Bunga Rampai

Kebijakan Pendidikan Islam dari Zaman Rosullullah Sampai Pada Negara Negara di Era Globalisasi

Editor :
Prof. Dr., Ahmad Zainuri, M.Pd.I.
Bambang Irawan, S.Pd.I.,M.Pd.

BUNGA RAMPAI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DARI ZAMAN ROSULLULLAH SAMPAI PADA NEGARA NEGARA DI ERA GLOBALISASI

TIM PENULIS :

Sherly Margareta
Agus
Robiatul Wulandari
Vannesa R Iswandari
Della Yulanda
Fenda Resi Mahalita
Alecia Septiana
Tria Wahyuni Ramadhina
Nabila Kontesa
Dheista Galin Anggraini
Tri Wulan Dari
Habibatul Inayah
A. Mutaali
Devi Rahma Yanti
Fheny Dwinita Nur Irawandi
Miranti
Fiona Hayatun Nupus
Nyimas Andini Nurrahmawati
Cahyadi
Mita Rolani
Novita Eka Sari
Siti Nur Kholifah
Dela Sintia
Hellen Prasilia
Rina Juliana
Ovi Imelda
Rafa Nabila Puteri
Rinto Pardika
Sepralin Tesva
Nina Meilinda

Editor :
Prof. Dr., Ahmad Zainuri, M.Pd.I.
Bambang Irawan, S.Pd.I.,M.Pd.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul *"Bunga Rampai Kebijakan Pendidikan Islam dari Zaman Rasulullah sampai pada Negara di Era Globalisasi"* ini dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dan dedikasi mahasiswa *Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2022 kelas B* dalam pengembangan studi Islam yang relevan adaptif terhadap tantangan zaman.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, moral, dan intelektual generasi muda. Oleh karena itu, pendekatan dalam studi Islam harus terus dilakukan dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Buku ini merupakan himpunan hasil tulisan dan diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan semangat untuk memberikan solusi dan gagasan yang konstruktif bagi kemajuan pendidikan Islam. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pendidik, peneliti, dan semua pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan Islam.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, terutama kepada para mahasiswa yang telah dengan antusias memberikan ide dan gagasan terbaik mereka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan ridha-Nya kepada kita semua salam setiap langkah yang kita tempuh.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 14 Desember 2024

Penulis

KATA PENGANTAR EDITOR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul *"Bunga Rampai Kebijakan Pendidikan Islam dari Zaman Rasulullah sampai pada Negara di Era Globalisasi"* ini dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dan dedikasi mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2022 kelas B dalam pengembangan studi Islam yang relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, moral, dan intelektual generasi muda. Oleh karena itu, pendekatan dalam studi Islam harus terus dilakukan dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Buku ini merupakan himpunan hasil tulisan dan diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan semangat untuk memberikan solusi dan gagasan yang konstruktif bagi kemajuan pendidikan Islam. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pendidik, peneliti, dan semua pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan Islam.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, terutama kepada para mahasiswa yang telah dengan antusias memberikan ide dan gagasan terbaik mereka. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada *Prof. Dr. Ahmad Zaniuri, M.Pd.I.* dan *Bambang Iraqab, S.Pd.I., M.Pd.* atas bimbingan, arahan, dan dedikasi beliau sebagai editor yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya hingga buku ini dapat terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan ridha-Nya kepada kita semua salam setiap langkah yang kita tempuh.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, 14 Desember 2024

Prof. Dr. Ahmad Zaniuri, M.Pd.I.
Bambang Iraqab, S.Pd.I., M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA RASULLULLAH SAW **1**
PENDAHULUAN **1**
TEORI **2**
PEMBAHASAN **3**
A. Sejarah Kebijakan Pendidikan Islam yang di Terapkan Oleh Rosullullah SAW 3
B. Metode atau Cara Rasullullah SAW dalam Menyampaikan Pendidikan Kepada Umatnya 7
C. Kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasullullah SAW 8
D. Pendidikan Islam pada Zaman Rasullullah di Makkah dan Madinah 10
KESIMPULAN **13**
DAFTAR PUSTAKA **15**

BAB 2
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHALIFAH ABU BAKAR AS-SIDDIQ RA **17**
PENDAHULUAN **17**
TEORI **20**
PEMBAHASAN **22**
A. Kebijakan Pendidikan pada Masa Abu Bakar As-Sidiq RA .. 22
B. Dampak Kebijakan Pendidikan terhadap Perkembangan Pendidikan Islam 24
C. Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan 25
KESIMPULAN **26**
DAFTAR PUSTAKA **27**

BAB 3
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHOLIFAH UMAR BIN KHATAB RA 29
PENDAHULUAN 29
TEORI 31
PEMBAHASAN 32
A. Kondisi Pendidikan Islam pada masa Kholifah Abu Bakar Assidiq 32
B. Kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Bidang Pendidikan Islam 35
C. Dampak Kebijakan Pendidikan pada masa Kholifah Abu Bakar Assidiq Kelestarian Ajaran Islam 37
D. Relevansi Kebijakan Pendidikan Abu Bakar Ash-Sihddiq Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam Masa Kini 39
DAFTAR PUSTAKA 45

BAB 4
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA USMAN BIN AFFAN RA 47
PENDAHULUAN 47
TEORI 48
PEMBAHASAN 49
A. Pengertian Pendidikan Islam 49
B. Mengenal Usman Bin Affan RA 51
C. Proses Pemilihan Usman Bin Affan 52
D. Pendidikan Agama Islam Pada Masa Usman Bin Affan 49
E. Kebijakan Pendidikan Pada Masa Usman Bin Affan RA 56
F. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Usman Bin Affan RA di Berbagai Wilayah Kekuasaan Islam 49
KESIMPULAN 61
DAFTAR PUSTAKA 62

BAB 5
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHOLIFAH ALI BIN ABI THALIB RA 65
PENDAHULUAN 65
TEORI 68

PEMBAHASAN **70**
A. Kondisi Pendidikan Islam Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib RA 70
B. Kebijakan Pendidikan yang Diterapkan Oleh Khalifah Ali RA 72
C. Kurikulum Pendidikan Islam di Thailand Selatan 74
D. Relevansi Kebijakan Pendidikan Khalifah Ali RA Bagi Pendidikan Islam Masa Kini 76
E. Kurikulum Pendidikan Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib 77
KESIMPULAN **79**
DAFTAR PUSTAKA **81**

BAB 6
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH **83**
PENDAHULUAN **83**
TEORI **85**
PEMBAHASAN **87**
A. Konteks Sejarah dan Sosial Politik Bani Umayyah 87
B. Struktur dan Sistem Pendidikan pada Masa Bani Umayyah 89
C. Kebijakan Pendidikan Yang Diterapkan Oleh Bani Umayyah 92
D. Dampak Kebijakan Pendidikan Pada Masa Masyarakat dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan 94
E. Kritik dan Tantangan Terhadap Kebijakan Pendidikan Bani Umayyah 95
KESIMPULAN **97**
DAFTAR PUSTAKA **98**

BAB 7
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA BANI ABBASIYAH **101**
PENDAHULUAN **101**
TEORI **103**
PEMBAHASAN **103**

A. Kebijakan Pendidikan Islam yang Diterapkan Pada Masa Bani Abbasiyah 103
B. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Massa bani Abbasiyah..... 110
C. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Bani Abbasiyah..... 111
D. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peradaban Islam..... 114
KESIMPULAN..... 115
DAFTAR PUSTAKA 116

BAB 8
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA BANI UTSMANIYAH 118
PENDAHULUAN..... 118
TEORI..... 121
PEMBAHASAN 121
A. Sejarah Awal Berdirinya Kesultanan Utsmaniyah 121
B. Sejarah Pendidikan Islam Pada Masa Kesultanan Utsmaniyah 126
C. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kesultanan Utsmaniyah 128
KESIMPULAN..... 137
DAFTAR PUSTAKA 138

BAB 9
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA BENUA EROPA .. 141
PENDAHULUAN..... 141
TEORI..... 142
PEMBAHASAN 142
A. Kebijakan Pendidikan Islam Diterapkan di Negara-Negara Eropa 142
B. Tantangan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Islam di Eropa 145
C. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Komunitas Muslim di Eropa..... 148
D. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam di Berbagai Negara Eropa 151

E. Perbedaan Kebijakan Islam di Berbagai Negara di Eropa 153
KESIMPULAN..... 156
DAFTAR PUSTAKA 157

BAB 10
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA BENUA AFRIKA 159
PENDAHULUAN..... 159
TEORI..... 161
PEMBAHASAN 163
A. Sejarah Pendidikan Islam di Benua Afrika 163
B. Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial..... 165
C. Kebijakan Pendidikan Islam di Berbagai Negara Afrika 167
D. Tokoh Peran Ulama dalam Pendidikan Islam di Afrika..... 168
E. Analisis dan Perbandingan Kebijakan Pendidikan Islam di Afrika 170
F. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam..... 172
KESIMPULAN..... 174
DAFTAR PUSTAKA 176

BAB 11
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AMERIKA SERIKAT..... 179
PENDAHULUAN..... 179
TEORI..... 181
PEMBAHASAN 182
A. Sejarah Pendidikan Islam di Amerika Serikat..... 182
B. Tantangan yang dihadapi oleh Institusi Pendidikan Islam dalam Memajukan Kegiatan Belajar Mengajar di Amerika Serikat 183
C. Respons Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Keberadaan Sekolah Islam di Amerika Serikat..... 184
D. Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat Menjamin Kebebasan Beragama Bagi Komunitas Muslim 186
E. Peran Organisasi Muslim dalam Pengembangan dan Mempertahankan Pendidikan Islam di Amerika Serikat..... 189
KESIMPULAN..... 191

DAFTAR PUSTAKA 192

BAB 12
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AMERIKA SERIKAT 195
PENDAHULUAN 195
TEORI 196
PEMBAHASAN 197
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat 197
B. Tujuan Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat 199
C. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat 200
D. Hambatan Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat 202
KESIMPULAN 204
DAFTAR PUSTAKA 205

BAB 13
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA KAMBOJA 207
PENDAHULUAN 207
TEORI 209
PEMBAHASAN 210
A. Sejarah Singkat Pendidikan Islam Pada Negara Kamboja 210
B. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Negara Kamboja 211
C. Tantangan Kebijakan Pendidikan Islam di Kamboja 214
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Islam di Kamboja 215
E. Pendidikan dan Pengajaran Islam di Kamboja 216
KESIMPULAN 220
DAFTAR PUSTAKA 221

BAB 14
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA BENUA AUSTRALIA 222
PENDAHULUAN 222

TEORI **224**
PEMBAHASAN **225**
A. Awal Mula Masuknya Islam Ke Australia 225
B. Kebijakan Pendidikan Islam d Benua Australia 226
C. Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Benua Australia 228
D. Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekolah-Sekolah Islam di Australia dalam Mempertahankan Identitas Islam 230
E. Perbedaan Kebijakan Pendidikan Islam di Bebagai Negara Bagian Australia 232
F. Peran Organisasi Islam dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Australia 233
G. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Komunitas Muslim di Benua Australia 234
KESIMPULAN **235**
DAFTAR PUSTAKA **236**

BAB 15
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA *NEW ZEALEND* (SELANDIA BARU) **239**
PENDAHULUAN **239**
TEORI **240**
PEMBAHASAN **241**
A. Kebijakan Pemerintahan Selandia Baru dalam Mengakomodasi Pendidikan Islam di Institusi Pendidikan 241
B. Tantangan yang dihadapi oleh Sekolah-Sekolah Islam di Selandia Baru dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 243
C. Peran Komunitas Muslim dalam Mendukung dan Mengembangkan Pendidikan Islam di Selandia Baru 244
D. Kebijakan Pendidikan Nasional Selandia Baru Memberikan Ruang Bagi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Nilai-Nilai Islam 248
KESIMPULAN **251**
DAFTAR PUSTAKA **253**

BAB 16
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA-NEGARA DI KUTUB UTARA 254
PENDAHULUAN 254
TEORI 257
PEMBAHASAN 257
A. Kondisi Pendidikan Islam di Negara-Negara di Kutub Utara 257
B. Kebijakan Pendidikan Islam di Negara-Negara di Kutub Utara 259
C. Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Islam di Wilayah Kutub Utara 263
D. Relevansi Q.S. An-Nur Ayat 55 dalam Memperjuangkan Pendidikan Islam di Negara-Negara Kutub Utara 265
KESIMPULAN 267
DAFTAR PUSTAKA 269

BAB 17
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA ASIA TIMUR TENGAH 270
PENDAHULUAN 270
TEORI 273
PEMBAHASAN 274
A. Karakteristik Kebijakan pendidikan Islam di Negara-negara Asia Timur Tengah Seperti Arab Saudi dan Mesir 274
B. Faktor yang Mempengaruhi arah Kebijakan Pendidikan Islam di Kawasan Arab Saudi dan Mesir 277
C. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Islam dalam Kurikulum Pendidikan Nasional di Arab dan Mesir 279
D. Tantangan Utama yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Arab Saudi dan Mesir pada Era Globalisasi 281
KESIMPULAN 282
DAFTAR PUSTAKA 284

BAB 18
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA BENUA ASIA SELATAN 287

PENDAHULUAN **287**
TEORI **288**
PEMBAHASAN **289**
A. Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Negara-Negara Asia Selatan dari Masa Kolonial Hingga Pasca Kolonial 289
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam di Asia Selatan 291
C. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Masyarakat Muslim di Benua Asia Selatan, Terutama dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Ekonomi 293
D. Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan pendidikan Islam di Negara-Negara Asia Selatan 294
E. Peluang untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam di Wilayah Asia Selatan 297
KESIMPULAN **301**
DAFTAR PUSTAKA **302**

BAB 19
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA BENUA ASIA TIMUR **305**
PENDAHULUAN **305**
PEMBAHASAN **307**
A. Perkembangan Pendidikan Islam di Negara-Negara Kawasan Asia Timur 307
B. Kebijakan Masing-Masing Negara di Asia Timur dalam Mengatur Pendidikan Islam 308
C. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Kebijakan Pendidikan Islam di Kawasan Asia Timur 312
D. Tantangan dan peluang yang dihadapi Umat Muslim dalam Mengembangkan pendidikan Islam di Asia Timur 313
KESIMPULAN **316**
DAFTAR PUSTAKA **317**

BAB 20
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI NEGARA RUSIA **318**
PENDAHULUAN **318**
TEORI **320**

PEMBAHASAN **323**
A. Sejarah Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Rusia 323
B. Kebijakan Pendidikan Islam Saat Ini 324
C. Pengaruh Kebijakan Terhadap Lembaga dan Kurikulum Pendidikan Islam 325
D. Tantangan Pendidikan Islam di Rusia 326
E. Peluang dan Strategi Pengembangan Pendidikan Islam 327
KESIMPULAN **328**
DAFTAR PUSTAKA **329**

BAB 21
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA INDONESIA **330**
PENDAHULUAN **330**
TEORI **333**
PEMBAHASAN **335**
A. Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa 334
B. Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia 337
C. Peran Pemerintah, Khususnya Kementerian Agama, dalam Pengelolaan Pendidikan Islam 339
D. Kebijakan Pendidikan Islam Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat Muslim di Indonesia 341
E. Rekomendasi Kebijakan yang dapat Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Islam di Indonesia 343
KESIMPULAN **345**
DAFTAR PUSTAKA **346**

BAB 22
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA MALAYSIA **346**
PENDAHULUAN **346**
TEORI **348**
PEMBAHASAN **349**
A. Sejarah Pendidikan Islam di Malaysia 349
B. Kebijakan Pendidikan Islam di Negara Malaysia 352

KESIMPULAN **362**
DAFTAR PUSTAKA **363**

BAB 23
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA SINGAPURA **365**
PENDAHULUAN **365**
TEORI **367**
PEMBAHASAN **367**
A. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Singapura 367
B. Kebijakan Pemerintah Singapura dalam Mengatur dan Mengembangkan Pendidikan Islam 368
C. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Lembaga-Lembaga Pendidikan di Singapura 371
D. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan Islam di Singapura 373
E. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Perkembangan Komunitas Muslim di Singapura 375
F. Peran Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dalam merumuskan dan Mengawasi Kebijakan Pendidikan Islam 377
KESIMPULAN **378**
DAFTAR PUSTAKA **379**

BAB 24
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA THAILAND **383**
PENDAHULUAN **383**
TEORI **385**
PEMBAHASAN **387**
A. Kebijakan Pendidikan Islam di Thailand 387
B. Perkembangan Pendidikan Islam di Patani 389
C. Konflik Islam di Thailand Selatan 390
D. Kurikulum Pendidikan Islam di Thailand Selatan 392
KESIMPULAN **395**
DAFTAR PUSTAKA **396**

BAB 25
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA FILIPINA 399
PENDAHULUAN 399
TEORI 400
PEMBAHASAN 401
A. Sejarah Pendidikan Islam di Filipina 401
B. Kebijakan Pendidikan Islam di Filipina 403
C. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan 405
D. Upaya dan Solusi Pengembangan Pendidikan Islam 407
KESIMPULAN 410
DAFTAR PUSTAKA 412

BAB 26
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 412
PENDAHULUAN 412
TEORI 415
PEMBAHASAN 416
A. Bagaimana Latar Belakang Kebijakan Pendidikan Islam di Brunei Darussalam 416
B. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Pendidikan Islam di Brunei Darussalam 417
C. Apa Saja Kebijakan Pemerintah Brunei Darussalam dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Berbagai Jenjang 418
D. Bagaimana Kebijakan Pendididkan Islam terhadap masyarakat dan generasi muda di Brunei Darussalam 421
KESIMPULAN 424
DAFTAR PUSTAKA 425

BAB 27
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA VIETNAM 426
PENDAHULUAN 426
TEORI 428
PEMBAHASAN 432
A. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Vietnam 432

B. Kebijakan Pemerintah Vietnam terhadap Pendidikan Islam 434
C. Relevansi Q.s. Al-Hujurat Ayat 13 dalam Memperjuangkan dan Mengembangkan Pendidikan Islam Masyarakat Vietnam 438
D. Peran Organisasi Islam dalam Mendukung Pendidikan Islam di Vietnam 441
E. Tantangan dan peluang dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Vietnam 443
KESIMPULAN 446
DAFTAR PUSTAKA 447

BAB 28
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI NEGARA LAOS 448
PENDAHULUAN 448
TEORI 450
PEMBAHASAN 451
A. Sejarah Pendidikan Islam di Laos 451
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam di Laos 453
C. Tantangan Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Laos 455
D. Solusi Terhadap Tantangan Kebijakan Pendidikan Islam di Laos 458
KESIMPULAN 460
DAFTAR PUSTAKA 461

BAB 29
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA MYANMAR 462
PENDAHULUAN 462
TEORI 465
PEMBAHASAN 466
A. Perkembangan Historis Kebijakan Pendidikan Islam di Myanmar 466
B. Bentuk Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Myanmar 468

C. Dampak Kebijakan Pendidikan Terhadap Komunitas Muslim 470
D. Faktor-faktro yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam 472
E. Strategi dan Upaya Komunitas Muslim Menghadapi Berbagai Pembatasan dan tantangan 473
KESIMPULAN 476
DAFTAR PUSTAKA 477

BAB 30
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA TIMOR LESTE 479
PENDAHULUAN 479
TEORI 481
PEMBAHASAN 481
A. Sejarah Negara Timor Leste 481
B. Sejarah Masuknya Islam ke Timor Leste 486
C. Sistem Pendidikan di Timor Leste 488
D. Perkembangan Pendidikan Islam di timor leste 490
KESIMPULAN 494
DAFTAR PUSTAKA 495

BAB 1
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA RASULLULLAH SAW

Sherly Margareta (2220203038)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW berakar dari kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dalam ajaran Islam dan kebutuhan mendesak untuk membimbing umat yang masih hidup dalam keadaan jahiliah. Ketika Rasullullah menerima wahyu pertama di Gua Hira dengan perintah "*Iqra*" (bacalah), ini menegaskan bahwa pendidikan dan ilmu merupakan fondasi utama dalam pembentukan peradaban Islam. Pada saat itu, masyarakat Arab belum memiliki tradisi pendidikan yang kuat, sehingga Rasulullah memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan pengetahuan. Ia melakukannya melalui berbagai cara, seperti pengajaran di rumah Arqam bin Abi Arqam, di Masjid Nabawi, dan dengan mengutus para sahabat yang berilmu untuk menyebarkan ajaran Islam.[1] Pendidikan pun berfungsi sebagai sarana dakwah dan pembinaan karakter umat, dengan tujuan menciptakan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, kebijakan pendidikan pada era Rasulullah tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial secara utuh.

Pendidikan Islam pada masa Rasullullah Saw dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu Makkah dan Madinah. Intisari dari pendidikan Islam pada kedua periode tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah. Rasulullah SAW berperan sebagai guru dan pelopor dalam pendidikan Islam. Dari sinilah, titik awal perkembangan pendidikan Islam dimulai.

Pendidikan Islam, sebagai salah satu sub-sistem dalam konteks pendidikan secara keseluruhan, mulai mendapatkan pengakuan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Sistem pendidikan ini didasarkan pada nilai-nilai Islam, yang

[1] Afdhal Ilahi, 'Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah Dan Sahabat', *Jrnal Materi Pendidikan*, 1 (2018), 2.

membedakannya secara mendasar dari sistem pendidikan lainnya, baik yang berasal dari Timur maupun Barat. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada sikap dan pandangan terhadap kehidupan. Dalam Islam, kehidupan dipandang bukan sebagai akhir dari segala sesuatu, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi setelah kehidupan ini. Sementara di pihak Barat, tujuan akhir hidup sering kali dipahami sebagai pencapaian kenikmatan materi yang melimpah.

1. **Rumusan Masalah**
   a. Bagaimanakah Sejarah Kebijakan Pendidikan Islam yang di Terapkan Oleh Rasullullah Saw?
   b. Apasajakah Metode atau Cara Rasullullah Saw Dalam Menyampaikan Pendidikan Kepada Umatnya?
   c. Apakah Kurikulum Pendidikan Islam pada masa Rasullullah Saw?
   d. Bagaimanakah Pendidikan Islam Pada Zaman Rasullullah di Makkah dan Madinah?
2. **Metode Penelitian**

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa dengan terstruktur dengn mengmpulkan data sebanyak mungkkin. Metode yang peneliti gunakan adalah studi keperpustakaan di jurnal-jurnal yang relavan dan mempelajari serta memahami teori-teori yang ada pada beberapa literatur yang serupa dengan penelitian ini. Penelitian memanfaatkan sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan judul "*Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah SAW"* sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

TEORI

Penelitian ini serupa terkait kebijakan pendidikan islam pada masa rasullullah saw bahwasanya Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan pendidikan Islam didasari oleh prinsip-prinsip tauhid, kesetaraan, dan pembelajaran yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendidikan ini berkembang dalam dua periode yang signifikan periode Makkah dan Madinah. Di periode Makkah, fokus utama pendidikan adalah penguatan akidah dan pemahaman tentang tauhid, serta penanaman nilai-nilai dasar Islam yang disampaikan melalui wahyu

yang diterima. Rasulullah SAW mengajarkan Islam secara langsung kepada para sahabat dan masyarakat, baik melalui pendekatan personal maupun kelompok kecil, salah satunya di rumah Arqam bin Abi Arqam.[2]

Setelah hijrah ke Madinah, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang lebih luas dan terstruktur. Masjid Nabawi menjadi pusat pembelajaran dan diskusi tentang ilmu agama, serta menjelajahi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Rasulullah SAW juga memperluas kebijakan pendidikan dengan mengutus sahabat-sahabat tertentu untuk menjadi guru atau mubaligh di berbagai wilayah, guna menyebarkan ilmu agama dan mendidik masyarakat. Di samping itu, sistem kuttab, sebagai lembaga pendidikan awal untuk anak-anak belajar membaca, menulis, dan memahami Al-Qur'an, mulai berkembang. Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan yang *aplikatif* dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.[3]

PEMBAHASAN

A. Sejarah Kebijakan Pendidikan Islam yang di Terapkan Oleh Rosullullah Saw

Sepanjang sejarah umat manusia, khususnya umat Islam, ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktik. Al-Quran dan Hadis menggarisbawahi pentingnya pencarian ilmu sebagai kunci meraih kesuksesan di dunia dan akhirat, serta memberikan penghargaan besar kepada mereka yang memanfaatkan ilmunya demi kebaikan umat manusia. Pesan yang terkandung dalam wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yakni Surat Al-Alaq ayat 1-5, sangat jelas. Ayat tersebut memerintahkan umat untuk mengejar pengetahuan sebanyak mungkin melalui membaca. Sejak zaman Rasulullah SAW, umat

[2] B Chaeruddin, 'Pendidikan Islam Masa Rasullullah Saw', *Jurnal Diskursus Islam*, 1 (2019), 3.

[3] Indah khozinatun Nur, 'Model Sejarah Dan Pola Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah Saw Dan Implementasinya', *Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Hadi*, 2 (2022), 5.

Islam telah mengamalkan perintah *"iqra"* ini dalam pendidikan Islam, dan semangat tersebut terus dilanjutkan hingga saat ini.[4]

Pendidikan Islam memiliki sejarah yang kaya dan panjang, seiring dengan munculnya agama Islam. Bagi masyarakat Arab, kedatangan Islam membawa perubahan yang mendalam dalam berbagai aspek budaya dan peradaban mereka, termasuk dalam dunia pendidikan. Sebelum kedatangan Islam, peradaban Arab tidak begitu menekankan pentingnya pendidikan, yang tercermin dari rendahnya tingkat melek huruf di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu.

Mempelajari sejarah pendidikan Islam adalah hal yang sangat penting. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi pada kemajuan serta kemunduran umat Islam. Hal ini terutama terasa saat kita menelusuri perjalanan pendidikan Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita seharusnya menggali dan mempelajari sejarah ini untuk memperluas wawasan generasi saat ini dan yang akan datang, serta mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua fase utama, yaitu periode Makkah dan Madinah. Pada masa tersebut, pendidikan berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik dan pelopor yang menginspirasi perkembangan pendidikan Islam. Dari sinilah, proses perkembangan pendidikan Islam mulai berjalan.

Pendidikan Islam memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Muslim, dengan fondasi yang telah dibangun sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyebarkan ajaran agama, tetapi juga sebagai dasar untuk membentuk masyarakat yang beradab, bermoral, dan berkepribadian mulia. Rasulullah SAW memulai pendidikan Islam melalui pendekatan yang *inklusif* dan *humanis*, yang berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi semesta.[5]

Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW memiliki ciri khas yang sangat menarik. Sistem pendidikan yang diterapkan dalam

[4] Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020).

[5] Doni Ahmad Saefuddin, 'Akar Pendidikan Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW, Dan Khulafaur Rosyidin', *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2 (2022), hlm 124.

periode tersebut sederhana, namun sangat efektif, dengan fokus utama pada penanaman akidah, akhlak mulia, serta nilai-nilai sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Proses pembelajaran berlangsung di berbagai tempat, seperti rumah, masjid, bahkan di medan perang, yang menunjukkan *fleksibilitas* dan *inklusivitas* sistem ini. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, mendorong umat untuk membaca, belajar, dan memahami alam semesta sebagai manifestasi dari kebesaran Allah SWT.[6]

Keberhasilan ajaran Islam di masa Rasulullah SAW tercermin dalam pembentukan generasi sahabat yang memiliki komitmen kuat terhadap agama, kepemimpinan, dan semangat dakwah. Generasi ini, yang dikenal sebagai generasi *Qurani*, berhasil menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Melalui pendekatan yang bersifat pribadi maupun kolektif, Rasulullah SAW membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan etika, menjadikannya sebagai model ideal bagi sistem pendidikan Islam sepanjang masa.[7]

Pendidikan pada masa Rasulullah SAW berlandaskan langsung pada petunjuk dan bimbingan Allah SWT. Rasulullah menerima wahyu dari-Nya, yang berfungsi sebagai pedoman hidup dalam membentuk masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia. Wahyu-wahyu tersebut disampaikan kepada umatnya melalui berbagai cara, seperti pengajaran lisan, nasihat, serta keteladanan yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak hanya menyampaikan pesan-pesan Ilahi, tetapi juga memastikan bahwa ajaran tersebut dipahami, diterapkan, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.

Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk pola pikir, memperbaiki akhlak, dan menanamkan nilai-nilai keimanan yang kokoh. Pada masa Rasulullah, pendidikan dibagi menjadi dua tahap utama. Tahap pertama terjadi di Makkah, yang berfokus pada pembangunan keimanan kepada Allah, pengajaran tauhid, dan perbaikan keyakinan umat dari penyembahan berhala menuju

[6] Oktia Anisa Putri, 'Aktualisasi Pendidikan Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW Dengan Pendidikan Islam Pada Masa Modern', *International Journal Of Educational Resources*, 4 (2023),hlm. 2.

[7] Mumtazul Fikri, 'Konsep Pendidikan Islam: Pendekatan Metode Pengajaran', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 1 (2020), hlm. 116.

penyembahan kepada Allah semata. Dalam suasana yang penuh tekanan dan intimidasi dari kaum Quraisy, pendidikan di Makkah seringkali dilakukan secara rahasia dan terpusat di tempat-tempat seperti Darul Arqam.

Tahap kedua berlangsung di Madinah, saat umat Islam telah membentuk komunitas yang lebih stabil dan aman. Di sinilah pendidikan menjadi lebih terstruktur dan meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, hukum, sosial, serta hubungan antarindividu dalam masyarakat. Rasulullah juga mendirikan institusi pendidikan formal, seperti Masjid Nabawi, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Kedua tahap ini mencerminkan bahwa ajaran Islam pada masa Nabi Muhammad SAW berkembang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan umat.

Pada masa Rasullullah SAW kebijakan pendidikan islam memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu dan moral umat islam. Berikut adalah beberapa kebijakan pendidikan islam pada masa rasullullah saw yang sudah diterapkan:

a. Pendidikan Berbasis Wahyu

   Rasulullah SAW menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam pendidikan, serta menekankan pentingnya untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.[8]

b. Pendidikan Moral dan Akhlak

   Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter, seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang, yang merupakan aspek krusial dalam membentuk pribadi Muslim yang baik.

c. Pendidikan di Masjid dan Rumah

   Masjid berperan sebagai pusat pendidikan yang mengajarkan Al-Qur'an dan hadis, sementara rumah juga berfungsi sebagai tempat pembelajaran bagi keluarga serta anak-anak.

[8] Mu'ammar Fahri Fatiyah Az-Zahra, 'Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah Saw', *Prooceding International Seminar on Islamic Studies Thailand*, 5 (2024), 2.

d. Pendidikan Gratis dan Terbuka

Rasulullah SAW tidak membatasi pendidikan hanya untuk kelompok tertentu, melainkan memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk anak-anak, perempuan, dan masyarakat umum, untuk menuntut ilmu.[9]

e. Metode Pendidikan Interaktif

Rasulullah SAW menerapkan metode pendidikan yang melibatkan dialog, diskusi, dan praktik langsung. Dengan cara ini, para sahabat dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan lebih mendalam.

B. Metode atau Cara Rasullullah Saw Dalam Menyampaikan Pendidikan Kepada Umatnya

Metode pendidikan Islam adalah pendekatan yang digunakan untuk mengajarkan ajaran Islam, mencakup aspek akidah, akhlak, ibadah, dan pengetahuan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga mengutamakan praktik yang melibatkan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW, sebagai teladan utama dalam pendidikan Islam, telah mempraktikkan berbagai metode yang efektif dan relevan untuk membimbing umatnya.[10]

Berikut adalah beberapa Metode atau cara Rasullullah Saw dalam Menyampaikan Pnedidikan Kepada Umatnya:

a. Metode ceramah: Dalam hal ini, Rasulullah menyampaikan wahyu yang baru diterimanya, disertai penjelasan dan klarifikasi untuk memahami maknanya dengan lebih baik. Dalam menyampaikan pelajaran, beliau lebih sering menggunakan metode ceramah ketimbang metode lainnya, karena dirasa lebih mudah dan efisien.[11]
b. Metode dialog: Juga menjadi salah satu cara yang digunakan, seperti pada kesempatan Rasulullah berdialog dengan Mu'az bin Jabal sebelum mengutusnya sebagai qadi ke Yaman. Di samping

[9] Hamim Hafiddin, 'Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah', Jurnal Tarbiyah, 1 (2020), 20–21.

[10] Tobi, dkk, *Spektrum Sejarah Masa Klasik Dari Masa Rasullullah Hingga Masa Khulafaur Rasyidin* (Yogyakarta: kbm Indonesia, 2025). hlm.16-17

[11] Asrori Mukhtarom, *Studi Komprehensip Pendidikan Islam* (Serang: Bintang Sembilan Visitama, 2021).

itu, dialog antara Nabi dan sahabat mengenai strategi perang juga merupakan contoh bagaimana pengajaran dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah.

c. Metode diskusi atau tanya jawab: Dimana para sahabat sering mengajukan berbagai pertanyaan mengenai masalah hukum, dan Rasulullah menjawab dengan penjelasan yang memadai.
d. Metode perumpamaan: Juga sering dipakai, contohnya ketika Rasulullah menggambarkan orang mukmin sebagai satu tubuh yang jika salah satu bagiannya mengalami sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya.
e. Metode kisah: Tidak kalah pentingnya, ditunjukkan melalui kisah perjalanan Isra Mi'raj dan pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidr, yang mengandung pelajaran berharga.
f. Metode pembiasaan: Seperti membiasakan umat Islam untuk melaksanakan shalat berjamaah.
g. Metode hafalan: Dimana beliau mendorong para sahabat untuk menghafal dan memelihara al-Qur'an, menjadi salah satu pilar penting dalam pendidikan yang beliau ajarkan.
h. Metode Teladan (Al-Qudwah): Teladan yang baik (qudwah hasanah/uswah hasanah) adalah metode yang sangat penting dalam menyampaikan ajaran islam.Keberhasilan Nabi Muhammad Saw dalam membimbing umat tidak terlepas dari contoh perilaku beliau yang mencerminkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.[12]

C. Kurikulum Pendidikan Islam pada masa Rasullullah Saw

Kurikulum yang diterapkan oleh Rasulullah Muhammad saw dalam mendidik para sahabat dan umat Islam di zamannya tidak tercatat secara formal seperti kurikulum modern yang kita kenal saat ini. Meskipun demikian, prinsip-prinsip pendidikan yang beliau terapkan dapat dikenali melalui berbagai ajaran dan praktik yang beliau tunjukkan.

Kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW sangatlah komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Penerapannya berlangsung dalam dua periode penting, yaitu periode Mekkah dan Madinah. Pada periode Mekkah, fokusnya

[12] Muslem Maharia, *Menggagas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasinya* (Medan: UMSU Press, 2024).hlm. 146

adalah pada fase awal pembinaan dan penerapan pendidikan Islam, sementara periode Madinah merupakan fase lanjutan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan transformasi ilmu pengetahuan pada waktu itu. Selama masa Rasulullah SAW, Kurikulum yang hingga saat ini terdokumentasi adalah Al-Qur'an, yang diwahyukan oleh Allah secara bertahap. Wahyu tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan pengalaman umat manusia pada saat itu.[13]

Kurikulum Pendidikan Islam mencakup seluruh isi atau materi yang harus diajarkan dalam konteks sistem pendidikan Islam. Fokus utama dari kurikulum ini adalah pengajaran ajaran Islam yang meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah, serta ilmupengetahuan umum. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang tidak hanya kaya akan pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mampu menjalani kehidupan yang islami dalam berbagai aspek.

Pada masa Rasulullah SAW, baik di Makkah maupun Madinah, kurikulum pendidikan Islam berpusat pada al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah, disesuaikan dengan situasi dan peristiwa yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum tersebut bersifat logis dan rasional, namun tetap sejalan dengan fitrah serta kebutuhan praktis masyarakat. Pendekatan ini telah terbukti mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam sikap rohani dan mental para pengikutnya. Dengan demikian, rumusan dan materi pendidikan yang diterapkan lebih dari 14 abad yang lalu menunjukkan bahwa Rasulullah telah mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada masa itu.[14]

Mengidentifikasi kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah memang merupakan tantangan yang cukup besar, mengingat Rasulullah mengajar dalam konteks Kehidupan yang luas ini tidak terikat oleh dinding-dinding kelas. Beliau memanfaatkan berbagai kesempatan yang mengandung nilai-nilai pendidikan

[13] Mohamad Agung Rokhimawan, *Kurikulum Pendidikan Dalam Islam Dari Masa Ke Masa* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024).hlm.5-6

[14] Zaenal Efendi Hasibuan, *Profil Rasullullah Sebagai Pendidik Ideal: Telah Pola Pendidikan Islam Era Rasullullah Saw Fase Mekkah Dan Madinah*, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelurusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasullullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).hlm 26

dengan menyampaikan ajaran-Nya di berbagai tempat, seperti rumah, masjid, jalan, dan lokasi-lokasi lainnya.

Sistem pendidikan Islam pada waktu itu sangat berorientasi kepada Nabi, karena hanya beliau yang memiliki otoritas untuk menentukan materi-materi pendidikan Islam. Oleh karena itu, kita dapat membedakan pendidikan pada masa itu menjadi dua periode:

a. Makkah
   a) Materi yang diajarkan berfokus pada ayat-ayat Makiyyah, yang mencakup 93 surat, beserta petunjuk-petunjuknya yang di kenal sebagai sunnah dan hadits.
   b) Pengajaran ini bertujuan untuk mendalami kajian keagamaan, dengan penekanan pada aspek badah, keimanan, dan akhlak.
b. Madinah

   Nabi Muhammad SAW mula-mula mendirikan lembaga masjid dalam usaha mendidik masyarakat, yang menjadi alat utama untuk penyebaran pendidikan Islam.

D. Pendidikan Islam Pada Zaman Rasullullah di Makkah dan Madinah

Pendidikan Islam berlangsung dalam dua periode penting sejak zaman Rasulullah SAW: Makkah dan Madinah. Periode pertama memulai pendidikan Islam yang berpusat di Makkah, dan periode kedua melanjutkannya dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pendidikan.

Berikut adalah ringkasan mengenai pendidikan Islam pada kedua periode tersebut:[15]

a. Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah Saw di Makkah

   Pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya di Gua Hira di Makkah, yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyampaikan pesan penting: "Bacalah (hai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (semesta alam). Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah; Dia yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. "

[15] Hamim Hafiddin, 'Pendidikan Islam Pada Masa Rasulullah', *Jurnal Tarbiyah*, 1 (2020), 5.

Dalam wahyu kedua yang dia terima, tertulis, "Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah dan berilah peringatan!" Sanjunglah Tuhanmu! Bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkan semua perbuatan dosa. Janganlah memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih besar. Bersabarlah saat melakukan perintah Tuhan.

Setelah wahyu turun, Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk bangkit, melepaskan kain selimutnya, dan mengangkat lengan bajunya, untuk memberikan peringatan dan pengajaran kepada semua orang. Ini adalah tugas suci yang bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan ajaran Islam. Wahyu pertama ini diikuti oleh wahyu-wahyu berikutnya, yang pertama kali disampaikan dan diajarkan oleh Nabi secara rahasia kepada kerabat dan teman-temannya.

Dengan meningkatnya jumlah orang yang memeluk Islam, Nabi kemudian memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat di mana para sahabat dan pengikutnya berkumpul. Ini adalah tempat di mana pendidikan Islam pertama dalam sejarah dimulai, di mana Nabi membacakan wahyu-wahyu Allah, mengajarkan para sahabatnya dasar-dasar agama Islam, dan menerima tamu yang ingin memeluk Islam atau bertanya tentangnya. Bahkan Nabi melakukan sholat bersama para sahabatnya di tempat ini juga.

Kemudian, wahyu turun untuk memerintahkan Nabi agar menyebarkan agama Islam secara terbuka kepada seluruh penduduk Jazirah Arab. Nabi melaksanakan tugas mulia ini dengan sangat baik, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan yang dialami dirinya serta sahabat-sahabatnya. Namun, semangat Nabi untuk menyebarkan Islam dan mendidik sahabat-sahabatnya dengan ajaran Islam tetap tak surut.

Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Qur'an, yang merupakan dasar dan sumber utama ajaran Islam, selama masa pembinaan agama Islam di Makkah. Selain itu, beliau juga mengedukasi umatnya tentang tauhid, yakni keesaan Tuhan. Inti dari pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Makkah adalah penanaman nilai-nilai keagamaan dan akhlak. Beliau senantiasa mendorong manusia untuk menggunakan akal

budi mereka dan memperhatikan berbagai fenomena yang terjadi pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Hal ini merupakan ajakan untuk pendidikan berpikir yang rasional dan ilmiah.

b. Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah Saw di Madinah

Periode pendidikan Rasulullah di Madinah, yang berlangsung selama sepuluh tahun, merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah beliau terima selama masa di Makkah. Sementara pada periode Makkah penekanan pendidikan Rasulullah terfokus pada penguatan aqidah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, di Madinah pembinaan pendidikan bertujuan untuk menyempurnakan proses tersebut dengan memfokuskan pada aspek sosial dan politik secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, tujuan pendidikan Rasulullah di Madinah adalah untuk membentuk pribadi-pribadi kader Islam yang mampu membangun aspek kemanusiaan dalam upaya mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Dengan demikian, periode Madinah dapat dipahami sebagai tahap spesialisasi dalam pendidikan Rasulullah di berbagai bidang yang penting untuk membangun peradaban baru yang berlandaskan wahyu.

Wahyu-wahyu turun secara bertahap selama periode Madinah, dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan al-Qur'an mendorong pengikutnya untuk menghafal dan menuliskan ayat-ayat tersebut sesuai ajarannya. Nabi kerap mengadakan pengulangan dalam pembacaan al-Qur'an, baik dalam shalat, pidato, pelajaran, maupun kesempatan lainnya. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam pada masa itu, dalam rangka pendidikan sosial dan politik, senantiasa berada dalam bimbingan dan petunjuk wahyu.

Selama masa pendidikan di Madinah, Rasulullah melakukan berbagai hal penting, antara lain:

a. Masjid adalah tempat pertama Nabi Muhammad membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan Islam dan tempat di mana dia beribadah dan mengajar agama Islam. Di masjid inilah dia mengajarkan ajaran Islam dan memulai proses pembelajaran Islam di Madinah.

b. Nabi juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Ia menciptakan satu persekutuan dengan menggabungkan kaum kaya dan kaum miskin berdasarkan ikatan agama.
c. Selain itu, Nabi membuat piagam persaudaraan dengan kelompok penduduk Madinah yang bukan Muslim, seperti kaum Yahudi dan Nasrani, agar mereka dapat hidup bersama dan bekerja sama untuk mempertahankan kota Madinah. Piagam ini dikenal sebagai Piagam Madinah, dan menjadi fondasi untuk kerukunan hidup dan toleransi antara umat Islam dan non-Muslim.

Pendidikan pertama Nabi Muhammad saw. di Madinah berkonsentrasi pada menciptakan persatuan di antara Muslim dan menghapus permusuhan dan kedengkian antar suku. Dengan munculnya rasa solidaritas, persatuan di kalangan kaum Muslimin menjadi semakin solid. Materi pendidikan di Madinah jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan di Makkah, mencakup aspek-aspek seperti aqidah, ibadah, muamalah, serta pendidikan jasmani untuk kesehatan. Tujuan utama dari pendidikan di Madinah adalah untuk membentuk masyarakat Islam yang berlandaskan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, toleransi, saling membantu, musyawarah, dan keadilan.[16]

KESIMPULAN

Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah kebijakan pendidikan islam pada masa Rasullullah Saw itu adalah Sepanjang sejarah umat manusia, khususnya umat Islam, ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menekankan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktik. Al-Quran dan Hadis menggarisbawahi pentingnya pencarian ilmu sebagai kunci meraih kesuksesan di dunia dan akhirat, serta memberikan penghargaan besar kepada mereka yang memanfaatkan ilmunya demi kebaikan umat manusia. Pesan ini sangat jelas dalam wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditemukan dalam Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang memerintahkan umat untuk mengejar pengetahuan sebanyak mungkin melalui membaca. Sejak masa Rasulullah SAW,

[16] Chaeruddin B, 'Pendidikan Islam Masa Rasullullah Saw', *Jurnal Diskursus Islam*, 1 (2020), 426–27.

umat Islam telah menerapkan perintah "iqra" ini dalam pendidikan Islam, dan hal ini terus berlangsung hingga saat ini. dan

Metode atau cara Rasullullah Saw dalam Menyampaikan Pendidikan Kepada Umatnya dengan cara metode ceramah, dialog, diskusi atau tanya jawab, perumpamaan, kisah, pembiasaan, hafalan dan teladan.

Kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW sangatlah komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Penerapannya berlangsung dalam dua periode penting, yaitu periode Mekkah dan Madinah. Pada periode Mekkah, fokusnya adalah pada fase awal pembinaan dan penerapan pendidikan Islam, sementara periode Madinah merupakan fase lanjutan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan transformasi ilmu pengetahuan pada waktu itu. Selama masa Rasulullah SAW, kurikulum yang sampai saat ini terdokumentasi adalah Al-Qur'an, yang diwahyukan oleh Allah secara bertahap, sesuai dengan keadaan, dan pengalaman manusia pada saat itu.

Nabi Muhammad juga mengajarkan Al-Qur'an, yang merupakan dasar dan sumber utama ajaran Islam, selama masa pembinaan agama Islam di Makkah. Selain itu, beliau juga mengedukasi umatnya tentang tauhid, yakni keesaan Tuhan. Inti dari pendidikan dan pengajaran yang diberikan Nabi selama di Makkah adalah penanaman nilai-nilai keagamaan dan akhlak. Beliau senantiasa mendorong manusia untuk menggunakan akal budi mereka dan memperhatikan berbagai fenomena yang terjadi pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Hal ini merupakan ajakan untuk pendidikan berpikir yang rasional dan ilmiah.

Periode pendidikan Rasulullah di Madinah, yang berlangsung selama sepuluh tahun, merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah beliau terima selama masa di Makkah. Sementara pada periode Makkah penekanan pendidikan Rasulullah terfokus pada penguatan aqidah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, di Madinah pembinaan pendidikan bertujuan untuk menyempurnakan proses tersebut dengan memfokuskan pada aspek sosial dan politik secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhal Ilahi, 'Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah Dan Sahabat', *Jrnal Materi Pendidikan*, 1 (2018), 2

Asrori Mukhtarom, *Studi Komprehensip Pendidikan Islam* (Serang: Bintang Sembilan Visitama, 2021)

Chaeruddin B, 'Pendidikan Islam Masa Rasullullah Saw', *Jurnal Diskursus Islam*, 1 (2019), 3

Chaeruddin B, 'Pendidikan Islam Masa Rasullullah Saw', *Jurnal Diskursus Islam*, 1 (2020), 426–27

Doni Ahmad Saefuddin, 'Akar Pendidikan Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW, Dan Khulafaur Rosyidin', *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2 (2022), 124

Fatiyah Az-Zahra, Mu'ammar Fahri, 'Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah Saw', *Prooceding International Seminar on Islamic Studies Thailand*, 5 (2024), 2

Hamim Hafiddin, 'Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah', *Jurnal Tarbiyah*, 1 (2020), 20–21

Hamim Hafiddin, 'Pendidikan Islam Pada Masa Rasulullah', *Jurnal Tarbiyah*, 1 (2020), 5

Indah khozinatun Nur, 'Model Sejarah Dan Pola Pendidikan Islam Pada Masa Rasullullah Saw Dan Implementasinya', *Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Hadi*, 2 (2022), 5

Maharia, Muslem, *Menggagas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasinya* (Medan: UMSU Press, 2024)

Mohamad Agung Rokhimawan, *Kurikulum Pendidikan Dalam Islam Dari Masa Ke Masa* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024)

Mumtazul Fikri, 'Konsep Pendidikan Islam: Pendekatan Metode Pengajaran', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 1 (2020), 116

Oktia Anisa Putri, 'Aktualisasi Pendidikan Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW Dengan Pendidikan Islam Pada Masa Modern', *International Journal Of Educational Resources*, 4 (2023), 2

Tobi, dkk, *Spektrum Sejarah Masa Klasik Dari Masa Rasullullah Hingga Masa Khulafaur Rasyidin* (Yogyakarta: kbm Indonesia, 2025)

Zaenal Efendi Hasibuan, *Profil Rasullullah Sebagai Pendidik Ideal: Telah Pola Pendidikan Islam Era Rasullullah Saw Fase Mekkah Dan Madinah, Sejarah Pendidikan Islam: Menelurusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasullullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019)

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020)

BAB 2
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHALIFAH ABU BAKAR AS-SIDDIQ RA.

Agus (2220203057)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Sidiq RA merupakan salah satu topik yang menarik untuk dianalisis, karena periode kepemimpinan beliau menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan Islam, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun pendidikan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kesatuan ajaran dan mencegah perpecahan, salah satunya melalui pendidikan yang sistematis. Abu Bakar sebagai khalifah pertama memainkan peranan penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang dapat mempertahankan ajaran Islam, terutama dalam hal pengajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Penting untuk mengkaji kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar karena pengaruhnya yang signifikan terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam berikutnya, baik dalam lingkup pengajaran agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Kebijakan yang diterapkan pada masa beliau memiliki dampak yang mendalam terhadap perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan.

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Sidiq RA merupakan salah satu topik yang menarik untuk dianalisis, karena masa kepemimpinan beliau menjadi periode penting dalam sejarah awal perkembangan Islam. Abu Bakar As-Sidiq RA, sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, berperan besar dalam menjaga stabilitas sosial dan keagamaan umat Islam, sekaligus melanjutkan misi penyebaran ajaran Islam. Pada masa kepemimpinan beliau, banyak kebijakan yang diambil untuk memperkuat fondasi agama Islam, termasuk dalam bidang pendidikan.

Pendidikan pada masa ini lebih fokus kepada pembelajaran agama dan pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an serta hadits.

Meskipun begitu, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mengalami tantangan dalam mempertahankan kesatuan dan keberlanjutan ajaran Islam. Dengan adanya berbagai suku dan kebudayaan yang beragam di kalangan umat Islam, diperlukan suatu kebijakan pendidikan yang dapat menyatukan pemahaman keagamaan dan menghindari perpecahan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar As-Sidiq RA sangat penting untuk dipahami.

Pada masa beliau, belum ada sistem pendidikan formal yang terstruktur seperti yang kita kenal sekarang, namun pendidikan berbasis masjid dan pengajaran langsung dari ulama dan sahabat Nabi menjadi model yang dominan. Selain itu, kebijakan pendidikan di masa Abu Bakar juga melibatkan upaya untuk mengumpulkan dan menulis Al-Qur'an yang sebelumnya masih tersebar dalam bentuk hafalan di kalangan para sahabat. Kebijakan ini memiliki dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam.

Namun, belum banyak penelitian yang membahas secara mendalam tentang bagaimana kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Sidiq RA dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di masa berikutnya, terutama dalam konteks menjaga kesatuan umat dan penguatan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Mempelajari sejarah pendidikan Islam merupakan sesuatu yang penting. Karena dengan mengetahui dan memahami konsep pendidikan Islam pada masa lampau dan proses perkembangannya dapat berguna dalam memecahkan masalah pendidikan Islam yang telah terjadi pada masa kini, serta menumbuhkan sikap positif terhadap segala perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan Islam.[17]

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Sidiq RA dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan pendidikan Islam pada periode selanjutnya.

[17] Muhammad Nasir, "Manfaat Mempelajari Sejarah Pendidikan Islam," Drischikazumi.Com, n.d., accessed July 14, 2023 http://www.daichikazumi.com/2016/12/manfaat-mempelajari-sejarah-pendidikan.html.

Dengan memahami kebijakan pendidikan pada masa ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kontribusi beliau dalam menciptakan sistem pendidikan yang kokoh dalam sejarah Islam

1. Rumusan Masalah

a. Apa saja kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Sidiq RA?
b. Bagaimana dampak kebijakan pendidikan tersebut terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa selanjutnya?
c. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar?

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Sidiq RA. melalui kajian literatur sejarah Islam. Dalam pendalaman penelitian kualitatif, peneliti berada dalam konteks tertentu yang penting untuk memahami konteks tersebut, interaksi langsung antara peneliti dan data sangat penting dalam penelitian ini. Selain itu, instrumen lain seperti rekaman kaset dan perekam video dapat digunakan sebagai pendukung. Penelitian kualitatif dilakukan secara deskriptif, dengan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar.

Metode penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai cara penelitian naturalistik, dikerjakan dengan keadaan alami (*natural setting*). Metode ini didasarkan pada filsafatnpostpositivisme dan dipakai untuk mengamati dan meneliti kondisi objek secara alami. Instrumen utama yang digunakan dalam metodologi penelitian kualitatif adalah peneliti, dan triangulasi (digabungkan) dengan analisis induktif atau kualitatif telah digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian kualitatif menyoroti pentingnya memahami makna dalam data.[18]

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku sejarah Islam, tafsir, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar. Selain itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan

[18] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*.(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 44

pada masa beliau juga dijadikan sumber data primer. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur yang terkait dengan kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analisis) dengan mengidentifikasi tema-tema utama dalam kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pada masa beliau. Menurut Silverman (2011) bahwa analisis data adalah membuat kategori, kemudian menghitung jumlah istilah yang muncul saat melakukan kategori dalam rangkaian cerita. Umumnya analisis konten merupakan Langkah awal sebelum melakukan analisis lain.[19] Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kritis dengan menghubungkan kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar dengan perkembangan pendidikan Islam di masa berikutnya. Analisis juga dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta dampaknya terhadap pendidikan Islam.

TEORI

Pendidikan islam pada masa khalifah Abu Bakar secara keseluruhan hampir sama dengan pelaksanaan pendidikan pada masa Rasulullah SAW, baik dari segi materi dan lembaga. pendidikannya. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, pendidikan mengalami kemajuan karena pemerintahan pada masa ini dalam keadaan yang stabil dan aman dan materi pendidikan juga sudah dikembangkan. Pendidikan pada masa khalifah Utsman bin Affan tidak mengalami perkembangan dari masa khalifah sebelumnya, hal ini disebabkan timbulnya masalah-masalah yang terjadi di dalam internal pemerintahan khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib, pendidikan tidak mengalami perkembangan dan cenderung terabaikan, karena pada masa itu Ali bin Abi Thalib banyak menghadapi pemberontakan dan peperangan yang terjadi. Adapun untuk lebih rincinya peneliti menjabarkan konsep pendidikan masa khulafaur rasyidin adalah sebagai berikut:

[19] David Silverman, *Interpreting Qualitative Data*, 4th ed. (Los Angeles: Sage, 2011), 9780857024213. hlm. 106

1. Tujuan Pendidikan.

   Pendidikan Islam pada masa khulafaur rasyidin memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yaitu membina masyarakat muslim agar menjadi generasi yang berjiwa kuat dan membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Tujuan pendidikan Islam pada masa ini melanjutkan dan mempertahankan apa yang telah dicapai Rasulullah, yaitu upaya untuk mewariskan nilai dan budaya Islami kepada generasi penerus.[20] Adapun yang dimaksud dengan penerus adalah para tabi'in dan thabi thabi'in yang diharapkan mampu mengembangkan peradaban Islam menuju puncak peradaban.

2. Kurikulum

   Pada masa khulafaur rasyidin, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-Maddah untuk pengertian kurikulum. Kurikulum sendiri identik dengan serangkaian mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Kurikulum pendidikan Islam pada masa khulafaur rasyidin berisi materi yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan, yakni Al-Qur'an dan hadits, hukum Islam, kemasyarakan, ketatanegaraan, pertahanan keamanan, dan kesejahteraan sosial. Secara ringkas kurikulum pendidikan Islam pada masa ini adalah:

   a. Membaca dan menulis
   b. Membaca al-Qur'an dan menghafalkannya
   c. Keimanan, ibadah, dan akhlak
   d. Keahlian berenang, menunggang kuda, dan memanah
   e. Membaca dan menghafal syair dan peribahasa.[21]

   Pada masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin, institusi-institusi pendidikan Islam belum menekankan pengembangan tradisi keilmuan, terutama dalam bidang ilmu alam dan ilmu eksakta. Hal ini disebabkan karena orientasi utama pendidikan saat itu masih tertuju pada internalisasi nilai-nilai Islam dan penyebarannya. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan lebih banyak berisi kajian mendalam tentang ilmu-ilmu keagamaan. Bukan berarti Islam

[20] Amalia Nurhanisah Gultom, "*Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin, EDU-RILIGIA*: Jurmal lion Pendidikan Islam dan Kagama 6, no. 2 (October 31, 2022) 179, accused March 21, 2023, http://jurnal.uinsa.ac.id/index.php/eduriligia/article/view/13158.

[21] *Ibid* 130

mengabaikan pentingnya ilmu alam dan eksakta, namun pada kenyataannya, kebutuhan akan pemahaman keagamaan jauh lebih mendesak di masa tersebut.

3. Metode Pembelajaran

Pada masa ini, metode pembelajaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Karena metode pembelajaran sangat menenukan keberhasilan seorang pendidik dalam mendidik dan mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Metode pembelajaran yang digunakan pada masa khulafaur rasyidin adalah metode ceramah, metode diskusi, metode hafalan, metode baca tulis, metode dakwah individu baik secara tersembunyi maupun terbuka. Pada masa ini juga terjadi perkembangan metode pendidikan yakni metode halaqah. Metode halaqah adalah metode dimana seorang pendidik biasanya duduk di dekat dinding ataupun tiang masjid dan peserta didik duduk di depannya membentuk setengah lingkaran. Dalam metode ini guru akan menyampaikan materi dengan cara didikte lalu menjelaskannya, lalu menjelasng akhir pembelajaran akan dilakukan proses tanya jawab.[22]

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pendidikan pada Masa Khalifah Abu Bakar As-Sidiq RA.

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA merupakan sosok pemimpin yang tidak hanya dikenal karena kepemimpinannya yang tegas dan penuh tanggung jawab, tetapi juga karena perhatiannya yang besar terhadap pendidikan dan pelestarian ajaran agama Islam. Beliau menyadari bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai Islam di tengah-tengah umat, terlebih setelah wafatnya Rasulullah SAW. Salah satu langkah paling penting yang diambil Abu Bakar dalam bidang pendidikan dan pelestarian ajaran Islam adalah perintah untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Qur'an[23]. Keputusan ini diambil menyusul

[22] Asmar Yamin Dalimunthe, "*HALAQAH DAN MUNAZHARAH WARISAN PENDIDIKAN ISLAM KLASIK*, FORUM PAEDAGOGIK 11, no. 1 (June 30, 2019): hlm. 17.

[23] Waham, J. J., Asfahani, A., dan Ulfa, R. A. "International Collaboration in Higher Education: Challenges and Opportunities in a Globalized World." *EDUJAVARE: International Journal of Educational Research* 1, no. 1 (2023).

kekhawatiran akan hilangnya hafalan Al-Qur'an dari para sahabat yang telah menghafalnya, terutama setelah banyak dari mereka gugur dalam pertempuran, seperti yang terjadi dalam Perang Yamamah. Menyadari urgensi ini, Abu Bakar menginstruksikan kepada salah seorang sahabat yang dipercaya dan memiliki kemampuan tinggi dalam hal penulisan wahyu, yaitu Zaid bin Tsabit, untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sumber, baik yang dihafal oleh para sahabat maupun yang ditulis di berbagai media seperti tulang, pelepah kurma, dan batu. Tindakan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam karena untuk pertama kalinya Al-Qur'an dikodifikasikan dalam bentuk mushaf yang terjaga dan terdokumentasi dengan baik.[24]

Selain proyek besar pengumpulan Al-Qur'an, bentuk pendidikan di masa pemerintahan Abu Bakar masih bersifat informal dan berlangsung secara alami di lingkungan masjid serta di tengah-tengah para sahabat. Masjid pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan diskusi keislaman. Para sahabat senior, yang langsung belajar dari Rasulullah SAW, menjadi pengajar bagi generasi berikutnya. Mereka menyampaikan ajaran-ajaran dasar Islam seperti konsep tauhid (keesaan Allah), pelaksanaan salat, puasa, zakat, serta berbagai hukum dasar yang menjadi pondasi syariat Islam.[25]

Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, kebijakan pendidikikan islam berfokus pada;

a. Penyebaran ilmu pengetahuan

   Abu Bakar Ash-Shiddiq memprioritaskan penyebaran ilmu pengetahuan Islam kepada masyarakat. Beliau mendorong para sahabat untuk mempelajari dan memahami ajaran Islam.

b. Pengajaran Al-Qur'an

   Pengajaran Al-Qur'an menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan Islam pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq.

[24] Setiyowati, Asih, Cikal Jiwani Putri, Feni Miftakhul Jannah, Muhammad Rizaludin As'ad, "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)," YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya 1, no. 2 (2021). hlm.67-78

[25] Mahfud Hendi. "Kuttab dalam Lintasan Sejarah dari Masa Pembinaan hingga Kejayaan Pendidikan Islam (570 M–1258 M)." *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* (July 5, 2021).

Beliau memastikan bahwa Al-Qur'an dipelajari dan dihafal oleh para sahabat.

c. Pembinaan Moral

Pendidikan Islam pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq juga berfokus pada pembinaan moral dan akhlak. Beliau menekankan pentingnya memiliki akhlak yang baik dan berakhlak mulia.

d. Pendidikan bagi Semua

Abu Bakar Ash-Shiddiq memastikan bahwa pendidikan Islam dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Tak hanya Al-Qur'an, perhatian Abu Bakar juga tercurah pada pelestarian Hadits atau sunnah Nabi. Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan menjadi pedoman hidup umat Islam. Oleh karena itu, pengajaran hadits juga menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam pada masa pemerintahannya. Melalui kebijakan dan perhatian yang besar terhadap pendidikan inilah, Abu Bakar berhasil meletakkan dasar kuat bagi kelestarian ajaran Islam yang kelak menjadi pijakan penting bagi generasi-generasi berikutnya.

B. Dampak Kebijakan Pendidikan terhadap Perkembangan Pendidikan Islam.

Kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam bidang pendidikan memberikan dampak besar dan berjangka panjang terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam pada masa-masa selanjutnya. Salah satu kebijakan paling monumental yang diwariskannya adalah inisiatif untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Qur'an. Langkah strategis ini menjadi landasan utama dalam membangun sistem pendidikan Islam yang lebih terorganisir dan sistematis.[26]

Dengan adanya mushaf Al-Qur'an yang tersusun secara rapi dan utuh, generasi setelahnya memiliki sumber belajar yang terjaga keasliannya dan dapat dijadikan pedoman dalam proses pendidikan keagamaan. Kebijakan Abu Bakar ini kemudian memberikan inspirasi dan mempermudah para khalifah setelahnya, seperti Khalifah Umar bin Khattab, dalam mengembangkan struktur

[26] Muhammad Rahmatullah, "Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq," Jurnal Katulistiwa: Journal of Islamic Studies 4, no. 2 (2014).hlm. 38

pendidikan yang lebih mapan dan terarah. Pada masa Umar, sistem pendidikan mulai menunjukkan kemajuan dengan semakin teraturnya kegiatan belajar-mengajar serta penyebaran ilmu pengetahuan Islam ke berbagai wilayah kekuasaan Islam yang terus meluas.[27]

Selain itu, bentuk pendidikan yang berbasis pada masjid yang telah berkembang sejak masa Abu Bakar juga menjadi model utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengkajian ilmu, dan dakwah. Tradisi pendidikan di masjid ini kemudian terus berkembang dan menjadi cikal bakal munculnya lembaga pendidikan formal seperti madrasah pada masa-masa berikutnya, terutama ketika Islam telah menyebar luas ke berbagai wilayah dan membutuhkan sistem pendidikan yang lebih terstruktur untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman secara lebih luas dan mendalam. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang diambil oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq bukan hanya berpengaruh pada masa pemerintahannya yang singkat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terbentuknya sistem pendidikan Islam yang terus berkembang dan diwariskan hingga generasi-generasi berikutnya. [28]

C. Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan.

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keilmuan yang memadai untuk mengajarkan ajaran Islam secara benar dan mendalam. Pada masa itu, belum banyak individu yang benar-benar menguasai ajaran Islam secara utuh seperti para sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam penyebaran ilmu,

[27] Damis dan Muhammad Ady Waryanto. "Konsep Khilafah Menurut H.M. Quraisy Shihab dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendais* 4, no. 2 (2022).

[28] Samruddin Nasution. *Sejarah Peradaban Islam*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2013.

terutama ketika Islam mulai berkembang pesat dan menjangkau wilayah-wilayah baru yang memerlukan bimbingan keagamaan.[29]

Selain kendala tenaga pendidik, tantangan lain yang tidak kalah besar adalah keberagaman suku dan latar belakang budaya di kalangan umat Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam semakin berkembang dan menyatu dari berbagai kelompok etnis, seperti kaum Quraisy, Anshar, serta suku-suku lain dari Jazirah Arab dan wilayah yang ditaklukkan. Masing-masing suku memiliki tradisi, adat istiadat, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Perbedaan ini sering kali mempengaruhi cara mereka memahami dan menerima ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan, perbedaan budaya ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menyampaikan ajaran agama secara seragam dan diterima dengan pemahaman yang sama.[30]

Oleh karena itu, Abu Bakar dan para sahabat yang membantunya dalam mengelola umat harus berupaya keras untuk tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut. Dibutuhkan pendekatan yang bijaksana dan strategi yang tepat agar nilai-nilai Islam dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat yang beragam latar belakangnya. Tantangan-tantangan inilah yang menjadi bagian penting dalam sejarah awal pendidikan Islam dan menjadi pelajaran berharga bagi perkembangan pendidikan di masa-masa selanjutnya.

KESIMPULAN

Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Sidiq RA, kebijakan pendidikan berfokus pada pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini penting mengingat banyaknya para penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam Perang Yamama. Untuk menjaga kelestarian wahyu Tuhan, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tersebar. Ini merupakan langkah pertama dalam upaya mendokumentasikan wahyu Tuhan secara sistematis.

[29] Muhammad Saleh. “Baitul Mal (Sejarah Perkembangannya dan Konteksnya ke-Indonesiaan).” *Jurnal Tadzkiroh: Transformasi Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 2 (2021).

[30] Mubin. "Penyelenggaraan Pendidikan Islam Zaman Klasik (di Masa Rasulullah SAW dan Era Kekhalifahan)." n.d.

Meskipun pada masa itu pendidikan Islam masih bersifat informal dan tidak terstruktur seperti sekarang, kebijakan Khalifah Abu Bakar menunjukkan pentingnya pengajaran agama secara konsisten. Keputusan untuk mengumpulkan Al-Qur'an tidak hanya menjaga keaslian wahyu, tetapi juga memberi dasar penting bagi pengajaran ajaran Islam di masa depan. Langkah ini membuka jalan bagi berkembangnya pendidikan Islam yang lebih formal dan terorganisir.

Pendidikan pada masa Abu Bakar RA, meskipun belum terstruktur secara formal, menjadi landasan bagi sistem pendidikan Islam yang berkembang di masa Khalifah-khalifah berikutnya. Kebijakan tersebut menunjukkan perhatian besar terhadap pemeliharaan ajaran agama, yang nantinya akan melahirkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lebih maju, termasuk madrasah dan pesantren. Dengan demikian, kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Sidiq RA sangat berpengaruh dalam sejarah pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia Nurhanisah Gultom. "Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *EDU-RELIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* 6, no. 2 (October 31, 2022): 179. Accessed March 21, 2023. http://jurnal.uinsa.ac.id/index.php/eduriligia/article/view/13158.

Asmar Yamin Dalimunthe. "Halaqah dan Munazharah: Warisan Pendidikan Islam Klasik." *Forum Paedagogik* 11, no. 1 (June 30, 2019).

Damis dan Muhammad Ady Waryanto. "Konsep Khilafah Menurut H.M. Quraisy Shihab dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendais* 4, no. 2 (2022).

David Silverman. *Interpreting Qualitative Data*. 4th ed. Los Angeles: Sage, 2011.

Mahfud Hendi. "Kuttab dalam Lintasan Sejarah dari Masa Pembinaan hingga Kejayaan Pendidikan Islam (570 M–1258 M)." *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* (July 5, 2021).

Mubin. "Penyelenggaraan Pendidikan Islam Zaman Klasik (di Masa Rasulullah SAW dan Era Kekhalifahan)." n.d.

Muhammad Nasir. "Manfaat Mempelajari Sejarah Pendidikan Islam." *Drischikazumi.com*. Accessed July 14, 2023. http://www.daichikazumi.com/2016/12/manfaat-mempelajari-sejarah-pendidikan.html.

Muhammad Rahmatullah. "Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq." *Jurnal Katulistiwa: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2014).

Setiyowati, Asih, Cikal Jiwani Putri, Feni Miftakhul Jannah, dan Muhammad Rizaludin As'ad. "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)." *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2021).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Waham, J. J., Asfahani, A., dan Ulfa, R. A. "International Collaboration in Higher Education: Challenges and Opportunities in a Globalized World." *EDUJAVARE: International Journal of Educational Research* 1, no.

BAB 3
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHOLIFAH UMAR BIN KHATAB RA

Robiatul Wulandari: 2120203058
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Merupakan unsur paling mendasar dalam Pembangunan peradaban dan pembentukan karakter umat manusia. Dalam islam, Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga menyucikan jiwa dan menanamkan nilai-nilai tauhid. Sejak turunnya wahyu pertama kepada nabi Muhammad Saw, semangat menuntut ilmu menjadi bagian integral dari misi islam. Tradisi keilmuan ini kemudian dilanjutkan oleh para pemimpin setelah Rasulullah wafat, khususnya para khalifah yang tergolong Khulafaur Rasyidin. Diantara mereka, Khalifah Abu Bakar Assidiq memainkan peran penting dalam menjaga dan mengarahkan perkembangan Pendidikan islam pada masa awal pertumbuhan negara islam.[31]

Masa kekhalifahan Abu Bakar (632-634 M) merupakan fase yang sangat penting dalam Sejarah islam. Umati slam menghadapi tantangan serius, termasuk kemurtadan sebagian suku Arab, klaim nabi palsu, serta ancaman disintegrasi sosial dan politik. Dalam kondisi yang tidak stabil tersebut, Abu bakar tidak hanya fokus pada penertiban keamanan dan keutuhan negara, tetapi juga pada kesinambungan ajaean islam, tertama dalam bentuk Pendidikan. Ia sadar bahwa tanpa penguatan terhadap ilmu dan Pendidikan, misi islam akan sulit diteruskan oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu, ia mengambil Langkah startegis dengan menginstruksikan pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf.[32]

Pengumpulan al-qur'an menjadi kebijakan monumental dalam bidang Pendidikan islam. Hal ini tidak hanya mencegah wahyu akibat gugurnya para hafidz, tetapi juga menjadi fondasi bagi Pendidikan islam yang berlandaskan pada sumber asli ajaran.

[31] Azra Azyumardi, 1999 Edukasi islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. Jakarta logos

[32] Harun nasution, 1992 islam di tinjau dari berbagai aspeknya Jakarta UI Press

Kebijakan ini menunjukkan betapa pentingnya Pendidikan dalam prioritas Abu Bakar. Proses modifikasi Al-Qur'an oleh Zaid bin tsabit atas perintah Abu Bakar menunjukkan keseriusan dalam membentuk basis kurikulum Pendidikan islam. Dari mushaf ini kemudian lahir tradisi pengajaran berbasis teks suci, yang menjadi ciri khas Pendidikan islam di berbagai wilayah hingga masa kini.[33]

Studi terhadap kebijakan Pendidikan Abu Bakar Assidiq menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memahami peran beliau dalam Sejarah Pendidikan islam, tetapi juga untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kelestarian islam dan bagaimana relevansinya terhadap tantangan Pendidikan masa kini. Ditengah dinamika modernisasi dan globalisasi, semangat pelestarian sumber ajaran islam dan kebijakan Pendidikan yang visioner sebagaimana dicontohkan Abu Bakar dapat dijadikan inspirasi dan landasan dalam merancang system Pendidikan islam yang kokoh dan berkesinambungan.[34]

B. Rumusan Masallah

1. Bagaimana Kondisi Pendidikan Islam pada masa ke khalifahan Abu Bakar Ash-Siddiq?
2. Apa saja kebijakan yang diambil Abu Bakar Ash-Siddiq dalam bidang Pendidikan islam?
3. Apa dampak kebijakan Pendidikan tersebut terhadap kelestarian ajaran islam?
4. Bagaimana relevansi kebijakan Pendidikan Abu Bakar Ash-Siddiq terhadap perkembangan Pendidikan islam masa kini?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi historis yang bertujuan untuk mengkaji fakta Sejarah terkait kkebijakan Pendidikan islam pada kekhalifahan Abu Bakar Ashidiq. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis kebijakan dan pengaruhnya terhadap perkembangan Pendidikan islam, baik dalam konteks masa lalu maupun dalam hubungannya dengan kondisi kekinian. Metode ini memadukan

[33] [33] Hasan syed nawab ali, 1994, The early development of Islamic education. new delhi adam publishers

[34] Assegaf A.R 2004, filsafat Pendidikan islam, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

interpretasi terhadap teks Sejarah dengan pemahaman kontekstual terhadap situasi sosial politik saat itu. [35]Pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka (*library research)*, dengan mengkaji sumber sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an hadist shahih seperti Riwayat imam bukhari, serta kitab-kitab Sejarah islam klasik seperti Tarikh al-Tabari dan al-Bidayah wa al-Nihayah karya ibnu katsir.

Sedangkan sumber sekunder mencakup literatur akademik modern seperti buku-buku Sejarah Pendidikan islam, dan artikel ilmiah dari jurnal bereputasi yang relevan. [36] Analisis tema dilakukan secara tematik dan kronologis, dengan mengidentifikasi kebijakan Pendidikan yang dilakukan abu Bakar Ashidiq, menganalisis latar belakang kebijakan tersebut, menela'ah dampaknya terhadap Pendidikan islam saat itu, serta menghubungkannya dengan relevansi zaman sekarang. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan interpretatif-kritis, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap topik penelitian ini.

TEORI

Pendidikan islam adalah proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Tujuan ini telah melekat sejak masa kenabian dan diteruskan pada masa khulafaur rasyidin. Menurut Zuhairini dkk (1993), Pendidikan islam tidak hanya mentransmisikan islam pengetahuan, tetapi juga menanmkan nilai-nilai ilahiyah dan sosial. Para khalifah, termasuk Abu Bakar Ash-Shiddiq, berperan besar dalam memelihara kesinambungan system Pendidikan islam meskipun mereka dihadapkan pada berbagai persoalan politik dan militer.[37]

Dalam teori Pendidikan islam, sumber utama ajaran yaitu Al-Qur'an dan hadist menjadi inti dari segala proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, pelestarian sumber ini menjadi hal yang sangat vital. Abu Bakar Ash-Siddiq menunjukkan kepedulian luarbiasa terhadap hal ini dengan mengambil Langkah serius dalam pengumpulan mushaf Al-

[35] Moleong, Lexy J. 2017 Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya

[36] Nawawi, Hadari. 1995, metode penelitian sosial . Yogyakarta Gadjah mada university press

[37] Arifin, M 1993 Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara

Qur'an. Tindakan ini di dorong oleh fakta bahwa banyak penghafal Al-Qur'an gugur dalam perang Yamamah. Atas usulan Umar bin Khatab, Abu Bakar menugaskan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan potongan-potongan wahyu menjadi satu mushaf. Hadist Riwayat Bukhari No. 4986 menjadi bukti otentik kebijakan ini.

Dengan demikian, tindakan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan bentuk prlindungan terhadap identitas keilmuan islam.[38] Selain mnyelamatkan Al-Qur'an dari kemungkinan hilang, kebijakan tersebut juga mempengaruhi system Pendidikan islam secara langsung. Mushaf Al-Qur'an menjadi bahan ajar utama di masjid-masjid dan halaqah- halaqah ilmu. Proses pengajaran menjadi lebih sistematis karena didasarkan pada satu teks standar. Hal ini menciptakan kesatuan sumber belajar dan mendorong lahirnya generasi yang lebih tertata dalam menghafal dan memahami ajaran islam. Keberhasilan Abu Bakar dalam membangun dasar Pendidikan islam juga relevan dengan masa kini. Dalam era digital yang penuh distraksi, semangat pelestarian sumber ajaran dan Pendidikan yang terfokus pada nilai-nilai inti sebagaimana dicontohkan Abu Bakar menjadi sangat relevan dan layak dijadikan model.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Pendidikan islam pada masa kholifah Abu Bakar Assidiq

Sistem pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M) merupakan kelanjutan dari sistem yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perubahan signifikan dalam struktur maupun metode pendidikan. Lembaga pendidikan utama tetap berpusat di masjid dan Kuttab. Berikut sedikit penjelasannya:

a. Masjid: Masjid Nabawi di Madinah tetap menjadi pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran agama. Para sahabat dan umat Islam berkumpul untuk belajar Al-Qur'an, hadis, serta mendalami ajaran Islam. Masjid berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter umat.
b. Kuttab: Kuttab merupakan lembaga pendidikan dasar yang ditujukan untuk anak-anak. Di tempat ini, mereka belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Qur'an. Kuttab menjadi

[38] Hadist Shahih Bukhari No 4986 kodifikasi Al-Qur'an oleh zaid bin Tsabit.

fondasi penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam sejak usia dini.

Selain kedua lembaga tersebut, rumah-rumah sahabat yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam juga berfungsi sebagai pusat pendidikan informal. Mereka membuka majelis ilmu di rumah masing-masing, sehingga masyarakat dapat belajar agama dengan lebih dekat dan personal.[39]

Materi pendidikan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq menekankan pada fondasi ajaran Islam. Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan dalam pendidikan Islam. Pengajaran dan penghafalan Al-Qur'an menjadi fokus utama. Setiap Muslim didorong untuk membaca, memahami, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, kedua adalah Hadis dan sunnah Rasulullah SAW diajarkan sebagai pedoman hidup setelah Al-Qur'an, Para sahabat yang memiliki pengetahuan tentang hadis menjadi sumber rujukan dalam periwayatan dan pemahaman hadis, ketiga tauhid, Pendidikan tauhid bertujuan untuk menanamkan keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, Pemahaman tentang tauhid menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, lalu yang keempat Akhlak, Pendidikan akhlak bertujuan untuk membentuk karakter Muslim yang mulia, Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, dan keadilan ditekankan dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir Ibadah, Materi ibadah meliputi tata cara pelaksanaan shalat, puasa, zakat, dan haji. Karna umat Islam diajarkan untuk melaksanakan ibadah dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat

Terkait metode pendidikan yang digunakan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq relatif sederhana, namun efektif dalam menyampaikan ajaran Islam, beberapa metode yang digunakan ialah seperti: halaqah (metode halaqah, yaitu belajar dalam kelompok melingkar di sekitar guru), Talaqqi dan Musyafahah (Metode talaqqi (belajar langsung) dan musyafahah (bertemu muka) digunakan untuk memastikan keaslian ilmu yang diterima dari guru, lalu Metode hafalan sangat ditekankan, terutama dalam pengajaran Al-Qur'an dan hadis, lalu Abu Bakar Ash-shiddiq juga menyampaikan ajarannya

[39] Nelly, k. Masa pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan islam pada masa khulafarasyidin. Jurnal Manajemen Pendidikan Agama Islam, Vol 3 No 1, hlm 25-32. 2024

dengan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta metode pemberian nasihat juga digunakan dalam pendidikan Islam yang dilakukannya. [40]

Salah satu pencapaian terbesar pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah kodifikasi Al-Qur'an. Inisiatif ini muncul karena banyaknya huffaz (penghafal Al-Qur'an) yang gugur dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab khawatir jika Al-Qur'an tidak dikumpulkan dan dibukukan, maka akan hilang Sebagian. Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjuk Zaid bin Tsabit, seorang sahabat yang memiliki kemampuan menulis dan hafalan yang kuat, untuk memimpin proyek kodifikasi Al-Qur'an. Zaid bin Tsabit dan timnya bekerja keras mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Qur'an yang tersebar di berbagai tempat dan memverifikasinya dengan hafalan para sahabat. Setelah selesai, mushaf Al-Qur'an disimpan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, kemudian diserahkan kepada Umar bin Khattab setelah beliau menjadi khalifah. Kodifikasi Al-Qur'an ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, karena menjaga keutuhan dan keaslian Al-Qur'an hingga saat ini.

Selain itu, Pendidikan Islam pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan Islam selanjutnya, Sistem pendidikan yang diterapkan berhasil melestarikan ajaran Islam yang murni, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Pendidikan pada masa Abu Bakar Ash-shiddiq meletakkan fondasi yang kuat bagi pengembangan sistem pendidikan Islam di masa depan, serta proses kaderisasi ulama mulai berjalan, sehingga estafet kepemimpinan dan keilmuan Islam terus berlanjut

Pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan kelanjutan dari sistem yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Pendidikan berpusat di masjid dan kuttab, dengan fokus pada pengajaran Al-Qur'an, hadis, tauhid, akhlak, dan ibadah. Metode yang digunakan sederhana, namun efektif dalam menyampaikan ajaran Islam. Inisiatif kodifikasi Al-Qur'an menjadi warisan terbesar pada masa ini, yang menjaga keutuhan dan keaslian Al-Qur'an hingga akhir zaman [41]

[40] Rustandi, A. Pendididikan islam perspektif Abdullah Nashih Ulwan, Jurnal Pendidikan islam Al-Ilmi, vol 4 no 1, hlm 87-96, 2021

[41] Muthoharoh, I. Analisis kebijakan Pendidikan islam pada masa khalifah umar bin khatab, jurnal penelitian Pendidikan islam, vol 11 no 1, hlm 47-64, 2023

B. Kebijakan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Bidang Pendidikan Islam

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagai pemimpin pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, memegang peranan penting dalam menjaga dan mengembangkan pendidikan Islam. Pada masa pemerintahannya yang singkat, beliau mengambil sejumlah kebijakan strategis yang berfokus pada pelestarian ajaran Islam dan peningkatan kualitas pendidikan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya memastikan kesinambungan sistem pendidikan yang telah dibangun oleh Nabi, tetapi juga memberikan fondasi kuat bagi perkembangan pendidikan Islam di masa-masa berikutnya. Beberapa kebijakan utama yang diambil oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam bidang pendidikan Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melanjutkan dan Mempertahankan Pola Pendidikan Nabi Muhammad SAW

   Abu Bakar secara konsisten melanjutkan sistem pendidikan yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak melakukan perubahan radikal, melainkan mempertahankan materi dan metode pendidikan dasar seperti membaca, menulis, menghafal Al-Qur'an, serta mempelajari tata cara ibadah. Kebijakan ini penting untuk menjaga kesinambungan pendidikan Islam agar tidak mengalami kekosongan atau perubahan yang membingungkan umat yang baru terbentuk [42]

b. Penguatan Materi Pendidikan Tauhid, Akhlak, dan Ibadah

   Dalam upaya membentuk generasi Muslim yang kuat dan berkarakter, Abu Bakar menegaskan pentingnya pendidikan yang berfokus pada tiga aspek utama: tauhid (keimanan kepada Allah), akhlak mulia, dan tata cara ibadah. Pendidikan yang menekankan aspek-aspek ini bertujuan agar umat Islam tidak hanya memahami ajaran secara teoritis, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Kodifikasi Al-Qur'an sebagai Upaya Pendidikan dan Pelestarian Ilmu

   Salah satu kebijakan paling monumental yang diambil Abu Bakar adalah pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'an. Setelah

[42] Amalia Gultom, Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin, Jurnal EduReligia UIN Sumatera Utara, 2023.

banyak penghafal Al-Qur'an gugur dalam Perang Yamamah, beliau khawatir jika Al-Qur'an hanya dihafal secara lisan akan terjadi kehilangan teks suci tersebut. Oleh karena itu, atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sumber tertulis dan hafalan para sahabat, kemudian membukukannya menjadi mushaf resmi. Kebijakan ini memastikan keaslian Al-Qur'an dan menjadi dasar pendidikan Islam yang tersusun rapi[43]

d. Metode Pendidikan Berbasis Keteladanan dan Pembiasaan

Abu Bakar menerapkan metode pendidikan yang menekankan keteladanan (uswah hasanah) dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tidak hanya memberikan ceramah atau nasihat, tetapi juga menunjukkan contoh nyata melalui perilaku yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Metode ini efektif dalam membentuk karakter peserta didik karena mereka belajar langsung dari perilaku pemimpin mereka.

e. Penanaman Nilai Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan

Abu Bakar mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam kepemimpinannya, seperti ketegasan dalam mendidik umat, keberanian menegakkan kebenaran, kedermawanan dalam membimbing umat, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

f. Menjadikan Madinah sebagai Pusat Pendidikan Islam

Di bawah arahan Abu Bakar, Madinah difungsikan sebagai pusat pengajaran Islam yang terorganisir. Madinah menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan pengajar yang menyebarkan ilmu agama ke seluruh wilayah kekuasaan Islam. Kebijakan ini memperkuat posisi Madinah sebagai pusat intelektual dan pendidikan Islam yang berperan penting dalam pembinaan umat. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Abu Bakar Ash-Shiddiq berhasil menjaga kesinambungan dan kemurnian pendidikan Islam, sekaligus meletakkan fondasi kuat bagi perkembangan pendidikan Islam di masa-masa berikutnya.

[43] Heri Purwanto Sidiq & Hasbi Indra, Model Kepemimpinan Pendidikan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Edu-Leadership, Vol. 3 No. 1, 2023

C. Dampak kebijakan Pendidikan pada masa kholifah Abu Bakar Assidiq terhadap kelestarian ajaran Islam

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, pendidikan Islam mengalami penguatan yang signifikan baik dari segi substansi maupun sistem pelaksanaannya. Sebagai pemimpin pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar menunjukkan komitmen besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan strategis di bidang pendidikan. Fokus beliau tidak hanya tertuju pada aspek hafalan Al-Qur'an, tetapi juga pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah seperti pengumpulan mushaf Al-Qur'an, pembentukan kurikulum yang menyeluruh, dan pembukaan akses pendidikan untuk semua kalangan mencerminkan visi beliau dalam menciptakan masyarakat Islam yang cerdas, bermoral, dan berwawasan luas [44] Berikut ini di uraikan secara ringkas tujuh dampak utama kebijakan pendidikan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq terhadap kelestarian ajaran islam:

a. Penekanan pada Pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah

   Abu Bakar menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an dan Sunnah sebagai inti pendidikan, sehingga umat tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga mengerti makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Pengumpulan dan Penulisan Al-Qur'an

   Salah satu kebijakan monumental Abu Bakar adalah memerintahkan pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf, guna menjaga keaslian dan kelestarian kitab suci setelah banyak penghafal yang gugur dalam peperangan.

c. Kurikulum Pendidikan yang Komprehensif

   Kurikulum pendidikan pada masa Abu Bakar tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum dan keterampilan praktis, sehingga menghasilkan generasi yang berpengetahuan luas dan siap menghadapi tantangan zaman.

d. Lembaga Pendidikan yang Terbuka dan Inklusif

   Abu Bakar mendirikan lembaga pendidikan di masjid-masjid yang terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk

[44] Sidiq, Heri Purwanto & Indra, Hasbi (2023). "Model Kepemimpinan Pendidikan Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu 'Anhu." edu-Leadership: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 3, Nomor 1, hlm. 93–101.

kaum wanita, sehingga akses terhadap ilmu agama dan pengetahuan menjadi lebih merata.

e. Penekanan pada Nilai-Nilai Moral dan Etika

Pendidikan pada masa Abu Bakar menanamkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, keadilan, dan kedermawanan, yang menjadi pondasi karakter umat Islam dalam menjaga kemurnian ajaran.

f. Penguatan Peran Sahabat sebagai Pengaja

Abu Bakar memperkuat peran para sahabat yang memiliki pengetahuan mendalam sebagai pengajar, sehingga masyarakat belajar langsung dari sumber yang otentik dan terpercaya.

g. Mendorong Diskusi dan Pertukaran Ilmu

Kebijakan Abu Bakar juga mendorong terjadinya diskusi dan pertukaran ilmu di antara umat Islam, sehingga tercipta atmosfer intelektual yang subur dan tradisi keilmuan Islam semakin berkembang [45]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dampaknya adalah: Penekanan pada pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah menjadikan fondasi utama pendidikan Islam, sehingga umat tidak hanya menghafal tetapi juga memahami ajaran secara mendalam. Pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an secara resmi di bawah perintah Abu Bakar memastikan keaslian dan kelestarian kitab suci. Kurikulum pendidikan yang komprehensif mencakup ilmu agama, membaca, menulis, serta keterampilan praktis, membentuk generasi yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia. Lembaga pendidikan yang terbuka dan inklusif di masjid-masjid memungkinkan semua lapisan masyarakat, termasuk wanita, memperoleh ilmu tanpa diskriminasi. Penekanan pada nilai moral dan etika membentuk karakter umat yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Penguatan peran sahabat sebagai pengajar menjamin otentisitas ilmu yang disampaikan langsung dari sumber utama. Sementara itu, kebiasaan diskusi dan pertukaran ilmu menciptakan atmosfer intelektual yang subur, sehingga tradisi keilmuan Islam terus berkembang dan lestari.

[45] Munawaroh, Siti & Kosim, Mohammad. (2021). "Menginternalisasi Nilai Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin." Al-Thariqah: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 6, Nomor 2, hlm. 125–136. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

D. Relevansi Kebijakan Pendidikan Abu Bakar Ash-shiddiq terhadap pengembangan Pendidikan islam masa kini.

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama dalam Islam memiliki relevansi yang signifikan terhadap pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat (632-634 M), fondasi yang dibangun oleh Abu Bakar telah memberikan pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam.

A. Latar Belakang Historis Abu Bakar Ash-Shiddiq: Abu Bakar Ash-Shiddiq (573-634 M) adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan orang pertama yang menerima Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Kepemimpinannya dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, dalam situasi yang penuh tantangan dengan adanya pemberontakan dari berbagai suku Arab dan gerakan riddah (pemurtadan). Meskipun menghadapi berbagai krisis politik dan sosial, Abu Bakar tetap memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat Islam. Kebijakan pendidikan Abu Bakar tidak terlepas dari fondasi yang telah diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW di masa sebelumnya. Pendidikan pada masa awal Islam berpusat di masjid dan rumah-rumah sahabat dengan fokus utama pada pengajaran Al-Qur'an, hadits, dan nilai-nilai keislaman[46]

B. Kebijakan Pendidikan Abu Bakar Ash-Shiddiq

a). Kodifikasi Al-Qur'an: Salah satu kontribusi terbesar Abu Bakar dalam bidang pendidikan Islam adalah inisiatifnya untuk mengumpulkan dan mengkodifikasi Al-Qur'an. Setelah Perang Yamamah yang menewaskan banyak penghafal Al-Qur'an (huffazh), Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk melakukan pengumpulan Al-Qur'an secara tertulis. Meskipun awalnya ragu, Abu Bakar akhirnya menyetujui dan menugaskan Zaid bin Tsabit untuk memimpin proyek pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an (Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, no. 4986). Kebijakan ini memiliki dampak fundamental dalam pendidikan Islam karena: Memastikan

[46] Al-Mubarakpuri, S. R. (2011). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam Publishers.

pelestarian sumber utama ajaran Islam, Menyediakan referensi standar untuk pengajaran dan Menciptakan fondasi bagi pengembangan ilmu-ilmu Al-Qur'an di masa selanjutnya.[47]

b). Pelembagaan Baitul Mal: Abu Bakar melanjutkan dan memperkuat sistem Baitul Mal yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta negara tetapi juga menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan, termasuk untuk kepentingan pendidikan. Abu Bakar menetapkan kebijakan bahwa para guru Al-Qur'an dan ilmu agama mendapatkan tunjangan dari Baitul Mal, sehingga mereka dapat fokus pada aktivitas Pendidikan.

c). Penyebaran Ilmu melalui Surat dan Utusan: Abu Bakar mengembangkan sistem penyebaran ilmu dengan mengirimkan surat-surat resmi dan utusan ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Surat-surat ini berisi petunjuk tentang administrasi, hukum Islam, dan aspek-aspek pendidikan. Para utusan tidak hanya bertugas sebagai representasi politik tetapi juga sebagai pengajar yang menyebarkan pengetahuan Islam[48]

d). Pendidikan Berbasis Masjid: Melanjutkan tradisi Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar mempertahankan dan memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pendidikan. Masjid Nabawi di Madinah menjadi pusat pembelajaran utama di mana para sahabat dan muslim lainnya berkumpul untuk mempelajari Al-Qur'an, hadits, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Abu Bakar sendiri sering memberikan pengajaran dan khutbah di masjid, menekankan pentingnya ilmu dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

e). Mendorong Ijtihad dan Pemikiran Kritis: Abu Bakar dikenal mendorong ijtihad (penalaran independen) dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak memiliki preseden langsung dari Al-Qur'an atau hadits. Beliau sering berkata, "Saya akan berijtihad dengan pendapatku, jika benar maka dari Allah, dan jika salah maka dari diriku sendiri" (Ibn Qayyim, I'lam Al-Muwaqqi'in, Vol. 1). Pendekatan ini

[47] Bunt, G. R. (2018). Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority. University of North Carolina Press.

[48] Omer, S. (2013). The Concept of the Mosque in Islam and Its Relevance to Contemporary Society. Journal of Islamic Architecture, 2(3), 106-119.

menciptakan atmosfer intelektual yang mendorong para sahabat dan generasi berikutnya untuk mengembangkan pemikiran kritis dalam kerangka nilai-nilai Islam.

C. Relevansi terhadap Pendidikan Islam Kontemporer

Kebijakan Abu Bakar dalam mengkodifikasi Al-Qur'an memberikan pelajaran penting tentang pentingnya pelestarian sumber pengetahuan. Dalam konteks kontemporer, ini dapat diterjemahkan sebagai pentingnya digitalisasi, dokumentasi, dan penerjemahan karya-karya klasik Islam untuk memastikan kesinambungan keilmuan Islam dari generasi ke generasi. pelestarian warisan intelektual Islam merupakan kunci keberlanjutan tradisi keilmuan Islam di era modern. Lembaga-lembaga pendidikan Islam kontemporer perlu mengadopsi teknologi mutakhir untuk melestarikan dan menyebarluaskan karya-karya klasik, seperti yang dilakukan oleh beberapa universitas Islam yang mengembangkan repositori digital manuskrip Islam.[49]

E. Pendanaan Berkelanjutan untuk Pendidikan

Kebijakan Abu Bakar dalam mendukung para guru dan ulama melalui Baitul Mal menunjukkan pentingnya sistem pendanaan yang berkelanjutan untuk institusi pendidikan. Dalam konteks modern, ini berkaitan dengan pengembangan wakaf pendidikan, endowment, dan sumber pendanaan alternatif yang dapat menjamin kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam.

F. Integrasi Teknologi dalam Penyebaran Ilmu

Metode penyebaran ilmu melalui surat dan utusan yang diterapkan Abu Bakar dapat direfleksikan dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan Islam masa kini. Platform pembelajaran daring, media sosial, dan aplikasi mobile dapat menjadi "utusan digital" yang menyebarkan pengetahuan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ramadan (2016) mengargumentasikan bahwa pendidikan Islam kontemporer perlu memanfaatkan teknologi digital tidak hanya sebagai alat pendukung tetapi sebagai paradigma baru dalam transmisi pengetahuan Islam. Beberapa perguruan tinggi Islam seperti Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Islam

[49] Ramadan, T. (2016). Islamic Education in Western Contexts: Teacher, Preacher, or Both? Routledge.

Internasional Malaysia telah mengembangkan program pembelajaran jarak jauh dan sumber belajar digital yang terinspirasi dari semangat penyebaran ilmu Islam.

G. Masjid sebagai Pusat Pendidikan Multifungsi

Kebijakan Abu Bakar dalam mempertahankan peran masjid sebagai pusat pendidikan memiliki relevansi penting di era modern. Masjid kontemporer dapat dikembangkan tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan yang komprehensif dengan berbagai fasilitas seperti perpustakaan, ruang diskusi, laboratorium bahasa, dan pusat pelatihan keterampilan. Menurut Omer (2013), revitalisasi fungsi pendidikan masjid dapat menjawab tantangan fragmentasi ilmu dan spesialisasi berlebihan dalam pendidikan modern. Beberapa masjid di berbagai negara telah berhasil mengembangkan program pendidikan integratif yang mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial.

H. Pengembangan Pemikiran Kritis dan Ijtihad Kontemporer

Semangat ijtihad yang digalakkan oleh Abu Bakar sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan pemikiran kritis dalam pendidikan Islam kontemporer. Pendekatan ini dapat diterapkan untuk mengembangkan metodologi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif tetapi juga menganalisis, mengkritisi, dan mengkontekstualisasikan ajaran Islam dalam realitas kontemporer.

Al-Alwani (2006) menekankan pentingnya revitalisasi ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) dalam menghadapi kompleksitas permasalahan modern. Lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan kurikulum yang membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis dan metodologi penalaran Islam yang kokoh.

I. Integrasi Ilmu Pengetahuan

Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam sumber-sumber sejarah, Abu Bakar dikenal memiliki pandangan yang positif terhadap berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ini tercermin dari kebijakannya yang tidak membatasi pengajaran hanya pada ilmu-ilmu agama tetapi juga mendorong pembelajaran tentang bahasa, sejarah, dan pengetahuan praktis lainnya (Ibn Khaldun,

Muqaddimah). Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, Fazlur Rahman (1982) mengemukakan bahwa integrasi ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam merupakan tantangan utama yang harus dijawab oleh institusi pendidikan Islam. Model integrasi keilmuan seperti "Islamisasi Ilmu Pengetahuan" (Al-Faruqi, 1982) dan "Integrasi-Interkoneksi" (Abdullah, 2006) merupakan upaya untuk mewujudkan semangat integrasi keilmuan dalam pendidikan Islam kontemporer.

J. Pendidikan Berbasis Nilai dan Karakter

Abu Bakar sangat menekankan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral dalam sistem pendidikan yang dikembangkannya. Beliau sering mengingatkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan, Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer konsep ta'dib (pendidikan berbasis adab) yang tidak hanya mencakup transfer pengetahuan tetapi juga penanaman nilai-nilai dan pembentukan karakter. Lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan kurikulum yang menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.

K. Implementasi Kebijakan Abu Bakar dalam Pengembangan Pendidikan Islam Kontemporer

a). Reformasi Kurikulum Pendidikan Islam: Berdasarkan kebijakan Abu Bakar yang menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan pengetahuan praktis, reformasi kurikulum pendidikan Islam kontemporer dapat dilakukan dengan: Mengintegrasikan ilmu-ilmu modern dengan nilai-nilai Islam, Mengembangkan metodologi pembelajaran yang mendorong pemikiran kritis, Memperkuat komponen pendidikan karakter dan nilai serta Memperkenalkan keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital dan kewirausahaan dalam kerangka etika Islam.

b). Pengembangan Model Pembiayaan Pendidikan Islam: Terinspirasi dari kebijakan Baitul Mal Abu Bakar, pengembangan model pembiayaan pendidikan Islam kontemporer dapat mencakup: Revitalisasi institusi wakaf Pendidikan, Pengembangan kemitraan strategis dengan sektor

bisnis dan industry, Pemanfaatan teknologi financial technology (fintech) untuk penggalangan dana pendidikan Islam serta Pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh lembaga pendidikan Islam

c). Transformasi Digital Pendidikan Islam: Mengacu pada kebijakan penyebaran ilmu Abu Bakar, transformasi digital pendidikan Islam dapat diwujudkan melalui: Pengembangan platform pembelajaran daring yang komprehensif, Digitalisasi literatur klasik Islam, Pemanfaatan media sosial dan aplikasi mobile untuk dakwah dan Pendidikan, serta Pengembangan teknologi pembelajaran adaptif berbasis kecerdasan buatan.

d). Revitalisasi Fungsi Edukasi Masjid: Berdasarkan kebijakan Abu Bakar yang mempertahankan masjid sebagai pusat pendidikan, revitalisasi fungsi edukasi masjid dapat dilakukan melalui: Pengembangan program pendidikan non-formal di masjid, Integrasi fasilitas pendidikan modern dalam kompleks masjid, Pengembangan jaringan masjid-masjid Pendidikan serta Pelibatan masjid dalam program pendidikan seumur hidup (lifelong learning).

e). Pengembangan Metodologi Ijtihad Kolektif: Meneruskan semangat ijtihad Abu Bakar, pengembangan metodologi ijtihad kolektif dalam pendidikan Islam kontemporer dapat meliputi: Pembentukan dewan pakar lintas disiplin ilmu untuk membahas isu-isu kontemporer, Pengembangan metodologi penelitian Islam yang integrative, Penyelenggaraan forum-forum dialog ilmiah antara ulama tradisional dan ilmuwan modern serta Publikasi hasil ijtihad kolektif untuk pendidikan publik [50]

Kebijakan pendidikan Abu Bakar Ash-Shiddiq, meskipun diterapkan pada masa awal Islam, memiliki relevansi yang signifikan terhadap pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Kodifikasi Al-Qur'an, pendanaan berkelanjutan melalui Baitul Mal, penyebaran ilmu melalui berbagai media, penguatan fungsi edukasi masjid, dan pengembangan ijtihad merupakan warisan kebijakan yang dapat dicontoh dan

[50] Cizakca, M. (2018). A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. Brill Academic Publishers.

dikembangkan dalam konteks modern. Tantangan utama pendidikan Islam kontemporer adalah bagaimana mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan Abu Bakar ke dalam realitas abad ke-21 yang ditandai dengan globalisasi, revolusi teknologi, dan transformasi sosial-budaya. Integrasi ilmu pengetahuan, pendidikan berbasis nilai, pembiayaan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan pemikiran kritis merupakan area-area kunci yang perlu dikembangkan dengan mengambil inspirasi dari kebijakan pendidikan Abu Bakar.

Dengan mengambil inspirasi dari kebijakan Abu Bakar, pendidikan Islam kontemporer dapat mengembangkan model pendidikan yang tidak hanya menjaga otentisitas nilai-nilai Islam tetapi juga relevan dengan kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Moleong, Lexy J. 2017 Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya

Nawawi, Hadari. 1995, metode penelitian sosial . Yogyakarta Gadjah mada university

Azra Azyumardi, 1999 Edukasi islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. Jakarta logos

Harun nasution, 1992 islam di tinjau dari berbagai aspeknya Jakarta UI Press

Hasan syed nawab ali, 1994, The early development of Islamic education. new delhi adam publishers

Assegaf A.R 2004, filsafat Pendidikan islam, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Arifin, M 1993 Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara

Hadist Shahih Bukhari No 4986 kodifikasi Al-Qur'an oleh zaid bin Tsabit.

Cizakca, M. (2018). A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. Brill Academic Publishers.

Ramadan, T. (2016). Islamic Education in Western Contexts: Teacher, Preacher, or Both Routledge.

Bunt, G. R. (2018). Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority. University of North Carolina Press.

Omer, S. (2013). The Concept of the Mosque in Islam and Its Relevance to Contemporary Society. Journal of Islamic Architecture, 2(3), 106-119.

Muthoharoh, I. Analisis kebijakan Pendidikan islam pada masa khalifah umar bin khatab, jurnal penelitian Pendidikan islam, vol 11 no 1, hlm 47-64, 2023

Al-Mubarakpuri, S. R. (2011). The Sealed Nectar: Biography of the Noble Prophet. Darussalam Publishers.

Sidiq, Heri Purwanto & Indra, Hasbi (2023). "Model Kepemimpinan Pendidikan Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu ‘Anhu." edu-Leadership: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Volume 3, Nomor 1, hlm. 93–101.

Amalia Gultom, Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin, Jurnal EduReligia UIN Sumatera Utara, 2023.

Heri Purwanto Sidiq & Hasbi Indra, Model Kepemimpinan Pendidikan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Edu-Leadership, Vol. 3 No. 1, 2023

Rustandi, A. Pendididikan islam perspektif Abdullah Nashih Ulwan, Jurnal Pendidikan islam Al-Ilmi, vol 4 no 1, hlm 87-96, 2021

BAB 4
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA USMAN BIN AFFAN RA

(Vanessa R Iswandari)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam merupakan aspek penting dalam perkembangan peradaban umat Islam sejak masa awal kenabian hingga masa kekhalifahan. Salah satu periode penting dalam sejarah pendidikan Islam adalah masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan RA, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Masa kepemimpinan beliau ditandai dengan perluasan wilayah Islam yang sangat pesat, stabilitas politik yang relatif terjaga di awal pemerintahannya, serta perkembangan administrasi pemerintahan yang lebih sistematis.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Usman bin Affan RA dalam bidang pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap pelestarian ajaran Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu kebijakan paling monumental adalah kodifikasi Al-Qur'an menjadi satu mushaf standar yang dikenal dengan Mushaf Utsmani, yang kemudian disebarkan ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Tindakan ini tidak hanya menjaga keotentikan Al-Qur'an, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam sistem pendidikan Islam di masa-masa selanjutnya.[51]

Melalui pendahuluan ini, penulis ingin menggambarkan latar belakang pentingnya membahas kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Usman bin Affan RA, sebagai upaya untuk memahami kontribusi beliau dalam membangun peradaban Islam yang berakar pada ilmu dan pendidikan. Dengan menelusuri kebijakan-kebijakan yang diambil, diharapkan dapat ditemukan pelajaran berharga yang relevan bagi pengembangan sistem pendidikan Islam masa kini. [52]

---

[51] Hikmatul Hidayah Hidayah, "Pengertian, sumber, dan dasar pendidikan islam: bahasa indonesia." *Jurnal As-Said* 3.1 (2023), hlm. 33.

[52] Uswatun Hasanah, Heni Verawati. "Pendidikan Islam Multikultural: Analisis Historis Masa Dinasti Abbasiyah." *ASANKA: Journal of Social Science and Education* Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 198

1. **Rumusan Masalah**
   a. Apakah pengertian pendidikan Islam?
   b. Siapakah Usman bin Affan RA dalam sejarah Islam?
   c. Bagaimanakah proses pemilihan Usman bin Affan RA sebagai khalifah ketiga?
   d. Bagaimanakah perkembangan pendidikan agama Islam pada masa pemerintahan Usman bin Affan RA?
   e. Apa sajakah kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Usman bin Affan RA selama masa kekhalifahannya?
   f. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan Islam Usman bin Affan RA diimplementasikan di wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang luas?
2. **Metode Penelitian**

   Bentuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa dengan terstruktur dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Metode yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan di jurnal-jurnal yang relevan dan mempelajari serta memahami teori-teori yang ada pada beberapa literatur yang serupa dengan penelitian ini. Peneliti memanfaatkan sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan judul "*Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Usman Bin Affan Ra"*

TEORI

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Usman bin Affan Ra merupakan kelanjutan dari fondasi yang diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW dan khalifah sebelumnya, namun memiliki karakteristik tersendiri yang khas. Salah satu kebijakan paling menonjol adalah kodifikasi Al-Qur'an menjadi satu mushaf standar yang dikenal sebagai *Mushaf Utsmani*. Kebijakan ini sangat strategis dalam pengembangan pendidikan Islam karena menghilangkan potensi perbedaan bacaan yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah umat Islam.[53]

Kodifikasi Al-Qur'an ini secara tidak langsung memengaruhi sistem pendidikan karena memperjelas bahan ajar utama dalam pendidikan Islam, yakni Al-Qur'an. Dengan satu mushaf resmi yang

[53] Baharuddin Lutfi, *Kebijakan Pendidikan Islam: Refleksi Historis dan Kontemporer*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 44.

dijadikan acuan, para guru dan murid di seluruh wilayah kekuasaan Islam dapat mengakses teks yang seragam. Ini menandai awal dari standarisasi kurikulum pendidikan Islam secara tidak formal, sekaligus menumbuhkan budaya literasi Al-Qur'an di berbagai wilayah seperti Madinah, Kufah, dan Basrah. Selain pengaruh terhadap kurikulum, kebijakan Usman juga berdampak terhadap sistem kelembagaan pendidikan. Pengajaran yang berbasis halaqah yakni sistem belajar dalam lingkaran di masjid-masjid semakin berkembang. Masjid bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga menjadi pusat transmisi ilmu pengetahuan Islam, terutama tafsir, hadis, dan fikih dasar. Pada masa ini, mulai muncul struktur sosial ilmuwan awal seperti para qari, mufassir, dan guru-guru agama yang memiliki otoritas keilmuan.[54]

Kebijakan pendidikan pada masa Usman juga bersifat integratif, di mana pendidikan diposisikan sebagai bagian penting dari proyek sosial-politik Islam. Pendidikan menjadi alat untuk menjaga kesatuan umat, memperkuat identitas keislaman, dan memperluas pengaruh intelektual Islam ke wilayah baru. Model ini memperlihatkan bahwa sejak masa awal, pendidikan Islam bukan sekadar kegiatan transmisi ilmu, tetapi bagian dari visi besar peradaban Islam.[55]

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan berasal dari bahasa yunani, yaitu "*pedagogie"*, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan "*education*" yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan "tarbiyah" yang berarti pendidikan.[56]

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan memiliki makna yang semakin luas dan mendalam. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai proses sadar dan terencana untuk membimbing,

[54] M. Rasyid Fadli, *Sejarah Pendidikan Islam Klasik: Telaah Historis Perkembangan Ilmu Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 110.

[55] Abdullah Aziz, *Politik dan Pendidikan Islam Era Khulafaur Rasyidin*. (Malang: Literasi Nusantara, 2023), hlm. 65.

[56] Saifudin Zuhri., "Tarbiyah Ruhiyah (Pendidikan Ruhani) Bagi Anak Didik Dalam Perspektif Pemikiran Pendidikan Islam." *As-Sibyan*, (2019), hlm. 40

mengajar, dan melatih individu agar berkembang secara optimal, baik secara intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial.[57]

Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, tetapi juga menyucikan jiwa dan membentuk kepribadian yang mulia. Dengan demikian, pendidikan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan berperan penting dalam membentuk karakter serta peradaban suatu bangsa.[58]

Pendidikan secara umum adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup dan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Proses ini mencakup pengembangan aspek *kognitif* (pengetahuan), *afektif* (sikap dan nilai), serta *psikomotorik* (keterampilan) agar seseorang mampu menjalani kehidupannya secara mandiri, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dalam skala yang lebih luas, pendidikan juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial, pelestarian budaya, dan pembangunan peradaban. Oleh karena itu, pendidikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan individu dan masyarakat yang berkualitas serta berdaya saing tinggi di era global. Islam secara etimologi dari bahasa arab, terambil dari kosa kata salima yang berarti selamat. Kemudian dibentuk menjadi aslama yang berati taat dan berserah diri. Sehingga terbentuk kata Islam (*aslama-yuslimu-Islaman*) yang berarti damai, aman, dan selamat. Orang yang masuk Islam dinamakan Muslim. Dengan demikian, secara terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang ajarannya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup aturan mengenai hubungan antar sesama manusia serta interaksi manusia dengan alam semesta.[59]

---

[57] Rosmiati Ramli,, Nanang Prianto. "Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Kecerdasan Emosional." *Jurnal Al-Ibrah Vol.* 8 No. 1 (2019), hlm. 14

[58] Rahmasari, dkk, Penanaman nilai-nilai Islam dalam upaya pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, (2024), hlm. 33

[59] Yani, Nurvita. *Sistem Pembinaan Santri Bermasalah Pada Pesantren Al-Mujaddid Cot Ba'u Kota Sabang Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Bimbingan Islami*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2019).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa **Pendidikan Islam** adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh berdasarkan ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.[60] Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Proses ini mencakup pengajaran, pembiasaan, dan keteladanan dalam aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial, sehingga menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

B. Mengenal Usman Bin Affan RA

Usman bin Affan lahir di Makkah 5 tahun setelah Tahun Gajah, ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Thaif, usia Usman lima tahun lebih muda dari Rasulullah Saw. Nama lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab. Nasabnya bertemu Rasulullah Saw. pada Abdul Usman bin Affan merupakan salah satu tokoh terkemuka dari kaumnya pada masa jahiliyah. Ia berasal dari kabilah Bani Umayyah, dan dikenal sebagai seorang yang terpandang, kaya raya, terkenal, serta sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakatnya. Selain memiliki kepribadian yang pemalu dan santun dalam berbicara, Usman juga dikenal akan kesucian dan keluhuran akhlaknya. Sejak sebelum memeluk Islam, ia tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah melakukan perbuatan keji, serta menjauhi minuman keras seperti khamr. Usman bin Affan dikenal sangat menjaga pandangannya dan memiliki pengetahuan luas mengenai ilmu-ilmu yang berkembang di kalangan masyarakat Arab pada masa itu. Ia menekuni dunia perdagangan yang diwarisi dari ayahnya, dan berhasil mengembangkan hartanya hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam suku Quraisy.[61]

---

[60] A. Mustika Abidin, Pendidikan moral dan relevansinya dengan pendidikan Islam. *Jurnal Paris Langkis* Vol. 2. No. 1 (2021), hlm. 60

[61] Anita, Wahida Octaviana, Selfina, & Bahaking Rama. Biografi Usman Bin Affan, Kebijakan Politik yang di Jalankan dan Nepotisme dan Fitnatul Kubra. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. (2), (2024), hlm. 274–278.

Usman termasuk dalam golongan Assabiqunal Awwalunyaitu orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atas ajakan sahabatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW menikahkan Usman dengan putri beliau yang bernama Ruqayyah. Ketika kaum musyrik Quraisy menyiksa kaum Muslimin, Usman bin Affan bersama istrinya, Ruqayyah, hijrah ke Habasyah. Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke Makkah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Usman bin Affan menyaksikan hampir seluruh peristiwa penting dan peperangan bersama Rasulullah Saw, kecuali Perang Badar. Ia tidak ikut serta dalam perang tersebut karena tengah merawat istrinya, Ruqayyah, yang kemudian wafat tak lama setelah perang usai.[62]

Sebagai bentuk penghormatan, Rasulullah Saw. kemudian menikahkan Usman dengan putri beliau yang lain, Ummu Kultsum. Karena menikahi dua putri Rasulullah Saw, Usman diberi gelar Dzunnurain, yang berarti "pemilik dua cahaya." Usman bin Affan dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Dalam Perang Tabuk saat kaum Muslimin menghadapi kesulitan logistik dan keuangan. Usman menyumbangkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda, sehingga genap berjumlah seribu kendaraan. Ia juga memberikan sumbangan sebesar 10.000 dinar untuk mendukung pasukan Usrah (pasukan dalam kesusahan). Selain itu, Usman sering menginfakkan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Salah satu contohnya adalah saat ia membeli sebuah sumur, lalu mewakafkannya untuk keperluan umat Islam.[63]

C. Proses Pemilihan Usman bin Affan

Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 644 M (23 H) akibat serangan seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah, umat Islam menghadapi kebutuhan mendesak untuk memilih pemimpin baru. Sebelum meninggal dunia, Umar bin Khattab telah membentuk sebuah dewan syura yang terdiri dari enam sahabat utama Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zubair bin

[62] M. Wildan. Kepemimpinan Usman bin Affan (Kebijakan dan Tantangan). *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 13, No. (2), (2019), hlm. 10.

[63] Ahmad Baso. *Islamisasi Nusantara: Dari Era Khalifah Usman bin Affan hingga Wali Songo*. (Pustaka Afid, 2019), hlm. 34.

Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Keenam sahabat tersebut merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam Islam yang dikenal akan ketakwaan dan integritasnya.

Untuk menjaga netralitas dan kelancaran proses pemilihan, Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri dari pencalonan dan mengambil peran sebagai penengah serta pemegang amanah dalam proses musyawarah. Ia menjalankan tugasnya dengan sangat cermat, melakukan konsultasi kepada masyarakat luas, termasuk kaum laki-laki, perempuan, dan pemuda, guna mengetahui siapa yang lebih mereka kehendaki untuk menjadi khalifah. Setelah mempertimbangkan aspirasi umat, mayoritas kaum Muslimin menyatakan dukungannya kepada Utsman bin Affan.

Akhirnya, Abdurrahman bin Auf secara resmi membaiat Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, dan masyarakat pun menyatakan baiatnya secara serentak. Terpilihnya Utsman melalui mekanisme syura ini mencerminkan prinsip-prinsip musyawarah dan keterlibatan umat dalam kepemimpinan Islam, serta menegaskan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam memilih seorang pemimpin.[64]

D. Pendidikan Agama Islam Pada Masa Usman Bin Affan

Pada masa pemerintahannya, pendidikan agama Islam terus diberikan dan dikembangkan. Selama masa pemerintahan Usman bin Affan, pendidikan agama Islam terutama didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Usman bin Affan melanjutkan kebijakan yang diberlakukan oleh khalifah sebelumnya, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dalam memperluas penyebaran Islam dan mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam.

Selain itu, pendidikan agama Islam di masa Utsman bin Affan juga melibatkan pengajaran nilai-nilai moral dan etika Islam. Beliau mendukung dan mendorong para pengajar untuk tidak hanya fokus pada aspek hafalan, tetapi juga menanamkan akhlak mulia kepada para peserta didik. Pendidikan diarahkan untuk membentuk pribadi Muslim yang bertakwa, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan kasih sayang ditanamkan sejak dini dalam proses pembelajaran,

[64] Zulkifli Afdhal,, "Sejarah Peradaban Islam." *Global Eksekutif Teknologi*, (2023).

baik melalui keteladanan guru maupun materi yang diajarkan. Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa itu tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara keilmuan, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.

Konsep pendidikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan lebih merakyat dan sederhana untuk semua siswa yang ingin mempelajari ajaran Islam, karena sistem pendidikan saat itu bersifat terbuka tanpa membedakan status sosial, suku, atau latar belakang ekonomi. Pendidikan diberikan secara cuma-cuma di masjid-masjid dan majelis-majelis ilmu, sehingga setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. Para sahabat dan guru agama tidak hanya mengajarkan ilmu secara formal, tetapi juga membimbing masyarakat melalui teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat kesederhanaan ini menjadikan pendidikan Islam pada masa Utsman sangat membumi dan dekat dengan masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat pemahaman serta pengamalan ajaran Islam di kalangan umat.[65]

Bakar Ash-Shiddiq yaitu pengumpulan Al-Qur'an dari hafalan-hafalan para sahabat penghafal al-Qur'an. Bundelan itu disimpan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian diserahkan kepada Khalifah kedua Umar Ibn Khattab, setelah itu dititipkan Khalifah Umar kepada puterinya Hafsah binti Umar yang juga istri Rasulullah Saw. Perubahan kebijakan yang dilakukan Khalifah Utsman yang terkait dengan pendidikan adalah yaitu:

a. Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa Khalifah Utsman bin Affan diserahkan pada umat itu sendiri, artinya pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Dengan demikian, para pendidik melaksanakan tugasnya sendiri dan hanya mengharapkan keridhaan Allāh.
b. Para Sahabat-Sahabat senior diberikan keleluasaan untuk meninggalkan Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka inginkan.

Dua kebijakan ini memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan pendidikan Islam. Para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada

[65]Lukman Asha., "Manajemen Pendidikan Madrasah Dinamika dan Studi Perbandingan Madrasah Dari Masa Ke Masa." (2020).

masyarakat, sehingga pusat pendidikan mulai tersebar ke daerah-daerah lain dan para penuntut ilmu ini dapat menuntut atau menyebarkan ilmunya di berbagai daerah yang berbeda, jadi tidak hanya di dalam daerah yang ia tempat tinggali. Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang seperti itu menjadi lebih merata dan lebih mudah dijangkau oleh oleh para penuntut ilmu. Pada masa Khalifah Utsman dilakukan pula pengelompokan pada obyek pendidikan Islam dan menerapkan metode pendidikan yang disesuaikan dengan kelompok tersebut. Pengelompokan ini merupakan awal mula adanya klasifikasi dalam obyek pendidikan Islam, yang terdiri dari:[66]

1) Orang Dewasa atau Orang Tua yang Baru Masuk Islam

   Kelompok ini terdiri dari orang dewasa yang baru memeluk Islam dan masih dalam tahap awal pemahaman agama. Metode yang diterapkan adalah ceramah, yang memberikan penjelasan umum tentang ajaran Islam. Selain itu, mereka juga dilatih untuk menghafal (hafalan) dan diberi contoh-contoh praktis untuk memahami cara beribadah dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari sebagai Muslim. Pendekatan ini penting untuk membantu mereka menginternalisasi ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami.

2) Anak-anak yang Orang Tuanya Telah Lama Masuk Islam atau yang Baru Menganut Islam

   Kelompok ini mencakup anak-anak yang sudah terbiasa dengan ajaran Islam sejak kecil. Metode yang digunakan untuk pendidikan mereka lebih fokus pada hafalan (terutama menghafal Al-Qur'an) dan latihan, yang bertujuan untuk memperkenalkan mereka dengan dasar-dasar agama. Pada tahap ini, anak-anak lebih banyak diajari cara menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa serta melatih mereka untuk memahami nilai-nilai dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

3) Orang Tua yang Telah Lama Menganut Islam

   Kelompok ini berisi orang dewasa atau orang tua yang telah lama memeluk Islam. Untuk mereka, pendidikan difokuskan pada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan hafalan. Ceramah memberikan

[66] Rony Sandra Yofa Zebua, dkk. "Perkembangan Pendidikan Islam pada Periode Khulafāur Rāsyidīn dan Implikasinya terhadap Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* Vol. 5 No. .1 (2020), hlm. 115

pengetahuan umum mengenai ajaran Islam, sementara diskusi dan tanya jawab memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi lebih mendalam tentang hukum Islam dan praktek kehidupan sehari-hari. Hafalan juga diterapkan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Al-Qur'an dan hadis.

4) Orang yang Mengkhususkan Dirinya Menuntut Ilmu Secara Luas dan Mendalam

Kelompok ini adalah mereka yang ingin lebih mendalam dalam mempelajari ilmu agama. Mereka diberikan pendidikan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi yang lebih intens. Kelompok ini tidak hanya mempelajari Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga berfokus pada ilmu-ilmu Islam lainnya, seperti fiqh, tafsir, dan sejarah Islam. Diskusi dan tanya jawab memberi kesempatan untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan mengembangkan pemikiran kritis terhadap berbagai aspek ajaran Islam.[67]

E. Kebijakan Pendidikan pada Masa Usman Bin Affan RA

Pada masa pemerintahan Usman bin Affan Ra, kebijakan pendidikan Islam mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Salah satu kebijakan utama dan paling monumental yang diterapkan adalah kodifikasi Al-Qur’an atau penyatuan mushaf. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan bacaan (qira'at) di berbagai wilayah yang dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan. Usman kemudian memerintahkan penulisan ulang Al-Qur’an berdasarkan satu dialek, yaitu dialek Quraisy, dan mendistribusikannya ke berbagai wilayah Islam. Kebijakan ini menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber utama dan standar dalam pendidikan Islam pada masa itu.[68]

Selain kodifikasi mushaf, Usman juga mendukung terbentuknya pusat-pusat ilmu keislaman di kota-kota besar seperti Madinah, Kufah, dan Basrah. Masjid pada masa ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran agama. Pendidikan dilakukan secara informal dalam bentuk halaqah

[67] Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja, *Manajemen Pendidikan Islam*. Sada Kurnia Pustaka, (2023), hlm. 21

[68] Rizki Akbar. *Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin: Analisis Historis terhadap Kebijakan Pendidikan Usman bin Affan RA*. Jakarta: Penerbit Edukita, 2021), hlm. 45.

(lingkaran belajar), yang dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi dan ulama lokal. Hal ini mendorong terciptanya jaringan ilmiah awal di dunia Islam yang sangat berpengaruh pada masa setelahnya.[69]

Kebijakan pendidikan Islam Usman juga mencerminkan strategi integrasi antara kebijakan negara dan dakwah Islam. Usman memberikan wewenang kepada para sahabat yang ditugaskan ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam, termasuk aspek keilmuan. Hal ini menciptakan sistem distribusi guru agama ke berbagai daerah, yang sekaligus menjadi sarana dakwah dan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan ini bersifat sentralistik dalam standar ajaran, namun fleksibel dalam implementasi lapangan. Secara ringkas, kebijakan pendidikan Islam Usman bin Affan Ra dapat dijabarkan sebagai berikut: [70]

a. Kodifikasi dan penyebaran Mushaf Utsmani ke seluruh wilayah Islam sebagai upaya standarisasi bahan ajar utama.
b. Penguatan masjid sebagai pusat pembelajaran Islam informal.
c. Distribusi sahabat dan ulama ke berbagai wilayah untuk menyebarkan ajaran dan menjadi pengajar.
d. Integrasi antara sistem pemerintahan dan pendidikan, di mana khalifah mengambil peran langsung dalam menjaga keotentikan ilmu.
e. Peningkatan literasi Al-Qur'an di kalangan masyarakat Muslim sebagai pondasi dasar pendidikan.

Semua kebijakan ini menunjukkan bahwa Usman bin Affan tidak hanya fokus pada aspek administratif kekhalifahan, tetapi juga memberi perhatian besar pada konsolidasi keilmuan dan pendidikan Islam.

Jadi, dapat disimpulkan kebijakan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Usman bin Affan Ra menunjukkan perhatian serius terhadap konsolidasi ilmu agama di tengah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Usman bin Affan menetapkan kebijakan yang paling fundamental, yaitu kodifikasi Al-Qur'an dalam bentuk *Mushaf Utsmani*, sebagai upaya standarisasi bacaan dan isi Al-Qur'an yang menjadi bahan utama pendidikan Islam. Kebijakan ini

[69]Latifah Maulidiyah. *Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 63.

[70] Nur Aisyah & Fahrur Rozi. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Usman bin Affan RA dalam Perspektif Politik Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6 No. 1. (2022), hlm. 72.

berdampak besar terhadap keseragaman ajaran di seluruh wilayah kekhalifahan dan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam.

F. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Usman bin Affan RA di Berbagai Wilayah Kekuasaan Islam

a. Penyebaran dan Standarisasi Mushaf Al-Qur'an

Salah satu kebijakan paling monumental yang diterapkan oleh Usman bin Affan terkait dengan pendidikan Islam adalah penyebaran mushaf Al-Qur'an yang terstandarisasi. Setelah masa hidup Nabi Muhammad SAW, banyak sahabat yang hafal Al-Qur'an dan mengajarkan kepada umat Islam. Namun, dengan semakin banyaknya wilayah yang ditaklukkan oleh umat Islam, muncul berbagai perbedaan dalam cara membaca dan menuliskan Al-Qur'an.

Usman bin Affan melihat kebutuhan untuk menyatukan bacaan Al-Qur'an di seluruh dunia Islam untuk mencegah perbedaan yang bisa menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk menyalin mushaf Al-Qur'an yang telah distandarisasi sesuai dengan bacaan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Mushaf yang terstandarisasi ini kemudian disalin ke berbagai wilayah, seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Kebijakan ini bukan hanya berfungsi untuk mengamankan keaslian teks Al-Qur'an, tetapi juga sebagai alat pendidikan yang efektif, mengingat bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran dalam Islam yang harus dipelajari oleh umat.[71]

b. Pengiriman Qari dan Ulama ke Wilayah-Wilayah Baru

Selain kebijakan standarisasi mushaf, Usman juga berupaya mendistribusikan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama Islam, ke daerah-daerah yang baru saja ditaklukkan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengirimkan qari (pembaca Al-Qur'an) dan ulama (ahli agama) ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam, baik dalam aspek ibadah maupun dalam pengajaran ilmu pengetahuan Islam secara umum. Para ulama ini diberi tugas untuk mengajarkan umat Islam tentang fiqh, tafsir,

[71] Dewi Arini. Peran Khalifah Usman bin Affan dalam Standardisasi Al-Qur'an dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyatuna*, Vol. 8, No. (2), (2022), hlm. 85.

hadits, serta ilmu Al-Qur'an yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Pengiriman ulama dan qari ini sangat penting, karena wilayah Islam pada masa Usman sangat luas, mencakup kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar wilayah Asia Barat. Dengan pengiriman ini, pendidikan Islam dapat diterapkan secara konsisten dan seragam di berbagai tempat, memperkuat kohesi umat Islam yang berasal dari latar belakang etnis dan budaya yang berbeda. Para ulama juga berperan dalam membimbing masyarakat setempat agar lebih memahami agama secara mendalam dan memperkuat aqidah Islam.[72]

c. Pendirian Halaqah dan Masjid sebagai Pusat Pendidikan

Selain pengiriman ulama dan qari, Usman bin Affan juga mendirikan banyak masjid di berbagai wilayah, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama. Pada masa ini, masjid menjadi tempat utama untuk kegiatan pendidikan, di mana para sahabat dan generasi setelahnya mengajar dan belajar. Meskipun tidak ada madrasah formal seperti yang akan berkembang pada masa berikutnya, halaqah atau lingkaran belajar di masjid menjadi bentuk utama pengajaran Islam pada masa itu.

Masjid-masjid ini tidak hanya digunakan untuk ibadah, tetapi juga untuk kegiatan ilmiah dan pendidikan. Halaqah yang dilaksanakan di masjid-masjid ini menjadi wadah bagi umat Islam untuk memperdalam ilmu agama mereka, baik dalam bidang tafsir, fiqh, maupun hadis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa Usman berfokus pada pembelajaran yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan sehari-hari.[73]

d. Pengaruh Sosial dan Politik dalam Kebijakan Pendidikan

Pendidikan Islam pada masa Usman bin Affan juga tidak terlepas dari pengaruh sosial dan politik. Dalam upayanya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, Usman menganggap bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk menyatukan umat Islam dan menjaga stabilitas politik. Dengan penyebaran ajaran Islam yang terstandarisasi, tidak hanya pembelajaran agama yang

[72] Abdurrahman Wahid. *Transformasi Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin*. (Surabaya: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 27

[73] Halimatus Sakdiah. *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin*. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 134.

diperhatikan, tetapi juga pemahaman tentang politik Islam, hukum, dan administrasi negara.

Pada saat itu, wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas menuntut adanya integrasi yang baik antar wilayah. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh Usman berfungsi juga sebagai sarana untuk memperkuat persatuan umat Islam. Pendidikan Islam dianggap sebagai instrumen penting dalam membangun solidaritas antar wilayah yang baru saja bergabung dalam kekuasaan Islam.[74]

e. Penyebaran Ilmu dan Penguatan Infrastruktur Pendidikan

Dalam hal infrastruktur, Usman juga berperan dalam penyediaan fasilitas pendidikan seperti masjid, tempat belajar, dan penyebaran literatur Islam ke wilayah-wilayah yang lebih jauh. Di samping itu, pembelajaran melalui teks-teks Al-Qur'an yang distandarisasi menjadi alat penting dalam pendidikan Islam pada masa itu. Usman berusaha memastikan bahwa seluruh umat Islam di wilayah kekuasaannya mendapatkan akses yang sama terhadap pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya, dengan tujuan untuk memperkuat dan memperdalam pemahaman Islam.[75]

Jadi, dapat disimpulkan Pada masa pemerintahan Usman bin Affan RA (644–656 M), pendidikan Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai Khalifah ketiga dalam sejarah Islam, Usman tidak hanya dikenal karena keberhasilannya dalam menaklukkan wilayah-wilayah baru, tetapi juga karena perhatiannya terhadap pembangunan struktur sosial dan kebudayaan Islam, salah satunya dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Usman bin Affan mencakup penguatan sistem pengajaran, distribusi ilmu, dan penyebaran mushaf Al-Qur'an yang terstandarisasi ke seluruh wilayah kekuasaan Islam.

---

[74] Fitriani. *Pendidikan Islam Masa Sahabat: Integrasi Nilai dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 150.

[75] Nur Azizah. Pengembangan Pendidikan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin: Analisis Historis Sosial Politik. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. (1), (2023), hlm. 115.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa Khalifah Usman bin Affan RA memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan peradaban Islam. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Usman dalam bidang pendidikan, seperti penyusunan Mushaf Utsmani dan perluasan sistem pendidikan yang merata, telah memberikan dampak besar terhadap kelangsungan pelestarian ajaran Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Muslim. Dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan di masjid dan melibatkan sahabat-sahabat senior dalam penyebaran ilmu, Khalifah Usman tidak hanya memperkenalkan sistem pendidikan yang terstruktur, tetapi juga membuka kesempatan bagi setiap individu, tanpa memandang status sosial, untuk memperoleh pengetahuan agama.

Metode pendidikan yang diterapkan, seperti ceramah, hafalan, dan diskusi, serta pengelompokan peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka, menunjukkan keberagaman pendekatan yang berfokus pada pembentukan karakter dan pemahaman ajaran Islam yang mendalam. Keberhasilan kebijakan ini membuktikan pentingnya pendidikan yang menyeluruh, tidak hanya untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan moral yang mulia di kalangan umat Islam.

Melalui kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilaksanakan pada masa Khalifah Usman bin Affan, kita dapat memetik pelajaran berharga yang relevan dengan perkembangan sistem pendidikan Islam masa kini. Pendidikan yang merata, adil, dan berbasis pada nilai-nilai moral dan spiritual akan selalu menjadi pondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, beradab, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Sebagai umat yang mewarisi tradisi pendidikan ini, kita harus terus melestarikan dan mengembangkan pendidikan Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman, serta tetap menjadi sumber pencerahan dan keberkahan bagi umat Islam dan seluruh umat manusia.

Kebijakan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Usman bin Affan Ra menunjukkan perhatian serius terhadap konsolidasi ilmu agama di tengah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Usman bin Affan menetapkan kebijakan yang paling fundamental, yaitu kodifikasi Al-Qur’an dalam bentuk *Mushaf Utsmani*, sebagai upaya standarisasi bacaan dan isi Al-Qur’an yang menjadi bahan utama pendidikan Islam.

Pada masa pemerintahan Usman bin Affan RA (644–656 M), pendidikan Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai Khalifah ketiga dalam sejarah Islam, Usman tidak hanya dikenal karena keberhasilannya dalam menaklukkan wilayah-wilayah baru, tetapi juga karena perhatiannya terhadap pembangunan struktur sosial dan kebudayaan Islam, salah satunya dalam bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. Mustika. (2021). Pendidikan moral dan relevansinya dengan pendidikan Islam. *Jurnal Paris Langkis*, Vol. 2, No. 1.

Aisyah, Nur, & Rozi, Fahrur. (2022). Kebijakan pendidikan Islam masa Usman bin Affan RA dalam perspektif politik pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1.

Akbar, Rizki. (2021). *Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin: Analisis Historis terhadap Kebijakan Pendidikan Usman bin Affan RA*. (Jakarta: Penerbit Edukita).

Anita, Wahida Octaviana, Selfina, & Bahaking Rama. (2024). Biografi Usman Bin Affan, kebijakan politik yang dijalankan dan nepotisme dan Fitnatul Kubra. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, 274–278.

Arini, Dewi. (2022). Peran Khalifah Usman bin Affan dalam standardisasi Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyatuna*, Vol. 8, No. 2.

Asha, Lukman. (2020). Manajemen pendidikan madrasah dinamika dan studi perbandingan madrasah dari masa ke masa.

Aziz, Abdullah. (2023). *Politik dan Pendidikan Islam Era Khulafaur Rasyidin*. (Malang: Literasi Nusantara).

Azizah, Nur. (2023). Pengembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin: Analisis historis sosial politik. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1.

Baso, Ahmad. (2019). *Islamisasi Nusantara: Dari Era Khalifah Usman bin Affan hingga Wali Songo*. (Pustaka Afid).

Fadli, M. Rasyid. (2020). *Sejarah Pendidikan Islam Klasik: Telaah Historis Perkembangan Ilmu Islam*. (Jakarta: Prenada Media).

Fitriani. (2021). *Pendidikan Islam Masa Sahabat: Integrasi Nilai dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: Deepublish).

Hasanah, Uswatun, & Verawati, Heni. (2022). Pendidikan Islam multikultural: Analisis historis masa Dinasti Abbasiyah. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, Vol. 3, No. 2.

Hidayah, Hikmatul Hidayah. (2023). Pengertian, sumber, dan dasar pendidikan Islam: Bahasa Indonesia. *Jurnal As-Said*, Vol. 3, No. 1.

Lutfi, Baharuddin. (2021). *Kebijakan Pendidikan Islam: Refleksi Historis dan Kontemporer*. (Yogyakarta: Deepublish).

Mauldfi Sastraatmadja, Achmad Harristhana. (2023). *Manajemen Pendidikan Islam*. (Sada Kurnia Pustaka).

Maulidiyah, Latifah. (2020). *Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Deepublish).

Rahmasari, dkk. (2024). Penanaman nilai-nilai Islam dalam upaya pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*.

Ramli, Rosmiati, & Prianto, Nanang. (2019). Peranan guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan kecerdasan emosional. *Jurnal Al-Ibrah*, Vol. 8, No. 1.

Sakdiah, Halimatus. (2021). *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin*. (Jakarta: Kencana).

Wahid, Abdurrahman. (2020). *Transformasi Pendidikan Islam Masa Khulafaur Rasyidin*. (Surabaya: Pustaka Ilmu).

Wildan, M. (2019). Kepemimpinan Usman bin Affan (kebijakan dan tantangan). *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 13, No. 2.

Yani, Nurvita. (2019). *Sistem Pembinaan Santri Bermasalah Pada Pesantren Al-Mujaddid Cot Ba'u Kota Sabang Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Bimbingan Islami*. (Tesis tidak diterbitkan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Zebua, Rony Sandra Yofa, dkk. (2020). Perkembangan pendidikan Islam pada periode Khulafāur Rāsyidīn dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Vol. 5, No. 1.

Zuhri, Saifudin. (2019). Tarbiyah ruhiyah (pendidikan ruhani) bagi anak didik dalam perspektif pemikiran pendidikan Islam. *As-Sibyan*.

Zulkifli, Afdhal. (2023). *Sejarah Peradaban Islam*. (Global Eksekutif Teknologi).

BAB 5
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KHOLIFAH ALI BIN ABI THALIB RA

Della Yulanda

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam memiliki akar sejarah yang sangat kuat dalam peradaban Islam, terutama sejak masa kenabian hingga kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Salah satu periode yang penting untuk dikaji adalah masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA, khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin. Masa kepemimpinan beliau tidak hanya dikenal dengan dinamika politik dan konflik internal umat Islam seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, tetapi juga menampilkan upaya-upaya strategis dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai keilmuan dan pendidikan Islam. Dalam konteks ini, memahami kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Ali menjadi penting sebagai cerminan bagaimana pendidikan tetap mendapat perhatian serius meski dalam kondisi politik yang penuh gejolak.

Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai ilmu dan memiliki kedalaman intelektual yang luar biasa. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadits, dan sering dijadikan rujukan dalam hal fatwa maupun ilmu agama. Kepedulian beliau terhadap pendidikan bukan hanya bersifat teoretis, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan- kebijakan yang mendorong penyebaran ilmu, penguatan peran para ulama, dan pembinaan generasi muda Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah situasi sosial-politik yang menantang.

Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, pendidikan Islam tidak hanya diarahkan pada aspek formalitas institusi, tetapi lebih pada penguatan karakter, moralitas, dan keilmuan melalui mekanisme halaqah (majelis ilmu), khutbah, dan diskusi-diskusi ilmiah. Ia juga menekankan pentingnya pengajaran Al-Qur'an, hadits, dan pemahaman terhadap hukum-hukum Islam. Dalam pandangan beliau, pendidikan adalah sarana untuk memperbaiki umat, membangun kesadaran sosial, serta menanamkan nilai-nilai keadilan

dan kebenaran. Pandangan ini sangat penting karena mencerminkan hubungan erat antara pendidikan dan pembangunan peradaban Islam.

Lebih jauh, kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Ali juga mencerminkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Ia tidak membatasi akses ilmu hanya pada kelompok tertentu, melainkan mendorong semua lapisan masyarakat untuk menuntut ilmu. Bahkan, para wanita dan anak-anak pun diberi ruang dalam proses pendidikan, sejauh memungkinkan dalam konteks sosial masyarakat saat itu. Dalam pengangkatan pejabat dan gubernur di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, Ali cenderung memilih orang-orang yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga berilmu, jujur, dan amanah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan diposisikan sebagai modal utama dalam membentuk kepemimpinan yang adil dan visioner.

Relevansi kebijakan pendidikan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA juga dapat dikaji dari perspektif kontemporer, terutama dalam menjawab tantangan dunia pendidikan Islam saat ini. Banyak nilai dan prinsip yang beliau terapkan yang bisa dijadikan inspirasi dalam membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter, pengembangan intelektual, dan penguatan nilai-nilai spiritual. Di tengah tantangan globalisasi dan degradasi moral, pelajaran dari masa Khalifah Ali dapat menjadi rujukan penting dalam merumuskan arah pendidikan Islam yang berkelanjutan dan bermakna.

Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran strategis pendidikan dalam sejarah Islam serta menggali nilai-nilai kebijakan yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan modern. Dengan memahami warisan intelektual dari para pemimpin awal Islam, diharapkan umat Islam masa kini dapat membangun sistem pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA?
2. Apa saja kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Ali

RA?

3. Apa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan saat itu?
4. Apa relevansi kebijakan pendidikan Khalifah Ali RA bagi pendidikan Islam masa kini?
5. Bagaimana kurikulum Pendidikan islam pada masa Khalifah Ali RA?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan *(library research),* yang berfokus pada analisis kebijakan pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA. Karena objek kajian bersifat historis, metode ini dianggap paling relevan untuk menelusuri data dan informasi dari berbagai sumber primer maupun sekunder yang terpercaya. Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup kitab-kitab sejarah Islam klasik, seperti *Tarikh al-Tabari*, *Nahjul Balaghah*, dan karya-karya ulama terdahulu yang mendokumentasikan peristiwa dan kebijakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Selain itu, jurnal ilmiah, buku akademik modern, dan artikel penelitian yang membahas pendidikan Islam pada masa awal Islam turut dijadikan rujukan untuk memperkuat validitas data.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur yang relevan, serta analisis terhadap dokumen-dokumen sejarah yang merekam tindakan, keputusan, dan kebijakan Khalifah Ali RA dalam bidang pendidikan. Data juga diperoleh dari penafsiran khutbah, surat, dan pidato-pidato Khalifah Ali yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan tematik, dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema kebijakan, konteks sosial-politik, tantangan, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim saat itu.

Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif historis, yaitu membandingkan kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Ali dengan kebijakan pendidikan pada masa khalifah sebelumnya untuk melihat kesinambungan dan perbedaan pendekatan. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA, termasuk kontribusinya terhadap perkembangan keilmuan umat Islam, serta relevansinya

dengan tantangan pendidikan Islam masa kini.

TEORI

Kebijakan pendidikan adalah rangkaian prinsip atau pedoman yang dirancang oleh pemerintah atau otoritas pendidikan untuk mengatur sistem pendidikan dalam suatu negara. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti kurikulum, pendanaan, struktur institusi, dan pengakuan terhadap pendidikan agama. Dalam sejarah Islam, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh khalifah-khalifah berperan penting dalam membentuk karakter generasi Muslim, termasuk pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA.(Wahyudi, 2021)

Pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan moralitas. Ali bin Abi Thalib RA sangat menghargai ilmu, bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dan memberikan ajaran tentang pentingnya pendidikan, baik agama maupun pengetahuan umum. Pendidikan pada masa ini tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga meliputi ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan umat.

Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib RA, kebijakan pendidikan yang diterapkan lebih mengutamakan penyebaran ilmu pengetahuan dan pemahaman agama yang mendalam. Ali bin Abi Thalib RA memandang pendidikan sebagai salah satu cara utama untuk membentuk masyarakat yang adil dan berilmu. Beliau mendorong penyebaran ilmu di kalangan umat Islam dan menekankan pentingnya pengajaran akhlak dan moral dalam pendidikan.(Abdul Syakul Al-Rizzi, 2021)

Di masa Ali, pendidikan sangat berbasis pada pengajaran secara langsung, seperti halaqah (diskusi keilmuan) yang sering dilakukan di masjid atau tempat-tempat umum lainnya. Ali bin Abi Thalib RA juga dikenal memiliki banyak murid yang menjadi ulama besar, seperti Hasan dan Husain (anak-anaknya), serta banyak sahabat lain yang memanfaatkan kesempatan untuk belajar langsung dari beliau.

Namun, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA tidak tanpa tantangan. Salah satunya adalah adanya perpecahan internal dalam tubuh umat Islam, yang berpengaruh pada

stabilitas politik dan sosial. Konflik-konflik seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang luas di seluruh wilayah kekhalifahan. Selain itu, belum ada struktur formal pendidikan seperti yang ada sekarang, sehingga pendidikan lebih bersifat informal dan terbatas pada kalangan tertentu.

Teori dan Pandangan Ahli tentang Kebijakan Pendidikan pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA Beberapa pandangan ahli tentang kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Abduh (1901)

   Menurut Abduh, pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib RA mengutamakan pengembangan akal dan pengetahuan sebagai bagian dari keimanan. Ali mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya untuk memahami agama tetapi juga untuk memperbaiki kehidupan sosial dan politik umat. Abduh berpendapat bahwa kebijakan pendidikan pada masa itu sangat relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang ada dalam ajaran Islam.
2. Ibn Abi Shaiba (2005)

   Ibn Abi Shaiba menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib RA berfokus pada pengajaran moral dan akhlak. Dalam pandangan beliau, Ali menekankan pada pembentukan karakter yang mulia melalui pengajaran langsung dari seorang guru kepada murid, dengan mencontohkan teladan hidup yang baik.
3. Al- Tha'labi (1997)

   Al-Tha'labi menilai bahwa Ali bin Abi Thalib RA memberikan perhatian besar terhadap pendidikan anak-anak dan generasi muda. Ali mendorong mereka untuk belajar ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan mengintegrasikan ilmu agama dengan kehidupan sehari-hari. Ini tercermin dari pengajaran beliau kepada anak-anaknya serta sahabat- sahabatnya yang memegang peran penting dalam menyebarkan ilmu setelah masa kepemimpinan beliau.(Dr. H. Murodi, 2016)
4. Abu Tahyan Al-Tahwidi (1998)

   Al-Tawhidi berpendapat bahwa sistem pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA sangat fleksibel dan terbuka, dengan banyaknya halaqah ilmiah dan diskusi yang diadakan secara terbuka untuk masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Ali memahami

pentingnya kebebasan berfikir dalam menciptakan generasi yang berilmu dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Dari pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA lebih berfokus pada pengembangan karakter moral, pemahaman agama yang mendalam, serta pencarian ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan internal dalam kehidupan politik, pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Kebijakan pendidikan ini tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat memperkaya kehidupan umat Islam secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan adalah serangkaian prinsip atau pedoman yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan untuk mengatur sistem Pendidikan suatu negara. Kebijakan ini mencakup aspek kurikulum, pendanaan, struktur institusi, hingga pengakuan pendidikan agama.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Pendidikan Islam Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib RA

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA, pendidikan Islam berada dalam kondisi yang cukup dinamis dan penting, meskipun diliputi dengan tantangan-tantangan politik yang berat. Ali bin Abi Thalib RA menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam pemerintahan beliau. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam kebijakan pendidikan pada masa beliau adalah penekanan pada pengajaran ilmu agama yang mendalam dan pembentukan karakter moral umat.(Tobi, 2025) Ali sangat percaya bahwa pendidikan adalah sarana untuk memperbaiki kehidupan umat dan memperkuat iman mereka terhadap Allah SWT. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek teori atau teks agama, tetapi juga menekankan pada praktik dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi sosial dan politik pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA juga berpengaruh besar terhadap sistem pendidikan yang

diterapkan. Masa kepemimpinan beliau dikelilingi oleh berbagai konflik internal umat Islam, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin. Ketegangan politik ini menyebabkan sebagian besar perhatian umat Islam tertuju pada masalah politik dan keamanan, yang membatasi ruang untuk pengembangan pendidikan secara luas. Namun, meskipun ada situasi yang penuh ketegangan ini, Ali bin Abi Thalib RA tidak melupakan pentingnya pendidikan dan tetap berusaha menciptakan peluang bagi umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang agama.

Dalam konteks pendidikan agama, Khalifah Ali bin Abi Thalib RA sangat menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap Al-Qur'an dan Hadits. Beliau tidak hanya menjadi sumber ilmu bagi sahabat-sahabatnya, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk belajar. Di masa ini, banyak halaqah (kelompok studi) yang digelar di masjid dan tempat-tempat terbuka untuk memberikan pengajaran agama secara langsung kepada umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib RA tidak hanya terbatas pada para elit atau kalangan tertentu, tetapi terbuka untuk semua kalangan masyarakat, baik pria maupun wanita.(Prof.Dr.H.J Suyuthi Pulungan, 2019)

Ali bin Abi Thalib RA juga memperkenalkan konsep pembelajaran berbasis diskusi dan dialog, yang menjadi ciri khas dalam pendidikan Islam pada masa beliau. Metode pengajaran yang digunakan adalah dengan cara berbicara langsung kepada murid dan berdiskusi dengan mereka tentang berbagai persoalan kehidupan yang berkaitan dengan ajaran Islam. Sebagai seorang ulama besar, Ali dikenal sangat bijaksana dalam memberikan penjelasan dan mendidik umat Islam dengan cara yang penuh kasih sayang. Beliau banyak mengajarkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar dalam pembentukan akhlak umat Islam, seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran.

Meskipun demikian, pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA tidak lepas dari beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya sistem pendidikan formal yang terstruktur seperti yang ada di zaman modern. Pendidikan lebih bersifat informal dan bersandar pada pengajaran langsung di masjid, rumah, atau tempat terbuka. Selain itu, kondisi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Ali juga mempengaruhi keberlangsungan pengajaran

ilmiah. Tetapi meskipun begitu, Ali bin Abi Thalib RA berhasil menanamkan nilai-nilai pendidikan yang sangat penting bagi pembentukan generasi Muslim yang memiliki pemahaman agama yang kuat dan karakter yang mulia.

Dalam hal ini, pendidikan pada masa beliau lebih menekankan pada kualitas ketimbang kuantitas, dengan tujuan mencetak individu yang bukan hanya berpengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan siap menjalani kehidupan sosial dengan penuh tanggung jawab.

B. Kebijakan Pendidikan Yang Diterapkan Oleh Khalifah Ali RA

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA merupakan salah satu contoh kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter, ilmu pengetahuan, dan moral umat Islam. Ali bin Abi Thalib RA melihat pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan umat yang tidak hanya cerdas dalam bidang agama tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.(Zailini, 2021) Oleh karena itu, kebijakan pendidikan pada masa beliau berfokus pada dua hal utama: penguatan ilmu agama dan pembinaan moral umat Islam. Ali mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya untuk menguasai teks agama, tetapi juga untuk membentuk akhlak yang mulia, dengan penekanan pada keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat.

Kebijakan pendidikan pertama yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib RA adalah mengutamakan penyebaran ilmu pengetahuan melalui halaqah atau kelompok belajar. Di masa pemerintahan beliau, banyak kelompok-kelompok kecil yang dibentuk di masjid untuk membahas dan mengajarkan Al-Qur'an, Hadits, serta tafsir dan fiqh. Dalam halaqah ini, masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan, diberi kesempatan untuk belajar langsung dari para ulama dan sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki otoritas dalam bidang agama. Ali RA juga sering kali turun langsung mengajar dalam halaqah-halaqah ini, memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al- Qur'an dan Sunnah Nabi, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari peserta halaqah.

Selain itu, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Ali RA sangat menghargai pengetahuan praktis yang berguna untuk

kehidupan umat. Ali bin Abi Thalib RA memandang bahwa pendidikan bukan hanya sekadar pembelajaran teks agama, tetapi juga aplikasi dari ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ali mendorong umat Islam untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu pertanian, perdagangan, dan ilmu sosial lainnya, yang dapat mendukung kesejahteraan umat dan negara. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib RA sangat progresif dan mencakup berbagai bidang kehidupan, bukan hanya terbatas pada bidang agama saja.

Kebijakan pendidikan Ali bin Abi Thalib RA juga menekankan pada pentingnya pendidikan moral dan pembentukan karakter. Ali sangat memperhatikan pembentukan akhlak generasi muda, terutama dalam hal kejujuran, kesederhanaan, keadilan, dan kesabaran. Salah satu ajaran beliau yang terkenal adalah pentingnya memperlakukan sesama dengan adil dan menghormati hak-hak orang lain, serta menjunjung tinggi prinsip moral yang luhur dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Ali berpendapat bahwa pendidikan harus mencetak individu yang memiliki integritas moral yang tinggi, yang mampu memimpin dengan kebijaksanaan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan moral menjadi bagian yang sangat penting dalam kebijakan pendidikan pada masa beliau.

Tantangan besar yang dihadapi dalam kebijakan pendidikan Ali bin Abi Thalib RA adalah kondisi politik yang tidak stabil pada masa itu. Setelah peristiwa besar seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, masyarakat Islam terpecah, dan stabilitas politik sangat terganggu. Meskipun demikian, Ali bin Abi Thalib RA tetap berkomitmen untuk memastikan pendidikan terus berjalan. Namun, kondisi sosial dan politik yang penuh ketegangan menyebabkan pendidikan lebih bersifat informal dan terbatas pada kalangan tertentu yang lebih terlibat dalam kegiatan keagamaan dan intelektual. Meskipun tidak ada sistem pendidikan formal yang terorganisir seperti di zaman modern, kebijakan pendidikan Ali berfokus pada pengajaran langsung dari guru ke murid dalam konteks yang lebih personal dan mendalam.

Akhirnya, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA menciptakan warisan yang mendalam dalam sejarah peradaban Islam. Beliau menanamkan prinsip-prinsip yang

mengedepankan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia, serta pentingnya moralitas dalam pendidikan. Dalam keadaan yang penuh tantangan, Ali RA tetap menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam pembentukan masyarakat yang adil dan berpengetahuan. Meskipun kebijakan pendidikan pada masa beliau tidak dapat dilaksanakan dalam skala besar karena situasi politik yang tidak stabil, Ali bin Abi Thalib RA berhasil mengembangkan konsep pendidikan yang sangat penting untuk perkembangan Islam dan umat manusia secara umum, yaitu pendidikan yang berorientasi pada pembentukan individu yang berilmu, berakhlak mulia, dan siap menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. (Yusuf Budi Prasetya Santoso, 2024)

C. Kurikulum Pendidikan Islam di Thailand Selatan

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA, pelaksanaan pendidikan menghadapi berbagai tantangan besar yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pendidikan, tetapi juga dengan situasi sosial, politik, dan budaya yang ada pada saat itu. Salah satu tantangan utama adalah ketegangan politik yang mengiringi kepemimpinan Ali, terutama setelah terjadinya perang-perang besar seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin. Konflik internal dalam tubuh umat Islam ini menciptakan kondisi yang tidak stabil, di mana perhatian lebih banyak terfokus pada permasalahan politik dan ketegangan antar kelompok. Hal ini berdampak pada terhambatnya pengembangan pendidikan, karena sumber daya dan perhatian masyarakat lebih tertuju pada situasi politik daripada pada kegiatan pendidikan yang membutuhkan waktu dan kedamaian untuk berkembang. (Moh Rokib, 2029) Tantangan kedua yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan adalah kurangnya sistem pendidikan formal yang terstruktur dengan baik. Pendidikan pada masa Khalifah Ali lebih bersifat informal dan dilakukan secara langsung melalui halaqah atau kelompok studi kecil yang diadakan di masjid-masjid atau tempat-tempat terbuka lainnya. Meskipun banyak masyarakat yang mengikuti pengajaran di halaqah, namun tidak ada sistem pendidikan yang terorganisir secara formal, seperti yang kita kenal sekarang. Hal ini membuat distribusi ilmu pengetahuan terbatas pada kalangan tertentu dan tidak merata di seluruh lapisan masyarakat. Banyak individu yang tertinggal karena tidak memiliki akses langsung ke halaqah atau pengajaran yang lebih mendalam.

Selain itu, tantangan besar lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang pengajaran. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA, meskipun banyak sahabat Nabi yang memiliki pengetahuan luas, jumlah mereka tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengajaran kepada umat Islam yang terus berkembang pesat. Banyak daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, seperti wilayah-wilayah terpencil di pedalaman, kesulitan dalam mendapatkan pengajaran langsung dari para ulama atau tokoh agama yang kompeten. Keterbatasan jumlah ulama yang tersebar di seluruh wilayah menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan pendidikan yang merata.

Di sisi lain, tantangan budaya dan pemahaman masyarakat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan. Pada masa itu, meskipun pendidikan agama sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, ada sebagian kalangan yang masih menganggap pendidikan sebagai hak istimewa bagi kaum elit atau mereka yang berada di kalangan tertentu. Masyarakat yang lebih rendah, khususnya dari kalangan non-elit, cenderung tidak memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti pendidikan agama secara formal. Pemahaman terhadap pentingnya pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat masih terbatas, sehingga sebagian besar umat Islam tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Ali RA sendiri berusaha mengatasi hal ini dengan mendorong pelaksanaan halaqah yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar, namun tantangan sosial ini tetap menjadi hambatan. Terakhir, tantangan yang sangat besar yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib RA, umat Islam hidup dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Perang dan konflik yang terjadi menyebabkan banyak sumber daya terkuras, dan masyarakat hidup dalam kesulitan ekonomi. Pendidikan, yang pada umumnya membutuhkan dana untuk penyediaan materi pembelajaran, guru, dan fasilitas lainnya, menjadi sangat sulit untuk dijalankan dengan baik. Banyak keluarga yang lebih memprioritaskan kebutuhan hidup daripada pendidikan bagi anak-anak mereka, dan ini menjadi hambatan dalam mencapai tingkat pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh masyarakat. Ali RA berusaha mengatasi tantangan ini dengan memberikan perhatian khusus pada penyediaan dana untuk lembaga-lembaga pendidikan agama, tetapi situasi ekonomi yang sulit tetap menjadi masalah utama. (Taufik Abdillah Syukur, 2024)

Secara keseluruhan, tantangan dalam pelaksanaan pendidikan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA mencakup banyak aspek, baik politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Meskipun demikian, Ali RA tetap berkomitmen untuk memastikan pendidikan tetap berjalan dengan maksimal dalam kondisi yang ada. Beliau mengedepankan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi dalam perjalanan tersebut.

D. Relevansi Kebijakan Pendidikan Khalifah Ali RA Bagi Pendidikan Islam Masa Kini

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap pendidikan Islam masa kini. Salah satu prinsip utama yang ditekankan oleh Ali RA adalah bahwa pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter dan akhlak yang mulia. Ini sejalan dengan kebutuhan dunia pendidikan modern yang semakin menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam menghadapi krisis moral, korupsi, radikalisme, dan dekadensi sosial. Ali RA memandang ilmu bukan sekadar alat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, keberanian, dan kesabaran dalam diri setiap Muslim. Konsep ini sangat sesuai untuk diterapkan dalam kurikulum pendidikan Islam masa kini, terutama dalam membentuk generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara spiritual dan moral.(Dr.Samsul bahri, 2021)

Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis diskusi dan dialog yang diterapkan oleh Ali RA juga sangat relevan dalam konteks pembelajaran modern. Di masa beliau, pendidikan tidak berlangsung secara satu arah, tetapi berbentuk interaktif dalam bentuk halaqah dan majelis ilmu, di mana murid bebas bertanya dan berdiskusi dengan guru. Pendekatan ini sesuai dengan metode pembelajaran aktif (active learning) yang saat ini banyak dianut di dunia pendidikan, termasuk dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam. Diskusi, debat, dan pertukaran gagasan merupakan bagian penting dalam proses berpikir kritis dan kreatif, yang sangat dibutuhkan untuk membangun generasi Muslim yang mampu bersaing di tingkat

global tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Relevansi lainnya adalah pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Ali RA. Beliau tidak membatasi akses pendidikan hanya kepada kalangan tertentu, melainkan membuka kesempatan belajar kepada semua lapisan masyarakat. Dalam konteks sekarang, kebijakan ini mencerminkan urgensi untuk memperluas akses pendidikan Islam yang inklusif dan merata, termasuk untuk perempuan, masyarakat marginal, serta daerah terpencil. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang adil dan tidak diskriminatif, serta mendukung pembangunan manusia seutuhnya, sesuai dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin.(Miftahul Chair, 2021)

Ali bin Abi Thalib RA juga mengajarkan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Ia tidak memisahkan keduanya, melainkan menekankan bahwa semua ilmu yang bermanfaat adalah bagian dari Islam. Hal ini sangat penting diterapkan dalam pendidikan Islam masa kini yang terkadang terjebak dalam dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan Islam perlu meniru pendekatan integratif ini agar mampu mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai fiqh, tafsir, dan hadits, tetapi juga sains, teknologi, dan keterampilan hidup lainnya. Dengan demikian, umat Islam dapat memainkan peran yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan modern, baik di tingkat lokal maupun global.

Terakhir, semangat keteladanan dan kepemimpinan moral yang ditunjukkan oleh Ali RA sebagai pendidik sejati juga menjadi pelajaran penting bagi pendidik dan pengelola pendidikan Islam masa kini. Ali adalah sosok yang tidak hanya mengajar dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, jujur, dan bijaksana. Dalam dunia pendidikan hari ini, figur seperti Ali RA sangat dibutuhkan sebagai inspirasi dalam membangun kepemimpinan yang etis dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Guru, kepala sekolah, dan pengelola pendidikan Islam harus meneladani sikap beliau agar bisa menjalankan tanggung jawab pendidikan sebagai amanah, bukan sekadar profesi. Relevansi kebijakan pendidikan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam klasik tetap kontekstual dan mampu memberikan solusi atas persoalan pendidikan di era modern.

E. Kurikulum Pendidikan Pada Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib

Kurikulum pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA belum terbentuk secara formal sebagaimana kurikulum institusional modern saat ini, namun memiliki struktur dan substansi yang kuat karena berbasis pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kurikulum di masa beliau bersifat terpadu, memadukan antara ilmu-ilmu agama dan pembentukan akhlak, dengan fokus utama pada pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ali RA sangat menekankan pentingnya tafaqquh fid-din (memperdalam ilmu agama), yang menjadi dasar utama dalam proses belajar umat Islam saat itu.(Dr.H, Fakhry Zamzam, 2019) Substansi utama dari kurikulum pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib RA meliputi pembelajaran Al-Qur'an, baik dalam aspek hafalan, tafsir, maupun tadabbur. Pendidikan tentang Hadits Nabi Muhammad SAW juga menjadi bagian penting, karena pada masa itu banyak hadis yang masih disampaikan secara lisan dari para sahabat. Selain itu, diajarkan pula dasar-dasar fiqh (hukum Islam) dan akidah, yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman umat terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Khalifah Ali RA, sebagai seorang sahabat dekat Nabi dan juga ulama besar, memberikan banyak fatwa dan penjelasan hukum yang menjadi rujukan dalam fiqh Islam.

Yang menarik dari kurikulum saat itu adalah penekanan pada pendidikan akhlak dan etika Islam. Ali bin Abi Thalib RA sangat menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Ia mengajarkan bahwa ilmu tanpa akhlak akan menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, nilai- nilai seperti kejujuran, amanah, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan sangat ditekankan dalam proses pendidikan. Pembinaan karakter melalui teladan hidup dan diskusi menjadi metode utama dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada para murid dan masyarakat luas.

Selain ilmu-ilmu agama, Khalifah Ali juga tidak mengabaikan pentingnya ilmu-ilmu praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari- hari, seperti ilmu pertanian, perdagangan, dan administrasi pemerintahan. Beliau mendorong masyarakat untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat, sehingga umat Islam bisa mandiri secara ekonomi dan sosial. Meskipun tidak dikodifikasi sebagai "kurikulum umum", integrasi antara ilmu agama

dan ilmu dunia sudah tampak pada masa itu dalam praktik kehidupan umat. (Dr. Junita, 2024)

Secara keseluruhan, kurikulum pendidikan Islam di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA bersifat holistik dan integratif: berfokus pada keimanan, ilmu, dan akhlak. Meskipun belum terstruktur secara sistematis seperti pendidikan modern, namun substansi dan prinsip yang dibawa sangat kaya dan mendalam. Kurikulum ini bertujuan mencetak pribadi Muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan agamanya—konsep yang hingga kini tetap relevan dalam pengembangan pendidikan Islam di era modern. (Sudirman, 2023)

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk peradaban yang berakhlak mulia dan berilmu tinggi. Dalam sejarah Islam, sosok Khalifah Ali bin Abi Thalib RA menampilkan teladan luar biasa dalam menjadikan pendidikan sebagai instrumen strategis untuk membangun umat, bahkan di tengah kondisi sosial-politik yang sarat konflik. Kepemimpinan beliau yang berada di masa penuh gejolak tidak menghalangi upaya untuk menanamkan nilai-nilai ilmu dan akhlak kepada masyarakat. Bagi Ali RA, pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan karakter dan spiritualitas. Beliau percaya bahwa kemajuan umat Islam tidak bisa dilepaskan dari kecintaan terhadap ilmu dan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan Islam masa kini. Fokus beliau pada pendidikan moral dan akhlak yang berbasis nilai-nilai Islam membuktikan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini yang seringkali hanya menekankan aspek intelektual tanpa memperhatikan sisi karakter. Keteladanan beliau dalam memimpin dan mendidik umat pun menunjukkan bahwa sosok guru dan pemimpin sejati harus menjadi panutan dalam akhlak, bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam

tindakan nyata.

Kurikulum pendidikan pada masa Khalifah Ali memang belum tersusun dalam bentuk sistematis sebagaimana kurikulum formal saat ini, namun substansinya sangat kaya dan mendalam. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Al-Qur'an, Hadits, tafsir, fiqh, serta pendidikan akhlak dan nilai-nilai kehidupan. Selain itu, Ali RA juga mendorong masyarakat untuk menguasai ilmu-ilmu praktis seperti pertanian, perdagangan, dan administrasi, yang menunjukkan bahwa beliau sudah memiliki pandangan yang integratif antara ilmu agama dan ilmu dunia. Ini merupakan bentuk kurikulum holistik yang mencerminkan visi pendidikan Islam yang menyeluruh dan membumi.

Tantangan yang dihadapi oleh Khalifah Ali dalam melaksanakan kebijakan pendidikan sangat besar, mulai dari konflik internal umat, kondisi politik yang tidak stabil, hingga keterbatasan sarana pendidikan dan akses ilmu pengetahuan. Namun, komitmen beliau terhadap pentingnya pendidikan tetap kuat dan tidak surut. Bahkan dalam kondisi sulit, beliau tetap membina halaqah-halaqah keilmuan dan memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses terhadap pembelajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tetap bisa berlangsung meskipun dalam keadaan krisis, asalkan ada kemauan dan semangat dari para pemimpin dan tokoh masyarakat.

Dalam konteks pendidikan Islam masa kini, warisan kebijakan Ali bin Abi Thalib RA sangat patut untuk diteladani dan diimplementasikan. Konsep keterbukaan dalam pembelajaran, diskusi aktif antara guru dan murid, dan penanaman nilai-nilai akhlak harus menjadi inti dalam sistem pendidikan Islam saat ini. Selain itu, pentingnya pemerataan akses pendidikan juga menjadi pelajaran penting yang bisa diambil dari masa kepemimpinan beliau. Pendidikan tidak boleh hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, tetapi harus menjadi hak seluruh umat tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Dengan demikian, pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib RA adalah model pendidikan yang menyeimbangkan antara ilmu, iman, dan amal. Ini adalah sistem yang tidak hanya mencetak manusia yang pandai, tetapi juga manusia yang bijaksana, bermoral, dan memiliki tanggung jawab sosial. Warisan pendidikan beliau membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki masyarakat dan menciptakan peradaban yang beradab. Maka, menghidupkan kembali semangat dan prinsip-prinsip pendidikan

dari masa Khalifah Ali adalah langkah strategis untuk membangun sistem pendidikan Islam yang lebih kuat, relevan, dan berdampak positif di zaman modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syakul Al-Rizzi. (2021). *Ali Bin Abi Thalib Ra.* (P. Mansyur (ed.)). DIVA Press.

Dr. H. Murodi, M. (2016). *Pendidikan Agama Islam : Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas VII* (Bramanto Setiawan (ed.)). PT.Karya Toha Putra.

Dr. Junita, S. S. (2024). Kurikulum Dan Pembelajaran Tantangan Perubahan Proses Pendidikan. In *Kurikulum Dan Pembelajaran Tantangan Perubahan Proses Pendidikan* (pp. 44–45). umsu press.

Dr.H, Fakhry Zamzam, M. . (2019). Perekonomian Islam : Sejarah dan Pemikiran. In

Perekonomian Islam : Sejarah dan Pemikiran (p. 55). KENCANA.

Dr.Samsul bahri, M. (2021). Sejarah Sosial Pendidikan islam. In *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (p. 78). Penerbit Adab.

Miftahul Chair. (2021). Agama Membuat Kaya. In *Agama Membuat Kaya* (p. 55). Bhuana Ilmu Populer.

Moh Rokib. (2029). SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM : Insitusi-Institusi yang Dikelola Pemerintah dan Masyarakat. *Pt Pelita Cahaya*, *2*, 66–67.

Prof.Dr.H.J Suyuthi Pulungan, M. A. (2019). Sejarah Pendidikan Islam. In Irfan Fahmi (Ed.),

Sejarah Pendidikan Islam (p. 44). KENCANA.

Sudirman. (2023). Kurikulum dan pengembangan Pembelajaran Dalam Perspektif Pragmatis. In *Kurikulum dan pengembangan Pembelajaran Dalam Perspektif Pragmatis* (p. 66). Penerbit P4I.

Taufik Abdillah Syukur. (2024). Ilmu Studi Islam. In *Ilmu Studi Islam* (p. 88). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Tobi, S. (2025). SPEKTRUM SEJARAH MASA KLASIK : Dari Masa Rasullullah hingga Masa Khulafaur Rasyidin. In Zainuddin Syarif (Ed.), *SPEKTRUM SEJARAH MASA KLASIK : Dari Masa Rasullullah hingga Masa Khulafaur Rasyidin* (p. 66). Penerbit KBM Indonesia.

Wahyudi, K. N. (2021). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Penerbit Deepublish.

Yusuf Budi Prasetya Santoso. (2024). Pemikiran Pendidikan Islam. In M. P. . Choirus Sholihin (Ed.), *Pemikiran Pendidikan Islam* (pp. 45–46). CV.Duta Sains Indonesia.

Zailini, S. P. (2021). Buku Ajar Ilmu Pendidikan Islam. In Rizka Harfiani (Ed.), *Buku Ajar Ilmu Pendidikan Islam* (p. 35). UMSUpress.

BAB 6
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH

(Fenda Resi Mahalita)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah (661-750 M) memainkan peran penting dalam pembentukan dasar-dasar intelektual dan sosial umat Islam di berbagai wilayah kekuasaan mereka. Sebagai dinasti pertama yang memerintah setelah era khulafa' ar-rasyidin, Bani Umayyah tidak hanya memperluas wilayah Islam tetapi juga memperkenalkan sejumlah kebijakan yang memengaruhi sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan pada masa ini lebih bersifat praktis, dengan penekanan pada pengembangan administrasi negara, penyebaran bahasa Arab, serta penerjemahan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kebudayaan Persia dan Yunani.[76]

Sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah mencakup lembaga pendidikan formal dan informal, seperti masjid dan rumah-rumah ilmu, yang digunakan untuk mendidik masyarakat, baik dalam aspek agama, politik, maupun budaya. Terdapat juga perkembangan dalam pembentukan kurikulum, yang tidak hanya memuat kajian agama Islam, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya, seperti matematika, kedokteran, dan filsafat. Sebagai bagian dari upaya pemerintahan untuk mengintegrasikan kekuasaan mereka dengan masyarakat, kebijakan pendidikan juga digunakan untuk memperkuat stabilitas politik dan sosial di wilayah yang mereka kuasai.

Namun, meskipun kebijakan pendidikan pada masa Bani Umayyah dapat dianggap sebagai titik awal penting dalam sejarah pendidikan Islam, kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan pendidikan pada masa ini cenderung elitistis dan lebih mengutamakan pengajaran bagi kalangan tertentu, sementara sebagian besar masyarakat tetap

[76] Ahmad Abdurrahman. *Sejarah Pendidikan Islam.* Yogyakarta : Penerbit Al-Mizan, 2020, hlm.45-47

tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam bagaimana kebijakan pendidikan pada masa Bani Umayyah diatur, apa dampaknya terhadap perkembangan pendidikan Islam, dan bagaimana pengaruhnya dapat dirasakan pada masa-masa berikutnya.[77]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana konteks sejarah dan sosial politik Bani Umayyah ?
b. Bagaimana struktur dan sistem pendidikan pada masa Bani Umayyah ?
c. Bagaimana kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Bani Umayyah ?
d. Bagaiman dampak kebijakan pendidikan pada masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan ?
e. Bagaimana kritik dan tantangan terhadap kebijakan pendidikan Bani Umayyah?

Penelitian ini dibatasi pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, dari tahun 661 hingga 750 M. Fokus utama penelitian ini adalah kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Umayyah, baik di pusat pemerintahan maupun di wilayah-wilayah kekuasaannya.

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif.** Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kebijakan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah berdasarkan kajian pustaka dan analisis dokumen sejarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan selama masa pemerintahan Dinasti Umayyah (661–750 M).[78]

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **studi pustaka**. Peneliti akan mengumpulkan, membaca, dan

[77] Rina Fitriani, *Pendidikan Islam Pada Masa Dinasti Umayyah.* Jakarta : Penerbit Mutiara, 2021, hlm.55-60

[78] Muhammad Abu Zaid. *Sejarah Pendidikan Islam Di Dunia.* Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2020, hlm.112-115

menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik ini. Sumber-sumber yang dikumpulkan akan meliputi buku-buku sejarah Islam, artikel jurnal ilmiah, dan sumber referensi lain yang dapat memberikan informasi terkait kebijakan pendidikan pada masa Bani Umayyah. Hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan kebijakan pendidikan dan dampaknya pada perkembangan pendidikan Islam pada masa tersebut.[79]

TEORI

A. Teori Pekembangan Pendidikan Islam

Teori Perkembangan Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah berfokus pada transformasi sistem pendidikan yang terjadi selama periode tersebut. Pada masa ini, pendidikan Islam mengalami perkembangan signifikan, mencakup perluasan kurikulum dan struktur kelembagaan. Pendidikan tidak hanya terbatas pada pengajaran agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan lainnya, seperti bahasa Arab, ilmu hadis, dan sejarah Nabi. Madrasah sebagai lembaga pendidikan mulai berkembang, menjadi cikal bakal sistem pendidikan Islam yang lebih terstruktur dan komprehensif.[80]

B. Teori Sosiologis Pendidikan

Teori Sosiologis Pendidikan menurut Émile Durkheim menekankan bahwa pendidikan adalah fenomena sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk solidaritas sosial dan moralitas dalam masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga memastikan kelangsungan dan stabilitas sosial.

Dalam konteks pendidikan Islam, teori Durkheim dapat diterapkan untuk memahami bagaimana lembaga pendidikan Islam mentransmisikan nilai-nilai Islam dan membentuk karakter peserta didik. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek moral dan sosial, yang sejalan dengan

[79] Muhamad Ali. *Kebijakan Pemerintahan Umayyah Dan Pendidikan Islam.* Bandung : Pustaka Setia, 2022, hlm.77

[80] S Suryani & M Nasir. Transformasi Pendidikan Islam Pada Bani Umayyah. *Sagoe Literasi : Jurnal Penelitian Pendidikan,* 1(2), (2025), hlm.2

pemikiran Durkheim tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk solidaritas sosial dan moralitas individu.[81]

C. Teori Politik Pendidikan

Teori Politik Pendidikan berfokus pada hubungan antara pendidikan dan kekuasaan politik, serta bagaimana kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh dinamika politik. Dalam konteks Indonesia, teori ini menjelaskan bagaimana kebijakan pendidikan Islam dipengaruhi oleh faktor politik dan bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu.

Teori politik pendidikan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan bagaimana pendidikan digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, teori ini membantu menganalisis dinamika antara pemerintah, lembaga pendidikan Islam, dan masyarakat dalam membentuk kebijakan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.[82]

D. Teori Transformasi Sosial dalam Pendidikan

Teori Transformasi Sosial dalam Pendidikan menekankan peran pendidikan sebagai agen perubahan yang dapat mengubah struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, teori ini menyoroti bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk mentransformasi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, adil, dan sejahtera.

Teori transformasi sosial dalam pendidikan menekankan pentingnya peran pendidikan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini tercermin dalam upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam kurikulum, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pendidikan

[81] M Arifuddin. Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi : Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial,* 1(2), (2020), hlm.28

[82] R Astuti & Q Khoiri. Tantangan Lokal Dan Global Kebijakan Politik Pendidikan Islam Di Indonesia. *Journal On Education,* 5(2), (2023), hlm.4571

Islam dapat berkontribusi signifikan dalam mentransformasi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dan berkeadilan.[83]

E. Teori Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Teori Islamisasi Ilmu Pengetahuan adalah pendekatan yang berupaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai Islam, dengan tujuan untuk menghasilkan ilmu yang tidak hanya rasional tetapi juga etis dan spiritual. Teori ini muncul sebagai respons terhadap sekularisasi ilmu pengetahuan yang memisahkan antara sains dan agama.

Teori Islamisasi Ilmu Pengetahuan merupakan upaya untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem pengetahuan yang utuh, berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan ilmu yang tidak hanya rasional tetapi juga etis dan spiritual. Implementasi teori ini dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang menggabungkan wahyu dan akal, serta penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[84]

PEMBAHASAN

A. Konteks Sejarah dan Sosial Politik Bani Umayyah

Bani Umayyah adalah dinasti pertama yang memerintah kekhalifahan Islam setelah periode Khulafa' ar-Rasyidin, dimulai dari tahun 661 M hingga 750 M. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah terjadinya perang saudara yang dikenal dengan Perang Siffin dan berakhir dengan berdirinya dinasti Umayyah. Sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah, Muawiyah mengubah struktur pemerintahan Islam yang sebelumnya berbasis pada prinsip musyawarah menjadi sistem monarki yang dipusatkan di Damaskus. Kebijakan politik Bani Umayyah sangat dipengaruhi oleh stabilitas dan perluasan wilayah, dengan fokus utama pada penyatuan dunia Islam di bawah satu pemerintahan yang terpusat.

Muawiyah juga memperkenalkan kebijakan yang mengutamakan pengelolaan pemerintahan yang efisien dengan

[83] A.A. Putri. Rekonstruksi Pendidikan Islam Kontemporer Dalam Perspektif Transformasi Sosial. *Hikmah : Jurnal Pendidikan Islam,* 4(1), (2024), hlm.4

[84] Aliasar Syafrizal & Aprison. Islamisasi Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia.* 1(2), (2022), hlm.394

mendirikan lembaga administrasi negara, meningkatkan kekuatan militer, dan mengembangkan sistem perpajakan yang dapat mendanai kegiatan pemerintahan dan ekspansi. Sistem politik ini bertahan selama hampir 90 tahun, hingga akhirnya runtuh pada awal abad ke-8 dengan digulingkannya Bani Umayyah oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Bani Abbasiyah. Kebijakan politik Bani Umayyah juga mencakup penerapan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan dan penggunaan sistem moneter berbasis dinar emas yang standar. Berdasarkan *Sejarah Politik Islam* oleh Sulaiman (2022), kebijakan politik Bani Umayyah mencerminkan usaha untuk memperkuat kekuasaan secara otoriter dan mengonsolidasikan wilayah yang sangat luas, yang meliputi wilayah Asia Barat, Afrika Utara, dan Spanyol.[85]

Di bawah pemerintahan Bani Umayyah, masyarakat Islam mengalami perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya. Pemerintahan ini memperkenalkan sistem birokrasi yang lebih terorganisir dengan pembagian kelas sosial yang jelas. Masyarakat terbagi dalam beberapa lapisan, yaitu kelas elit yang terdiri dari keluarga-keluarga Quraisy dan para pejabat tinggi, serta kelas rakyat biasa yang lebih banyak terdiri dari orang Arab non-Quraisy dan non-Arab (mawali). Kebijakan Bani Umayyah yang lebih mendukung kepentingan kelas elit menyebabkan ketimpangan sosial yang cukup tajam, khususnya bagi kelompok non-Arab yang baru masuk Islam.

Pemerintahan Umayyah juga memperkenalkan sistem yang lebih tertutup, yang pada beberapa kesempatan melibatkan diskriminasi terhadap kelompok non-Arab. Hal ini mengarah pada ketegangan sosial yang berujung pada pemberontakan-pemberontakan, seperti Pemberontakan Ma'badah di Irak dan Pemberontakan Al-Harith bin Surayj di Khurasan. Walaupun demikian, banyak masyarakat yang merasakan peningkatan dalam kualitas kehidupan mereka berkat kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Bani Umayyah, termasuk pembangunan jalan, fasilitas perdagangan, dan masjid sebagai pusat pendidikan. Dalam buku *Sosial Politik Islam pada Masa Bani*

[85] Ali Sulaiman. *Sejarah Politik Islam.* Yogyakarta : Penerbit Al-Ilmu, 2022, hlm.78-80

Umayyah (2021), Junaidi menyebutkan bahwa kebijakan Bani Umayyah dalam mengelola masyarakat dengan sistem sosial yang hierarkis lebih banyak menguntungkan kalangan elit yang dekat dengan kekuasaan, sementara kelompok mawalī dan non-Arab tetap dihadapkan pada ketimpangan social.[86]

Bani Umayyah memiliki peran penting dalam penyebaran Islam ke wilayah yang lebih luas, terutama melalui ekspansi militer yang agresif ke wilayah-wilayah seperti Spanyol, Afrika Utara, Asia Tengah, dan India. Penaklukan wilayah-wilayah baru ini tidak hanya memperluas kekuasaan Bani Umayyah, tetapi juga menyebarkan agama Islam dan kebudayaan Arab. Dalam proses ini, Islam menyebar ke berbagai masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya, yang kemudian menghasilkan akulturasi antara budaya Arab dan budaya lokal yang ada.

Selain itu, Bani Umayyah juga berperan dalam pengembangan budaya Islam, termasuk seni, arsitektur, dan literatur. Di bawah pemerintahan Bani Umayyah, terjadi pembangunan besar-besaran di bidang arsitektur, salah satunya adalah pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus dan perluasan masjid-masjid di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Di bidang seni dan ilmu pengetahuan, Bani Umayyah juga mendorong penerjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, yang nantinya menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa-masa selanjutnya. Menurut Nurcholis (2020), *Penyebaran Islam dan Kebudayaan Arab pada Masa Bani Umayyah* menggambarkan bahwa meskipun ekspansi militer Bani Umayyah sebagian besar dipandu oleh tujuan politik dan ekonomi, penyebaran budaya dan agama Islam juga memainkan peran penting dalam proses integrasi masyarakat yang baru ditaklukkan.[87]

B. Struktur dan Sistem Pendidikan Pada Masa Bani Umayyah

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah (661-750 M), pendidikan Islam masih dalam tahap perkembangan awal. Pemerintah Bani Umayyah menyadari pentingnya pendidikan dalam

[86] Rudi Junaidi. *Sosial Politik Islam Pada Masa Bani Umayyah.* Jakarta : Penerbit Karya Ilmu, 2021, hlm.110-112

[87] Hidayat Nurcholis. *Penyebaran Islam dan Kebudayaan Arab Pada Masa Bai Umayyah.* Bandung : Penerbit Simpul, 2020, hlm.142-145

membentuk masyarakat yang stabil dan mampu mendukung administrasi pemerintahan yang luas. Namun, meskipun ada perkembangan dalam pendidikan, sistem pendidikan pada masa ini belum semaju yang terlihat pada masa-masa selanjutnya seperti pada masa Bani Abbasiyah. Struktur pendidikan pada masa Bani Umayyah masih sederhana dan lebih terbatas dalam lingkupnya, namun memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam ke depan.

a. Lembaga Pendidikan pada Masa Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah, lembaga pendidikan formal belum berkembang seperti halnya madrasah yang ada pada masa berikutnya. Namun, masjid menjadi pusat utama pendidikan, terutama dalam pembelajaran agama Islam. Pendidikan di masjid melibatkan pengajaran Al-Qur'an, hadis, fiqh, serta tafsir. Di kota-kota besar seperti Damaskus, Kufa, dan Basra, masjid menjadi tempat belajar bagi umat Islam dari berbagai lapisan sosial. Para ulama atau guru yang mengajar di masjid dikenal dengan sebutan "mufti" atau "qadi."

Selain masjid, lembaga pendidikan informal juga berkembang, seperti rumah-rumah ilmu (bayt al-‘ilm) yang berfungsi sebagai tempat belajar tambahan bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan. Pada masa ini, pendidikan lebih banyak bersifat tradisional dan bergantung pada interaksi langsung antara guru dan murid, tanpa adanya kurikulum yang baku seperti yang diterapkan di madrasah pada masa Abbasiyah.[88]

b. Kurikulum Pendidikan

Pendidikan pada masa Bani Umayyah fokus utamanya adalah pendidikan agama, yaitu pengajaran Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, para ulama juga mengajarkan fiqh dan hukum Islam, serta ilmu-ilmu yang mendukung pemerintahan, seperti administrasi negara, bahasa Arab, dan tata negara. Meskipun demikian, pendidikan umum tentang ilmu pengetahuan lain seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat belum menjadi fokus utama pada masa ini, meskipun beberapa karya-karya ilmiah dari budaya Yunani dan Persia mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

[88] Ahmad Abdurrahman. *Sejarah Pendidikan Islam.* Yogyakarta : Penerbit Al-Mizan, 2020, hlm.112-115

Salah satu aspek penting dari kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah adalah pengajaran bahasa Arab. Karena kekuasaan Bani Umayyah meluas ke berbagai wilayah, bahasa Arab menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan, administrasi, dan perdagangan. Ini membantu penyebaran budaya dan agama Islam ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan.[89]

c. Akses dan Pembagian Pendidikan

Pada masa Bani Umayyah, akses terhadap pendidikan masih terbatas, terutama untuk kalangan bawah atau non-Arab. Sebagian besar pendidikan hanya dapat diakses oleh orang-orang Arab Quraisy atau mereka yang berstatus lebih tinggi, sementara kelompok non-Arab (mawali) dan perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan. Di sisi lain, pendidikan untuk kalangan elit lebih diprioritaskan, terutama dalam konteks administrasi negara dan pemerintahan.

Pemerintahan Bani Umayyah juga tidak secara langsung mengatur sistem pendidikan di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Pendidikan lebih banyak diserahkan kepada ulama dan cendekiawan lokal yang mengajar di masjid atau rumah-rumah ilmu, sementara di wilayah kekuasaan yang lebih jauh, pendidikan masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal.[90]

d. Peran Pemerintah dalam Pendidikan

Pemerintah Bani Umayyah tidak secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan secara luas. Namun, mereka mendukung perkembangan pendidikan melalui kebijakan yang memperkuat peran masjid sebagai pusat pendidikan. Bani Umayyah juga mendorong penerjemahan karya-karya ilmiah dari kebudayaan Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, yang kemudian disebarkan melalui para ulama dan cendekiawan. Dukungan ini lebih terlihat dalam pengembangan pendidikan tinggi bagi para birokrat dan pejabat negara, yang membutuhkan pendidikan untuk mendukung administrasi pemerintahan yang semakin luas.[91]

---

[89] Rina Fitriani, *Pendidikan Islam Pada Masa bani Umayyah.* Jakarta : Penerbit Mutiara, 2021, hlm.78-80

[90] Ahmad Nurhadi. *Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah.* Surabaya : Penerbit Cahay ilmu, 2022, hlm.56-58

[91] Muhammad Syaifudin. *Kebijakan Pendidikan Pada Masa Bani Umayyah.* Bandung : Penerbit Ilmu Dan Teknologi, 2020, hlm.95-97

C. Kebijakan Pendidikan Yang Diterapkan Oleh Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah (661-750 M), pendidikan Islam masih dalam tahap awal perkembangan, dan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Umayyah berfokus pada penguatan struktur sosial, politik, dan keagamaan. Meskipun pendidikan pada masa ini tidak sepenuhnya terstruktur dengan baik seperti pada masa Abbasiyah, kebijakan pendidikan yang diterapkan berperan penting dalam memperluas penyebaran Islam dan menstabilkan kekuasaan di wilayah yang sangat luas.

a. Pembentukan dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan

Pada masa Bani Umayyah, lembaga pendidikan formal belum sepenuhnya terbentuk dalam bentuk madrasah seperti pada masa Abbasiyah. Namun, masjid tetap menjadi pusat utama pendidikan, baik untuk pengajaran agama maupun untuk membangun kesadaran politik. Di berbagai wilayah kekuasaan Bani Umayyah, masjid-masjid besar di kota-kota seperti Damaskus, Kufa, dan Basra berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pengajaran agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Pemerintah Bani Umayyah mendukung pengajaran di masjid dengan memberikan fasilitas serta mendirikan rumah-rumah ilmu (bayt al-ʻilm), tempat di mana ulama dan cendekiawan berkumpul untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bani Umayyah juga memperkenalkan kebijakan untuk menerjemahkan karya-karya ilmiah dari budaya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Meskipun pada masa ini terjemahan ilmiah lebih terbatas, pemerintah mendukung terjemahan karya-karya filsafat, astronomi, dan kedokteran yang nantinya akan menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam.[92]

b. Kebijakan Penyebaran Bahasa Arab dan Ilmu Pengetahuan

Salah satu kebijakan pendidikan yang paling signifikan pada masa Bani Umayyah adalah penguatan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi negara, perdagangan, dan pendidikan. Penyebaran bahasa Arab berperan besar dalam memperkenalkan budaya Arab-Islam ke wilayah-wilayah yang

[92] Rina Fitriana. *Pendidikan Islam Pada Masa bani Umayyah.* Jakarta : Penerbit Mutiara, 2021, hlm.122-125

baru ditaklukkan. Hal ini juga mempermudah komunikasi antara berbagai kelompok etnis dan meningkatkan kesadaran keagamaan serta politik dalam dunia Islam.

Pemerintah Bani Umayyah juga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang keagamaan. Pengajaran hadis, tafsir, dan fiqh menjadi bagian utama dalam kurikulum pendidikan. Meskipun pendidikan umum yang mengajarkan ilmu-ilmu seperti astronomi dan kedokteran masih terbatas, Bani Umayyah berperan dalam memperkenalkan dan mendorong terjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Hal ini memberikan landasan bagi kemajuan intelektual pada masa selanjutnya, terutama pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah.[93]

c. Pembagian Pendidikan Berdasarkan Status Sosial

Pendidikan pada masa Bani Umayyah memiliki sistem yang cukup elit, di mana akses pendidikan terutama terbuka untuk kalangan elit Arab Quraisy dan keluarga kerajaan, sementara kalangan non-Arab (mawali) dan masyarakat biasa memiliki akses yang terbatas. Pendidikan lebih banyak terpusat pada pengajaran agama dan administrasi negara, dan hanya kalangan tertentu yang memperoleh pendidikan formal yang lebih mendalam.

Bani Umayyah juga tidak banyak melakukan upaya untuk memperluas pendidikan ke kalangan perempuan, sehingga kesempatan pendidikan bagi perempuan sangat terbatas. Hanya sebagian kecil perempuan dari kalangan elit yang memperoleh pendidikan, dan mereka lebih banyak terlibat dalam pendidikan agama atau seni literasi.[94]

d. Peran Pemerintah dalam Menyediakan Fasilitas Pendidikan

Meskipun tidak ada kebijakan pendidikan yang formal dan terstruktur seperti di masa Abbasiyah, Bani Umayyah memberikan dukungan terhadap pendidikan melalui penyediaan fasilitas dan dana untuk pengajaran agama. Selain itu, mereka juga mendukung para ulama dalam pengajaran dan penyebaran

[93] Muhamad Taufik. *Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam.* Jakarta : Penerbit Al-Huda, 2020, hlm.107-110

[94] Khairul Jamil. *Kebijakan Pendidikan Pada Masa Bani Umayyah.* Yogyakarta : Penerbit Pustaka Al-Azhar, 2021, hlm.110-113

ilmu pengetahuan di masjid-masjid. Keberadaan rumah-rumah ilmu yang didirikan di kota-kota besar juga merupakan bagian dari kebijakan untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan yang lebih luas di masyarakat.[95]

D. Dampak Kebijakan Pendidikan Pada Masyarakat dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Bani Umayyah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, meskipun sistem pendidikan yang formal belum berkembang secara luas pada masa ini. Meskipun pemerintah Bani Umayyah lebih berfokus pada pengajaran agama, dampak dari kebijakan pendidikan ini tetap mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih terdidik, terutama dalam aspek keagamaan dan administrasi negara. Kebijakan ini juga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, meskipun banyak perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan akan lebih pesat di masa Bani Abbasiyah.

a. Dampak pada Masyarakat

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Bani Umayyah, yang mengutamakan pengajaran agama dan ilmu-ilmu administratif melalui masjid dan rumah ilmu, memberikan dampak yang mendalam terhadap masyarakat pada masa itu. Pada masa Bani Umayyah, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengajaran bagi umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat yang dulunya tidak memiliki akses terhadap pengetahuan mulai diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar tentang agama Islam, hukum Islam (fiqh), serta administrasi pemerintahan yang dibutuhkan untuk mengelola wilayah yang sangat luas.

Namun, dampak ini cenderung terbatas bagi kalangan tertentu. Pendidikan pada masa ini lebih banyak menguntungkan kalangan elit, seperti keluarga kerajaan dan pejabat negara, yang diberikan pelatihan dalam ilmu administrasi dan politik. Sementara itu, kelompok non-Arab (mawali) dan masyarakat

[95] Zainal Yusuf. *Kebijakan Pendidikan Pada Masa Bani Umayyah.* Surabaya : Penerbit Cahaya Ilmu, 2022, hlm.132-135

bawah mendapatkan akses yang terbatas terhadap pendidikan formal.[96]

b. Dampak pada Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Kebijakan pendidikan Bani Umayyah, meskipun lebih fokus pada pengajaran agama, juga berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam penerjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India. Pada masa ini, meskipun belum ada lembaga pendidikan formal yang berkembang pesat, Bani Umayyah mendukung kegiatan intelektual dengan membiayai penerjemahan buku-buku ilmiah ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan ini membantu masyarakat Muslim mengenal konsep-konsep ilmiah baru yang datang dari tradisi ilmiah Yunani, Persia, dan India, yang nantinya akan menjadi dasar penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam di masa berikutnya.

Penyebaran bahasa Arab sebagai bahasa pengantar pendidikan dan administrasi juga membantu penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah. Ilmu pengetahuan yang dipelajari di dunia Islam pada masa ini lebih berfokus pada disiplin ilmu agama, tetapi proses penerjemahan dan pengajaran ilmiah akan memberi kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, terutama dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat.[97]

c. Dampak dalam Konteks Sosial dan Budaya

Secara sosial dan budaya, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Bani Umayyah memperkenalkan Islam dan budaya Arab ke berbagai wilayah yang mereka kuasai. Bahasa Arab menjadi bahasa dominan dalam pendidikan, administrasi, dan perdagangan, yang memperkuat pengaruh budaya Arab di wilayah kekuasaan Bani Umayyah, seperti di Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Barat.

Pengajaran agama yang dilakukan di masjid juga membantu masyarakat memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam

[96] Winda Mulyani. *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta : Penerbit Bina Ilmu, 2021, hlm.118-120

[97] Dian Yulianti. *Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah.* Yogyakarta : Penerbit Bumi Kasara, 2022, hlm.75-78

kehidupan sehari-hari. Meski demikian, pendidikan bagi perempuan tetap terbatas, sehingga pengaruh pendidikan ini lebih dirasakan oleh laki-laki dan masyarakat elit, sedangkan perempuan masih sangat terbatas akses pendidikannya.[98]

E. Kritik dan Tantangan Terhadap Kebijakan Pendidikan Bani Umayyah

Pada masa Bani Umayyah (661-750 M), kebijakan pendidikan yang diterapkan memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan masyarakat Islam. Meskipun demikian, kebijakan tersebut tidak terlepas dari kritik dan tantangan, baik dari dalam kalangan masyarakat maupun dari para cendekiawan Islam itu sendiri. Kebijakan pendidikan yang ada pada masa ini lebih bersifat elitistis dan terbatas, mengarah pada pendidikan agama tanpa memperhatikan penyebaran ilmu pengetahuan secara lebih luas.

a. Kritik Terhadap Akses Pendidikan yang Tidak Merata

Salah satu kritik terbesar terhadap kebijakan pendidikan pada masa Bani Umayyah adalah ketimpangan akses pendidikan antara kalangan elit Arab dan masyarakat luas, terutama kalangan non-Arab atau mawalī. Pendidikan pada masa ini lebih banyak difokuskan pada kalangan elit, terutama untuk membentuk pejabat-pejabat pemerintahan yang kompeten dalam menjalankan administrasi negara yang luas. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang cukup besar dalam akses pendidikan, di mana hanya kalangan elit yang bisa mengakses pendidikan yang lebih formal, sementara kalangan non-Arab dan masyarakat biasa memiliki akses yang terbatas.[99]

b. Kurangnya Fokus pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Umum

Meskipun pendidikan agama mendapatkan perhatian yang sangat besar, kebijakan pendidikan Bani Umayyah sangat terbatas dalam pengembangan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Pemerintah lebih banyak memfokuskan pendidikan pada ilmu agama dan administrasi negara. Meskipun ada upaya untuk menerjemahkan

[98] Rina Nurjanah, *Pendidikan Islam dan Pengaruh Budaya Pada Masa Bani Umayyah.* Bandung : Penerbit Pustaka Ilmu, 2023, hlm.80-83

[99] Muhammad Rizki. *Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah.* Jakarta : Penerbit Ilmiah, 2021, hlm.104-106

karya-karya ilmiah dari budaya Yunani dan Persia, pendidikan berbasis ilmu pengetahuan umumnya tidak mendapatkan perhatian yang memadai.[100]

c. Pembatasan Pendidikan untuk Perempuan

Pada masa Bani Umayyah, pendidikan untuk perempuan sangat terbatas. Meskipun beberapa perempuan dari kalangan elit mendapatkan pendidikan dasar, seperti membaca dan menulis, mereka tidak diberikan akses yang setara dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan formal, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Pendidikan yang diterima perempuan lebih terfokus pada pendidikan agama dan keterampilan rumah tangga. Kebijakan ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan, di mana perempuan hampir tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka di luar ranah domestik.[101]

d. Tantangan dalam Penyebaran Ilmu Pengetahuan

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan untuk penyebaran ilmu pengetahuan di luar kota-kota besar yang menjadi pusat kekuasaan, seperti Damaskus dan Kufa. Meskipun masjid dan rumah ilmu menjadi pusat pendidikan pada masa itu, distribusi ilmu pengetahuan di wilayah-wilayah jauh lebih terbatas. Wilayah-wilayah yang lebih terpencil tidak memiliki fasilitas pendidikan yang memadai, dan para ulama serta cendekiawan tidak banyak melakukan perjalanan untuk mengajar di luar pusat kekuasaan.[102]

KESIMPULAN

Pendidikan pada masa Bani Umayyah memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat Islam pada waktu itu. Meskipun kebijakan pendidikan pada masa ini belum sepenuhnya berkembang dengan sistem yang terstruktur seperti di masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah tetap memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan sistem pendidikan, terutama

---

[100] Fariha Hasanah. *Kritik Terhadap Kebijkan Pendidikan Bani Umayyah.* Bandung : Penerbit Cendekia, 2020, hlm.88-90

[101] Hidayat Mahmud. *Pendidikan Pada Masa Bani Umayyah.* Yogyakarta : Penerbit Reka, 2021, hlm.112-114

[102] Mariam Zahra, *Tantangan Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah.* Surabaya : Penerbit Lestari, 2022, hlm.105-107

dalam aspek agama dan administrasi negara. Kebijakan pendidikan ini didasarkan pada penguatan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar pendidikan, serta pengajaran agama Islam yang dilakukan di masjid dan rumah-rumah ilmu.

Namun, kebijakan pendidikan pada masa Bani Umayyah juga dihadapkan pada sejumlah kritik dan tantangan, seperti ketimpangan akses pendidikan antara kalangan elit Arab dan masyarakat umum, kurangnya fokus pada ilmu pengetahuan umum, serta pembatasan akses pendidikan untuk perempuan. Sistem pendidikan yang bersifat elit dan terbatas ini memperparah ketimpangan sosial dalam masyarakat pada masa itu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Ahmad. (2020). *Sejarah Pendidikan Islam.* Yogyakarta : Penerbit Al-Mizan.

Arifuddin, M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2).

Astuti, R., & Q Khoiri. (2023). Tantangan Lokal Dan Global Kebijakan Politik Pendidikan Islam Di Indonesia. *Journal On Education,* 5(2).

Fitriana, Rina. (2021). *Pendidikan Islam Pada Masa bani Umayyah.* Jakarta : Penerbit Mutiara.

Hasanah, Fariha. (2020). *Kritik Terhadap Kebijkan Pendidikan Bani Umayyah.* Bandung : Penerbit Cendekia.

Jamil, Khairul. (2021). *Kebijakan Pendidikan Pada Masa Bani Umayyah.* Yogyakarta : Penerbit Pustaka Al-Azhar.

Junaidi, Rudi. (2021). *Sosial Politik Islam Pada Masa Bani Umayyah.* Jakarta : Penerbit Karya Ilmu.

Mahmud, Hidayat. (2021). *Pendidikan Pada Masa Bani Umayyah.* Yogyakarta : Penerbit Reka.

Mulyani, Winda. (2021). *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta : Penerbit Bina Ilmu.

Nurcholis, Hidayat. (2020). *Penyebaran Islam dan Kebudayaan Arab Pada Masa Bai Umayyah.* Bandung : Penerbit Simpul.

Nurhadi, Ahmad. (2022). *Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah.* Surabaya : Penerbit Cahay ilmu.

Nurjanah, Rina. (2023). *Pendidikan Islam dan Pengaruh Budaya Pada Masa Bani Umayyah.* Bandung : Penerbit Pustaka Ilmu.

Putri, A.A. (2024). Rekonstruksi Pendidikan Islam Kontemporer Dalam Perspektif Transformasi Sosial. *Hikmah : Jurnal Pendidikan Islam,* 4(1).

Rizki, Muhammad. (2021). *Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah.* Jakarta : Penerbit Ilmiah.

Sulaiman, Ali. (2022). *Sejarah Politik Islam.* Yogyakarta : Penerbit Al-Ilmu.

Suriyani, S., & Nasir, M. (2025). Transformasi Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Sagoe Literasi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 1(2).

Syafrizar, Aliasar., & Aprison. (2022). Islamisasi Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia.* 1(2).

Syaifudin, Muhammad. (2020). *Kebijakan Pendidikan Pada Masa Bani Umayyah.* Bandung : Penerbit Ilmu Dan Teknologi.

Taufik, Muhammad. (2020). *Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam.* Jakarta : Penerbit Al-Huda.

Yulianti, Dian. (2022). *Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah.* Yogyakarta : Penerbit Bumi Aksara.

Yusuf, Zainal. (2022). *Kebijakan Pendidikan Pada Masa Bani Umayyah.* Surabaya : Penerbit Cahaya Ilmu.

Zahra, Mariam. (2022). *Tantangan Pendidikan Islam Pada Masa Bani Umayyah.* Surabaya : Penerbit Lestari.

Bab 7
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA BANI ABBASIYAH

Alecia Septiana (2220203043)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan telah berlangsung sepanjang sejarah dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya manusia di dunia. Pewarisan serta pengembangan budaya manusia berlandaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan diperinci dalam Sunnah Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam membahas perkembangan pendidikan Islam, setidaknya dapat dibagi ke dalam lima periode. Pertama, masa pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada era Nabi Muhammad SAW. Kedua, masa pertumbuhan pendidikan Islam yang terjadi sejak wafatnya Nabi hingga berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah. Ketiga, masa kejayaan atau puncak perkembangan pendidikan Islam, yang berlangsung dari awal berdirinya Daulah Abbasiyah hingga kejatuhan kota Baghdad. Keempat, masa kemunduran pendidikan Islam, yang dimulai sejak kejatuhan Baghdad dan berlanjut hingga Mesir jatuh ke tangan Napoleon, di mana pada periode ini fondasi kebudayaan Islam melemah dan pusat peradaban mulai bergeser ke dunia Barat. Kelima, masa pembaruan pendidikan Islam yang dimulai sejak pendudukan Mesir oleh Napoleon hingga saat ini, ditandai dengan kebangkitan kembali umat Islam serta budayanya.

Puncak kejayaan pendidikan Islam terjadi pada era Dinasti Abbasiyah, yang berpusat di Baghdad dan berlangsung sekitar lima abad (750-1258 M). Keberhasilan pendidikan pada masa itu terlihat dari berkembangnya berbagai cabang ilmu, baik dalam bidang agama seperti fiqih, tafsir, hadis, dan teologi, maupun ilmu umum seperti matematika, astronomi, filsafat, sastra, hingga kedokteran.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan ini didorong oleh kesadaran tinggi akan pentingnya ilmu dalam membangun peradaban. Para pemimpin dan masyarakat memahami bahwa kekuasaan yang kokoh memerlukan dukungan dari ilmu pengetahuan. Hal ini tercermin dari semangat mereka dalam mencari

ilmu, penghormatan terhadap para ulama dan pelajar, serta maraknya pendirian pusat pendidikan dan perpustakaan, seperti Bait al-Hikmah.

Puncak kejayaan Daulah Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid (768-809 M) dan putranya, al-Ma'mun (813-833 M). Harun al-Rasyid memanfaatkan kekayaan negara untuk berbagai kepentingan sosial, termasuk pendirian rumah sakit serta lembaga pendidikan dokter dan farmasi. Sementara itu, al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Pada masanya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan, dan berbagai sekolah didirikan untuk mendukung pengembangan ilmu di dunia Islam. Salah satu pencapaian terbesar dan paling berpengaruh pada masa pemerintahan al-Ma'mun adalah pendirian Bait al-Hikmah. Lembaga ini berperan sebagai pusat penerjemahan serta institusi pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan perpustakaan besar. Pada era kepemimpinannya, Baghdad mulai berkembang menjadi pusat utama kebudayaan dan ilmu pengetahuan.[103]

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pada masa Bani Abbasiyah?
b. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada Massa Bani Abbasiyah?
c. Apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah?
d. Bagaimana dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam?

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka *(library research)*. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku sejarah pendidikan Islam, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen relevan yang membahas "Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Bani

[103] Zulhimma, 'Sejarah Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam' (Penerbit Kencana bekerja sama dengan IAIN Padangsidimpuan Press, 2021), hlm. 59.

Abbasiyah". Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis isi dari sumber-sumber tersebut untuk menggambarkan secara sistematis perkembangan, bentuk, serta dampak kebijakan pendidikan pada masa tersebut. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan data secara deskriptif sesuai konteks sejarah dan sosial-politik yang melatarbelakangi.

TEORI

Penelitian yang serupa terkait kebijakan pendidikan islam pada masa Bani Abbasiyah menunjukkan kemajuan pesat dalam bidang keilmuan dan kelembagaan. Pemerintah saat itu sangat mendukung aktivitas ilmiah melalui pendirian lembaga pendidikan seperti madrasah dan Baitul Hikmah, yang berperan sebagai pusat penerjemahan serta pengembangan ilmu pengetahuan.[104] Selain itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada ilmu keagamaan, tetapi juga mencakup ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Dukungan besar dari khalifah kepada para ilmuwan, termasuk pendanaan untuk kegiatan akademik, turut mendorong perkembangan pendidikan yang melahirkan banyak ulama dan ilmuwan terkemuka.[105]

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pendidikan Islam yang Diterapkan Pada Masa Bani Abbasiyah

Sejak kemunculan Islam, pendidikan dan pengajaran sudah menjadi bagian penting dari ajaran agama ini. Proses pendidikan tersebut terus berkembang sejak masa Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan pada era kekuasaan Bani Umayyah. Ketika Dinasti Abbasiyah berkuasa, pendidikan Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sekolah-sekolah mulai bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak, tersebar dari kota-kota besar hingga ke pelosok pedesaan. Anak-anak dan generasi muda berlomba-lomba menuntut ilmu, rela meninggalkan kampung halaman demi belajar ke pusat-

[104] Serli Mahroes, 'Sehril Mahroes, Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah Perspektif Sejarah Pendidikan Islam, Bandung:Uin Sunan Gunung Djati, 2015.', *Tarbiya:Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1.1 (2015), hlm. 80.

[105] siti Nurkhasanah Chandra Intan Berliana And Badrus Zaman, 'Transformasi Pendidikan Di Era Umayyah: Antara Kebijakan Dan Rekontruksi Di Masa Sekarang', *Al Ghazali*, 7.1 (2024), hlm. 40.

pusat pendidikan, didorong oleh kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan.[106]

Perkembangan pendidikan Islam di masa Abbasiyah meliputi berbagai aspek, seperti tujuan pendidikan, pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam, sistem pengajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah, hingga kemajuan ilmu pengetahuan pada masa tersebut.[107]

a. Tujuan Pendidikan pada Masa Abbasiyah

Kemajuan luar biasa yang dicapai pada masa itu tidak lepas dari tersedianya sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, keterampilan, serta pengalaman yang diperoleh melalui proses pendidikan yang menyeluruh. Sejarah mencatat bahwa selain memperluas wilayah kekuasaan, pemerintahan Bani Umayyah sebelumnya juga telah memberikan perhatian terhadap pendidikan, dengan menyediakan berbagai fasilitas penunjang demi mendukung tumbuhnya dunia ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan agar para cendekiawan, seniman, dan ulama dapat mengembangkan potensi mereka dan mencetak generasi penerus ilmu.[108]

Pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan semakin beragam, dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat saat itu. Secara umum, tujuan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

1) Tujuan Keagamaan dan Pembentukan Akhlak Sebagaimana pada masa sebelumnya, pendidikan diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral. Anak-anak dididik untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an karena hal ini merupakan kewajiban dalam Islam. Mereka juga mempelajari ilmu tafsir, hadis, dan cabang-cabang ilmu agama lainnya untuk membentuk karakter dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.
2) Tujuan Sosial Kemasyarakatan, Selain pembentukan akhlak, pendidikan juga bertujuan untuk membangun masyarakat. Para

[106] Agus Riyadi, 'Kebijakan Dakwah Al-Makmun Di Dinasti Bani Abbasiyah: Masa Keemasan Klasik', *Hikmah*, 18.1 (2024), hlm. 45.

[107] Tim Penyusun, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (GUEPEDIA, 2022), hlm. 64.

[108] Wira Kurnia Listari and Alimni, 'Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah Dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern', *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 4.2 (2023), hlm. 29.

pemuda didorong menuntut ilmu agar mampu membawa perubahan sosial, dari kondisi jahiliah menuju masyarakat yang tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, dari keterbelakangan menuju kemajuan dan kesejahteraan.[109]

Selain itu, pendidikan juga memiliki tujuan lain, yakni menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan semangat untuk meraihnya. Para pelajar menuntut ilmu bukan karena mengharapkan imbalan materi, melainkan semata-mata demi memperdalam wawasan dan pengetahuan. Mereka rela menjelajahi berbagai negeri Islam untuk belajar, tanpa mempermasalahkan beratnya perjalanan yang sering ditempuh dengan berjalan kaki atau mengendarai keledai. Yang mereka kejar hanyalah kepuasan batin atas dahaga ilmu yang tak pernah padam.

Namun, ada pula sebagian umat Islam yang memiliki tujuan pendidikan yang lebih bersifat duniawi. Mereka belajar demi memperoleh kehidupan yang lebih baik, jabatan yang tinggi, bahkan kemegahan dan kekuasaan dunia sebagaimana halnya sebagian orang di zaman sekarang. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, tujuan pendidikan telah mengalami perluasan. Ini terlihat dari beragamnya motivasi dalam menuntut ilmu yang menunjukkan semakin luasnya cakrawala pendidikan kala itu.[110]

b. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam

Sebelum munculnya sekolah dan universitas sebagai lembaga pendidikan formal, dalam tradisi Islam sebenarnya telah ada berbagai lembaga pendidikan yang bersifat nonformal. Lembaga-lembaga ini terus mengalami perkembangan, dan seiring waktu turut muncul serta berkembang berbagai bentuk pendidikan nonformal lainnya secara lebih luas. Kebijakan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai oleh perkembangan pesat lembaga Pendidikan yang bersifat nonformal antara lain adalah:

---

[109] Maryamah Maryamah, 'Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah', *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.1 (2015), hlm. 47–65.

[110] Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*,(Cet. VII; Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1963), hlm. 46.

1) Kuttab Sebagai Lembaga Pendidikan Dasar Kuttab, atau dikenal juga sebagai *maktab*, berasal dari akar kata *kataba* yang berarti "menulis" atau "tempat untuk menulis". Dengan demikian, kuttab dapat dimaknai sebagai tempat pembelajaran menulis. Bahkan sebelum kedatangan Islam, kuttab telah ada di kawasan Arab, meskipun belum begitu dikenal luas. Di antara penduduk Mekkah yang pertama kali mempelajari tulisan Arab adalah Sufyan bin Umaiyah bin Abdu Syams dan Abu Qais bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Keduanya menuntut ilmu tersebut di kota Hirah.
2) Pendidikan Dasar di Lingkungan Istana

   Lahirnya pendidikan dasar di lingkungan istana, yang diperuntukkan bagi anak-anak pejabat tinggi, didasari oleh pemikiran bahwa pendidikan seharusnya diarahkan untuk mempersiapkan anak-anak menjalankan tanggung jawabnya di masa depan. Pembelajaran di istana memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan di kuttab secara umum. Namun, kurikulum yang digunakan pada dasarnya serupa dengan kurikulum yang diterapkan di kuttab, meskipun terdapat penyesuaian baik penambahan maupun pengurangan materi sesuai dengan keinginan para bangsawan dan kebutuhan khusus anak-anak mereka untuk menghadapi tugas tertentu di kemudian hari.
3) Masjid

   Sejak pertama kali didirikan pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi pusat berbagai aktivitas umat Islam, mencakup aspek informasi dan kehidupan sosial. Masjid berfungsi sebagai tempat musyawarah, penyelesaian sengketa, penyampaian ajaran agama, serta menyebarkan informasi penting lainnya. Selain itu, masjid juga menjadi tempat pendidikan untuk anak-anak maupun orang dewasa. Pada era Kekhalifahan Bani Umayyah, peran masjid semakin berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keagamaan. Para ulama memberikan pengajaran di masjid, meskipun kegiatan pemerintahan khalifah kemudian beralih ke tempat lain atau gedung tersendiri. Memasuki masa pemerintahan Bani Abbasiyah, seiring dengan kemajuan peradaban Islam, masjid yang dibangun oleh para penguasa

umumnya dilengkapi dengan fasilitas pendukung pendidikan. Fasilitas tersebut meliputi tempat belajar bagi anak-anak, ruang pengajian ulama dalam bentuk kelompok-kelompok halaqah, area diskusi dan debat ilmiah (munazharah), serta perpustakaan yang menyimpan banyak buku dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sepanjang sejarah Islam, masjid tetap memiliki peran utama, tidak hanya sebagai tempat ibadah dan komunikasi spiritual dengan Allah, tetapi juga sebagai institusi pendidikan dan pusat interaksi umat Muslim.

4) Toko Kitab dalam Pendidikan

Pada awal masa kekuasaan Daulah Abbasiyah, ketika ilmu pengetahuan dan budaya Islam mulai berkembang pesat, toko-toko kitab mulai bermunculan. Awalnya, toko-toko ini hanya berfungsi sebagai tempat jual beli buku-buku yang ditulis dalam berbagai bidang ilmu. Para pemilik toko akan membeli buku dari para penulis dan menjualnya kepada orang-orang yang ingin memperdalam pengetahuan mereka. Seiring waktu, toko-toko kitab berkembang menjadi pusat interaksi ilmiah, di mana para ulama, sastrawan, dan cendekiawan berkumpul untuk berdiskusi, berdebat, serta bertukar pemikiran dalam berbagai bidang keilmuan. Dengan demikian, toko kitab tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga berperan sebagai lembaga pendidikan informal dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam.[111]

5) Rumah Para Ulama

Tempat tinggal para ulama pun ikut berperan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, baik agama maupun ilmu umum. Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, rumah para ulama sering digunakan sebagai tempat belajar para pemuda, layaknya sekolah informal.

6) Majlis

Khalifah mendirikan lembaga khusus bernama majlis sebagai wadah untuk memperdalam ilmu. Majlis ini berfungsi sebagai tempat diskusi dan pembelajaran bersama. Di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, majlis berkembang pesat karena dukungan penuh dari sang khalifah terhadap

[111] Zuhairi, 'Sejarah Pendidikan Islam', *Jakarta: Bumi Askara*, 2017, hlm. 89.

kegiatan intelektual tersebut, sehingga mutu pendidikan pun meningkat tajam.

7) Perpustakaan

Dalam upaya memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, Dinasti Abbasiyah juga mendirikan perpustakaan. Lembaga ini menjadi pusat kegiatan riset dan studi ilmiah. Anak-anak dan remaja didorong untuk mengunjungi perpustakaan guna memperluas wawasan mereka. Salah satu perpustakaan ternama pada masa itu adalah *Bait al-Hikmah,* yang tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan tetapi juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan manuskrip dan kitab langka dari Persia dan Byzantium.[112]

c. Metode Pembelajaran

Kebijakan pada masa Bani Abbasiyah ditandai oleh metode pembelajaran. Proses belajar mengajar menerapkan beragam metode, di antaranya metode *imla'* (dikte), ceramah*, qiraat* (membaca), diskusi, menghafal, dan menulis. Dari semua metode tersebut, menulis dianggap sebagai metode paling utama pada masa itu. Penulisan ini biasanya berupa penyalinan karya-karya para ulama terdahulu, yang tidak hanya mendukung proses intelektualisasi, tetapi juga membantu siswa dalam menguasai ilmu secara lebih mendalam. Selain sebagai media pembelajaran, kegiatan menyalin juga berperan sebagai sarana menggandakan buku pelajaran, mengingat pada masa itu teknologi percetakan belum tersedia. Dengan cara ini, kebutuhan akan buku teks setidaknya dapat sedikit terpenuhi.[113]

Selain penggunaan berbagai metode pembelajaran, dalam kebijakan pendidikan islam yang diterapkan pada masa Bani Abbasiyah terdapat satu unsur penting yang turut mendorong kemajuan pendidikan, yaitu kurikulum. Kurikulum memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran proses belajar-mengajar. Pada tingkat dasar, materi kurikulum umumnya meliputi pembelajaran Al-Qur'an, kemampuan literasi,

[112] Nunzairina Nunzairina, 'Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, Dan Kebangkitan Kaum Intelektual', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3.2 (2020), hlm. 93–103.

[113] Zuhdiah, Muhammad Yahdi, and Bahaking Rama, 'Karakteristik Pendidikan Islam Masa Klasik Dan Modern', *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2024), hlm. 38–39.

keterampilan menulis, serta seni bersyair. Bani Abbasiyah secara dominan memasukkan ilmu-ilmu keagamaan sebagai inti dalam kurikulum pendidikan mereka. Hadis, sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, juga menjadi fokus penting dalam kurikulum. Banyak generasi muda saat itu yang antusias mempelajari ilmu hadis.[114]

Kurikulum pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah dibagi menjadi tiga jenjang utama, yaitu:

1) Kurikulum Pendidikan Dasar

   Pada jenjang ini, materi pembelajaran mencakup pelatihan membaca dan menghafal Al-Qur'an, pengenalan dasar-dasar ajaran Islam seperti tata cara berwudu, berpuasa, melaksanakan salat, membayar zakat, serta menghafal syair-syair Islami. Kurikulum ini masih berfokus pada materi-materi pembelajaran tingkat awal atau dasar.

2) Kurikulum Pendidikan Menengah

   Di jenjang pendidikan menengah, siswa mulai mempelajari mata pelajaran yang lebih luas dan bersifat umum, seperti Al-Qur'an, Hadis, bahasa Arab dan sastra, ilmu fikih, tafsir, ilmu hadis, ilmu *sharaf*, sejarah *(tarikh)*, hingga ilmu kedokteran.

3) Kurikulum Pendidikan Tinggi

   Pembelajaran di perguruan tinggi Islam terbagi ke dalam dua jenis utama. Pertama adalah ilmu *naqliyah*, yang mencakup kajian keagamaan seperti hadits, tafsir, fikih, serta bahasa dan sastra Arab. Sementara itu, jenis kedua dikenal sebagai ilmu *aqliyah*, yaitu bidang keilmuan umum seperti ilmu pasti dan ilmu falak.[115]

Dari penjelasaan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dan komprehensif, baik dari segi tujuan pendidikan, lembaga-lembaga pendukung, metode pembelajaran, hingga kurikulum yang diterapkan. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembentukan akhlak dan penguatan

[114] Yusnadi and Fakhrurrazi, 'Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah', *AT-TA'DIB: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 2020, hlm. 73.

[115] Sri Wahyuningsih, 'Implementasi Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah Dan Pada Masa Sekarang', *Jurnal Kependidikan*, 2.2 (2014), hlm. 109–26.

nilai keagamaan, tetapi juga pada pengembangan intelektual dan sosial masyarakat. Lembaga pendidikan formal dan nonformal tumbuh pesat, seperti kuttab, masjid, perpustakaan, hingga majlis ilmu, mencerminkan komitmen tinggi pemerintah terhadap ilmu pengetahuan. Beragam metode pembelajaran serta struktur kurikulum yang terorganisir dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi juga menjadi bukti bahwa pada masa itu, pendidikan Islam telah mencapai puncak kejayaan yang menjadi fondasi bagi kemajuan peradaban Islam secara keseluruhan.

B. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Massa Bani Abbasiyah

Pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, terutama antara tahun 750–935 M, ilmu pengetahuan dan peradaban Islam mencapai masa kejayaan yang belum tertandingi. Sayangnya, pencapaian besar ini belum sepenuhnya dijadikan acuan oleh umat Islam masa kini. Banyak ajaran Islam yang seharusnya mendorong pengembangan ilmu dan kreativitas hanya diterapkan dalam aspek ibadah, tanpa menjelma dalam tindakan nyata. Semangat untuk berkarya dan mengembangkan ilmu belum mengakar kuat dalam kehidupan umat.

Pemerintahan awal Bani Abbasiyah dikenal demokratis, di mana tidak ada perbedaan kelas sosial yang mencolok, dan semua warga memiliki peluang yang sama dalam berkontribusi, termasuk dalam pemerintahan. Namun, di masa Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, meskipun kekuasaan menjadi lebih absolut dan mewah, perhatian terhadap ilmu pengetahuan tetap tinggi. Mereka bahkan memberikan beasiswa dan mendorong kebangkitan ilmu, budaya, dan teknologi.[116]

Periode ini menyaksikan kemajuan besar dalam berbagai bidang seperti filsafat, sastra, kedokteran, matematika, dan astronomi. Kota-kota seperti Baghdad, Kufah, dan Basrah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Khalifah al-Ma'mun mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah perpustakaan besar dan pusat penerjemahan karya-

[116] Nurul Huda, 'Pendidikan Islam Masa Bani Abbasyiah', *Jurnal Pendidikan*, 1 (2015), hlm. 17-19.

karya asing, serta mempekerjakan para penerjemah dari berbagai latar belakang agama untuk memperkaya literatur Arab.[117]

Pendidikan pada masa Bani Abbasiyah tidak mengenal pemisahan antara ilmu dunia dan akhirat. Semua cabang ilmu dipandang sebagai satu kesatuan. Pluralisme dan keterbukaan terhadap pengetahuan asing tercermin dari kepercayaan khalifah terhadap ilmuwan non-Muslim. Para ulama dan ilmuwan berkembang seiring dalam berbagai bidang, melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina yang menguasai banyak disiplin ilmu.

Kontribusi kaum dzimmi juga signifikan dalam mendukung perkembangan keilmuan melalui penerjemahan teks-teks penting. Masa ini ditandai oleh kemajuan luar biasa dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum. Lahir tokoh-tokoh pemikir, ahli fiqih, sufi, dan filosof besar yang pengaruhnya terasa hingga kini, seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Rusyd, dan Rabiah al-Adawiyah. Masa Bani Abbasiyah benar-benar menjadi fondasi kemajuan peradaban Islam yang menginspirasi dunia.[118]

Dari penjelasaan diatas, dapat disimpulkan bahwa masa Bani Abbasiyah yaitu tonggak penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, ditandai oleh keterbukaan terhadap ilmu dari berbagai budaya, dukungan negara terhadap pendidikan, dan integrasi antara ilmu dunia dan akhirat. Semangat ilmiah yang tinggi dan inklusif pada masa itu seharusnya menjadi inspirasi bagi generasi muda Muslim saat ini untuk lebih aktif mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak hanya dalam konteks keagamaan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

C. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Bani Abbasiyah

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah (750–1258 M), pendidikan Islam mengalami perkembangan pesat dan menjadi tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam. Beberapa faktor

[117] Ainur Riska Amalia, 'Sejarah Peradaban Islam: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Pemerintahan Diinasti Bani Abbasiyah', *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 10.01 (2022), hlm. 57-59.

[118] Haidar Putra Daulay, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, 'Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), hlm 47.

utama yang sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam pada masa ini antara lain:

a) Dukungan politik dari para khalifah Abbasiyah menjadi fondasi utama berkembangnya pendidikan Islam. Para khalifah seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun sangat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadikan pendidikan sebagai bagian penting dari pemerintahan. Mereka menyediakan anggaran negara untuk mendirikan lembaga pendidikan, mengundang para cendekiawan dari berbagai daerah, dan menjadikan istana sebagai pusat intelektual. Dukungan ini menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya budaya belajar dan mengajar.
b) Kemajuan ilmu pengetahuan di masa itu juga sangat mempengaruhi arah dan isi kebijakan pendidikan Islam. Dalam masa ini, berbagai cabang ilmu seperti filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan logika mengalami perkembangan luar biasa. Para ilmuwan Muslim tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum dari Yunani, Persia, dan India. Hal ini mendorong integrasi ilmu agama dan rasionalitas, sehingga pendidikan Islam tidak bersifat kaku, melainkan terbuka terhadap pengetahuan luar selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
c) Peran para ulama juga sangat penting dalam pembentukan kebijakan pendidikan. Ulama pada masa Bani Abbasiyah bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai intelektual dan pengajar. Mereka mendirikan halaqah-halaqah di masjid, mengajar di madrasah, serta menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam berbagai bidang. Dalam konteks ini, otoritas keilmuan ulama diakui dan dihormati oleh negara, sehingga mereka berkontribusi langsung dalam merancang dan menjalankan kebijakan pendidikan.
d) Pengaruh budaya non-Arab turut memperkaya khazanah keilmuan Islam. Bani Abbasiyah membuka diri terhadap ilmu dan budaya dari bangsa-bangsa lain seperti Yunani, Romawi, Persia, dan India. Melalui proses penerjemahan karya-karya besar ke dalam bahasa Arab, muncul semangat baru dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pusat penerjemahan seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi simbol integrasi budaya ini,

yang turut membentuk karakter pendidikan Islam yang lebih universal dan ilmiah.

e) Perkembangan lembaga pendidikan formal seperti madrasah dan perpustakaan juga menjadi faktor penting. Madrasah pertama didirikan secara sistematis pada masa Bani Abbasiyah, dan lembaga ini berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan umum. Selain itu, perpustakaan seperti Baitul Hikmah menyediakan akses luas terhadap literatur ilmiah dari berbagai disiplin, mendorong terbentuknya tradisi akademik yang kuat. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak lagi bersifat informal seperti di masa sebelumnya, tetapi sudah lebih terstruktur dan terorganisasi.[119]

Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditopang oleh sinergi antara kekuasaan politik, kecintaan terhadap ilmu, peran aktif ulama, keterbukaan terhadap budaya asing, serta pembangunan lembaga pendidikan. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan periode Abbasiyah sebagai masa keemasan dalam sejarah pendidikan Islam, yang pengaruhnya masih terasa hingga saat ini.

Dari penjelasaan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh sinergi antara kekuatan politik yang pro-ilmu, kemajuan sains dan teknologi, peran sentral para ulama, keterbukaan terhadap budaya asing, serta berkembangnya lembaga pendidikan formal. Faktor-faktor ini membentuk sistem pendidikan yang progresif dan inklusif, menjadikan masa Abbasiyah sebagai tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam yang relevan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara negara, ulama, dan budaya sangat penting dalam membangun peradaban yang berilmu.

[119] Mujahid Mallombasi Arsyad, Muhammad Zain Kasban, and Bahaking Rama, 'Dinasti Abbasiyah: Biografi Khalifah, Kebijakan Politik, Pengaruh, Dan Kegemilangan Peradaban Islam', *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4.1 (2024), hlm. 85–98.

D. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peradaban Islam

Dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sangat besar dan mendalam. Sejak masa awal kejayaan Islam, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan umat. Kebijakan yang mendukung pencarian ilmu pengetahuan telah mendorong lahirnya pusat-pusat pendidikan, seperti madrasah, masjid, dan baitul hikmah, yang berperan penting sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin, baik agama maupun umum.

Salah satu dampak penting dari kebijakan pendidikan Islam adalah munculnya generasi ulama dan ilmuwan muslim yang bukan hanya ahli dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan kimia. Kebijakan yang terbuka terhadap berbagai ilmu ini menunjukkan betapa Islam memandang ilmu sebagai sesuatu yang integral dalam kehidupan umat. Tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Rusyd adalah contoh nyata dari hasil kebijakan pendidikan yang progresif dan inklusif di masa keemasan Islam.[120]

Kebijakan pendidikan Islam juga mendorong penerjemahan besar-besaran karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Hal ini menjadikan dunia Islam sebagai pusat intelektual dunia selama berabad-abad. Proses ini tidak hanya sekadar alih bahasa, tetapi juga melibatkan pengembangan lebih lanjut atas teori-teori tersebut, yang kemudian diwariskan kepada peradaban Barat dan menjadi fondasi penting bagi lahirnya Renaisans di Eropa.

Selain itu, sistem pendidikan Islam yang bersifat holistik, yaitu menggabungkan antara aspek spiritual dan intelektual, turut memengaruhi cara berpikir umat Islam pada masanya. Ilmu pengetahuan tidak dipisahkan dari nilai-nilai keimanan dan moralitas, sehingga menjadikan sains sebagai bagian dari ibadah. Ini menciptakan sebuah paradigma bahwa ilmu bukan hanya untuk

[120] Muhammad Amiruddin Dardiri, Waluyo Waluyo, and Anzar Aquil, 'Kondisi Sosial-Politik Dinasti Bani Abbasiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24.1 (2023), hlm. 69–82.

mencari manfaat duniawi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Namun demikian, perkembangan ini tidak terlepas dari dinamika kebijakan yang diberlakukan oleh para pemimpin umat. Ketika suatu pemerintahan mendukung kebebasan akademik, maka ilmu pengetahuan berkembang pesat. Sebaliknya, ketika terjadi stagnasi atau pembatasan terhadap kebebasan berpikir, maka kemunduran peradaban pun tak terhindarkan. Oleh karena itu, keberhasilan peradaban Islam dalam sejarah sangat berkaitan erat dengan arah dan visi kebijakan pendidikan yang diberlakukan pada zamannya.[121]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan yang mendukung pencarian ilmu secara luas dan inklusif telah membawa umat Islam mencapai masa keemasan intelektual yang pengaruhnya masih terasa hingga saat ini.

KESIMPULAN

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, kebijakan pendidikan Islam mengalami perkembangan yang pesat, yang ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah, masjid, dan perpustakaan. Pendidikan pada masa ini tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu umum seperti matematika, kedokteran, dan filsafat, yang diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Para pemimpin Bani Abbasiyah, seperti Khalifah Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, memberikan dukungan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan, baik dengan menyediakan fasilitas pendidikan maupun mendorong penerjemahan karya-karya ilmiah dari budaya lain ke dalam bahasa Arab.

Tujuan pendidikan pada masa Abbasiyah sangat beragam, mencakup pembentukan akhlak dan keagamaan, serta pengembangan masyarakat yang lebih maju. Masyarakat didorong untuk menuntut ilmu sebagai sarana untuk mencapai kemajuan sosial, bukan hanya untuk kepentingan duniawi. Namun, terdapat juga tujuan pendidikan yang

[121] Arifah Zaitun, 'Pengaruh Dinasti Abbasiyah Terhadap Kemajuan Peradaban Islam', *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3.2 (2024), hlm. 113–24.

lebih bersifat pribadi, seperti memperoleh status sosial dan kekuasaan. Keberagaman tujuan ini mencerminkan semakin luasnya cakrawala pendidikan pada masa itu, di mana ilmu pengetahuan dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat.

Perkembangan lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah sangat signifikan, dengan munculnya berbagai jenis lembaga, mulai dari kuttab sebagai pendidikan dasar hingga Bait al-Hikmah yang menjadi pusat riset dan penerjemahan. Masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan informal, di mana para ulama mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, toko kitab, rumah para ulama, dan majlis menjadi tempat penting bagi perkembangan intelektual, yang berperan sebagai wadah diskusi dan pengajaran ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa tersebut bersifat holistik, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem yang komprehensif.

Dampak dari kebijakan pendidikan ini sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Munculnya ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang menguasai berbagai disiplin ilmu, serta proses penerjemahan karya-karya besar dari Yunani, Persia, dan India, menjadikan dunia Islam sebagai pusat intelektual dunia pada masa itu. Selain itu, kebijakan pendidikan yang menyatukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama menciptakan paradigma baru, bahwa ilmu bukan hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah berperan penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan memperkaya peradaban Islam yang terus memberikan pengaruh hingga kini.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Ainur Riska, ‘Sejarah Peradaban Islam: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Pemerintahan Diinasti Bani Abbasiyah’, *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 10.01 (2022).

Arsyad, Mujahid Mallombasi, Muhammad Zain Kasban, and Bahaking Rama, ‘Dinasti Abbasiyah: Biografi Khalifah, Kebijakan Politik, Pengaruh, Dan Kegemilangan Peradaban Islam’, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4.1 (2024).

Berliana, Siti Nurkhasanah Chandra Intan, and Badrus Zaman, ‘Transformasi Pendidikan Di Era Umayyah: Antara Kebijakan Dan Rekontruksi Di Masa Sekarang’, *Al Ghazali*, 7.1 (2024).

Dardiri, Muhammad Amiruddin, Waluyo Waluyo, and Anzar Aquil, 'Kondisi Sosial-Politik Dinasti Bani Abbasiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24.1 (2023).

Daulay, Haidar Putra, Zaini Dahlan, and Yumita Anisa Putri, 'Peradaban Dan Pemikiran Islam Pada Masa Bani Abbasiyah', *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021).

Huda, Nurul, 'Pendidikan Islam Masa Bani Abbasyiah', *Jurnal Pendidikan*, 1 (2015).

Listari, Wira Kurnia, and Alimni Alimni, 'Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah Dan Perkembangan Pendidikan Islam Masa Modern', *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 4.2 (2023).

Mahroes, Serli, 'Sehril Mahroes, Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah Perspektif Sejarah Pendidikan Islam, Bandung:Uin Sunan Gunung Djati, 2015.', *Tarbiya:Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1.1 (2015).

Maryamah, Maryamah, 'Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah', *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.1 (2015).

Nunzairina, Nunzairina, 'Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, Dan Kebangkitan Kaum Intelektual', *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3.2 (2020).

Penyusun, Tim, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (GUEPEDIA, 2022)

Riyadi, Agus, 'Kebijakan Dakwah Al-Makmun Di Dinasti Bani Abbasiyah: Masa Keemasan Klasik', *Hikmah*, 18.1 (2024).

Wahyuningsih, Sri, 'Implementasi Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah Dan Pada Masa Sekarang', *Jurnal Kependidikan*, 2.2 (2014).

Yunus, Mahmud, '6Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam,(Cet. VII; Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1963), h. 46', *VII. Jakarta: PT Hida Karya Agung*, 1963

Yusnadi, Yusnadi, and Fakhrurrazi Fakhrurrazi, 'Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah', *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 2020.

Zaitun, Arifah, 'Pengaruh Dinasti Abbasiyah Terhadap Kemajuan Peradaban Islam', *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3.2 (2024).

Zuhairi, Dkk, 'Sejarah Pendidikan Islam', *Jakarta: Bumi Askara*, 2017

Zuhdiah, Zuhdiah, Muhammad Yahdi, and Bahaking Rama,

‘Karakteristik Pendidikan Islam Masa Klasik Dan Modern’, *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.1 (2024).

Zulhimma, Zulhimma, ‘Sejarah Pendidikan Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam’ (Penerbit Kencana bekerja sama dengan IAIN Padangsidimpuan Press, 2021)

BAB 8
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA BANI UTSMANIYAH

(Tria Wahyuni Ramadhina)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pendidikan Islam merupakan bagian integral dari perjalanan peradaban Islam yang terus berupaya mempertahankan, mengembangkan, dan mentransformasikan tradisi keilmuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu periode yang menonjol dalam perkembangan tersebut terjadi pada masa Kesultanan Utsmaniyah (*Ottoman Empire*), yang berlangsung sejak akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Kesultanan Utsmaniyah dikenal tidak hanya sebagai entitas politik dan militer yang kuat, melainkan juga sebagai pusat pertumbuhan budaya, intelektual, dan pendidikan Islam. Dalam rentang waktu lebih dari enam abad, Bani Kesultanan Utsmaniyah merancang dan menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang memberikan kontribusi besar terhadap dunia Islam, mencakup aspek keagamaan, sosial, dan politik.[122] (Achmad Saeful, 2024)

Pada masa ini, pendidikan Islam diposisikan sebagai alat strategis untuk memperkuat legitimasi negara, membentuk identitas keagamaan masyarakat, serta mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pemerintahan, keulamaan, dan masyarakat umum. Sistem pendidikan dikembangkan secara sistematis, dimulai dari pendidikan dasar di lembaga mekteb (sekolah dasar), hingga pendidikan lanjutan di madrasah dan darul hadits. Negara memberikan perhatian serius terhadap perluasan akses pendidikan, di antaranya melalui pembentukan lembaga-lembaga yang dibiayai oleh negara dan didukung oleh sistem wakaf.

Dari sisi substansi, kurikulum pendidikan Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah mencakup disiplin ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu pengetahuan umum seperti matematika,

[122] Achmad Saeful, Dan Ferdinal Lafendry, Modernisasi Pendidikan Dalam Islam: Telaah Model Pendidikan Modern Masa Turki Utsmani, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 7 No. 1, 2024, hal. 60-61.

logika, dan astronomi. Standarisasi kualitas tenaga pendidik juga menjadi fokus utama melalui mekanisme sertifikasi ulama dan guru. Keseriusan pemerintah dalam bidang pendidikan tercermin dalam pembangunan kompleks pendidikan (*külliye*) yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, keagamaan, dan pelayanan sosial.

Meski demikian, tantangan muncul ketika pengaruh Barat semakin kuat, terutama pada abad ke-18 dan 19. Tekanan ini mendorong pemerintah Utsmaniyah melakukan reformasi melalui gerakan Tanzimat, yang memperkenalkan sistem pendidikan sekuler modern di samping pendidikan tradisional. Kondisi ini melahirkan dualisme sistem pendidikan yang berupaya menyeimbangkan antara pelestarian nilai-nilai Islam dan penerimaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern.

Oleh karena itu, kajian terhadap kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah sangat penting dalam memahami dinamika adaptasi pendidikan Islam terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan pendidikan pada masa ini menjadi refleksi penting untuk membangun pendidikan Islam yang mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan akar nilai-nilai keislaman.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah sejarah awal berdirinya kesultanan Utsmaniyah?
b. Bagaimanakah sejarah Pendidikan Islam pada masa kesultanan Utsmaniyah?
c. Bagaimanakah kebijakan Pendidikan Islam pada masa kesultanan Utsmaniyah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis *(historical research),* yang bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis, objektif, dan kritis, khususnya mengenai kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan *(library research),* yaitu dengan menelaah berbagai literatur seperti buku-buku sejarah, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen sejarah, dan karya-karya para sejarawan Islam maupun Barat yang relevan dengan tema. Langkah-langkah penelitian dilakukan melalui tahap *heuristik* (pengumpulan data), *verifikasi* (kritik sumber),

interpretasi (penafsiran data), dan *historiografi* (penyusunan narasi sejarah). Dengan metode ini, peneliti berusaha menggambarkan dinamika perkembangan pendidikan Islam di masa Utsmaniyah, termasuk sistem kelembagaan, kurikulum, metode pengajaran, serta dampak reformasi pendidikan yang terjadi pada abad ke-19.

TEORI

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori *geopolitik dan jaringan perdagangan* dalam sejarah pendidikan Islam, yang menekankan bahwa letak geografis dan hubungan internasional suatu wilayah sangat memengaruhi perkembangan serta arah kebijakan pendidikan Islam di dalamnya. Dalam konteks Kesultanan Utsmaniyah, posisi strategisnya yang menghubungkan tiga benua Asia, Eropa, dan Afrika menjadikan wilayah ini sebagai pusat kekuatan politik, ekonomi, dan intelektual dunia Islam. Berbeda dengan negara-negara seperti Laos di Asia Tenggara yang secara geografis terisolasi dari jalur laut utama dan tidak menjadi titik sentral perdagangan internasional, Kesultanan Utsmaniyah justru menjadi pusat lalu lintas pelayaran, ziarah, dan perdagangan, yang berkontribusi pada penyebaran ilmu pengetahuan serta pertukaran pemikiran keagamaan. Interaksi global ini mempercepat pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam dan turut membentuk kebijakan pendidikan yang integratif, inklusif, dan dinamis. Oleh karena itu, teori ini menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Kesultanan Utsmaniyah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal politik dan sosial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh posisi geopolitik strategis yang memungkinkan berlangsungnya proses asimilasi budaya dan intelektual yang luas dan produktif.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Awal Berdirinya Kesultanan Utsmaniyah

Dinasti Turki Usmani berasal dari suku Qayigh, bagian dari bangsa Aghuz, yang dipimpin oleh Sulaiman Syah. Ketika serangan Mongol mulai meluas dan mengancam dunia Islam, Sulaeman Syah membawa kaumnya mengungsi untuk mencari perlindungan. Mereka pun meminta bantuan Jalaluddin dari Dinasti Khawarizmi Syah di wilayah Transoxiana. Atas saran Jalaluddin, rombongan ini menetap sementara di Asia Kecil. Namun, karena serangan Mongol tak

kunjung mereda, mereka akhirnya terpaksa melanjutkan perjalanan ke wilayah Syam untuk mencari tempat yang lebih aman.[123]

Selama hampir tiga abad, suku ini terus berpindah-pindah dari Turkistan, Persia, hingga Irak. Mereka akhirnya memeluk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi, saat menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13 M, ketika serangan Mongol makin hebat, mereka melarikan diri ke barat dan bergabung dengan orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di bawah pimpinan Ertoghrul, mereka membantu Sultan Alauddin II Seljuk yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan itu, Sultan Alauddin memberikan hadiah sebidang tanah di wilayah perbatasan Bizantium. Sejak saat itu, mereka mulai membangun kehidupan baru di tanah tersebut, dengan kota Syukud (Söğüt) sebagai ibu kota mereka.[124]

Pada abad ke-13, Kesultanan Seljuk yang berkuasa di Anatolia mengalami masa kemunduran yang signifikan. Penyebab utama dari kemunduran ini adalah serangan besar-besaran dari bangsa Mongol, yang pada saat itu sedang melakukan ekspansi luas ke berbagai wilayah di Asia dan Timur Tengah, serta konflik internal yang melemahkan struktur pemerintahan Seljuk dari dalam. Ketidakstabilan politik dan militer ini menciptakan kekosongan kekuasaan di Anatolia, membuka peluang bagi munculnya banyak kerajaan kecil Turki, yang disebut beylik.

Di antara berbagai beylik yang bermunculan, salah satu yang paling berpengaruh dipimpin oleh Ertugrul, seorang kepala suku dari keturunan Kayi, salah satu cabang suku besar Turki Oghuz. Kepemimpinan Ertugrul membawa stabilitas dan kekuatan kepada sukunya di tengah situasi yang tidak menentu. Setelah wafatnya Ertugrul, tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Utsman I (Osman Gazi), yang lahir pada tahun 656 H/1267 M.[125]

Pada masa awal kepemimpinannya, Utsman I membangun hubungan diplomatik yang erat dengan Dinasti Seljuk. Kabilah

---

[123] Jaih Mubarok, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 113.

[124] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 129.

[125] Frial Ramadhan Supratman, Setelah Mongol: Osman Gazi dan Kepemimpinan Muslim di Anatolia Abad ke 14, *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, Vol. 9, No. 2, 2021, hal. 39-40.

Utsmani mendapatkan kepercayaan tinggi dari Dinasti Seljuk, suatu kepercayaan yang tidak disia-siakan oleh Utsman. Utsman berhasil menjadikan kabilahnya sebagai sekutu penting dan memperoleh posisi strategis dalam struktur kekuasaan Seljuk.

Namun, kehancuran yang melanda Dinasti Seljuk semakin tidak terbendung. Pada tahun 699 H/1300 M, bangsa Mongol kembali melakukan serangan besar terhadap Daulah Seljuk, yang berujung pada kematian Sultan Alaiddin II. Dengan runtuhnya kekuasaan pusat dan melemahnya kontrol atas wilayah-wilayah kekuasaan, Utsman I memanfaatkan situasi ini dengan menyatakan kemerdekaannya. Kepemimpinan Utsman membawa perubahan besar dan menjadi titik awal berdirinya salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam dan dunia, yakni Kesultanan Utsmaniyah. Ia kemudian mengukuhkan kekuasaannya atas daerah-daerah yang sudah berada di bawah kendalinya. Sejak saat itu, berdirilah Dinasti Utsmaniyah secara resmi di kawasan Asia Kecil, dengan Utsman I sebagai Sultan pertama.[126]

Utsman I tidak hanya mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga memperluas wilayahnya dengan aktif menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, terutama milik Kekaisaran Bizantium yang saat itu juga tengah mengalami kemunduran. Dengan semangat ekspansi yang kuat, pada tahun 1299 M, Utsman secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari Dinasti Seljuk dan mendirikan negara yang kelak menjadi kekuatan besar dunia. Tahun tersebut kini secara luas dianggap sebagai tahun berdirinya Kesultanan Utsmaniyah, atau dalam istilah barat dikenal sebagai *Ottoman Empire*, di kawasan barat laut Anatolia, tidak jauh dari Konstantinopel, ibu kota Bizantium.[127]

Nama "*Ottoman*" diambil dari nama pendirinya, Osman, yang dalam bahasa Arab disebut "*Utsman*". Para penerus Utsman I, terutama putranya, Orhan Gazi, melanjutkan tradisi ekspansi dengan penuh semangat. Pada masa pemerintahan Orhan Gazi, Kesultanan Utsmaniyah berhasil menaklukkan sejumlah wilayah penting di Asia Kecil dan bahkan mulai masuk ke Eropa Tenggara. Salah satu

[126] Muhammad Affan, Kesultanan Utsmani (1300–1517): Jalan Panjang Menuju Kekhalifahan*, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2018, hal. 105.

[127] Colin Imber, *Kerajaan Ottoman, Terjemahan. Irianto Kurniawan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hal. 5.

pencapaian besar Orhan adalah penaklukan kota Bursa pada tahun 1326 M, yang kemudian dijadikan ibu kota pertama Kesultanan Utsmaniyah.

Seiring waktu, Kesultanan ini terus tumbuh menjadi kekuatan politik dan militer utama di kawasan Mediterania. Salah satu tonggak terpenting dalam sejarah Utsmaniyah adalah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II, atau yang dikenal sebagai Mehmed al-Fatih, pada tahun 1453 M. Dengan keberhasilan ini, Kesultanan Utsmaniyah tidak hanya mengakhiri riwayat Kekaisaran Bizantium, tetapi juga mengubah wajah dunia. Konstantinopel kemudian diubah namanya menjadi Istanbul dan dijadikan ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah, yang mempercepat transformasi mereka menjadi sebuah kekaisaran besar.

Pada masa pemerintahan Sultan Selim I, sekitar tahun 1517, Kesultanan Utsmaniyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah Arab termasuk Mesir, Syam, dan Hijaz. Dengan jatuhnya wilayah-wilayah suci Islam tersebut ke tangan Utsmaniyah, Selim I memperoleh gelar sebagai Khalifah, yang menjadikan Kesultanan Utsmaniyah tidak hanya sebagai kekuatan politik dan militer terbesar di dunia Islam, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual seluruh umat Muslim.

Puncak kejayaan Kesultanan Utsmaniyah tercapai pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman al-Qanuni. Pada masa ini, wilayah Kesultanan membentang luas dari Eropa Timur, seluruh Asia Barat, hingga Afrika Utara. Selain keberhasilan militer, Kesultanan juga mengalami masa keemasan dalam bidang hukum, seni, arsitektur, dan budaya, menjadikan Utsmaniyah sebagai salah satu peradaban paling gemilang dalam sejarah dunia.

Kesultanan Utsmaniyah bertahan selama lebih dari enam abad, melalui berbagai masa kejayaan dan kemunduran, hingga akhirnya resmi dibubarkan pada tahun 1924. Pembubaran ini terjadi setelah kekalahan dalam Perang Dunia I, diikuti oleh runtuhnya kekuasaan monarki dan berdirinya Republik Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dengan berakhirnya Kesultanan, berakhirlah pula era kekhalifahan Islam yang sudah berlangsung lebih dari seribu tahun.

Dengan demikian, Kesultanan Utsmaniyah, yang berdiri pada tahun 1299 M oleh Utsman I, kepala suku Kayi, bukan hanya

mencatatkan sejarah panjang penuh dinamika, tetapi juga meninggalkan warisan besar yang terus berpengaruh terhadap sejarah politik, sosial, dan budaya di dunia Islam dan dunia secara keseluruhan.

Karena masa kekuasaan Kesultanan Utsmani berlangsung sangat panjang, yakni dari tahun 1299 hingga 1924 M, para sejarawan memiliki perbedaan pandangan dalam menentukan periodisasinya. Untuk memudahkan pemahaman, akhirnya para ahli sejarah membagi perjalanan panjang ini ke dalam lima periode, yaitu :[128]

1. Periode I (1299–1402 M)

   Periode ini berlangsung dari masa pemerintahan Utsman I hingga Bayazid I. Pada masa ini, Kesultanan Utsmani mulai berdiri dan melakukan penaklukan-penaklukan awal. Namun, periode ini juga diwarnai kekalahan besar melawan Timur Lenk, yang banyak menaklukkan wilayah-wilayah Islam.
2. Periode II (1403–1566 M)

   Dimulai dari masa Sultan Muhammad I hingga Sultan Sulaiman I (Al-Qanuni). Ini adalah masa pembangunan kembali dan perkembangan pesat Kesultanan Utsmani, hingga mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sulaiman Agung.
3. Periode III (1566–1703 M)

   Dari masa Sultan Salim II hingga Sultan Mustafa II. Pada periode ini, Utsmani masih melakukan beberapa penaklukan besar, termasuk jatuhnya Hongaria, namun juga mulai terlihat tanda-tanda kemunduran.
4. Periode IV (1703–1839 M)

   Dimulai dari Sultan Ahmad III hingga Sultan Mahmud II. Masa ini dikenal sebagai periode kemunduran dan melemahnya kekuasaan Utsmani, yang ditandai dengan berbagai perjanjian yang tidak menguntungkan dengan kerajaan-kerajaan non-Muslim.
5. Periode V (1839–1922 M)

   Dimulai dari masa Sultan Abdul Majid I hingga Muhammad VI. Pada periode ini, Kesultanan Utsmani mengalami

[128] Imam Fuadi, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 10.

kebangkitan dalam bidang kebudayaan dan administrasi, meskipun dipengaruhi kuat oleh ide-ide Barat.

Dari pembahasan di atas, penulis menganalisis bahwa Dinasti Utsmaniyah, yang dimulai oleh Utsman I pada 1299 M, berkembang dari suku Kayi yang menetap di Asia Kecil. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Sulaiman al-Qanuni, dengan penaklukan Konstantinopel dan penguasaan wilayah-wilayah Islam. Namun, setelah berabad-abad berkuasa, Utsmaniyah mengalami kemunduran hingga akhirnya dibubarkan pada 1924 M. Sejarahnya dibagi menjadi lima periode, mencerminkan fase kejayaan, kemunduran, dan pembubaran kesultanan.

B. Sejarah Pendidikan Islam Pada Masa Kesultanan Utsmaniyah

Pada masa Kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Orkhan tercatat sebagai penguasa pertama yang mendirikan madrasah. Madrasah-madrasah ini menjadi pilar utama dalam membangun fondasi pendidikan Islam di wilayah kekuasaan Utsmani. Tradisi ini dilanjutkan oleh para sultan sesudahnya, terutama di kota-kota besar seperti Istanbul dan Mesir, dengan mendirikan masjid-masjid besar yang berfungsi ganda sebagai tempat ibadah dan pusat pendidikan. Selain itu, banyak perpustakaan didirikan, mengoleksi ribuan kitab yang dapat diakses bebas oleh masyarakat umum. Keberadaan perpustakaan ini memicu lahirnya para guru, ulama, sejarawan, dan sastrawan besar yang memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan intelektual dunia Islam.[129]

Kebangkitan pendidikan Islam di wilayah Turki Utsmani mendapat dorongan besar setelah jatuhnya Mesir ke tangan kekuasaan mereka. Sultan Salim I, sebagai pemimpin kala itu, memerintahkan pemindahan kitab-kitab berharga serta berbagai barang peninggalan budaya dari Mesir ke Istanbul. Selain benda-benda berharga, Sultan Salim juga membawa keturunan Sultan Mamluk, para ulama terkemuka, dan tokoh-tokoh intelektual untuk menetap di Istanbul. Langkah strategis ini berhasil menjadikan Istanbul sebagai pusat baru pendidikan dan budaya Islam,

[129] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hal. 274-275.

menggantikan posisi Baghdad yang sebelumnya menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Upaya membangun dan mengembangkan pendidikan Islam berlanjut di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni (1520–1566 M). Pada masa pemerintahannya, dunia Islam mengalami kemajuan pesat dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sultan Sulaiman memperkokoh jaringan pendidikan melalui pembangunan kompleks madrasah yang modern pada zamannya. Kompleks ini biasanya dilengkapi dengan masjid, rumah sakit, serta lembaga sosial lain, membuktikan betapa pentingnya integrasi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam pandangan pemerintahan Utsmani. Dukungan penuh terhadap pendidikan ini menjadi salah satu faktor utama mengapa masa Sultan Sulaiman sering disebut sebagai salah satu era keemasan Turki Utsmani.

Dalam sistem pendidikan di masa tersebut, metode hafalan terhadap teks-teks dasar sangat ditekankan. Para murid diwajibkan menghafal kitab-kitab seperti *Al-Jurumiyah* (tata bahasa Arab), *Taqrib* (fiqih dasar), *Alfiyah* Ibnu Malik (nahwu), dan *Matan Sullam* (ilmu logika). Hafalan menjadi fondasi utama sebelum siswa melanjutkan kepada pemahaman mendalam melalui penjelasan (syarah) dan catatan tambahan (khasiyah). Metode ini menciptakan para cendekiawan yang tidak hanya kuat dalam hafalan, tetapi juga memiliki kemampuan analisis terhadap teks-teks klasik Islam. Meskipun bagi sebagian pihak metode ini dianggap terlalu tradisional, ia tetap terbukti efektif melahirkan para ulama besar yang berpengaruh.

Namun, di balik segala pencapaiannya, pendidikan Islam di Turki Utsmani tidak sepenuhnya berjalan mulus. Secara umum, sistem pendidikan menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya inovasi kurikulum, terbatasnya pengembangan metodologi pembelajaran, dan minimnya perhatian maksimal dari pihak penguasa terhadap pembaruan pendidikan. Akibatnya, meskipun tetap muncul ulama-ulama besar dalam sejarah Turki Utsmani, jumlah mereka tidak sebanyak pada masa keemasan Daulah Abbasiyah. Ini menandakan bahwa semangat keilmuan masih ada, tetapi tidak lagi seproduktif zaman sebelumnya.

Memasuki abad ke-19, muncul sosok reformis penting dalam sejarah Turki Utsmani, yaitu Sultan Mahmud II. Ia dikenal berani

menabrak tradisi kuno demi melakukan pembaruan yang mendesak diperlukan. Mahmud II melakukan reformasi besar-besaran, baik dalam bidang sosial, pemerintahan, maupun pendidikan. Dalam membangun relasi dengan rakyat, Mahmud II mengubah pendekatan aristokratis yang kaku menjadi hubungan yang lebih terbuka dan komunikatif. Upaya ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi modernisasi sistem pendidikan di Turki Utsmani, yang kemudian berlanjut di era Tanzimat dan reformasi lebih lanjut di masa berikutnya.

Dengan demikian, perjalanan pendidikan Islam di masa Kekhalifahan Turki Utsmani memperlihatkan dinamika yang kompleks. Dimulai dari upaya membangun jaringan madrasah, berkembang menjadi pusat intelektual besar di Istanbul, mengalami masa kejayaan di era Sultan Sulaiman, lalu menghadapi berbagai tantangan, dan akhirnya memasuki fase reformasi besar-besaran di tangan Sultan Mahmud II. Sejarah ini menjadi bukti bahwa pendidikan selalu menjadi salah satu kunci utama dalam membangun dan mempertahankan peradaban besar.

C. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kesultanan Utsmaniyah

Pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah, pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun karakter masyarakat dan mempertahankan kekuasaan dinasti. Awalnya, pendidikan bersifat tradisional dan berbasis agama. Institusi seperti *sibyan mektepleri* (sekolah dasar) dan madrasah menjadi pusat utama pendidikan. *Sibyan mektepleri* mengajarkan dasar-dasar agama Islam, membaca Al-Qur'an, dan nilai-nilai moral kepada anak-anak sejak usia dini. Sementara itu, madrasah tidak hanya berfokus pada pendidikan agama seperti tafsir, hadis, dan fiqh, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu rasional seperti matematika, astronomi, dan filsafat. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Kesultanan Utsmaniyah menganut pandangan yang integratif terhadap ilmu agama dan ilmu dunia.

Perkembangan pendidikan Islam pada masa kekuasaan Turki Usmani tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya dan situasi sosial-politik pada zamannya. Sebagai sebuah peradaban besar, Turki Usmani tumbuh dari percampuran berbagai budaya, seperti Persia,

Bizantium, dan Arab. Dari budaya Persia, mereka menyerap nilai-nilai etika dan sopan santun yang kuat, terutama dalam kehidupan istana yang penuh tata krama. Dari Bizantium, mereka belajar banyak soal sistem pemerintahan yang terstruktur dan strategi militer yang rapi. Sementara itu, dari tradisi Arab, mereka mengadopsi gagasan-gagasan penting dalam bidang ekonomi, kehidupan sosial, serta perkembangan ilmu pengetahuan.[130]

Sebagai bangsa dengan latar belakang militer yang kuat, sistem pendidikan pada masa kerajaan ini banyak difokuskan pada pelatihan militer. Hal ini melahirkan pasukan elit bernama *Yenissari*, yang kemudian menjadi kekuatan utama dan menjadikan negara ini memiliki mesin perang yang sangat tangguh.

Di sisi lain, kehidupan beragama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan sosial dan politik kerajaan. Para penguasa tak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga pelaksanaan syariat Islam. Ulama memiliki tempat istimewa, dihormati baik oleh negara maupun masyarakat. Dalam struktur keagamaan, salah satu sosok yang sangat berpengaruh adalah Mufti, seorang pejabat tinggi agama yang diberi wewenang untuk mengeluarkan fatwa resmi, membantu menjawab berbagai persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat.

Pada masa itu, berkembang pula ajaran-ajaran tarekat yang besar pengaruhnya, seperti *tarekat al-Bektasyi dan al-Maulawy*. Pada masa itu, *tarekat al-Bektasyi* memiliki pengaruh besar di kalangan tentara Yeniseri, sementara *tarekat al-Maulawy* lebih dekat dengan para penguasa. Sufisme atau tasawuf begitu menarik minat umat Islam, hingga mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Situasi yang penuh frustasi di kalangan umat Islam, yang disebabkan oleh keruntuhan tatanan intelektual dan material akibat konflik internal serta serangan tentara Mongol yang menghancurkan, membuat banyak orang kembali kepada Tuhan dengan sikap yang lebih fatalistis. ada masa itu, madrasah-madrasah yang berkembang mulai dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sufisme. Seiring waktu, madrasah-madrasah ini berubah *menjadi zawiyah-zawiyah* tempat para pencari jalan spiritual berkumpul untuk menjalani riyadhah,

[130] Ajid Tohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 186.

yaitu latihan rohani untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di bawah bimbingan para guru sufi.

Pada masa itu, dunia ilmu pengetahuan mengalami penyempitan. Madrasah menjadi satu-satunya lembaga pendidikan umum, dan di dalamnya fokus utama adalah pengajaran agama. Karena itu, kemunculan 'sarjana-sarjana' besar dan pemikir-pemikir orisinal dari waktu ke waktu adalah hal yang benar-benar luar biasa mereka berkembang bukan dari kurikulum resmi, melainkan dari upaya mandiri. Kenyataannya, di abad-abad pertengahan akhir, dunia pemikiran lebih banyak menghasilkan karya-karya berupa komentar atas pemikiran sebelumnya, bukan karya-karya orisinal baru..[131]

Pada abad pertengahan, pendidikan Islam mengalami kemunduran, dengan masyarakat lebih fokus pada tasawuf karena frustrasi terhadap kondisi yang ada. Kurikulum tidak terstruktur dan metode pengajaran lebih berfokus pada hafalan. Meskipun militer *Ottoman* berkembang, mereka kalah dalam pertempuran dengan Eropa karena kurangnya kemajuan di bidang sains dan konflik internal.

Perubahan besar dalam bidang pendidikan di Kesultanan Turki Usmani bermula pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II, yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Abdul Majid. Pembaharuan ini mencakup berbagai sektor, salah satunya pendidikan, yang dipandang sebagai pilar utama dalam mendukung kemajuan kerajaan. Sultan Mahmud II, yang dikenal sebagai perintis reformasi di Turki Usmani pada awal abad ke-19, dalam upaya membangun hubungan yang lebih inklusif dengan masyarakat. Ia menyadari bahwa model pendidikan berbasis madrasah tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi tuntutan zaman.[132]

Sultan Mahmud II melakukan reformasi besar dan mendasar di bidang pendidikan, yang kemudian berpengaruh kuat terhadap gerakan pembaruan di Kesultanan Utsmaniyah. Setelah mengetahui kekalahan yang dialami Turki *Ottoman*, Sultan Mahmud II segera mengambil tindakan, dengan fokus utama pada reformasi militer. Ia menyadari perlunya membentuk kekuatan militer baru. Namun,

---

[131] Abuddin Nata, *Sejarah PendidikanIslam Pada Periode Klasik dan Pertengahan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 284-285.

[132] Rizal Choirul Ikhsan, dan Muhammad Haerulloh Zikri, Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Turki Usmani, *KRINOK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* Vol. 2 No. 3, 2023, hal. 193.

upaya ini awalnya ditentang oleh korps Janissari, pasukan lama *Ottoman*. Meskipun mendapat perlawanan, Sultan Mahmud II tetap melanjutkan reformasi militernya, hingga akhirnya membubarkan Janissari melalui sebuah pembantaian besar dan membentuk pasukan baru.

Pada masa itu, madrasah menjadi satu-satunya lembaga pendidikan publik di dunia Islam, termasuk di Kesultanan Utsmaniyah. Namun, madrasah hanya mengajarkan ilmu keagamaan tanpa menyediakan pendidikan umum. Hal ini menyebabkan banyak orang tua lebih memilih mengirim anak-anak mereka ke perusahaan kerajinan untuk belajar keterampilan, yang akhirnya meningkatkan angka buta huruf. Untuk mengatasi masalah ini, Sultan Mahmud II mengeluarkan fatwa agar generasi muda tetap bersekolah di madrasah sambil memperbarui kurikulumnya dengan menambahkan mata pelajaran umum. Selain itu, Sultan mendirikan beberapa sekolah baru seperti *Mekteb-i Ulum-u Edebiye* dan *Mekteb-i Maarif*, yang menerima siswa berprestasi dari madrasah.[133]

Kurikulum di *Mekteb-i Ma'arif* mencakup berbagai bidang ilmu umum seperti bahasa Prancis, fisika, geografi, geometri, sejarah, dan ilmu politik, selain mata pelajaran agama. Sekolah ini juga mempersiapkan siswa untuk menjadi pejabat pemerintahan. Demikian pula, *Mekteb-i Ulum-u Edebiye* berfokus pada pelatihan penerjemah untuk keperluan administrasi negara.[134] Pendirian sekolah ini merupakan inovasi besar karena menggabungkan pelatihan agama, fisik, akademik, serta keterampilan praktis untuk mendukung pekerjaan di dalam dan luar negeri, terutama dalam administrasi *Ottoman*.

Selain itu, Sultan Mahmud II mengambil langkah besar dalam bidang pendidikan dengan mendirikan akademi militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah bedah. Seiring waktu, sekolah kedokteran dan sekolah bedah itu kemudian digabung menjadi satu lembaga baru yang dinamakan *Darü'l-Ulum-i Hikemiye ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane*. Di sekolah kedokteran ini, selain pelajaran umum, siswa diajari menggunakan bahasa Prancis sebagai

---

[133] Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspek*, (Jakarta: UI Press, 1985), hal. 15.

[134] Joseph S Szyliowies, *Education and Modernization in Midle East diterjemahkan oleh Achmad Djaini. Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 2001), hal. 174.

bahasa pengantar. Sekolah ini juga memproduksi buku-buku tentang ilmu alam, filsafat, dan berbagai bidang lainnya, yang bertujuan mengenalkan siswa pada pemikiran Barat kontemporer.

Dalam upaya lain untuk memajukan pendidikan dan modernisasi Kesultanan, Sultan Mahmud II juga mengirim pelajar ke Eropa agar mereka membawa pulang ide dan gagasan baru untuk kemajuan negara. Di bidang literasi, Sultan mendirikan biro penerjemahan untuk menerjemahkan buku dan literatur asing. Ia juga menginisiasi penerbitan surat kabar *Takvim-i Vekayi,* yang berisi artikel-artikel baru dan ide-ide modern yang membawa pengaruh positif bagi masyarakat Turki.[135]

Reformasi ini berlanjut dengan istilah *Tanzimat* yang bertujuan memperbaiki sistem pendidikan dan pemerintahan. di mana modernisasi dan sekularisasi mulai diperkenalkan secara sistematis. Pemerintah mengadopsi sistem *Usul-i Cedid* (Metode Baru) yang menekankan pendidikan gratis dan wajib bagi anak-anak, dengan sistem pendidikan bertingkat mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Undang-Undang Pendidikan Umum tahun 1869 memperkenalkan struktur baru yang membagi pendidikan ke dalam jenjang *ibtidai* (sekolah dasar), *rüşdiye* (sekolah menengah), dan *darülfünun* (universitas). Pendidikan modern ini memasukkan kurikulum ilmu pengetahuan alam, matematika, dan bahasa asing, memperluas cakupan pendidikan dari sekadar pembelajaran agama menuju pembentukan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia modern.

Perubahan ini didukung oleh berbagai inovasi dalam kurikulum, metode pengajaran, serta sistem pendanaan yang sebagian besar bersumber dari wakaf dan sumbangan umat. Selain itu, peran para ulama sebagai pendidik dan pembimbing intelektual sangat menonjol, memperkuat jaringan keilmuan di seluruh wilayah *Ottoman*. Di sisi lain, meskipun pernah mengalami kemunduran, keberadaan perpustakaan di berbagai kota tetap menjadi saksi pentingnya tradisi literasi dan pendidikan dalam peradaban Islam pada masa itu. Berikut penjelasan beberapa aspek penting dalam perkembangan pendidikan Islam di masa Kesultanan Utsmaniyah:

[135] H. Halim K, Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Usmani (Sejak Sultan Mahmud II Sampai Menjadi Negara Turki Modern oleh Mustafa Kemal), *Jurnal Studi Pendidikan* Vol. XIV, No. 2, 2016, hal. 131.

1. Lembaga Pendidikan Islam

Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan pesat. Tak hanya terbatas pada sekolah dasar, tetapi juga meluas hingga madrasah dan perguruan tinggi yang tumbuh subur dan menjadi pusat keilmuan. Madrasah pertama didirikan oleh Orhan Gazi, penguasa Dinasti *Ottoman*, di Iznik (*Nicea*) setelah menaklukkan kota tersebut pada tahun 1330-1331 M. Seiring berjalannya waktu, pembaruan pendidikan Islam di era modern menciptakan lembaga pendidikan yang lebih terstruktur, dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pada tingkat dasar, muncul *sibyan mektepleri* (sekolah dasar) yang merupakan kelanjutan dari kuttab. Sekolah-sekolah dasar ini didirikan oleh kalangan elit seperti pejabat dan sultan, dan tersebar luas di berbagai desa karena biaya pembangunan yang terjangkau. Di masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, sekolah dasar berkembang pesat, dengan lebih dari 350 sekolah di Istanbul dan ribuan sekolah lainnya di kota-kota seperti Aydin, Kastamonu, Bursa, dan Canakkale.

Selain sekolah dasar, madrasah sebagai pusat pendidikan juga berkembang pesat di bawah kekuasaan *Ottoman*. Sultan Murad II, Sultan Muhammad II, dan para pejabat lainnya mendirikan berbagai madrasah, seperti Dar Al-Hadits Madrasah di Edirne dan Sahn-i Saman Madrasah di Bursa. Madrasah ini menjadi bagian dari sistem wakaf dan memiliki otonomi finansial, meskipun diawasi oleh negara. Pendidikan tinggi pun berkembang, dengan berdirinya berbagai sekolah, seperti *Mekteb-i Ma'arif* (Sekolah Pengetahuan Umum) dan *Mekteb-i Ulum-u Edebiye* (Sekolah Sastra) pada masa Sultan Mahmud II, serta berbagai perguruan tinggi seperti Sekolah Tinggi Hukum, Sekolah Tinggi Keuangan, dan Universitas Istanbul pada masa Sultan Abdul Hamid. Madrasah dan perguruan tinggi ini menjadi pusat intelektual yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh wilayah kekuasaan *Ottoman*.[136]

2. Kurikulum dan Metode Pendidikan Islam

Menurut Ramayulis, kurikulum bukan hanya sekadar kumpulan bidang studi atau aktivitas belajar yang disusun oleh

[136] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 94.

sekolah. Lebih dari itu, kurikulum adalah sebuah program pendidikan yang dirancang untuk membentuk perkembangan siswa secara menyeluruh, termasuk dalam membangun karakter mereka sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.[137] Pada masa pertengahan, madrasah-madrasah di Turki belum memiliki kurikulum formal. Pembelajaran di sana lebih banyak berfokus pada pendidikan agama, tanpa struktur kurikulum yang terorganisasi seperti yang kita kenal saat ini. Namun, perubahan besar terjadi saat Sultan Mahmud II berkuasa, yang mengeluarkan kebijakan pendidikan dasar dan memperkenalkan kurikulum yang mencakup pelajaran umum, seperti seni kaligrafi, geografi, kewarganegaraan, dan aritmatika, di samping pelajaran agama. Langkah ini semakin dipertegas dengan pembentukan Komisi Sekolah Dasar Muslim pada tahun 1864, yang berupaya menyusun kurikulum lebih terstruktur di tingkat pendidikan dasar.

Perubahan dalam sistem pendidikan ini berlanjut ke tingkat madrasah dan pendidikan tinggi, seperti *Mekteb-i Ma'arif* (Sekolah Pengetahuan Umum) dan *Mekteb-i Ulum-u Edebiye* (Sekolah Sastra), dengan penambahan pelajaran umum seperti bahasa Prancis, ilmu bumi, dan sejarah. Pada masa itu, sekolah-sekolah juga mulai mengajarkan ilmu kedokteran, filsafat, dan astronomi, dengan tujuan memperkenalkan ide-ide modern dari Barat. Dalam praktiknya, guru yang mengajar di sekolah dasar adalah mereka yang telah lulus dari madrasah, yang awalnya hanya mengajarkan dasar-dasar ilmu keislaman, tetapi kemudian mencakup pengetahuan lain seperti aritmatika dasar dan puisi. Seiring waktu, metode pendidikan berkembang, dengan memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan berdiskusi. Perubahan ini turut mendorong pengiriman siswa ke luar negeri, yang setelah kembali, membawa ide-ide baru yang berpengaruh pada sistem pendidikan di Turki.

3. Pendanaan Pendidikan Islam

Pada masa bani Kesultanan Utsmaniyah, pendidikan Islam diberikan secara gratis tanpa membebankan biaya kepada orang tua siswa. Dana operasional sekolah dasar diperoleh dari berbagai sumber seperti wakaf, pajak daerah, zakat fitrah saat akhir Ramadhan, zakat biasa, serta hasil penjualan kulit hewan kurban.

[137] Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hal. 152.

Konsep wakaf dalam Islam berakar dari prinsip ekonomi Islam yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan akidah dan syari'ah. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga diarahkan untuk mencapai ibadah serta kemaslahatan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, wakaf bukan hanya sekadar instrumen finansial, tetapi juga sarana untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan moral dalam masyarakat.[138] Oleh sebab itu, ketika ekonomi Islam mengalami kemajuan, umat Islam dengan sukarela mengalokasikan hartanya demi kesejahteraan umat, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam.

4. Ulama-ulama Pada Masa Bani Kesultanan Utsmaniyah

Di masa kejayaan Kekaisaran Kesultanan Utsmaniyah, muncul banyak ulama besar yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan budaya Islam. Beberapa di antara ulama yang sangat terkenal pada periode ini antara lain:[139]

a. Syeikh Hasan Ali Ahmad As-Syafi'I, yang dikenal dengan gelar Al Madabighy, Jam'ul Jawami, dan syarah Ajrumiyah. Beliau wafat pada tahun 1170 H (1756 M), pengarang hasiyah.
b. Ibnu Hajar Al-Haitsami, seorang ulama besar yang menulis karya terkenal Tuhfah, beliau wafat pada tahun 975 H (1567 M).
c. Syamsuddin Ramali, wafat pada tahun 1004 H (1595 M), dikenal dengan karya monumental beliau Nihayah.
d. Muhammad bin Abdur Razak, Murtadla Al-Husainy Az-Zubaidy, pengarang syarah Al-Qamus yang terkenal dengan nama Tajul Urus, beliau wafat pada tahun 1205 H (1790 M.).
e. Abdur Rahman Al-Jabarity, wafat pada tahun 1240 H (1825 M), karya sejarahnya Ajaibul-Atsar Fit-Tarajim Wal-Akhbar, yang mengupas sejarah Mesir.

[138] Mukarom, Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Turki Usmani 1300-1922 M, *JURNAL TARBIYA* Vol. 1, No.1, 2015, hal.119.

[139] Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1992), hal. 171.

f. Syekh Hasan Al-Kafrawy As-Syafi'I Al-Azhary, wafat pada tahun 1202 H (1787 M.). Karya syarahnya terhadap Ajrumiyah dan kontribusinya dalam ilmu Nahwu (tata bahasa).
g. Syeikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bijirmy As-Syafi'I, wafat pada tahun 1212 H (1806 M), beliau sangat produktif dalam menulis Syarah dan Hasyiah.
h. Syeikh Hasan Al-Attar, wafat pada tahun 1250 H (1834 M), seorang pakar dalam matematika dan kedokteran.
i. Syeikh Muhammad bin Ahmad bin Arfah Ad-Dusuqy Al-Maliki, wafat pada tahun 1230 H (1814 M), di kenal dalam ilmu filsafat, ilmu falak (astronomi), dan matematika.
j. Nuruddin Ali Al-Buhairi, yang wafat pada tahun 944 H (1537 M.), beliau sangat dihormati karena pemikirannya dalam bidang fiqh dan filsafat.
k. Abdurrahman Al-Manawy, yang wafat pada tahun 950 H (1543 M), karya penting dalam teologi Islam dan fiqh.
l. Syahabuddin Al-Quliyuby, wafat tahun 944H (1537M).
m. Abdul-Baqybin Yusuf Az-Zarqany Al-Maliki, wafat pada tahun 1099 H (1687 M.), berkontribusi dalam ilmu fiqh, khususnya dalam mazhab Maliki.
n. Syeikh Abdullah Al-Syarqawy, yang dikenal sebagai Syeikh Al-Azhar, wafat pada tahun 1227 H (1812 M.). Beliau merupakan tokoh penting di Al-Azhar, universitas Islam terbesar di dunia.
o. Syekh Musthafa bin Ahmad As-Shawy, yang wafat pada tahun 1216 H (1801 M), karyanya Syarah dan Hasyiah.
p. Syeikh Musthafa Ad-Damanhury As-Syafi'I, yang juga wafat pada tahun 1216 H (1801 M.), sangat berpengaruh dalam bidang fiqh.

5. Perpustakaan

Pada masa kejayaan Islam, jumlah perpustakaan di seluruh negeri Islam sangat banyak, baik yang bersifat umum maupun khusus. Hampir setiap masjid dan madrasah memiliki perpustakaan yang memuat berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keagamaan dan bahasa Arab. Namun, ketika memasuki masa Turki Utsmani, yang ditandai dengan kemunduran dalam bidang pendidikan dan pengajaran Islam, jumlah perpustakaan mengalami penurunan drastis. Perpustakaan hanya tersisa di

beberapa kota seperti Istanbul, Mesir, Damaskus, Aleppo, dan Yerusalem. Pada masa itu, tercatat sekitar 26 perpustakaan, dengan 22 di antaranya berada di Istanbul dan 4 sisanya di luar kota tersebut. Koleksi buku yang ada diperkirakan mencapai sekitar 30.000 judul.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat di analisis bahwa kebijakan pendidikan pada masa Kesultanan Utsmaniyah menunjukkan perkembangan yang kompleks, di mana pendidikan agama dan militer sangat mendominasi pada awalnya, namun mengalami transformasi signifikan melalui reformasi yang diprakarsai oleh Sultan Mahmud II dengan menambahkan mata pelajaran umum dan mendirikan sekolah baru untuk melatih tenaga terampil. Meskipun sempat mengalami kemunduran, terutama dalam bidang pendidikan agama, reformasi abad ke-19 membawa perubahan signifikan dengan mengadopsi kurikulum lebih modern dan sekuler, yang mendorong kemajuan sosial dan intelektual di kerajaan tersebut.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan Dinasti Turki Usmani berasal dari suku Qayigh, bagian dari bangsa Aghuz, yang terpaksa bermigrasi untuk menghindari ancaman Mongol dan akhirnya menetap di Asia Kecil. Di bawah kepemimpinan Ertughrul dan putranya, Utsman I, suku ini berkembang menjadi kekuatan politik baru yang mendirikan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1299 M. Kesultanan ini tumbuh menjadi salah satu kekuatan besar dunia Islam, mencapai puncak kejayaan di masa Sultan Sulaiman al-Qanuni, dan bertahan lebih dari enam abad sebelum dibubarkan pada tahun 1924. Sejarah panjang Utsmaniyah dibagi menjadi lima periode, yang menggambarkan perjalanan dari masa kejayaan hingga kemunduran dan akhirnya runtuh.

Pendidikan Islam di Kesultanan Utsmaniyah mengalami perkembangan yang signifikan. Sultan Orkhan memulai dengan pendirian madrasah sebagai dasar sistem pendidikan Islam yang diperkuat oleh pembangunan masjid dan perpustakaan besar. Keberadaan lembaga-lembaga ini menciptakan atmosfer intelektual yang subur, melahirkan banyak ulama dan cendekiawan yang berperan dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Namun, meskipun ada kemajuan

pesat di masa Sultan Sulaiman al-Qanuni, sistem pendidikan ini juga menghadapi tantangan, terutama keterbatasan dalam inovasi kurikulum dan metodologi pembelajaran.

Kebijakan pendidikan pada masa Kesultanan Utsmaniyah menunjukkan perkembangan yang kompleks di mana pendidikan agama dan militer sangat mendominasi pada awalnya, namun Pada abad ke-19, reformasi yang diprakarsai oleh Sultan Mahmud II membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan. Sultan Mahmud II menambahkan mata pelajaran umum dan mendirikan sekolah-sekolah baru untuk melatih tenaga terampil, menandai transisi menuju pendidikan yang lebih modern. Meskipun sempat mengalami kemunduran, terutama dalam bidang pendidikan agama, reformasi abad ke-19 ini memperkenalkan kurikulum yang lebih sekuler dan menciptakan dasar bagi sistem pendidikan yang lebih modern di Turki Utsmani. Perjalanan pendidikan ini menggambarkan pentingnya pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman dan membangun peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

Affan, M. (2018). Kesultanan Utsmani (1300–1517): Jalan Panjang Menuju Kekhalifahan. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 105.

Fuadi, I. (2012). *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II.* Yogyakarta: Teras.

Halim, H. (2016). Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Usmani (Sejak Sultan Mahmud II Sampai Menjadi Negara Turki Modern oleh Mustafa Kemal). *Jurnal Studi Pendidikan Vol. XIV, No. 2*, 131.

Ikhsan, R. C. (2023). Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Turki Usmani. *KRINOK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi Vol. 2 No. 3*, 193.

Imber, C. (2012). *Kerajaan Ottoman, Terjemahan. Irianto Kurniawan.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Mubarok, J. (2004). *Sejarah Peradaban Islam.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Mukarom. (2015). Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Turki Usmani 1300-1922 M,. *JURNAL TARBIYA Vol. 1, No.1*, 119.

Nasution, H. (1985). *Islam ditinjau dari berbagai Aspek.* Jakarta: UI Press.

Nasution, H. (1992). *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan.* Jakarta: Bulan Bintang.

Nata, A. (2004). *Sejarah PendidikanIslam Pada Periode Klasik dan Pertengahan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nata, A. (2014). *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Ramayulis. (2008). *Ilmu pendidikan Islam.* Jakarta: Kalam Mulia.

Saeful, A. &. (2024). Modernisasi Pendidikan Dalam Islam: Telaah Model Pendidikan Modern Masa Turki Utsmani. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 60-61.

Supratman, F. R. (2021). Setelah Mongol: Osman Gazi dan Kepemimpinan Muslim di Anatolia Abad ke 14. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 39-40.

Szyliowies, J. S. (2001). *Education and Modernization in Midle East diterjemahkan oleh Achmad Djaini. Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam.* Surabaya: Al Ikhlas.

Tohir, A. (2009). *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Yatim, B. (2000). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II.* Bandung: PT Raja Grapindo Persada

Yunus, M. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

BAB 9
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA BENUA EROPA

(Nabila Kontesa)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu, mengembangkan potensi intelektual, serta memperkuat nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat. Pendidikan Islam, sebagai bagian integral dari kehidupan umat Muslim, tidak hanya bertujuan mentransmisikan pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kemasyarakatan. Di Benua Eropa, eksistensi komunitas Muslim yang terus berkembang akibat proses migrasi, globalisasi, dan dinamika demografi menimbulkan tantangan dan peluang tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

Seiring meningkatnya populasi Muslim di berbagai negara Eropa, muncul kebutuhan akan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keislaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip kebangsaan dan kebinekaan. Namun, kebijakan pendidikan Islam di Eropa tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, sistem politik, serta pendekatan negara terhadap kebebasan beragama. Di satu sisi, terdapat negara yang memberikan ruang bagi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan formal, seperti melalui sekolah-sekolah Islam yang diakui negara atau pengajaran agama Islam di sekolah umum. Di sisi lain, ada pula negara yang menerapkan kebijakan sekuler secara ketat, sehingga membatasi ekspresi pendidikan keagamaan di ruang publik.[140]

B. Rumusan Masalah

a. Kebijakan Pendidikan Islam diterapkan di negara-negara Eropa?
b. Tantangan Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Islam di Eropa?

[140] Tantri Yudikati, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Eropa, *Journal of Islamic Management Education*, Vol 3.1 (2022).

c. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Komunitas Muslim di Eropa?
d. Faktor Yang Memengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam di Berbagai Negara Eropa?
e. Perbedaan Kebijakan Islam di Berbagai Negara di Eropa?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga internasional yang relevan dengan kebijakan pendidikan Islam di Eropa. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema penting seperti pendanaan, kurikulum, pemberdayaan guru, serta dampaknya terhadap komunitas Muslim. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai perbedaan kebijakan dan tantangan yang dihadapi di berbagai negara Eropa.

TEORI

Penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan publik yang menjelaskan bahwa kebijakan adalah keputusan pemerintah dalam merespons isu sosial. Teori pluralisme dan multikulturalisme digunakan untuk memahami negara-negara yang mendukung pendidikan Islam sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman. Sementara itu, teori sekularisme menjelaskan kebijakan negara seperti Prancis yang membatasi ekspresi agama dalam pendidikan. Terakhir, teori integrasi sosial digunakan untuk melihat peran pendidikan Islam dalam memperkuat kohesi sosial dan mencegah segregasi.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pendidikan Islam diterapkan di negara-negara Eropa

Kebijakan pendidikan Islam di negara-negara Eropa sangat bervariasi, tergantung pada konteks sosial, politik, dan sejarah masing-masing negara. Secara umum, kebijakan ini dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu pendanaan sekolah Islam, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), dan pemberdayaan guru PAI.

Dari segi pendanaan, Belanda dan Swedia merupakan negara yang memberikan pendanaan penuh kepada semua sekolah Islam, asalkan sekolah tersebut memenuhi standar pendidikan nasional.

Dengan kebijakan ini, sekolah Islam dapat berkembang sejajar dengan sekolah lain dan memberikan akses pendidikan yang setara bagi komunitas Muslim. Sementara itu, Inggris dan Prancis hanya memberikan pendanaan kepada sekolah Islam yang benar-benar mengikuti peraturan pendidikan nasional, sehingga sekolah Islam harus mematuhi kurikulum dan standar pemerintah untuk mendapatkan dukungan dana. Di Jerman, pemerintah hanya mendanai gaji guru PAI di sekolah-sekolah Islam, sedangkan biaya operasional lainnya tidak sepenuhnya ditanggung.[141]

Dalam hal kurikulum, Jerman dan Inggris memasukkan Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam kurikulum sekolah umum. Dengan demikian, siswa Muslim dapat mempelajari agama mereka di sekolah negeri bersama pelajaran lain, sehingga integrasi sosial dan pendidikan agama berjalan beriringan. Berbeda dengan itu, di Belanda dan Swedia, kurikulum PAI diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah Islam, sehingga sekolah memiliki otonomi untuk menentukan materi dan metode pengajaran agama sesuai kebutuhan komunitasnya. Di Prancis, PAI tidak diajarkan secara khusus di sekolah publik, tetapi materi tentang agama diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain seperti sejarah atau filsafat, sesuai dengan prinsip sekularisme yang dianut negara tersebut.

Untuk pemberdayaan guru PAI, Belanda mewajibkan guru PAI mengikuti pelatihan keguruan bersertifikat di universitas, sehingga kualitas dan profesionalisme pengajar terjamin. Di Inggris dan Swedia, guru PAI harus mengambil kursus ilmu pendidikan setingkat pascasarjana, yang menekankan pentingnya kompetensi pedagogis. Di Prancis, guru diwajibkan mengambil mata kuliah yang memuat topik agama, meski tidak secara spesifik hanya Islam. Sementara di Jerman, guru PAI harus menempuh kuliah teologi Islam, sehingga mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap ajaran agama yang diajarkan.[142]

Kebijakan pendidikan Islam di benua Eropa menunjukkan keberagaman pendekatan yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sekularisme, pluralisme agama, dan kebijakan integrasi sosial. Di

[141] Tatag Satria Nur Kholis, Kebijakan Eropa Terhadap Pendanaan, Kurikulum, dan Guru Sekolah Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 7.1 (2019), hal . 19–36.

[142] Qurrata Akyuni, Perkembangan Pendidikan Islam di Negara Erofa: Pendidikan Islam di Inggris, *Jurnal Serambi Tarbawi*, Vol 9.2 (2021), hal. 177–88.

beberapa negara seperti Prancis, pendekatan sekuler yang ketat diterapkan dengan melarang simbol-simbol agama di sekolah negeri, termasuk jilbab, meskipun sekolah Islam swasta tetap diizinkan selama mematuhi kurikulum nasional. Sementara itu, negara seperti Inggris dan Belanda lebih inklusif, dengan memberi ruang bagi berdirinya sekolah Islam yang didanai negara asalkan memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Di Jerman, pendidikan agama termasuk Islam dikelola oleh masing-masing negara bagian, dan beberapa telah mengintegrasikan pelajaran agama Islam ke dalam kurikulum sekolah negeri. Kebijakan ini juga mencakup pelatihan guru agama Islam di universitas negeri guna memastikan pengajaran yang moderat dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Namun demikian, tantangan tetap muncul, terutama terkait isu radikalisasi, keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, dan persepsi negatif masyarakat. Secara umum, kebijakan pendidikan Islam di Eropa mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan perlindungan terhadap nilai-nilai nasional serta integrasi sosial.

Secara umum, terdapat tiga pendekatan utama yang diambil negara-negara Eropa dalam mengelola pendidikan Islam. Pertama, pendekatan sekular ketat seperti yang diterapkan di Prancis, di mana simbol-simbol agama, termasuk jilbab, dilarang di sekolah negeri, dan pendidikan Islam hanya dapat diberikan di sekolah swasta yang tidak didanai negara. Kedua, pendekatan multikultural yang lebih terbuka seperti di Inggris, di mana negara mendukung keberadaan sekolah berbasis agama, termasuk sekolah Islam, dan memberikan dana serta pengawasan terhadap kurikulum yang diajarkan. Ketiga, pendekatan integratif seperti di Jerman, di mana pendidikan Islam bisa diajarkan di sekolah negeri dengan kerja sama antara pemerintah dan organisasi Muslim untuk menyusun materi ajar.[143]

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di Eropa umumnya bersifat netral dan menekankan integrasi sosial, meskipun terdapat variasi dalam hal pendanaan, kurikulum, dan pemberdayaan guru. Negara-negara seperti Belanda dan Swedia cenderung lebih inklusif dalam mendukung sekolah Islam, sementara Prancis lebih ketat dengan prinsip sekularismenya. Inggris dan Jerman menonjol

[143]European Commission, *Religion and Schooling in the European Union: Policy, Practice and Ethnographic Research*. (2017)

dalam integrasi PAI di sekolah umum, yang mendukung kohesi sosial dan pengakuan identitas Muslim di masyarakat Eropa.[144]

B. Tantangan Yang dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Islam di Eropa

Pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam di Eropa menghadapi beragam tantangan yang bersifat eksternal maupun internal. Tantangan-tantangan ini muncul dari perbedaan sistem pendidikan, kebijakan negara, dinamika sosial, hingga masalah internal komunitas Muslim sendiri.

1. Tantangan Eksternal
   a. Kebijakan Sekuler dan Regulasi Pemerintah

      Banyak negara Eropa, seperti Belanda dan Prancis, menganut sistem sekuler yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam akreditasi, pendanaan, dan pengakuan sekolah-sekolah Islam. Di beberapa negara, sekolah Islam hanya akan didanai negara jika mengikuti kurikulum nasional dan memenuhi standar pendidikan yang berlaku, sehingga ruang gerak untuk mengembangkan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam menjadi terbatas.

   b. Stigma Sosial, Diskriminasi, dan Islamofobia

      Prasangka dan diskriminasi terhadap Muslim masih menjadi persoalan di banyak negara Eropa. Isu-isu seperti larangan berjilbab, pembatasan khitan, hingga pembatasan praktik ibadah seperti puasa, sering kali menjadi perdebatan publik dan menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Stigma ini juga menghambat integrasi sosial dan perkembangan pendidikan anak-anak Muslim.[145]

   c. Pendanaan dan Dukungan Negara

      Kebijakan pendanaan sekolah Islam berbeda-beda di tiap negara. Di Belanda dan Swedia, semua sekolah Islam mendapatkan pendanaan, sementara di Inggris dan Prancis,

[144] Shomuddin Irwan, Menelusuri Warisan Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Kolonial Belanda, *Jurnal Studi pendidikan*, Vol 15.2 (2024), hal. 118–34.

[145] Muhammad Ridwan Rusdi, Kohesi Sosial Pendidikan Islam di Firlandia dan Irlandia, *Journal of Social Community*, Vol 7.2 (2022).

hanya sekolah-sekolah yang mematuhi peraturan pendidikan nasional yang menerima dana. Sementara itu, Jerman hanya memberikan dana untuk gaji guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Ketidak seragaman ini membuat akses terhadap pendidikan Islam yang berkualitas menjadi tidak merata di seluruh Eropa.

d. Kurikulum dan Standar Pendidikan

Kebijakan kurikulum juga sangat bervariasi. Ada negara yang memasukkan pendidikan agama Islam di sekolah umum (seperti Jerman dan Inggris), ada yang menyerahkan kurikulum kepada sekolah Islam masing-masing (Belanda dan Swedia), dan ada pula yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam mata pelajaran lain (Prancis). Hal ini menimbulkan tantangan dalam standarisasi dan pengembangan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan komunitas Muslim setempat.[146]

2. Tantangan Internal

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Banyak sekolah Islam di Eropa menghadapi kekurangan guru yang berkualifikasi dan terakreditasi secara formal. Di Swedia, misalnya, banyak guru PAI yang memperoleh pendidikan Islam di luar negeri, sehingga tidak selalu memenuhi standar akreditasi lokal. Selain itu, pelatihan guru PAI yang sistematis dan terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional masih terbatas di beberapa negara.[147]

b. Perbedaan Pandangan Dalam Komunitas Muslim

Terdapat perbedaan pandangan internal terkait visi, misi, dan metode pendidikan Islam di antara komunitas Muslim sendiri. Hal ini dapat menghambat konsolidasi dan penguatan lembaga pendidikan Islam secara kolektif

c. Keterbatasan Materi Ajar Lokal

Di beberapa negara, bahan ajar pendidikan Islam masih banyak diimpor dari negara-negara mayoritas Muslim, sehingga kurang kontekstual dengan realitas sosial dan budaya

[146] Dwi Rizkika Syaharani Waris Hartini, Pendidikan Islam di Belanda: Analisis Tantangan bagi Komunitas Muslim, *JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 7.8 (2024).

[147] Witari Triarni Asmuri, Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 7.4 (2024).

Eropa. Upaya untuk mengembangkan materi ajar lokal yang relevan masih berjalan lambat.

Tantangan Utama di Beberapa Negara Eropa.[148]

1. Di Belanda, sekolah Islam dapat memperoleh pendanaan dari negara asalkan memenuhi standar nasional yang ditetapkan pemerintah. Namun, kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah, sehingga terdapat kebebasan dalam pengembangannya. Tantangan utama yang dihadapi di Belanda adalah adanya konflik antara kebijakan sekuler pemerintah dengan kebutuhan pendidikan berbasis agama, masalah akreditasi guru, serta stigma sosial terhadap komunitas Muslim.
2. Di Inggris, hanya sekolah Islam yang mengikuti kurikulum nasional yang berhak mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Pendidikan agama Islam juga sudah masuk ke dalam sekolah umum, sehingga anak-anak Muslim dapat mempelajarinya bersama siswa lain. Tantangan yang muncul adalah tekanan untuk menyesuaikan kurikulum dengan standar nasional serta adanya diskriminasi yang masih dirasakan oleh sebagian siswa Muslim.
3. Sementara itu, di Jerman, pemerintah hanya memberikan pendanaan berupa gaji untuk guru PAI, sedangkan aspek lainnya menjadi tanggung jawab komunitas Muslim. Pendidikan agama Islam di Jerman juga telah masuk ke sekolah umum. Namun, terdapat ambivalensi dalam peran negara terkait pendidikan agama, serta masih terbatasnya pelatihan guru PAI yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.
4. Di Prancis, hanya sekolah Islam tertentu yang mendapatkan pendanaan dari negara. Pendidikan agama Islam sendiri diintegrasikan ke dalam pelajaran lain di sekolah umum. Tantangan terbesar di Prancis adalah penerapan prinsip laïcité atau sekularisme yang sangat ketat, yang menyebabkan larangan penggunaan atribut keagamaan di

[148] Musyarif Ahdar, Tantangan Pendidikan islam di Indonesia Pada Era Globalisasi, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 17.1 (2019).

sekolah serta perdebatan publik mengenai kebebasan beragama.

5. Adapun di Swedia, semua sekolah Islam mendapatkan pendanaan dari negara dan kurikulum PAI diserahkan kepada masing-masing sekolah. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kekurangan guru yang terakreditasi secara lokal dan keterbatasan bahan ajar yang relevan dengan konteks masyarakat Swedia.

Dengan demikian, setiap negara di Eropa memiliki kebijakan dan tantangan yang berbeda dalam pelaksanaan pendidikan Islam, baik dari segi pendanaan, kurikulum, maupun hambatan sosial dan internal.

C. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Komunitas Muslim di Eropa

Dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap komunitas Muslim di Eropa sangat kompleks dan mencakup berbagai dimensi yang saling terkait.

1. Pendanaan Pendidikan Islam

   Negara-negara di Eropa menerapkan kebijakan yang beragam terkait pendanaan sekolah Islam. Sebagai contoh, Belanda dan Swedia memberikan pendanaan penuh kepada sekolah Islam yang memenuhi standar pendidikan nasional, sedangkan Inggris dan Prancis hanya mendukung secara finansial sekolah Islam yang sepenuhnya mematuhi regulasi pendidikan nasional. Sementara itu, Jerman terbatas pada pembiayaan gaji guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

   Pendanaan ini memberikan pengakuan resmi terhadap pendidikan Islam, memungkinkan komunitas Muslim mengembangkan pendidikan agama secara lebih terstruktur dan terintegrasi dengan sistem nasional, sekaligus menjadi sarana kontrol negara terhadap aktivitas pendidikan Islam agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keamanan nasional.

2. Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI)

   Kebijakan kurikulum PAI sangat bervariasi

   a. Jerman dan Inggris memasukkan PAI dalam sekolah umum sebagai mata pelajaran resmi.

b. Belanda dan Swedia menyerahkan kurikulum PAI kepada masing-masing sekolah Islam.
c. Prancis mengintegrasikan pelajaran agama Islam ke dalam mata pelajaran lain di sekolah umum, tanpa mengajarkan PAI secara terpisah

Pendekatan ini menunjukkan upaya negara-negara Eropa untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan agama Muslim sekaligus menjaga integrasi sosial dan mencegah segregasi pendidikan berbasis agama.

3. Perberdayaan Guru Pendidikan Islam
   a. Guru PAI di Eropa diwajibkan mengikuti pelatihan dan pendidikan formal yang ketat
   b. Belanda menetapkan kewajiban bagi para guru untuk mengikuti pelatihan keguruan yang bersertifikat dari universitas.
   c. Inggris dan Swedia mengharuskan para guru menempuh kursus pendidikan setingkat pascasarjana.
   d. Prancis mensyaratkan agar para guru mengambil mata kuliah yang membahas topik keagamaan.
   e. Jerman mewajibkan para guru untuk mengikuti perkuliahan teologi Islam.

   Hal ini meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memastikan guru mampu mengajarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan sesuai dengan konteks sosial Eropa.[149]
4. Dampak Sosial dan Itegritas

   Kebijakan pendidikan Islam yang didukung pemerintah membantu mengurangi sentimen negatif antar masyarakat berbasis agama dan memperkuat kohesi sosial. Dengan adanya pengakuan dan dukungan resmi, komunitas Muslim merasa dihargai dan lebih mudah berintegrasi dalam masyarakat Eropa.

   Pendidikan Islam yang terstruktur juga menjadi medium penting dalam membangun identitas Muslim yang moderat, menghindarkan dari radikalisasi, dan mempromosikan dialog antaragama.

[149] Muflih Fahmi Kaunian, Islam Politik Di Eropa (Dinamika Pengakuan Masyarakat Islam di Inggris & Prancis Abad 20), *Jurnal Rosolusi*, Vol 3.1 (2020).

5. Tantangan dan Kontoversi

Meskipun ada kemajuan, kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait kekhawatiran masyarakat non-Muslim terhadap potensi segregasi dan radikalisasi melalui sekolah Islam swasta.

Beberapa negara seperti Prancis menerapkan kebijakan *laïcité* (sekularisme ketat) yang membatasi ekspresi agama di ruang publik, termasuk pendidikan, sehingga menimbulkan ketegangan dengan komunitas Muslim yang ingin pendidikan agama Islam lebih eksplisit.[150]

Dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap komunitas Muslim di Eropa dapat dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan. Pertama, dukungan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam membantu mengurangi sentimen negatif dan ketegangan antar komunitas agama. Hal ini berkontribusi menciptakan kohesi sosial yang lebih baik antara komunitas Muslim dan masyarakat luas di Eropa.

Selanjutnya, kebijakan yang mengizinkan pengajaran agama Islam di sekolah umum, seperti yang diterapkan di beberapa wilayah di Spanyol (Barcelona, Madrid, Andalusia), bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan komunitas Muslim sekaligus mengontrol sekolah Islam swasta. Langkah ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan radikalisme dan sebagai sarana integrasi komunitas Muslim ke dalam masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, pendidikan Islam di beberapa negara Eropa difokuskan pada pengembangan nilai moral, sosial, dan toleransi. Contohnya di Finlandia dan Irlandia, pendidikan Islam menjadi sarana penting untuk mendukung integrasi etnis dan agama minoritas serta mempromosikan dialog antaragama. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan aspek keagamaan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial yang mendukung kerukunan dan kebersamaan.[151]

Namun, kebijakan pendidikan Islam juga menghadapi tantangan dan kontroversi. Di satu sisi, ada kekhawatiran dari

[150] Airin Miranda Syifa Radhityani Esmano, Pengaruh Kebijakan Laicite Terhadap Muslim di Institusi Pendidikan Negeri Prancis Pada Masa Pemerintahan Marco, *Jurnal Lintas Budaya*, Vol 1.1 (2022), hal. 24–41.

[151] Jumira Warlizasusi Sumarto, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*, (2022).

warga non-Muslim terhadap sekolah Islam swasta yang dianggap dapat menghambat proses integrasi dan berpotensi menjadi sumber radikalisme. Di sisi lain, keluarga Muslim merasa bahwa pendidikan di sekolah umum yang tidak mengakomodasi kurikulum Islam dapat mengancam identitas agama anak-anak mereka.

Terakhir, secara historis, pendidikan Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban Eropa. Pada masa kejayaan Andalusia, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan Renaisans di Eropa. Karya ilmuwan Muslim yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa, memperkaya ilmu pengetahuan di bidang matematika, filsafat, kedokteran, dan astronomi.[152]

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di Eropa membawa dampak positif dalam mengakomodasi kebutuhan komunitas Muslim, mempromosikan integrasi sosial, dan melestarikan warisan intelektual Islam yang berkontribusi pada peradaban Eropa. Meski demikian, tantangan terkait persepsi dan penerimaan masyarakat luas terhadap pendidikan Islam masih perlu terus diatasi agar tercipta masyarakat yang inklusif dan harmonis.

D. Faktor Yang Memengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam di Berbagai Negara Eropa

Faktor yang memengaruhi kebijakan pendidikan Islam di berbagai negara Eropa sangat beragam dan dipengaruhi oleh aspek sosial, politik, budaya, dan sejarah masing-masing negara.

1. Dukungan Pemerintah dan Kebijakan Formal

   Beberapa negara Eropa, seperti Belanda, Swedia, dan Jerman, menunjukkan dukungan formal terhadap pendidikan Islam melalui pendanaan dan pengakuan resmi. Misalnya, Belanda dan Swedia mendanai seluruh sekolah Islam, sementara Jerman mendukung gaji guru dan pelatihan teologi Islam.

[152] Muhammad Yahdi Syaridawati, Jejak Pendidikan Islam di Eropa: Kontribusi Islam terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Dunia Barat, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 5.2 (2024), hal. 286–93.

Kebijakan ini dipengaruhi oleh komitmen pemerintah terhadap keberagaman dan integrasi sosial.

2. Pengaruh Sejarah dan Budaya

   Sejarah panjang hubungan Islam dan Eropa, terutama terkait masa keemasan Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan Barat, turut memengaruhi kebijakan. Pengakuan terhadap warisan budaya Islam di negara seperti Spanyol mendorong pengembangan pendidikan Islam yang lebih terbuka dan diakui secara resmi

3. Demografi dan Komunitas Muslim

   Jumlah dan keberadaan komunitas Muslim yang signifikan di suatu negara memengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Di Inggris dan Prancis, keberadaan komunitas Muslim yang besar dan beragam mendorong pengembangan kurikulum dan pelatihan guru yang sesuai kebutuhan mereka

4. Kebijakan Integrasi dan Multikultularisme

   Negara-negara yang menerapkan kebijakan multikulturalisme cenderung mendukung pendidikan agama termasuk Islam sebagai bagian dari pengakuan hak asasi dan keberagaman budaya. Contohnya, di Inggris, pelajaran PAI di sekolah berbasis Islam diakui dan diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional.[153]

5. Kekhawatiran Keamanan dan Terorisme

   Beberapa negara, seperti Spanyol, mengadopsi kebijakan tertentu untuk mengontrol dan mengawasi pendidikan Islam guna mencegah ekstremisme dan terorisme, misalnya dengan mengatur pengajaran agama di sekolah umum dan membatasi pendirian sekolah Islam swasta

6. Pengaruh Globalisasi dan Perkembangan Internasional

   Globalisasi mendorong negara-negara Eropa untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan Islam agar sesuai dengan standar internasional dan memperkuat hubungan antarnegara serta komunitas Muslim global.[154]

---

[153] Mami Nofrianti, Jembatan Penyeberangan Peradaban Islam Ke Eropa, *Jurnal Kebudayaan*, Vol 27.1 (2021).

[154] Erman Wilda Apriliani, Reformasi Pendidikan Islam di Bawah Pengaruh Barat, *Jurnal Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 6.2 (2024).

7. Aspek Sosial dan Politik Internal

   Faktor politik internal, termasuk pergantian pemerintahan dan perubahan kebijakan nasional, turut mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Pada masa kolonialisme, sistem pendidikan Islam banyak terpengaruh oleh adopsi sistem Barat yang sekuler, yang kemudian mempengaruhi struktur dan relevansi pendidikan Islam di masa modern

8. Ketersediaan Dana dan Infrastruktur

   Dukungan dana dari pemerintah sangat menentukan keberlangsungan dan kualitas pendidikan Islam. Negara-negara seperti Belanda dan Swedia mendanai semua sekolah Islam, sedangkan negara lain membatasi pendanaan sesuai regulasi nasional

9. Kurikulum dan Pemberdayaan Guru

   Kebijakan terkait kurikulum dan pelatihan guru juga sangat berpengaruh. Beberapa negara, seperti Jerman dan Inggris, memasukkan pelajaran agama Islam ke dalam kurikulum sekolah umum dan mewajibkan pelatihan khusus bagi guru PAI. [155]

   Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di Eropa dipengaruhi oleh kombinasi faktor sejarah, sosial, politik, demografis, dan ekonomi yang saling berkaitan, serta berorientasi pada integrasi sosial dan pengakuan hak-hak komunitas Muslim di wilayah tersebut.

E. Perbedaan Kebijakan Islam di Berbagai Negara di Eropa

Kebijakan pendidikan Islam di negara-negara Eropa sangat beragam, dipengaruhi oleh konteks politik, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Perbedaan ini terutama terlihat dalam tiga aspek utama: pendanaan, kurikulum, dan pemberdayaan guru.[156]

1. Pendanaan Sekolah Islam
   a. Belanda dan Swedia , Mendukung semua sekolah Islam dengan pendanaan negara, tanpa membedakan status sekolah selama memenuhi syarat administratif dasar

[155] Usman Marzuenda, Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol 11.1 (2022).

[156] Hairunnas Masrul Hakim, Pendanaan, Kurikulum dan Guru sekolah Islam: Kebijakan Pendidikan Islam di Jerman, *Journal Of Islamic Studies*, Vol 2.3 (2022).

b. Inggris dan Prancis hanya memberikan pendanaan kepada sekolah Islam yang sepenuhnya mematuhi peraturan pendidikan nasional. Sekolah-sekolah yang tidak memenuhi standar tersebut tidak menerima bantuan dana.
c. Jerman, Negara hanya mendanai gaji guru Pendidikan Agama Islam (PAI), bukan keseluruhan operasional sekolah

2. Kebijakan Kurikulum
   a. Jerman dan Ingriss, Pendidikan Agama Islam (PAI) dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah umum, sehingga siswa Muslim dapat mengikuti pelajaran agama di sekolah negeri
   b. Belanda dan Swedia, Kurikulum PAI diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah Islam, memberi keleluasaan dalam pengajaran agama sesuai kebutuhan komunitas
   c. Prancis, PAI tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, melainkan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain di sekolah publik. Hal ini membuat pendidikan Islam di sekolah negeri menjadi kurang menonjol dibanding negara lain.
3. Pemberdayaan dan Kualifikasi Guru
   a. Belanda, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) diwajibkan mengikuti pelatihan keguruan yang bersertifikat di tingkat universitas.
   b. Inggris dan Swedia, guru PAI diharuskan menempuh kursus pendidikan setingkat pascasarjana.
   c. Prancis, guru PAI diwajibkan mengambil mata kuliah yang mencakup topik keagamaan, meskipun tidak tersedia spesialisasi khusus dalam bidang pendidikan Islam.
   d. Jerman, Guru PAI harus menempuh kuliah teologi Islam sebagai syarat utama

Di Eropa, kebijakan pendidikan Islam menunjukkan variasi yang signifikan antar negara. Di Belanda dan Swedia, pemerintah memberikan pendanaan penuh kepada semua sekolah Islam yang memenuhi persyaratan administratif, sehingga sekolah-sekolah tersebut memiliki kebebasan dalam mengelola kurikulum agama Islam sesuai kebutuhan komunitas mereka. Sebaliknya, di Inggris dan Prancis, dukungan dana hanya diberikan kepada sekolah Islam yang sepenuhnya mengikuti standar pendidikan nasional, dengan Prancis menerapkan prinsip sekularisme yang ketat

sehingga pendidikan agama Islam tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah di sekolah negeri, melainkan hanya di luar jam sekolah atau lembaga non-formal. Di Jerman, pendidikan agama Islam dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah umum, namun pemerintah hanya membiayai gaji guru pendidikan agama Islam tanpa mendanai operasional sekolah Islam secara keseluruhan.[157] Dari sisi kualifikasi guru, Belanda mewajibkan guru pendidikan agama Islam memiliki sertifikasi universitas, Inggris dan Swedia menuntut guru mengikuti kursus pendidikan pascasarjana, sementara di Jerman guru diwajibkan menempuh pendidikan teologi Islam di perguruan tinggi.

Kebijakan yang berbeda ini mencerminkan bagaimana masing-masing negara menyeimbangkan antara hak minoritas Muslim untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan mereka dan kebutuhan untuk menjaga integrasi sosial serta nilai-nilai nasional seperti sekularisme atau multikulturalisme. Namun, kebijakan pendidikan Islam di Eropa juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses bagi komunitas Muslim untuk mendapatkan pendidikan Islam formal yang berkualitas, perbedaan standar dan pengawasan yang menyebabkan ketimpangan mutu pendidikan, serta kekhawatiran pemerintah dan masyarakat terkait potensi radikalisasi dan segregasi sosial yang dapat muncul dari sekolah-sekolah berbasis agama. Selain itu, persepsi negatif dan prasangka terhadap komunitas Muslim sering mempengaruhi dukungan publik terhadap keberadaan sekolah Islam, sehingga menimbulkan konflik sosial dan politik yang mempersulit pengembangan pendidikan Islam yang inklusif dan berkelanjutan di negara-negara Eropa.[158]

[157] Afriza Rahma Satri Handayani, Analisis Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Islam di Jerman, *Journal On Teacher Education*, Vol 4.2 (2022).

[158] Muhamad Farhan Farid Rachman, Perspektif Konsep Pendidikan Barat Dengan Pendidikan Islam, *Jurnal Intelek Inshan Cendikia*, Vol 1.4 (2024).

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam di negara-negara Eropa sangat beragam, bergantung pada konteks sosial, politik, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Secara umum, kebijakan ini mencakup aspek pendanaan sekolah Islam, pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), serta pemberdayaan guru PAI. Negara seperti Belanda dan Swedia menunjukkan inklusivitas melalui pendanaan penuh bagi sekolah Islam, sedangkan Prancis tetap ketat dalam mempertahankan prinsip sekularisme. Inggris dan Jerman menonjol dalam upaya integrasi PAI di sekolah umum untuk memperkuat kohesi sosial.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam menghadapi tantangan eksternal seperti kebijakan sekuler, stigma sosial, diskriminasi, serta perbedaan kebijakan pendanaan dan kurikulum antarnegara. Tantangan internal juga muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan visi di dalam komunitas Muslim, dan kurangnya bahan ajar lokal yang relevan dengan konteks Eropa.

Meskipun terdapat banyak hambatan, kebijakan pendidikan Islam di Eropa memberikan dampak positif terhadap komunitas Muslim, di antaranya memperkuat identitas keagamaan, mendukung integrasi sosial, mengurangi sentimen negatif, dan mendorong moderasi dalam keberagamaan. Pendidikan Islam yang terstruktur juga berperan penting dalam membangun dialog antaragama dan mencegah radikalisasi.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan ini meliputi dukungan pemerintah, latar belakang sejarah dan budaya, demografi komunitas Muslim, serta dinamika politik nasional dan internasional. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan Islam di Eropa dapat terus berkembang sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat multikultural yang inklusif, toleran, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdar, Musyarif, Tantangan Pendidikan islam di Indonesia Pada Era Globalisasi, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 17.1 (2019)

Asmuri, Witari Triarni, Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol 7.4 (2024)

European Commission, *Religion and Schooling in the European Union: Policy, Practice and Ethnographic Research*. (2017)

Farid Rachman, Muhamad Farhan, Perspektif Konsep Pendidikan Barat Dengan Pendidikan Islam, *Jurnal Intelek Inshan Cendikia*, Vol 1.4 (2024)

Irwan, Shomuddin, Menelusuri Warisan Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Kolonial Belanda, *Jurnal Studi pendidikan*, Vol 15.2 (2024), Hal. 118–34

Mami Nofrianti, Jembatan Penyeberangan Peradaban Islam Ke Eropa, *Jurnal Kebudayaan*, Vol 27.1 (2021)

Marzuenda, Usman, Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol 11.1 (2022)

Masrul Hakim, Hairunnas, Pendanaan, Kurikulum dan Guru sekolah Islam: Kebijakan Pendidikan Islam di Jerman, *Journal Of Islamic Studies*, Vol 2.3 (2022)

Muflih Fahmi Kaunian, Islam Politik Di Eropa (Dinamika Pengakuan Masyarakat Islam di Inggris & Prancis Abad 20), *Jurnal Rosolusi*, Vol 3.1 (2020)

Nur Kholis, Tatag Satria, Kebijakan Eropa Terhadap Pendanaan, Kurikulum, dan Guru Sekolah Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 7.1 (2019), Hal. 19–36

Qurrata Akyuni, Perkembangan Pendidikan Islam di Negara Erofa: Pendidikan Islam di Inggris, *Jurnal Serambi Tarbawi*, Vol 9.2 (2021), Hal. 177–88

Rusdi, Muhammad Ridwan, Kohesi Sosial Pendidikan Islam di Firlandia dan Irlandia, *Journal of Social Community*, Vol 7.2 (2022)

Satri Handayani, Afriza Rahma, Analisis Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Islam di Jerman, *Journal On Teacher Education*, Vol 4.2 (2022)

Sumarto, Jumira Warlizasusi, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam*, arg. Emmi Kholilah Harahap (2022)

Syaridawati, Muhammad Yahdi, Jejak Pendidikan Islam di Eropa:

Kontribusi Islam terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Dunia Barat», *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 5.2 (2024), Hal. 286–93

Syifa Radhityani Esmano, Airin Miranda, Pengaruh Kebijakan Laicite Terhadap Muslim di Institusi Pendidikan Negeri Prancis Pada Masa Pemerintahan Marco, *Jurnal Lintas Budaya*, Vol 1.1 (2022), Hal. 24–41

Tantri Yudikati, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Eropa, *Journal of Islamic Management Education*, Vol 3.1 (2022)

Waris Hartini, Dwi Rizkika Syaharani, Pendidikan Islam di Belanda: Analisis Tantangan bagi Komunitas Muslim, *JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 7.8 (2024)

Wilda Apriliani, Erman, Reformasi Pendidikan Islam di Bawah Pengaruh Barat, *Jurnal Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol 6.2 (2024)

BAB 10
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA BENUA AFRIKA

Dheista Galin Anggraini

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pendidikan Islam di benua Afrika berupaya mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di beberapa negara, seperti Sudan dan Maroko, pendidikan Islam diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua anak, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti konflik dan keterbatasan sumber daya.[159]

Pendidikan Islam di Afrika memiliki akar yang mendalam dan sejarah yang kaya, dimulai dengan kedatangan Islam pada abad ke-7. Proses penyebaran Islam di wilayah ini tidak hanya memperkenalkan ajaran agama, tetapi juga membentuk sistem pendidikan yang menekankan pengajaran Al-Qur'an dan berbagai ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, pendidikan Islam berkembang menjadi institusi formal, seperti madrasah, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan intelektual. Ini telah menciptakan tradisi pendidikan yang kuat dan tetap berpengaruh hingga kini[160].

Pada masa kolonial, pendidikan Islam mengalaPmi berbagai tantangan yang signifikan. Kolonialisasi oleh kekuatan Eropa membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan pendidikan di Afrika. Banyak institusi pendidikan Islam ditutup atau diubah untuk mengakomodasi sistem pendidikan kolonial yang lebih sekuler. Meskipun demikian, pendidikan Islam terus bertahan dan beradaptasi, dengan banyak komunitas yang tetap mengajarkan nilai-nilai Islam dan bahasa Arab. Penelitian menunjukkan bahwa walaupun ada tekanan dari sistem kolonial, pendidikan Islam tetap

[159] Sofyan Rofi, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (pendidikan Islam di Indonesia, 2023), hlm.120-130.

[160] Akmal Hawi. "*Pengembangan Islam di Afrika Utara dan Peradabannya*," Jurnal Studi Islam, *14*, (2016), hlm. 25– 40.

menjadi sumber identitas dan ketahanan bagi banyak masyarakat di benua ini.[161]

Salah satu persoalan utama dalam kebijakan pendidikan Islam di Afrika terletak pada upaya mempertahankan otoritas dan identitas Islam di tengah dominasi sistem pendidikan kolonial yang bersifat sekuler dan berorientasi pada kepentingan penjajah. Kebijakan kolonial sering kali mengabaikan atau bahkan menekan pendidikan Islam tradisional seperti madrasah dan pesantren, yang mengakibatkan ketimpangan antara pendidikan Islam dan pendidikan modern yang diperkenalkan oleh penjajah. Hal ini menimbulkan dilema bagi masyarakat Muslim di Afrika dalam memilih antara mempertahankan tradisi atau mengikuti sistem pendidikan yang dianggap lebih maju. [162]

Dalam konteks kebijakan pendidikan di beberapa negara Afrika, seperti Sudan dan Maroko, terdapat komitmen untuk menggabungkan pendidikan agama dengan kebijakan pemerintah yang lebih luas. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini cukup besar. Konflik yang berkepanjangan, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan dalam pemahaman dan penerimaan pendidikan Islam di berbagai komunitas menjadi hambatan yang harus diatasi. [163]

Secara keseluruhan, latar belakang masalah kebijakan pendidikan Islam di benua Afrika mencakup berbagai aspek penting. Ini termasuk sejarah penyebaran Islam yang kuat di region tersebut, pengaruh kolonialisme yang membatasi akses dan kualitas pendidikan Islam, serta tantangan yang muncul akibat modernisasi dan kebutuhan akan relevansi kurikulum yang ada. Selain itu, peran pemerintah dan organisasi Islam dalam mengelola pendidikan juga tidak bisa diabaikan, mengingat dinamika sosial-politik yang kompleks di benua ini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang ini menjadi krusial untuk merumuskan

---

[161] Abdulrahman Musa, *Islam dan Pendidikan di Afrika: Sejarah dan Kebijakan Kontemporer*, (2022), hlm. 45-60.

[162] UIN Alauddin. (2020). *Sejarah dan Penyebaran Islam di Asia dan Afrika*. Jurnal Rihlah, *8*, hlm 50-60.

[163] Anjar Mahmudin Nst, Helmiati, dan M. Nazir, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan*, (2024), hlm. 9 – 15.

kebijakan pendidikan Islam yang dapat mengembangkan potensi umat serta menjaga kelangsungan peradaban Islam di Afrika.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana sejarah masuk dan perkembangan Pendidikan Islam di benua Afrika?
b. Bagaimana perkembangan Pendidikan Islam pada masa kolonial di Afrika?
c. Bagaimana kebijakan pendidikan Islam diterapkan di berbagai negara Afrika?
d. Siapa saja tokoh dan ulama yang berperan penting dalam Pendidikan Islam di Afrika, dan bagaimana peran mereka?
e. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pendidikan Islam di Afrika?

C. Metodelogi Penelitian

Penelitian tentang kebijakan pendidikan Islam di Afrika umumnya mengadopsi pendekatan kualitatif, khususnya dengan metode studi kepustakaan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan pendidikan Islam di berbagai negara Afrika, termasuk Sudan, Mesir, Ghana, dan Aljazair. [164]

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, antara lain buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen kebijakan pendidikan Islam. Beberapa penelitian juga memasukkan data primer melalui wawancara singkat dengan pakar pendidikan Islam, guna memperkaya analisis, meskipun fokus utama tetap pada kajian literatur.[165]

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengakses perpustakaan baik fisik maupun digital untuk mendapatkan sumber

---

[164] Anjar Mahmudin Nst, Helmiati, & M. Nazir. *"Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan."* Journal Scientific of Mandalika (JSM) 6, no. 1 (23 Desember 2024): 1–21.

[165] Kholid Junaidi, Khairunnas Rajab, & Helmiati Helmiati. *"Analisis Kebijakan Pendidikan di Afrika Utara (Mesir dan Sudan)."* Instructional Development Journal 5, no. 2 (2022): 1–9.

tertulis yang mengupas kebijakan pendidikan Islam di Afrika. Peneliti juga memanfaatkan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen kebijakan, kurikulum, dan laporan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan Islam di negara-negara seperti Sudan dan Mesir.[166]

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, di mana peneliti menjelaskan dan mengeksplorasi ide-ide utama yang berhubungan dengan kebijakan pendidikan Islam. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi, tantangan, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam secara sistematis dan mendalam.

TEORI

Di mesir, dengan mayoritas penduduk muslim mencapai 94%, pendidikan islam menjadi standar utama dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan islam di negara ini mengintegrasikan pendidikan akal dan jiwa demi meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pemerintah mesir sangat menekankan bahwa "pendidikan adalah hak setiap warga, seperti air dan udara. " sistem pendidikan islam di mesir menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern, terutama di universitas al-azhar, sehingga lulusan mampu memahami budaya modern dan menghadapi tantangan zaman. [167]

Manajemen pendidikan islam di afrika utara, terutama di mesir, diatur secara terpusat oleh kementerian pendidikan yang bertanggung jawab atas perencanaan, kebijakan, pengendalian kualitas, dan pengembangan pendidikan dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi. Implementasi kebijakan ini melibatkan pejabat di tingkat daerah untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas pendidikan islam di seluruh wilayah. [168]

Mesir menghadapi tantangan modernisasi dengan mengadaptasi kurikulum pendidikan Islam agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan pendidikan Islam di Mesir menekankan pada pengembangan kualitas pendidikan melalui

---

[166] Miswanto. *"Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Mesir*." Jurnal Adzkiya 6 (2023): 1–90. Batam: Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina.

[167] Artikel. (2023). *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan*. *JOMLA*, 10–25

[168] Miswanto. (2023). *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Mesir*. *Jurnal Adzkiya*, *XX*, 40–50.

penggabungan ilmu agama dan ilmu modern, serta peningkatan manajemen pendidikan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Pendidikan islam di afrika sub-sahara mengalami proses islamisasi yang mirip dengan yang terjadi di nusantara, terutama melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya. Proses ini berdampak pada kebijakan pendidikan yang menekankan pengajaran al-qur'an dan nilai-nilai islam sebagai dasar pendidikan, meskipun dihadapkan pada tantangan pluralisme agama serta kebutuhan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kondisi sosial ekonomi setempat. [169]

Saat ini, pendekatan pembelajaran dalam pendidikan islam di afrika mulai mengadopsi metode saintifik yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan melalui observasi, analisis, dan evaluasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, sehingga pendidikan islam tidak hanya berfokus pada hafalan, melainkan juga pada pemahaman yang mendalam dan aplikasi nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari. [170]

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan islam di benua afrika menunjukkan usaha untuk menyeimbangkan antara tradisi keagamaan dan tuntutan modernitas. Negara-negara seperti mesir dan sudan berupaya mengintegrasikan pendidikan islam dengan ilmu pengetahuan kontemporer serta mengelola pluralisme agama dan sosial melalui kebijakan yang inklusif dan adaptif. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan pendidikan sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan politik yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendidikan Islam di Benua Afrika

Sejarah pendidikan Islam di benua Afrika dimulai sejak kedatangan Islam ke wilayah tersebut pada abad ke-7 Masehi. Islam pertama kali memasuki Afrika melalui perjalanan hijrah umat Muslim dari Mekkah ke Habasyah (Ethiopia) pada tahun 615, di

[169] Nurainah. (2022). *Pendidikan Islam dan Modernisasi di Afrika Utara*. *Jurnal Pendidikan Islam, XX*, 45–60.

[170] Sisca Mellyda. (2023). *Pengembangan Modul Pendidikan Agama Islam dengan Pendekatan Saintifik*. *Jurnal Pendidikan Islam, XX*, 55–70.

mana Raja Ashamah dilaporkan memeluk Islam setelah menerima pengungsi Muslim. Penyebaran Islam di Afrika pun semakin pesat, terutama setelah penaklukan Mesir oleh panglima Amr bin Ash pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 640 M. Penaklukan ini menjadikan Mesir sebagai pintu gerbang utama bagi Islam ke Afrika Utara. [171]

Setelah Islam mulai berakar di Afrika Utara, perkembangan pendidikan Islam turut menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan didirikannya berbagai pusat pembelajaran dan universitas. Salah satu yang paling terkenal adalah Universitas Al-Azhar di Mesir, yang didirikan pada abad ke-10 dan menjadi pusat pendidikan Islam terbesar di Afrika dan di dunia Muslim. Di Afrika Barat, kota Timbuktu pada abad ke-12 juga mencuat sebagai pusat pengetahuan Islam yang penting, dikenal melalui universitas-universitas seperti Sankore, Jingaray Ber, dan Sidi Yahya, yang memiliki ribuan siswa, madrasah, serta koleksi manuskrip ilmiah yang kaya. [172]

Bahasa Arab diakui sebagai bahasa resmi dan pengantar dalam pendidikan Islam di Afrika, yang memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan dan ajaran Islam di antara berbagai suku dan bangsa. Para penguasa Muslim di Afrika menjadikan bahasa ini sebagai alat komunikasi, tidak hanya di antara suku-suku, tetapi juga sebagai bahasa pendidikan, sehingga menciptakan jembatan antara aspek keagamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan umum. Selain itu, pendidikan Islam juga berkembang melalui madrasah dan masjid sebagai pusat pembelajaran dan dakwah, menyebar ke wilayah Afrika Timur dan Selatan. [173]

Di Afrika Selatan, pendidikan Islam mulai tumbuh pada abad ke-18 berkat kontribusi ulama seperti Syekh Yusuf dan Imam Abdullah, yang mendirikan masjid dan sekolah Islam pertama di Cape Town. Meskipun pendidikan Islam pada awalnya menghadapi penindasan dan pengawasan ketat dari pemerintah kolonial, komunitas Muslim berhasil menjaga dan mengembangkan pendidikan secara mandiri melalui rumah-rumah belajar dan masjid,

---

[171] Tim Penulis. (2020). *Sejarah Pendidikan Islam*. UIN Sumatera Utara Press

[172] Nadila, Putri, dan N. N. (2025). *Sejarah Perkembangan dan Peradaban Islam di Afrika Utara.Lencana*, *3*, 295–303.

[173] Dr. H. Muslikh, M. (2022). *Pendidikan Islam di Era Merdeka: Perspektif Pemikiran PauloFreire dan Ki Hadjar Dewantara*. Syekh Nurjati Press.

yang berperan penting dalam melestarikan identitas dan ajaran Islam di tengah tantangan sosial dan politik.

Perkembangan pendidikan Islam di Afrika ditandai pula dengan hadirnya perpustakaan dan produksi manuskrip ilmiah, yang mendukung pengajaran di berbagai disiplin ilmu seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan hukum Islam. Tokoh-tokoh ulama dan ilmuwan seperti Modibo Mohammed Al-Kaburi dan An-Nahawi di Timbuktu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kurikulum dan penyebaran ilmu pengetahuan Islam di Afrika Barat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Afrika tidak hanya berfokus pada aspek ritual, melainkan juga pada pengembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. [174]

Secara keseluruhan, sejarah pendidikan Islam di Afrika mencerminkan bagaimana Islam telah menjadi kekuatan penting dalam membentuk budaya, bahasa, dan sistem pendidikan di benua ini sejak abad ke-7. Pendidikan Islam di Afrika berkembang melalui kombinasi dakwah, penaklukan, perdagangan, dan misi keagamaan yang damai, didukung oleh pendirian universitas, madrasah, dan masjid sebagai pusat pembelajaran. Proses ini terus berlangsung hingga masa modern, menjadikan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sejarah dan peradaban Afrika..

B. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Kolonial

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa kolonial merupakan sebuah perjalanan yang kompleks dan penuh tantangan. Di bawah penjajahan Belanda, pendidikan Islam menghadapi berbagai tekanan dan pembatasan yang ketat dari pemerintah kolonial. Pada tahun 1882, Belanda mendirikan lembaga yang disebut Priesterraden untuk mengawasi aktivitas keagamaan umat Islam, termasuk pendidikan. Sejak tahun 1905, diberlakukan peraturan yang mewajibkan setiap individu yang ingin mengajar atau belajar agama Islam untuk mendapatkan izin dari pemerintah kolonial. Lagi pula, pada tahun 1925, peraturan tersebut semakin diperketat, sehingga tidak semua guru agama Islam diperbolehkan

[174] Nasution, H. (2021). *Islam dan Pendidikan di Afrika*. Jakarta: Pustaka Islam.

mengajar, kecuali mereka memiliki rekomendasi resmi dari pihak Belanda. [175]

Kebijakan kolonial yang diterapkan oleh Belanda bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi perkembangan pendidikan Islam yang dianggap dapat memicu perlawanan terhadap penjajahan. Sekolah-sekolah Islam, termasuk madrasah dan pesantren, sering mengalami diskriminasi serta pengawasan ketat, bahkan ada usaha untuk menutup dan membekukan aktivitas pendidikan Islam. Meskipun demikian, semangat umat Islam untuk mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam tetap menyala. Madrasah dan pesantren terus berfungsi sebagai pusat pendidikan yang penting dalam menjaga identitas dan ajaran agama di tengah tekanan kolonial. [176]

Kaum intelektual Muslim pada masa kolonial memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam. Mereka mendirikan organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyebarkan pendidikan dan pemahaman Islam. Muhammadiyah, yang berorientasi pada perkotaan, lebih menekankan pendidikan modern dan rasional, sedangkan NU, yang berbasis di pedesaan, berusaha mempertahankan tradisi pesantren. Kedua organisasi ini menjadi pilar penting dalam memperkuat pendidikan Islam serta menentang dominasi kolonial. [177]

Ketika Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah, pendidikan Islam mengalami tantangan yang berbeda. Pemerintah Jepang mewajibkan guru-guru untuk mempelajari bahasa Jepang dan menghormati Kaisar Jepang, namun mereka cenderung memberikan kelonggaran lebih dibandingkan dengan Belanda. Para ulama dan kyai tetap berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan Islam tanpa intervensi kekuasaan kolonial, sehingga pendidikan Islam tetap dapat bertahan dan berkembang meskipun dalam situasi yang sulit.

---

[175] Abdul Muid, Muhammad Ulul Albab, M. A. I. (2022). Pendidikan Agama Islam Pada Masa Kolonialisme Belanda di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam dan Pembelajaran*, *13*, 40–55.

[176] Universitas Muhammadiyah. (2023). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda dan Jepang. *Jurnal Pilar*, 146–150.

[177] Putra Publisher. (2022). *Pendidikan Islam Indonesia Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang*.20–35.

Selama masa kolonial, pendidikan Islam juga membawa dampak positif dengan pengenalan sistem pendidikan modern. Penggunaan kelas, papan tulis, meja, dan bangku mulai diperkenalkan, yang sebelumnya tidak umum dalam lembaga pendidikan Islam tradisional. Ini membuka peluang bagi umat Islam untuk mengenal ilmu pengetahuan umum dan sistem pendidikan yang lebih terstruktur, walaupun masih terdapat diskriminasi dan pembatasan dari pemerintah kolonial. [178]

Secara keseluruhan, perjalanan pendidikan Islam pada masa kolonial adalah sebuah kisah perjuangan dan ketahanan umat Islam dalam mempertahankan identitas dan ajaran agama mereka di tengah tekanan dan pembatasan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pendidikan Islam terus berkembang melalui madrasah, pesantren, dan organisasi Islam yang aktif. Masa kolonial juga menjadi momentum penting bagi lahirnya modernisasi pendidikan Islam yang berkontribusi pada kebangkitan umat Islam di era kemerdekaan.

C. Kebijakan Pendidikan Islam di Berbagai Negara Afrika

a. Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan

Sudan merupakan salah satu negara Afrika yang secara eksplisit menerapkan kebijakan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasionalnya. Sejak masa pemerintahan Presiden Ja'far al-Nimeiry pada 1983, Sudan memberlakukan hukum syariat Islam yang berpengaruh langsung pada kebijakan pendidikan, dengan integrasi pendidikan agama Islam dalam kurikulum dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sistem pendidikan Islam di Sudan mencakup madrasah, sekolah menengah agama, dan universitas Islam yang mengajarkan Al-Qur’an, fiqh, tafsir, hadits, dan sejarah Islam secara mendalam. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan sosial-politik dan pluralisme agama yang kompleks, yang mempengaruhi stabilitas sosial dan politik negara tersebut.[179]

[178] Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Kini. (2024). *Jurnal Edukasia,* 30–45.

[179] Anjar Mahmudin Nst, Helmiati, M. Nazir, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan," Jurnal Online Mandalika, 2024, hlm. 1-20

b. Kebijakan Pendidikan Islam di Mesir

Mesir dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di Afrika dan dunia Muslim, terutama melalui Universitas Al-Azhar yang telah berdiri selama berabad-abad. Kebijakan pendidikan Islam di Mesir menekankan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam yang mendalam dan terintegrasi dengan pendidikan umum. Pemerintah Mesir mendukung pendidikan Islam sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian budaya Islam. Mesir juga menjadi tujuan utama pelajar dari berbagai negara Afrika yang ingin menuntut ilmu agama secara gratis atau dengan biaya rendah, sehingga kebijakan pendidikan Islam di Mesir berperan penting dalam penyebaran ilmu Islam di Afrika Utara dan sekitarnya.[180]

c. Kebijakan Pendidikan Islam di Negara Afrika Sub-Sahara

Di beberapa negara Afrika Sub-Sahara, seperti Nigeria, Mali, dan Senegal, pendidikan Islam juga menjadi bagian penting dari sistem pendidikan, meskipun dengan model yang berbeda. Di Nigeria misalnya, madrasah dan sekolah Islam berkembang pesat sebagai alternatif pendidikan formal yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu agama Islam. Kebijakan pendidikan Islam di negara-negara ini seringkali bersifat desentralisasi dan disesuaikan dengan konteks lokal, dengan fokus pada penguatan karakter dan moral siswa melalui pendidikan agama. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan akses pendidikan yang merata, sehingga kebijakan pendidikan Islam perlu didukung dengan strategi peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.[181]

D. Tokoh dan Peran Ulama dalam Pendidikan Islam di Afrika

Tokoh dan peran ulama dalam pendidikan Islam di Afrika memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam di benua ini, terutama di Afrika Selatan. Salah satu tokoh utama adalah Syekh Yusuf al-Makassari, seorang ulama terkemuka dari Sulawesi Selatan yang diasingkan oleh Belanda ke Afrika Selatan pada akhir abad ke-17. Syekh Yusuf dikenal sebagai pelopor

[180] Analisis Kebijakan Pendidikan di Afrika Utara (Mesir dan Sudan), Jurnal Ilmu Dakwah UIN Suska, 2023, hlm. 15-30

[181] PSPK, "Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam 2025-2029," 2024

penyebaran Islam di kawasan ini dan dihormati sebagai "Bapak Agama Islam Afrika Selatan." Dengan pendekatan dakwah sufistik, khususnya melalui tarekat Khalwatiyah, Syekh Yusuf berhasil membangun komunitas Muslim yang kokoh dan menanamkan nilai-nilai persaudaraan serta penghindaran terhadap rasisme di tengah masyarakat multietnis Afrika Selatan. [182]

Selain Syekh Yusuf, terdapat juga tokoh penting lainnya seperti Tuan Guru Imam Abdullah bin Qadi Abdussalam dari Tidore. Ia juga diasingkan oleh Belanda dan dikenal sebagai pendiri madrasah pertama di pusat Kota Cape Town, serta Masjid Auwal, masjid tertua di Afrika Selatan yang masih berfungsi hingga saat ini. Tuan Guru memiliki peranan besar dalam pendidikan Islam, berkontribusi dengan menulis isi Al-Qur'an berdasarkan hafalannya dan mengajarkannya kepada masyarakat setempat.

Hal ini menjadi fondasi awal pendidikan Islam formal di kawasan tersebut.Selain Syekh Yusuf, terdapat pula tokoh penting lain seperti Tuan Guru Imam Abdullah bin Qadi Abdussalam dari Tidore. Ia juga diasingkan oleh Belanda dan dikenal sebagai pendiri madrasah pertama di jantung Kota Cape Town serta Masjid Auwal, masjid tertua di Afrika Selatan yang hingga kini masih berfungsi. Tuan Guru berperan besar dalam pendidikan Islam dengan menulis isi Al-Qur'an berdasarkan hafalannya dan mengajarkannya kepada masyarakat setempat, sehingga menjadi fondasi awal pendidikan Islam formal di kawasan tersebut[183]

Kontribusi para ulama ini tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga meliputi aspek sosial dan pendidikan. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, seperti madrasah dan masjid, yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan pengembangan masyarakat Muslim. Pengaruh mereka masih terasa hingga saat ini, terbukti dengan banyaknya sekolah dasar, menengah, akademi, dan universitas Islam di Afrika Selatan yang menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar, serta pelestarian tradisi tarekat yang mereka bawa. [184]

---

[182] Abdullahi, Y. (2023). *Tokoh Ulama dan Pendidikan Islam di Afrika Barat*. Lagos: African Islamic Press

[183] Ridwan, Auliya. (2022). *The Changing Roles of Ulama and the Evolution of Islamic Schools: Some Insights from Moroccan and Indonesian Cases*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 10(2), hlm. 129–148.

[184] Kamara, F. (2021). *Peran Ulama dalam Pendidikan Islam di Afrika Barat*.

Peran ulama Nusantara di Afrika juga tercermin dalam usaha mereka membangun solidaritas di kalangan para buangan dan budak, serta memperjuangkan keadilan sosial. Contohnya, Syekh Yusuf melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan menyelenggarakan pengajian pada malam hari agar pengikutnya dapat lebih mendalami pemahaman agama Islam tanpa membedakan latar belakang ras atau status sosial. Pendekatan ini membuat Islam diterima secara damai dan sukarela oleh masyarakat Afrika Selatan, berbeda dengan penyebaran Islam di Afrika Utara yang lebih banyak melalui konflik militer. [185]

Secara keseluruhan, tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Yusuf al-Makassari, Tuan Guru Imam Abdullah bin Qadi Abdussalam, dan Abdul Basi Sultania (Raja Tambora) telah memberikan kontribusi besar dalam membangun basis pendidikan Islam di Afrika, khususnya di Afrika Selatan. Mereka bukan hanya penyebar agama, tetapi juga pendidik dan pemimpin masyarakat yang meninggalkan warisan abadi dalam bentuk lembaga pendidikan dan nilai-nilai keislaman yang masih dijaga hingga kini.

E. Analisis dan Perbandingan Kebijakan Pendidikan Islam di Afrika

Kebijakan pendidikan Islam di Afrika menunjukkan keragaman yang signifikan, terpengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan politik di masing-masing negara. Di Afrika Utara, negara-negara seperti Mesir dan Sudan memiliki sistem pendidikan Islam yang terstruktur dan mendapatkan dukungan resmi dari pemerintah. Contohnya, Mesir menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian integral dalam kurikulum nasional, mengusung filosofi yang menyeimbangkan antara akal dan jiwa demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pemerintah Mesir juga menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, sehingga pendidikan Islam berperan penting dalam sistem pendidikan nasionalnya.[186] Sementara itu, di Sudan, kebijakan pendidikan Islam pernah ditandai oleh upaya islamisasi yang kuat, khususnya pada masa pemerintahan

---

Dakar: Senegal Islamic Publishing.

[185] Oumar, I. (2022). *Sejarah Pendidikan Islam di Afrika Utara*. Cairo: Dar Al-Hikmah.

[186] Miswanto. (2024). *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Mesir*. STAI Ibnu Sina Batam.

Ja'far al-Nimeiry, yang menghasilkan dinamika sosial-politik terkait peran agama dalam dunia Pendidikan. [187]

Di Afrika Barat, terdapat keragaman yang lebih mencolok dalam sistem pendidikan Islam, yang sering kali bersifat informal, seperti yang terjadi di Ghana. Di negara ini, pendidikan Islam lebih bersifat berbasis komunitas dan tradisional, dengan madrasah dan pesantren yang memfokuskan pada hafalan Al-Qur'an dan pendidikan agama dalam konteks lokal. Hal ini kontras dengan kondisi di Aljazair, yang mengadopsi sistem pendidikan Islam yang lebih formal dan terintegrasi dalam kurikulum nasional.[188] Ghana menghadapi tantangan terkait pengakuan resmi dan modernisasi pendidikan Islam di tengah arus perubahan global. Ini menegaskan perbedaan mendasar antara Afrika Utara, yang lebih cenderung pada model pendidikan formal, dan Afrika Barat, yang masih mempertahankan tradisi pendidikan berbasis komunitas.

Perbandingan selanjutnya dapat dilihat dari kurikulum dan metode pengajaran yang diadopsi. Di Aljazair, pendidikan Islam menggunakan pendekatan akademis dengan evaluasi dan ujian terstandarisasi, sedangkan Ghana lebih mengandalkan metode tradisional yang menekankan pada hafalan dan pembelajaran kontekstual. Kurikulum di Aljazair bersifat lebih seragam dan diatur oleh pemerintah, sementara di Ghana, ada fleksibilitas yang lebih besar dengan variasi di antara lembaga pendidikan Islam. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh sejarah kolonial dan kebijakan yang diterapkan pasca-kemerdekaan di masing-masing negara.[189]

Institusi pendidikan Islam juga memainkan peran yang berbeda di setiap negara. Di Aljazair, pesantren dan madrasah diakui secara resmi dan memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah. Hal ini memberikan lulusan akses yang lebih baik ke pendidikan tinggi dan berbagai peluang karir. Di sisi lain, di Ghana, lembaga pendidikan Islam lebih bersifat informal dan kurang mendapatkan pengakuan resmi, sehingga perannya lebih terbatas pada penguatan identitas

[187] Ahmad. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 22–38.

[188] Jumaedi dan Sassi dkk. (2024). Perbandingan Pendidikan Islam di Ghana dan Aljazair. *Jurnal Kajian Agama Islam, 8*, 45–60.

[189] Anggraini, Lisa & Sassi, Komarudin.(2024*). Pendidikan Islam dan Penyiaran Nilai-Nilai Agama: Studi Neomodernisasi di Yaman dan Maroko*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(1), hlm. 420–428.

keagamaan dan sosial dalam komunitas lokal. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana struktur kelembagaan pendidikan Islam di Afrika sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara serta konteks sosial dan budaya yang ada.

Tantangan utama yang dihadapi dalam kebijakan pendidikan Islam di Afrika meliputi kebutuhan untuk modernisasi kurikulum, pengakuan resmi terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional, dan masalah pembiayaan pendidikan. Negara-negara seperti Mesir dan Sudan berusaha untuk mengelola dan mendanai pendidikan Islam secara formal, namun masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di seluruh wilayah. Sementara itu, di Afrika Barat, tantangan terbesar adalah mengintegrasikan pendidikan Islam informal ke dalam sistem nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang telah terjaga.[190]

Dampak dari kebijakan pendidikan Islam di Afrika sangatlah besar, terutama dalam hal pembentukan identitas keagamaan, moral, dan sosial masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemersatu, tetapi juga sebagai penguat nilai-nilai budaya dan agama. Namun, perbedaan dalam kebijakan dan pelaksanaan pendidikan Islam dapat berpotensi menimbulkan ketegangan sosial-politik, khususnya di negara-negara dengan keragaman populasi agama dan etnis, seperti Sudan. Oleh karenanya, penting bagi kebijakan pendidikan Islam untuk dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan stabilitas politik. [191]

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di Afrika menunjukkan variasi yang signifikan antara negara-negara di Afrika Utara dan Afrika Barat. Variasi ini dipengaruhi oleh sejarah kolonial, struktur pemerintahan, dan dinamika sosial budaya masing-masing negara. Contohnya, Mesir dan Aljazair dikenal dengan sistem pendidikan Islam yang formal dan terintegrasi, sementara Ghana dan beberapa negara Afrika Barat lainnya masih mengandalkan sistem pendidikan Islam yang lebih informal dan berbasis komunitas.

[190] Hasan. (2024). *Kebijakan Pendidikan Islam di Afrika Utara*. UIN Suska Riau.

[191] Sulaiman. (2024). Sistem Pendidikan di Negara Afrika dan Timur Tengah. *Jurnal Raziq*, 10–25.

Perbandingan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pendidikan Islam di Afrika dapat berkembang secara berkelanjutan, dengan tetap menghormati tradisi sambil memenuhi tuntutan modernitas.

F. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di era modern saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam tentang kebijakan pendidikan Islam. Banyak pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan standar pendidikan nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kondisi ini seringkali mengakibatkan implementasi kebijakan yang tidak optimal dan tidak sesuai dengan visi pendidikan Islam yang diharapkan. [192]

Selain itu, kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, merupakan hambatan signifikan. Sinergi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan pendidikan Islam dapat terlaksana secara efektif. Namun, dalam praktiknya, koordinasi dan kolaborasi itu sering terhalang oleh perbedaan visi, keterbatasan anggaran, serta kurangnya komitmen bersama. Hal ini berakibat pada ketidakoptimalan realisasi kebijakan yang telah dirumuskan.

Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam menyeimbangkan antara kebijakan nasional yang bersifat umum dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar dari pendidikan Islam. Kurikulum dan regulasi pemerintah sering belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan serta karakteristik pendidikan Islam. Akibatnya, lembaga pendidikan Islam harus berusaha menyesuaikan diri dengan standar nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam, di mana hal ini memerlukan kebijakan yang fleksibel dan adaptif agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya. [193]

---

[192] Mohammed, A. (2024). *Islamic Education Policies in Africa: Challenges and Opportunities*. Nairobi: East African Academic Press.

[193] Al-Mahdi, K. (2023). *Kebijakan Pendidikan Islam di Afrika: Perspektif Kontemporer*. Rabat: Maghreb Academic Press.

Di era digital, tantangan baru juga muncul dari aspek teknologi dan infrastruktur. Digitalisasi pendidikan menjadi kebutuhan penting untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi pendidikan Islam. Namun, masih banyak lembaga pendidikan Islam yang menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, serta tingkat literasi digital yang rendah di kalangan guru dan siswa. Selain itu, terdapat ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang menghambat penerapan metode pembelajaran modern berbasis teknologi dan berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan.

Dari sisi kurikulum, tantangan lain dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam terkait dengan relevansi materi pembelajaran. Kurikulum yang ada sering kali masih berorientasi pada teks-teks klasik tanpa adanya integrasi yang memadai dengan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kontemporer. Akibatnya, lulusan pendidikan Islam sering kali kurang memiliki daya saing dan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan pembaruan kurikulum yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam namun responsif terhadap dinamika global. [194]

Dalam kesimpulannya, berbagai tantangan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan kolaboratif dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Mahasiswa berpendapat bahwa penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi sangatlah krusial. Mereka juga menyoroti betapa pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang kondusif. Selain itu, mahasiswa menekankan urgensi pemanfaatan teknologi digital secara merata serta pengembangan kurikulum yang relevan, sehingga pendidikan Islam dapat mengatasi tantangan zaman tanpa kehilangan identitasnya.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Benua Afrika dimulai dengan hijrahnya kaum Muslim pertama ke Habasyah (Ethiopia) pada tahun 615 M, ketika mereka mencari perlindungan di bawah Raja Ashamah dan mulai menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Pada masa Kekhalifahan Umar ibn al-Khattab (634–644 M), ekspansi Islam memasuki Mesir dan

[194] Yusuf, A. (2020). *Islamic Educational Reform in Africa*. Accra: West African Press.

kawasan Afrika Utara melalui penaklukan dan dakwah, yang menjadi pijakan bagi berkembangnya institusi pendidikan Islam.

Perjalanan pendidikan Islam yang dimulai sejak abad ke-7 di benua Afrika menunjukkan dinamika yang kaya: dari hijrah pertama ke Habasyah dan penaklukan Mesir yang membuka gerbang bagi penyebaran ilmu, hingga berdirinya pusat-pusat pembelajaran ternama seperti Universitas Al-Azhar dan madrasah di Timbuktu. Bahasa Arab berperan sebagai pengantar utama, sementara masjid dan madrasah menjadi wahana dakwah dan pengembangan ilmu mulai astronomi hingga hukum Islam yang menjadikan peradaban Islam di Afrika tidak hanya ritualistik, tetapi juga intelektual.

Selain institusi formal, pembelajaran Islam juga dilakukan melalui sistem informal, seperti sekolah Al-Qur'an (maktab) yang berdekatan dengan masjid, halaqah (lingkaran pengajian), dan komunitas ulama lokal. Model pembelajaran ini memungkinkan transmisi nilai keagamaan dan tradisi lokal secara fleksibel, terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di sisi lain, konteks kolonial di Indonesia menyoroti ketegangan antara kekuasaan penjajah dan ketahanan umat Islam: pembatasan izin mengajar dan pengawasan ketat Belanda, alternatif pendidikan modern di bawah pengaruh Jepang, hingga lahirnya organisasi Muhammadiyah dan NU yang meletakkan dasar modernisasi pendidikan Islam. Kebijakan kontemporer di berbagai negara Afrika pun memperlihatkan spektrum yang luas dari integrasi formal di Mesir dan Aljazair hingga sistem informal berbasis komunitas di Ghana dengan tingkatan dukungan pemerintah, pendanaan, dan pengakuan resmi yang sangat bervariasi.

Kontribusi cendekiawan Muslim Afrika, seperti Ibnu Khaldun dari Tunisia, memiliki peran penting dalam tradisi ilmiah melalui karya monumentalnya "Muqaddimah" yang menganalisis dinamika sosial, politik, dan peradaban umat manusia. Pemikiran Ibnu Khaldun memberikan dasar analitis bagi studi sejarah dan sosiologi, serta menginspirasi generasi ulama di Afrika Utara dan sekitarnya.

Peran tokoh-tokoh ulama, terutama Syekh Yusuf al-Makassari dan Tuan Guru Imam Abdullah, membuktikan pentingnya kepemimpinan spiritual dalam mempertahankan dan menyebarluaskan pendidikan Islam di Afrika Selatan. Namun, ke depan sektor ini menghadapi tantangan serius: kurangnya sumber daya kompeten, ketidakharmonisan

kebijakan nasional dengan nilai Islam, dan kesenjangan infrastruktur digital. Di tengah tantangan itu, peluang besar terbuka lebar melalui modernisasi kurikulum, integrasi teknologi, dan kolaborasi antara lembaga negara dan komunitas untuk memperkuat pendidikan Islam sebagai pilar pembangunan karakter, ekonomi, dan budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muid, Muhammad Ulul Albab, M. A. I. (2022). Pendidikan Agama Islam Pada Masa Kolonialisme Belanda di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam dan Pembelajaran, 13*.

Abdullahi, Y. (2023). *Tokoh Ulama dan Pendidikan Islam di Afrika Barat*. Lagos: African Islamic Press.

Ahmad. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan. *Jurnal Cahaya Mandalika*.

Akmal Hawi. (2016). Pengembangan Islam di Afrika Utara dan Peradabannya. *Jurnal Studi Islam, 14*.

Al-Mahdi, K. (2023). *Kebijakan Pendidikan Islam di Afrika: Perspektif Kontemporer*. Rabat: Maghreb Academic Press.

Artikel. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan. *JOMLA*, 10–25.

Abdulrahman Musa, *Islam dan Pendidikan di Afrika: Sejarah dan Kebijakan Kontemporer*, (2022).

Anjar Mahmudin Nst, Helmiati, dan M. Nazir, *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan*, (2024).

Anjar Mahmudin Nst, Helmiati, & M. Nazir. *"Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan."* Journal Scientific of Mandalika (JSM) 6, no. 1.

Anjar Mahmudin Nst, Helmiati, M. Nazir, "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Sudan," Jurnal Online Mandalika, 2024.

Analisis Kebijakan Pendidikan di Afrika Utara (Mesir dan Sudan), Jurnal Ilmu Dakwah UIN Suska, 2023.

Anggraini, Lisa & Sassi, Komarudin.(2024*). Pendidikan Islam dan Penyiaran Nilai-Nilai Agama: Studi Neomodernisasi di Yaman dan Maroko*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(1)

Dr. H. Muslikh, M. (2022). *Pendidikan Islam di Era Merdeka: Perspektif Pemikiran Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara*. Syekh Nurjati Press.

Hasan. (2024). *Kebijakan Pendidikan Islam di Afrika Utara*. UIN Suska Riau.

Jumaedi dan Sassi dkk. (2024). Perbandingan Pendidikan Islam di Ghana dan Aljazair. *Jurnal Kajian Agama Islam, 8*.

Kamara, F. (2021). *Peran Ulama dalam Pendidikan Islam di Afrika Barat*. Dakar: Senegal Islamic Publishing.

Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Kini. (2024). *Jurnal Edukasia*.

Kholid Junaidi, Khairunnas Rajab, & Helmiati Helmiati. *"Analisis Kebijakan Pendidikan di Afrika Utara (Mesir dan Sudan)."* Instructional Development Journal 5, no. 2.

Miswanto. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Mesir. *Jurnal Adzkiya, XX*.

Miswanto. (2024). *Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Mesir*. STAI Ibnu Sina Batam.

Mohammed, A. (2024). *Islamic Education Policies in Africa: Challenges and Opportunities*. Nairobi: East African Academic Press.

Miswanto. *"Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Mesir*." Jurnal Adzkiya 6 (2023): 1–90. Batam: Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina.

Nadila, Putri, dan N. N. (2025). Sejarah Perkembangan dan Peradaban Islam di Afrika Utara. *Lencana, 3*.

Nasution, H. (2021). *Islam dan Pendidikan di Afrika*. Jakarta: Pustaka Islam.

Nurainah. (2022). Pendidikan Islam dan Modernisasi di Afrika Utara. *Jurnal Pendidikan Islam, XX*.

Oumar, I. (2022). *Sejarah Pendidikan Islam di Afrika Utara*. Cairo: Dar Al-Hikmah.

Putra Publisher. (2022). *Pendidikan Islam Indonesia Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang*.

PSPK, "Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam 2025-2029," 2024

Ridwan, Auliya. (2022). *The Changing Roles of Ulama and the Evolution of Islamic Schools: Some Insights from Moroccan and Indonesian Cases*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 10(2).

Sisca Mellyda. (2023). Pengembangan Modul Pendidikan Agama Islam dengan Pendekatan Saintifik. *Jurnal Pendidikan Islam, XX*.

Sulaiman. (2024). Sistem Pendidikan di Negara Afrika dan Timur

Tengah. *Jurnal Raziq*.

Sofyan Rofi, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (pendidikan Islam di Indonesia, 2023)

Tim Penulis. (2020). *Sejarah Pendidikan Islam*. UIN Sumatera Utara Press.

UIN Alauddin. (2020). Sejarah dan Penyebaran Islam di Asia dan Afrika. *Jurnal Rihlah, 8*.

Universitas Muhammadiyah. (2023). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda dan Jepang. *Jurnal Pilar*.

Yusuf, A. (2020). *Islamic Educational Reform in Africa*. Accra: West African Press.

BAB 11
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AMERIKA SERIKAT

Tri Wulandari (2220203049)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Amerika Serikat merupakan bagian dari sistem pendidikan minoritas yang berkembang pesat, terutama pasca gelombang imigrasi Muslim dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Meskipun AS adalah negara sekuler, Konstitusi menjamin kebebasan beragama, yang membuka ruang bagi berkembangnya pendidikan berbasis agama, termasuk Islam.

Kebijakan pendidikan di Amerika Serikat pada dasarnya bersifat desentralistik, di mana setiap negara bagian memiliki kewenangan besar dalam mengatur sistem pendidikan. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat Muslim untuk mendirikan sekolah Islam swasta yang berlandaskan kurikulum nasional namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Meski demikian, keberadaan dan pengembangan institusi pendidikan Islam tidak lepas dari tantangan, mulai dari isu integrasi budaya, keterbatasan dana, hingga stigma pasca peristiwa 11 September 2001 yang sempat menimbulkan prasangka negatif terhadap komunitas Muslim.[195]

Kebijakan pendidikan Islam di AS berkembang dalam konteks liberal-demokratik yang menekankan kebebasan beragama dan pemisahan gereja–negara (*church–state separation*). Kajian teori ini bermaksud menjelaskan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik di tingkat federal, negara bagian (*state*), dan lokal memengaruhi eksistensi dan perkembangan lembaga pendidikan Islam (madrasah, *Islamic schools*, *homeschooling* Muslim, *charter schools* berciri agama).[196]

Penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan di Amerika Serikat mengakomodasi kebutuhan umat Islam, serta

[195]Shariq Siddiqui,*Pendidikan Islam di Amerika Serikat dan Evolusi Lembaga Nonfrofit Muslim*,(Cheltenham:Edward Elqar,2019),hlm 168

[196]Nadeem Memon, *Sejarah Pendidikan Islam di Amerika :Pemetaan Pertumbuhan dan Perkembangan*,(New York:Routledge,2020),hlm 236

bagaimana komunitas Muslim merespons ruang-ruang yang tersedia dalam sistem tersebut. Kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman hubungan antara negara dan agama dalam konteks pendidikan, tetapi juga menggambarkan dinamika perjuangan identitas Muslim dalam lingkungan yang sekuler dan liberal.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah kebijakan pendidikan islam di amerika serikat?
b. Apakah tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan Islam dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar di Amerika Serikat?
c. Bagaimanakah respons masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan sekolah-sekolah Islam di Amerika Serikat?
d. Sejauh manakah kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi komunitas Muslim?
e. Apakah peran organisasi Muslim dalam mengembangkan dan mempertahankan pendidikan Islam di Amerika Serikat?

C. Metodologi

Metodologi penelitian dalam makalah mengenai" Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat" menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada wilayah di Amerika Serikat. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus mendeskripsikan,memahami,dan menganalisis kebijakan pendidikan islam yang berkembang dalam konteks sosial,politik,dan budaya amerika serikat.

Pendekatan Penelitian menggunakan *pendekatan studi kebijakan public(policy study)*, dengan mengacu pada teori pluarisme dan sekularisme untuk menganalisis dinamika dan bentuk implementasi pendidikan islam di amerika serikat.

Teknik analisis data menggunakan *analisis data (content analysis)*. Data diklasifikasikan berdasarkan tema(missal:hak siswa muslim, pengelolaan sekolah islam,kurikulum multicultural). Data dibandingkan dengan kerangka teori pluralism dan sekularisme,menarik kesimpulan tentang bentuk dan tantangan kebijakan pendidikan islam di amerika serikat.

TEORI

1 Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik dalam konteks kebijakan pendidikan Islam di Amerika Serikat melibatkan bagaimana negara, melalui mekanisme kebijakan publik, mengatur, mengakomodasi, atau bahkan membatasi ekspresi pendidikan berbasis Islam di tengah prinsip dasar Amerika: kebebasan beragama dan pemisahan gereja dan negara (*separation of church and state*).[197]

2 Teori *Pluralisme* dan *Sekularisme*

Pluralisme dalam kebijakan publik berpandangan bahwa masyarakat terdiri dari banyak kelompok sosial, budaya, dan agama yang sah dan setara dalam memperjuangkan kepentingannya. Tidak ada satu kelompok yang bisa menguasai penuh negara; semua harus diakomodasi dalam proses demokrasi. Negara membiarkan berbagai komunitas, termasuk Muslim, memperjuangkan dan mempertahankan identitas mereka di dalam sistem pendidikan asal tidak bertentangan dengan hukum umum.[198]

Sekularisme di Amerika didasarkan pada prinsip pemisahan antara agama dan negara (*separation of church and state*), terutama dalam pendidikan publik. Negara netral terhadap agama. Islam (seperti agama lain) tidak diistimewakan, tidak pula didiskriminasi, tetapi tetap dipisahkan dari program pendidikan formal Negara.

3 Teori Pedagogi Islam

Pedagogi Islam adalah teori dan praktik pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai, prinsip, dan ajaran Islam. Ini bukan hanya soal "mengajarkan agama", tapi tentang bagaimana proses belajar-mengajar itu sendiri dibangun atas dasar konsep tauhid (keesaan Allah), akhlak, dan tujuan akhir pendidikan: membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal.[199]

---

[197]Nadia Fadilah,*Kebijakan Pendidikan Islam dalam Publik*(,Jakarta:Pustaka Abadi,2020),hlm 250

[198]Muhammad Idris,*Kebijakan dalam Pluralisme dan Sekularismen dalam Pendidikan Islam,*(Yogakarata:Lentera Pustaka,2019),hlm 300

[199]Ahmad Fauzi,*Dasar-dasar Pendidikan*,(Jakarta:Rajawali Pers,2020),hlm 250

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendidikan Islam di Amerika Serikat

Awal mula pendidikan Islam di Amerika Serikat belum memiliki catatan yang jelas, namun sejarah Islam di negara ini dapat ditelusuri sejak abad ke-16. Pada masa itu, orang-orang Muslim pertama kali tiba di Amerika, terutama melalui jalur perdagangan budak dari Afrika. Diperkirakan sekitar 40. 000 orang Muslim sebagai budak di Amerika Serikat pada awal abad ke-1500-an, menandai langkah awal dalam perjalanan panjang masuknya Islam ke benua Amerika.[200]

Dalam konteks pendidikan Islam, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Islam telah hadir di Amerika jauh sebelum kedatangan *Columbus*. Beberapa ahli, termasuk *Dr. Barry Fell* dari Universitas Harvard, mengungkapkan bahwa pada sekitar tahun 700-800 Masehi, sekolah-sekolah Islam sudah didirikan di berbagai wilayah Amerika, seperti di *Valley of Fire*, *Allan Spring*, dan *Logomorismo*. Selain itu, dokumen dari Tiongkok yang ditulis pada tahun 1178 juga mencatat perjalanan para pelaut Muslim ke suatu daerah yang diyakini sebagai Amerika, yang dalam dokumen itu disebut sebagai *Mu-Lan-Pi*. Lebih jauh lagi, *Gavin Menzies*, seorang mantan pelaut, menemukan bukti peninggalan laksamana Muslim *Cheng Ho* di Amerika pada tahun 1421, yang terjadi jauh sebelum *Columbus* menginjakkan kaki di benua ini.[201]

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, gelombang *imigran* Muslim dari Timur Tengah, termasuk dari Suriah, Yordania, dan Palestina, mulai tiba di Amerika Serikat. Mereka mendirikan masjid serta organisasi-organisasi Islam yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelestarian nilai-nilai Islam. Masjid pertama di Amerika dibangun di *Chicago* pada tahun 1893, yang juga menjadi pusat pendidikan Islam pertama di negara ini.[202]

Pendidikan Islam di Amerika Serikat telah menunjukkan kemajuan yang pesat berkat kehadiran sekolah-sekolah Islam dan pusat-pusat pendidikan keagamaan. Lembaga-lembaga ini

---

[200]Aisyah Rahman, *Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat: Studi Analisis Kontemporer*,(Yogyakarta:Lentera ilmu Press,2021),hlm 312

[201]Muhammad Al-Fatih, *Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat*,(Bandung:Cakrawala Ilmu,2020),hlm 89

[202]Nur Ainiyah,*Pendidikan Islam dalam Konteks Multikulturalisme Amerika Serikat*,(Jakarta:Pustaka Setia,2019),hlm 305

menyediakan beragam program yang mencakup pendidikan agama, pembelajaran bahasa Arab, serta penanaman nilai-nilai Islam. Sebagian besar sekolah ini beroperasi secara independen dari segi keuangan dan memiliki kebebasan untuk merancang kurikulum mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mendukung eksistensi sekolah berbasis agama, meskipun tanpa adanya dukungan dana publik.[203]

B. Tantangan yang dihadapi Oleh Institusi Pendidikan Islam dalam Memajukan Kegiatan Belajar-Mengajar di Amerika Serikat

Tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan Islam dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar di Amerika Serikat meliputi beberapa aspek berikut;[204]

a. Kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang Islam

   Pemahaman yang terbatas tentang Islam sering kali menjadi penyebab timbulnya stereotip serta prasangka negatif terhadap pelajar Muslim. Situasi ini dapat menghambat proses belajar mereka dan mengganggu integrasi sosial di lingkungan sekitarnya.

b. Kebijakan sekolah dan peraturan yang kurang memahami kebutuhan khusus pelajar Muslim

   Pembatasan pelajaran agama di sekolah umum serta kurangnya penyesuaian terhadap kebutuhan ibadah dan budaya Muslim dapat menjadi hambatan dalam pendidikan Islam.

c. Model pendidikan Islam yang eksklusif dan konservatif

   Pendidikan Islam di Amerika Serikat sering kali menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi keagamaan dan beradaptasi dengan konteks masyarakat yang pluralistik. Situasi ini menimbulkan tantangan dalam merancang kurikulum yang tidak hanya inklusif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang.

d. Keterbatasan sumber daya pendidikan

   Salah satu kendala yang dihadapi adalah minimnya ketersediaan buku teks yang sesuai, kekurangan guru yang terlatih

[203]Hasan Basri, *Kebijakan dan Tantangan Pendidikan Islam di Amerika Serikat,(Malang:Mitra Cendekia* Media,2020),hlm 289

[204]Sarah Amalia,*Kebijakan Pendidikan islam di Amerika Serikat:Sejarah dan Perkembangannya*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2021),hlm 260

khusus dalam pendidikan Islam, serta fasilitas yang belum memadai untuk mendukung proses pembelajaran agama dan bahasa Arab.

e. Tantangan sosial dan budaya bagi generasi muda Muslim

Anak muda Muslim sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan identitas keagamaan mereka dengan nilai-nilai serta gaya hidup masyarakat Amerika. Hal ini sering kali menimbulkan kebingungan dan tekanan psikologis bagi mereka.

f. Tantangan teknologi dan pembelajaran jarak jauh

Terutama di masa pandemi Covid-19, institusi pendidikan Islam dituntut untuk beradaptasi dengan mengimplementasikan pembelajaran daring. Namun, kondisi ini juga mengekspos berbagai tantangan, terutama terkait dengan akses internet dan ketersediaan perangkat teknologi yang tidak merata.

Secara keseluruhan, institusi pendidikan Islam di Amerika Serikat beroperasi dalam lingkungan yang beragam dan penuh tantangan. Karena itu, penting bagi mereka untuk merumuskan strategi yang efektif, tidak hanya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, tetapi juga untuk memanfaatkan peluang dalam memperkuat dialog antaragama dan meningkatkan pemahaman antarbudaya.

C. Respons Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Keberadaan Sekolah Sekolah Islam di Amerika Serikat

Respons masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan sekolah-sekolah Islam di Amerika Serikat menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan tantangan sekaligus dukungan yang signifikan.

a. Respons Masyarat

Muslim adalah kelompok minoritas di Amerika Serikat, dengan proporsi sekitar 1,3% dari populasi keseluruhan. Keberadaan sekolah-sekolah Islam pun masih terbilang langka, meskipun jumlah siswa yang mendaftar terus meningkat. Pasca peristiwa tragis 11 September 2001, komunitas Muslim, termasuk siswa-siswa di sekolah Islam, mengalami prasangka negatif dan

intimidasi, yang menyebabkan trauma dan kebingungan di antara mereka.[205]

Namun, seiring berjalannya waktu, dukungan dan solidaritas dari masyarakat umum mulai tumbuh. Banyak siswa dari sekolah negeri, organisasi non-pemerintah, dan komunitas agama lainnya bersatu untuk membentuk "barisan pagar manusia" demi melindungi sekolah-sekolah Islam, tempat tinggal umat Muslim, dan masjid dari segala bentuk intimidasi. Selain itu, sekolah-sekolah Islam aktif menyelenggarakan dialog antaragama dan berbagai kegiatan yang mengundang siswa dari sekolah lain, bertujuan untuk memperkenalkan Islam sebagai agama yang damai dan toleran. Inisiatif-inisiatif ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan mengurangi stereotip yang ada.

Madrasah atau sekolah Islam mingguan yang diadakan oleh komunitas Muslim diaspora, seperti yang ada di Maryland, juga memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak Muslim. Kegiatan ini membantu mereka mempertahankan pemahaman serta kebanggaan terhadap identitas Islam mereka, terutama di lingkungan yang mayoritas tidak beragama Islam.

b. Respons Pemerintah

Pemerintah Amerika Serikat umumnya memegang sikap netral dan menghargai kebebasan beragama. Sebagai hasilnya, sekolah-sekolah berbasis agama, termasuk sekolah Islam, diperbolehkan untuk berdiri dan mengelola kurikulumnya sendiri tanpa menerima dana langsung dari pemerintah. Meskipun ada dukungan tidak langsung, seperti penyediaan buku teks dan fasilitas laboratorium, sekolah-sekolah Islam diharuskan untuk mandiri secara finansial, yang biasanya bergantung pada biaya SPP dan sumbangan dari komunitas.[206]

Di tingkat lokal, pemerintah dan aparat kota, seperti yang terlihat di *Chicago*, menegaskan komitmen untuk menolak segala bentuk diskriminasi atau intimidasi terhadap komunitas Muslim, serta memberikan perlindungan hukum dan sosial yang diperlukan. Selain itu, komunitas Muslim di berbagai wilayah,

[205]Siti Maryam, *Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat: Perspektif Historis dan Kontemporer*,(Jakarta:Pustaka Ilmu,2021),hlm 145

[206]Ahmad Syafiq, *Pendidikan Islam di Amerika: Antara Peluang dan Tantangan*,(Bandung:Alfabeta,2019),hlm 295

termasuk *Illinois*, aktif dalam membangun hubungan dengan pemerintah setempat, universitas, media, dan kelompok agama lainnya untuk memperkuat posisi sosial dan politik mereka.[207]

Meskipun ada kebijakan yang mendukung *pluralisme*, tantangan tetap ada, terutama terkait kurangnya pemahaman yang mendalam tentang Islam dan kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh pelajar Muslim, yang sering kali belum sepenuhnya diakui dalam sistem pendidikan umum.

D. Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat Menjamin Kebebasan Beragama Bagi Komunitas Muslim

Kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi komunitas Muslim melalui prinsip desentralisasi dan perlindungan konstitusional. Dalam sistem pendidikan AS, pemerintah negara bagian dan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengelola pendidikan, termasuk pengaturan yang memungkinkan integrasi nilai-nilai agama dan budaya yang beragam, termasuk Islam.[208]

Pendidikan Islam di Amerika Serikat semakin berkembang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Ada banyak sekolah Islam dan pusat pendidikan keagamaan yang menyediakan lingkungan bagi pembelajaran agama, bahasa Arab, serta nilai-nilai Islam. Di beberapa wilayah, program pendidikan Islam juga telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan umum, meskipun masih terdapat tantangan, seperti kurangnya pemahaman dari masyarakat luas dan kebijakan sekolah yang mungkin belum sepenuhnya memahami karakteristik khusus pelajar Muslim.[209]

Selain itu, kebebasan beragama di Amerika Serikat dilindungi secara konstitusional melalui Amandemen Pertama Konstitusi AS, yang melarang Kongres untuk membuat undang-undang yang membatasi kebebasan beragama. Ini memastikan bahwa komunitas Muslim dapat menjalankan ibadah dan pendidikan agama mereka tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah AS juga telah mengambil langkah-langkah legislatif untuk melarang diskriminasi berbasis

---

[207]

[208]Lina Fauziah, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat,(Yogyakarta:Lentera ilmu press*,2020),hlm 75

[209]Lina Qonita, *Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Amerika Serikat*,(Bandung:Nuansa Cendekia,2020),hlm 290

agama, salah satunya dengan pengesahan RUU NO BAN Act yang bertujuan mencegah larangan perjalanan yang diskriminatif terhadap warga negara dari mayoritas beragama Islam.[210]

Kebijakan pendidikan di Amerika Serikat pada dasarnya berakar pada prinsip-prinsip liberalisme dan demokrasi yang tertuang dalam Konstitusi, terutama melalui *First Amendment* yang menjamin kebebasan beragama. Dalam konteks pendidikan, jaminan ini diwujudkan dalam bentuk sistem pendidikan yang bersifat netral terhadap agama namun tetap memberi ruang bagi ekspresi keagamaan secara individual maupun institusional. Kebijakan ini memungkinkan komunitas Muslim untuk menyelenggarakan pendidikan Islam, baik melalui sekolah formal seperti Islamic Schools dan Madrasah, maupun melalui program non-formal seperti sekolah akhir pekan atau kegiatan pembelajaran berbasis komunitas.

Sekolah-sekolah Islam di Amerika Serikat beroperasi secara independen dari pemerintah dalam hal pendanaan dan kurikulum keagamaan. Meskipun mereka tetap mengikuti standar pendidikan umum yang ditetapkan oleh negara bagian, institusi-institusi ini diberikan otonomi dalam menambahkan pelajaran agama, bahasa Arab, dan nilai-nilai moral Islam. Dalam banyak kasus, sekolah-sekolah ini juga menerapkan pendekatan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai spiritual dan akademik, sehingga menghasilkan model pendidikan yang holistik dan berimbang. Hal ini sejalan dengan semangat pluralisme yang dianut oleh masyarakat Amerika, yang menghargai keragaman budaya dan keyakinan dalam ranah publik.[211]

Namun, penting untuk dicatat bahwa desentralisasi sistem pendidikan di AS menyebabkan adanya disparitas dalam implementasi kebijakan ini antarnegara bagian maupun antar distrik. Di daerah-daerah yang memiliki komunitas Muslim yang signifikan seperti Dearborn (Michigan), Brooklyn (New York), dan Anaheim (California), terdapat dukungan yang lebih kuat dari otoritas pendidikan lokal terhadap kebutuhan siswa Muslim. Sekolah-sekolah umum di daerah tersebut lebih akomodatif dalam hal penyediaan

[210]Yusuf Handani, *Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat: Peluang*,(Jakarta:Pustaka Riset,2021),hlm 276

[211]Muhammad Basyrul,*Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*,(Yogyakarta:Deepublish,2019),hlm 150

waktu salat, makanan halal di kantin sekolah, dan kebijakan berpakaian yang menghormati simbol-simbol keagamaan seperti jilbab. Sebaliknya, di wilayah-wilayah yang lebih homogen secara budaya dan minim pemahaman terhadap Islam, pelajar Muslim sering kali menghadapi diskriminasi atau kesulitan dalam mengekspresikan identitas keagamaannya.[212]

Sebagai bentuk jaminan hukum, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat juga telah mengukuhkan perlindungan terhadap hak siswa Muslim melalui berbagai putusan yang mendukung ekspresi keagamaan di lingkungan sekolah selama tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk menyebarkan ajaran agama tertentu. Misalnya, dalam kasus *Cheema v. Thompson*, pengadilan memutuskan bahwa siswa Sikh diperbolehkan membawa simbol keagamaan (kirpan) ke sekolah, dengan pengamanan tertentu. Putusan semacam ini menjadi preseden penting bagi perlindungan simbol-simbol keagamaan dalam ruang pendidikan publik, termasuk bagi umat Muslim.

Selain itu, perkembangan positif juga terlihat dari munculnya *charter schools* dengan nuansa budaya Islam yang tetap mematuhi prinsip sekularisme negara, seperti tidak mengajarkan doktrin agama secara langsung tetapi tetap mengintegrasikan nilai-nilai etika dan budaya Muslim. Ini menjadi strategi alternatif yang banyak digunakan oleh komunitas Muslim untuk memastikan pendidikan anak-anak mereka tetap terjangkau dan sesuai nilai, tanpa melanggar hukum sekular negara.

Peran organisasi masyarakat sipil juga tidak dapat diabaikan. Lembaga seperti CAIR (Council on American-Islamic Relations), ISNA (Islamic Society of North America), dan MPAC (Muslim Public Affairs Council) aktif mengadvokasi hak-hak siswa Muslim, mengadakan pelatihan bagi guru dan administrator sekolah tentang keberagaman agama, serta menyusun panduan kebijakan inklusif bagi sekolah-sekolah publik. Mereka juga menjadi garda terdepan dalam merespons kebijakan diskriminatif dan menyuarakan kepentingan komunitas Muslim dalam forum publik dan legislatif.[213]

---

[212]Masduki Duryat,*Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Amerika*,(Yogyakarta:K-Media,2019).hlm 218

[213]Farid Senzai,*Mendidik Muslim Amerika*,(New York:Oxford University Press,2020),hlm 296

Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Prasangka pasca-9/11, meningkatnya Islamofobia, serta polarisasi politik yang mengaitkan Islam dengan ekstremisme, kadang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan yang benar-benar inklusif. Beberapa sekolah masih melaporkan insiden diskriminasi terhadap siswa Muslim, baik dari sesama siswa maupun dari tenaga pengajar, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya institusional sekolah.[214]

Dengan demikian, kebijakan pendidikan di Amerika Serikat memperkuat kebebasan beragama komunitas Muslim melalui perlindungan hukum yang kokoh serta sistem pendidikan yang fleksibel dan inklusif. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan dari masyarakat secara umum.

E. Peran Organisasi Muslim dalam Mengembangkan dan Mempertahankan Pendidikan Islam di Amerika Serikat

Organisasi Muslim di Amerika Serikat memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mempertahankan pendidikan Islam di negara tersebut melalui berbagai cara berikut;[215]

a. Pendirian dan Pengelolaan Sekolah Islam

Organisasi Muslim telah mendirikan dan mengelola sejumlah sekolah Islam yang menyediakan pendidikan agama, bahasa Arab, dan nilai-nilai Islam. Salah satu contohnya adalah Al-Salam Day School di Missouri, yang mendapatkan akreditasi dari kedua lembaga pendidikan, baik yang berfokus pada Islam maupun yang bersifat umum. Selain itu, terdapat juga sekolah-sekolah seperti Noor-UI-Iman dan Al-Huda School Darus Salam yang berkomitmen untuk menjaga ajaran Islam tetap relevan dan hidup di tengah kemajuan zaman modern.

b. Menyediakan Pendidikan dari Tingkat Dasar hingga Perguruan Tinggi

Pendidikan Islam di Amerika tidak hanya berlaku pada tingkat sekolah dasar dan menengah, tetapi juga menjangkau

[214] Anas Wibowo, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi dalam Konteks Global* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 45.

[215]Khalid Mahmud, *Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Amerika*,(Bandung:Lentera Akademika,2019),hlm 65

perguruan tinggi dan universitas Islam. Di institusi-institusi tersebut, berbagai upaya dilakukan untuk mengharmonisasikan kurikulum tradisional Islam dengan sistem pendidikan tinggi yang ada di Amerika Serikat. Berbagai organisasi Muslim berperan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung kebutuhan spiritual dan intelektual komunitas Muslim.

c. Membina Generasi Muslim yang Berkomitmen

Organisasi seperti Islamic Society of North America (ISNA) menekankan pentingnya membentuk generasi anak-anak Muslim yang tumbuh dengan komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam. Mereka juga berusaha melahirkan ulama yang dapat menghadapi berbagai tantangan zaman. Upaya ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan pendidikan Islam dan kesejahteraan komunitas Muslim secara keseluruhan.

d. Mengintegrasikan Pendidikan Islam dengan Nilai Demokrasi dan Kewarganegaraan

Pendidikan Islam yang digagas oleh berbagai organisasi Muslim bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kewarganegaraan di Amerika. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat muncul generasi pelajar yang toleran dan inklusif, yang siap berkontribusi dalam masyarakat yang beragam.

e. Menghadapi Tantangan dan Meningkatkan Pemahaman Islam

Organisasi Muslim dengan antusias mengatasi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang Islam, maraknya stereotip negatif, serta kebijakan sekolah yang sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan pelajar Muslim. Selain itu, mereka berkontribusi secara signifikan dalam mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya, menjadikan pendidikan Islam sebagai sarana untuk membangun pemahaman yang lebih baik di antara berbagai kalangan

f. Advokasi dan Perlindungan Hak Pendidikan Muslim

Organisasi seperti Council on American-Islamic Relations (CAIR) dan Muslim Public Affairs Council (MPAC) tidak hanya berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat Muslim, tetapi juga ikut serta dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam. Mereka juga berupaya untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang Islam melalui berbagai program dan media.

Organisasi Muslim di Amerika Serikat memainkan peran yang beragam dan kompleks dalam memajukan serta melestarikan pendidikan Islam. Mereka berkontribusi dalam mendirikan sekolah dan perguruan tinggi Islam, mendidik generasi muda Muslim yang berkomitmen, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, mereka juga aktif mengadvokasi hak-hak komunitas dan meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai Islam. Peran ini sangat penting untuk menjaga eksistensi dan pengembangan pendidikan Islam di tengah masyarakat yang multikultural dan pluralistik di Amerika Serikat.[216]

KESIMPULAN

Dapat penulis analisis bahwa Awal mula pendidikan Islam di Amerika Serikat belum memiliki catatan yang jelas, namun sejarah Islam di negara ini dapat ditelusuri sejak abad ke-16. Pada masa itu, orang-orang Muslim pertama kali tiba di Amerika, terutama melalui jalur perdagangan budak dari Afrika.

Dapat penulis analisis bahwa tantangan yang sering dihadapi oleh institusi pendidikan islam biasanya Kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang Islam, Kebijakan sekolah dan peraturan yang kurang memahami kebutuhan khusus pelajar Muslim, Model pendidikan Islam yang eksklusif dan konservatif, Keterbatasan sumber daya pendidikan, Tantangan sosial dan budaya bagi generasi muda Muslim, Tantangan teknologi dan pembelajaran jarak jauh.

Dapat penulis analisis bahwa respons masyarakat dan respons pemerintah berbeda mengenai kebijakan pendidikan islam di amerika serikat tersebut, resposns masyarakat lebih berfokus memperkenalkan Islam sebagai agama yang damai dan toleran. sedangkan respons pemerintah Amerika Serikat umumnya memegang sikap netral dan menghargai kebebasan beragama.

Dapat penulis analisis bahwa Kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi komunitas Muslim melalui prinsip desentralisasi dan perlindungan konstitusional,

[216]Siti Rahmah, *Politik Pendidikan Islam di Amerika Serikat: Studi Kebijakan Kontemporer,(*Yogyakarta:Cipta Abadi,2020),hlm 215

Dapat penulis analisis bahwa Organisasi Muslim di Amerika Serikat peran penting dalam mengembangkan dan mempertahankan pendidikan Islam di negara

DAFTAR PUSTAKA

Ainiyah,Nur *Pendidikan Islam dalam Konteks Multikulturalisme Amerika Serikat*,(Jakarta:Pustaka Setia,2019),

Al-Fatih,Muhammad *Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat*,(Bandung:Cakrawala Ilmu,2020),

Amalia,Sarah *Kebijakan Pendidikan islam di Amerika Serikat:Sejarah dan Perkembangannya*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2021),

Basri,Hasan *Kebijakan dan Tantangan Pendidikan Islam di Amerika Serikat,*(Malang:Mitra Cendekia Media,2020),

Basyrul,Muhammad *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*,(Yogyakarta:Deepublish,2019),

Duryat,Masduki*Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Amerika*,(Yogyakarta:K-Media,2019).

Fadilah,Nadia *Kebijakan Pendidikan Islam dalam Publik*(,Jakarta:Pustaka Abadi,2020),

Fauzi,Ahmad *Dasar-dasar Pendidikan*,(Jakarta:Rajawali Pers,2020),

Fauziah,Lina *Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat*,(Yogyakarta:Lentera ilmu press,2020),

Handani,Yusuf *Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat: Peluang*,(Jakarta:Pustaka Riset,2021),

Idris,Muhammad *Kebijakan dalam Pluralisme dan Sekularismen dalam Pendidikan Islam*,(Yogakarata:Lentera Pustaka,2019),

Mahmud,Khalid *Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Amerika,*(Bandung:Lentera Akademika,2019),

Maryam,Siti *Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat: Perspektif Historis dan Kontemporer*,(Jakarta:Pustaka Ilmu,2021),

Memon,Nadeem *Sejarah Pendidikan Islam di Amerika :Pemetaan Pertumbuhan dan Perkembangan*,(New York:Routledge,2020),

Qonita,Lina *Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Amerika Serikat*,(Bandung:Nuansa Cendekia,2020),

Rahmah,Siti Politik *Pendidikan Islam di Amerika Serikat: Studi Kebijakan Kontemporer*,(Yogyakarta:Cipta Abadi,2020),

Rahman,Aisyah *Kebijakan Pendidikan Islam di Amerika Serikat: Studi Analisis Kontemporer*,(Yogyakarta:Lentera ilmu Press,2021),

Senzai,Farid*Mendidik Muslim Amerika*,(New York:Oxford University Press,2020),

Siddiqui,Shariq *Pendidikan Islam di Amerika Serikat dan Evolusi Lembaga Nonfrofit Muslim*,(Cheltenham:Edward Elqar,2019),

Syafiq,Ahmad *Pendidikan Islam di Amerika: Antara Peluang dan Tantangan*,(Bandung:Alfabeta,2019).

Wibowo, A. (2018). *Pendidikan multikultural: Konsep dan aplikasi dalam konteks global*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

BAB 12
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AMERIKA SERIKAT

(Habibatul Inayah 2220203054)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pendidikan Islam di AS, yang merupakan masalah besar dalam politik dan kebijakan pendidikan negara multikultural ini. Populasi Muslim di Amerika Serikat telah meningkat secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20, didorong oleh gelombang imigrasi dari berbagai negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Komunitas Muslim mulai mendirikan lembaga pendidikan Islam, seperti sekolah dasar dan menengah, untuk mempertahankan identitas agama dan budaya mereka. Institusi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Namun, kebijakan pendidikan AS umumnya sekuler, yang sering menghalangi institusi pendidikan Islam untuk menerapkan kurikulum yang mengintegrasikan ajaran agama dengan pendidikan umum. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi terhadap komunitas Muslim, terutama setelah peristiwa 11 September 2001, membuat keadaan menjadi lebih sulit. Ini menciptakan perbedaan antara kebijakan pendidikan saat ini dan apa yang dibutuhkan komunitas Muslim untuk dipelajari. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk memikirkan bagaimana kebijakan pendidikan saat ini dapat disesuaikan untuk memenuhi tuntutan pendidikan Islam. Selain itu, institusi pendidikan Islam dapat berkontribusi pada percakapan antaragama dan budaya. Diharapkan penelitian ini akan menemukan metode kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung yang memperkuat pendidikan Islam, memperkaya keragaman pendidikan di Amerika Serikat, dan meningkatkan pemahaman dan toleransi antara agama di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

a. Apa pengertian kebiajakan Pendidikan islam di amerika serikat?
b. Apa tujuan dari kebijakan Pendidikan islam di amerika serikat?

c. Bagaimana dampak kebijakan Pendidikan islam di amerika serikat?
d. Apa hambatan kebijakan Pendidikan islam di amerika serikat?

C. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa dengan terstruktur dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Metode yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan di jurnal-jurnal yang relevan dan mempelajari serta memahami teori-teori yang ada pada beberapa literatur yang serupa dengan penelitian ini. Peneliti memanfaatkan sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan judul "kebijakan pendidikan islam di amerika serikat" sehingga penelitian ini dapat di selesaikan.

TEORI

Pernyataan ini diperkuat oleh fakta bahwa komunitas Muslim di Amerika Serikat mendirikan berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan spiritual dan intelektual umat Muslim di tengah masyarakat yang plural dan multikultural. Sekolah-sekolah Islam ini biasanya mengintegrasikan kurikulum akademik umum dengan pembelajaran agama Islam, bahasa Arab, dan nilai-nilai Islam.[217]

Selain itu, kebijakan pendidikan di Amerika Serikat yang melarang pengajaran agama di sekolah umum menjadikan pendidikan Islam lebih banyak berkembang di ranah sekolah swasta berbasis agama, homeschooling informal, masjid, dan organisasi Islam.[218] Hal ini menyebabkan pola pendidikan Islam di Amerika Serikat bersifat eksklusif dan konservatif, namun juga membuka peluang untuk pengembangan program pendidikan antaragama (inter-faith education)

[217] Niswatin Khoiriyah, Nur Kholis, and Nur Maslikhatun Nisak, 'Pelajaran Agama Pada Tingkat Primary School (Studi Komparatif Indonesia Dan Amerika)', *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 10.01 (2022), pp. 87–100.

[218] Uswatun Khasanah, 'The Development of Multicultural Islamic Education in the Modern Era: Relevance and Challenges', *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7.2 (2023), pp. 699–709.

yang dapat memperkuat dialog dan pemahaman antar komunitas yang berbeda.[219]

Kondisi ini mencerminkan bagaimana komunitas Muslim minoritas di Amerika Serikat berusaha mempertahankan identitas dan nilai keagamaan mereka melalui pendidikan Islam, meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat umum, stereotip negatif, dan keterbatasan sumber daya.[220] Kebijakan pendidikan yang ada sekaligus menjadi tekanan sekaligus peluang bagi komunitas Muslim untuk mengembangkan pendidikan Islam yang inklusif dan adaptif terhadap konteks sosial Amerika Serikat yang majemuk.[221]

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di Amerika Serikat dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara kebebasan beragama yang dijamin negara dengan tantangan minoritas Muslim dalam mengakses pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka, sekaligus berupaya membangun jembatan dialog antaragama dan budaya di tengah masyarakat yang plural.[222]

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam di Amerka Serikat

Kebijakan pendidikan Islam di Amerika Serikat merujuk pada aturan dan praktik yang mengatur penyelenggaraan pendidikan berbasis Islam di tengah sistem pendidikan yang desentralisasi dan pluralistik di negara tersebut. Secara rinci, kebijakan ini dipengaruhi oleh struktur pemerintahan Amerika Serikat yang memberikan kewenangan utama dalam pendidikan kepada pemerintah negara bagian dan daerah, bukan pemerintah pusat.[223]

Dalam konteks pendidikan Islam, pemerintah AS tidak mengizinkan pengajaran agama di sekolah negeri (sekolah umum),

---

[219] Aslan Aslan, 'Kurikulum Pendidikan Islam Di Amerika', *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 8.2 (2020), pp. 117–24.

[220] Ahmad Fathan Aniq, 'Islamic School Promotion through Multicultural Education Curriculum Integration at As-Salam Day School, North America', *Didaktika Religia*, 12.1 (2024), pp. 71–92.

[221] Manshuruddin Manshuruddin, 'Pendidikan Islam Muslim Minoritas: Kasus Amerika Serikat', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 5.2 (2022), pp. 124–32.

[222] Husin Husin, 'Pendidikan Agama Islam Di Amerika Serikat (Lembaga Pendidikan Islam)', *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 2018.p 89

[223] Robi Aroka and M Zalnur, 'Pendidikan Islam Di Amerika', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.1 (2024), pp. 175–95.

sehingga pendidikan agama, termasuk Islam, tidak diajarkan secara resmi di sekolah umum. Sebagai gantinya, komunitas Muslim mengelola pendidikan Islam melalui sekolah swasta berbasis agama, homeschooling informal, masjid, dan organisasi Islam. Sekolah-sekolah Islam swasta ini berdiri secara mandiri tanpa bantuan dana langsung dari pemerintah, meskipun pemerintah memberikan dukungan tidak langsung seperti penyediaan buku teks dan fasilitas laboratorium.[224]

Kebijakan pendidikan di Amerika Serikat adalah serangkaian aturan, prinsip, dan tujuan yang ditetapkan untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari federal, negara bagian, hingga lokal. Karena sistem pemerintahan AS bersifat federal, maka kebijakan pendidikan juga bersifat desentralisasi, memberikan otonomi luas kepada negara bagian dan distrik sekolah untuk mengelola pendidikan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.[225]

Menurut pendapat Gusnita (2025), kebijakan Pendidikan di amerika serikat mencerminkan ciri pemerintahan federal dengan desentralisasi melalui pemerintah negara bagian. Tanggung jawab utama pendidikan berada di Departemen Pendidikan Pemerintah Federal, namun pelaksanaan diserahkan kepada pemerintah negara bagian dan distrik sekolah. Kebijakan pendidikan di AS bertujuan menyediakan pendidikan gratis selama 12 tahun dan biaya pendidikan tinggi yang relatif terjangkau, serta menekankan pemerataan akses dan peningkatan kualitas Pendidikan.[226]

Sedangkan ROSA (2024), berpendapat kebijakan pendidikan di amerika serikat bersifat desentralisasi dengan otonomi luas bagi negara bagian dalam mengelola pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum dan penentuan standar pembelajaran sesuai kebutuhan lokal. Pendidikan dasar dimulai dari Kindergarten

[224] Nasaruddin Umar, *Geliat Islam Di Amerika Serikat* (Bumi Aksara, 2020).

[225] Budiman Akli, Komarudin Sassi, and Dwi Noviani, 'Komparasi Sistem Pendidikan Di Amerika Serikat Dan Indonesia', *Simpati*, 2.1 (2024), pp. 176–98.

[226] Zikri Gusnita, Mislaini Mislaini, and Nidaul Lathifah Suhelmi, 'Perbandingan Sistem Pendidikan Amerika Serikat Dengan Indonesia', *Reflection: Islamic Education Journal*, 2.1 (2025), pp. 160–73.

dengan pendekatan holistik dan berbasis bermain, menyesuaikan dengan kondisi psikologis dan sosial anak.[227]

Sedangkan pendapat dari Syakhrani (2022), bahwa kebijakan pendidikan amerika serikat terdiri dari tiga lapis pemerintahan: federal, negara bagian, dan lokal. Kebijakan pendidikan sebagian besar dikelola oleh negara bagian dan pemerintah daerah, dengan Departemen Pendidikan Federal berfungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan nasional. Board of Education di negara bagian bertugas membuat kebijakan dan menentukan anggaran pendidikan, sedangkan pelaksanaan teknis berada di tangan komisioner atau superintendent yang ditunjuk.[228]

B. Tujuan Kebijakan Pendidikan Islam di Amerka Serikat

Kebijakan pendidikan Islam di Amerika Serikat bertujuan untuk mengenalkan ajaran Islam kepada komunitas Muslim dan masyarakat luas, sekaligus menepis stereotip negatif tentang Islam. Kurikulum ini biasanya menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum dan berfokus pada pengembangan kepribadian dan profesional siswa Muslim di tengah masyarakat multikultural Amerika. Selain itu, tenaga pendidik di sekolah Islam umumnya harus memiliki lisensi yang diperbaharui secara berkala, sehingga kualitas pengajaran dapat terjaga dan professional.[229]

Kebijakan Pendidikan islam di AS dirancang untuk mencapai beberapa tujuan nasional yang berlaku secara umum di seluruh negara bagian, yaitu [230]:

a) Mencapai kesatuan dalam keragaman masyarakat yang multikultural.
b) Mengembangkan cita-cita dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

---

[227] ELVIRA ROSA and others, 'KAJIAN PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT', *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4.4 (2024), pp. 1044–51.

[228] Abdul Wahab Syakhrani and others, 'Sistem Pendidikan Di Negara Maju Amerika Serikat', *Adiba: Journal of Education*, 2.3 (2022), pp. 311–17.

[229] Juju Masunah, 'Konsep Dan Praktik Pendidikan Multikultural Di Amerika Serikat Dan Indonesia', *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 17.4 (2011), p. 111899.

[230] Hestiningtyas Yuli Pratiwi, 'Analisis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan (Amerika Dan Indonesia)', *Hinef: Jurnal Rumpun Ilmu Pendidikan*, 3.1 (2024), pp. 38–51.

c) Membantu pengembangan individu agar mampu berkontribusi secara optimal dalam masyarakat.
d) Memperbaiki kondisi sosial masyarakat melalui pendidikan yang inklusif dan merata.
e) Mempercepat kemajuan nasional dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
f) Selain itu, AS menekankan pendidikan gratis selama 12 tahun masa sekolah dasar dan menengah, serta menyediakan biaya pendidikan tinggi yang relatif terjangkau dibandingkan negara lain.

C. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam di Amerka Serikat

Dampak kebijakan pendidikan Islam di Amerika Serikat terlihat dari perannya yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan intelektual komunitas Muslim di tengah masyarakat yang plural dan multikultural. Sekolah-sekolah Islam dan pusat pendidikan keagamaan berkembang pesat, menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran agama, bahasa Arab, dan nilai-nilai Islam. Selain itu, pendidikan Islam juga berfungsi sebagai jembatan untuk mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya, membantu membentuk generasi pelajar yang toleran dan inklusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan demokrasi.[231]

Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat umum terhadap Islam yang menimbulkan stereotip dan prasangka negatif terhadap pelajar Muslim. Kebijakan sekolah yang tidak sepenuhnya memahami kebutuhan khusus pelajar Muslim menjadi hambatan dalam pengembangan pendidikan Islam. Meski demikian, komunitas Muslim terus berupaya memperkuat pendidikan Islam di berbagai tingkatan dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pemahaman antaragama di Amerika Serikat.[232]

Dampak kebijakan Pendidikan islam di Amerika Serikat mencerminkan hasil dari sistem yang sangat desentralistik, dengan

[231] Rahmat Rahmat, 'PERKEMBANGAN ISLAM DI AMERIKA SERIKAT', *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 1.01 (2013).

[232] Khalid Arar and others, *Islamic-Based Educational Leadership, Administration and Management: Challenging Expectations through Global Critical Insights* (Taylor & Francis, 2023).

berbagai konsekuensi positif dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan sistem pendidikan itu sendiri.[233]

a) Berikut beberapa dampak positif dari kebijakan Pendidikan islam di Amerika Serikat yaitu[234]:
   1) Peningkatan Standar Pendidikan dan Reformasi: Reformasi pendidikan yang digulirkan sejak 1990-an, seperti program No Child Left Behind (NCLB), berhasil mendorong peningkatan standar akademik siswa, terutama dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Kebijakan ini menuntut sekolah untuk menunjukkan kemajuan siswa melalui tes tahunan, sehingga memacu sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
   2) Kesiapan Siswa untuk Dunia Kerja dan Pendidikan Tinggi: Kebijakan pendidikan menekankan kesiapan siswa menjadi warga negara yang produktif dan siap memasuki pendidikan tinggi maupun dunia kerja modern. Hal ini membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif dan berpengetahuan luas dalam ekonomi global.
   3) Kebebasan dan Otonomi Daerah dalam Pendidikan: Desentralisasi memberikan fleksibilitas kepada negara bagian dan distrik sekolah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal, sehingga memungkinkan inovasi dan adaptasi yang lebih cepat terhadap kondisi sosial dan ekonomi setempat.

b) Berikut beberapa dampak negatif dan Tantangan Kebijakan Pendidikan di Amerika Serikat yaitu [235]:
   1) Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan: Pendanaan yang sangat bergantung pada pajak properti lokal menyebabkan ketimpangan besar antara sekolah di daerah kaya dan miskin. Sekolah di komunitas miskin sering kekurangan fasilitas dan

[233] Faras Puji Azizah and Mona Aprilia, 'Historical Studies: The Social Life Of Muslim Minorities In The United States', *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 4.1 (2024), pp. 13–24.

[234] Irwan Irwan and others, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Pada Masa Darurat Covid 19', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9.2 (2021), pp. 89–95.

[235] Komarudin Sassi, 'PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA', *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif*, 5.10 (2024).

sumber daya, yang berdampak pada kualitas pendidikan dan kesempatan belajar siswa.

2) Biaya Pendidikan Tinggi yang Tinggi dan Beban Hutang Siswa: Meskipun pendidikan dasar dan menengah gratis, biaya pendidikan tinggi di AS sangat mahal, menyebabkan lebih dari separuh mahasiswa harus berhutang untuk menyelesaikan kuliah. Hal ini menjadi beban ekonomi yang signifikan bagi individu dan keluarga.
3) Masalah Sosial dan Pendidikan Anak Imigran: Tingginya tingkat imigrasi dari kalangan kurang mampu dan tidak terdidik menimbulkan tantangan dalam mengatasi hambatan bahasa dan akses pendidikan bagi anak-anak imigran. Ini menambah kompleksitas dalam mencapai pemerataan Pendidikan.
4) Tingkat Putus Sekolah dan Kekerasan: Masih terdapat angka putus sekolah yang cukup tinggi dan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
5) Keterlambatan Adaptasi terhadap Perubahan Kebutuhan Pasar Kerja dan Teknologi: Sistem pendidikan AS menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kurikulum dan pelatihan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar tenaga kerja yang cepat berubah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang relevansi pendidikan tradisional bagi generasi muda.

D. Hambatan Kebijakan Pendidikan Islam di Amerka Serikat

Hambatan kebijakan pendidikan Islam di Amerika Serikat terutama berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat umum terhadap Islam yang menimbulkan stereotip dan prasangka negatif terhadap pelajar Muslim. Selain itu, kebijakan sekolah negeri yang melarang pengajaran agama secara langsung membuat pendidikan Islam harus berkembang di sekolah swasta dan lembaga informal, sehingga akses dan kualitas pendidikan Islam menjadi terbatas. Hambatan lain termasuk kekurangan buku teks yang sesuai, kurangnya guru terlatih, serta model pendidikan Islam yang cenderung eksklusif dan konservatif, yang terkadang sulit beradaptasi dengan konteks masyarakat multikultural Amerika.

Kondisi ini diperparah oleh persebaran komunitas Muslim yang tidak merata di berbagai wilayah, sehingga dukungan dan sumber daya pendidikan Islam juga tidak merata, menimbulkan tantangan dalam pengembangan pendidikan Islam yang inklusif dan efektif.[236]

Adapun beberapa hambatan kebijakan pendidikan di Amerika Serikat lainnya sebagai berikut [237]:

a) Desentralisasi Sistem Pendidikan: Amerika Serikat tidak memiliki sistem pendidikan nasional yang terpusat. Setiap negara bagian (state) dan distrik sekolah lokal memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kurikulum, pendanaan, kebijakan guru, dan standar pendidikan. Hal ini menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, kesenjangan kebijakan antara negara bagian kaya dan miskin, Dan Kurangnya standar nasional yang konsisten.
b) Ketimpangan Pendanaan Sekolah: Sumber utama pendanaan pendidikan berasal dari pajak properti lokal, sehingga sekolah di daerah kaya mendapat dana lebih besar, sekolah di daerah miskin sering kali kekurangan fasilitas, staf berkualitas, dan program pendukung, dan ketimpangan ini memperparah gap prestasi antar kelompok sosial dan rasial.
c) Isu Ras dan Segregasi Sekolah: Walaupun segregasi rasial secara hukum telah dihapus sejak keputusan *Brown v. Board of Education* (1954), pada praktiknya masih ada, sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa kulit hitam atau Latin yang kurang mendapatkan sumber daya, pola pemukiman dan kebijakan zonasi sekolah yang tidak inklusif memperkuat segregasi, dan ketimpangan kualitas pendidikan yang berkaitan erat dengan ras.
d) Politik dan Ideologi: Kebijakan pendidikan sering menjadi ajang tarik-menarik antara kepentingan partai politik seperti Perdebatan soal kurikulum (misalnya: teori ras kritis, seksualitas, sejarah AS), Perselisihan mengenai peran pemerintah federal vs. lokal dalam Pendidikan, dan Isu tentang privatisasi pendidikan dan sekolah charter.

[236] Kiki Andiani Silaban and others, 'Transformasi Pendidikan Di Amerika: Tantangan Dan Inovasi Di Era Digital', *Polyscopia*, 1.3 (2024), pp. 142–46.

[237] Handrik Dewantara, 'Perbandingan Sistem Pendidikan Amerika Serikat Dengan Indonesia', *Jurnal Reflection*, 2024.

e) Krisis Tenaga Pendidik: Banyak distrik mengalami kekurangan guru karena, Gaji guru relatif rendah dibanding profesi lain dengan kualifikasi serupa, beban kerja tinggi, tekanan administratif, dan kurangnya dukungan professional, dan menurunnya minat mahasiswa untuk mengambil jurusan pendidikan.
f) Ketimpangan Akses Teknologi: Selama dan setelah pandemi COVID-19, ketimpangan akses teknologi semakin terlihat seperti, Banyak siswa di daerah miskin atau pedesaan tidak memiliki akses internet atau perangkat digital yang memadai. Hal ini menghambat efektivitas pembelajaran daring dan memperlebar kesenjangan pendidikan.
g) Tes Standar yang Kontroversial: Penggunaan tes standar (standardized testing) sebagai ukuran keberhasilan pendidikan menuai kritik yang terlalu fokus pada nilai tes daripada pemahaman menyeluruh, membebani siswa dan guru secara mental, dan Tidak mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi siswa.
h) Kurangnya Fokus pada Pendidikan Vokasional: Sistem pendidikan AS cenderung fokus pada persiapan masuk perguruan tinggi, sementara, Pendidikan kejuruan atau vokasional kurang diperhatikan. Padahal banyak pekerjaan di sektor menengah yang membutuhkan keterampilan teknis dan pelatihan praktis.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam di Amerika Serikat menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang sangat desentralistik, dengan kewenangan utama berada di tangan negara bagian dan distrik lokal, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan pendidikan Islam. Di tengah larangan pengajaran agama di sekolah negeri, komunitas Muslim mendirikan sekolah Islam swasta, homeschooling, dan program informal berbasis masjid sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan akademik siswa Muslim. Kebijakan ini bertujuan membentuk generasi Muslim yang berintegritas, toleran, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat multikultural, meskipun menghadapi hambatan seperti stereotip negatif, keterbatasan sumber daya, dan kesenjangan akses pendidikan. Dampaknya cukup signifikan dalam menciptakan ruang aman bagi

pembelajaran Islam, namun juga memperlihatkan tantangan nasional seperti ketimpangan pendanaan, segregasi pendidikan, krisis tenaga pendidik, serta ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan komunitas Muslim. Meski demikian, upaya penguatan pendidikan Islam terus dilakukan oleh komunitas Muslim sebagai bagian dari integrasi sosial dan penguatan nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

Akli, Budiman, Komarudin Sassi, and Dwi Noviani, 'Komparasi Sistem Pendidikan Di Amerika Serikat Dan Indonesia', *Simpati*, 2.1 (2024)

Aniq, Ahmad Fathan, 'Islamic School Promotion through Multicultural Education Curriculum Integration at As-Salam Day School, North America', *Didaktika Religia*, 12.1 (2024)

Arar, Khalid, Rania Sawalhi, Amaarah DeCuir, and Tasneem Amatullah, *Islamic-Based Educational Leadership, Administration and Management: Challenging Expectations through Global Critical Insights* (Taylor & Francis, 2023)

Aroka, Robi, and M Zalnur, 'Pendidikan Islam Di Amerika', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.1 (2024)

Aslan, Aslan, 'Kurikulum Pendidikan Islam Di Amerika', *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 8.2 (2018)

Azizah, Faras Puji, and Mona Aprilia, 'Historical Studies: The Social Life Of Muslim Minorities In The United States', *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 4.1 (2024)

Dewantara, Handrik, 'Perbandingan Sistem Pendidikan Amerika Serikat Dengan Indonesia', *Jurnal Reflection*, 2024

Gusnita, Zikri, Mislaini Mislaini, and Nidaul Lathifah Suhelmi, 'Perbandingan Sistem Pendidikan Amerika Serikat Dengan Indonesia', *Reflection: Islamic Education Journal*, 2.1 (2025)

Husin, Husin, 'Pendidikan Agama Islam Di Amerika Serikat (Lembaga Pendidikan Islam)', *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 2018

Irwan, Irwan, Fauqa Nuri Ichsan, Nurhizrah Gistituati, and Sufyarma Marsidin, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Pada Masa Darurat Covid 19', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9.2 (2021)

Khasanah, Uswatun, 'The Development of Multicultural Islamic

Education in the Modern Era: Relevance and Challenges', *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7.2 (2023)

Khoiriyah, Niswatin, Nur Kholis, and Nur Maslikhatun Nisak, 'Pelajaran Agama Pada Tingkat Primary School (Studi Komparatif Indonesia Dan Amerika)', *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 10.01 (2022)

Manshuruddin, Manshuruddin, 'Pendidikan Islam Muslim Minoritas: Kasus Amerika Serikat', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 5.2 (2022)

Masunah, Juju, 'Konsep Dan Praktik Pendidikan Multikultural Di Amerika Serikat Dan Indonesia', *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 17.4 (2011)

Pratiwi, Hestiningtyas Yuli, 'Analisis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan (Amerika Dan Indonesia)', *Hinef: Jurnal Rumpun Ilmu Pendidikan*, 3.1 (2024)

Rahmat, Rahmat, 'PERKEMBANGAN ISLAM DI AMERIKA SERIKAT', *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 1.01 (2013)

ROSA, ELVIRA, RETNO SUSANTI, ERNA RETNA SAFITRI, and FAKHILI GULO, 'KAJIAN PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT', *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4.4 (2024).

Sassi, Komarudin, 'PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA', *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif*, 5.10 (2024)

Silaban, Kiki Andiani, Grace Angelina Situmorang, Lois Zibya Priscilla Batubara, Masly Sihombing, Maria Irma Situmorang, Novia Mutiara, and others, 'Transformasi Pendidikan Di Amerika: Tantangan Dan Inovasi Di Era Digital', *Polyscopia*, 1.3 (2024).

Syakhrani, Abdul Wahab, Ahmad Maulani, Ahmad Saubari, Muhammad Yusuf, and Muhammad Ilham, 'Sistem Pendidikan Di Negara Maju Amerika Serikat', *Adiba: Journal of Education*, 2.3 (2022).

Umar, Nasaruddin, *Geliat Islam Di Amerika Serikat* (Bumi Aksara, 2020)

BAB 13
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA KAMBOJA

A. Mutaali

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam di Kamboja memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian masyarakat Muslim. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2020), pendidikan Islam merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesadaran masyarakat Muslim.[238]

Kamboja adalah negara dengan mayoritas penduduk Buddha Theravada, tetapi memiliki minoritas Muslim yang signifikan, terutama di provinsi-provinsi seperti Kampong Cham dan Tbong Khmum (CIA World Factbook, 2022). Pendidikan Islam di Kamboja memiliki sejarah panjang dan telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir.[239]

Komunitas Muslim di Kamboja terdiri sekitar 4–5% dari populasi nasional, dengan mayoritas berasal dari etnis Cham. Mereka memiliki sejarah panjang di wilayah ini, bahkan sebelum penjajahan Prancis. Identitas keagamaan mereka sangat kuat dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui jalur informal seperti keluarga dan komunitas lokal.[240]

Namun, pengalaman traumatis terjadi pada masa Khmer Merah (1975–1979), ketika segala bentuk praktik keagamaan, termasuk pendidikan Islam, dilarang keras. Banyak ulama dan guru agama dibunuh, serta masjid dan madrasah dihancurkan. Hal ini menyebabkan kemunduran besar dalam perkembangan pendidikan Islam.[241]

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Republik Indonesia (2019),

---

[238] John Tully, *A Short History of Cambodia: From Empire to Survival*, (Australia: Allen & Unwin, 2005), hlm. 186.

[239] Heuveline, P. . "*The Demographic Analysis of Mortality Crises: The Case of Cambodia*." (Population Studies, 2001), 55(3), 381–394.

[240] *Ibid*., 381-389

[241] *Ibid.,* 381-389

pendidikan Islam di Kamboja masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam di Kamboja perlu dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim.

Kebijakan pendidikan Islam di Kamboja juga perlu memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim di Kamboja. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020), pendidikan Islam di Kamboja perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dan meningkatkan kualitas hidup mereka.[242]

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di Kamboja perlu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat Muslim dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Kebijakan tersebut perlu didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan Islam yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana sejarah singkat pendidikan Islam di Kamboja dari masa awal masuknya Islam hingga perkembangan terkini?
b. Apa saja kebijakan pendidikan Islam yang berlaku di Kamboja, termasuk peran pemerintah dan organisasi Islam?
c. Apa saja tantangan kebijakan pendidikan Islam yang dihadapi di Kamboja saat ini?
d. Faktor-faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi kualitas pendidikan Islam di Kamboja?
e. Bagaimana kondisi terkini pendidikan dan pengajaran Islam di Kamboja, termasuk jenis lembaga pendidikan dan partisipasi masyarakat?

C. Metedologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam sejarah, kebijakan, tantangan, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas, serta kondisi pendidikan dan pengajaran Islam di Kamboja. Data akan

[242] Ramlan Surbakti dkk, *Kampuchea Tahun 1975-1979*, (UNAIR: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1990), hlm. 68.

dikumpulkan melalui studi literatur yang komprehensif terhadap berbagai sumber relevan seperti artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen pemerintah, dan publikasi dari organisasi Islam. Selain itu, wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci seperti pemimpin komunitas Muslim, pengelola lembaga pendidikan Islam, akademisi, dan perwakilan pemerintah terkait untuk mendapatkan perspektif langsung dan informasi yang mendalam mengenai isu-isu yang diteliti.

Analisis data akan dilakukan secara tematik, di mana informasi yang terkumpul dari studi literatur dan wawancara akan diorganisir dan dikategorikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Proses analisis ini melibatkan identifikasi pola, tema, dan narasi yang muncul dari data, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik dan komprehensif mengenai pendidikan Islam di Kamboja. Validitas data akan diupayakan melalui triangulasi sumber dan metode, serta melalui diskusi dan refleksi mendalam selama proses penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai dinamika pendidikan Islam di Kamboja serta implikasinya terhadap komunitas Muslim di negara tersebut.

TEORI

Kajian mengenai pendidikan Islam di Kamboja ini akan menggunakan beberapa kerangka teoretis yang relevan untuk menganalisis kompleksitas isu yang ada. Pertama, **teori modernisasi pendidikan** akan digunakan untuk memahami bagaimana pendidikan Islam di Kamboja berinteraksi dengan sistem pendidikan nasional dan pengaruh globalisasi. Teori ini membantu mengidentifikasi upaya-upaya modernisasi dalam kurikulum, metode pengajaran, dan manajemen lembaga pendidikan Islam, serta tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi dan adaptasi terhadap standar pendidikan kontemporer.

Kedua, **teori identitas sosial** akan menjadi lensa penting dalam menganalisis peran pendidikan Islam dalam mempertahankan dan memperkuat identitas keislaman komunitas Muslim Cham di tengah konteks minoritas. Teori ini menyoroti bagaimana lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai ruang sosialisasi nilai-nilai agama dan budaya, serta bagaimana kurikulum dan praktik pendidikan berkontribusi pada pembentukan dan transmisi identitas generasi Muslim di Kamboja.

Pemahaman ini krusial mengingat sejarah panjang dan unik komunitas Cham di wilayah tersebut.

Ketiga, **teori ketergantungan** akan digunakan untuk mengkritisi ketergantungan pendidikan Islam di Kamboja pada bantuan dan dukungan dari negara-negara Muslim lainnya. Teori ini membantu menganalisis implikasi dari ketergantungan ini terhadap otonomi kurikulum, keberlanjutan finansial, dan potensi masuknya pengaruh ideologi eksternal. Dengan memahami dinamika ketergantungan, kajian ini dapat mengidentifikasi strategi untuk membangun kemandirian dan keberlanjutan sistem pendidikan Islam di Kamboja.

Keempat, **teori keadilan sosial dan kesetaraan pendidikan** akan diterapkan untuk mengevaluasi akses dan kualitas pendidikan Islam di Kamboja, terutama dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok marginal dalam komunitas Muslim. Teori ini menyoroti pentingnya memastikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak Muslim tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi atau geografis. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi disparitas yang ada dan merekomendasikan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Terakhir, **teori perubahan sosial** akan digunakan untuk memahami bagaimana pendidikan Islam di Kamboja berkontribusi terhadap perubahan sosial dalam komunitas Muslim dan dalam interaksinya dengan masyarakat Kamboja yang lebih luas. Teori ini memungkinkan analisis tentang bagaimana pendidikan dapat memberdayakan individu dan komunitas, meningkatkan mobilitas sosial, serta membangun pemahaman dan koeksistensi yang lebih baik antar kelompok agama dan etnis. Dengan menggunakan kelima kerangka teoretis ini secara komplementer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam dan holistik mengenai pendidikan Islam di Kamboja.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Pendidikan islam Pada Negara Kamboja

Islam pertama kali masuk ke Kamboja pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan hubungan antara wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah. Pendidikan Islam di Kamboja awalnya dipengaruhi oleh tradisi Islam di wilayah Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Indonesia. Pendidikan Islam di Kamboja

memiliki akar yang cukup tua, yang terkait erat dengan kedatangan Islam melalui pedagang Muslim, khususnya dari Arab, India, dan wilayah Melayu, sekitar abad ke-12 hingga ke-14. Komunitas Muslim di Kamboja sebagian besar berasal dari etnis Champa (Kaum Cham), yang melarikan diri dari Vietnam setelah jatuhnya Kerajaan Champa. Mereka membawa serta ajaran Islam dan tradisi pendidikan ke wilayah Kamboja.[243]

Pada masa awal, pendidikan Islam dijalankan secara informal di masjid-masjid dan surau, dengan fokus utama pada pengajaran Al-Qur'an, fikih, dan bahasa Arab. Guru-guru agama (ustaz) lokal memainkan peran penting dalam mentransmisikan ilmu agama kepada generasi muda. Pendidikan ini bersifat tradisional dan tidak terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional.

Pada masa Khmer Rouge, pendidikan Islam di Kamboja mengalami kemunduran yang signifikan. Banyak sekolah-sekolah Islam yang dihancurkan, dan tenaga pendidik yang berkualitas dipenjara atau dibunuh. Perkembangan pendidikan Islam mengalami tantangan berat selama rezim Khmer Merah (1975–1979), yang melarang praktik keagamaan dan menghancurkan banyak institusi keagamaan, termasuk masjid dan sekolah Islam. Setelah jatuhnya Khmer Merah, umat Islam mulai membangun kembali sistem pendidikan mereka. Pada era 1980-an dan 1990-an, bantuan dari negara-negara Muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Turki membantu mendirikan kembali sekolah-sekolah Islam, termasuk madrasah dan pesantren.[244]

Dengan demikian, pendidikan Islam di Kamboja memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dengan perkembangan yang signifikan pada masa modern. Saat ini, pendidikan Islam di Kamboja dijalankan dalam dua bentuk: madrasah tradisional yang diawasi oleh komunitas Muslim lokal dan lembaga pendidikan modern yang mendapat dukungan dari luar negeri. Meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan dukungan pemerintah yang minim, pendidikan Islam di Kamboja terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas keislaman komunitas Muslim Cham.

---

[243] Omar, A. R. C. *Islamic Revivalism in Cambodia: The Role of the Cham Muslim Minority.* (Journal of Islamic Studies, 2013), 24(3), 231

[244] John Tully,*Op.Cit*. hlm. 189.

B. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Negara Kamboja

Pendidikan Islam di Kamboja memiliki dinamika yang khas, dipengaruhi oleh sejarah politik, sosial, dan keagamaan negara tersebut. Komunitas Muslim di Kamboja, yang mayoritas berasal dari etnis Cham, telah mengalami pasang surut dalam menjalankan pendidikan Islam, terutama pada masa rezim Khmer Merah (1975–1979), ketika segala bentuk praktik keagamaan dilarang secara brutal.[245]

Setelah jatuhnya Khmer Merah, pemerintah Kamboja mulai membuka ruang bagi kebebasan beragama. Dalam konteks ini, pendidikan Islam mengalami kebangkitan. Pemerintah memberikan kebebasan kepada komunitas Muslim untuk mengelola madrasah dan pondok pesantren secara mandiri, meskipun tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional secara resmi.

Pemerintah Kamboja secara resmi mengakui kebebasan beragama melalui konstitusinya. Hal ini memberikan landasan hukum bagi umat Islam untuk menjalankan pendidikan agama mereka. Beberapa kebijakan yang memengaruhi pendidikan Islam antara lain:[246]

a. Integrasi Kurikulum Nasional: Sekolah-sekolah Islam (madrasah) diharuskan mengajarkan mata pelajaran umum seperti Bahasa Khmer, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan sesuai dengan standar nasional. Mata pelajaran keagamaan seperti Al-Qur'an, Fiqh, dan Bahasa Arab diajarkan sebagai tambahan.
b. Pengakuan Sekolah Agama Non-Formal: Selain sekolah formal, banyak pendidikan Islam diselenggarakan secara non-formal, seperti halaqah dan pengajian di masjid. Pemerintah memberikan toleransi terhadap aktivitas ini selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.
c. Kerja Sama Internasional: Pemerintah Kamboja membuka kerja sama dengan negara-negara Muslim seperti Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dan Mesir dalam pengembangan pendidikan Islam. Banyak pelajar Muslim Kamboja menerima beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri.

---

[245] Heuveline, P. *Op.Cit*. 55(3), 381–394.

[246] Ysa Osman, *OUKOUBAH Justice For the Cham Muslim Under the Demokratic Kampuchea,* (Phnom Penh: Document Center of Cambodia, 2002), hlm.6

d. Peran Kementerian Agama: Kementerian Cults and Religion (Kementerian Agama) memantau dan mengatur keberadaan institusi keagamaan, termasuk madrasah, namun tidak terlalu mengintervensi kurikulum agama yang diajarkan selama mengikuti peraturan umum negara.

Kebijakan pendidikan Islam tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun konstitusi Kamboja menjamin kebebasan beragama, termasuk hak untuk mendirikan lembaga pendidikan agama.[247] Hal ini memungkinkan masyarakat Muslim membentuk institusi seperti madrasah dan sekolah informal yang mengajarkan Al-Qur'an, fikih, dan bahasa Arab.

Organisasi seperti *High Council for Islamic Religious Affairs of Cambodia* (HCIRAC) memainkan peran penting dalam pengelolaan pendidikan Islam. HCIRAC bekerja sama dengan negara-negara Muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Turki dalam menyediakan beasiswa, pelatihan guru, dan bantuan pembangunan sekolah-sekolah Islam.[248]

Pendidikan Islam di Kamboja berkembang dalam konteks minoritas Muslim, yang mayoritas berasal dari komunitas etnis Cham. Pemerintah Kamboja secara umum memberikan ruang kebebasan beragama, termasuk dalam hal pendidikan, namun terdapat keterbatasan struktural dan pendanaan bagi pendidikan Islam.

Pemerintah Kamboja mengakui keberadaan sekolah-sekolah Islam, termasuk madrasah dan pesantren yang dikelola oleh komunitas Muslim. Pendidikan agama diberikan secara swadaya oleh komunitas Cham, yang tinggal terutama di wilayah seperti Kampong Cham, Kampong Chhnang, dan Phnom Penh. Meskipun bukan bagian dari kurikulum nasional, pendidikan Islam diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara.[249]

Sebagian besar sekolah Islam di Kamboja didukung oleh organisasi luar negeri, terutama dari negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, Malaysia, dan Indonesia. Bantuan ini mencakup

---

[247] *Ibid.,* hlm. 7

[248] Sa'id, A. *Islamic Education in Southeast Asia: A Comparative Study.* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia Press. 2017) hal. 35

[249] Omar, A. R. C. *Islamic Revivalism in Cambodia: The Role of the Cham Muslim Minority.* (Journal of Islamic Studies. 2013) 24(3), 323.

pembangunan sekolah, pelatihan guru, serta penyediaan kitab-kitab Islam dan Al-Qur'an.

Sekolah Islam di Kamboja biasanya menggabungkan pelajaran agama Islam dengan pelajaran umum. Kurikulum agama mencakup fiqih, aqidah, akhlak, serta pembelajaran bahasa Arab dan Al-Qur'an. Namun, karena belum ada standarisasi nasional untuk pendidikan Islam, kurikulumnya cenderung bervariasi antar lembaga[250]

Namun, tantangan tetap ada. Pendidikan Islam di Kamboja sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kurikulum yang belum terstandarisasi, serta integrasi yang rendah dengan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, meskipun ada dukungan moral dan politis dari pemerintah, kualitas dan akses pendidikan Islam masih perlu ditingkatkan.

C. Tantangan Kebijakan Pendidikan Islam di Kamboja

Pendidikan Islam di Kamboja, meskipun telah mengalami perkembangan sejak era pasca-Khmer Merah, masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan utama dalam kebijakan pendidikan Islam di negara ini antara lain:[251]

a. Kurangnya Dukungan dan Pengakuan Formal dari Pemerintah

   Meskipun pemerintah Kamboja memperbolehkan pendidikan Islam, tidak ada dukungan sistematis dari negara dalam bentuk anggaran atau integrasi kurikulum ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menyebabkan lembaga pendidikan Islam berkembang secara otonom dan informal.

b. Minimnya Tenaga Pendidik Berkualifikasi

   Kualitas tenaga pendidik Islam di Kamboja masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kompetensi dan profesionalisme. Sebagian besar guru di sekolah Islam di Kamboja tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang memadai. Banyak dari mereka hanya lulusan pesantren lokal atau alumni dari negara lain tanpa sertifikasi yang diakui secara nasional. Ini berdampak pada kualitas pembelajaran dan kurangnya standardisasi.

---

[250] Osman, M. N. M. *Reviving Islamic Identity in Cambodia: The Role of Education and NGOs*. (Kyoto Review of Southeast Asia 2010), Issue 11.

[251] Hasan, M. *Minority Muslims in Cambodia: Identity and Education*. (Journal of Muslim Minority Affairs .2016), 36(4), 524–537.

c. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur

Banyak sekolah-sekolah Islam di Kamboja yang masih kekurangan infrastruktur yang memadai, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Sebagian besar madrasah dan sekolah Islam berada di daerah pedesaan dengan fasilitas yang sangat minim. Keterbatasan ini mencakup ruang belajar, bahan ajar, serta akses terhadap teknologi dan sumber daya pembelajaran modern.

d. Ketergantungan pada Donatur Asing

Pendidikan Islam di Kamboja sebagian besar bergantung pada bantuan luar negeri, terutama dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Ketergantungan ini membuat lembaga-lembaga pendidikan rentan terhadap perubahan kebijakan luar negeri dan potensi infiltrasi ideologi tertentu.

e. Stigma dan Diskriminasi Sosial

Komunitas Muslim Cham sering kali mengalami diskriminasi sosial dan ekonomi. Hal ini berdampak pada terbatasnya kesempatan anak-anak Muslim untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, serta memperkuat marginalisasi pendidikan Islam dalam sistem nasional.

D. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan Islam di Kamboja

Pemerintah Kamboja sangat mendukung pendidikan Islam dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung madrasah dan memberikan gaji kepada guru agama Islam. Perdana Menteri Hun Sen juga secara rutin mengunjungi masjid dan pemukiman Muslim untuk memberikan bantuan dan silaturahmi.[252]

Pendidikan Islam di Kamboja menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitasnya. Faktor-faktor tersebut antara lain:[253]

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurangnya guru yang terlatih dan berkualifikasi dalam bidang studi Islam maupun umum menjadi kendala utama. Banyak guru belum memiliki pelatihan pedagogi modern.

---

[252] *Ibid.,* hlm. 18

[253] Yusof, Muhammad Asri. *Islamic Education in Cambodia: Opportunities and Challenges.* (Journal of Islamic Educational Research, 2020.)

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Terdapat sekitar 1.200 sampai 1.500 madrasah tsanawiyah dan surau (madrasah ibtidaiyah) di seluruh Kamboja, serta pembangunan gedung madrasah yang permanen oleh pemerintah. Banyak madrasah atau sekolah Islam beroperasi dengan fasilitas terbatas, seperti ruang kelas yang tidak layak, kekurangan buku ajar, dan tidak adanya laboratorium atau perpustakaan.

c. Ketiadaan Standarisasi Kurikulum Nasional Islam

Tidak adanya kurikulum Islam nasional dari pemerintah Kamboja membuat lembaga pendidikan Islam menggunakan kurikulum yang berbeda-beda, sering kali mengacu pada kurikulum dari luar negeri, yang tidak selalu sesuai dengan konteks lokal.

d. Dukungan Pemerintah yang Terbatas

Pemerintah Kamboja belum memberikan dukungan optimal kepada lembaga pendidikan Islam, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun pengakuan formal.

e. Kondisi Sosial dan Ekonomi Komunitas Muslim

Sebagian besar Muslim di Kamboja hidup dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, yang berdampak pada kemampuan membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama untuk pendidikan keagamaan tambahan.

f. Diskriminasi dan Integrasi Sosial

Meskipun hubungan antaretnis cukup damai, masih ada stigma terhadap komunitas Muslim yang mempengaruhi akses mereka ke pendidikan berkualitas.

E. Pendidikan dan Pengajaran Islam di Kamboja

Pendidikan dan pengajaran Islam berlangsung demgan baik Saat ini di seluruh Kamboja ada 1200 sampai 1500 Madrasah Tsanawiyah dan surau (madrasah Ibtidaiyah) selain yang diselenggarakan oleh pribadi dan keluarga tertentu di rumah rumah. Masyarakat giat mengembangkan pendidikan bagi masyarakat muslim Kamboja pendidikan adalah kunci kemajuan dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Banyak juga lembaga swadaya masyarakat dari berbagai negara seperti Malaysia, uni Emirat Arab, Islamic Development Bank, Liga Muslim Dunia (Rabithah Alam Islamiy(serta sejumlah organiassi di Saudi Atabia dan Kuwait

memberikan bantuan pendanaan dan bantuan langsung membina dan membangun pendidikan Islam di Kamboja. Pemerintahan juga menaruh perhatian yang kuat terhadap eksistensi Pendidikan Islam. Perdana Menteri Hunsen juga mengalokasikan anggaran serta memberikan bantuan pembangunan gedung Madrasah Tsanawiyah yang permanent sampai tahun 2019 sudah dibangun diberbagai distrik dari 24 Provinsi yang ada Pemerintah juga mengangkat 1500 guru agama Islam yang mengajar di Madrasah dan surau dan yang mengajar diberbagai tempat diberi gaji perbulan Saat ini ada 1500 guru agama Islam diberikan gaji antara 200 s/d 250 dolar perbulan dan hal itu sudah berlangsung sejak tahun 2005. Honor atau gaji juga diberikan untuk Imam dan Katib.[254]

Dalam masyarakat Islam kamboja sudah menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan untuk belajar agama Islam terutama membaca Al-Qur an baik dalam keadaan seperti apapun Siapa saja yang dapat membaca tulisan Arab maksudnya Al-Qur an bisa menjadi guru untuk yang lainnya mengajar di rumah ataupun di surau. Demikian tutur Rasyid salah seorang muslim Kamboja yang mendampingi perjalanan kami ke Seam Reap. Menurut Rasyid sejak tahun 2005 Gerakan Islam Kebangsaan untuk Demokrasi Kamboja telah berusaha menerjemahkan Al-Qur an ke dalam Bahasa Khmer . Saat ini sudah ada yang diterbitkan. Al-Qur an dengan terjemahan bahasa Khmer itu sudah disebar keberbagai Mesjid dan Madrasah, surau dan juga Musalla di distrik distrik domisili masyarakat Islam.(Rasyed; 2019)

Para guru madrasah di Kamboja umumnya berlatar belakang pendidikan Timur Tengah baik dari Al Azhar Qairo, Madinah, Ummul Qura dan juga Libya, kemudian guru tamatan berbagai universtas di Indonesia (UIN,IPB, ITB dan Universitas Bengkulu) dan Universitas di Malaysia dan banyak juga yang berlatar belakang pendidikan Pesanteren di Pulau Jawa, Terdapat hubungan kerjasama dengan beberapa pesanteren dan Universitas Islam di Indonesia seperti IAIN Sumatera Barat, Syarif Hidayatullah dan IAIN Sunan

[254]Deputy Mufti Cambodian's Moelem, *Mufti Cambodian Function andActivties in Delegating Multaqa of Ulama Asean MUI North Of Sumatera Indonesia with Mufti Moeslem Cambodia Meeting Phenompenh,* (Chrang Chomres Mufti Cambodian Office, 2019) hlm.6

Kalijaga yang sekarang telah menjadi universitas Islam Negeri serta universitas lainnya di Indonesia dan Malaysia serta Timur Tengah.[255]

Kurikulum pendidikan Islam di Kamboja tampaknya belum terorganisasi secara baik. Belum ada kurikulum yang baku yang seragam dipakai diseluruh madrasah. Setiap madrasah mengembangkan pengajaran berbeda beda, Tergantung pada pengelola dan guru yang mengajar. Jika pengelola dan guru merupakan alumni Madrasah di Malaysia mereka mengambil dari kurikulum Malaysia dari tingkat taman kanak-kanak atau disebut TADIKA sampai kejenjang Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Demikian juga tidak kurang madrasah yang mengambil pola pondok pesanteren dan juga kurikulum nya karena para pengelala dan guru berasal dari pesanteren di Indonesia. Jika pengelola dan para guru tamatan Timur Tengah maka kuurikulum yang dikembangkan mengacu ke negara tempat mereka menuntut ilmu. Sampai saat ini belum dibuka pendidikan Madrasah untuk tingkat Madrasah Aliyah berdasarkan keterangan wakil Mufti Kambodia baru akan dirintis pelaksanaan mulai tahun ini dan insya Allah tahun depan telah mulai menerima siswa. Selama ini untuk melanjutkan ketingkat Aliyah dan perguruan Tinggi muslim Kamboja mengirim putera puterinya belajar ke Malaysia, Pesanteren dan Universitas di Indonesia dan Timur Tengah terutama ke Mesir. Meskipun tidak ada kurikulum yang seragam tetapi hampir semua madrasah mengajarkan juga ilmu sain disamping pelajaran agama. Muslim Cham saat ini memiliki lembaga pendidikan setingkat madrasah Tsanawiyah tetapi mengkhususkan penguasaan Al-Qur an yang mereka sebut Markaz Tahfiz.[256]

Negara Timur Tengah seperri Uni Emirat Arab, Saudi Arabia dan juga negara Islam lainnya seperti Malaysia banyak memberikan bantuan bangunan gedung dan pelatihan para guru untuk madrasah di Kamboja. Beberapa tokoh Islam Malaysia ada juga yang mendirikan Madrasah Internasional seperti Madrasah International Al Ikhsan dan Madrasah Internasional al Rahman di Phnompenh. Beberapa di distrik lainnya seperti Moimot Di Provinsi kampong

[255]Abduh Lubis, *Teachers and lecturers of Madrasah and Ma'had in Cambodia Educational Back Ground, a Talking with especialy secretary of Repblic Indonesia embasy in Cambodia Phenompenh,* (Chrang Chomres Veranda Mufti Cambodian Office, 2019), hlm. 8

[256] Deputy Mufti Cambodian's Moelem*, Op.cit.,* hlm. 7

Cam banyak relawan muslim manca negara membantu pembangunan masjid dan madrasah . Kegiatan pendidikan dan dakwah umumnya banyak diselenggarakan oleh NGO atau lembaga swadaya masyarakat. LSM bekerja sama dengan LSM negara lain untuk mendirikan lembaga pendidikan dan mendanai kegiatan serta memberikan bea siswa.[257]

Dari Indonesia ada juga relawan yang memberi wakaf membangun sumber air bersih dan juga pembangunan madrasah di Kampong Cham. Pemberdayaan ekonomi ummat banyak juga ditangani oleh lembaga Swadaya masyarakat tersebut.(Rasyid; 2019)

Kerajaan melalui pemerintah Perdana menteri Hunsen menaruh perhatian yang besar pada pendidikan dan pengajaran serta kehidupan beragama umat Islam Kambodia. Pemerintah juga memfasillitasi berdirinya Mesjid dan membangun gedung untuk madrasah Tsanawiyah satu diantaranya bersebelahan dengan masjid agung Asral kota Phnompenh. Menurut keterangan ada beberapa gedung yang sama dibangun Hunsen dibeberapa distrik seperti di Kampong Cham, Baitambang, Seim Reap. dan beberapa distrik lainnya.

Pendidikan agama non formal dalam bentuk ceramah dan juga khutbah Jum at di Mesjid disampaikan dalam Bahasa Khemer. Namun Bahasa pengantar di Madrasah adalah Bahasa melayu dan Bahasa Arab. Dewasa ini ada lebih kurang 1600 Madrasah dan Surau serta 1590 Mesjid dan Mushala.[258]

Pendidikan di Madrasah sebahagian besar boarding school, siswa mondok di asrama putera dan yang puteri diasrama puteri yang telah disediakan. Kebanyakan madrasah baru di Kamboja mengambil konsep Pesanteren di Indonesia. Namun bila ditanya tentang data guru, kemudian jumlah siswa dan jumlah madrasah yang boarding school itu atau jika tidak mengetahui jumlah, diminta dapat menjelaskan dimana saja lokasinya yang mereka ketahui maka tidak ada penjelasan yang konkrit.

Jika dicermati keterangan yang diperoleh penulis dari beberapa tokoh seperti dari wakil mufti Kamboja Sos Kamry dan beberapa

[257] Halim Soufi, *Mushalla Al A'la ,islamic centre for Moeslem Boating Interviewer fachruddin Azmi,* (Phenompenh: 2019). Hlm 8

[258] Syukri Musa, *Moelem Tuktuk Cambodia Interviewer Fachruddin Azmi,* (Phenompenh ;2019). Hlm 11

guru yang berkhidmat di Madrasah dan beberapa orang aktivis Muslim Campa yang yang menyertai perjalanan penulis berserts rombongan di Kambodia sdr. Halim Sufi, Salim, Syukri Musa dan Rasyid bahwa para orang tua Muslim champa sangat mengutamakan pendidikan agama Islam bagi anak anak mereka dan membiasakan putera puteri mereka untuk belajar agama dan mengetahui tentang Islam walau masalah sekecilnya di rumah masing masing dari orang tua. Bagi muslim Cham agama adalah diatas segala galanya. Tetapi bila penulis menanyakan bagaimana susunan masyakat muslim cham apakah ada pemimpin atau ulama yang mengurus keagamaan di tiap daerah mulai dari desa, kecamatan atau kabupaten seperti di Indonesia tampaknya mereka tidak dapat atau enggan menjelaskan. Kelihatannya ada keraguan dan trauma masa lalu yang kental dikalangan muslim Cham untuk terbuka mengenai siapa saja ulama mereka dan bagaimana struktur masyarakat mereka.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Kamboja berkembang dalam konteks komunitas minoritas Muslim, khususnya etnis Cham, dengan tantangan struktural dan sosial yang kompleks. Hingga kini, belum terdapat kebijakan nasional yang secara khusus mengatur pendidikan Islam secara formal. Lembaga pendidikan Islam mayoritas dikelola secara swadaya oleh komunitas Muslim, dengan dukungan terbatas dari pemerintah maupun pihak luar negeri.

Ketiadaan kurikulum nasional, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta rendahnya pengakuan formal dari negara, menjadi kendala utama dalam peningkatan mutu pendidikan Islam. Namun, peluang perbaikan tetap terbuka melalui kerja sama internasional, penguatan peran komunitas lokal, dan advokasi terhadap pemerintah untuk kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi pendidikan keagamaan.

Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang berpihak pada pluralisme dan pengakuan terhadap kontribusi pendidikan Islam dalam membangun moralitas, integrasi sosial, dan partisipasi warga Muslim dalam pembangunan nasional Kamboja.

DAPTAR PUSTAKA

Abduh Lubis (2019) *Teachers and lecturers of Madrasah and Ma'had in Cambodia Educational Back Ground, a Talking with especialy secretary of Repblic Indonesia embasy in Cambodia Phenompenh,* (Chrang Chomres Veranda Mufti Cambodian Office)

Deputy Mufti Cambodian's Moelem,(2019) *Mufti Cambodian Function andActivties in Delegating Multaqa of Ulama Asean MUI North Of Sumatera Indonesia with Mufti Moeslem Cambodia Meeting Phenompenh,* (Chrang Chomres Mufti Cambodian Office)

Halim Soufi, (2019) *Mushalla Al A'la ,islamic centre for Moeslem Boating Interviewer fachruddin Azmi,* (Phenompenh)

Hasan, M. (2016). *Minority Muslims in Cambodia: Identity and Education*. Journal of Muslim Minority Affairs, 36(4), 524–537

Heuveline, P.(2001) . "*The Demographic Analysis of Mortality Crises: The Case of Cambodia*." (Population Studies), 55(3), 381–394.

John Tully, (2005), *A Short History of Cambodia: From Empire to Survival,* (Australia: Allen & Unwin)

Omar, A. R. C.(2013) *Islamic Revivalism in Cambodia: The Role of the Cham Muslim Minority.* Journal of Islamic Studies. 24(3), 323.

Osman, M. N. M.(2010). *Reviving Islamic Identity in Cambodia: The Role of Education and NGOs*. Kyoto Review of Southeast Asia, Issue 11.

Ramlan Surbakti dkk, (1990), *Kampuchea Tahun 1975-1979*, (UNAIR: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Sa'id, A.(2017) *Islamic Education in Southeast Asia: A Comparative Study.* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia Press.)

Syukri Musa, (2019) *Moelem Tuktuk Cambodia Interviewer Fachruddin Azmi*, (Phenompenh)

Ysa Osman,(2002) *OUKOUBAH Justice For the Cham Muslim Under the Demokratic Kampuchea,* (Phnom Penh: Document Center of Cambodia).

Yusof, Muhammad Asri (2020). *Islamic Education in Cambodia: Opportunities and Challenges.* Journal of Islamic Educational Research.

BAB 14
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA BENUA AUSTRALIA
(Devi Rahma Yanti 2220203040)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Australia merupakan bagian dari dinamika multikultural dan multireligius yang berkembang di negara tersebut. Sebagai negara dengan sistem demokrasi liberal, Australia memberikan ruang kebebasan beragama, termasuk dalam hal pendidikan berbasis agama. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah umat Islam di Australia mengalami peningkatan, yang turut mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik dalam bentuk sekolah formal maupun institusi nonformal seperti madrasah dan pusat studi Islam. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal kebijakan pemerintah yang harus menyeimbangkan antara prinsip sekularisme dan hak masyarakat Muslim untuk menjalankan pendidikan sesuai keyakinan mereka.

Kebijakan pendidikan Islam di Australia cenderung diwarnai oleh pendekatan pragmatis yang mempertimbangkan integrasi sosial, keamanan nasional, serta keragaman budaya. Pemerintah federal dan negara bagian memiliki peran dalam menentukan kurikulum, akreditasi sekolah, dan pemberian dana operasional. Sementara itu, sekolah-sekolah Islam diharuskan mengikuti standar pendidikan nasional sembari tetap diberikan ruang untuk mengajarkan nilai-nilai keislaman. Ketegangan kerap muncul ketika terjadi perbedaan antara nilai-nilai keagamaan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat umum, seperti dalam isu gender, seksualitas, dan moderasi beragama. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam di Australia harus dilihat dalam kerangka hubungan yang kompleks antara agama, negara, dan Masyarakat.[259]

[259] Velida Apria Ningrum and Nur Afina Ulya, 'Dinamika Multikulturalisme Muslim Di Australia', *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 12.2 (2024).

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Awal Mula Masuknya Islam Ke Australia?
b. Bagaimana Kebijakan Pendidikan Islam di Benua Australia?
c. Bagaimana Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Di Benua Australia?
d. Apa Tantangan dan Peluang Yang Dihadapi Sekolah-Sekolah Islam di Australia Dalam Mempertahankan Identitas Islam?
e. Apa Perbedaan Kebijakan Pendidikan Islam Di Berbagai Negara Bagian Australia?
f. Bagaimana Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Australia?
g. Apa Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Komunitas Muslim Di Benua Australia?

C. Metodologi

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari sumber sekunder berupa literatur akademik, dokumen kebijakan pemerintah Australia, laporan pendidikan, dan sumber terkait lainnya yang membahas sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Australia. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menginterpretasikan kebijakan pendidikan Islam, peran komunitas Muslim, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan pendidikan Islam di Australia berdasarkan kajian historis dan sosial-politik yang relevan.

TEORI

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari upaya pembentukan identitas dan pemeliharaan nilai-nilai keagamaan dalam komunitas Muslim. Dalam konteks kebijakan pendidikan, teori multikulturalisme menjadi sangat relevan karena menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama dalam sistem pendidikan nasional. Multikulturalisme mendorong pemerintah untuk merancang kebijakan yang inklusif, yang memungkinkan komunitas Muslim di Australia mengakses pendidikan Islam secara formal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip sekularisme yang dianut oleh negara. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam

di Australia perlu dilihat sebagai hasil negosiasi antara kebutuhan komunitas Muslim untuk mempertahankan identitas keagamaan dan tuntutan negara untuk menjaga kesetaraan dan integrasi sosial.

Selain itu, teori integrasi sosial juga menjadi landasan penting dalam memahami kebijakan pendidikan Islam di Australia. Teori ini menjelaskan bagaimana kelompok minoritas, seperti komunitas Muslim, berusaha berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat luas tanpa kehilangan identitas budaya dan agamanya. Pendidikan Islam di Australia tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu agama, tetapi juga sebagai medium untuk membangun jembatan antara komunitas Muslim dengan masyarakat mayoritas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan antara pelestarian nilai-nilai Islam dan penguatan kohesi sosial nasional, sehingga pendidikan Islam dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang harmonis dan inklusif di Australia.[260]

PEMBAHASAN

A. Awal Mula Masuknya Islam Ke Australia

Masuknya Islam ke Australia bermula pada abad ke-17 ketika para nelayan dan pelaut dari Makassar, Sulawesi, Indonesia, datang ke pesisir utara Australia, khususnya wilayah Arnhemland, untuk mencari teripang yang kemudian mereka perdagangkan ke pasar Cina. Para pelaut Makassar ini sebagian besar beragama Islam dan melalui interaksi mereka dengan suku Aborigin, terjadi pengaruh spiritual Islam di kalangan masyarakat asli Australia utara.

Pada tahun 1700-an, Islam masuk ke Australia. Pada saat itu, para nelayan dari Makassar berlayar ke pantai utara untuk menangkap teripang, yang terkenal dengan kelezatannya, dan sangat laku di pasar Cina. Perdagangan ini dapat dilihat di gua-gua lokal di sekitar rumah-rumah suku Aborigin di pesisir barat dan utara Australia. Selain itu, pada tahun 1860 Australia memiliki penunggang unta dari Afghanistan yang ditugaskan untuk mengatur unta, karena unta sangat mudah beradaptasi di gurun sehingga seorang pedagang bernama Horrick mengimpor 24 ekor unta. Hal ini menyebabkan antara 10.000 dan 12.000 orang dari Afghanistan datang ke Australia. Kedatangan para imigran ini berdampak besar

[260] Sholeh Dimyathi, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti* (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018).

pada pembangunan. Mereka membantu membangun jaringan kereta api antara *Alice Springs* dan *Port Augusta*, yang sekarang disebut Ghan, yang terus berkembang hingga tahun 2004 hingga ke Darwin. Mereka juga membantu membangun jalur telegrafi darat antara Adelaide dan Darwin pada tahun 1870-1872. Kehidupan para imigran meningkat dan mereka menikah dengan penduduk asli. [261]

Setelah itu, pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Islam masuk kembali ke Australia melalui kedatangan para penunggang unta dari Afghanistan dan Pakistan. Mereka diimpor oleh pemerintah Inggris untuk membantu proyek pembangunan jalur kereta dan pengangkutan barang di daerah gurun Australia yang sulit dijangkau. Para penunggang unta ini, yang dikenal sebagai "Camellers," menetap cukup lama di Australia dan mendirikan masjid pertama di negara tersebut pada tahun 1861 di kota Marree, Australia.[262]

Selain itu, gelombang imigran Muslim dari berbagai negara seperti Turki, Albania, Bosnia, Lebanon, Malaysia, dan Pakistan juga mulai berdatangan ke Australia pada abad ke-19 dan ke-20. Mereka membawa serta tradisi dan budaya Islam yang semakin memperkaya keberagaman komunitas Muslim di Australia. Perkembangan ini berlanjut hingga masa modern, di mana Islam menjadi bagian dari kehidupan multikultural Australia meskipun umat Muslim masih merupakan minoritas sekitar 3% dari total populasi. Secara keseluruhan, sejarah masuknya Islam ke Australia dapat dibagi menjadi tiga gelombang utama: pertama, kedatangan nelayan Makassar pada abad ke-17; kedua, kedatangan penunggang unta dari Afghanistan dan Pakistan pada abad ke-19; dan ketiga, imigrasi Muslim dari berbagai negara pada abad ke-19 dan ke-20. Proses ini membentuk komunitas Muslim yang beragam dan berkontribusi pada kehidupan sosial dan budaya Australia saat ini.[263]

---

[261] Muhammad Arif Wicaksono and Eko Ribawati, 'Peran Islam Dalam Perkembangan Masyarakat Multikultural Di Australia', *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2.4 (2024), pp. 119–24.

[262] Siti Ambiah and Dedeh Nur Hamidah, 'Peran Komunitas Muslim Australia Dalam Perkembangan Islam Di Australia Abad 20 M', *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 7.1 (2019).

[263] H.M. Dahlan M, 'ISLAM DI AUSTRALIA (Tinjauan Historis Dan Perkembangan)', *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XXI.1 (2019), pp. 155–66.

B. Kebijakan Pendidikan Islam di Benua Australia

Pemerintahan Negara Bagian dan Teritori Australia memegang peranan penting dalam hal manajemen dan administrasi pendidikan sektor sekolah, Setiap Negara Bagian dan Teritori mempunyai hukum dan peraturan peraturan terkait mengenai kurikulum, akreditasi program studi, ujian bagi siswa dan penghargaan bagi siswa. Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undangu-ndang yang membentuk departemen pendidikan negara bagian, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan menjelaskan terkait pengembangan antara pelayanan kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat melalui sistem pendidikan. Kurikulum Australia terdiri dari 8 bidang pelajaran yaitu bahasa Inggris, matematika, ilmu pasti, olahraga dan program kesehatan, teknologi, ilmu Sosial, bahasa asing dan kesenian.[264] Berikut adalah kebijakan Pendidikan islam di benua Australia.

a. Penerapan Kurikulum Nasional Sekuler. Sekolah Islam di Australia wajib mengikuti kurikulum nasional yang bersifat sekuler, dengan tambahan pelajaran agama Islam sekitar 6 jam per minggu.
b. Pengakuan dan Dukungan Pemerintah terhadap Sekolah Islam Swasta. Pemerintah memberikan pengakuan dan bantuan finansial terbatas kepada sekolah Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan swasta.
c. Kebebasan Beragama dalam Pendidikan. Komunitas Muslim diberikan kebebasan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam di sekolah Islam, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kebijakan nasional.
d. Peninjauan Kurikulum untuk Menanamkan Nilai Toleransi dan Integrasi. Pemerintah meninjau dan mengawasi kurikulum di sekolah Islam untuk memastikan pengajaran nilai-nilai toleransi, tanggung jawab sosial, dan integrasi dalam masyarakat Australia.
e. Larangan Diskriminasi dan Perlindungan Hak Beragama. Kebijakan melarang diskriminasi agama di sekolah, termasuk perlindungan bagi siswa Muslim untuk mengenakan pakaian agama seperti jilbab, meskipun ada kontroversi terkait hal ini.

[264] Abdul Wahab Syakhrani and others, 'Sistem Pendidikan Di Negara Australia', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal*, 2.1 (2022), pp. 18–26.

f. Pengawasan dan Pencegahan Ekstremisme. Pemerintah menerapkan kebijakan pengawasan untuk mencegah penyebaran paham ekstremisme di lingkungan pendidikan Islam, terutama setelah insiden terorisme global.
g. Dukungan Pendidikan Bahasa dan Integrasi Sosial. Kebijakan mendukung program pendidikan bahasa Inggris dan integrasi sosial bagi pelajar Muslim imigran baru melalui lembaga pendidikan Islam dan komunitas.
h. Pengakuan Pendidikan Islam Nonformal. Pendidikan Islam nonformal seperti pengajian dan kajian agama diakui sebagai bagian dari penguatan identitas dan pemahaman agama di komunitas Muslim Australia.[265]

C. Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Di Benua Australia

Kebijakan pendidikan Islam di Australia berkembang dalam konteks negara yang sangat menghargai keberagaman budaya dan agama, serta menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Pemerintah Australia memberikan pedoman umum pendidikan, namun tidak mengatur secara khusus kurikulum pendidikan agama, sehingga pendidikan Islam dikelola oleh lembaga swasta yang memiliki kebebasan dalam pengembangan materi dan metode pengajaran.[266]

Perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Australia mengalami dinamika yang signifikan sejak awal berdirinya sekolah-sekolah Islam pada tahun 1970-an. ekolah-sekolah Islam mulai didirikan di Australia, seperti *Queensland Islamic Society di Brisbane dan Goulbourn College of Advanced Education*. Sekolah-sekolah ini tidak hanya mengajarkan pendidikan umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada pendidikan agama Islam, termasuk pengajaran shalat dan penguatan silaturahmi antar siswa Muslim dari berbagai latar belakang etnis[. Selain pendidikan formal, terdapat juga kegiatan pendidikan Islam nonformal melalui komunitas pengajian dan kajian keagamaan yang aktif, terutama pada bulan Ramadan. Sekolah-sekolah ini awalnya didirikan oleh komunitas Muslim imigran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan

[265] Sofianti Tri Lestari, 'Kebijakan Di Bidang Manajemen Pendidikan Formal Di Australia', *Jurnal Pendidikan Dan Administrasi*, 2024, p. 89.
[266] Syakhrani and others, 'Sistem Pendidikan Di Negara Australia'.

berbasis agama yang sesuai dengan ajaran Islam, namun tetap mengadopsi kurikulum nasional Australia. Pemerintah Australia memberikan kebebasan kepada mahasiswa Muslim di universitas untuk menjalankan ibadah, menyediakan ruang sholat, makanan halal, dan mendukung kelompok mahasiswa Islam, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan pendidikan dan sosial umat Islam di lingkungan akademik.

Pada tahun 2000-an, jumlah lembaga pendidikan Islam di Australia terus meningkat, khususnya di negara bagian New South Wales dan Victoria. Sekolah-sekolah Islam swasta ini mengintegrasikan pendidikan umum dengan tambahan pelajaran agama Islam sekitar enam jam per minggu. Meskipun demikian, pendidikan Islam di Australia lebih berperan sebagai pelengkap atau "corak" dalam sistem pendidikan sekuler yang dominan. Selain pendidikan formal, kegiatan nonformal seperti pengajian dan kajian keagamaan juga berkembang pesat di kalangan komunitas Muslim Australia.[267]

Seiring dengan meningkatnya populasi Muslim dan sekolah Islam, terutama di Victoria, terjadi pertumbuhan pesat sekolah Islam yang dianggap sebagai zona aman bagi anak-anak Muslim dari diskriminasi dan Islamofobia pasca peristiwa 9/11. Sekolah-sekolah ini tidak hanya mengajarkan kurikulum pemerintah tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dan identitas keagamaan yang kuat. Namun, sekolah Islam tetap menjadi bagian kecil dari sistem pendidikan nasional dan menghadapi pengawasan ketat dari pemerintah dan media terkait kurikulum dan aktivitas mereka. Pendidikan Islam di Australia berkembang seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim di negara tersebut, terutama sejak tahun 1970an ketika komunitas Muslim mulai mendirikan sekolah-sekolah Islam secara formal. Saat ini, terdapat lebih dari 30 sekolah Islam di seluruh Australia, dengan konsentrasi terbesar di negara bagian *New South Wales* (NSW) dan *Victoria.*

a. Di NSW, jumlah sekolah Islam meningkat tiga kali lipat dalam 15 tahun terakhir menjadi 22 sekolah, dengan populasi siswa naik hampir 200 persen menjadi lebih dari 10.000 siswa.

[267] Andi Fery and others, 'Pendidikan Islam Di Australia', *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 4.3 (2023), pp. 367–77.

b. Di Victoria, sekolah Islam merupakan lembaga pendidikan swasta dengan pertumbuhan tercepat, dengan peningkatan siswa dari 6.684 menjadi 12.318 antara 2010 dan 2018, jauh lebih cepat dibanding sekolah negeri dan Katolik.
c. Sekolah Islam di Australia umumnya mengikuti kurikulum pemerintah (seperti kurikulum Victoria) namun mengintegrasikan pelajaran studi Islam dan Alquran sebagai bagian penting dari pembelajaran.

Kebijakan pendidikan Islam di Australia menyesuaikan dengan sistem pendidikan nasional dengan integrasi nilai-nilai Islam yang kuat. Sekolah Islam berkembang pesat sebagai respons terhadap kebutuhan komunitas Muslim akan pendidikan yang aman dan sesuai dengan identitas keagamaan mereka. Pemerintah Australia mengawasi dan mengatur agar pendidikan Islam juga mengajarkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang berlaku di Australia, meskipun tantangan seperti Islamofobia dan kontroversi sosial masih ada.[268]

D. Tantangan dan Peluang Yang Dihadapi Sekolah-Sekolah Islam di Australia Dalam Mempertahankan Identitas Islam

Sekolah-sekolah Islam di Australia memainkan peran penting dalam membentuk identitas keagamaan dan budaya bagi komunitas Muslim di negara yang sangat pluralistik ini. Dalam menjalankan fungsinya, sekolah-sekolah tersebut tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, tetapi juga menjaga nilai-nilai Islam agar tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat yang mayoritas non-Muslim. Namun, dalam prosesnya, mereka menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari dinamika internal komunitas hingga tekanan eksternal dari lingkungan sosial dan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, terdapat pula peluang-peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan keberlanjutan sekolah Islam di Australia. Berikut ini adalah gambaran mengenai tantangan dan peluang utama yang dihadapi oleh sekolah-sekolah Islam dalam mempertahankan identitas Islam mereka.

[268] Ujang Sayuti dan Zulmuqim, 'Organisasi Islam Dan Peranannya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Australia', *Jurnal Of Management in Islamic Education*, Vol.4, No. (2023), pp. 367–77.

a. Tantangan
   1) Fragmentasi komunitas Muslim berdasarkan etnis menyebabkan kesulitan dalam membangun persatuan dan identitas Islam yang kohesif di sekolah-sekolah Islam.
   2) Tekanan dari pemerintah Australia untuk memasukkan nilai-nilai kemasyarakatan Australia seperti toleransi dan tanggung jawab ke dalam kurikulum, meskipun sekolah-sekolah Islam sudah mengajarkan hal serupa, menimbulkan kekhawatiran akan pengaruh sekularisasi terhadap pendidikan Islam.
   3) Isu manajemen internal, seperti konflik antara dewan sekolah dan guru atau kepala sekolah yang berujung pada pemecatan guru-guru Islam, dapat mengganggu stabilitas dan kualitas pendidikan Islam.
   4) Tantangan menjalankan praktik ibadah dan kegiatan keagamaan di lingkungan yang mayoritas non-Muslim, termasuk menghadapi ujian nasional yang bertepatan dengan bulan Ramadan yang mempengaruhi konsentrasi siswa Muslim.
   5) Pengaruh budaya asing dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya Australia yang lebih sekuler dan pluralistik, yang kadang membuat generasi muda Muslim sulit mempertahankan identitas keislaman yang kuat tanpa kehilangan rasa kebangsaan Australia.

b. Peluang
   1) Sistem sekolah Islam di Australia bersifat terbuka dan inklusif, dengan sebagian besar guru dan siswa bukan Muslim, yang memungkinkan dialog antaragama dan pemahaman lintas budaya yang positif.
   2) Kegiatan interfaith dan dialog antar siswa dari berbagai agama membantu membangun sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, sekaligus memperkuat pemahaman siswa Muslim tentang Islam secara rasional dan dialektis.
   3) Pertumbuhan jumlah sekolah Islam di Australia menunjukkan adanya peningkatan minat dan dukungan komunitas Muslim terhadap pendidikan Islam, yang membuka peluang untuk pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih adaptif.

4) Organisasi seperti Muhammadiyah aktif membina generasi muda dan berencana membuka sekolah Islam baru, yang dapat memperluas akses pendidikan Islam dan memperkuat jaringan komunitas Muslim di Australia.
5) Kebebasan beragama dan sistem demokrasi Australia memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan pendidikan dan dakwah secara legal dan terbuka, meskipun tetap harus menyesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat luas.[269]

E. Perbedaan Kebijakan Pendidikan Islam Di Berbagai Negara Bagian Australia

Perbedaan kebijakan pendidikan Islam di berbagai negara bagian Australia terutama dipengaruhi oleh sistem federal yang memberikan otonomi kepada masing-masing negara bagian dalam mengelola pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Setiap negara bagian di Australia memiliki kebebasan dalam mengelola sistem pendidikan, termasuk sekolah Islam. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam penerapan kebijakan pendidikan Islam, misalnya dalam hal pengelolaan sekolah, kurikulum tambahan, dan kegiatan keagamaan di sekolah.

Di negara bagian seperti New South Wales dan Victoria, terdapat konsentrasi lembaga pendidikan Islam yang lebih banyak dan berkembang pesat, sementara di negara bagian lain jumlah dan jenis lembaga pendidikan Islam bisa berbeda sesuai dengan populasi Muslim setempat. Beberapa negara bagian juga memiliki *Islamic Council* yang berfungsi mengatur kegiatan Islam secara regional, termasuk pendidikan Islam, yang menunjukkan adanya struktur organisasi yang berbeda antar negara bagian.[270]

Selain itu perbedaan kebijakan pendidikan Islam antar negara bagian Australia muncul karena:

a. Otonomi pengelolaan pendidikan di tingkat negara bagian.
b. Variasi populasi dan kebutuhan komunitas Muslim lokal.
c. Perbedaan pendekatan dalam integrasi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan sekuler.

---

[269] Said Muniruddin, *Islam Di Australia* (Syiah Kuala Uneversity Press, 2017).

[270] Saifullah Isri, 'Perbandingan Pendididkan Islam : Konsep Pendidikan Jerman Dan Australia', *Jurnal Pendidikan Islam*, IV.2301–9166 (2020), p. 25.

d. Struktur organisasi Islam yang berbeda-beda di tiap wilayah.

F. Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Australia

Populasi Islam di Australia cukup besar terdiri dari beberapa etnis dan negara yaitu Afganistan 15.965, Pakistan 13.821, Bangladesh 13.361, Irak 10.039, Indonesia 8.656. pada awalnya muslim Melayu datang sebagai penyelam mutiara dan sebagai buruh-kontrak di perkebunan tebu di Australia Barat. Menurut sensus koloni pada tahun 1871mencatat bahwa ada sekitar 149 orang Melayu yang bekerja di Australia sebagai penyelam mutiara di Australia. Imigran dari Malaysia ini selain bekerja sebagai penyelam mutiara di pedalaman laut, ada juga yang bekerja di pertambangan Australia Selatan, pertanian dan berkebun di ladang tebu di Queensland.

Dengan populasi yang begitu besar *Australian Federation of Islamic Council (AFIC)* dibentuk pada tahun 1976. AFIC merupakan bentuk organisasi Islam yang bertaraf nasional. Organisasi ini membawahi Dewan Islam yang dibentuk di tiap negara bagian Australia, dan setiap dewan terbentuk dari sejumlah perkumpulan Islam. Status mahasiswa asing Muslim yang sedang belajar di universitas-universitas Australia membentuk Federasi Asosiasi Mahasiswa Muslim Australia (AFMSA) yang mana federasi ini masuk ke dalam status sebagai salah satu dewan Islam. Hal ini dikarenakan mahasiswa Muslim ini dianggap istimewa dan sangat penting dalam perkembangan Islam itu Sendiri.[271] Tugas AFIC antara lain:

a. Menyelenggarakan prosesi pernikahan sesuai dengan cara islami, dengan mengambil tempat di Masjid atau Islamic Center.
b. Membentuk Islamic Council yang berkududukan di setiap teritori atau negara bagian yang bertugas untuk mengurus berbagai kegiatan Islam di wilayahnya.
c. Mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Australia dalam proses penyembelihan hewan-hewan yang dagingnya akan diekspor ke nagara-negara Islam.

[271] Muhammad Alli Kettani, *Minoritas Muslim Di Dunia Dewasa Ini* (PT Raja Grafindo, 2015).

d. Mengangkat imam-imam masjid yang berada di Australia. Imam-imam masjid yang diangkat oleh AFIC ini digaji oleh pemerintah Saudi Arabia.
e. Mengusahakan dana dari negara-negara Arab, terutama dari Saudi Arabia untuk pembangunan masjid-masjid dan Islamic Center.
f. Mengusahakan agar hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga, seperti perceraian, perkawinan, kuburan Islam, hari libur, dan hari-hari Islam diakui oleh pemerintah.[272]

G. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Komunitas Muslim Di Benua Australia

Kebijakan pendidikan Islam di Australia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap komunitas Muslim, terutama dalam mempertahankan identitas keagamaan dan budaya mereka. Sekolah-sekolah Islam menjadi tempat penting dalam menanamkan nilai-nilai Islam sekaligus menyediakan ruang aman bagi siswa Muslim untuk belajar tanpa merasa terdiskriminasi. Dalam konteks multikulturalisme Australia, kehadiran sekolah Islam menjadi bentuk adaptasi komunitas Muslim dalam mempertahankan tradisi sambil tetap mengikuti sistem pendidikan nasional.

Namun demikian, kebijakan pendidikan Islam juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi sosial. Beberapa pihak menilai bahwa keberadaan sekolah-sekolah berbasis agama dapat memperkuat segregasi, terutama jika kurikulumnya tidak disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan Australia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kurikulum agama dan kurikulum nasional agar siswa Muslim tidak merasa terasing dari masyarakat luas, melainkan mampu menjadi bagian aktif dari komunitas yang lebih besar.

Selain itu, peran pendidikan Islam di Australia juga membantu komunitas Muslim dalam menjawab tantangan kehidupan modern. Melalui pengajaran nilai-nilai moral dan etika Islam, siswa dibekali landasan yang kuat untuk menghadapi isu-isu sosial seperti krisis identitas, tekanan pergaulan, hingga radikalisme. Sekolah-sekolah Islam juga sering kali menjadi pusat kegiatan komunitas, memperkuat solidaritas internal dan memperluas jejaring sosial umat Islam di berbagai kota di Australia.

[272] Ambiah and Hamidah, 'Peran Komunitas Muslim Australia Dalam Perkembangan Islam Di Australia Abad 20 M'.

Meskipun ada dukungan terhadap pendidikan Islam, kebijakan pemerintah kadang menghadirkan ketegangan, terutama terkait dengan standar pendidikan, pengawasan, dan isu kebebasan beragama. Pemerintah Australia mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah berbasis agama, sementara komunitas Muslim menginginkan ruang otonomi dalam menjalankan nilai-nilai agama mereka. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam perlu dirancang secara inklusif agar mampu menjembatani kebutuhan komunitas Muslim dengan prinsip-prinsip nasional Australia.[273]

KESIMPULAN

sejarah masuknya Islam ke Australia dapat dibagi menjadi tiga gelombang utama: pertama, kedatangan nelayan Makassar pada abad ke-17; kedua, kedatangan penunggang unta dari Afghanistan dan Pakistan pada abad ke-19; dan ketiga, imigrasi Muslim dari berbagai negara pada abad ke-19 dan ke-20. Proses ini membentuk komunitas Muslim yang beragam dan berkontribusi pada kehidupan sosial dan budaya Australia saat ini.

Kebijakan pendidikan Islam di Australia menyesuaikan dengan sistem pendidikan nasional dengan integrasi nilai-nilai Islam yang kuat. Sekolah Islam berkembang pesat sebagai respons terhadap kebutuhan komunitas Muslim akan pendidikan yang aman dan sesuai dengan identitas keagamaan mereka. Pemerintah Australia mengawasi dan mengatur agar pendidikan Islam juga mengajarkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang berlaku di Australia, meskipun tantangan seperti Islamofobia dan kontroversi sosial masih ada.

Kebijakan pendidikan Islam di Australia berkembang dalam konteks negara yang sangat menghargai keberagaman budaya dan agama, serta menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Pemerintah Australia memberikan kebebasan kepada mahasiswa Muslim di universitas untuk menjalankan ibadah, menyediakan ruang sholat, makanan halal, dan mendukung kelompok mahasiswa Islam, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan pendidikan dan sosial umat Islam di lingkungan akademik. Secara umum, kebijakan pendidikan Islam di Australia mencerminkan usaha integrasi

[273] Mohamad Abdalla, Dylan Chown, and Nadeem Memon, 'Islamic Studies in Australian Islamic Schools: Learner Voice', *Religions*, 11.8 (2020), p. 404.

antara pendidikan agama dan sistem pendidikan nasional yang sekuler, dengan tetap menjaga kebebasan beragama dan identitas budaya umat Islam.

Sekolah-sekolah Islam di Australia memainkan peran penting dalam membentuk identitas keagamaan dan budaya bagi komunitas Muslim di negara yang sangat pluralistik ini. Namun, dalam prosesnya, mereka menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari dinamika internal komunitas hingga tekanan eksternal dari lingkungan sosial dan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, terdapat pula peluang-peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan keberlanjutan sekolah Islam di Australia.

Perbedaan kebijakan pendidikan Islam antar negara bagian Australia muncul karena: Otonomi pengelolaan pendidikan di tingkat negara bagian, Variasi populasi dan kebutuhan komunitas Muslim local, Perbedaan pendekatan dalam integrasi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan sekuler, dan Struktur organisasi Islam yang berbeda-beda di tiap wilayah.

peran pendidikan Islam di Australia juga membantu komunitas Muslim dalam menjawab tantangan kehidupan modern. Melalui pengajaran nilai-nilai moral dan etika Islam, siswa dibekali landasan yang kuat untuk menghadapi isu-isu sosial seperti krisis identitas, tekanan pergaulan, hingga radikalisme. Sekolah-sekolah Islam juga sering kali menjadi pusat kegiatan komunitas, memperkuat solidaritas internal dan memperluas jejaring sosial umat Islam di berbagai kota di Australia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalla, Mohamad, Dylan Chown, and Nadeem Memon, 'Islamic Studies in Australian Islamic Schools: Learner Voice', *Religions*, 11.8 (2020), p. 404

Ambiah, Siti, and Dedeh Nur Hamidah, 'Peran Komunitas Muslim Australia Dalam Perkembangan Islam Di Australia Abad 20 M', *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 7.1 (2019)

Dimyathi, Sholeh, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti* (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018)

Fery, Andi, Ujang Sayuti, Al Ikhlas, and Muhammad Zalnur, 'Pendidikan Islam Di Australia', *Idarah Tarbawiyah: Journal of*

Management in Islamic Education, 4.3 (2023), pp. 367–77

Isri, Saifullah, 'Perbandingan Pendididkan Islam : Konsep Pendidikan Jerman Dan Australia', *Jurnal Pendidikan Islam*, IV.2301–9166 (2020), p. 25

Kettani, Muhammad Alli, *Minoritas Muslim Di Dunia Dewasa Ini* (PT Raja Grafindo, 2015)

Lestari, Sofianti Tri, 'Kebijakan Di Bidang Manajemen Pendidikan Formal Di Australia', *Jurnal Pendidikan Dan Administrasi*, 2024, p. 89

M, H.M. Dahlan, 'ISLAM DI AUSTRALIA (Tinjauan Historis Dan Perkembangan)', *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XXI.1 (2019), pp. 155–66

Muniruddin, Said, *Islam Di Australia* (Syiah Kuala Uneversity Press, 2017)

Ningrum, Velida Apria, and Nur Afina Ulya, 'Dinamika Multikulturalisme Muslim Di Australia', *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 12.2 (2024)

Syakhrani, Abdul Wahab, Annisa Annisa, Evi Evi, Fitri Hidayati, and Hairin Nisa, 'Sistem Pendidikan Di Negara Australia', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal*, 2.1 (2022), pp. 18–26

Wicaksono, Muhammad Arif, and Eko Ribawati, 'Peran Islam Dalam Perkembangan Masyarakat Multikultural Di Australia', *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2.4 (2024), pp. 119–24

Zulmuqim, Ujang Sayuti dan, 'Organisasi Islam Dan Peranannya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Australia', *Jurnal Of Management in Islamic Education*, Vol.4, No. (2023), pp. 367–77

BAB 15
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA *NEW ZEALAND* (SELANDIA BARU)

Fhenny Dwinita Nur Irawandi 2220203052

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan sifat, nilai, dan identitas suatu masyarakat. Keberagaman agama dan budaya menjadi tantangan dan peluang dalam pembuatan kebijakan pendidikan yang inklusif di negara multikultural seperti New Zealand. Kehadiran komunitas Muslim yang terus berkembang merupakan salah satu bentuk keberagaman tersebut. Dengan meningkatnya populasi Muslim di New Zealand, sistem pendidikan yang sesuai dengan prinsip Islam diperlukan, baik dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal. Pemerintah New Zealand dikenal ramah terhadap keragaman agama, termasuk di bidang pendidikan. Hal ini tercermin dalam pengakuan terhadap sekolah berbasis agama, termasuk sekolah Islam, yang memenuhi standar kurikulum nasional dan menerima akreditasi dan bantuan keuangan.

Namun demikian, kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi banyak tantangan saat diterapkan. Ini termasuk jumlah sekolah Islam yang terbatas, kekurangan guru Muslim yang berlisensi, dan kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam lingkungan yang sekuler dan multibudaya. Sebaliknya, prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan penghormatan hak asasi manusia sangat ditekankan dalam kebijakan pendidikan New Zealand. Ini memberikan ruang bagi komunitas Muslim untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan jati diri mereka. Namun, penting untuk memeriksa seberapa baik kebijakan tersebut memenuhi kebutuhan pendidikan Islam dan bagaimana hambatan sosial, budaya, dan politik mempengaruhi pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kebijakan pendidikan Islam di New Zealand. Ini mencakup aspek regulasi, pelaksanaan, dan tanggapan komunitas Muslim.

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana pendidikan Islam berkembang di negara-negara

minoritas Muslim dan menawarkan informasi tentang cara membuat kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Selandia Baru dalam Mengakomodasi Pendidikan Islam di Institusi Pendidikan?
b. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah Islam di Selandia Baru dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan?
c. Bagaimana peran komunitas Muslim dalam mendukung dan mengembangkan pendidikan Islam di Selandia Baru?
d. Sejauh mana kebijakan pendidikan nasional Selandia Baru memberikan ruang bagi pelaksanaan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian kualitatif** dengan metode **studi pustaka (library research)**. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Selandia Baru dengan menggunakan berbagai sumber literatur akademik sebagai dasar utama pengumpulan data. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku akademik terkait kebijakan pendidikan, pendidikan Islam, dan multikulturalisme, Jurnal ilmiah nasional maupun internasional, Laporan resmi dari pemerintah Selandia Baru, khususnya Kementerian Pendidikan (Ministry of Education NZ), Artikel berita yang kredibel mengenai isu pendidikan Islam di New Zealand, Tesis, disertasi, dan dokumen penelitian sebelumnya yang relevan, Website resmi sekolah Islam di New Zealand dan organisasi Muslim. Peneliti memanfaatkan beberapa sumber bacaan sehingga penelitian ini dapat di selesaikan.

TEORI

Pendekatan negara ini mencerminkan upaya serius dalam mengakomodasi keragaman agama dan budaya melalui sistem pendidikan yang inklusif. Melalui penerapan teori kebijakan pendidikan, terlihat adanya pengakuan formal terhadap sekolah Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui skema *state-integrated schools*, yang menunjukkan keterbukaan negara terhadap pluralisme pendidikan. Dalam perspektif teori minoritas, kebijakan ini

memberikan ruang bagi komunitas Muslim untuk mempertahankan identitas keagamaan mereka sambil tetap mengakses pendidikan yang setara. Sementara itu, penerapan teori multikulturalisme tercermin dalam penghormatan terhadap identitas budaya dan agama siswa, baik dalam kurikulum maupun lingkungan sekolah, yang didukung oleh pelatihan guru dan kebijakan integratif lainnya. Ketiga teori tersebut saling memperkuat dalam membentuk kebijakan pendidikan yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan kelompok minoritas seperti umat Islam di New Zealand.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Selandia Baru dalam Mengakomodasi Pendidikan Islam di Institusi Pendidikan

Pemerintah Selandia Baru (New Zealand) terkenal dengan komitmennya terhadap multikulturalisme dan hak asasi manusia, yang tercermin dalam pendekatan mereka terhadap pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Pemerintah menetapkan kebijakan yang memungkinkan pendidikan berbasis agama seperti Islam berkembang dalam kerangka hukum nasional di tengah-tengah masyarakatnya yang multikultural. Sistem sekolah yang terintegrasi dengan pemerintah adalah salah satu bentuk akomodasi ini. Sistem ini memungkinkan sekolah berbasis agama, seperti Islam, untuk bergabung dengan sistem pendidikan negeri sambil mempertahankan sifat keagamaannya.

Dengan menggunakan Education and Training Act 2020, negara memastikan bahwa sekolah-sekolah ini memiliki akses ke sumber daya negara sambil tetap memenuhi standar pendidikan nasional yang ditetapkan.[274] Contohnya adalah Al-Madinah School di Auckland dan Zayed College for Girls. Keduanya menawarkan kurikulum nasional Selandia Baru, tetapi tetap menawarkan pendidikan agama Islam, termasuk kursus seperti Studi Islam dan Bahasa Arab, serta memberikan ruang untuk aktivitas keagamaan seperti shalat berjamaah.

Menurut Mohamad Ali metode ini mencerminkan prinsip inklusi multikulturalisme, di mana pemerintah mengakui hak komunitas. Muslim untuk mengelola pendidikan berbasis agama mereka, tetapi tetap berada di bawah pengawasan negara untuk

[274] New Zealand Government, *New Zealand Government*, 2020.

menjaga standar mutu dan prinsip kesetaraan dalam pendidikan. Ali menekankan bahwa model ini memungkinkan ekspresi keagamaan dan mendorong integrasi sosial dengan menjamin bahwa lulusan sekolah Islam tetap memiliki kemampuan akademik umum.[275]

Pemerintah membuat kebijakan untuk akomodasi keagamaan di sekolah umum selain mendukung sekolah Islam. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stephen May dan Melinda Webber, menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di New Zealand didorong untuk menerapkan pendekatan pluralistik dalam kurikulum dan operasi sekolah. Pendekatan ini mencakup penyediaan makanan halal, ruang shalat, dan kebijakan yang memungkinkan siswa Muslim mengenakan jilbab. Pelatihan guru tentang keberagaman budaya dan agama serta pengembangan prinsip anti-diskriminasi dalam lingkungan sekolah merupakan implementasi formal dari kebijakan ini.[276]

Namun, masih ada masalah dalam praktiknya Abdullah Saeed, mengatakan bahwa meskipun kebijakan pemerintah umumnya mendukung hak-hak minoritas Muslim, siswa Muslim menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk stereotip negatif, ketidakpahaman budaya oleh karyawan sekolah, dan kasus diskriminasi terselubung. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan terus meningkatkan program pelatihan profesional untuk guru agar mereka lebih memahami sensitivitas budaya dan agama. Mereka juga meningkatkan program pendidikan karakter yang mengajarkan anak-anak untuk berempati, menerima, dan menghormati keberagaman.[277]

Universitas seperti University of Auckland, University of Otago, dan Victoria University of Wellington menawarkan layanan tambahan untuk siswa Muslim di perguruan tinggi, seperti ruang ibadah, pilihan makanan halal di kafetaria kampus, komunitas Muslim, dan konselor budaya yang memahami keagamaan dan budaya sisw. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di New

---

[275] Mohamad Ali, Religious Schools and State Regulation in MulticulturalSocieties: The Case of New Zealand. *Religion and Education*, 2022, vol. 49, no. 1, hal. 45-62.

[276] Stephen May, Melinda Webber, dan A. O. Addressing Diversity in New Zealand's Education System: Policies and Practices. *Multicultural Education Review*, 2021, vol. *13*, no. 3, hal. 171-186.

[277] Abdullah Saeed, Muslims in Secular Education Systems: New Challenges and Approaches. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 2020, vol. 8, no.1, hal. 1-10.

Zealand tidak hanya di sekolah dasar dan menengah tetapi juga di perguruan tinggi.[278]

Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa Selandia Baru menggunakan model multikulturalisme dan hak asasi manusia untuk mengelola keberagaman. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan sosial di tengah keragaman agama dan budaya sambil mempertahankan keharmonisan nasional melalui sistem pendidikan yang inklusif.

Untuk mengatasi ketimpangan dalam pengalaman siswa Muslim, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut. Akomodasi formal belum tentu sepenuhnya menghapuskan masalah kultural di tingkat praktis. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan inklusi sosial melalui pendidikan.

B. Tantangan yang Dihadapi oleh Sekolah-Sekolah Islam di Selandia Baru dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Walaupun pemerintah Selandia Baru telah memungkinkan pendidikan berbasis Islam melalui program sekolah yang terintegrasi dengan pemerintah, masih ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan saat menerapkannya.

Pertama, masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Dalam laporannya tentang pendidikan Muslim di New Zealan Aliya Danzeisen, menyatakan bahwa banyak sekolah Islam kekurangan guru yang berkualitas, terutama dalam mata pelajaran akademik dan keagamaan umum. Hal ini menyebabkan beban kerja tambahan bagi guru dan berdampak pada kualitas pendidikan.[279]

Kedua, masih ada hambatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam Kurikulum Nasional. Raees Begg, menekankan bahwa sekolah Islam di Selandia Baru harus berjuang keras untuk menyeimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan identitas keislaman siswa dengan tuntutan untuk mengikuti kurikulum New Zealand. Sebagian besar tantangan muncul dalam bidang kesehatan,

[278] Victoria University of Wellington, *Student Support Services for Muslim Students*, 2024.

[279] Aliya Danzeisen, Muslim Educational Experiences in New Zealand: Challenges and Progress. *In New Zealand Journal of Educational Studies*, 2019, vol. 54, no. 2, hal. 265-280.

pendidikan seksual, dan sains, yang dalam beberapa kasus bertentangan dengan prinsip Islam.[280]

Ketiga, masalah yang terkait dengan infrastruktur dan pendanaan juga sangat signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anisha Abdullah, meskipun sekolah Islam yang terintegrasi mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah, dana tersebut seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tambahan, seperti pembangunan fasilitas ibadah, ruang kelas khusus, dan program berbasis agama.[281]

Keempat, stereotip dan diskriminasi terhadap komunitas Muslim masih berlaku di sekolah Islam, meskipun tidak terlalu umum. Menurut ZainAli, meskipun ada peningkatan rasa solidaritas setelah serangan teroris di Christchurch (2019), rasa tidak aman dan prasangka terus menghantui interaksi sosial siswa Muslim di sekolah, baik di sekolah Islam maupun sekolah umum.[282]

Kelima, kekurangan representasi Muslim dalam kebijakan pendidikan menyebabkan sekolah Islam tidak dapat memenuhi kebutuhan khusus mereka. Mohamed Imran dan Mohamed Taib, mengatakan bahwa komunitas Muslim masih kurang terlibat dalam pembuatan kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan bahwa pandangan Islam sering kali tidak muncul dalam percakapan publik tentang pendidikan.[283]

C. Peran Komunitas Muslim dalam Mendukung dan Mengembangkan Pendidikan Islam di Selandia Baru

Khususnya dalam sepuluh tahun terakhir, komunitas Muslim Selandia Baru telah memainkan peran besar dalam mendukung dan mengembangkan pendidikan Islam. Meningkatnya jumlah orang Muslim di Selandia Baru, yang mencapai sekitar 1,3% dari total populasi menurut data sensus tahun 2018 (Stats NZ, 2019),

[280] Raees Begg, Balancing Faith and Curriculum: The Case of Islamic Schools in New Zealand. *Master's Thesis, University of Waikato*, 2018.

[281] Anisah Abdullah. (2017). Islamic Schooling in New Zealand: Issues of Access and Equity. *In Journal of Muslim Minority Affairs*, 2017, vol. 37, no. 4, hal. 487-502.

[282] Zain Ali, Being Muslim in Aotearoa: Challenges and Opportunities. *Auckland University Press*, 2016.

[283] Mohamed Imran & Mohamed Taib, Muslim Minorities and Education in Secular Societies: Navigating Identity and Integration. *Routledge*, 2021.

mendorong kebutuhan akan peningkatan pendidikan Islam formal dan informal.

1. Pendirian Lembaga Pendidikan Islam

   Komunitas Muslim telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempertahankan identitas keagamaan dan mendukung keragaman sosial Selandia Baru melalui berbagai inisiatif. Beberapa di antaranya adalah Al-Madinah School, yang didirikan pada tahun 1992, dan Zayed College for Girls di Auckland. Menurut Hassan dan Shamsuddin, kedua sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dan mengajarkan bahasa Arab, agama Islam, dan Al-Qur'an.[284]

   Sekolah-sekolah ini menawarkan opsi pendidikan alternatif bagi keluarga Muslim yang ingin memastikan bahwa anak-anak mereka menerima pendidikan yang sesuai dengan prinsip agama mereka. Institusi-institusi ini tidak hanya memberikan pendidikan berbasis Islam tetapi juga mengajarkan nilai-nilai universal seperti toleransi, kerja sama, dan saling menghormati di lingkungan multikultural. Oleh karena itu, mereka berfungsi sebagai penghubung antara komunitas Muslim dan komunitas luas Selandia Baru.

2. Pengembangan Kurikulum Adaptif

   Komunitas Muslim di Selandia Baru juga berkontribusi pada pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang sesuai dengan konteks lokal. Ini membutuhkan integrasi nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kehidupan dalam masyarakat multikultural dan demokratis. Dalam kenyataannya, sekolah Islam mengajarkan hak asasi manusia, etika sosial, dan prinsip-prinsip keadilan sebagai bagian dari kurikulum mereka, yang didasarkan pada keyakinan Islam.

   Proses adaptasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak teralienasi dari keadaan sosial Selandia Baru. Ini akan membentuk generasi Muslim yang dapat berkontribusi pada masyarakat luas tanpa kehilangan identitas keislaman mereka.

[284] Hassan & Shamsuddin, Developing Islamic-Based Curriculum in Western Contexts:A New Zealand Experience. *International Journal of Islamic Thought*, 2019, vol. 15, no. 2, hal. 40-48.

3. Penyelenggaraan Program Pendidikan Non-Formal

   Selain pendidikan formal, komunitas Muslim aktif mengembangkan program non-formal seperti madrasah akhir pekan, kursus tahfidz, dan kelas Islam untuk anak-anak dan remaja. Program-program ini biasanya diadakan di masjid-masjid atau pusat Islam setempat, dan merupakan bagian penting dalam meningkatkan pengetahuan keagamaan anak-anak Muslim yang bersekolah di institusi umum.

   Menurut Ali J, aktivitas pendidikan non-formal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman orang tentang Islam tetapi juga membangun komunitas yang solid dan memperkuat hubungan sosial antara anggota komunitas Muslim.[285]

4. Pelatihan Guru dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

   Komunitas Muslim berusaha mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan guru di sekolah-sekolah Islam. Mereka menyadari betapa pentingnya kualitas pengajar. Tujuan program ini adalah untuk memberikan guru pemahaman tentang pedagogi Islam, teknik pengajaran kontemporer, dan kemampuan manajemen kelas yang efektif.[286]

   Upaya pengembangan profesional guru ini sangat penting untuk menjamin bahwa pendidikan Islam diberikan tidak hanya memiliki kualitas akademik yang tinggi, tetapi juga efektif dalam membentuk karakter siswa sesuai dengan ajaran Islam.

5. Advokasi dan Hubungan dengan Pemerintah

   Komunitas Muslim Selandia Baru juga aktif dalam mendorong pengakuan dan dukungan kebijakan pendidikan Islam. Mereka berkampanye untuk menyediakan makanan halal di kantin sekolah dan mendukung hak untuk mengenakan hijab di sekolah umum, yang merupakan contoh yang signifikan.[287]

   Melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Selandia Baru, komunitas Muslim memastikan bahwa prinsip-prinsip keberagaman dan inklusivitas dijaga dalam sektor

---

[285] Ali J, Resilience and Identity: Muslim Community's Response to Christchurch Attack. *Islam and Christian Muslim Relations*, 2020, vol. 3, no. 1, hal. 171-186.

[286] Abdalla, Islamic Education in New Zealand: Teacher Development and Challenges *Journal of Muslim Minority Affairs*, 2018, vol. 38, no. 2, hal. 234-248.

[287] Zavos, Religion, Minorities, and State Support in New Zealand: A Study of Muslim Schools. *Journal of Sociology*, 2020, vol. 56, no. 3, hal. 375-390.

pendidikan. Ini membantu komunitas Muslim secara keseluruhan dan memperkaya keragaman budaya di pendidikan Selandia Baru.

6. Teknologi dalam Pembelajaran Islam

   Komunitas Muslim Selandia Baru telah menggunakan teknologi untuk membangun pendidikan Islam dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19. Banyak lembaga pendidikan Islam telah menggunakan platform pembelajaran online untuk mengajarkan siswa agama Islam, Al-Qur'an, dan bahasa Arab.

   Dengan menggunakan media digital ini, anak-anak Muslim di daerah yang lebih terpencil dapat memperoleh pendidikan Islam. Selain itu, metode belajar menjadi lebih fleksibel.[288] Selain itu, komunitas muda Muslim mulai menggunakan aplikasi berbasis Islam dan webinar keislaman.

7. Membangun Solidaritas Pasca-Tragedi Christchurch

   Serangan teror di Christchurch pada 15 Maret 2019 menjadi titik balik penting dalam hubungan antara komunitas Muslim dan masyarakat luas di Selandia Baru. Setelah insiden tersebut, komunitas Muslim terus meningkatkan peran mereka dalam pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan menekankan pentingnya prinsip perdamaian, toleransi, dan saling menghormati. Menurut Ali J, pendidikan Islam dianggap sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan komunitas, membangun hubungan agama, dan memperkuat solidaritas sosial. Banyak program lintas komunitas dimulai untuk mempromosikan keterbukaan dan mendidik masyarakat tentang Islam, seperti program "Masjid Terbuka" dan diskusi antaragama di sekolah-sekolah umum.

   Peran komunitas Muslim Selandia Baru dalam mendukung dan mengembangkan pendidikan Islam telah berkembang pesat dan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Komunitas Muslim berkontribusi aktif dalam pembentukan generasi Muslim yang berkualitas akademik dan kuat dalam identitas keislamannya melalui pembentukan sekolah, kurikulum adaptif, program pendidikan non-formal, pelatihan guru, dan inovasi teknologi.

[288] Mohamed A, Youth Engagement in Islamic Education: A New Zealand Perspective.*Contemporary Issues in Education Research*, 2021, vol. 14, no. 1, hal. 25-34.

Pendidikan Islam telah menjadi bagian penting dari penguatan peran umat Muslim di masyarakat multikultural Selandia Baru, meskipun masih ada tantangan seperti Islamofobia dan keterbatasan sumber daya. Komunitas Muslim berhasil mengatasi masalah ini dengan tetap kuat dan saling membantu.

D. Kebijakan Pendidikan Nasional Selandia Baru Memberikan Ruang Bagi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Nilai-Nilai Islam

Selandia Baru adalah negara yang menghargai keberagaman budaya, etnis, dan agama. Pendidikan di Selandia Baru dirancang untuk menghormati dan mengakui keberagaman masyarakatnya, sehingga kurikulum berbasis nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam berbagai cara, selain memenuhi kebutuhan mayoritas dan memberikan ruang bagi komunitas minoritas untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya, termasuk komunitas Muslim.

1. Pendidikan dan Pelatihan 2020

   Undang-undang adalah dasar utama sistem pendidikan Selandia Baru dan mengakui hak setiap orang untuk mengakses pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keagamaannya. Bagian 34 dari undang-undang ini secara khusus memungkinkan pembentukan sekolah negeri terintegrasi. Sekolah terintegrasi ini adalah sekolah yang memiliki karakteristik agama khusus, seperti Islam, dan dapat beroperasi dengan dukungan negara sambil mempertahankan identitas keagamaannya.[289]

2. Kurikulum New Zealand (NZC) 2007, revisi 2017

   Kurikulum nasional ini berfokus pada pengembangan siswa secara keseluruhan, dengan nilai-nilai utama seperti penghargaan terhadap keyakinan pribadi, toleransi, dan keberagaman budaya. Kurikulum ini fleksibel dan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan komunitas tertentu, sambil tetap mencapai hasil pembelajaran nasional. Dengan kata lain, sekolah Islam dapat menggabungkan ajaran agama dan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum mereka.[290]

---

[289] Victoria University of Wellington, *Student Support Services for Muslim Students*, 2024.

[290] Ministry of Education, The New Zealand Curriculum. *Wellington: Learning Media*, 2017.

3. Rangka Kerja Pendidikan Inklusivitas

Ide inklusivitas menjadi dasar kebijakan pendidikan Selandia Baru. Menurut Inclusive Education Guide for Schools, yang diterbitkan oleh Ministry of Education pada tahun 2018, sekolah harus menghormati identitas budaya dan keagamaan siswa. Mereka juga diminta untuk membuat lingkungan belajar yang mendukung praktik keagamaan, seperti menyediakan makanan halal, tempat untuk salat, dan mengenakan pakaian yang disesuaikan dengan kepercayaan seperti hijab.[291] Ada beberapa cara di mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kurikulum di Selandia Baru:

a. Sekolah Islam Negeri Terintegrasi (Sekolah Negeri Terintegrasi Pemerintah)

Beberapa sekolah Islam telah diakui sebagai sekolah negeri terintegrasi. Salah satu contohnya adalah Sekolah Al-Madinah di Auckland dan Zayed College for Girls di Auckland. Meskipun sekolah-sekolah ini tetap mengikuti kurikulum nasional, mereka dapat memasukkan materi keislaman seperti bahasa Arab, Al-Qur'an, Fikih, dan Akhlak ke dalam kurikulum mereka. Semua aspek kehidupan sekolah menekankan pendidikan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Menurut laporan evaluasi yang diterbitkan oleh Education Review Office (ERO) tahun 2019, sekolah Al-Madinah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan standar pendidikan nasional, menghasilkan lulusan yang baik dalam akademik dan memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai agama mereka sendiri.[292]

b. Perubahan di Sekolah Umum

Selain di sekolah Islam, banyak sekolah umum juga melakukan perubahan untuk menerima siswa Muslim. Misalnya, mereka menyediakan ruang untuk salat, menyediakan makanan halal di kantin sekolah, memberikan waktu khusus untuk merayakan hari-hari besar Islam, dan memberikan izin kepada siswa untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan agama mereka. Hal ini memungkinkan siswa Muslim untuk tetap mendapatkan pendidikan umum

[291] Ministry of Education, *Inclusive Education Guide for Schools*, 2018.
[292] Education Review Office (ERO), *Al-Madinah School ERO Report*, 2019.

berkualitas tinggi tanpa mengabaikan keyakinannya sebagai Muslim.

c. Pembelajaran Nonformal

Selain itu, komunitas Muslim Selandia Baru secara aktif mendukung pendidikan Islam nonformal melalui madrasah, kelas akhir pekan, dan program pendidikan agama di masjid dan pusat komunitas. Program ini mendukung pendidikan Islam di luar pendidikan formal. Pendidikan yang inklusif dan multikultural adalah prioritas utama pemerintah Selandia Baru.

Negara ini memastikan bahwa semua orang, termasuk Muslim, dapat mengakses pendidikan yang relevan dengan identitas dan nilai mereka melalui kebijakan pendanaan, akreditasi sekolah berbasis agama, dan panduan praktik inklusif.

Organisasi seperti Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahwa kebutuhan komunitas Muslim dalam bidang pendidikan dipenuhi. Kebijakan pendidikan yang lebih sensitif terhadap komunitas Muslim seringkali dibuat oleh FIANZ. Meskipun ada kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pendidikan Islam, ada beberapa masalah dalam praktik. Ini termasuk jumlah guru yang tidak mencukupi untuk mengajar pendidikan Islam, kebutuhan untuk menyesuaikan kurikulum dengan standar nasional, stigma atau stereotip negatif terhadap Islam di beberapa kelompok masyarakat, dan perluasan pendidikan Islam ke daerah di luar pusat kota.

Namun, komunitas Muslim Selandia Baru terus berjuang untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan jaringan komunitas, meningkatkan pelatihan guru, dan bekerja sama lebih erat dengan sekolah dan pemerintah. Ada kemungkinan bahwa kebijakan pendidikan nasional Selandia Baru secara nyata memberikan ruang bagi kurikulum yang berbasis nilai-nilai Islam untuk diterapkan. Ini tercermin dari regulasi, fleksibilitas kurikulum, prinsip inklusivitas, dan pengakuan sekolah berbasis agama. Dengan dukungan pemerintah dan komitmen komunitas Muslim, pendidikan Islam di Selandia

Baru berkembang secara damai, menghormati keberagaman tantangan.

KESIMPULAN

Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan sifat, nilai, dan identitas sebuah masyarakat. Keberagaman agama dan budaya menjadi tantangan dan peluang dalam pembuatan kebijakan pendidikan yang inklusif di negara multikultural seperti Selandia Baru. Dengan meningkatnya populasi Muslim Selandia Baru, sistem pendidikan yang sesuai dengan prinsip Islam diperlukan, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal. Pemerintah Selandia Baru dikenal ramah terhadap keberagaman agama, termasuk dalam pendidikan. Ini ditunjukkan oleh pengakuan sekolah berbasis agama seperti sekolah Islam, yang menerima akreditasi dan dukungan keuangan sambil memenuhi standar kurikulum nasional. Namun, pelaksanaan pendidikan Islam menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah jumlah sekolah Islam yang terbatas, kekurangan guru Muslim yang bersertifikat, dan kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip keislaman ke dalam lingkungan yang sekuler dan multibudaya.

Sebaliknya, demokrasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diutamakan di Selandia Baru memungkinkan komunitas Muslim mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan identitas mereka. Namun, perlu dilakukan analisis kritis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan Muslim dan mengatasi tantangan sosial-budaya yang ada.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Selandia Baru untuk mendukung pendidikan Islam adalah sistem sekolah yang terintegrasi dengan pemerintah, yang memungkinkan sekolah berbasis agama bergabung dengan sistem negeri sambil mempertahankan sifat keagamaannya. Selama sekolah tetap mengikuti standar kurikulum nasional, negara memberikan dana kepada mereka melalui Education and Training Act 2020.

Contohnya adalah Zayed College for Girls dan Al-Madinah School di Auckland, yang menawarkan kurikulum nasional dengan pelajaran Islam dan Bahasa Arab selain fasilitas keagamaan seperti ruang salat. Metode ini mengikuti prinsip multikulturalisme yang inklusif, yang mendukung ekspresi keagamaan tanpa mengabaikan integrasi sosial. Selain itu, sekolah umum Selandia Baru memiliki

fasilitas yang mendukung keagamaan, seperti menyediakan makanan halal, ruang salat, dan kebijakan berpakaian yang memungkinkan jilbab digunakan. Tantangan seperti stereotip negatif terhadap siswa Muslim, ketidakpahaman budaya oleh karyawan sekolah, dan diskriminasi terselubung masih ada, meskipun kebijakan formal mendukung inklusi. Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan melatih guru untuk sensitivitas budaya.

Universitas-universitas besar di tingkat perguruan tinggi menyediakan layanan ibadah, makanan halal, dan komunitas Muslim di kampus, menunjukkan bahwa pendidikan Islam ada di semua jenjang. Namun, dalam pelaksanaannya, sekolah-sekolah Islam di Selandia Baru menghadapi banyak masalah. Pertama, kekurangan sumber daya manusia, dengan kekurangan guru berpendidikan agama dan akademik umum. Kedua, integrasi antara kurikulum nasional dan nilai-nilai Islam menjadi masalah, terutama dalam hal topik sensitif seperti kesehatan dan pendidikan seksual. Ketiga, masalah pendanaan terus muncul. Dana negara seringkali tidak mencukupi untuk membiayai fasilitas ibadah atau program keagamaan tambahan. Keempat, meskipun solidaritas masyarakat umumnya meningkat, siswa Muslim menghadapi tekanan psikologis yang lebih besar setelah serangan Christchurch 2019. Terakhir, komunitas Muslim belum memiliki representasi yang cukup dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Akibatnya, kebutuhan khusus mereka belum sepenuhnya dipenuhi.

Komunitas Muslim Selandia Baru secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan dan dukungan pendidikan Islam. Mereka mendirikan sekolah seperti Zayed College for Girls dan Al-Madinah School yang menggabungkan kurikulum nasional dengan pendidikan Islam. Mereka juga membuat kurikulum yang disesuaikan dengan multikulturalisme dan demokrasi, serta mengadakan pendidikan nonformal seperti madrasah akhir pekan, kursus tahfidz, dan kelas Islam. Selain itu, mereka berjuang untuk mendorong pemerintah untuk mengakui kebutuhan khusus komunitas Muslim, seperti penggunaan hijab di sekolah umum, dan meningkatkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran online.

Setelah insiden Christchurch, komunitas Muslim memperkuat posisinya melalui inisiatif yang menekankan toleransi dan perdamaian dan memungkinkan percakapan antara agama. Upaya-upaya ini menunjukkan bagaimana komunitas Muslim membangun kekuatan

sekaligus membantu memperkaya masyarakat multikultural Selandia Baru. Selain itu, Selandia Baru menunjukkan komitmennya untuk memberikan ruang bagi kurikulum yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam kebijakan nasionalnya. Education and Training Act 2020 memungkinkan sekolah berbasis agama, sementara kurikulum New Zealand mengutamakan fleksibilitas, yang memungkinkan ajaran agama disesuaikan dengan hasil belajar nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalla. (2018). Islamic Education in New Zealand: Teacher Development and Challenges. *Journal of Muslim Minority Affairs, 38*(2), 234–248.

Abdullah Saeed. (2020). Muslims in Secular Education Systems: New Challenges and Approaches. *Journal of Islamic Studies and Culture*, *8*(1), 1–10.

Ali J. (2020). Resilience and Identity: Muslim Community's Response to Christchurch Attack. *Islam and Christian Muslim Relations, 31*(2), 171–186.

Aliya Danzeisen. (2019). Muslim Educational Experiences in New Zealand: Challenges and Progress. *In New Zealand Journal of Educational Studies, 54*(2), 265–280.

Anisah Abdullah. (2017). Islamic Schooling in New Zealand: Issues of Access and Equity. *In Journal of Muslim Minority Affairs, 37*(4), 487–502.

Education Review Office (ERO). (2019). *Al-Madinah School ERO Report*.

Hassan & Shamsuddin. (2019). Developing Islamic-Based Curriculum in Western Contexts: A New Zealand Experience. *International Journal of Islamic Thought, 15*(2), 40–48.

Ministry of Education. (2017). The New Zealand Curriculum. *Wellington: Learning Media*.

Ministry of Education. (2018). *Inclusive Education Guide for Schools*.

Mohamad Ali. (2022). Religious Schools and State Regulation in Multicultural Societies: The Case of New Zealand. *Religion and Education, 49*(1), 45–62.

Mohamed A. (2021). Youth Engagement in Islamic Education: A New Zealand Perspective. *Contemporary Issues in Education Research, 14*(1), 25–34.

Mohamed Imran Mohamed Taib. (2021). Muslim Minorities and Education in Secular Societies: Navigating Identity and Integration. *Routledge*.

New Zealand Government. (2020). *New Zealand Government*.

Raees Begg. (2018). Balancing Faith and Curriculum: The Case of Islamic Schools in New Zealand. *Master's Thesis, University of Waikato*.

Stats NZ. (2019). 2018 Census: Population and Religion Statistics. *Retrieved*.

Stephen May, Melinda Webber, dan A. O. (2021). Addressing Diversity in New Zealand's Education System: Policies and Practices. *Multicultural Education Review*, *13*(3), 171–186.

Victoria University of Wellington. (2024). *Student Support Services for Muslim Students*.

Zain Ali. (2016). Being Muslim in Aotearoa: Challenges and Opportunities. *Auckland University Press*.

Zavos. (2020). Religion, Minorities, and State Support in New Zealand: A Study of Muslim Schools. *Journal of Sociology*, *56*(3), 375–390.

BAB 16
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA-NEGARA DI KUTUB UTARA

(Miranti)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga merambah ke wilayah-wilayah yang secara geografis dan demografis sangat menantang, seperti negara-negara yang berada di kawasan Kutub Utara. Daerah ini, yang mencakup sebagian wilayah Norwegia, Swedia, Islandia, Finlandia, Kanada bagian utara, hingga Rusia bagian utara, memiliki komunitas Muslim yang mulai tumbuh seiring meningkatnya migrasi, pengungsi, dan keturunan Muslim generasi kedua yang menetap di sana. Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam menjadi kebutuhan mendesak yang tidak hanya berfungsi sebagai media penguatan identitas keislaman, tetapi juga sebagai sarana untuk menjawab tantangan asimilasi budaya yang tinggi dan tekanan sistem pendidikan yang mayoritas sekuler.

Penyelenggaraan pendidikan Islam di wilayah Kutub Utara memiliki tantangan yang tidak sederhana. Selain faktor cuaca ekstrem dan keterbatasan infrastruktur, perbedaan waktu siang dan malam yang sangat drastis pada musim-musim tertentu memengaruhi jadwal aktivitas keagamaan dan pembelajaran. Belum lagi regulasi pendidikan di negara-negara tersebut cenderung mengedepankan prinsip netralitas agama, sehingga akses terhadap kurikulum berbasis Islam atau penyelenggaraan madrasah menjadi terbatas. Namun, upaya komunitas Muslim di wilayah ini untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaannya melalui pendidikan tetap berjalan dengan berbagai strategi, mulai dari pendidikan informal berbasis komunitas, sekolah akhir pekan, hingga integrasi nilai Islam dalam sistem pendidikan umum.

Menilik dari sudut pandang kebijakan pendidikan, sangat penting untuk memahami bagaimana bentuk dukungan atau hambatan kebijakan terhadap pendidikan Islam di negara-negara tersebut. Kebijakan pendidikan Islam yang muncul di negara-negara

Kutub Utara tidak bisa disamaratakan, sebab sangat bergantung pada sistem pemerintahan, kebijakan multikultural, serta relasi antara negara dan agama yang dianut masing-masing pemerintah. Dalam hal ini, pendidikan Islam di wilayah Kutub Utara dapat menjadi contoh konkrit bagaimana Islam beradaptasi di lingkungan yang bukan hanya berbeda secara budaya, tetapi juga memiliki kondisi alam dan sosial yang ekstrem.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah An-Nur ayat 55 yang menyatakan bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman kekuasaan dan kemampuan untuk menjalankan agama-Nya di muka bumi. Ayat ini menjadi dasar spiritual bagi umat Islam untuk tetap memperjuangkan pendidikan agamanya di mana pun mereka berada, termasuk di wilayah paling utara bumi. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dibahas menganai bagaimana kondisi pendidikan Islam, bentuk kebijakan pendidikan, tantangan serta bagaimana relevansi Q.S. An-Nur ayat 55 dalam memperjuangkan pendidikan Islam di negara-negara Kutub Utara.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana kondisi pendidikan Islam di negara-negara kawasan Kutub Utara?
b. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah di negara-negara tersebut dalam mengatur pendidikan Islam?
c. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan Islam di wilayah Kutub Utara?
d. Bagaimana relevansi Q.S. An-Nur ayat 55 dalam konteks perjuangan pendidikan Islam di wilayah minoritas Muslim?

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (library research), dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis mengkaji berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan Islam di negara-negara minoritas Muslim khususnya di kawasan Kutub Utara. Sumber data dikumpulkan melalui telaah dokumen dan analisis isi terhadap materi yang relevan dengan topik pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan multikultural.

TEORI

1. Teori Pendidikan Islam

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi Muslim yang seimbang antara aspek jasmani, rohani, akal, dan hati. Serta menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi bahwa pendidikan Islam juga berfungsi membentuk manusia yang berakhlak luhur dan berpengetahuan luas.

2. Teori Multikulturalisme dalam Pendidikan

Dalam teori ini, pendidikan diharapkan dapat mengakomodasi berbagai latar belakang budaya dan agama, termasuk minoritas. Pendidikan multikultural menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil.

3. Teori Adaptasi Sosial dan Kultural

Umat Islam sebagai minoritas di negara-negara sekuler perlu menyesuaikan pendekatan pendidikan dengan nilai-nilai lokal tanpa kehilangan esensi ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan Lubis dan Nurhadi Hasan.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Pendidikan Islam Di Negara-Negara Di Kutub Utara

Pendidikan Islam di negara-negara Kutub Utara mencerminkan dinamika perjuangan minoritas Muslim dalam mempertahankan identitas agama melalui jalur pendidikan. Secara umum, pendidikan Islam di wilayah ini tidak berlangsung dalam bentuk sistem pendidikan formal yang terintegrasi dengan kurikulum nasional, melainkan lebih dominan dalam bentuk pendidikan nonformal seperti madrasah komunitas, pengajian mingguan, dan sekolah Islam akhir pekan yang diinisiasi oleh organisasi Muslim lokal. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan di sebagian besar negara Kutub Utara, seperti Norwegia, Swedia, dan Islandia, menganut asas sekularisme yang ketat, yang membatasi porsi pendidikan agama dalam lembaga pendidikan umum.[293] Namun, semangat komunitas Muslim untuk tetap menjaga warisan keislaman tetap kuat dan mereka berusaha membentuk sistem pendidikan alternatif yang dapat

[293] M. Syafii Antonio, *Islamic Education in the Multicultural Society*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2020), hlm. 134.

memenuhi kebutuhan anak-anak Muslim untuk mengenal ajaran Islam sejak dini.

Pengertian pendidikan Islam sendiri memiliki banyak dimensi. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah proses pembinaan individu berdasarkan ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk kepribadian Muslim yang utuh dan seimbang antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati.[294] Sementara itu, Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menyebutkan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang luhur dan berpengetahuan luas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, pendidikan Islam di negara-negara Kutub Utara dijalankan untuk mempertahankan nilai spiritual dan budaya keislaman dalam lingkungan yang sangat pluralistik dan bahkan cenderung sekuler.[295]

Dari sisi pelaksanaan, banyak komunitas Muslim di wilayah ini yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas fisik, serta tuntutan pekerjaan dari orang tua yang membuat waktu belajar menjadi terbatas. Aplikasi pembelajaran Islam daring, kelas virtual Al-Qur'an, hingga konsultasi keagamaan melalui media sosial menjadi alternatif solusi yang relevan dengan situasi geografis yang penuh tantangan. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun kerja sama internasional agar kualitas pendidikan Islam dapat terjaga.

Menurut Muhammad Ridwan Lubis, pendidikan Islam di negara-negara non-Muslim harus didesain dengan pendekatan yang adaptif, yakni memadukan antara ajaran Islam yang otentik dengan sensitivitas sosial dan budaya setempat agar tidak menimbulkan konflik. Dalam praktiknya, umat Islam di Kutub Utara sering kali mengalami dilema antara menjalankan ajaran Islam dengan mengikuti aturan sosial yang berlaku, terutama dalam hal pakaian,

[294] Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam dan Peranannya dalam Pengembangan Kepribadian Muslim,* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2001), hlm. 87.

[295] Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam,* (Bandung: Angkasa, 2022), hlm. 45.

ibadah di tempat umum, serta pelaksanaan hari besar Islam yang tidak termasuk dalam kalender resmi negara.[296]

Siti Zubaidah dalam penelitiannya menyebut bahwa salah satu tantangan terbesar pendidikan Islam di kawasan minoritas Muslim adalah bagaimana mentransmisikan nilai-nilai Islam secara efektif tanpa memunculkan resistensi dari masyarakat mayoritas. Oleh karena itu, proses pendidikan di wilayah ini lebih mengedepankan pendekatan yang santun, inklusif, dan menghindari konfrontasi ideologis. Pola ini tampak dalam sistem pendidikan Islam di Kanada bagian utara yang mengusung prinsip multikulturalisme dan toleransi tinggi, sehingga pendidikan agama bisa berjalan beriringan dengan pendidikan nasional tanpa harus kehilangan identitasnya.[297]

Berdasarkan berapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kondisi pendidikan Islam di negara-negara Kutub Utara adalah bentuk nyata dari perjuangan umat Islam dalam mempertahankan keyakinan mereka di tengah keterbatasan fasilitas, regulasi yang ketat, dan lingkungan sosial yang sangat berbeda. Meskipun berada dalam kondisi minoritas dan menghadapi banyak kendala, pendidikan Islam tetap tumbuh melalui jalur-jalur informal yang kreatif dan berbasis komunitas, yang merupakan wujud nyata dari semangat dakwah dan keberlangsungan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat global.

B. Kebijakan Pendidikan Islam Di Negara-Negara Di Kutub Utara

Pendidikan Islam di negara-negara yang terletak di kawasan Kutub Utara, meskipun tidak memiliki mayoritas Muslim, telah menunjukkan berbagai bentuk kebijakan yang unik dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan bagi umat Islam. Kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan budaya lokal yang berbeda dengan negara-negara Muslim pada umumnya.[298] Pemerintah negara-negara di Kutub Utara, seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, Islandia, Kanada, dan Rusia bagian utara, biasanya memegang prinsip sekularisme yang sangat kuat dalam

[296] Muhammad Ridwan Lubis, *Pendidikan Islam di Tengah Tantangan Globalisasi*, (Medan: Pustaka Madani, 2020), hlm. 112.

[297] Siti Zubaidah, Pendidikan Islam dalam Konteks Minoritas Muslim di Negara Barat, *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 58.

[298] Fadli Ar-Rahman, *Pendidikan Islam dalam Sistem Multikultural: Tantangan dan Solusi*, (Bandung: Mizan, 2021), hlm. 76.

sistem pendidikan mereka. Meskipun demikian, mereka juga dihadapkan pada kenyataan bahwa ada komunitas minoritas, terutama komunitas Muslim, yang memerlukan perhatian khusus dalam hal akses terhadap pendidikan agama mereka.

Secara umum, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di negara-negara ini dapat dikategorikan dalam dua model utama. Pertama, model yang lebih inklusif dan mendukung keberagaman agama, yang mengakomodasi pendidikan agama Islam dalam kerangka multikulturalisme. Negara seperti Swedia dan Kanada cenderung memberi ruang bagi komunitas Muslim untuk mengadakan sekolah-sekolah Islam atau program pendidikan berbasis agama dalam sistem pendidikan umum. Sebagai contoh, di Swedia, ada sekolah-sekolah yang menyediakan pelajaran agama Islam sebagai bagian dari kurikulum, dan ada pula pelajaran tentang budaya dan sejarah Islam yang diperkenalkan di sekolah-sekolah umum.[299] Di Kanada, terutama di wilayah yang memiliki populasi Muslim yang cukup besar seperti Toronto, banyak sekolah umum yang bekerja sama dengan komunitas Muslim untuk menyediakan pendidikan Islam bagi siswa Muslim, baik melalui kelas-kelas agama di luar jam sekolah maupun dengan menawarkan kurikulum yang lebih inklusif terhadap pelajaran agama.

Kedua, model kebijakan pendidikan Islam yang lebih terbatas, di mana kebijakan pendidikan agama sangat bergantung pada kebijakan lokal dan lebih terfokus pada pendidikan Islam di luar sistem pendidikan negara. Di negara seperti Norwegia dan Finlandia, yang cenderung lebih mengutamakan pendidikan sekuler, pendidikan Islam banyak dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan swasta atau komunitas Islam. Di negara-negara ini, ada sejumlah madrasah dan sekolah Islam yang berdiri sendiri, di luar sistem pendidikan negara, yang memberikan pendidikan agama dan keagamaan kepada anak-anak Muslim.[300] Meskipun demikian, beberapa negara seperti Finlandia memberikan kelonggaran dengan memungkinkan siswa Muslim untuk mendapatkan izin khusus untuk melaksanakan ibadah seperti shalat selama jam pelajaran, tetapi ini

[299] Tika Asmarani, *Kebijakan Pendidikan Islam di Negara-negara Barat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2022), hlm. 98.

[300] Alia Hidayah, *Pendidikan Islam di Negara-negara Minoritas Muslim*, (Jakarta: Alvabet, 2020), hlm. 123.

tetap bergantung pada kebijakan pemerintah setempat dan kondisi sekolah.

Menurut beberapa ahli, kebijakan pendidikan Islam di negara-negara dengan minoritas Muslim sangat bergantung pada sikap negara terhadap kebebasan beragama dan pengakuan terhadap keberagaman. Menurut Suyatno dalam bukunya Pendidikan Islam dan Pluralisme di Indonesia, pendidikan Islam harus dilihat sebagai hak dasar bagi umat Muslim di negara-negara minoritas. Negara harus menciptakan kebijakan yang memungkinkan pendidikan agama berjalan seiring dengan pendidikan umum, tanpa mengesampingkan kualitas pendidikan itu sendiri. Ini sangat penting, karena pendidikan agama akan memberikan fondasi moral dan etika yang dibutuhkan oleh generasi muda.[301] Munir dalam bukunya Islam dan Kebijakan Pendidikan di Negara Multikultural menambahkan bahwa dalam konteks negara-negara yang sangat sekuler, seperti yang ada di Kutub Utara, kebijakan yang mengakomodasi keberagaman agama perlu didorong lebih lanjut agar pendidikan Islam dapat diakses oleh semua pihak, bukan hanya melalui lembaga-lembaga swasta, tetapi juga dalam bentuk integrasi dengan sistem pendidikan nasional.[302]

Pendidikan Islam di negara-negara yang terletak di kawasan Kutub Utara, meskipun tidak memiliki mayoritas Muslim, telah menunjukkan berbagai bentuk kebijakan yang unik dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan bagi umat Islam. Sebagai berikut, yaitu:

a. Model Inklusif (Multikulturalisme Positif)
    1) Negara seperti Swedia dan Kanada memberikan ruang pendidikan Islam di sekolah umum.
    2) Kurikulum agama Islam tersedia secara resmi dan diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional.
    3) Sekolah umum bekerja sama dengan komunitas Muslim untuk mendukung kegiatan keagamaan.
b. Model Terbatas (Sekularisme Ketat)
    1) Negara seperti Norwegia dan Finlandia membatasi pendidikan

[301] Suyatno, *Pendidikan Islam dan Pluralisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 112.

[302] Munir Mulkhan, *Islam dan Kebijakan Pendidikan di Negara Multikultural*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2021), hlm. 154.

agama hanya di luar sistem sekolah negara.

2) Pendidikan Islam hanya bisa dilakukan melalui madrasah komunitas dan lembaga swasta.
3) Izin ibadah (seperti shalat) di sekolah umum tergantung pada kebijakan lokal masing-masing.

c. Ketergantungan pada Komunitas Lokal
   1) Pendidikan Islam sebagian besar didirikan dan dijalankan oleh komunitas Muslim sendiri tanpa bantuan negara.
   2) Pendanaan, kurikulum, dan tenaga pendidik berasal dari inisiatif lokal.
d. Regulasi Ketat terhadap Lembaga Pendidikan Islam
   1) Negara-negara Kutub Utara menerapkan aturan ketat dalam pendirian sekolah agama.
   2) Kurikulum harus tetap dalam standar sekuler nasional, sehingga pelajaran agama hanya sebagai pelengkap.
e. Keterbatasan SDM dan Materi Kontekstual
   1) Pemerintah tidak menyediakan pelatihan guru pendidikan Islam.
   2) Materi ajar seringkali tidak kontekstual dengan budaya lokal dan iklim sosial masyarakat setempat.

Dalam hal ini, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melestarikan agama, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk identitas keagamaan yang kuat bagi generasi muda. Oleh karena itu, kebijakan yang inklusif, meskipun terbatas, sangat diperlukan agar umat Islam di negara-negara ini dapat menjalankan ibadah mereka dengan baik, sambil tetap mengintegrasikan diri dalam masyarakat yang lebih luas.

Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan pendidikan Islam di negara-negara Kutub Utara menunjukkan dua model utama, yaitu model inklusif yang mengakomodasi pendidikan Islam dalam kerangka multikulturalisme (seperti di Swedia dan Kanada yang menyediakan pelajaran agama Islam dalam kurikulum sekolah umum), dan model yang lebih terbatas di mana pendidikan Islam bergantung pada kebijakan lokal dan difokuskan di luar sistem pendidikan negara (seperti di Norwegia dan Finlandia yang lebih mengutamakan pendidikan sekuler dengan pendidikan Islam banyak dilakukan melalui lembaga swasta atau komunitas). Meskipun menghadapi tantangan dalam negara-negara yang

cenderung sekuler, pendidikan Islam tetap diperjuangkan sebagai hak dasar umat Muslim minoritas yang berfungsi tidak hanya untuk melestarikan agama tetapi juga membentuk identitas keagamaan yang kuat bagi generasi muda, sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional.

C. Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Islam Di Wilayah Kutub Utara

Pelaksanaan pendidikan Islam di wilayah Kutub Utara menghadapi beragam tantangan yang sangat kompleks, baik dari sisi lingkungan geografis, kebijakan negara, maupun sosial budaya masyarakat setempat. Wilayah Kutub Utara yang dikenal dengan cuaca ekstrem dan kondisi siang malam yang tidak menentu, menjadi hambatan tersendiri dalam proses pendidikan. Dalam beberapa bulan, wilayah ini mengalami siang hari yang berlangsung hampir 24 jam, sedangkan pada bulan lainnya malam berlangsung sangat lama. Hal ini tidak hanya memengaruhi jadwal aktivitas belajar-mengajar, tetapi juga mempersulit penyesuaian waktu ibadah dan pelaksanaan pendidikan berbasis Islam yang biasanya mengacu pada waktu-waktu tertentu.[303] Dalam konteks ini, penyesuaian terhadap kalender pendidikan dan waktu ibadah menjadi tantangan pertama yang harus dihadapi oleh institusi pendidikan Islam di wilayah tersebut.

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang umumnya bersifat sekuler di negara-negara Kutub Utara. Negara-negara seperti Norwegia, Swedia, Finlandia, Islandia, Kanada, dan Rusia bagian utara memiliki sistem pendidikan nasional yang tidak memasukkan unsur agama dalam kurikulum formal. Oleh karena itu, pendidikan Islam sering kali hanya dapat dijalankan dalam ranah informal atau melalui lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh komunitas Muslim lokal. Menurut Nasir Fadillah dalam bukunya Politik Hukum Pendidikan Islam, negara dengan prinsip sekularisme cenderung menempatkan agama sebagai urusan privat, sehingga pendidikan agama tidak mendapatkan porsi yang proporsional dalam kebijakan pendidikan nasional. Hal ini

[303] Zahruddin Latief, *Pendidikan Islam dan Globalisasi Sosial Budaya*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 2020), hlm. 88.

berdampak pada terbatasnya dukungan anggaran, tenaga pendidik, dan bahan ajar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.[304]

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pendidikan Islam. Komunitas Muslim di wilayah Kutub Utara umumnya masih dalam jumlah kecil dan baru berkembang, sehingga jumlah guru agama atau ustaz yang memiliki latar belakang pendidikan formal dalam studi Islam sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan banyak lembaga pendidikan Islam hanya mengandalkan tenaga sukarelawan atau pendidik dari kalangan komunitas itu sendiri, yang belum tentu memiliki kualifikasi pedagogik yang memadai. Dalam pandangan Moch. Syuhudi Ismail, keberhasilan pendidikan Islam sangat bergantung pada kualitas pendidik, karena mereka adalah teladan utama bagi peserta didik dalam hal ilmu dan akhlak. Oleh karena itu, rendahnya jumlah dan kualitas tenaga pendidik menjadi penghambat serius dalam pelaksanaan pendidikan Islam yang efektif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.[305]

Selain itu, tantangan budaya dan sosial juga menjadi hambatan tersendiri. Masyarakat di negara-negara Kutub Utara umumnya sangat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender dan kebebasan individu, yang kadang bertentangan dengan beberapa praktik dalam pendidikan Islam, seperti pembagian peran laki-laki dan perempuan atau pemisahan ruang belajar berdasarkan jenis kelamin. Menurut Nurhadi Hasan dalam kajian tentang adaptasi pendidikan Islam di lingkungan sekuler, pendidikan Islam di wilayah mayoritas non-Muslim harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai prinsipil yang menjadi ruh dalam pendidikan Islam itu sendiri.[306] Oleh karena itu, proses negosiasi budaya menjadi suatu hal yang tidak terelakkan dalam upaya menjalankan pendidikan Islam secara kontekstual dan moderat.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan fasilitas dan materi ajar yang kontekstual dengan kebutuhan peserta didik di lingkungan Kutub Utara. Sebagian besar materi ajar yang digunakan berasal dari

---

[304] Nasir Fadillah, *Politik Hukum Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm. 93.

[305] Moch. Syuhudi Ismail, *Fundamental Pendidikan Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pilar Nusantara, 2022), hlm. 105.

[306] Nurhadi Hasan, *Adaptasi Pendidikan Islam di Lingkungan Sekuler*, (Surabaya: Lintas Ilmu, 2021), hlm. 67.

negara-negara Islam, seperti Indonesia, Mesir, atau negara-negara Timur Tengah, yang konteks sosial, budaya, dan lingkungannya sangat berbeda dengan realitas kehidupan di negara-negara Kutub Utara. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara materi ajar dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga menyulitkan proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka.[307] Pendidikan Islam yang berhasil harus mampu membumikan ajarannya sesuai dengan realitas kehidupan lokal tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam penyusunan kurikulum dan materi pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan aplikatif.

Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pendidikan Islam di wilayah Kutub Utara membutuhkan strategi yang tepat, adaptif, dan kolaboratif. Strategi ini harus mencakup penguatan kapasitas pendidik, penyesuaian waktu pembelajaran dan ibadah, penyusunan materi ajar kontekstual, serta dukungan kebijakan dari pemerintah setempat yang bersifat akomodatif. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan realistis, pendidikan Islam di wilayah yang penuh tantangan ini dapat tetap hidup dan berkembang.

D. Relevansi Q.S. An-Nur Ayat 55 dalam Memperjuangkan Pendidikan Islam di Negara-negara Kutub Utara

Relevansi Q.S. An-Nur ayat 55 dalam memperjuangkan pendidikan Islam di negara-negara Kutub Utara sangat penting untuk dipahami secara mendalam karena ayat ini memberikan jaminan ilahiah kepada kaum Muslimin bahwa mereka akan diberikan kekuasaan dan kemantapan untuk menjalankan agama di mana pun mereka berada, asalkan mereka tetap beriman dan beramal saleh. Dalam ayat tersebut Allah berfirman:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاۗ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔاۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٥٥

Artinya: *"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa*

[307] Fahri Abdillah, *Tantangan Pendidikan Islam di Negara Minoritas Muslim*, (Malang: UIN Maliki Press, 2022), hlm. 112.

Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa tetap kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (Q.S. An-Nur: 55)

Ayat ini memberikan semangat dan motivasi yang sangat kuat bagi umat Islam, termasuk bagi komunitas Muslim yang tinggal di wilayah-wilayah minoritas seperti Kutub Utara, untuk terus memperjuangkan eksistensi dan kelangsungan pendidikan Islam. Meskipun mereka hidup dalam kondisi geografis yang ekstrem dan kebijakan pemerintahan yang cenderung sekuler, semangat yang terkandung dalam ayat ini mengajarkan bahwa keimanan dan amal saleh merupakan kunci utama untuk memperoleh kemantapan dalam menjalankan syariat, termasuk dalam bidang pendidikan.

Menurut Hasan Basri dalam bukunya Tafsir Tematik Pendidikan Islam, ayat ini mencerminkan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan masyarakat yang kokoh dalam beragama. Pendidikan Islam, katanya, tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang kuat secara spiritual dan mampu mempertahankan ajaran Islam dalam kondisi sosial yang menantang.[308] Oleh karena itu, memperjuangkan pendidikan Islam di negara-negara Kutub Utara adalah wujud nyata dari pengamalan Q.S. An-Nur ayat 55, yaitu usaha kolektif untuk meneguhkan agama Allah dalam berbagai situasi dan tempat.

Pendapat ini senada dengan Asep Abdullah dalam jurnalnya Integrasi Nilai-nilai Tauhid dalam Pendidikan Minoritas Muslim, yang menyebut bahwa umat Islam di negara minoritas tidak boleh berpangku tangan terhadap tantangan eksternal. Mereka justru harus menjadikan keterbatasan sebagai motivasi untuk memperkuat sistem

[308] Hasan Basri, *Tafsir Tematik Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2020), hlm. 135.

pendidikan berbasis tauhid sebagai manifestasi dari janji Allah. Menurutnya, ayat ini merupakan inspirasi spiritual bagi setiap Muslim dalam melakukan perlawanan secara damai terhadap marginalisasi, termasuk dalam bentuk pendidikan yang tidak mengakomodasi nilai Islam.[309]

Sementara itu, Nurul Huda menegaskan dalam jurnal Dakwah dan Pendidikan Islam Global bahwa makna dari Q.S. An-Nur ayat 55 tidak hanya bersifat eskatologis, tetapi juga operasional. Artinya, umat Islam dituntut untuk berikhtiar nyata dalam membangun peradaban Islam, termasuk dengan mendirikan institusi pendidikan Islam di wilayah-wilayah yang secara struktural tidak berpihak pada agama. Dalam konteks ini, pendidikan Islam menjadi medan perjuangan umat Islam untuk memastikan nilai-nilai keimanan dan akhlak tetap hidup dan ditanamkan pada generasi muda Muslim, meskipun mereka hidup jauh dari negara-negara mayoritas Islam.[310]

Makna "Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka" menunjukkan bahwa janji Allah tidak bersifat pasif, melainkan menuntut adanya usaha dari kaum Muslimin. Maka dari itu, memperjuangkan lembaga pendidikan Islam, memperkuat kurikulum berbasis nilai-nilai tauhid, membentuk guru-guru Muslim yang andal, serta membangun komunitas belajar yang solid di Kutub Utara merupakan bentuk dari aktualisasi janji tersebut. Pendidikan Islam di negara-negara Kutub Utara bukan hanya tentang pengajaran, melainkan perjuangan spiritual dan sosial dalam menjaga eksistensi iman dan nilai Islam di tengah keterbatasan.

Dapat disimpulkan bahwa, dengan menjadikan Q.S. An-Nur ayat 55 sebagai pondasi perjuangan, umat Islam di Kutub Utara memiliki keyakinan teologis bahwa segala upaya mereka tidak sia-sia. Justru dari situ muncul kekuatan kolektif yang mampu melahirkan generasi Muslim yang tangguh, berilmu, dan tetap

[309] Asep Abdullah, Integrasi Nilai-nilai Tauhid dalam Pendidikan Minoritas Muslim, *Jurnal Tarbiyah dan Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 48.

[310] Nurul Huda, Dakwah dan Pendidikan Islam Global: Upaya Penegakan Nilai Islam di Negara Minoritas, *Jurnal Dakwah Islamiyah*, Vol. 4, No. 1, (Jakarta: STDI Imam Syafi'i Press, 2022), hlm. 71.

menjaga jati dirinya sebagai seorang Muslim di tengah masyarakat multikultural dan plural.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di negara-negara Kutub Utara merupakan perjuangan minoritas Muslim mempertahankan identitas keagamaan di lingkungan sekuler. Meski menghadapi tantangan geografis ekstrem, keterbatasan tenaga pendidik, dan kebijakan pendidikan sekuler, komunitas Muslim tetap menjalankan pendidikan Islam melalui madrasah komunitas, pengajian mingguan, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai alternatif pembelajaran.

Kebijakan pendidikan Islam menunjukkan dua pola utama: model inklusif yang mengakomodasi pendidikan Islam dalam kerangka multikulturalisme (Swedia dan Kanada), serta model terbatas yang mengandalkan lembaga swasta atau komunitas (Norwegia dan Finlandia). Perbedaan ini dipengaruhi oleh sikap negara terhadap kebebasan beragama dan pengakuan keberagaman yang menentukan integrasi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional.

Tantangan pelaksanaan mencakup faktor geografis, kebijakan sekuler, keterbatasan SDM kompeten, perbedaan budaya, dan minimnya materi kontekstual. Menghadapinya diperlukan strategi adaptif dan kolaboratif, termasuk penguatan kapasitas pendidik, penyesuaian metode pembelajaran, dan inovasi kurikulum yang relevan dengan kondisi lokal.

Q.S. An-Nur ayat 55 menjadi landasan spiritual yang memberikan inspirasi bagi komunitas Muslim untuk memperjuangkan eksistensi pendidikan Islam. Ayat ini menegaskan bahwa dengan keimanan dan amal saleh, Allah memberikan kemantapan dalam menjalankan agama meski dalam kondisi minoritas. Perjuangan ini bukan sekadar upaya edukatif, tetapi manifestasi komitmen teologis untuk meneguhkan nilai-nilai Islam dalam membentuk generasi Muslim yang tangguh dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Fahri. (2022). *Tantangan pendidikan Islam di negara minoritas Muslim*. Malang: UIN Maliki Press.

Abdullah, Asep. (2021). Integrasi nilai-nilai tauhid dalam pendidikan minoritas Muslim. *Jurnal Tarbiyah dan Pendidikan Islam*, 5(2), 48. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Al-Abrasyi, M. A. (2022). *Dasar-dasar pokok pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa.

Antonio, M. S. (2020). *Islamic education in the multicultural society*. Jakarta: Tazkia Publishing.

Ar-Rahman, Fadli. (2021). *Pendidikan Islam dalam Sistem Multikultural: Tantangan dan Solusi.* Bandung: Mizan.

Asmarani, Tika. (2022). *Kebijakan Pendidikan Islam di Negara-negara Barat*. Surabaya: Bina Ilmu.

Basri, Hasan. (2020). *Tafsir tematik pendidikan Islam*. Yogyakarta: LKiS.

Fadillah, Nasir. (2021). *Politik hukum pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Hasan, Nurhadi. (2021). *Adaptasi pendidikan Islam di lingkungan sekuler*. Surabaya: Lintas Ilmu.

Hidayah, Alia. (2020). *Pendidikan Islam di Negara-negara Minoritas Muslim*. Jakarta: Alvabet.

Huda, Nurul. (2022). Dakwah dan pendidikan Islam global: Upaya penegakan nilai Islam di negara minoritas. *Jurnal Dakwah Islamiyah*, 4(1), 71. Jakarta: STDI Imam Syafi'i Press.

Ismail, Moch. Syuhudi. (2022). *Fundamental pendidikan Islam kontemporer*. Yogyakarta: Pilar Nusantara.

Langgulung, H. (2001). *Pendidikan Islam dan peranannya dalam pengembangan kepribadian Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Latief, Zahruddin. (2020). *Pendidikan Islam dan globalisasi sosial budaya*. Jakarta: Pustaka Rakyat.

Lubis, M. R. (2020). *Pendidikan Islam di tengah tantangan globalisasi*. Medan: Pustaka Madani.

Mulkhan Munir. (2021). *Islam dan Kebijakan Pendidikan di Negara Multikultural.* Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Suyatno. (2020). *Pendidikan Islam dan Pluralisme di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zubaidah, S. (2020). Pendidikan Islam dalam konteks minoritas Muslim di negara barat. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 4(1), 58.

BAB 17
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI NEGARA ASIA TIMUR TENGAH

(Fiona Hayatun Nupus 2220203047)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pendidikan Islam di negara-negara Asia Timur Tengah memiliki sejarah panjang yang berakar pada perkembangan peradaban Islam klasik. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk membentuk identitas keislaman dan menjaga stabilitas sosial. Negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang beragam, bergantung pada faktor historis, sosial, ekonomi, dan politik masing-masing[311].

Di Arab Saudi, pendidikan Islam berfokus pada pengajaran aqidah berdasarkan pemahaman Salafi. Kementerian Pendidikan berperan besar dalam menentukan kurikulum berbasis syariat, terutama melalui mata pelajaran tauhid, fikih, hadis, dan tafsir. Namun, sejak program Saudi Vision 2030, negara ini mulai melakukan reformasi pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan ekonomi modern dan tantangan globalisasi, seperti meningkatkan penguasaan teknologi dan bahasa asing, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam[312].

Sementara itu, Mesir, melalui lembaga bersejarah seperti Al-Azhar, mempertahankan tradisi pendidikan Islam klasik, namun juga memperkenalkan reformasi untuk memperkuat aspek-aspek seperti pemikiran kritis dan dialog antaragama. Sejak masa Presiden Gamal Abdel Nasser, pemerintah Mesir mengintegrasikan pendidikan Islam

---

[311] Ahmad Suryana, *Pendidikan Islam Global: Dinamika, Strategi, dan Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 85–93.

[312] **Mohammad Asadullah Niaz** dan **Shujaat Arif,** (2018). *Education Policy in Saudi Arabia: Between Modernization and Preservation of Islamic Values*, *Education in the Arab World* (London: Bloomsbury Academic, 2018), hlm. 125–142

dengan kurikulum nasional umum, namun tetap menjaga otonomi Al-Azhar dalam mengembangkan standar pendidikan keagamaan[313]

Di Qatar, kebijakan pendidikan Islam mengalami transformasi besar melalui program Education for a New Era. Kebijakan ini bertujuan memperbarui metode pembelajaran, memperkenalkan standar internasional, dan mendorong inovasi, namun tetap mempertahankan Islam sebagai fondasi moral masyarakat. Pendidikan Islam diintegrasikan dalam sistem sekolah nasional dengan pendekatan berbasis keterampilan abad ke-21[314].

Meski masing-masing negara memiliki pendekatan berbeda, terdapat benang merah dalam kebijakan pendidikan Islam di Asia Timur Tengah: yakni upaya menjaga keseimbangan antara tradisi keagamaan dan kebutuhan modernisasi. Tantangan yang dihadapi meliputi resistensi konservatif terhadap perubahan kurikulum, politisasi pendidikan agama, serta kebutuhan akan peningkatan kualitas guru pendidikan Islam.

Kajian tentang kebijakan pendidikan Islam di Asia Timur Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada isi kurikulum, tetapi juga pada strategi implementasi, pelatihan guru, dukungan masyarakat, dan kemampuan negara dalam beradaptasi terhadap perubahan global tanpa kehilangan identitas budaya dan religius. Dengan demikian, studi ini penting untuk memahami bagaimana dinamika pendidikan Islam di kawasan ini turut membentuk arah masa depan dunia Islam secara global [315].

B. Rumusan masalah

a. Bagaimana karakteristik kebijakan pendidikan Islam di negara-negara Asia Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Mesir?
b. Apa saja faktor yang memengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam di kawasan arab Saudi dan mesir?

---

[313] **Helen Boyle,** (2004), *Modernization of Education and Its Discontents: Lessons from Al-Azhar University*, *Comparative Education Review*, Vol 48 (4), hlm. 408–429.

[314] **Michael Romanowski dan Ramzi Nasser,** (2012). *How Critical Thinking Is Taught in Qatari Independent Schools' Social Studies Classrooms: Teachers' Perspectives*, *International Journal of Education*, Vol 4 (1), hlm. 68–84.

[315] **Ayesha Al Kaabi dan Abdullah Al-Hebsi,** (2015*), Reforming Islamic Education in the United Arab Emirates: Some Social and Political Implications*, *International Journal of Educational Development*, vol 41, hlm. 123–131.

c. Bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan nasional?
d. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam di arab Saudi dan mesir pada era globalisasi?

C. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen dari Majlis agama Islam di asia timur tengah, serta artikel akademik yang relevan dengan topik kebijakan pendidikan Islam di asia timur tengah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menelaah kebijakan-kebijakan pendidikan Islam, perkembangan madrasah, serta respons komunitas Muslim terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika pendidikan Islam dalam konteks negara multikultural dan sekuler seperti Arab Saudi, Mesir, dan Qatar.

Tujuan dari metodologi ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana kebijakan pendidikan Islam di asia timur tengah dirancang, diterapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim, berdasarkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber terpercaya.

TEORI

Penelitian serupa terkait kebijakan Pendidikan islam di negara asia timur tengah seperti, Pendidikan Islam di Arab Saudi mengalami ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional Salafi dan kebutuhan untuk melakukan modernisasi demi memenuhi tuntutan ekonomi global (Mohammad Asadullah Niaz & Shujaat Arif, 2018) dengan judul Education Policy in Saudi Arabia: Between Modernization and Preservation of Islamic Values. Memberikan tinjauan umum tentang pendidikan di dunia Arab, termasuk kebijakan pendidikan Islam dan bagaimana negara-negara Timur Tengah mengadaptasi sistem pendidikan mereka untuk menjawab perubahan sosial dan ekonomi (Llorent-Bedmar 2018)

dengan judul Education in the Arab World: A Contemporary Review. Mengeksplorasi dinamika hubungan antara modernitas dan pendidikan Islam di Arab Saudi, serta bagaimana kebijakan pendidikan berusaha menjawab tantangan global dengan tetap menjaga ajaran Islam (Amani Hamdan 2010) dengan judul The Relationship between Islamic Education and Modernity: The Case of Saudi Arabia.

PEMBAHASAN

A. Karakteristik kebijakan pendidikan Islam di negara-negara Asia Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Mesir.

1. Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara Islam yang mempertahankan ajaran dan praktik keagamaan yang sudah ada, baik dari segi sosial maupun keagamaan. Dengan budaya yang beragam, di mana berdasarkan pada kesukuan dan berbagai aliansi dalam Islam. Hal ini menjadikan budaya di negara ini berbeda, terstruktur dan sistematis. Seperti di negara-negara muslim lainnya, pendidikan Islam di Arab Saudi sangatlah penting. Tujuan utama pendidikan di negara ini adalah mengajarkan normanorma agama, ekonomi, dan sosial kepada siswa-siswinya, serta mengurangi angka buta huruf yang tinggi. Sejalan dengan pandangan Paulo Freire, seorang pakar pendidikan yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan sebenarnya adalah untuk memulihkan hakikat kemanusiaan individu, sehingga mereka terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, dan keterbelakangan[316].

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemajuan atau kemunduran peradaban suatu masyarakat muslim sangat bergantung pada sistem pendidikan yang ada diterapkan di Negara tersebut, artinya memiliki upaya dan usaha dalam memberikan pendidikan yang baik. Di mana Islam telah menyebar secara signifikan terutama melalui progres pendidikan.

Di Arab Saudi, pendidikan Islam telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan perkembangan gerakan dakwah Islamiyah, Terutama pada zaman Abbasiyah dan Umayyah ketika peradaban Islam mencapai masa

[316] Abdul Al-Mahfudz, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Global*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 34-36

kejayaannya.Seiring dengan perkembangan zaman, karakteristik dan pola pendidikan Islam terus mengalami perubahan, dari tradisional menjadi lebih logis, lebih kontemporer (modern) dalam hal kurikulum, struktur organisasi, metode pembelajaran, dan aspek lainnya[317].

Sistem pendidikan Islam di Arab Saudi menjadi sorotan beberapa negara, terutama negara maju dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Kota Mekah dan Madinah, yang merupakan bagian dari provinsi di Arab Saudi, dikenal sebagai pusat studi ilmu-ilmu keagamaan. Sejak masa Nabi Muhammad Saw, kedua kota ini telah menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam, terutama dalam bidang hadis dan fikih[318].

Dari pemaparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Arab Saudi memiliki peran besar dalam perkembangan pendidikan Islam di berbagai negara Muslim di seluruh dunia. Oleh karena itu, negara ini diharapkan terus menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah tanpa terpengaruh oleh budaya luar. Dalam konteks ini, penulis berusaha memaparkan dan mencoba memberikan informasi terkait sistem pendidikan Islam di Arab Saudi, mencakup profil singkat negara, sejarah, kurikulum, tujuan pendidikan, pendidikan perempuan, peran pemerintah, metode pembelajaran, serta perbedaan dan pengaruh pendidikan Islam di Arab Saudi.[319]

Tujuan Pendidikan islam di arab Pendidikan telah menjadi perhatian utama di Saudi Arabia, khususnya semenjak tahun 1954 M ketika kementerian pendidikan dibentuk. Rencana pembangunan telah memformalkan maksud ini. Sasaran-sasarannya, diarahkan ke arah arus pembangunan nasional. Dalam upaya pembangunan nasional, sistem pendidikan didasarkan pada tiga tujuan utama: Pertama, untuk memberikan sekurang-

[317] Abdul Rahman Al-Qarni, (2021). *Perkembangan Pendidikan Islam di Arab Saudi: Antara Tradisionalisme dan Modernitas*. Jurnal Pendidikan Islam Internasional, vol 9, no 2, hlm 145–160.

[318] Muhammad Nasrullah, *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 12

[319] Rosita, Noorthaibah, dan Khojir, Memperkuat Sistem Pendidikan Islam di Arab Saudi: Analisis Terhadap Kajian Literatur dan Best Practices, *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo* Vol 5, No 3, (2024), hlm 313-328.

kurangnya pendidikan dasar bagi seluruh penduduk. Kedua, untuk mempersiapkan murid-murid dengan keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi yang terus berubah; dan ketiga, untuk mendidik keimanan peserta didik, aspek praktek beragama, nilai-nilai serta kebudayaan Islam[320].

Sistem pendidikan di Arab Saudi memiliki empat karakteristik: Penekanannya adalah pada Islam dan karenanya bahasa Arab sebagai media untuk menyebarkan pengetahuan tentang Islam, Sistem pendidikan yang sangat sentralistik, Sekolah yang dipisahkan gender, dan Pelatihan sebagai perusahaan yang disponsori pemerintah[321].

2. Mesir

Mesir menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji karena disebabkan kompleksitas yang terjadi di negara ini. Mulai dari tradisi keilmuannya, Mesir merupakan poros utama para pencari ilmu dari berbagai negara dunia Islam, tanpa terkecuali Indonesia. Beberapa tahun terkahir ini sistem pendidikan perguruan Tinggi Islam di Indonesia nyaris merupakan copy paste dari Universitas Al-Azhar Cairo, yang merupakan icon utama pendidikan Islam yang tertua di Timur Tengah.

Negara Mesir, adalah sebuah negara yang diakui secara luas sebagai pusat budaya dan politik utama di wilayah Arab bagian Timur Tengah. Modernisasi pendidikan di Mesir bermula dari sebuah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon Bonaparte ketika terjadinya penaklukan Mesir. Dari hasil pemikiran yang dicapai Napoleon Bonaparte ini, banyak memberikan inspirasi yang terhadap para pembaharu Mesir di antaranya adalah Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Ali Pasha mereka melakukan pembaharuan pendidikan Islam di Mesir karena pendidikan merupakan tombak

[320] Witta Perdana Putri, Analisis Pendidikan di Arab Saudi dan Keunikannya Dibandingkan Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 3, No 1, (2025), Hal 45-55.

[321] A. Munir, Struktur dan Kurikulum Pendidikan Islam di Arab Saudi: Landasan dan Implementasi, *Instructional Development Journal (IDJ)*, Vol 6 No 3 (2023), hlm 309-316.

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bertumpu pada pemberdayaan semua komponen masyarakat[322].

Sejarah pendidikan di Mesir, khususnya Al-Azhar memiliki keterkaitan dengan dinamika keberagamaan Islam di tanah air dapat di saksikan dari kiprah para alumninya yang telah begitu banyak mengisi dan mengembangkan keilmuan yang mencakup semua aspek kehidupan sosial, politik, budaya dan keagamaan. Peran mereka tersebar mulai dari penceramah, akademisi, pengusaha, budayawan, penegak hukum dan politikus. Berbicara soal peran alumni Al-Azhar Mesir di Indonesia, hal tersebut tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam di tanah air. Mengingat, Al-Azhar merupakan institusi pendidikan yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pembaharu di dunia, sebagaimana telah diuraikan di atas, juga telah melahirkan para tokoh yang sama di Indonesia. Hampir semua tokoh Islam modern pernah belajar dengan para guru yang berijazah Al-Azhar[323].

Hubungan antara Indonesia dan Mesir telah berlangsung cukup lama, yaitu diperkirakan sejak saat orang Mesir menggunakan kapur yang berasal dari Barus di Pulau Sumatera sebagai salah satu bahan pengawet mumi di Mesir. Selanjutnya dalam perjalanan sejarah, Indonesia dan Mesir memiliki banyak persinggungan sejarah yang saling menguatkan satu sama lain seperti perkembangan Islam dan sejarah modernisasi negara dan pendidikan. Kedua, pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al Azhar mengajarkan paham keagamaan Islam yang sesuai dengan budaya Indonesia yang multikultur dan beragam[324].

B. Faktor yang memengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam di kawasan arab Saudi dan mesir,

a. Arab Saudi

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam di Arab Saudi yaitu sebgai berikut:

---

[322] Bambang Supradi, Potret Sistem Pendidikan Islam Di Mesir, *Tazkiya*, Vol. X No.2, (2021), hlm 57-67.

[323] Ahmad Saleh, (2015), Peran Alumni Al-Azhar dalam Perkembangan Islam di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol 20, no 2, hlm, 45-67.

[324] Muhammad Murtadlo, Hubungan Mesir-Indonesia Dalam Modernisasi Pendidikan Islam, *Al-Qalam* vol 24 No 2 (2018), hal. 297–306.

1. Ideologi Keagamaan, Arab Saudi menjadikan paham **Salafi-Wahhabi** sebagai dasar ideologis pendidikan Islam. Paham ini sangat mempengaruhi isi kurikulum, metode pembelajaran, dan tujuan pendidikan Islam yang menekankan pemurnian tauhid, penolakan terhadap bid'ah, dan ketaatan terhadap ulama.
2. Politik, Pendidikan Islam di Arab Saudi juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi politik keluarga kerajaan. Pengajaran agama Islam yang menekankan ketaatan pada ulil amri (penguasa) menjadi alat stabilisasi kekuasaan. Pendidikan digunakan untuk membentuk warga negara yang patuh, religius, dan tidak radikal secara politik.
3. Pengaruh globalisasi dan tekanan internasional, Setelah peristiwa 9/11, Saudi mendapat tekanan internasional untuk **mereformasi kurikulum agama** yang dianggap terlalu eksklusif dan intoleran. Hal ini mendorong Arab Saudi melakukan revisi kurikulum agar lebih moderat dan akomodatif terhadap nilai global[325].
4. Agenda modernisasi ekonomi, Melalui *Vision 2030*, pemerintah Saudi berusaha membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Hal ini mendorong reformasi pendidikan, termasuk pendidikan Islam, agar lebih selaras dengan **keterampilan abad 21,** literasi digital, dan kewirausahaan.
5. Peran ulama dan Lembaga keagamaan, Para ulama memiliki pengaruh besar dalam sistem pendidikan, terutama di bidang kurikulum agama. Majelis Ulama Tinggi (Hai'ah Kibar al-'Ulama) sering menjadi penentu arah reformasi pendidikan Islam. Hubungan antara kerajaan dan ulama merupakan faktor kunci dalam menentukan isi, metode, dan tujuan pendidikan Islam.

b. Mesir

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam di Arab Saudi yaitu sebgai berikut:

1. Faktor historis dan kultural Mesir memiliki akar sejarah panjang dalam dunia pendidikan Islam, terutama melalui Universitas Al-Azhar, yang merupakan salah satu institusi

[325] Michaela Prokop, *Saudi Arabia: The Politics of Education*, *International Affairs*, Vol 79, No 1, (2003), hal. 77–89.

Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Al-Azhar memiliki peran dominan dalam menentukan arah pendidikan Islam di Mesir. Tradisi ini membuat pendidikan Islam di Mesir tidak bisa dilepaskan dari warisan keilmuan klasik.

2. Faktor politik, Pemerintah Mesir, terutama sejak era Presiden Gamal Abdel Nasser (1950-an), telah mengintervensi pendidikan Islam untuk menjadikannya bagian dari sistem nasionalisme sekuler. Pemerintah menginginkan agar pendidikan agama Islam tidak hanya mendidik para ulama, tetapi juga menjadi alat kontrol sosial dan stabilitas politik.
3. Faktor sosial, Mesir memiliki populasi Muslim terbesar di dunia Arab, dengan keberagaman latar belakang sosial. Hal ini mendorong kebutuhan akan sistem pendidikan Islam yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang heterogen, dari perkotaan hingga pedesaan.
4. Ekonomi dan globalisasi, Kebutuhan untuk bersaing di tingkat global dan menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan pasar kerja global membuat Mesir melakukan reformasi kurikulum, termasuk pada pendidikan Islam. Pendidikan agama tidak hanya diajarkan dalam konteks ibadah, tetapi juga dikaitkan dengan etika kerja, kewirausahaan, dan ilmu terapan[326].

C. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan nasional di arab dan mesir.

a. Arab Saudi

Pemerintah Arab Saudi telah menjadikan Islam sebagai prioritas kebijakan luar negeri. Islam adalah pedoman untuk legitimasi kegiatan negara atau negara manapun. Konstitusi Arab Saudi adalah Islam, bahkan bendera memiliki kata tauhid dan pedang sebagai simbol jihad. Di Arab Saudi, nilai-nilai Islam menjadi inti utama dari keseluruhan sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam tidak hanya hadir sebagai mata pelajaran tersendiri seperti *tauhid*, *fikih*, *hadis*, dan *tajwid*, tetapi juga diintegrasikan dalam berbagai aspek kurikulum lainnya, termasuk

[326] Vicente, *Education in the Arab World: A Contemporary Review, International Journal of Educational Development*, *International Education Studies*, Vol 7, No 12, (2014), hal. 95–102.

bahasa Arab, sejarah, bahkan dalam pendekatan pembelajaran sains dan matematika.

Kurikulum diatur secara ketat oleh Kementerian Pendidikan dan Komite Tinggi Urusan Pendidikan Islam, yang bertugas memastikan seluruh materi sejalan dengan prinsip Salafisme Wahhabi, sebagai interpretasi dominan di negara tersebut. Namun, dalam dua dekade terakhir, terutama sejak diterapkannya program Saudi Vision 2030, pemerintah mulai melakukan reformasi untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan keterampilan abad ke-21[327].

Kementerian Pendidikan dan GAGE keduanya memiliki bagian yang menangani kurikulum, meskipun perubahan pada kurikulum sangat minim sejak lembaga ini didirikan. Kedua lembaga tersebut menyewa penulis untuk menyusun buku teks, yang kemudian dicetak dan didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Dengan cara ini, kurikulum yang diterapkan di seluruh Arab Saudi tetap seragam. Pelaksanaan kurikulum dipantau melalui berbagai cara, seperti melalui kepala sekolah, kunjungan oleh para inspektur dari kantor distrik, dan sistem ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang harus diajarkan setiap semester. Metode pengajaran tidak dapat diseragamkan dan bervariasi antar mata pelajaran. Guru-guru mata pelajaran agama lebih fokus pada hafalan dan jarang menggunakan peralatan pengajaran selain papan tulis. Guru bahasa Arab juga menggunakan papan tulis dan metode hafalan teks. Guru-guru mata pelajaran ilmu eksakta menggunakan laboratorium jika tersedia di sekolah. Namun, hampir semua laboratorium di sekolah kekurangan peralatan atau tenaga profesional, atau keduanya. Laboratorium bahasa umumnya hanya ada di sekolah-sekolah elit yang mengajarkan bahasa Inggris[328].

b. Mesir

Mesir menempuh pendekatan yang lebih plural dan moderat dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum nasional. Sistem pendidikan di Mesir terbagi dua: pendidikan

[327] Olayan, Huda, dan Abdulrahman Alhajji. "Dampak Visi Saudi 2030 terhadap Reformasi Pendidikan." *Jurnal Pengembangan Pendidikan Internasional, vol* 40, no. 3 (2021), hlm, 213-225

[328] *ibid*

umum yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, dan pendidikan Islam tradisional yang dikelola oleh Al-Azhar. Meski terpisah, nilai-nilai Islam tetap diintegrasikan dalam pendidikan umum melalui pengajaran akhlak, sejarah Islam, dan pelajaran agama Islam.

Al-Azhar sendiri memiliki peran penting dalam menjaga moderasi Islam melalui kurikulum yang mencakup tidak hanya ilmu agama seperti tafsir, fikih, dan ushul fiqh, tetapi juga ilmu umum seperti matematika, sains, dan bahasa asing. Kurikulumnya disesuaikan agar lulusan Al-Azhar mampu berkontribusi dalam konteks sosial dan ekonomi kontemporer, tanpa meninggalkan tradisi keilmuan Islam.

D. Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam di arab Saudi dan mesir pada era globalisasi

a. Arab Saudi

Arab Saudi menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara pelestarian nilai-nilai keislaman (khususnya paham Salafi/Wahhabi) dengan tuntutan globalisasi dan modernisasi pendidikan. Beberapa tantangan utamanya adalah:

1. Resistensi terhadap Reformasi Kurikulum, Banyak kalangan konservatif menolak perubahan kurikulum yang dianggap melemahkan identitas Islam. Upaya reformasi dalam kerangka *Saudi Vision 2030*, yang memperkenalkan pendidikan sains dan teknologi lebih kuat, ditentang oleh kelompok-kelompok yang khawatir terhadap "sekularisasi" pendidikan Islam.
2. Kurangnya Integrasi Ilmu Keislaman dengan Ilmu Modern, Pendidikan Islam masih cenderung terpisah dari pendidikan umum. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mempersiapkan lulusan yang religius namun juga kompeten dalam bidang profesional.
3. Keterbatasan Kritis dan Kreativitas, Sistem pendidikan Islam cenderung tekstual dan menghafal, kurang memberi ruang bagi

pengembangan berpikir kritis yang dibutuhkan dalam era globalisasi[329].

b. Mesir

Mesir, sebagai pusat pendidikan Islam klasik (melalui Al-Azhar), menghadapi tantangan dalam menjembatani antara pendidikan tradisional dan kebutuhan modernitas global. Tantangan utama yang dihadapi adalah:

1. Dominasi Pendidikan Tradisional, Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan Islam yang berpengaruh masih mempertahankan pendekatan klasik dalam kurikulum, sehingga sulit beradaptasi cepat dengan dinamika global.
2. Politik dalam Pendidikan Islam, Pendidikan Islam di Mesir sering menjadi alat politik, terutama setelah perubahan rezim. Ini menyebabkan kebijakan pendidikan sering berubah-ubah dan tidak berkelanjutan.
3. Ketimpangan antara Pendidikan Agama dan Umum, Lulusan dari lembaga pendidikan Islam sering mengalami kesulitan memasuki pasar kerja karena kurangnya keterampilan teknis dan profesional[330].

KESIMPULAN

Arab Saudi dan Mesir merupakan dua negara berpengaruh dalam perkembangan pendidikan Islam dunia. Arab Saudi mengembangkan sistem pendidikan Islam yang terstruktur dengan fokus pada pembentukan masyarakat beriman dan berakhlak melalui kurikulum berbasis dakwah Islamiyah yang terus dimodernisasi, termasuk dalam aspek metode pembelajaran dan kebijakan gender. Sementara itu, Mesir, melalui Universitas Al-Azhar, menjadi pusat keilmuan Islam moderat sejak lama. Modernisasi pendidikan di Mesir dimulai sejak era kolonial dan diperkuat oleh pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Keduanya menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sarana pemberdayaan umat. Kedua negara ini juga menjadi rujukan penting

[329] Faisal Al-Saadi, (2019). *Keadaan Pendidikan Islam di Arab Saudi: Menyeimbangkan Tradisi dengan Modernisasi*. Jurnal Reformasi Pendidikan Internasional, vol 29, no 1, hlm, 89-104.

[330] Boyle, *Memorization and Learning in Islamic Schools*. *Educating Citizens in Muslim Societies,* (New York: Teachers College Press, 2006), hlm. 123–145.

bagi negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, dalam mengembangkan pendidikan Islam yang moderat dan kontekstual.

Arah kebijakan pendidikan Islam di Arab Saudi dan Mesir dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual yang khas dari masing-masing negara. Di Arab Saudi, kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh ideologi keagamaan Salafi-Wahhabi yang menjadi dasar kurikulum dan metode pengajaran, dengan fokus pada pemurnian tauhid dan ketaatan terhadap ulama. Selain itu, pendidikan Islam juga dijadikan alat legitimasi politik untuk menopang kekuasaan keluarga kerajaan melalui penguatan nilai ketaatan pada ulil amri. Globalisasi dan tekanan internasional pasca peristiwa 9/11 turut mendorong reformasi kurikulum agar lebih moderat dan toleran. Agenda modernisasi ekonomi dalam kerangka Vision 2030 juga menuntut penyesuaian pendidikan Islam dengan keterampilan abad ke-21 dan literasi digital, sementara peran ulama tetap dominan dalam menentukan isi dan arah pendidikan. Sementara itu, di Mesir, kebijakan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh faktor historis dan kultural melalui dominasi Universitas Al-Azhar yang merepresentasikan tradisi keilmuan klasik Islam. Pemerintah Mesir secara politis turut mengintervensi pendidikan Islam untuk mengintegrasikannya dalam proyek nasionalisme sekuler dan sebagai alat kontrol sosial. Faktor sosial berupa keberagaman masyarakat serta kebutuhan ekonomi dan globalisasi juga mendorong reformasi kurikulum agar lebih inklusif dan relevan dengan tuntutan pasar kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan terapan.

Pendidikan Islam di Arab Saudi dan Mesir memiliki pendekatan yang berbeda dalam kebijakan dan implementasinya. Arab Saudi menjadikan Islam, khususnya paham Salafisme Wahhabi, sebagai inti dari sistem pendidikan nasional yang seragam dan diawasi ketat oleh negara, dengan fokus kuat pada hafalan dan nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspek kurikulum. Sementara itu, Mesir menerapkan pendekatan yang lebih plural dan moderat, dengan sistem pendidikan yang terbagi antara pendidikan umum dan pendidikan Islam tradisional Al-Azhar. Al-Azhar memainkan peran penting dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern, sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berperan dalam masyarakat kontemporer tanpa melepaskan akar keilmuannya dalam Islam.

Arab Saudi dan Mesir menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam di era globalisasi. Di Arab Saudi, tantangan utama mencakup resistensi terhadap reformasi kurikulum oleh kelompok konservatif, kurangnya integrasi antara ilmu keislaman dan ilmu modern, serta keterbatasan pengembangan berpikir kritis. Sementara itu, Mesir menghadapi dominasi pendekatan tradisional di lembaga seperti Al-Azhar, politisasi pendidikan Islam, dan ketimpangan antara pendidikan agama dan umum yang menyulitkan lulusan dalam dunia kerja. Kedua negara berjuang menyeimbangkan pelestarian nilai Islam dengan tuntutan modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Munir, Struktur dan Kurikulum Pendidikan Islam di Arab Saudi: Landasan dan Implementasi, *Instructional Development Journal (IDJ)*, Vol 6 No 3 (2023).

Al Kaabi, Ayesha dan Abdullah Al-Hebsi, (2015*), Reforming Islamic Education in the United Arab Emirates: Some Social and Political Implications*, *International Journal of Educational Development*, vol 41.

Al-Mahfudz, Abdul, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Global*, (Jakarta: Kencana, 2021).

Al-Saadi, Faisal, (2019). *Keadaan Pendidikan Islam di Arab Saudi: Menyeimbangkan Tradisi dengan Modernisasi*. Jurnal Reformasi Pendidikan Internasional, vol 29, no 1.

Asadullah, Mohammad Niaz dan **Shujaat Arif,** (2018). *Education Policy in Saudi Arabia: Between Modernization and Preservation of Islamic Values*, *Education in the Arab World* (London: Bloomsbury Academic, 2018).

Boyle, Helen, (2004), *Modernization of Education and Its Discontents: Lessons from Al-Azhar University*, *Comparative Education Review*, Vol 48 (4).

Boyle, *Memorization and Learning in Islamic Schools*. *Educating Citizens in Muslim Societies,* (New York: Teachers College Press, 2006).

Murtadlo, Muhammad, Hubungan Mesir-Indonesia Dalam Modernisasi Pendidikan Islam, *Al-Qalam* vol 24 No 2 (2018).

Nasrullah, Muhammad, *Sejarah Pendidikan Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Olayan, Huda, dan Abdulrahman Alhajji. "Dampak Visi Saudi 2030 terhadap Reformasi Pendidikan." *Jurnal Pengembangan Pendidikan Internasional, vol* 40, no. 3 (2021).

Perdana, Witta Putri, Analisis Pendidikan di Arab Saudi dan Keunikannya Dibandingkan Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 3, No 1, (2025).

Prokop, Michaela, *Saudi Arabia: The Politics of Education*, *International Affairs*, Vol 79, No 1, (2003).

Rahman, Abdul Al-Qarni, (2021). *Perkembangan Pendidikan Islam di Arab Saudi: Antara Tradisionalisme dan Modernitas*. Jurnal Pendidikan Islam Internasional, vol 9, no 2.

Romanowski, Michael dan Ramzi Nasser, (2012). *How Critical Thinking Is Taught in Qatari Independent Schools' Social Studies Classrooms: Teachers' Perspectives*, *International Journal of Education*, Vol 4 (1).

Rosita, Noorthaibah, dan Khojir, Memperkuat Sistem Pendidikan Islam di Arab Saudi: Analisis Terhadap Kajian Literatur dan Best Practices, *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Borneo* Vol 5, No 3, (2024).

Saleh, Ahmad, (2015), Peran Alumni Al-Azhar dalam Perkembangan Islam di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol 20, no 2.

Supradi, Bambang, Potret Sistem Pendidikan Islam Di Mesir, *Tazkiya*, Vol. X No.2, (2021).

Suryana, Ahmad, *Pendidikan Islam Global: Dinamika, Strategi, dan Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2020).

Vicente, *Education in the Arab World: A Contemporary Review, International Journal of Educational Development*, *International Education Studies*, Vol 7, No 12, (2014).

BAB 18
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA BENUA ASIA SELATAN

(Nyimas Andini Nurrahmawati-2220203035)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk di Benua Asia Selatan. Wilayah Asia Selatan, yang terdiri dari negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, dan Sri Lanka, memiliki sejarah panjang dan kompleks dalam konteks pendidikan Islam. Di tengah keragaman etnis, bahasa, dan budaya, kebijakan pendidikan Islam di masing-masing negara di Asia Selatan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, politik, dan sosial-ekonomi.[331]

Sejak masa kolonial hingga pasca-kolonial, kebijakan pendidikan Islam di Asia Selatan sering kali mengalami perubahan, baik yang mengarah pada peningkatan akses pendidikan maupun yang memunculkan tantangan besar, seperti ketimpangan sosial, diskriminasi terhadap kelompok minoritas Muslim, serta keterbatasan dalam sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, peran negara dalam mengatur pendidikan Islam juga sangat beragam, dengan beberapa negara memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan Islam, sementara yang lainnya lebih terpusat dan dikontrol oleh negara.[332]

Melihat kondisi tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan Islam di Benua Asia Selatan berkembang dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat Muslim di sana. Penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek-aspek kebijakan

[331] Zahira, & Al Faruq, Jejak Sejarah: Peradaban Islam di Asia Selatan dari Sebelum Masuk hingga Tersebarnya Islam. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 3, No. (5), hlm. 143

[332] Eva Tri Cahyanti. *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi*. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 2, No. (2), (2021), hlm. 181.

pendidikan Islam di negara-negara Asia Selatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.[333]

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah perkembangan kebijakan pendidikan islam di negara-negara asia selatan dari masa kolonial hingga pasca-kolonial?
b. Apasajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan islam di asia selatan?
c. Bagaimanakah dampak kebijakan pendidikan islam terhadap masyarakat muslim di benua asia selatan, terutama dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi?
d. Apasajakah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan islam di negara-negara asia selatan?
e. Bagaimanakah peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan islam di wilayah asia selatan?

C. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa dengan terstruktur dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Metode yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan di jurnal-jurnal yang relevan dan mempelajari serta memahami teori-teori yang ada pada beberapa literatur yang serupa dengan penelitian ini. Peneliti memanfaatkan sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan judul "*Kebijakan Pendidikan Islam Pada Benua Asia Selatan***"**

TEORI

Kebijakan pendidikan di Asia Selatan khususnya di India, Pakistan, dan Bangladesh menunjukkan kecenderungan marginalisasi terhadap pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini mendorong komunitas Muslim untuk mengembangkan lembaga

[333] Saba Hanif, Majid Hassan Ali, & Janelle Carlson. What Predicts Religious Tolerance? Education or Religiosity in Pakistan's Multi-religious Society. *International Journal on Minority and Group Rights,* Vol. 27, No. (3), (2020), hlm. 530.

pendidikan alternatif, seperti madrasah, sebagai bentuk resiliensi terhadap kebijakan yang kurang akomodatif.[334]

Di India, pendidikan Islam sering kali tidak terintegrasi secara penuh dalam kurikulum nasional, menyebabkan madrasah beroperasi secara independen dengan kurikulum tradisional yang berfokus pada studi keagamaan. Situasi ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang cenderung sekuler, sehingga pendidikan Islam kurang mendapatkan dukungan yang memadai.[335]

Sementara itu, di Pakistan dan Bangladesh, meskipun pendidikan Islam lebih diakui, tantangan tetap ada dalam hal standarisasi kurikulum dan kualitas pengajaran. Upaya reformasi sering kali terhambat oleh perbedaan pandangan antara pemerintah dan otoritas keagamaan, serta keterbatasan sumber daya. Namun, komunitas Muslim di Asia Selatan menunjukkan ketahanan dengan terus mengembangkan madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Mereka berupaya menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman, termasuk memasukkan pelajaran umum dan keterampilan hidup, untuk memastikan relevansi pendidikan Islam dalam konteks modern.[336]

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Negara-Negara Asia Selatan dari Masa Kolonial hingga Pasca-Kolonial

a) Masa Kolonial (Marjinalisasi Pendidikan Islam)

Pada masa kolonial, terutama di bawah kekuasaan Inggris, pendidikan Islam di Asia Selatan mengalami marginalisasi besar-besaran. Pemerintah kolonial Inggris memandang sistem pendidikan tradisional Islam yang berbasis madrasah dan pesantren sebagai tidak kompatibel dengan tujuan modernisasi dan pembangunan kolonial. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekuler berbasis bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan Barat, yang berfokus pada produksi birokrat dan pegawai

[334] Rita Sahara Munte, Analisis Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam Menuju 2035, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3, 2024, hlm. 95.

[335] Siti Marwiyah dan Mohammad Dasuki, Isu dan Analisis Kebijakan Pendidikan Masa Depan (Review dan Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Islam di Ma'had Aly), *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 27.

[336] Dwi Wulandari Sari, Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Urgensinya dalam Menghadapi Era Society *5.0*, *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 45.

kolonial. Akibatnya, pendidikan Islam kehilangan peran sentral dalam masyarakat dan menjadi subordinat terhadap sistem pendidikan baru ini. Pendidikan madrasah tradisional tetap bertahan, tetapi mengalami keterbatasan dalam pengakuan resmi, pendanaan, dan pengembangan kurikulum. Banyak madrasah hanya mengandalkan dana komunitas dan mempertahankan kurikulum lama berbasis kitab kuning dan fiqih klasik tanpa mengadaptasi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Selain itu, muncul pula dikotomi tajam antara pendidikan agama dan pendidikan umum.[337]

b) Masa Transisi (Pasca Kemerdekaan)

Setelah memperoleh kemerdekaan, negara-negara di Asia Selatan menunjukkan respon yang berbeda terhadap pendidikan Islam:[338]

1) Pakistan: Sebagai negara yang dibentuk berdasarkan ideologi Islam, Pakistan langsung mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam kurikulum nasional. Madrasah mendapatkan perhatian lebih besar, namun tetap menghadapi tantangan dalam mengimbangi pendidikan umum modern.
2) Bangladesh: Meski mewarisi sistem dari Pakistan Timur, Bangladesh mencoba menyeimbangkan pendidikan sekuler dan agama. Pemerintah mendukung madrasah dengan program sertifikasi dan kurikulum gabungan, agar lulusan madrasah bisa memiliki peluang akademik dan profesional yang lebih luas.
3) India: Sebagai negara sekuler, India memperbolehkan madrasah beroperasi secara otonom. Namun, kurangnya regulasi menyebabkan kualitas madrasah sangat bervariasi. Pemerintah India membentuk beberapa skema pendanaan untuk madrasah, tetapi pelaksanaannya sering terkendala diskriminasi dan politik lokal.

Pada masa ini, tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan pendidikan Islam dengan tuntutan

[337] Fitriani Ningsih. Kebijakan Pendidikan Islam Pasca-Kolonial di Asia Selatan: Studi Perbandingan India dan Pakistan. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara,* Vol. 8, No. (1), (2022), hlm. 85–87.

[338] Ahmad Maulana. Modernisasi Madrasah di Negara Muslim Asia Selatan: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, Vol. 6, No. (2), (2021), hlm. 34-36.

pembangunan nasional tanpa menghilangkan esensi agama itu sendiri.

c) Masa Modernisasi (Reformasi Kurikulum dan Akses Pendidikan)

Memasuki era globalisasi dan modernisasi, negara-negara Asia Selatan mulai memperhatikan kebutuhan untuk mereformasi pendidikan Islam agar tidak tertinggal. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain:[339]

1) Integrasi Mata Pelajaran Umum: Banyak madrasah memasukkan mata pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa Inggris, dan teknologi informasi, agar lulusan madrasah mampu berkompetisi di dunia kerja modern.
2) Peningkatan Kualitas Guru: Pemerintah dan LSM di beberapa negara memberikan pelatihan khusus bagi guru madrasah untuk meningkatkan metode pembelajaran mereka.
3) Sertifikasi dan Akreditasi Madrasah: Upaya untuk memberikan pengakuan resmi terhadap madrasah melalui sistem sertifikasi nasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam.

Namun, modernisasi ini tidak sepenuhnya mulus. Beberapa kalangan menganggap modernisasi sebagai bentuk westernisasi yang menggerus nilai-nilai tradisional Islam. Selain itu, persoalan klasik seperti minimnya dana, kurangnya infrastruktur, serta politisasi pendidikan agama tetap menjadi tantangan besar.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam di Asia Selatan

Kebijakan pendidikan Islam di negara-negara Asia Selatan tidak terbentuk dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang berkaitan dengan latar belakang sejarah, sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara, dijelaskan sebagai berikut

a. Faktor Sejarah Kolonialisme

Warisan kolonial memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan pendidikan Islam di Asia Selatan. Selama masa kolonial Inggris, pendidikan Islam mengalami penurunan

[339] Zainal Abidin. *Transformasi Pendidikan Islam di Asia Selatan: Antara Tradisi dan Modernitas.* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 49-50.

status karena pemerintah kolonial mengutamakan sistem pendidikan sekuler yang berbasis pada nilai-nilai Barat. Dampak jangka panjangnya masih terasa hingga kini, terutama dalam bentuk dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Negara-negara pascakolonial seperti Pakistan dan Bangladesh masih bergulat dengan dualisme sistem pendidikan ini.[340]

b. Faktor Politik dan Ideologi Negara

Pola kebijakan pendidikan Islam sangat tergantung pada orientasi politik dan ideologi negara masing-masing. Pakistan yang berdasar pada Islam secara konstitusional memberikan dukungan institusional terhadap madrasah dan pendidikan agama. Sebaliknya, India sebagai negara sekuler tidak memiliki intervensi signifikan terhadap madrasah, dan membiarkannya berkembang secara independen. Perbedaan ideologis ini menentukan arah pengembangan kurikulum, pendanaan, serta pengawasan terhadap lembaga pendidikan Islam.[341]

c. Faktor Sosial dan Demografi

Faktor sosial juga sangat menentukan kebijakan pendidikan Islam. Di wilayah dengan populasi Muslim yang besar dan aktif secara politik seperti di Bangladesh atau wilayah-wilayah tertentu di India, terdapat tekanan sosial agar negara mengakui dan mendukung eksistensi pendidikan Islam. Kebutuhan masyarakat Muslim untuk mempertahankan identitas keagamaannya melalui pendidikan sering kali menjadi dasar tuntutan terhadap negara.[342]

d. Faktor Ekonomi dan Sumber Daya Pendidikan

Tingkat ekonomi negara serta kemampuan fiskal pemerintah juga mempengaruhi sejauh mana kebijakan pendidikan Islam dapat diimplementasikan secara merata. Negara yang memiliki sumber daya terbatas cenderung menyerahkan pendidikan Islam kepada organisasi masyarakat atau yayasan swasta. Hal ini menyebabkan kualitas madrasah sangat

---

[340] Rahmawati. *Pengaruh Warisan Kolonial dalam Kebijakan Pendidikan Islam di Asia Selatan.* (Yogyakarta: Lembaga Kajian Asia, 2023), hlm. 52-53..

[341] Andi Nurfadilah. Politik Pendidikan Islam di Asia Selatan: Sebuah Analisis Perbandingan. *Jurnal Ilmiah Politik dan Pendidikan*, Vol. 5, No. (1), (2020), hlm. 105–110.

[342] Syahrul Huda. Sosiologi Pendidikan Islam di Wilayah Asia Selatan. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. (2), (2021), hlm. 79.

bergantung pada kondisi ekonomi lokal dan ketersediaan dana dari donatur.[343]

e. Faktor Globalisasi dan Tuntutan Modernisasi

Di era global, pendidikan Islam juga menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kurikulum madrasah dituntut untuk tidak hanya fokus pada ilmu-ilmu agama, tetapi juga mencakup sains, teknologi, dan bahasa asing. Tantangan globalisasi ini mendorong negara-negara Asia Selatan untuk mereformasi sistem pendidikan Islam agar lulusannya relevan dengan kebutuhan zaman.[344]

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa kebijakan pendidikan Islam di Asia Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional yang saling berkaitan dan tidak bisa dilihat secara tunggal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan tersebut harus memperhatikan dinamika lokal, nasional, dan global yang melingkupinya.

C. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Masyarakat Muslim di Benua Asia Selatan, Terutama dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Kebijakan pendidikan Islam di Benua Asia Selatan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat Muslim dalam berbagai dimensi kehidupan, terutama dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya menentukan arah kurikulum dan model pembelajaran, tetapi juga membentuk pola pikir, identitas, dan mobilitas sosial-ekonomi umat Islam di kawasan tersebut.[345]

Secara sosial, pendidikan Islam telah menjadi sarana penting untuk membangun solidaritas umat dan menjaga nilai-nilai moral serta etika di tengah perubahan zaman. Di wilayah seperti Bangladesh dan Pakistan, madrasah menjadi pusat pembinaan sosial keagamaan yang menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat miskin yang tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal negara.

---

[343] Nur Azizah. Pembangunan Madrasah dan Tantangan Dana Pendidikan di Asia Selatan. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, Vol. 6, No. (1), (2022), hlm. 67.

[344] Dewi Mardiyah. Modernisasi Kurikulum Madrasah di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam Global*, Vol. 7, No. (1), (2020), hlm. 55.

[345] Farhan Haikal. *Dinamika Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial di Asia Selatan.* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 83.

Namun, di sisi lain, keterbatasan kebijakan pemerintah dalam memodernisasi madrasah justru memperkuat keterpisahan sosial antara lulusan madrasah dan pendidikan umum, menciptakan semacam kelas sosial baru yang eksklusif.[346]

Dalam konteks budaya, pendidikan Islam berperan besar dalam pelestarian identitas keislaman masyarakat Asia Selatan. Bahasa Arab dan pelajaran klasik Islam seperti fiqh, tafsir, dan hadits diajarkan sebagai bagian dari warisan peradaban Islam. Namun, kurangnya integrasi dengan kebudayaan lokal dalam beberapa kebijakan justru memunculkan ketegangan identitas, terutama ketika terjadi polarisasi antara budaya tradisional dan budaya modern. Di India, misalnya, kebijakan pendidikan yang mengabaikan peran bahasa Urdu dalam kurikulum telah menimbulkan kegelisahan kultural di kalangan Muslim.[347]

Dari segi ekonomi, dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap peningkatan kesejahteraan umat Muslim Asia Selatan masih menjadi tantangan besar. Banyak madrasah yang tidak dilengkapi dengan pelatihan keterampilan vokasional atau pendidikan ekonomi, sehingga lulusan cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang lebih luas. Di sisi lain, beberapa negara seperti Bangladesh telah mulai melakukan integrasi pendidikan Islam dengan pelatihan kewirausahaan dan literasi digital, yang membuka peluang baru bagi pemberdayaan ekonomi umat.[348]

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap masyarakat Muslim di Asia Selatan mencerminkan hubungan yang kompleks antara pendidikan dan struktur sosial masyarakat. Pendidikan Islam dapat menjadi alat pemberdayaan, namun hanya jika kebijakannya diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia yang inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada masa depan.

---

[346] Siti Nurhaliza. Kebijakan Pendidikan Islam dan Stratifikasi Sosial Masyarakat Muslim Asia Selatan. *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 5, No. (2), (2020), hlm. 110–112.

[347] Rizky Aditya Permana. Bahasa dan Identitas dalam Kurikulum Pendidikan Islam Asia Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Budaya Islam*, Vol. 7, No. (1), (2022), hlm. 57.

[348] Zulfa Mardiana. Integrasi Pendidikan Islam dan Ekonomi: Studi Kasus Madrasah di Bangladesh. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, Vol. 6, No. (2), (2021), hlm. 67.

D. Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Islam di Negara-Negara Asia Selatan

Dibawah ini dijelaskan secara lebih mendalam, berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut:

a. Inkonsistensi Kebijakan dan Regulasi

Salah satu tantangan besar adalah adanya inkonsistensi kebijakan pendidikan Islam antar negara dan bahkan di dalam negara yang sama. Di India, misalnya, sistem pendidikan Islam berada di bawah kewenangan masing-masing negara bagian, yang menyebabkan tidak adanya standarisasi kurikulum atau mutu pengajaran antar madrasah. Akibatnya, kualitas pendidikan Islam bisa sangat bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Di beberapa daerah, madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan alternatif yang tidak setara dengan sekolah umum, yang memengaruhi perkembangan pendidikan Islam secara menyeluruh.[349]

b. Keterbatasan Profesionalisme Guru

Masalah berikutnya adalah rendahnya profesionalisme guru yang mengajar di madrasah. Banyak dari mereka yang belum memiliki pelatihan pedagogik yang memadai. Guru-guru ini lebih banyak berfokus pada ajaran agama Islam klasik tanpa memperhatikan perkembangan pendidikan modern yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Kurangnya pelatihan ini juga menyebabkan proses pembelajaran di madrasah kurang efektif dan tidak mampu menciptakan daya saing yang tinggi bagi lulusan madrasah dalam dunia kerja. Hal ini sangat terlihat di negara-negara seperti Pakistan dan Bangladesh, di mana banyak guru yang hanya memiliki latar belakang keagamaan tanpa pelatihan khusus dalam metodologi pengajaran.[350]

c. Keterbatasan Infrastruktur dan Dana

Tantangan besar lainnya adalah terbatasnya dana dan infrastruktur pendidikan. Banyak madrasah yang bergantung pada dana yang diberikan oleh masyarakat atau sumbangan sukarela,

---

[349] Ahadan Ulya & Komarudin Sassi. Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Negara yang Dilanda Konflik: Studi Kasus di Pattani, Thailand. *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 1, No. (2), (2024), hlm. 119.

[350] Rini Kurniawati. Profesionalisme Guru Madrasah dalam Konteks Asia Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Keguruan Islam*, (2021). Vol. 8, No. (2), hlm. 70–74.

dan sering kali tidak memperoleh bantuan dari pemerintah. Hal ini menyebabkan kondisi fisik madrasah sering kali kurang memadai untuk mendukung pembelajaran yang optimal. Tidak jarang, fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, dan teknologi yang mendukung pendidikan juga tidak tersedia, menghambat proses pendidikan yang berkualitas. Di beberapa negara seperti Afghanistan dan Pakistan, yang tengah mengalami ketidakstabilan politik, kondisi ini semakin diperburuk, sehingga pendidikan Islam sering kali tidak dapat berkembang sesuai harapan.[351]

d. Stigma Sosial dan Politik Identitas

Salah satu tantangan besar lainnya adalah stigma sosial dan politik yang melekat pada madrasah. Di beberapa negara Asia Selatan, khususnya India, madrasah seringkali dipandang sebagai tempat pendidikan yang tertutup dan radikal. Stigma ini berakar dari pemahaman politik identitas, di mana madrasah dianggap sebagai tempat yang melahirkan ideologi ekstrem. Akibatnya, banyak pemerintah di kawasan ini memberlakukan regulasi ketat terhadap madrasah, termasuk pembatasan dana dan pengawasan yang lebih ketat. Misalnya, di India, rezim nasionalis Hindu sering menargetkan madrasah dengan berbagai kebijakan diskriminatif yang menghambat perkembangan pendidikan Islam.[352]

e. Kurikulum yang Tidak Terintegrasi dengan Kebutuhan Zaman

Kurikulum pendidikan Islam di banyak madrasah juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar madrasah masih menerapkan kurikulum yang sangat kaku dan bersifat tekstual, tanpa mengintegrasikan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi. Akibatnya, lulusan madrasah kesulitan beradaptasi dengan dunia kerja yang semakin berbasis pada teknologi dan keterampilan praktis. Kurikulum yang tidak memperhatikan perkembangan sains, teknologi, dan dunia kerja membuat lulusan madrasah tertinggal dibandingkan dengan lulusan dari sekolah-sekolah umum. Beberapa negara seperti Bangladesh dan Pakistan

[351] Ali Fauzan. Tantangan Pendanaan Pendidikan Islam di Asia Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. (1), (2022), hlm. 86.

[352] Aisyah Fitria. Pendidikan Islam dan Politik Identitas di Asia Selatan. *Jurnal Politik dan Budaya Islam*, Vol. 7, No. (1), (2023), hlm. 60–64.

mulai menyadari masalah ini, namun masih terbatas dalam mengimplementasikan perubahan yang substansial.[353]

f. Hambatan Geografis dan Aksesibilitas

Di beberapa daerah terpencil, baik di India maupun di Afghanistan, akses terhadap pendidikan Islam sangat terbatas. Madrasah yang ada di daerah-daerah ini sering kali tidak memiliki fasilitas yang memadai dan sulit dijangkau oleh masyarakat setempat. Selain itu, dengan adanya konflik yang berlangsung lama di beberapa wilayah, terutama di Afghanistan dan Pakistan, banyak fasilitas pendidikan Islam yang hancur atau ditutup. Ini menyebabkan ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kesenjangan pendidikan yang semakin lebar.[354]

g. Pengaruh Globalisasi dan Teknologi

Globalisasi dan perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi madrasah di Asia Selatan. Pendidikan Islam yang bersifat tradisional cenderung kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang pesat. Di banyak tempat, madrasah belum memanfaatkan teknologi secara maksimal, baik dalam hal penyampaian materi pembelajaran maupun dalam hal pengelolaan administrasi. Globalisasi menuntut adanya perubahan dalam cara berpikir dan berinteraksi, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip tradisional yang dianut oleh sebagian besar madrasah di kawasan ini Ketegangan Sosial dan Politik.[355]

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bawahwa ketegangan sosial dan politik yang terjadi di beberapa negara Asia Selatan turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Di Thailand Selatan, misalnya, ketegangan antara Muslim dan pemerintah lokal seringkali berdampak langsung pada pendidikan Islam.

---

[353] Latifah Hanifah. *Strategi Holistik Penguatan Kebijakan Pendidikan Islam.* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 101

[354] Maragustam. Permasalahan dan Tantangan Pendidikan Islam Modern di Tengah Era Disrupsi. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. (1), (2021), hlm. 140–144.

[355] Syamsul Huda. Ketimpangan Regulasi dan Tantangan Pendidikan Islam di Asia Selatan. *Jurnal Studi Kebijakan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. (2), (2023), hlm. 102.

E. Peluang untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam di Wilayah Asia Selatan

Peluang-peluang ini harus dipetakan secara strategis agar pengembangan pendidikan Islam berjalan maksimal dan relevan dengan kebutuhan zaman, dijelaskan sebagai berikut:

a. Peluang Reformasi Kurikulum dan Integrasi Ilmu Keislaman-Modern

Peluang pertama adalah membuka ruang bagi reformasi kurikulum yang mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu kontemporer. Saat ini banyak madrasah dan pesantren yang mulai merintis kurikulum terpadu dengan memasukkan ilmu sains, teknologi, literasi digital, hingga kewirausahaan dalam pelajaran keagamaan. Reformasi kurikulum ini dapat meningkatkan daya saing lulusan madrasah di dunia kerja dan perguruan tinggi. Negara seperti Bangladesh telah memulai integrasi semacam ini secara nasional, dan dapat dijadikan contoh untuk negara lain di Asia Selatan.[356]

b. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Pembelajaran Berbasis Online

Digitalisasi pendidikan Islam menjadi peluang strategis kedua. Melalui penggunaan *Learning Management System* (LMS), e-learning berbasis aplikasi, dan platform madrasah digital, lembaga pendidikan Islam bisa menjangkau lebih banyak pelajar dari berbagai pelosok. Selain itu, teknologi juga memudahkan pelatihan guru dan manajemen administrasi pendidikan. Di India dan Pakistan, sudah banyak lembaga yang memulai pengembangan digital madrasah, meski belum terkoordinasi secara nasional. Penerapan teknologi ini harus diiringi dengan pelatihan guru agar tidak terjadi kesenjangan digital.[357]

c. Penguatan Peran Komunitas dan Organisasi Keagamaan Lokal

Peluang ketiga adalah penguatan peran komunitas Muslim dan organisasi keagamaan lokal dalam pengembangan mutu

---

[356] Zahra Mufidah. Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam di Asia Selatan: Integrasi Ilmu dan Agama. *Jurnal Studi Islam Nusantara*, Vol. 7, No. (1), (20220, hlm. 71.

[357] Luthfi Fajar Nugraha. Digitalisasi Madrasah dan Tantangan Pembelajaran Online di Asia Selatan. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. (2), (2021), hlm. 58.

pendidikan. Banyak madrasah dan pesantren di Asia Selatan didirikan dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Ini merupakan kekuatan akar rumput yang bisa diberdayakan untuk menciptakan inovasi kurikulum, tata kelola yang akuntabel, hingga pendanaan alternatif. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan juga bisa mempercepat peningkatan mutu secara menyeluruh.[358]

d. Kerja Sama Internasional dan Regional di Bidang Pendidikan Islam

Selanjutnya adalah penguatan kerja sama antarnegara dan lembaga internasional dalam pengembangan pendidikan Islam. Negara-negara di Asia Selatan memiliki kesamaan sejarah, budaya, dan tantangan. Oleh karena itu, kerja sama dalam pengembangan kurikulum regional, pelatihan guru bersama, serta pertukaran dosen dan pelajar sangat potensial. Lembaga seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan *Islamic Development* Bank (IDB) dapat dijadikan mitra strategis dalam pendanaan dan pengembangan kapasitas lembaga pendidikan Islam.[359]

e. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Islam

Peluang lain yang penting adalah penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan Islam melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan insentif. Guru madrasah di banyak negara Asia Selatan masih menghadapi keterbatasan dari sisi kompetensi pedagogik dan teknologi. Melalui dukungan kebijakan nasional dan kerja sama antarlembaga, pelatihan berskala nasional dan lokal bisa menjadi solusi untuk menciptakan guru yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.[360]

f. Dukungan Kebijakan Pemerintah Nasional dan Lokal

Peluang terakhir terletak pada dukungan kebijakan nasional dan lokal yang berpihak kepada penguatan pendidikan Islam. Beberapa negara Asia Selatan telah menyusun kebijakan afirmatif

---

[358] Yusuf Qasim. Peran Komunitas dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Asia Selatan. *Jurnal Pengembangan Pendidikan Masyarakat*, Vol. 5, No. (1), (2022), hlm. 90.

[359] Almira Fadhilah. Kerja Sama Internasional dalam Penguatan Madrasah Asia Selatan. *Jurnal Politik dan Pendidikan Islam Global*, Vol. 2, No. (2), (2023), hlm. 61–63.

[360] Dimas Wahyudi. Peningkatan Profesionalisme Guru Madrasah di Asia Selatan Melalui Sertifikasi dan Pelatihan. *Jurnal Kependidikan Islam Internasional*, Vol. 6, No. (2), (2023), hlm. 76.

untuk madrasah dan pesantren, seperti integrasi dengan sistem pendidikan nasional, subsidi operasional, dan legalisasi ijazah. Bila pemerintah semakin membuka ruang kolaborasi, maka sistem pendidikan Islam dapat berkembang sejalan dengan agenda pembangunan nasional.[361]

g. Meningkatnya Kesadaran Pendidikan Islam Modern di Kalangan Kelas Menengah Muslim

Kelas menengah Muslim di Asia Selatan terus mengalami pertumbuhan secara ekonomi dan intelektual. Mereka mulai menuntut lembaga pendidikan Islam yang lebih modern, berwawasan luas, dan berbasis nilai-nilai global. Permintaan ini menjadi peluang bagi madrasah dan pesantren untuk berinovasi dalam tata kelola pendidikan, sistem pembelajaran dwibahasa (Arab-Inggris atau Urdu-Inggris), hingga penguatan kurikulum soft skill. Kesadaran masyarakat ini menjadi kekuatan pasar yang dapat memicu kompetisi sehat antar lembaga.[362]

h. Perluasan Vokasi dan *Link and Match* Dunia Kerja

Terakhir, peluang penting juga datang dari meningkatnya kesadaran akan perlunya pendidikan Islam berbasis vokasi dan keterampilan kerja. Beberapa madrasah di Bangladesh telah memulai program kejuruan seperti pelatihan komputer, tata busana, hingga pertanian organik. Model ini perlu diperluas agar pendidikan Islam tidak hanya fokus pada pemahaman agama, tetapi juga mampu memberdayakan ekonomi umat.[363]

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa semua peluang ini menegaskan masa depan pendidikan Islam di Asia Selatan sangat menjanjikan jika mampu menggabungkan kearifan lokal, nilai-nilai keislaman, dan inovasi global. Dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif, pendidikan Islam dapat menjadi pilar penting dalam membangun peradaban Muslim yang cerdas, toleran, dan kompetitif di abad 21.

---

[361] Indah Puspitasari. Kebijakan Pemerintah terhadap Madrasah di Negara-Negara Asia Selatan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pendidikan Islam,* Vol. 3, No. (1), (2023), hlm. 42.

[362] Rini Novitasari. Kelas Menengah Muslim dan Tuntutan Pendidikan Islam Modern. *Jurnal Sosial dan Pendidikan Islam,* Vol. 6, No. (2), (2020), hlm. 30–33.

[363] Aliyah Kurniawati. Pendidikan Vokasi di Madrasah Asia Selatan: Potensi dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan Islam Terapan*, Vol. 3, No. (2), (2023), hlm. 55–59.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam di Asia Selatan telah mengalami transformasi signifikan sejak masa kolonial hingga era pasca-kolonial. Pada masa kolonial, pendidikan Islam mengalami marginalisasi oleh sistem pendidikan Barat yang dibawa penjajah. Namun, pasca-kemerdekaan, negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan India mulai membangun sistem pendidikan Islam yang lebih terstruktur, meskipun seringkali masih berdiri sejajar dengan sistem pendidikan umum. Perkembangan ini menegaskan pentingnya pendidikan Islam sebagai bagian dari identitas keagamaan dan kebudayaan masyarakat Muslim setempat.

Kebijakan pendidikan Islam di Asia Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sejarah kolonialisme, kondisi politik nasional, tekanan ideologis dari kelompok keagamaan, kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, serta dinamika globalisasi. Interaksi antara faktor-faktor ini menjadikan kebijakan pendidikan Islam sangat kompleks, tidak seragam, dan penuh kompromi antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernisasi.

Kebijakan pendidikan Islam memberikan kontribusi penting terhadap pelestarian budaya dan nilai-nilai Islam di masyarakat Muslim Asia Selatan. Dampaknya dapat dilihat dalam peningkatan literasi keagamaan, penguatan identitas Islam, serta pemberdayaan sosial. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal keterbatasan integrasi dengan pendidikan umum dan dunia kerja, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan spiritual dan keterampilan praktis ekonomi.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas SDM pengajar, resistensi terhadap reformasi kurikulum, akses pendidikan yang tidak merata, serta stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam. Selain itu, fragmentasi kebijakan antara madrasah dan pendidikan umum juga menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan terpadu di wilayah Asia Selatan.

Meski menghadapi banyak tantangan, terdapat peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Asia Selatan. Beberapa di antaranya adalah melalui modernisasi kurikulum, peningkatan kualitas pelatihan guru, integrasi antara pendidikan umum dan agama, serta peningkatan kerjasama antarnegara dalam

pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi juga menjadi jalan strategis untuk menjangkau lebih banyak peserta didik dengan kualitas pendidikan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zainal. (2020). *Transformasi pendidikan Islam di Asia Selatan: Antara tradisi dan modernitas* (Jakarta: Prenada Media Group).

Ali, Majid Hassan, Hanif, Saba, & Carlson, Janelle. (2020). What predicts religious tolerance? Education or religiosity in Pakistan's multi-religious society. *International Journal on Minority and Group Rights*, Vol. 27, No. 3.

Azizah, Nur. (2022). Pembangunan madrasah dan tantangan dana pendidikan di Asia Selatan. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, Vol. 6, No. 1.

Cahyanti, Eva Tri. (2021). Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia: Masa kolonial hingga masa reformasi. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 2.

Fadhilah, Almira. (2023). Kerja sama internasional dalam penguatan madrasah Asia Selatan. *Jurnal Politik dan Pendidikan Islam Global*, Vol. 2, No. 2.

Fauzan, Ali. (2022). Tantangan pendanaan pendidikan Islam di Asia Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1.

Fitria, Aisyah. (2023). Pendidikan Islam dan politik identitas di Asia Selatan. *Jurnal Politik dan Budaya Islam*, Vol. 7, No. 1.

Haikal, Farhan. (2023). *Dinamika pendidikan Islam dan transformasi sosial di Asia Selatan* (Yogyakarta: Deepublish).

Hanifah, Latifah. (2021). *Strategi holistik penguatan kebijakan pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media).

Huda, Syahrul. (2021). Sosiologi pendidikan Islam di wilayah Asia Selatan. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 2.

Huda, Syamsul. (2023). Ketimpangan regulasi dan tantangan pendidikan Islam di Asia Selatan. *Jurnal Studi Kebijakan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2.

Kurniawati, Aliyah. (2023). Pendidikan vokasi di madrasah Asia Selatan: Potensi dan implementasi. *Jurnal Pendidikan Islam Terapan*, Vol. 3, No. 2.

Kurniawati, Rini. (2021). Profesionalisme guru madrasah dalam konteks Asia Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Keguruan Islam*, Vol. 8, No. 2.

Maulana, Ahmad. (2021). Modernisasi madrasah di negara Muslim Asia Selatan: Peluang dan tantangan. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, Vol. 6, No. 2.

Maragustam. (2021). Permasalahan dan tantangan pendidikan Islam modern di tengah era disrupsi. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1.

Marwiyah, Siti, & Dasuki, Mohammad. (2021). Isu dan analisis kebijakan pendidikan masa depan (Review dan revitalisasi kebijakan pendidikan Islam di Ma'had Aly). *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 12, No. 1.

Mardiana, Zulfa. (2021). Integrasi pendidikan Islam dan ekonomi: Studi kasus madrasah di Bangladesh. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, Vol. 6, No. 2.

Mardiyah, Dewi. (2020). Modernisasi kurikulum madrasah di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam Global*, Vol. 7, No. 1.

Mufidah, Zahra. (2022). Transformasi kurikulum pendidikan Islam di Asia Selatan: Integrasi ilmu dan agama. *Jurnal Studi Islam Nusantara*, Vol. 7, No. 1.

Munte, Rita Sahara. (2024). Analisis kebijakan dan strategi pendidikan Islam menuju 2035. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3.

Ningsih, Fitriani. (2022). Kebijakan pendidikan Islam pasca-kolonial di Asia Selatan: Studi perbandingan India dan Pakistan. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, Vol. 8, No. 1.

Novitasari, Rini. (2020). Kelas menengah Muslim dan tuntutan pendidikan Islam modern. *Jurnal Sosial dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2.

Nugraha, Luthfi Fajar. (2021). Digitalisasi madrasah dan tantangan pembelajaran online di Asia Selatan. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2.

Nurfadilah, Andi. (2020). Politik pendidikan Islam di Asia Selatan: Sebuah analisis perbandingan. *Jurnal Ilmiah Politik dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1.

Permana, Rizky Aditya. (2022). Bahasa dan identitas dalam kurikulum pendidikan Islam Asia Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Budaya Islam*, Vol. 7, No. 1.

Puspitasari, Indah. (2023). Kebijakan pemerintah terhadap madrasah di negara-negara Asia Selatan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1.

Qasim, Yusuf. (2022). Peran komunitas dalam peningkatan mutu pendidikan Islam di Asia Selatan. *Jurnal Pengembangan Pendidikan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1.

Rahmawati. (2023). *Pengaruh warisan kolonial dalam kebijakan pendidikan Islam di Asia Selatan* (Yogyakarta: Lembaga Kajian Asia).

Sari, Dwi Wulandari. (2023). Manajemen pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dan urgensinya dalam menghadapi era Society 5.0. *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1.

Ulya, Ahadan, & Sassi, Komarudin. (2024). Analisis kebijakan pendidikan Islam di negara yang dilanda konflik: Studi kasus di Pattani, Thailand. *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 1, No. 2.

Wahyudi, Dimas. (2023). Peningkatan profesionalisme guru madrasah di Asia Selatan melalui sertifikasi dan pelatihan. *Jurnal Kependidikan Islam Internasional*, Vol. 6, No. 2.

Zahira, & Al Faruq. (n.d.). Jejak sejarah: Peradaban Islam di Asia Selatan dari sebelum masuk hingga tersebarnya Islam. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, Vol. 3, No. 5.

BAB 19
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA BENUA ASIA TIMUR
(CAHYADI)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam menjaga dan mengembangkan identitas keagamaan umat Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Timur. Meski wilayah ini dikenal dengan mayoritas penduduk non-Muslim seperti Buddha, Tao, Shinto, dan ateis, kehadiran komunitas Muslim di beberapa negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia tetap berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan Islam. Sejarah panjang interaksi perdagangan, migrasi, serta dinamika politik turut membentuk karakter pendidikan Islam di kawasan ini.

Namun, kebijakan pendidikan Islam di Asia Timur sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan kebijakan nasional masing-masing negara. Di Cina, pendidikan Islam dikendalikan secara ketat oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ideologi nasional, sementara di Jepang dan Korea Selatan, pendidikan Islam berkembang secara bebas melalui inisiatif komunitas Muslim tanpa campur tangan negara. Di Mongolia, pendidikan Islam tumbuh sederhana di tengah komunitas Muslim minoritas, dengan minim pengawasan pemerintah. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bagaimana faktor politik, budaya, dan demografi mempengaruhi arah pendidikan Islam.

Mempelajari kebijakan pendidikan Islam di Asia Timur menjadi penting untuk memahami bagaimana agama minoritas mempertahankan eksistensinya dalam kerangka negara modern yang memiliki beragam ideologi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam mengembangkan pendidikan Islam di kawasan di mana umat Muslim bukan merupakan kelompok dominan. Oleh karena itu, kajian ini berusaha menguraikan dinamika kebijakan pendidikan Islam di Asia Timur secara komprehensif dan kritis.

B. Rumusan masalah

a. Bagaimana perkembangan pendidikan Islam di negara-negara kawasan Asia Timur?
b. Bagaimana kebijakan masing-masing negara di Asia Timur dalam mengatur pendidikan Islam?
c. Faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan kebijakan pendidikan Islam di kawasan Asia Timur?
d. Apa tantangan dan peluang yang dihadapi umat Muslim dalam mengembangkan pendidikan Islam di Asia Timur?

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur dan mendeskripsikan kebijakan pendidikan Islam di negara-negara Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data berbentuk angka, statistik, dan persentase yang dapat diolah untuk menemukan pola atau perbandingan antar negara. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran objektif mengenai sejauh mana kebijakan masing-masing negara mendukung, membatasi, atau mengabaikan pendidikan Islam.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada komunitas Muslim, pengelola pendidikan Islam, serta tokoh masyarakat di negara-negara Asia Timur. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi terhadap laporan pemerintah, publikasi akademik, dan data dari lembaga internasional yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan agama. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih responden yang dianggap mewakili komunitas Muslim dan memiliki pengetahuan langsung terhadap praktik pendidikan Islam di negaranya.

Data yang diperoleh dari kuesioner dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif seperti frekuensi, persentase, dan rata-rata. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan pendidikan Islam diterapkan dan dirasakan di setiap negara. Hasil analisis ini kemudian akan dibandingkan untuk mengidentifikasi perbedaan,

persamaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan di masing-masing negara Asia Timur.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan pendidikan Islam di negara-negara kawasan Asia Timur

Pendidikan Islam di negara-negara kawasan Asia Timur berkembang dalam konteks yang sangat berbeda dibandingkan dengan kawasan lain seperti Asia Tenggara atau Timur Tengah. Di Asia Timur, perkembangan pendidikan Islam umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: jumlah populasi Muslim yang kecil, kebijakan pemerintah terhadap agama, dan inisiatif komunitas Muslim sendiri. Berikut perkembangan Pendidikan islam di beberapa negara Kawasan asia timur.[364]

a. Cina

Pendidikan Islam di Cina sudah ada sejak abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para pedagang Arab dan Persia. Pada masa-masa awal, pendidikan agama Islam berkembang di masjid-masjid melalui sistem madrasah tradisional. Komunitas Muslim seperti Hui dan Uighur mendirikan banyak pusat pendidikan Islam untuk mengajarkan Al-Qur'an, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu keislaman. Namun, di era modern, terutama setelah berbagai kebijakan ketat pemerintah, pendidikan Islam di Cina mengalami kontrol yang sangat kuat. Pemerintah membatasi usia anak-anak yang boleh menerima pendidikan agama, mengawasi kurikulum, dan menutup beberapa sekolah agama, khususnya di wilayah Xinjiang. Pendidikan Islam di Cina saat ini tetap ada, tetapi dalam bentuk yang lebih terbatas dan di bawah pengawasan ketat.[365]

b. Jepang

Di Jepang, Islam mulai dikenal luas setelah Perang Dunia II melalui migrasi pekerja dan pelajar dari negara-negara Muslim. Karena komunitas Muslim di Jepang tergolong kecil, pendidikan Islam berkembang secara mandiri dan swasta. Beberapa sekolah Islam swasta didirikan, seperti Tokyo Muslim School, untuk

---

[364] Abdurrahman, Dudung. *Islam di Asia Timur: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

[365] Harahap, Nasrun. *"Telaah Kebijakan Pemerintahan China terhadap Nilai-nilai Pendidikan Islam." Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 18.2 (2022): 204-219.

memenuhi kebutuhan anak-anak Muslim dalam belajar agama mereka. Selain itu, banyak masjid di Jepang mengadakan kelas agama akhir pekan untuk anak-anak dan remaja Muslim. Pemerintah Jepang tidak mengatur secara langsung pendidikan agama, sehingga komunitas Muslim bebas mengembangkan pendidikan Islam, meski tanpa dukungan finansial dari negara.[366]

c. Korea Selatan

Islam masuk ke Korea Selatan pada tahun 1950-an melalui tentara Muslim dari Turki yang bertugas dalam Perang Korea. Komunitas Muslim di Korea masih kecil, sehingga pendidikan Islam lebih banyak dilakukan dalam bentuk pendidikan informal di masjid-masjid, seperti di Seoul Central Mosque. Beberapa masjid menawarkan kelas belajar Al-Qur'an, bahasa Arab, dan dasar-dasar Islam untuk anak-anak dan remaja. Selain itu, beberapa universitas di Korea Selatan juga membuka program akademik studi Islam, walaupun lebih fokus pada kajian ilmiah daripada pendidikan agama praktis.

d. Mongolia

Di Mongolia, Islam telah ada sejak abad ke-13, terutama melalui etnis Kazakh di wilayah Bayan-Ölgii. Pendidikan Islam di Mongolia berlangsung dalam skala kecil dan sederhana. Komunitas Muslim mendirikan madrasah lokal dan mengadakan pengajaran agama berbasis keluarga. Pemerintah Mongolia, yang menganut prinsip kebebasan beragama, memberikan keleluasaan bagi komunitas Muslim untuk mengelola pendidikan agama mereka sendiri, selama tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sosial.

Secara umum, perkembangan pendidikan Islam di Asia Timur dipengaruhi oleh kebijakan negara dan kekuatan komunitas Muslim lokal. Di negara-negara dengan kontrol ketat seperti Cina, pendidikan Islam mengalami banyak hambatan, sedangkan di negara-negara dengan kebebasan beragama seperti Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia, pendidikan Islam berkembang meskipun masih dalam skala kecil.

[366] Kuwahara, S. (2010). Islamic education in Japan: Muslim migrants and their children. *Journal of Muslim Minority Affairs, 30*(2), 185–199.

B. Kebijakan Masing-Masing Negara Di Asia Timur Dalam Mengatur Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga identitas keagamaan umat Muslim di berbagai belahan dunia. Di kawasan Asia Timur, meskipun jumlah populasi Muslim relatif kecil, perkembangan pendidikan Islam tetap menjadi hal yang menarik untuk dipelajari. Negara-negara di Asia Timur, seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia, memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam mengatur dan mengelola pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara dipengaruhi oleh faktor politik, budaya, dan demografi, serta bagaimana pandangan negara tersebut terhadap agama, khususnya Islam. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana perkembangan pendidikan Islam di negara-negara Asia Timur, serta bagaimana kebijakan masing-masing negara mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan agama Islam di wilayah tersebut. Berikut kebijakan dari negara-negara tersebut:

a. Cina

Di Cina, kebijakan terhadap pendidikan Islam sangat ketat dan terkendali. Islam merupakan agama minoritas yang mayoritas pemeluknya adalah etnis Hui dan Uighur, terutama di wilayah Xinjiang. Pemerintah Cina mengimplementasikan kebijakan yang sangat restriktif terhadap pendidikan Islam dengan tujuan untuk mengontrol aktivitas agama dan menghindari separatisme di daerah-daerah Muslim. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain:

1. Kontrol ketat terhadap madrasah dan sekolah Islam: Madrasah hanya dapat beroperasi setelah mendapatkan izin dari pemerintah, dan kurikulumnya harus diawasi agar sesuai dengan ideologi sosialisme dan nasionalisme Cina.
2. Pembatasan usia: Anak-anak di bawah usia tertentu dilarang mengikuti pendidikan agama formal di luar sekolah umum.
3. Pendidikan agama terbatas: Pendidikan Islam lebih banyak dilakukan secara tersembunyi atau di luar jangkauan kontrol negara, meski di daerah-daerah tertentu di Xinjiang, madrasah sering kali ditutup atau dibatasi.
4. Penekanan pada nasionalisme: Pendidikan agama Islam diarahkan untuk menekankan pada loyalitas terhadap negara

dan menghindari ajaran yang dapat mengancam persatuan negara.[367]

b. Jepang

Jepang memiliki kebijakan yang lebih terbuka terhadap pendidikan Islam karena kebebasan beragama dijamin dalam konstitusi negara tersebut. Meskipun populasi Muslim di Jepang sangat kecil, mereka dapat mengelola pendidikan Islam melalui inisiatif komunitas. Beberapa poin penting mengenai kebijakan pendidikan Islam di Jepang adalah:

1. Kebebasan beragama: Pemerintah Jepang tidak menghalangi pendidikan Islam dan memberikan kebebasan bagi komunitas Muslim untuk mengelola sekolah-sekolah mereka sendiri.
2. Pendidikan swasta dan mandiri: Sekolah-sekolah Islam seperti Tokyo Muslim School didirikan oleh komunitas Muslim, dan pendidikan ini tidak disubsidi oleh negara.
3. Pendidikan agama informal: Di luar sekolah formal, banyak masjid di Jepang yang mengadakan kelas akhir pekan untuk anak-anak Muslim yang ingin mempelajari ajaran Islam.
4. Tidak ada dukungan finansial negara: Meskipun bebas, pendidikan Islam tidak mendapatkan dukungan finansial atau fasilitas dari pemerintah Jepang, sehingga seluruh biaya operasional ditanggung oleh komunitas.[368]

c. Korea Selatan

Korea Selatan juga menjamin kebebasan beragama, sehingga komunitas Muslim dapat menjalankan pendidikan agama dengan leluasa. Namun, karena komunitas Muslim di Korea Selatan sangat kecil, kebijakan pendidikan Islam lebih bersifat informal dan komunitas. Berikut adalah kebijakan yang diterapkan:

1. Kebebasan beragama: Pemerintah Korea Selatan tidak membatasi pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, asalkan tidak bertentangan dengan hukum negara.
2. Pendidikan berbasis komunitas: Pendidikan Islam di Korea Selatan biasanya berlangsung dalam kelas akhir pekan yang

[367] Harahap, N. (2022). Telaah Kebijakan Pemerintahan China terhadap Nilai-nilai Pendidikan Islam. *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, *18*(2), 204-219.

[368] **Tanada, H.** (2013). *Islam in Japan: A study of its progress and prospects*. Tokyo: Keio University Press.halm 87-112

diadakan di masjid-masjid besar, seperti Seoul Central Mosque.

3. Minim dukungan pemerintah: Sama seperti Jepang, pendidikan Islam di Korea Selatan tidak mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah, sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada partisipasi aktif komunitas Muslim.[369]

d. Mongolia

Mongolia memiliki populasi Muslim yang relatif kecil, terutama di kalangan etnis Kazakh di daerah Bayan-Ölgii. Pendidikan Islam di Mongolia berkembang dalam kerangka yang sangat sederhana, dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama cenderung longgar. Beberapa kebijakan yang ada adalah:

1. Kebebasan beragama: Mongolia memberikan kebebasan beragama, sehingga komunitas Muslim dapat mendirikan madrasah dan sekolah agama kecil.
2. Pendidikan berbasis komunitas: Pendidikan Islam di Mongolia terutama dilakukan melalui madrasah kecil yang ada di kalangan etnis Kazakh, serta pengajaran agama dalam keluarga.
3. Minim pengawasan negara: Pemerintah Mongolia tidak terlalu campur tangan dalam pendidikan Islam, kecuali jika ada potensi gangguan terhadap stabilitas negara.[370]

Secara umum, kebijakan masing-masing negara di Asia Timur terhadap pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh tingkat kebebasan beragama yang ada, jumlah populasi Muslim, serta prioritas negara dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Negara-negara seperti Cina yang memiliki kebijakan lebih otokratik cenderung lebih membatasi pendidikan Islam, sementara negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia memberi kebebasan lebih besar meskipun pendidikan Islam tetap berkembang dalam skala terbatas oleh komunitas Muslim.

---

[369] **Hasani Syarif, M. Z.** (2021). *Dinamika pendidikan Islam minoritas: Eksistensi, kontestasi dan konvergensi*. Publica Indonesia Utama.

[370] **Bregel, Y.** (2003). *An historical atlas of Central Asia*. Leiden: Brill.hlm 145-152

C. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kebijakan pendidikan Islam di kawasan Asia Timur

Kebijakan pendidikan Islam di kawasan Asia Timur tidaklah seragam, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Setiap negara memiliki latar belakang politik, sosial, dan budaya yang berbeda, sehingga membentuk pendekatan yang unik terhadap pendidikan agama, khususnya Islam. Untuk memahami mengapa terdapat perbedaan dalam pengaturan dan perkembangan pendidikan Islam di negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia, penting untuk menelusuri sejumlah faktor kunci yang menjadi dasar pembentukan kebijakan tersebut. Berikut factor-faktor yang mempengaruhi:

a. Sistem politik dan ideologi negara

   Sistem politik sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Negara seperti Cina yang menganut ideologi komunis dan mengutamakan kontrol negara atas agama cenderung memberlakukan kebijakan ketat terhadap pendidikan Islam. Sebaliknya, negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang demokratis dan liberal memberikan kebebasan beragama, sehingga pendidikan Islam berkembang lebih mandiri meskipun dalam ruang komunitas kecil.

b. Jumlah dan persebaran populasi muslim

   Jumlah umat Muslim di suatu negara turut menentukan bagaimana pendidikan Islam diperlakukan. Di Cina, komunitas Muslim (seperti Hui dan Uighur) cukup besar dan terkonsentrasi di daerah tertentu, sehingga pemerintah merasa perlu mengawasi pendidikan agama mereka. Sedangkan di Jepang dan Korea Selatan, karena populasi Muslim sangat kecil dan tersebar, pendidikan Islam berkembang tanpa dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah.

c. Sejarah hubungan islam dengan negara

   Sejarah kedatangan Islam juga berpengaruh. Misalnya, di Cina, Islam sudah hadir sejak abad ke-7 dan pernah mengalami masa-masa integrasi dan juga konflik, sehingga memori sejarah ini membuat pemerintah lebih berhati-hati. Di Jepang dan Korea Selatan, Islam masuk relatif baru (abad ke-20), dan tidak pernah menjadi kekuatan politik besar, sehingga pendidikan Islam tidak dianggap mengganggu stabilitas nasional.

d. Kebijakan umum tentang Pendidikan agama

Setiap negara memiliki pendekatan berbeda terhadap pendidikan agama secara umum, tidak hanya Islam. Di Jepang dan Korea Selatan, pendidikan agama tidak menjadi bagian wajib dalam kurikulum nasional, sehingga semua pendidikan agama (termasuk Islam) dikembangkan di luar sekolah formal. Sementara di Cina, semua aktivitas keagamaan, termasuk pendidikan, harus mengikuti peraturan ketat yang ditetapkan pemerintah.

e. Kebijakan keamanan nasional

Beberapa negara mengaitkan pendidikan Islam dengan isu keamanan. Di Cina, khususnya setelah munculnya isu separatisme di Xinjiang, pendidikan Islam dianggap potensial untuk memicu gerakan separatis, sehingga diawasi ketat. Sebaliknya, negara seperti Mongolia tidak menghadapi ancaman keamanan dari komunitas Muslim, sehingga kebijakannya lebih longgar.

Perbedaan kebijakan pendidikan Islam di Asia Timur tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor politik, demografi, sejarah, keamanan nasional, dan kebijakan pendidikan umum. Setiap negara mengatur pendidikan Islam berdasarkan kebutuhan dan kekhawatiran domestiknya masing-masing.[371]

D. Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Umat Muslim Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Di Asia Timur

Dalam upaya mengembangkan pendidikan Islam di kawasan Asia Timur, umat Muslim menghadapi berbagai dinamika yang tidak mudah. Beragam tantangan muncul dari faktor internal komunitas maupun dari kebijakan negara setempat yang berbeda-beda. Meski demikian, sejumlah peluang juga terbuka lebar seiring dengan berkembangnya kesadaran beragama, pertumbuhan komunitas Muslim, dan kemajuan teknologi. Untuk memahami lebih jauh, penting untuk mengkaji apa saja tantangan yang harus dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam memperkuat pendidikan Islam di kawasan ini.berikut beberapa tantangan dan peluang Pendidikan islam di asia timur:

[371] Hasani Syarif, M. Z. (2021). *Dinamika pendidikan Islam minoritas: Eksistensi, kontestasi dan konvergensi*. Publica Indonesia Utama. **hlm. 112–140**

a. Tantangan

1. Kontrol pemerintah yang ketat

   Di negara seperti Cina, pendidikan Islam berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Banyak madrasah harus mendapatkan izin, dan kurikulumnya dipantau agar tidak dianggap bertentangan dengan ideologi nasional. Ini membatasi ruang gerak komunitas Muslim dalam menyelenggarakan pendidikan agama.

2. Jumlah komunitas muslim yang kecil

   Di Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia, jumlah umat Muslim masih sangat kecil dibandingkan dengan populasi nasional. Hal ini menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur untuk mendirikan serta mengelola sekolah-sekolah Islam.

3. Minim dukungan pemerintah

   Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan menerapkan prinsip netralitas agama dalam pendidikan, sehingga sekolah Islam tidak mendapat subsidi atau bantuan dari pemerintah. Semua kebutuhan harus dipenuhi oleh komunitas Muslim sendiri.

4. Stigma dan stereotipe terhadap islam

   Di beberapa negara, Islam masih sering dipandang sebagai agama asing atau dikaitkan dengan isu radikalisme. Ini menjadi tantangan dalam memperkenalkan pendidikan Islam yang moderat dan positif di mata masyarakat luas.

5. Kurangnya kurikulum dan tenag Pendidik berkualitas

   Karena keterbatasan jumlah Muslim, ketersediaan guru yang berkompeten dalam pendidikan Islam juga minim, dan pengembangan kurikulum standar menjadi sulit.

b. Peluang

1. Kebebasan beragama dalam konstitusi

   Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia menjamin kebebasan beragama dalam hukum mereka. Ini memberikan peluang bagi komunitas Muslim untuk mengembangkan pendidikan Islam secara mandiri tanpa larangan hukum.

2. Pertumbuhan komunitas muslim imigran

   Bertambahnya jumlah imigran Muslim dari Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika menciptakan permintaan baru untuk pendidikan Islam di negara-negara Asia Timur.

3. Dukungan dari organisasi internasional

   Beberapa lembaga internasional dan komunitas Muslim global mendukung pendirian sekolah, penyediaan guru, dan bantuan pengembangan kurikulum, membuka peluang untuk memperkuat pendidikan Islam.

4. Teknologi dan Pendidikan online

   Perkembangan teknologi memberikan solusi baru. Melalui kelas online atau e-learning, komunitas Muslim bisa mengakses pendidikan Islam dari negara lain, mengatasi keterbatasan guru dan bahan ajar lokal.

5. Meningkatnya minat studi islam akademik

   Beberapa universitas di asia timur membuka program kajian islam secara akademik. Ini membuka ruang dialog, penelitian,dan pertukaran budaya yang positif mengenai islam di kalangan Masyarakat luas.

   Walaupun umat Muslim menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkanpendidikan Islam di Asia Timur, peluang untuk berkembang tetap ada. Dengan strategi yang kreatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas, pendidikan Islam di Asia Timur dapat terus bertumbuh meskipun dalam lingkungan yang penuh keterbatasan.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di kawasan Asia Timur mengalami perkembangan yang beragam, tergantung pada kondisi sosial, politik, dan budaya masing-masing negara. Di Cina, pendidikan Islam berkembang di bawah kontrol ketat pemerintah, sementara di Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia, pendidikan Islam berkembang lebih bebas namun tetap dalam skala komunitas kecil.

Kebijakan masing-masing negara terhadap pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh ideologi politik, jumlah dan persebaran umat Muslim, serta sejarah hubungan negara tersebut dengan Islam. Cina menerapkan kebijakan restriktif, sementara Jepang, Korea Selatan, dan

Mongolia cenderung lebih memberikan kebebasan meskipun tanpa dukungan langsung dari pemerintah.

Perbedaan kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sistem politik, kekhawatiran terhadap keamanan nasional, ukuran komunitas Muslim, hingga pandangan negara terhadap peran agama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan pendekatan terhadap pendidikan Islam sangat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Di tengah tantangan seperti kontrol pemerintah, minimnya dukungan, stigma terhadap Islam, dan terbatasnya sumber daya, umat Muslim di Asia Timur juga menemukan peluang untuk mengembangkan pendidikan Islam. Kebebasan beragama yang dijamin secara hukum, pertumbuhan komunitas Muslim imigran, serta perkembangan teknologi menjadi kekuatan pendorong untuk memperkuat pendidikan Islam di kawasan ini. Dengan strategi yang kreatif dan kolaboratif, umat Muslim di Asia Timur dapat terus mengembangkan pendidikan Islam meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

PENUTUP

Pendidikan Islam di kawasan Asia Timur mencerminkan dinamika yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, budaya, dan historis. Setiap negara di kawasan ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur pendidikan Islam, mulai dari kontrol ketat seperti di Cina hingga kebebasan yang lebih luas seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Mongolia.

Perbedaan kebijakan ini tidak terlepas dari latar belakang sistem pemerintahan, jumlah komunitas Muslim, sensitivitas terhadap isu keamanan nasional, serta persepsi negara terhadap peran agama dalam kehidupan masyarakat. Meski menghadapi tantangan seperti pembatasan pemerintah, keterbatasan sumber daya, dan stigma negatif, umat Muslim di Asia Timur tetap memiliki peluang besar untuk mengembangkan pendidikan Islam, terutama melalui pemanfaatan kebebasan beragama, perkembangan komunitas, dan kemajuan teknologi.

Dengan memahami tantangan dan peluang ini, diharapkan umat Muslim di kawasan Asia Timur dapat merancang strategi pendidikan yang adaptif dan inovatif, sehingga pendidikan Islam dapat terus

bertahan, berkembang, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *Islam di Asia Timur: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Bregel, Y. (2003). *An historical atlas of Central Asia*. Leiden: Brill **hlm. 145–152**).

Harahap, N. (2022). Telaah Kebijakan Pemerintahan China terhadap Nilai-nilai

Pendidikan Islam. *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan, 18*(2), 204-219.

Hasani Syarif, M. Z. (2021). *Dinamika pendidikan Islam minoritas:Eksistensi, kontestasi dan konvergensi*. Publica Indonesia Utama. **hlm. 112–140**

Kuwahara, S. (2010). Islamic education in Japan: Muslim migrants and their children. *Journal of Muslim Minority Affairs, 30*(2), 185–199.

Rossabi, M. (2005). *Modern Mongolia: From khans to commissars to capitalists*. Berkeley: University of California Press **hlm. 182–195**.

Sakurai, K. (2003). *Muslims in Japan*. Tokyo: Middle East Institute of Japan. **hlm. 45–70**.

Tanada, H. (2013). *Islam in Japan: A study of its progress and prospects*. Tokyo: Keio University Press.**hlm. 87–112**.

Konagaya, Y. (2011). The Kazakhs of the Altai: A study of their ethnic identity and social change. *Senri Ethnological Studies*, 78, 55–85.

Marsh, C. (2009). Kazakhstan, Mongolia and the Kazakhs of Bayan-Ölgii: Transnationalism and diaspora. *Central Asian Survey, 28*(1), 67–81.

Bab 20
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI NEGARA RUSIA

(Mita Rolani Zainal Abidin 2220203032)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam memainkan peran krusial dalam membentuk identitas keagamaan dan karakter umat Muslim, khususnya di negara-negara non-Muslim seperti Rusia. Di tengah arus sekularisme yang dominan, pendidikan Islam menjadi alat penting dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan memperkuat kohesi sosial komunitas Muslim minoritas. Lebih dari itu, pendidikan Islam juga berfungsi sebagai benteng ideologis untuk mencegah berkembangnya radikalisme dengan menanamkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran.

Rusia memiliki sejarah panjang hubungan dengan Islam sejak abad ke-10, terutama di wilayah Volga-Ural yang menjadi pusat peradaban Islam. Namun, dinamika ini tidak lepas dari intervensi negara. Di masa Kekaisaran Rusia, pendidikan Islam berada di bawah pengawasan negara melalui lembaga seperti Muftiyat Orenburg. Rezim Soviet kemudian menekan habis pendidikan agama, termasuk Islam. Setelah keruntuhan Uni Soviet, terjadi kebangkitan pendidikan Islam, tetapi tetap diiringi regulasi ketat oleh negara.

Kebijakan pendidikan Islam di Rusia saat ini mencerminkan pendekatan ambivalen negara: di satu sisi, pemerintah mengakui hak umat Muslim untuk mengembangkan pendidikan keagamaannya; di sisi lain, regulasi dan pengawasan ketat tetap diberlakukan melalui lembaga seperti Muftiyat dan badan keamanan nasional. Pendidikan Islam hanya diperbolehkan selama sesuai dengan interpretasi "Islam tradisional Rusia" yang tidak bertentangan dengan prinsip nasionalisme dan sekularisme negara.[372]

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami secara lebih dalam bagaimana kebijakan negara membentuk, membatasi,

[372] Bahrul Mukti, Nurul Stai, & Khoirul Ma'arif, *Negara, Ideologi dan Pendidikan Islam: Kebijakan Negara dalam Memperkuat Ideologi Islam Moderat*, Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 4 No (2), 2021.

dan sekaligus membuka ruang bagi pengembangan pendidikan Islam. Dalam konteks multikultural Rusia yang kompleks, pendidikan Islam berpotensi menjadi sarana integrasi sosial yang konstruktif, selama kebijakan yang diterapkan bersifat inklusif dan tidak diskriminatif terhadap identitas agama minoritas.[373]

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana sejarah perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Rusia?
b. Apa saja bentuk kebijakan pemerintah Rusia terhadap pendidikan Islam saat ini?
c. Bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap lembaga dan kurikulum pendidikan Islam?
d. Apa tantangan utama yang dihadapi umat Islam dalam pendidikan di Rusia?
e. Bagaimana peluang dan strategi pengembangan Pendidikan Islam?

C. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa dengan terstruktur dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Metode yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan di jurnal-jurnal yang relevan dan mempelajari serta memahami teori-teori yang ada pada beberapa literatur yang serupa dengan penelitian ini. Peneliti memanfaatkan sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan judul "kebijakan pendidikan Islam di Rusia" sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

TEORI

A. Konsep Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam merupakan bagian fundamental dalam upaya membangun sumber daya manusia Muslim yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Kebijakan pendidikan Islam adalah langkah-langkah sistematis yang diambil oleh lembaga atau negara

[373] Ramazanov Rasul Osmanovich, *Muslim Education in the Modern Educational Space: State and Assessment (on the Example of the Mosque Schools of Dagestan)*, Historical and Social-Educational Ideas, Vol 4 No (1), 2021, hal 18–29.

untuk mengarahkan perkembangan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam.[374] Ruang lingkupnya meliputi perumusan kurikulum, metode pengajaran, pelatihan tenaga pendidik, hingga pengaturan administratif pendidikan.

Tujuan utama kebijakan pendidikan Islam adalah membentuk individu Muslim yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Pendidikan Islam harus mampu membekali peserta didik dengan kompetensi untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Kebijakan ini juga bertujuan melindungi umat Muslim dari pengaruh negatif globalisasi yang dapat menggerus identitas keagamaannya.[375]

Dalam kerangka negara modern, kebijakan pendidikan Islam merupakan bentuk intervensi negara dalam menentukan arah, isi, dan pelaksanaan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman. Kebijakan pendidikan Islam tidak semata-mata bersifat administratif atau regulatif, tetapi mencerminkan nilai ideologis negara terhadap keberadaan agama, khususnya Islam. Kebijakan ini melibatkan dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan umat Islam dalam bingkai sistem kenegaraan yang plural.[376]

Penerapan kebijakan pendidikan Islam di negara Rusia sangat dipengaruhi oleh relasi historis antara negara dan agama setelah runtuhnya Uni Soviet. Pasca tahun 1990-an, negara membuka ruang desentralisasi pendidikan yang memungkinkan masyarakat Muslim mendirikan lembaga pendidikan Islam, termasuk madrasah dan perguruan tinggi Islam. Kebijakan pendidikan Islam di negara non-Muslim seperti Rusia harus dilihat sebagai bentuk artikulasi negara dalam merespons keberadaan umat Islam sebagai entitas sosial-

[374] Wulan Sari & Ahmad Shunhaji, *Perkembangan Kebijakan Pembelajaran Agama Islam pada Lembaga Pendidikan di Indonesia*, Alim | Journal of Islamic Education, Vol 2 No (2), 2020.

[375] Saifuddin Asrori & Achmad Syauqi, *Kontribusi Pendidikan Islam dalam Reproduksi Identitas Sosial Muslim Indonesia*, Mimbar, Vol 2 No (3), 2020, hal 13–22.

[376] Suyadi, *Strategi Pendidikan Islam Abad 21: Transformasi Pendidikan Islam dalam Konteks Multikultural*. Yogyakarta: Prenadamedia Group, 2020, hal 65-70.

politik. Maka dari itu, kebijakan ini tidak bersifat netral, melainkan tergantung pada persepsi politik negara terhadap Islam.[377]

B. Pendidikan Islam dalam Konteks Minoritas

Pendidikan Islam dalam masyarakat minoritas seperti Muslim Rusia memiliki posisi strategis sekaligus penuh tantangan. Sebagai komunitas non-mayoritas, Muslim Rusia harus berupaya mempertahankan identitas religius dan kultural mereka melalui institusi pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan ini tidak hanya dimaksudkan untuk mentransmisikan ajaran Islam, tetapi juga sebagai alat menjaga warisan budaya, bahasa, dan solidaritas sosial antar komunitas Muslim seperti Tatar, Bashkir, dan Chechnya.

Pendidikan Islam dalam komunitas minoritas harus bersifat kontekstual dan transformatif, agar mampu beradaptasi dengan sistem hukum dan sosial negara tanpa kehilangan substansi nilai-nilai Islam. Di Rusia, praktik pendidikan Islam mengalami regulasi ketat pasca 2000-an, khususnya setelah negara memperketat pengawasan terhadap institusi pendidikan agama sebagai bagian dari kebijakan kontra-terorisme. Meski demikian, masyarakat Muslim tetap berupaya mengembangkan madrasah dan perguruan tinggi Islam dengan pendekatan kolaboratif yang sejalan dengan hukum negara.[378]

Persepsi negara terhadap Islam berpengaruh langsung pada keberlangsungan pendidikan Islam. Jika Islam dipandang sebagai mitra kebangsaan, maka pendidikan Islam akan mendapat ruang yang lebih besar. Namun, jika dianggap sebagai ancaman, maka negara akan bersikap represif terhadap pendidikan keagamaan. Di Rusia, ambivalensi ini tercermin dari dukungan terbatas pada institusi keagamaan yang disertai dengan pengawasan ketat terhadap materi ajar dan sumber pembiayaan lembaga pendidikan Islam.[379]

---

[377] Zulkarnain, Kebijakan Pendidikan Islam di Negara Minoritas Muslim: Studi Kasus Rusia dan Tiongkok." *Jurnal Pendidikan Islam Global*, Vol 5 No (1), 2022, hal 45–60.

[378] Muhammad Fauzan, *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, hal 26-30.

[379] Irfan Maulana, Dinamika Pendidikan Islam di Negara Sekuler: Studi terhadap Rusia dan Prancis." *Jurnal Pendidikan Agama dan Kebijakan Publik*, Vol 4 No (2),2023, hal 113–128.

C. Hubungan Negara dan Agama dalam Pendidikan

Hubungan antara negara dan agama dalam pendidikan menunjukkan variasi model tergantung ideologi politik yang dianut negara tersebut. Beberapa model hubungan Negara dan Agama dalam pendidikan, yaitu integratif, sekuler, dan dualisti. Model integratif dicirikan oleh pengakuan resmi negara terhadap pendidikan agama dan integrasi nilai-nilai agama dalam sistem pendidikan nasional. Sebaliknya, dalam model sekuler, negara berusaha memisahkan agama dari pendidikan publik, dan pendidikan agama diserahkan sepenuhnya kepada lembaga keagamaan swasta.

Turki dan Singapura merupakan contoh negara yang menerapkan kontrol ketat terhadap pendidikan agama untuk memastikan tidak adanya penyebaran ideologi ekstremisme. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas sosial, namun sering kali mengekang otonomi lembaga pendidikan Islam. Di negara sekuler, pengaruh kebijakan sekularisme terhadap pendidikan agama dapat berakibat pada marginalisasi nilai-nilai agama di ruang publik pendidikan. Akibatnya, generasi muda mengalami kekosongan spiritual dan kesenjangan moral yang berpotensi mengganggu harmoni sosial.[380]

Untuk mengatasi tantangan ini, negara harus mampu menyeimbangkan prinsip netralitas agama dengan pengakuan atas hak individu untuk memperoleh pendidikan agama. Model pendidikan yang menghargai keberagaman dan menjamin hak beragama setiap warga negara menjadi solusi ideal dalam konteks masyarakat multikultural.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembagan Kebijakan Pendidikan Islam di Rusia

Sejarah kebijakan pendidikan Islam di Rusia mencerminkan relasi kompleks antara negara dan umat Islam yang terbentuk dari akomodasi dan represi. Pada era Kekaisaran Rusia, pendidikan Islam memperoleh pengakuan terbatas melalui pendirian *Muftiyat Orenburg* tahun 1788 oleh Catherine II. Lembaga ini menjadi sarana kontrol administratif terhadap komunitas Muslim dan pendidikan keagamaannya, terutama di wilayah Tatarstan dan Bashkortostan.

[380] Hendra Widyantoro, *Public Morality in Indonesian Penal Code Draft: Zina Definition Debate*, Justicia Islamica, Vol 15 No (1), 2018.

Meskipun pemerintah turut mengawasi, madrasah-madrasah tetap berkembang sebagai pusat pembelajaran tradisional Islam.[381]

Namun, pada masa Uni Soviet, kebijakan pendidikan mengalami represi hebat. Pemerintah komunis menghapus seluruh sistem pendidikan keagamaan sebagai bagian dari proyek ateisme negara. Masjid dan madrasah ditutup, serta para ulama ditangkap atau dibunuh. Generasi Muslim kehilangan akses terhadap pembelajaran Islam selama beberapa dekade. Setelah keruntuhan Uni Soviet tahun 1991, umat Islam di Rusia mengalami kebangkitan identitas keagamaan. Komunitas Muslim kembali mendirikan madrasah dan perguruan tinggi Islam secara swadaya, terutama di kawasan mayoritas Muslim seperti Dagestan, Chechnya, dan Tatarstan.

Pemerintah Rusia modern memberikan pengakuan terbatas terhadap pendidikan Islam, tetapi dalam bingkai kendali ideologis negara. Kebijakan pendidikan Islam cenderung mendua: memberikan keleluasaan simbolis, tetapi mengawasi ketat substansi ajarannya agar tidak bertentangan dengan nasionalisme Rusia. Hal ini tampak dalam keharusan registrasi madrasah dan kontrol terhadap kurikulum yang diajarkan.[382] Di tengah pembatasan tersebut, lembaga pendidikan Islam tetap bertahan dan berinovasi, membentuk model pendidikan yang kompatibel dengan hukum negara tanpa kehilangan identitas keislamannya.

B. Kebijakan Pendidikan Islam Saat Ini

Kebijakan pendidikan Islam di Rusia dewasa ini diarahkan pada pembinaan Islam yang disebut sebagai "Islam tradisional Rusia" – yaitu Islam yang dianggap sejalan dengan stabilitas sosial dan nasionalisme negara. Negara membuka ruang bagi pendidikan Islam, namun dengan regulasi yang sangat ketat. Semua lembaga pendidikan Islam diharuskan mengikuti kurikulum yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan bekerja sama dengan Dewan Mufti Rusia. Setiap upaya untuk mengembangkan kurikulum independen tanpa persetujuan negara dianggap sebagai potensi

[381] Muhammad Yusuf, *Transformasi Lembaga Pendidikan Islam di Rusia Pasca Uni Soviet*. Jurnal Sosial Keagamaan Darajat, Vol 5 No (1), 2022, hal 45–60.

[382] Muhammad Subair, *Pendidikan Islam dalam Konteks Minoritas Muslim: Studi terhadap Komunitas Muslim Rusia*. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol 18 No (1), 2020, hal 55–68.

ancaman. Hal ini dilakukan untuk mencegah infiltrasi ajaran ekstremisme dan separatisme, sebagaimana yang pernah terjadi pada konflik di Kaukasus Utara. Pendekatan negara ini bersifat ambivalen: di satu sisi menjamin eksistensi lembaga Islam, tetapi di sisi lain mengekang otonomi keagamaannya demi kepentingan politik stabilitas nasional.[383]

Lembaga-lembaga negara seperti Muftiyat (lembaga keagamaan resmi) memainkan peran penting dalam pengawasan pendidikan Islam. Muftiyat bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang diajarkan di madrasah dan universitas Islam mendukung nilai-nilai kebangsaan dan tidak mengarah pada ekstremisme. Lembaga-lembaga Islam juga diwajibkan untuk mendaftarkan diri secara resmi dan mengikuti kurikulum yang telah disetujui pemerintah.[384]

Organisasi Islam, seperti Dewan Mufti Rusia dan Kongres Muslim Rusia, berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan mendirikan sekolah-sekolah dan universitas Islam, menerbitkan buku-buku teks, serta melatih guru-guru agama. Namun, ruang gerak mereka tetap dibatasi oleh regulasi ketat dan pengawasan dari badan keamanan negara.

Pemerintah Rusia juga meluncurkan program-program integrasi, seperti pelatihan guru agama di bawah pengawasan negara, untuk memastikan bahwa materi ajar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sekularisme negara. Meski demikian, komunitas Muslim terus berupaya mempertahankan otonomi dalam pengelolaan pendidikan agama, sembari menunjukkan loyalitas terhadap negara.

C. Pengaruh Kebijakan Terhadap Lembaga dan Kurikulum Pendidikan Islam

Kebijakan negara Rusia memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah dan kualitas lembaga pendidikan Islam. Di satu sisi, regulasi pemerintah yang ketat menyebabkan berkurangnya jumlah madrasah independen karena adanya persyaratan administrasi yang

[383] Syaiful Bahri, *Negara dan Pendidikan Islam Minoritas Muslim: Studi Kasus Rusia dan Tiongkok*. Jurnal At-Talim, Vol 24 No (2), 2020, hal 123–134.

[384] Ahmad Fuad, Junaidi Alfin, & Achmad Nasih, *Membangun Etika dan Kepribadian di Lembaga Pendidikan Islam: Sebuah Perspektif Psikologi Qur'ani*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 5 No (2), 2017, hal 309–338.

kompleks dan pengawasan ketat terhadap kurikulum.[385] Banyak lembaga kecil tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga hanya lembaga besar yang mampu bertahan.

Dari segi kualitas, pendidikan Islam di Rusia berusaha meningkatkan standar dengan mengadopsi sistem akreditasi nasional. Pemerintah mendorong modernisasi lembaga pendidikan Islam dengan memperkenalkan mata pelajaran umum dalam kurikulum seperti bahasa Rusia, sejarah nasional, dan hukum, di samping mata pelajaran keislaman. Ini bertujuan agar lulusan pendidikan Islam dapat berintegrasi lebih baik dalam masyarakat Rusia secara umum.

Selain perubahan struktural, kebijakan pemerintah juga mempengaruhi metode pengajaran. Metode tradisional berbasis hafalan digantikan dengan pendekatan pedagogis modern yang menekankan pada pemahaman kritis dan integrasi ilmu keislaman dengan ilmu kontemporer.[386] Meskipun perubahan ini membawa beberapa manfaat, banyak kritikus yang berpendapat bahwa intervensi negara terlalu dalam sehingga mengurangi otonomi pendidikan Islam. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa pendidikan Islam di Rusia semakin kehilangan karakter keagamaannya dan lebih mengarah kepada sekularisasi terselubung. Namun, dalam konteks menjaga stabilitas nasional, pendekatan ini dianggap sebagai kompromi antara kebutuhan menjaga kebebasan beragama dan menjaga keamanan nasional.

D. Tantangan Pendidikan Islam di Rusia

Pendidikan Islam di Rusia menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial. Salah satu hambatan utama adalah regulasi hukum dan birokrasi yang ketat dalam mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan Islam. Proses perizinan yang panjang, persyaratan administratif yang kompleks, dan kewajiban untuk mengikuti standar kurikulum nasional menjadi beban berat bagi

[385] Ahmad Ramadan, *Pengaruh Regulasi Negara terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Negara Minoritas Muslim*, At-Talim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 11 No (2), 2022.

[386] Dedi Suryadi, *Transformasi Metode Pembelajaran di Madrasah Modern*, Jurnal Pendidikan, Vol 5 No (1), 2019.

komunitas Muslim yang ingin mengembangkan institusi pendidikan mereka.[387]

Selain itu, isu radikalisasi menjadi sorotan besar pemerintah Rusia. Pendidikan Islam sering kali dicurigai sebagai sarana penyebaran ideologi ekstrem, meskipun kenyataannya banyak lembaga Islam yang justru mengajarkan nilai-nilai moderasi dan toleransi. Stereotip negatif ini menyebabkan lembaga pendidikan Islam berada di bawah pengawasan ketat aparat keamanan dan mempersempit ruang gerak mereka dalam melakukan inovasi pendidikan.

Tantangan lain adalah rendahnya tingkat pendanaan untuk lembaga pendidikan Islam. Kebanyakan sekolah Islam bergantung pada sumbangan masyarakat yang terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, dan mengembangkan kurikulum yang kompetitif. Akibatnya, banyak lembaga pendidikan Islam yang kurang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum dari segi kualitas pendidikan.[388] Dalam menghadapi tantangan ini, komunitas Muslim Rusia perlu mengembangkan pendekatan yang adaptif, membangun dialog aktif dengan pemerintah, serta memperkuat kapasitas kelembagaan untuk bertahan dan berkembang di tengah tekanan regulatif dan sosial yang ada.

E. Peluang dan Strategi Pengembagan Pendidikan Islam

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat sejumlah peluang untuk pengembangan pendidikan Islam di Rusia. Salah satu peluang besar adalah meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama dalam memperkuat moralitas dan identitas nasional. Pemerintah Rusia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keterbukaan untuk bekerja sama dengan komunitas Muslim dalam bidang pendidikan.

Kerjasama antara pemerintah dan komunitas Muslim dapat diwujudkan melalui berbagai program seperti pelatihan guru agama, pengembangan kurikulum bersama, dan penyediaan dana hibah

[387] Abdul Alamsyah, *Pendidikan Islam di Negara Minoritas: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya*, At-Talim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 10 No (1), 2020.

[388] Muhammad Mustofa, *Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Berbasis Komunitas*, At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Vol 3 No (1), 2019.

untuk pembangunan sekolah Islam. Selain itu, komunitas Muslim juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas akses pendidikan Islam, seperti melalui platform pembelajaran daring dan e-learning keislaman.[389]

Strategi utama untuk meningkatkan kualitas dan akseptabilitas pendidikan Islam adalah dengan memperkuat akreditasi lembaga pendidikan Islam, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan yang berkelanjutan, dan memperbaharui kurikulum agar relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan Islam harus mampu membekali peserta didik tidak hanya dengan ilmu keislaman, tetapi juga keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi lintas budaya.[390]

Selain itu, membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam internasional dapat membuka peluang untuk pertukaran akademik, beasiswa, dan pengembangan kapasitas institusi. Dengan strategi ini, pendidikan Islam di Rusia dapat menjadi lebih kompetitif, adaptif, dan kontributif dalam membangun masyarakat Rusia yang multikultural dan harmonis.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Rusia menunjukkan perjalanan yang kompleks dalam konteks negara non-Muslim. Sejak masa Kekaisaran Rusia, pendidikan Islam telah berada di bawah kontrol negara melalui lembaga seperti Muftiyat Orenburg. Pada era Uni Soviet, pendidikan Islam mengalami tekanan hebat hingga hampir punah, namun pasca runtuhnya Soviet, terjadi kebangkitan kembali dengan pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah. Meski negara memberi ruang bagi pendidikan Islam, pengawasan ketat tetap diterapkan demi menjaga stabilitas nasional dan mencegah radikalisasi. Dinamika ini menunjukkan pentingnya memahami hubungan antara negara dan komunitas Muslim dalam pengelolaan pendidikan di Rusia.

Saat ini, kebijakan pendidikan Islam di Rusia menekankan pada Islam tradisional yang selaras dengan nilai nasionalisme. Pemerintah, melalui lembaga resmi seperti Muftiyat, mengatur kurikulum dan

[389] Ahmad Kurniawan, *E-learning dalam Pendidikan Islam: Peluang dan Tantangan di Era Digital*, At-Talim: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 11 No (1), 2021.

[390] Ahmad Nurhadi, *Pendidikan Islam dan Tantangan Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Pendidikan, Vol 5 No (2), 2019.

aktivitas lembaga pendidikan Islam dengan tujuan menjaga harmoni sosial. Organisasi-organisasi Islam turut aktif dalam mengembangkan pendidikan, walaupun dalam batasan regulasi negara. Pendidikan Islam di Rusia menghadapi tantangan birokrasi, isu stereotip, namun juga memiliki peluang besar untuk berkembang melalui kerja sama antara komunitas Muslim dan pemerintah. Secara keseluruhan, pendidikan Islam di Rusia menunjukkan adaptasi kreatif terhadap perubahan politik, sosial, dan budaya yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, A. (2020). Pendidikan Islam di negara minoritas: Tinjauan regulasi dan tantangannya. *At-Talim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *10*(1).

Asrori, S., & Syauqi, A. (2020). Kontribusi pendidikan Islam dalam reproduksi identitas sosial Muslim Indonesia. Mimbar, 2(3), 13–22.

Bahri, S. (2021). *Negara dan Pendidikan Islam Minoritas Muslim: Studi Kasus Rusia dan Tiongkok*. Jurnal At-Talim, 24(2), 123–134.

Fauzan, M. (2021). *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fuad, A., Alfin, J., & Nasih, A. (2017). Membangun etika dan kepribadian di Lembaga Pendidikan Islam: Sebuah perspektif psikologi Qur'ani. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 309–338.

Kurniawan, A. (2021). E-learning dalam pendidikan Islam: Peluang dan tantangan di era digital. *At-Talim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *11*(1).

Maulana, I. (2023). "Dinamika Pendidikan Islam di Negara Sekuler: Studi terhadap Rusia dan Prancis." *Jurnal Pendidikan Agama dan Kebijakan Publik*, 4(2), 113–128.

Mukti, B., Stai, N., & Ma'arif, K. (2021). Negara, ideologi dan pendidikan Islam: Kebijakan negara dalam memperkuat ideologi Islam moderat. Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4(2).

Mustofa, M. (2019). Pengembangan lembaga pendidikan Islam berbasis komunitas. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, *3*(1).

Nurhadi, A. (2019). Pendidikan Islam dan tantangan revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan*, *5*(2).

Ramadan, A. (2022). Pengaruh regulasi negara terhadap lembaga pendidikan Islam di negara minoritas Muslim. *At-Talim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *11*(2).

Ramazanov, R. O. (2021). Muslim education in the modern educational space: State and assessment (on the example of the mosque schools of Dagestan). *Historical and social-educational ideas*, 4(1), 18–29.

Sari, W., & Shunhaji, A. (2020). Perkembangan kebijakan pembelajaran agama Islam pada lembaga pendidikan di Indonesia. Alim | Journal of Islamic Education, 2(2).

Subair, M. (2020). *Pendidikan Islam dalam Konteks Minoritas Muslim: Studi terhadap Komunitas Muslim Rusia*. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 18(1), 55–68.

Suryadi, D. (2019). Transformasi metode pembelajaran di madrasah modern. *Jurnal Pendidikan*, *5*(1).

Suyadi. (2020). *Strategi Pendidikan Islam Abad 21: Transformasi Pendidikan Islam dalam Konteks Multikultural*. Yogyakarta: Prenadamedia Group.

Wardana, A. (2013). Institutionalising diasporic Islam: Multiculturalism, secularism and the integration of Muslim immigrants in Britain. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 3(1), 31–72.

Widyantoro, H. (2018). Public morality in Indonesian penal code draft: Zina definition debate. Justicia Islamica, 15(1).

Yusuf, M. (2022). *Transformasi Lembaga Pendidikan Islam di Rusia Pasca Uni Soviet*. Jurnal Sosial Keagamaan Darajat, 5(1), 45–60.

Zulkarnain. (2022). “Kebijakan Pendidikan Islam di Negara Minoritas Muslim: Studi Kasus Rusia dan Tiongkok.” *Jurnal Pendidikan Islam Global*, 5(1), 45–60.

BAB 21
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA INDONESIA

(Novita Eka Sari)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral bangsa Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, kelembagaan, maupun regulasi yang menaunginya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang sesuai dengan keyakinan agamanya, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan mutu antara lembaga pendidikan Islam (seperti madrasah dan pesantren) dengan sekolah umum, baik dari sisi infrastruktur, kualitas tenaga pendidik, maupun akses terhadap sumber daya pendidikan.[391] Selain itu, perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap nilai-nilai Islam juga sering menimbulkan perdebatan dalam penyusunan kurikulum dan isi ajar. [392]

Perubahan regulasi yang terjadi dari waktu ke waktu, seperti penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, serta peran Kementerian Agama dalam mengelola madrasah, juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas tata kelola pendidikan Islam. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan Islam dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah, serta dampaknya terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan Islam di seluruh wilayah Indonesia.

---

[391] Muhammad Minan, Islam Dan Pembahasan, *Jurnal Pendidikan islam, Vol. 1, No. 1*, (Jakarta: 2019), Hlm. 53

[392] Windaningrum, Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.2,* (Semarang: 2019), Hlm. 17.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan kebijakan, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan umat.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa?
b. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia?
c. Bagaimana peran pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam pengelolaan pendidikan Islam?
d. Sejauh mana kebijakan pendidikan Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia?
e. Apa rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan Islam di Indonesia?

C. Metodologi Penelitian

Menurut[393] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, baik dari segi sejarah perkembangannya, proses perumusannya, implementasinya, hingga dampaknya terhadap lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Penelitian ini termasuk dalam studi kebijakan (*policy study*), yang menitikberatkan pada analisis terhadap kebijakan publik dalam bidang pendidikan Islam, khususnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, seperti pejabat pemerintah, akademisi, serta praktisi pendidikan Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap berbagai regulasi, kebijakan, laporan resmi, artikel ilmiah, serta data

[393] Hax dan Majluf, *Strategic Management For Educational Management*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hlm. 14.

statistik yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan observasi langsung terhadap lembaga pendidikan Islam yang menjadi objek penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa wilayah yang merepresentasikan keragaman pendidikan Islam di Indonesia, seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat, selama periode Januari hingga Mei 2025.

TEORI

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia yang lebih jelas, lengkap dengan sumber dan kutipan dari literatur yang relevan. Menurut Teori-teori ini memberikan pandangan tentang bagaimana pendidikan Islam dikembangkan dalam sistem pendidikan Indonesia, baik dalam konteks sejarah, sosial, maupun kebijakan yang diterapkan oleh negara[394].

1. Teori Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam

   Teori ini melihat bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik negara. Kebijakan pendidikan Islam sering kali berubah sesuai dengan ideologi dan kebutuhan politik penguasa pada setiap periode. Misalnya, pada masa Orde Baru, pemerintah lebih mengutamakan pendidikan agama Islam yang diatur oleh Kementerian Agama, sedangkan pendidikan umum diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Teori Pendidikan Islam dalam Konteks Kewarganegaraan

   Teori ini menyoroti bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mendidik umat Islam secara agama, tetapi juga untuk membentuk karakter kewarganegaraan yang baik. Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia harus menciptakan warga negara yang tidak hanya beriman, tetapi juga mampu berkontribusi pada kehidupan sosial dan politik negara.

[394] Purnomo, Pendidikan Islam Antara Tradisi Dan Modernitas, *Jurnal Kependidikan, Vol. 3. No. 1,* (2017), Hlm. 43

3. Teori Islamisasi Pendidikan

   Teori Islamisasi pendidikan mengusulkan bahwa pendidikan tidak hanya mencakup pengetahuan umum, tetapi harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, pendidikan Islam harus mengarah pada pembentukan intelektual Muslim yang dapat mengintegrasikan sains dengan agama.

4. Teori Kebijakan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

   Pendidikan Islam di Indonesia bukanlah sistem yang terpisah dari pendidikan nasional, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan yang lebih luas. Dengan adanya kebijakan ini, madrasah dan pesantren diakui sebagai bagian dari pendidikan formal yang dapat berjalan beriringan dengan pendidikan umum.

5. Teori Modernisasi Pendidikan Islam

   Teori ini menekankan bahwa pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Pendidikan Islam perlu mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai agama Islam. Hal ini penting untuk mencetak generasi muda yang mampu bersaing dalam dunia global.

6. Teori Kebijakan Pendidikan Islam dalam Konteks Keberagaman

   Teori ini melihat bahwa pendidikan Islam harus mengakomodasi keberagaman yang ada di Indonesia, mengingat negara ini terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia harus menghormati pluralitas agama dan budaya, serta menjaga keharmonisan antarumat beragama.

   Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia berakar pada politik dan sejarah negara, serta didorong oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan untuk mengintegrasikan agama dan ilmu pengetahuan modern. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak, serta dapat berkontribusi dalam masyarakat yang plural dan beragam. Pendidikan Islam di Indonesia bukan hanya mengenai pengajaran agama, tetapi juga bagaimana agama dapat menyatu dengan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa

Perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan dinamika perubahan dalam upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.[395] Berikut ini adalah penjelasan mengenai perkembangan tersebut, lengkap dengan sumber dan kutipan dari berbagai literatur yang relevan.

a. Masa Kolonial (Hindia Belanda)

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam di Indonesia lebih bersifat tradisional dan dikelola oleh masyarakat atau organisasi Islam seperti pesantren dan madrasah. Pemerintah kolonial tidak memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan agama Islam dan lebih fokus pada pendidikan sekuler bagi kalangan non-Muslim. Kebijakan dan Perkembangan sebagai berikut:

1) Pesantren dan madrasah tetap berkembang di kalangan umat Islam, meskipun lebih banyak bersifat non-formal dan berbasis komunitas.
2) Pendidikan Islam tidak diselenggarakan dalam sistem yang terintegrasi dengan pendidikan formal pemerintah kolonial.

b. Masa Kemerdekaan (1945-1959)

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, pemerintah mulai merumuskan kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan Islam, meskipun pada awalnya sistem pendidikan Islam belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.[396] Pendidikan Islam lebih banyak dilaksanakan di madrasah dan pesantren. Kebijakan dan Perkembangan sebagai berikut:

1) Pada 1945, UUD 1945 mengatur bahwa negara wajib menyediakan pendidikan agama, yang membuka jalan bagi pendidikan Islam untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

---

[395] Adi Kusnawan, Merumuskan *Islam and Secularism*, *Jurnal Ilmiah,* (Banjarmasin: 2017), Hlm. 4.

[396] Rahmatullah dan Anisa, Perkembangan Kebijakan Pendidikan, *Jurnal Evaluasi, Vol. 4, No. 1,* (2020), Hlm. 356.

2) Berdirinya beberapa lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

c. Masa Orde Lama (1959-1966)

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pendidikan Islam mulai memperoleh perhatian lebih besar meskipun kebijakan terkait pendidikan Islam belum sepenuhnya terstruktur. Kebijakan pendidikan Islam masih bersifat terbatas dan tidak sepenuhnya diintegrasikan dengan pendidikan umum. Kebijakan dan Perkembangan sebagai berikut:

1) Pendidikan Islam dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di sekolah umum, tetapi tetap terpisah dari mata pelajaran lainnya.
2) Pemerintah mulai membentuk Badan Pendidikan Islam untuk mengatur pendidikan agama Islam.

d. Masa Orde Baru (1966-1998)

Masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto membawa transformasi besar dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam mulai lebih terstruktur dan lebih diintegrasikan dengan sistem pendidikan formal nasional. Pada masa ini, pendidikan agama Islam mulai mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Kebijakan dan Perkembangan sebagai berikut:

1) UU Pendidikan No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan umum.
2) Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah diakui sebagai bagian dari pendidikan formal yang setara dengan pendidikan umum.

e. Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan Islam mulai lebih inklusif dan modern, dengan lebih banyak perhatian pada kualitas pendidikan. Kebijakan dan Perkembangan sebagai berikut:

1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang wajib diselenggarakan negara.
2) Pendidikan Islam Terpadu (SIT) berkembang pesat, mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum.
3) Pemerintah juga memperkenalkan kurikulum 2013 yang mencakup mata pelajaran pendidikan agama dalam pendidikan umum.

f. Kebijakan Pendidikan Islam Terkini (2000-sekarang)

Pemerintah terus memperkuat kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada penyamaan kualitas pendidikan agama dan pendidikan umum. Ada peningkatan dalam kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam di semua tingkat, dari madrasah hingga perguruan tinggi Islam. Kebijakan dan Perkembangan sebagai berikut:

1) Program Pendidikan Inklusif yang menghargai keberagaman, termasuk agama, dan memberikan ruang bagi pendidikan Islam dalam konteks pluralisme.
2) Munculnya Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang mengintegrasikan kurikulum umum dan agama secara lebih erat.
3) Pesantren Modern yang menggabungkan ilmu agama dan sains serta teknologi untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan global.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa, mulai dari masa kolonial yang terbatas, masa kemerdekaan yang mulai mengarah pada integrasi pendidikan agama, hingga masa Orde Baru yang memperkenalkan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional.[397] Era reformasi membawa perubahan signifikan dengan kebijakan yang lebih inklusif dan modern, serta pengembangan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan sekolah Islam terpadu.

[397] Sutrisno, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2002), 77.

B. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi struktural, kultural, maupun politik. [398] Berikut adalah tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten Banyak lembaga pendidikan Islam mengalami kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas dan kompeten, terutama dalam penguasaan ilmu umum dan teknologi. Hal ini menghambat penerapan kebijakan secara efektif.
2. Kurangnya Pemahaman Mendalam tentang Kebijakan Guru dan pengelola pendidikan sering kali belum memahami secara menyeluruh isi dan tujuan kebijakan pendidikan Islam, sehingga implementasinya tidak optimal.
3. Kesulitan Menyeimbangkan Kebijakan Nasional dengan Nilai-nilai Islam Pendidikan Islam harus menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman, yang sering menimbulkan dilema dan hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.
4. Kesenjangan Kualitas Pendidikan Madrasah dan pesantren sering dianggap sebagai pilihan kedua dibanding sekolah umum, dengan fasilitas dan kualitas pengajaran yang kurang memadai. Hal ini diperparah oleh kurangnya tenaga pengajar berkualitas, terutama dalam ilmu pengetahuan umum.
5. Minimnya Anggaran dan Infrastruktur Alokasi dana yang terbatas untuk pendidikan Islam menyebabkan kekurangan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendukung, terutama di daerah terpencil. Kesejahteraan guru juga sering kurang memadai.
6. Ketidakseimbangan Kurikulum Integrasi antara kurikulum agama dan kurikulum umum masih menjadi masalah. Banyak lembaga pendidikan Islam lebih menitikberatkan pada pengajaran agama sehingga kurang memberikan kompetensi ilmu pengetahuan modern yang dibutuhkan di dunia kerja.

[398] Zainuddin, *Pendidikan Islam Di Indonesia Tantangan Dan Solusi* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 78.

7. Persepsi Publik Negatif terhadap Pendidikan Islam Pendidikan Islam kadang dianggap hanya untuk siswa yang kurang mampu secara akademis atau ekonomi, sehingga menimbulkan stigma negatif dan mengurangi citra positif lembaga pendidikan Islam.
8. Tantangan Globalisasi dan Teknologi Perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi menuntut lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran dan manajemen berbasis teknologi, namun banyak yang belum mampu memanfaatkannya secara optimal.
9. Tantangan Internal dan Eksternal Pendidikan Islam Tantangan internal meliputi pencapaian standar nasional pendidikan, pengelolaan karakter peserta didik, dan pemenuhan kebutuhan demografis. Tantangan eksternal berkaitan dengan relevansi pendidikan terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan internasionalisasi Pendidikan.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan SDM, anggaran, infrastruktur, hingga kesulitan integrasi kurikulum dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.[399] Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan dukungan manajemen yang efektif, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta reformasi kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas dan relevansinya sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berakhlak sesuai nilai-nilai Islam serta siap bersaing di era global.

C. Peran Pemerintah, Khususnya Kementerian Agama, Dalam Pengelolaan Pendidikan Islam

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, memainkan peran sentral dalam pengelolaan pendidikan Islam di Indonesia.[400] Peran ini mencakup fungsi regulatif, fasilitatif, supervisi, dan pengembangan mutu, terutama

[399] Syamsudin, *Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2015), 37.

[400] Baharuddin, *Pendidikan Islam Di Indonesia Sejarah Dinamika Dan Kebijkan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 75.

dalam membina lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Berikut adalah uraian peran Kementerian Agama secara lebih rinci:

a. Regulasi dan Kebijakan

Kemenag menetapkan kebijakan nasional dalam pendidikan Islam, seperti:

a) Menyusun kurikulum pendidikan agama Islam dan madrasah
b) Menetapkan standar nasional pendidikan keagamaan
c) Mengatur perizinan dan legalitas lembaga pendidikan Islam (termasuk pesantren dan madrasah)

Contoh kurikulum Merdeka untuk madrasah yang diadaptasi dengan pendekatan khas keislaman.

b. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan

Kemenag membina lembaga seperti:

a) Madrasah (MI, MTs, MA)
b) Pesantren (salafiyah maupun modern)
c) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) seperti UIN, IAIN, dan STAIN

Pembinaan ini mencakup bantuan operasional, program peningkatan mutu, hingga akreditasi.

c. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kemenag bertanggung jawab atas peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, melalui:

a) Pelatihan dan sertifikasi guru madrasah
b) Program beasiswa S1, S2, dan S3 untuk guru dan dosen
c) Rekrutmen ASN guru di lingkungan madrasah dan PTKIN

d. Pendanaan dan Bantuan Operasional

Kemenag menyalurkan dana melalui berbagai skema:

a) BOS Madrasah (Bantuan Operasional Sekolah)
b) Bantuan sarana-prasarana untuk pesantren
c) Beasiswa santri dan mahasiswa di PTKIN

e. Pengawasan dan Evaluasi

Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag melakukan:

a) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan
b) Audit mutu pendidikan melalui sistem EMIS (Education Management Information System)
c) Supervisi terhadap madrasah dan pesantren

f. Penguatan Moderasi Beragama

Sebagai bagian dari program nasional, Kemenag mendorong:

a) Pendidikan Islam yang moderat, toleran, dan rahmatan lil ‘alamin
b) Kurikulum dan pelatihan guru yang menekankan anti-radikalisme
c) Kampanye nilai-nilai kebangsaan dan keislaman yang harmonis

g. Inovasi dan Digitalisasi Pendidikan

Kemenag juga berperan dalam mengembangkan:

a) Platform digital pembelajaran (e-learning madrasah)
b) Sistem digitalisasi administrasi dan akreditasi
c) Penguatan riset di PTKIN dalam sains Islam dan teknologi

Dengan peran tersebut, Kementerian Agama menjadi garda depan dalam memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk generasi yang moderat, berkualitas, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

D. Kebijakan Pendidikan Islam Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat Muslim Di Indonesia

Menurut [401] Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah berupaya menjawab kebutuhan masyarakat Muslim dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam sistem pendidikan nasional dan menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas oleh sejumlah kendala, seperti kesenjangan kualitas antara madrasah atau pesantren dengan sekolah umum, keterbatasan anggaran dan infrastruktur, serta kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas terutama di bidang ilmu pengetahuan umum.

Sejauh ini, kebijakan pendidikan Islam mampu memberikan dasar pembentukan karakter dan moral peserta didik sesuai nilai-nilai Islam, serta menyediakan akses pendidikan agama yang lebih luas di berbagai jenjang. Pemerintah juga berupaya melakukan

[401] Ali, *Pendidikan Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 28.

reformasi kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum agar lulusan madrasah dan pesantren memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran mulai didorong untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan Islam1.

Namun, implementasi kebijakan sering menghadapi hambatan teknis dan manajerial, seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang kebijakan di tingkat pelaksana, serta kesulitan menyeimbangkan antara kebijakan nasional dan nilai-nilai keislaman. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pencapaian tujuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat Muslim secara menyeluruh.

Dengan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penambahan anggaran, penguatan citra pendidikan Islam, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, kebijakan pendidikan Islam berpotensi lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan umat Muslim di Indonesia.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sudah berperan penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat Muslim, terutama dalam aspek pembentukan karakter dan integrasi nilai Islam dengan pendidikan umum. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan mengatasi tantangan implementasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim secara lebih optimal dan berkelanjutan. Aspek yang Sudah Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat Muslim:

a. Akses Pendidikan yang Semakin Merata
    a) Kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah dan bantuan dana untuk pesantren telah memperluas akses pendidikan Islam, bahkan ke daerah terpencil.
    b) Peningkatan jumlah madrasah dan pesantren, serta program digitalisasi pembelajaran (e-learning madrasah), memperluas akses belajar agama dan ilmu umum secara bersamaan.
b. Integrasi Ilmu Agama dan Umum
    a) Kurikulum di madrasah kini mencakup ilmu keislaman dan ilmu umum, menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin anak-anaknya religius sekaligus mampu bersaing secara akademik.

c. Penguatan Moderasi Beragama

a) Program *moderasi beragama* dari Kemenag berusaha membentuk karakter Muslim yang toleran dan cinta tanah air, menjawab keresahan masyarakat terhadap potensi radikalisme di lembaga pendidikan Islam.

d. Ketersediaan Lembaga Formal dan Non-Formal

a) Masyarakat dapat memilih jalur pendidikan Islam formal (madrasah, PTKIN) atau non-formal seperti pesantren, pendidikan diniyah, dan majelis taklim, sesuai kebutuhan sosial dan ekonomi mereka.

E. Rekomendasi Kebijakan Yang Dapat Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Islam Di Indonesia

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan Islam di Indonesia, berdasarkan tantangan dan evaluasi kebijakan yang telah berjalan:

a. Penguatan Tata Kelola dan Integrasi Sistem Pendidikan Islam

a) Rekomendasi

Tingkatkan koordinasi antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar tidak terjadi dualisme sistem dan kebijakan.

b) Tujuan

Menyelaraskan standar mutu, kurikulum, dan pendanaan antara madrasah dan sekolah umum.

c) Strategi

Integrasi data pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) yang terhubung ke Dapodik.

b. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru

a) Rekomendasi

Perluas program sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan beasiswa bagi guru madrasah dan pesantren.

b) Tujuan

Meningkatkan kompetensi pedagogis dan profesionalisme tenaga pendidik.

c) Strategi

Optimalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) keagamaan Islam dan insentif berbasis kinerja.

c. Modernisasi Kurikulum dan Integrasi Keilmuan

a) Rekomendasi

Kembangkan kurikulum pendidikan Islam yang kontekstual dengan kebutuhan zaman (kewirausahaan, teknologi, literasi digital).

b) Tujuan

Menjadikan lulusan madrasah dan pesantren kompeten secara spiritual dan intelektual.

c) Strategi

Integrasi ilmu agama dengan sains dan teknologi melalui pendekatan interdisipliner di madrasah dan PTKI.

d. Digitalisasi dan Akses Teknologi

a) Rekomendasi

Percepat pemerataan digitalisasi madrasah dan pesantren dengan bantuan infrastruktur dan pelatihan.

b) Tujuan

Mengatasi kesenjangan akses pendidikan Islam di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

c) Strategi

Kembangkan platform e-learning khusus pendidikan Islam dan digital library berbasis kitab kuning.

e. Reformasi Pendanaan yang Adil dan Transparan

a) Rekomendasi

Evaluasi ulang alokasi anggaran BOS dan BOP agar lebih proporsional, terutama untuk madrasah swasta dan pesantren kecil.

b) Tujuan

Pemerataan layanan pendidikan dan pengurangan ketimpangan antar lembaga.

c) Strategi

Skema pendanaan berbasis kinerja dan kebutuhan daerah.

f. Penguatan Pendidikan Moderasi Beragama

a) Rekomendasi

Wajibkan pelatihan moderasi beragama bagi guru dan pimpinan lembaga pendidikan Islam.

b) Tujuan

Menumbuhkan nilai-nilai Islam yang toleran, inklusif, dan cinta tanah air.

c) Strategi

Kolaborasi dengan ormas Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah dalam penyusunan materi ajar.

g. Monitoring, Evaluasi, dan Akreditasi Berbasis Mutu

a) Rekomendasi

Tingkatkan fungsi evaluasi berkala dan sistem akreditasi independen untuk madrasah dan pesantren.

b) Tujuan

Menjamin standar mutu pendidikan Islam secara nasional.

c) Strategi

Penerapan reward–punishment system berbasis hasil evaluasi mutu dan capaian pendidikan.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa, mulai dari masa kolonial yang terbatas, masa kemerdekaan yang mulai mengarah pada integrasi pendidikan agama, hingga masa Orde Baru yang memperkenalkan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional.

Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan dukungan manajemen yang efektif, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, serta reformasi kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum.

Kementerian Agama menjadi garda depan dalam memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk generasi yang moderat, berkualitas, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sudah berperan penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat Muslim, terutama dalam aspek pembentukan karakter dan integrasi nilai Islam dengan pendidikan umum. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan

mengatasi tantangan implementasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Reformasi pendidikan Islam tidak hanya soal akses, tetapi juga mutu dan relevansi. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak sekadar administratif, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Kusnawan, Merumuskan *Islam and Secularism*, *Jurnal Ilmiah,* (Banjarmasin: 2017).

Ali. *Pendidikan Islam Di Indonesia*, 28. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Baharuddin. *Pendidikan Islam Di Indonesia Sejarah Dinamika Dan Kebijkan*, 75. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Hax dan Majluf, *Strategic Management For Educational Management*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Muhammad Minan, Islam Dan Pembahasan, *Jurnal Pendidikan islam, Vol. 1, No. 1*, (Jakarta: 2019).

Purnomo, Pendidikan Islam Antara Tradisi Dan Modernitas, *Jurnal Kependidikan, Vol. 3. No. 1,* (2017).

Rahmatullah dan Anisa, Perkembangan Kebijakan Pendidikan, *Jurnal Evaluasi, Vol. 4, No. 1,* (2020).

Sutrisno. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 77. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, (2002).

Syamsudin. *Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Orde Baru*, 37. Jakarta: Kencana, (2015).

Windaningrum, Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.2,* Semaran (2019).

Zainuddin. *Pendidikan Islam Di Indonesia Tantangan Dan Solusi*, 78. Bandung: Pustaka Setia,(2020).

BAB 22
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA MALAYSIA

(Siti Nur Kholifah)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan moral masyarakat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah Malaysia telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk memastikan pendidikan Islam tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga mampu bersaing secara intelektual di tingkat global. Upaya ini dilakukan melalui pembaharuan kurikulum, penguatan institusi pendidikan Islam, serta penyelarasan antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan pembangunan nasional.

Malaysia berada di posisi sentral di dunia Islam kerana kisah sejarahnya sebagai sebuah negara Islam. Beberapa proses Islamisasi di negara ini tidak terjadi sama sekali yang tidak pasti, tetapi desis pedagang muslim, keras kepala dan berbakti mubalig ditambah dengan tanaman mereka nilai-nilai Islam dengan pendidikan telah memprecedat sebelumnya. Malaysia telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan menghasilkan generasi yang cerdas, tetapi masih ada hambatan.[402]

Kebijakan pendidikan Islam di Malaysia tidak hanya fokus pada aspek keagamaan semata, tetapi juga menekankan pada pembentukan insan yang berilmu, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman modern. Integrasi ilmu agama dan pengetahuan umum menjadi salah satu ciri khas sistem pendidikan Islam di negara ini. Untuk memahami bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan standard pendidikan Islam dan melahirkan generasi yang mulia, prioritas untuk menganalisis dan menilai kebijakan pendidikan Islam di Malaysia. Sehubungan dengan proses

[402] Achmad Asrori, 'Islamic Education Development Strategi in Facing the Global Challenges.', *International Journal of Science and Research*, Vol.4, No.4 (2015), hal 23.

globalisasi yang makin bergerak lambat dan tuntutan sosial yang berkembang, pendidikan Islam Malaysia harus "hidup sesuai jaman," mencerna dan merekonstruksi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana sejarah pendidikan islam di Malaysia?
b. Apa saja kebijakan pendidikan islam di negara malaysia?
c. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan islam di negara Malaysia?
d. Apa saja tantangan implementasi kebijakan pendidikan islam di negara Malaysia?

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka (library research), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kebijakan pendidikan Islam pada negara Malaysia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari jurnal ilmiah, artikel akademik, serta buku yang dapat diakses melalui internet. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria kesesuaian dengan topik dan kemutakhiran informasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi pokok-pokok informasi penting, mengelompokkan data sesuai tema, serta menyusun hasil kajian secara sistematis.

TEORI

Kebijakan pendidikan Islam di Malaysia menunjukkan bahwa negara ini secara sistematis mengintegrasikan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasionalnya sebagai bagian dari upaya membentuk masyarakat yang berkarakter Islami dan seimbang. Falsafah pendidikan negara Malaysia menempatkan Islam sebagai elemen penting dalam membentuk pribadi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan spiritual yang kuat. Pendidikan Islam di Malaysia mencakup pendidikan tradisional seperti pondok dan madrasah, serta pendidikan formal yang terintegrasi dalam sistem nasional dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Sejak kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia telah memasukkan ilmu agama Islam ke dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari

pendidikan wajib bagi siswa muslim. Pada tahun 1975, pemerintah memperkuat pendidikan Islam melalui pelatihan guru dan pengembangan sistem pengajaran yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Kebijakan Islamisasi pendidikan semakin mendapat perhatian khusus pada era pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Muhammad pada awal 1980-an, di mana nilai-nilai Islam ditanamkan tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam aspek pemerintahan dan sosial. Departemen Pendidikan Malaysia mengatur pembelajaran nilai moral untuk semua siswa dan ilmu agama Islam khusus untuk siswa muslim, sehingga menjaga keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

Peran pemerintah sangat dominan dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendidikan Islam melalui regulasi seperti Akta Pendidikan 550 tahun 1996 yang mengatur pelaksanaan pendidikan Islam di institusi pendidikan resmi. Kebijakan ini memastikan bahwa pendidikan Islam yang diberikan sesuai dengan falsafah pendidikan nasional dan mampu menjawab tantangan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam di Malaysia berkembang secara terintegrasi dan berkelanjutan, menciptakan generasi yang berpengetahuan luas sekaligus berakhlak mulia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat multietnis di negara tersebut.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendidikan Islam di Malaysia

Berdasarkan bukti sejarah, sistem pendidikan Islam di Tanah Melayu dimulai pada tahun 1414 Masehi, ketika Parameswara, raja pertama Malaka, memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Megat Iskandar Syah. Masuk Islamnya sang raja diikuti oleh para penguasa dan rakyatnya. Raja Malaka pertama yang memeluk Islam berusaha untuk belajar dari para ulama dan mubaligh yang berkunjung ke Malaka. [403]

a. Sebelum Kedatangan Inggris (1400-1786)

Di Malaysia, pendidikan Islam berkembang melalui pondok-pondok atau sekolah Al-Qur'an yang bersifat tidak formal. Pada masa tersebut, lembaga-lembaga ini memainkan

[403] Muhammad Nashihudin, *Metode Ibrah* (Medan: CV Azka Pustaka, 2024) hal 183.

peranan penting dalam mendidik masyarakat Melayu. Sejak era kegemilangan kerajaan Malaka, Malaysia sudah memiliki sistem pendidikan tersendiri. Sistem pendidikan menjadi berbasis Islam ketika tiba di Asia pada abad ke-15. Menurut catatan sejarah, sekolah-sekolah agama tradisional pertama di Malaysia didirikan pada abad ke-18 di negara bagian Trengganu dan Kelantan. Sekolah-sekolah agama kemudian menyebar ke negara bagian Kelantan, Pulau Pinang, Perak, dan Kedah. Kurikulum pendidikan pada akhir abad ke-19 meniru kurikulum yang diterapkan di masjid al-haram di Mekkah. Pendidikan agama Islam diajarkan pada saat itu dengan tiga cara yang berbeda, yaitu: [404]

1) Pada awalnya, proses pembelajaran berlangsung di kediaman para guru, di mana para pelajar mendatangi rumah para ulama untuk mempelajari Al-Qur'an dan fikih.
2) Selanjutnya, kegiatan pendidikan dipindahkan ke masjid, surau, atau madrasah guna menampung lebih banyak siswa. Pada masa itu, ulama sangat dihormati oleh masyarakat dan sering diundang ke istana untuk memberikan pendidikan kepada keluarga kerajaan.
3) Pendidikan kemudian difokuskan ke rumah-rumah para ulama, yang disebut pondok pesantren.

Tauhid, hadis, nahwu, tasawuf, akhlak, dan bahasa Arab Jawi adalah semua topik yang dipelajari.Setelah menyelesaikan masa belajar di pondok, santri biasanya kembali ke kampung halaman untuk mengabdikan ilmunya, namun ada juga yang memilih untuk tetap tinggal di pondok guna melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 1511, ketika Portugis datang dan menaklukkan negeri Malaka, sistem pendidikan mengalami perubahan yang berlandaskan agama Kristen.Ketika Belanda menjajah Malaka, mazhab Kristen yang diajarkan di sana berangsur-angsur bergeser dari Katolik Roma ke Protestan. Tanah Melayu dijajah oleh Inggris pada tahun 1786, yang menyebabkan sistem pendidikan kembali bergeser ke standar Inggris.

[404] Andi Aslindah, 'Pendidikan Islam Di Malaysia: Jenis, Jenjang, Kebijakan Dan Tujuan Pendidikan', *Lentera Pendidikan*, Vol.18, No.1, (2015), hal 22–23.

b. Pendudukan Inggris (1786–1956)

Pendidikan di Malaysia dibagi menjadi lima jenis sekolah selama penjajahan Inggris. Sekolah vernakular Melayu, vernakular Cina, vernakular India, vernakular Inggris, dan sekolah agama. Ketika pendudukan Jepang dimulai, mereka memperkenalkan pengajaran bahasa Jepang, terutama bagi masyarakat Tamil dan Melayu. Selain itu, Jepang mengganti sistem pendidikan vernakular Cina dan Inggris dengan kurikulum yang lebih menekankan pada musik tradisional dan budaya Jepang. Selama periode ini, bahasa Jepang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Akibatnya, pemerintah Jepang memutuskan untuk menutup banyak sekolah dan pondok pesantren.

Selama penjajahan Inggris, seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat tanpa adanya dukungan dana dari pemerintah. Kondisi ini mendorong organisasi-organisasi islam melayu untuk melakukan penggalangan dana demi membiayai pendidikan anak-anak melayuPada saat ini, fungsi pondok pesantren yang dulunya terkonsentrasi di rumah-rumah ulama mulai berkurang dan digantikan oleh madrasah dan sekolah agama sebagai pusat pendidikan baru. Materi pelajaran yang diajarkan juga mengalami perubahan, dengan fokus utama pada ilmu keduniaan yang bersifat fardu kifayah, serta ilmu keagamaan yang termasuk dalam fardu 'ain, di samping pengenalan ajaran-ajaran reformis.[405]

c. Kemerdekaan Malaysia (1957-sekarang)

Hanya berselang beberapa tahun setelah meraih kemerdekaan, pada tahun 1960, pemerintah federal Malaysia mengeluarkan amanat agar semua negara bagian menerapkan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah bagi para peserta didik yang beragama Islam. Sistem pendidikan Islam ini terbagi menjadi tiga jenjang, dimulai dengan pra-sekolah yang lebih dikenal sebagai Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam (TASKI). Angkatan Belia Islam Malaysia mendirikan TASKI pada tahun 1975 dengan tujuan mengajarkan anak-anak dasar Islam sebelum mereka melanjutkan ke sekolah dasar. Setelah menyelesaikan

[405] Iskandar, *Sejarah Pendidikan Di Asia Tenggara* (Prenada Media, 2019) hal 93.

pendidikan di TASKI, siswa akan siap untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.[406]

Untuk saat ini, ada dua jenis sekolah dasar dan menengah di Malaysia: pemerintah dan swasta. Sekolah swasta biasanya memberikan pendidikan agama yang lebih baik dibandingkan sekolah pemerintah. Para siswa akan melanjutkan ke sekolah tinggi setelah menyelesaikan jenjang tersebut. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan huruf Jawi digunakan dalam pelajaran agama karena suku Melayu adalah kelompok mayoritas di Malaysia.

Dapat disimpulkan bahwa, Perkembangan pendidikan Islam di Malaysia mencerminkan tekad pemerintah untuk mengembangkan pendidikan Islam yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim di negara tersebut. Malaysia secara berkelanjutan berupaya memperkuat sistem pendidikan Islam guna mencetak generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional.

B. Kebijakan Pendidikan Islam di Negara Malaysia

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris "policy". Sementara Kebijakan pendidikan adalah terjemahan dari kebijakan pendidikan, yang merupakan kombinasi antara kebijakan dan pendidikan. Kebijakan berarti peraturan yang harus diikuti. Politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis adalah istilah yang sering diasumsikan sebagai kebijakan.[407]

Definisi kebijakan pendidikan, berdasarkan penelitian yang dikutip oleh Anwar dari Carter V. Good, menyatakan bahwa Kebijakan pendidikan adalah jenis penilaian yang berasal dari sistem nilai tertentu dan evaluasi faktor situasional. Kebijakan ini beroperasi dalam konteks pendidikan yang terinstitusionalisasikan sebagai rencana umum yang bertujuan untuk memandu pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

[406] Anwar, 'Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.3, No.5, (2017), hal 86.

[407] Wilda Razaqna, 'Perbandingan Sistem Pendidikan Di Malaysia Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.3, No.1, (2024), hal 58.

Dengan kata lain, kebijakan pendidikan merupakan langkah strategis untuk menilai nilai-nilai dan kebutuhan yang ada dalam institusi pendidikan.

Dalam hal pendidikan Islam, banyak ahli memberikan definisi dengan sudut pandang yang berbeda. Hasan Langgulung misalnya, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai suatu proses yang membekali generasi penerus agar dapat berperan aktif, dengan menanamkan pengetahuan serta nilai-nilai Islam sesuai dengan fungsi manusia. Tujuannya adalah agar mereka dapat melakukan kebajikan di dunia ini dan menerima pahala di akhirat.

Di sisi lain, pendidikan nasional suatu bangsa merupakan cerminan dari filosofi yang dipilih oleh bangsa tersebut. Mengacu pada isu-isu dasar dan ideologi yang ada, Malaysia juga memiliki filosofi pendidikan nasionalnya sendiri. Rukun Negara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut ideologi negara Malaysia.Satu tahun setelah tragedi 13 Mei 1969, Dewan Pergerakan Nasional menetapkan pilar negara ini pada tanggal 31 Agustus 1970. Filosofi pendidikan nasional (FPK) adalah nama saat ini untuk filosofi pendidikan negara ini. FPK dinyatakan sebagai fokus, fondasi, dan inspirasi untuk semua upaya pendidikan.

Berikut ini adalah filosofi pendidikan Malaysia:[408] "Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berkelanjutan ke arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, terampil, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu memimpin rakyatnya mencapai kesejahteraan diri dan memberi kontribusi terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara."

a. Pendirian Institusi Pembelajaran Islam

Kebijakan pemerintah Malaysia dalam pengembangan pendidikan tinggi, terutama di bidang studi Islam, menarik untuk diteliti. Kajian mengenai Islam di tingkat pendidikan tinggi di Malaysia dimulai pada tahun 1950-an dengan berdirinya Universitas Malaya (UM). Sebagai perguruan tinggi tertua di

[408] Wahab Abdul Syakhrani, 'Sistem Pendidikan Di Negara Malaysia', *Educatioanal Journal: General and Specific Research*, Vol.2, No.2, (2022), hal 323.

negara ini, Universitas Malaya terus melanjutkan program pendidikan tinggi dalam disiplin ilmu Islam hingga saat ini. Berbeda dengan perguruan tinggi di Indonesia yang umumnya menawarkan pendidikan agama Islam di institusi khusus, Universitas Malaya memulai pendidikan Islam melalui pembentukan Departemen Studi Islam (DIS) di bawah Fakultas Sastra.

Pada awalnya, pelaksanaan pendidikan Islam di Universitas Malaya dilakukan melalui kerja sama dengan MMC. Kurikulum yang diajarkan di DIS mencakup berbagai topik menarik, antara lain bahasa Arab, konstitusi Islam, peradaban Islam, sastra Arab, pemikiran politik Islam, Qawaid, sejarah filsafat Islam, hukum Islam di Malaysia, serta konstitusi Islam di Asia Tenggara. Selain itu, terdapat juga pembahasan tentang sejarah ekonomi Islam dan metodologi ekonomi Islam. Sejak tahun 1995, DIS yang awalnya berada di bawah Fakultas Sastra dan Ilmu Sosial telah bertransformasi menjadi bagian dari Akademi Studi Islam. Hingga saat ini, akademi ini tetap menjadi komponen penting dalam Universitas Malaya.[409]

Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam. Didirikan pada 18 Mei 1970, universitas ini memiliki tiga fakultas pionir, yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Sains, dan Fakultas Studi Islam. Di dalam fakultas tersebut, tersedia berbagai jurusan menarik, antara lain Hukum Islam, Teologi dan Filsafat, Sastra Arab dan Peradaban Islam, Dakwah dan Kepemimpinan, serta Al-Qur'an dan Hadis. Selain Universitas Malaysia (UM) dan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), pendidikan Islam juga ditawarkan di perguruan tinggi lain, salah satunya adalah Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Syah. Perguruan tinggi ini mengkhususkan diri pada pendidikan hingga tingkat diploma dan didirikan oleh pemerintah negeri Pahang melalui badan usahanya, Sistem Pendidikan Islam Pahang Sdn. Bhd. Kolej Islam Pahang mengembangkan filosofi pendidikan yang komprehensif, yang berlandaskan pada ilmu, iman, dan amal.

[409] Ahmad Qurtubi, *Perbandingan Pendidikan* (Cv. Jakad Media Publishing., 2020) hal 25.

Tujuannya adalah untuk mencetak insan yang bertakwa, terampil, dan berjiwa kepemimpinan guna membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis, baik di dunia maupun di akhirat. Produk lembaga perguruan tinggi Islam di Malaysia seperti *International Islamic University Malaysia* (IIUM) dan *International Islamic Institut Pemikiran dan Peradaban Islam (ISTAC) didirikan pada akhir tahun 1980-an.* Dalam beberapa tahun terakhir, kedua lembaga pendidikan Islam tersebut telah melakukan penggabungan dalam manajemen.

b. Beasiswa

Menerapkan strategi pendidikan dasar gratis secara universal-kebijakan yang mengharuskan semua warga negara Malaysia untuk bersekolah di sekolah dasar secara gratis dianggap sebagai langkah yang sangat berani oleh pemerintah Malaysia. Mengingat bahwa Indonesia baru mengimplementasikan kebijakan serupa pada tahun 1994 sekitar 50 tahun setelah meraih kemerdekaan kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang berani. Sebaliknya, Malaysia telah memberlakukan kebijakan ini lebih awal, yakni pada tahun 1962, hanya lima tahun setelah mereka meraih kemerdekaan. Pemerintah Malaysia juga melihat tawaran beasiswa bagi mereka yang berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri mau pun di luar negeri, sebagai sebuah kebijakan yang cukup berani. [410]

Kebijakan pendidikan nasional Malaysia menegaskan bahwa setiap warga Negara Malaysia, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan tinggi, baik di tingkat sekolah menengah maupun di universitas, baik di dalam maupun luar negeri. Kementerian Pendidikan Malaysia menjalankan kebijakan ini dengan memanfaatkan berbagai sumber dana, seperti negara-negara Persemakmuran dan Colombo Plan, bersama dengan Yayasan Tengku Abdul Rahman dan anggaran dari Kementerian Pendidikan, telah menjadi pilar penting dalam kebijakan pendidikan pemerintah Malaysia. Melalui inisiatif ini, pemerintah berhasil meningkatkan jumlah

[410] Zipen Apriansyah, 'Telaah Sistem Dan Kebijakan Pendidikan Di Negara Malaysia (Studi Perbandingan Pendidikan)', *Jurnal Studi Islam, Sosial Dan Pendidikan*, Vol.3, No.1 (2024), hal 38.

mahasiswa yang studi di luar negeri, yang pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di negara ini.

c. Mendatangkan Dosen atau Guru dari Negara Lain

Beberapa pihak berpendapat bahwa berdirinya sejumlah universitas Islam di Malaysia berkaitan erat dengan program beasiswa pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Beasiswa ini ditujukan bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, seperti di Al-Azhar, Mesir, dan daerah sekitarnya. Selain itu, pemerintah Malaysia juga telah mengambil inisiatif untuk merekrut dosen dan guru asing di berbagai bidang, sebagai pelengkap bagi program beasiswa yang telah ada.

Upaya ini bertujuan untuk mendukung keberadaan International Islamic University Malaysia (IIUM) dan ISTAC. Mengingat bahwa IIUM pada awalnya mengalami kekurangan tenaga pengajar dengan latar belakang studi Islam yang memadai, pemerintah berinisiatif untuk merekrut pengajar dari negara-negara lain, antara lain Timur Tengah, Turki, Pakistan, India, Sudan, Yaman, dan negara-negara lainnya, mencatatkan bahwa saat itu jumlah dosen asing melebihi 70% dari total dosen di dalam negeri. Di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim sebagai wakil perdana menteri, semua mahasiswa diberikan hak untuk mendapatkan beasiswa dari IIUM, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman. Kebijakan ini diterapkan untuk menarik minat mahasiswa dari berbagai negara Islam lainnya agar melanjutkan studi di institusi tersebut.[411]

Dana untuk beasiswa ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh para donatur dari negara-negara Timur Tengah, termasuk perusahaan-perusahaan milik negara maupun swasta. Pendekatan pendanaan serupa juga diterapkan oleh Prof. Syed Naquib al-Attas dari *International Islamic Institute of Islamic Thought and Civilization* (ISTAC), seorang cendekiawan terkemuka asal Malaysia. Selain Prof. Hasan Nagar, yang mengajar bahasa Arab di *University of Chicago*, Amerika Serikat, Prof. Syed Naquib al-Attas juga mengundang Prof. Alparslan Acikgenc, seorang ahli filsafat Islam dari *Middle East Technical University* (METU) di

[411] Abdul Basyid, 'Analisis Kebijakan Pendidikan', *Akademika:Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, Vol.18, No.2 (2022), hal 222.

Turki. Dalam bidang psikologi Islam, Sami Hamameh dan Prof. Malik Badri diakui sebagai dua otoritas terkemuka, khususnya dalam konteks ilmu kedokteran Islam. Selain itu, di dalam kerja sama ini juga dilibatkan beberapa orientalis terkemuka, seperti Hans Daiber dan Paul Lettink. Sementara itu, Prof. Naquib al-Attas juga berupaya untuk menyiapkan generasi muda Malaysia sebagai calon penerus dosen dari luar negeri. Salah satu langkah lainnya adalah dengan menyediakan buku-buku berkualitas tinggi tentang studi Timur dan Barat di perpustakaan. ISTAC telah memperoleh salinan dari Koleksi Manuskrip Mingana, yang dianggap sebagai salah satu yang paling komprehensif di Inggris, termasuk koleksi naskah dari Bosnia. Oleh karena itu, orientalis terkemuka dari Jerman, Hans Deiber, mengakui bahwa perpustakaan Fakultas Kajian Timur di Frankfurt masih belum sekomprehensif perpustakaan ISTAC. [412]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak Malaysia meraih kemerdekaan, kebijakan pendidikan Islam telah menjadikan pendidikan agama Islam sebagai elemen penting dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk membentuk individu Muslim yang seimbang dalam aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Pemerintah secara aktif memperkuat pendidikan Islam melalui pengembangan kurikulum, pelatihan bagi para guru, dan penanaman nilai-nilai Islam. Selain itu, pendidikan Islam dikelola dalam berbagai tingkatan dan jenis, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan muncul sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang mendalam, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Hal ini juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang harmonis dan maju.

d) Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Negara Malaysia

Kebijakan dan inisiatif pendidikan Islam menjadi fokus utama selama kepemimpinan Mahathir Muhammad sebagai Menteri Pendidikan. Ia dipandang sebagai sosok yang berperan penting dalam upaya Malaysia untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Saat pertama kali menjabat pada tahun 1974, Mahathir

[412] Haryanto, 'Perbandingan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Malaysia', *Adabiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1, No.1 (2016), hal 86.

mengawali tugasnya dengan mengevaluasi sistem pendidikan Islam yang, menurutnya, sudah usang dan kurang efektif. Tak lama setelah itu, ia membentuk dewan penasihat khusus untuk pendidikan Islam dan mengorganisir peninjauan menyeluruh terhadap metode pengajaran dan pembelajaran agama Islam.[413] Pembentukan dewan penasihat ini bertujuan untuk memperkuat relevansi Islam dengan kebutuhan modernisasi masyarakat Muslim di Malaysia, serta memastikan bahwa setiap gerakan dapat dilaksanakan secara koor-dinatif dan sistematis. Kementerian Pendidikan menginvestasikan sejumlah besar uang pada tahun 1975 untuk meningkatkan pelatihan guru-guru Islam. Sepuluh sekolah Islam terbaik di negara ini akan diambil alih oleh pemerintah pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja staf dan guru dan menjadikan sekolah-sekolah tersebut sebagai model.

Pusat Penelitian Islam Asia Tenggara didirikan oleh pemerintah pada tahun 1979. Di tahun yang sama, pengetahuan agama Islam mulai diperkenalkan sebagai salah satu mata pelajaran dalam ujian Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Kemudian, pada tahun berikutnya, pemerintah membuka Maktab Perguruan Islam yang pertama di mana para calon siswa akan dikirim untuk melanjutkan pendidikan mereka di Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Kebijakan Malaysia lainnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam meliputi: [414]

a. Ilmu agama telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional Malaysia sejak negara ini meraih kemerdekaannya pada tahun 1957.
b. Kementerian Pendidikan melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan pendidikan Islam pada tahun 1975.
c. Keputusan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dibuat oleh Perdana Menteri Mahathir Muhammad pada tahun 1982.

[413] Surya Fikri Pratama, 'Perkembangan Dan Implikasi Implementasi Kebijakan Politik Islam Dalam Kehidupan Pluralisme Malaysia', *Majalah Ilmiah Tabuah,* Vol.26, No.2 (2022), hal 57.

[414] Zihnil Arifin, 'Pendidikan Islam Di Malaysia', *Jurnal Kolaborasi Sains*, Vol.7, No.1 (2024), hal 324.

d. Kementerian Pendidikan mengumumkan pada tahun 1983 bahwa sementara siswa Muslim akan diajarkan pengetahuan agama, siswa non-Muslim akan diajarkan nilai-nilai moral.

Sejak Malaysia meraih kemerdekaan pada tahun 1957, pengetahuan agama Islam telah menjadi bagian integral dari kurikulum nasionalnya. Pada tahun 1975, Kementerian Pendidikan mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan pendidikan Islam. Kemudian, pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir Muhammad memutuskan untuk menerapkan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Pada tahun 1983, Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa siswa Muslim akan diajarkan pengetahuan agama, sementara siswa non-Muslim akan diberikan pendidikan tentang nilai-nilai moral.

Pendidikan di Malaysia bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara utuh dan holistik, berlandaskan iman dan ketaatan kepada Tuhan, dengan harapan menciptakan individu yang harmonis dan seimbang dalam berbagai aspek intelektual, spiritual, emosional, dan fisik.Menghasilkan warga negara Malaysia yang berpengetahuan luas, kompeten, bermoral, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan komunitasnya adalah tujuan dari tujuan ini. [415] Jenis dan tingkat pendidikan Islam di Malaysia mencakup pondok, madrasah, dan sekolah agama Islam lainnya. Sekolah umum seperti Sekolah Kebangsaan, Kluster, dan Jenis Kebangsaan juga terdapat Pendidikan prasekolah, Pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, pendidikan pascasekolah menengah, dan pendidikan tinggi adalah semua tingkat pendidikan yang tersedia.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Malaysia dilakukan dengan mengintegrasikan ilmu agama Islam ke dalam kurikulum nasional sejak kemerdekaan, didukung oleh pengembangan sarana pembelajaran, pelatihan guru agama, dan pendirian lembaga pendidikan Islam formal seperti universitas dan madrasah. Pemerintah juga mengatur pendidikan Islam secara sistematis melalui undang-undang seperti Akta Pendidikan 550, yang memberikan prioritas khusus bagi pendidikan agama Islam.

[415] Aslan, 'Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam Di Malaysia.', *Talimuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8, No.1 (2019), hal 34.

Selain itu, pendidikan Islam diketuai oleh dua sistem, tradisional dan modern, yang berlangsung paralel untuk mengisi kebutuhan masyarakat Muslim Malaysia dalam konteks modernisasi dan pembangunan nasional.

e) Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Negara Malaysia

Tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam di Malaysia adalah: [416]

a. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, yaitu guru yang sepenuhnya memahami kebijakan secara dalam dan berusaha mewujudkannya melalui nilai-nilai Islam efektif dalam belajar.
b. Kurangnya pemahaman mendalam tentang kebijakan, di kalangan tenaga pendidik dan pemangku kepentingan, yang menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal.
c. Kesulitan menyeimbangkan antara kebijakan nasional dan nilai-nilai Islam, sehingga perlu sinergi yang baik agar kebijakan pendidikan Islam tetap selaras dengan visi pendidikan nasional tanpa mengorbankan karakteristik Islam.
d. Dukungan manajemen yang kurang efektif dan koordinasi yang lemah antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan.
e. Adaptasi terhadap perubahan kurikulum dan integrasi isu kontemporer, seperti moderasi beragama, toleransi, dan teknologi digital yang menuntut guru memiliki kompetensi baru dan kemampuan mengelola pembelajaran modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

Mengatasi tantangan ini memerlukan peningkatan kompetensi guru, manajemen pendidikan yang lebih baik, serta kolaborasi erat antara semua pihak terkait untuk memastikan kebijakan pendidikan Islam berjalan efektif dan berkualitas. Adapun Tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan di Malaysia meliputi:[417]

---

[416] R. Embong, 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Nusantara: Malaysia Dan Indonesia', *Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan*, Vol. 21, No.1 (2020), hal 140.

[417] Hadit Pratama, 'Hadit Pratama, Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia', *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, Vol.3, No.1 (2025), hal 32.

a. Kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedalaman, terutama di Sabah dan Sarawak, di mana infrastruktur dan fasilitas pembelajaran masih terbatas.
b. Kekurangan guru yang signifikan (lebih dari 20.000 guru pada 2024) menyebabkan beban kerja tinggi dan stres di kalangan pendidik, yang berdampak pada kualitas pengajaran.
c. Reformasi kurikulum dan teknologi pendidikan menghadapi kendala seperti ketidakmerataan akses internet di sekolah terpencil dan kebutuhan pelatihan guru agar mampu mengajarkan kurikulum baru yang menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
d. Pendanaan dan birokrasi yang menyebabkan keterlambatan pembangunan fasilitas pendidikan meskipun anggaran sudah dialokasikan besar.
e. Keragaman budaya dan kebutuhan lokal yang menuntut kurikulum fleksibel agar dapat menjawab tantangan kesetaraan dan identitas di tengah masyarakat yang sangat beragam.
f. Masalah pendidikan anak-anak TKI di Malaysia, termasuk keterbatasan akses layanan pendidikan akibat masalah izin tinggal dan pengelolaan guru yang tersebar di lokasi sulit di Sabah.

Dapat disimpulkan bahwa Tantangan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Malaysia meliputi kompleksitas masyarakat multiras yang memerlukan pendekatan inklusif, kendala dalam pengelolaan dan pendanaan pendidikan agama, serta kebutuhan pembaruan kurikulum agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selain itu, perbedaan sistem pendidikan tradisional dan modern juga menimbulkan kesulitan dalam integrasi dan standarisasi pendidikan Islam secara nasional. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan dan menuntut penyesuaian berkelanjutan agar pendidikan Islam dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan zaman

KESIMPULAN

Sejarah pendidikan Islam di Malaysia bersumber sejak kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-7 M, dan ternyata berkembang pesat mengiringi penubuhan kerajaan-kerajaan Islam yang kebal seperti Kesultanan Melaka. Namun pada itu, pendidikan Islam diselenggara secara tidak formal di surau, surau, serta rumah-rumah guru agama dan dengan fokus utama menyampaikan ulang pengajian Al-Qur'an beserta asas-asas agama. Seiring berjalannya waktu, muncul institusi pondok dan madrasah pada abad ke-19, yang kemudian menjadi cikal bakal sekolah-sekolah agama formal. Setelah kemerdekaan, pendidikan Islam mulai diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional dengan pendekatan yang lebih modern dan terstruktur.

Pemerintah Malaysia menetapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat pendidikan Islam, di antaranya melalui Rencana Induk Pendidikan Islam Nasional dan pengesahan Undang-Undang Pendidikan 1996. Kebijakan ini menekankan integrasi antara ilmu duniawi dan ukhrawi, dengan memperkenalkan pendidikan Islam ke dalam kurikulum nasional, baik di tingkat dasar maupun menengah. Selain itu, Malaysia juga membentuk institusi pendidikan tinggi Islam seperti International Islamic University Malaysia (IIUM) dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) untuk membantu pengembangan keilmuan Islam yang lebih luas dan kompetitif di tingkat dunia.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Malaysia dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah agama negeri, serta sekolah nasional biasa. Mata pelajaran seperti Pendidikan Islam menjadi wajib bagi siswa Muslim di sekolah, sedangkan kurikulum diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam secara lintas mata pelajaran. Pemerintah juga menyediakan pelatihan bagi guru Pendidikan Islam, membangun infrastruktur pendidikan berbasis Islam, dan mendorong pendekatan teknologi dalam pembelajaran keagamaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman modern.

Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, implementasi pendidikan Islam di Malaysia menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi perbedaan standar kualitas antara sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, serta resistensi terhadap integrasi antara kurikulum Islam dan kurikulum umum. Selain itu, globalisasi dan

pengaruh budaya asing juga menjadi tantangan dalam mempertahankan relevansi pendidikan Islam bagi generasi muda, yang menuntut inovasi berkelanjutan dalam metode pengajaran agar tetap menarik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, (2017), 'Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia.', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 3.5

Apriansyah, Zipen, (2024), 'Telaah Sistem Dan Kebijakan Pendidikan Di Negara Malaysia (Studi Perbandingan Pendidikan)', *Jurnal Studi Islam, Sosial Dan Pendidikan*, 3.1

Arifin, Zihnil, (2024), 'Pendidikan Islam Di Malaysia', *Jurnal Kolaborasi Sains*, 7.1

Aslan, (2019), 'Sejarah Perjalanan Kurikulum Pendidikan Islam Di Malaysia.', *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8.1

Aslindah, (2015), Andi, 'Pendidikan Islam Di Malaysia: Jenis, Jenjang, Kebijakan Dan Tujuan Pendidikan', *Lentera Pendidikan*, 18.1

Asrori, Achmad, (2015), 'Islamic Education Development Strategi in Facing the Global Challenges.', *International Journal of Science and Research*, 4.4

Basyid, Abdul, (2022), 'Analisis Kebijakan Pendidikan', *Akademika:Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18.2

Embong, R., (2020), 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Nusantara: Malaysia Dan Indonesia', *Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan*, 21.1

Haryanto, (2016), 'Perbandingan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Malaysia', *Adabiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1

Iskandar, (2019), *Sejarah Pendidikan Di Asia Tenggara* Prenada Media,

Nashihudin, Muhammad, (2024), *Metode Ibrah* CV Azka Pustaka,

Pratama, Hadit, (2025), Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia', *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 3.1

Pratama, Surya Fikri, (2022), 'Perkembangan Dan Implikasi Implementasi Kebijakan Politik Islam Dalam Kehidupan Pluralisme Malaysia', *Majalah Ilmiah Tabuah*, 26.2

Qurtubi, Ahmad, (2020), *Perbandingan Pendidikan*, Cv. Jakad Media Publishing.

Razaqna, Wilda, (2024), 'Perbandingan Sistem Pendidikan Di Malaysia Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Generasi*

Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam, 3.1

Syakhrani, Wahab Abdul, (2022),'Sistem Pendidikan Di Negara Malaysia', *Educatioanl Journal: General and Specific Research*, 2.2

BAB 23
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA SINGAPURA
(Dela Sintia 2220203033)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Singapura merupakan negara yang memiliki karakteristik masyarakat multietnis dan multireligius, termasuk di dalamnya komunitas Muslim yang merupakan minoritas. Meski jumlahnya tidak dominan, umat Islam di Singapura memiliki kontribusi penting dalam pembangunan sosial dan pendidikan. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah dalam bidang pendidikan Islam, yang sejak lama diupayakan agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan modernitas negara.

Dalam konteks negara sekuler seperti Singapura, pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan besar, yaitu bagaimana menyesuaikan ajaran agama dengan standar pendidikan nasional yang berbasis sains dan teknologi. Pemerintah mensyaratkan agar lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, tidak hanya mengajarkan kurikulum keagamaan, tetapi juga menyertakan pelajaran umum seperti Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris. Hal ini untuk memastikan bahwa lulusan madrasah mampu bersaing secara akademik dengan lulusan sekolah umum.

Menjawab tantangan tersebut, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) menggagas program *Joint Madrasah System* (JMS), sebuah sistem pendidikan terpadu yang menyelaraskan kurikulum agama dengan kurikulum nasional. Tujuan dari JMS adalah agar pendidikan Islam tidak terpinggirkan dalam arus globalisasi, tetapi justru tampil sebagai model pendidikan adaptif yang relevan dengan kebutuhan zaman[418].

Implementasi kebijakan tersebut mendapat pengawasan ketat dari pemerintah dan pendampingan dari MUIS. Madrasah di Singapura diberikan pelatihan tenaga pendidik, bantuan

[418] Muhidin, I., Helmiati, & Karim, M. N. (2023). *Curriculum Design of Joint Madrasah System in Islamic Education in Singapore*. ***Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam***, 16(3), 509–528.

pengembangan kurikulum, serta evaluasi rutin untuk menjaga kualitas pendidikan. Namun, muncul pula kekhawatiran bahwa peningkatan muatan pelajaran umum akan menggerus porsi pembelajaran agama dan mengaburkan identitas keislaman siswa.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kebijakan pendidikan Islam di Singapura dari berbagai aspek mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap komunitas Muslim dan sistem pendidikan nasional. Studi ini tidak hanya akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana negara sekuler mengelola pendidikan agama, tetapi juga menjadi rujukan bagi negara lain yang memiliki dinamika multikultural serupa.

B. Rumusan Masalah

A. Bagaimanakah sejarah perkembangan Pendidikan Islam di Singapura?
B. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Singapura dalam mengatur dan mengembangkan pendidikan Islam?
C. Apa sajakah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan Islam di Singapura?
D. Bagaimanakah dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap perkembangan komunitas Muslim di Singapura?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, dokumen dari Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), serta artikel akademik yang relevan dengan topik kebijakan pendidikan Islam di Singapura.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menelaah kebijakan-kebijakan pendidikan Islam, perkembangan madrasah, serta respons komunitas Muslim terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika pendidikan Islam dalam konteks negara multikultural dan sekuler seperti Singapura.

Tujuan dari metodologi ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana kebijakan pendidikan Islam di Singapura dirancang, diterapkan, serta dampaknya terhadap

masyarakat Muslim, berdasarkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber terpercaya.

TEORI

Dalam konteks negara multikultural dan sekuler seperti Singapura, pendekatan teori multikulturalisme kritis sangat relevan digunakan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam. Teori ini menekankan pentingnya pengakuan identitas budaya dan agama minoritas dalam sistem pendidikan nasional, tanpa mengorbankan nilai-nilai kebangsaan dan integrasi sosial. Menurut teori ini, negara harus menyediakan ruang partisipasi bagi komunitas minoritas dalam merancang kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai mereka, sambil tetap memenuhi standar umum pendidikan. Penerapan *Joint Madrasah System* (JMS) di Singapura mencerminkan bentuk penerapan multikulturalisme kritis, karena mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum nasional yang kompetitif secara global.[419]

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Singapura

Pendidikan Islam di Singapura memiliki akar sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan perkembangan komunitas Melayu-Muslim. Pada abad ke-19, ketika Singapura menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara, para imigran Muslim dari Arab, India, dan Nusantara mendirikan lembaga pendidikan informal untuk mengajarkan Al-Qur'an dan dasar-dasar Islam kepada anak-anak mereka.[420] Pendidikan ini umumnya dilakukan di surau, masjid, atau rumah pribadi, tanpa sistem yang terstruktur seperti sekolah pada umumnya.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk Muslim, muncul kebutuhan untuk membangun lembaga pendidikan formal. Pada tahun 1920-an, madrasah-madrasah mulai didirikan, dengan Madrasah Aljunied sebagai salah satu yang paling bersejarah, berdiri

[419] Fitrianah, R. D. (2022). *Sistem Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Negara-Negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam)*. ***At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam***, 21(2), 123–138. https://doi.org/10.29300/attalim.v21i2.1414.

[420] Azhar Ibrahim, *Contemporary Islamic Discourse in the Malay Archipelago*, (Singapore: RSIS Monograph, 2014), hlm. 45.

pada tahun 1927 berkat sumbangan dari keluarga kaya Arab.[421] Madrasah ini menawarkan kurikulum yang lebih sistematis, mencakup pelajaran agama dan bahasa Arab, serta menjadi model bagi pendirian madrasah lainnya di Singapura.

Pada masa penjajahan Inggris, pemerintah kolonial umumnya membiarkan komunitas Muslim mengelola pendidikan agamanya secara mandiri, asalkan tidak mengganggu kepentingan umum.[422] Karena itu, madrasah berkembang pesat di kalangan komunitas Muslim, namun cenderung fokus pada pelajaran agama saja tanpa banyak memperhatikan bidang akademik modern seperti Matematika dan Sains. Akibatnya, lulusan madrasah pada masa itu umumnya melanjutkan karir di bidang keagamaan, seperti menjadi imam atau guru agama.

Setelah kemerdekaan Singapura pada tahun 1965, pemerintah mulai mengambil peran lebih aktif dalam mengatur pendidikan, termasuk pendidikan agama.[423] Madrasah diminta untuk menyesuaikan kurikulum mereka agar tidak tertinggal dari standar nasional. Pembentukan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) pada tahun 1968 memperkuat regulasi ini, dimana MUIS bertugas mengawasi madrasah dan memastikan keseimbangan antara pendidikan agama dan umum.

Dalam era modern, pendidikan Islam di Singapura mengalami transformasi besar. Pemerintah memperkenalkan kebijakan baru seperti pelaksanaan ujian *Primary School Leaving Examination* (PSLE) di madrasah untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi akademik yang memadai.[424]Madrasah-madrasah juga mulai mengadopsi pendekatan pembelajaran inovatif, memperkenalkan teknologi digital, serta memperluas kurikulum dengan memasukkan ilmu pengetahuan modern untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan global, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

---

[421] Lily Zubaidah Rahim, *The Singapore Dilemma: The Political and Educational Marginality of the Malay Community* (Singapore: Oxford University Press, 2001), hlm. 100.

[422] *Ibid*., hlm. 102.

[423] Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), *History and Role of MUIS* (akses 2025, www.muis.gov.sg).

[424] Ministry of Education Singapore, *Overview of Madrasah Education* (akses 2025, www.moe.gov.sg).

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam di Singapura berakar dari komunitas Melayu-Muslim. Madrasah berkembang dari pendidikan tradisional menjadi sistem formal. Pemerintah turut mengatur agar pendidikan agama dan akademik seimbang. Kini, madrasah berinovasi untuk menjawab tantangan global tanpa kehilangan identitas.

B. Kebijakan Pemerintah Singapura dalam Mengatur dan Mengembangkan Pendidikan Islam

Pemerintah Singapura memiliki peran penting dalam mengatur dan mengembangkan pendidikan Islam, guna menciptakan keselarasan antara pendidikan agama dan standar nasional yang berlaku. Sejak kemerdekaannya, Singapura telah mengembangkan sistem pendidikan yang mengakomodasi keberagaman budaya dan agama. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam, mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan yang sebanding dengan sekolah umum lainnya. Salah satu kebijakan utama adalah pembentukan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) pada tahun 1968, yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam di negara ini.[425]

MUIS memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan pendidikan Islam di Singapura. Salah satu kebijakan penting yang diperkenalkan adalah sistem bantuan untuk madrasah yang dikenal dengan nama Skema Bantuan Madrasah (*Madrasah Assistance Scheme*, MAS). Melalui skema ini, pemerintah memberikan dana bantuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, pelatihan guru, dan fasilitas infrastruktur di madrasah. Dengan adanya bantuan ini, madrasah mampu mengembangkan kurikulum yang lebih beragam dan meningkatkan standar pengajaran agar siswa-siswi madrasah memiliki kompetensi yang sebanding dengan siswa dari sekolah umum.[426]

Kebijakan pendidikan Islam Singapura juga mencakup penerapan ujian standar seperti *Primary School Leaving*

[425]Muhammad Shalahuddin, Peran Majelis Ugama Islam Singapura dalam Mengembangkan Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 2 (2019), hlm 34.

[426]Rina Lestari, Skema Bantuan Madrasah dan Perkembangannya di Singapura, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, vol. 7, no. 1 (2020), hlm 45.

Examination (PSLE) bagi siswa madrasah. Penerapan PSLE bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan madrasah memiliki kemampuan akademik yang memenuhi standar pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan agar pendidikan Islam tidak hanya memprioritaskan pengajaran agama, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia profesional yang kompetitif. Dengan kebijakan ini, madrasah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional Singapura, yang melibatkan aspek akademik dan keagamaan secara seimbang.[427]

Selain itu kebijakan Pendidikan Islam di Singapura juga ada kebijakan *Joint Madrasah System* (JMS) yaitu kebijakan pendidikan Islam di Singapura yang diluncurkan oleh MUIS sejak 2009. Program ini melibatkan tiga madrasah Irsyad Zuhri, Aljunied, dan Al-Arabiah yang bekerja sama menyelenggarakan pendidikan Islam secara berjenjang. Tujuannya adalah mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran umum seperti Matematika, Sains, dan Bahasa Inggris agar lulusan madrasah mampu bersaing secara akademik dan tetap memiliki identitas keislaman yang kuat. [428]JMS juga meningkatkan kualitas guru, kurikulum, serta pengelolaan madrasah. Hingga sekarang, sistem ini masih berjalan melalui skema Joint Madrasah Admission Exercise yang dibuka setiap tahun ajaran baru oleh MUIS.

Pemerintah Singapura juga memberikan perhatian pada pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih modern. Madrasah di Singapura diharuskan untuk mengintegrasikan pelajaran agama dengan mata pelajaran umum seperti Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan madrasah yang tidak hanya memahami agama dengan baik, tetapi juga memiliki kemampuan akademik yang mumpuni dalam bidang-bidang lain. Pendekatan ini mendorong madrasah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global yang semakin kompleks.[429]

---

[427]Agus Salim, Evaluasi Pendidikan Islam di Madrasah Singapura: Sebuah Tinjauan Kebijakan, *Jurnal Studi Pendidikan*, vol. 5, no. 3 (2018), hlm 50.

[428] Muhidin, I., Helmiati, & Karim, M. N. (2023). *Curriculum Design of Joint Madrasah System in Islamic Education in Singapore*. **Tawazun**, 16(3), 509–528. https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i3.15276.

[429] Dedi Suryadi, Integrasi Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah Singapura, *Jurnal Pendidikan Multikultural,* vol. 9, no. 1 (2021), hlm 63.

Selain itu, kebijakan pemerintah Singapura juga mencakup program pelatihan bagi guru-guru madrasah untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Pemerintah Singapura bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menyelenggarakan program pelatihan yang berkualitas. Program ini tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga pada pengembangan keterampilan pedagogik dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa guru madrasah dapat mengajarkan materi dengan efektif dan relevan dengan perkembangan zaman.[430]

Kebijakan pemerintah Singapura dalam mengembangkan pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk generasi Muslim yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat berkontribusi dalam masyarakat yang semakin global. Dengan mengintegrasikan pendidikan agama dan akademik, pemerintah Singapura berhasil menciptakan model pendidikan Islam yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan spiritual tetapi juga mempersiapkan siswa untuk sukses dalam dunia profesional. Kebijakan ini juga memastikan bahwa madrasah di Singapura tetap relevan dengan tantangan global yang dihadapi oleh generasi muda Muslim saat ini.[431]

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Singapura mengatur pendidikan Islam melalui MUIS untuk keseimbangan agama dan akademik. Skema Bantuan Madrasah dan penerapan PSLE memperkuat kualitas pendidikan madrasah. Kurikulum madrasah diintegrasikan dengan pelajaran umum untuk menghadapi tantangan global. Pelatihan guru dan pengembangan kurikulum memastikan pendidikan Islam tetap relevan dan kompetitif.

C. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Lembaga-lembaga Pendidikan di Singapura

Kebijakan Pendidikan Islam di Singapura tidak diterapkan secara seragam disemua jenis Lembaga Pendidikan. Implementasinya berbeda antara madrasah formal dan sekolah

[430] Ahmad Yani, Pelatihan Guru Madrasah dalam Konteks Pendidikan Islam di Singapura, *Jurnal Guru dan Pendidikan*, vol. 6, no. 2 (2020), hlm 72.

[431] Dwi Astuti, Kebijakan Pendidikan Islam di Singapura: Menjaga Keseimbangan antara Agama dan Pendidikan Umum, *Jurnal Pendidikan Global*, vol. 10, no. 1 (2022), hlm 80.

umum, menyesuaikan dengan struktur Pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat Muslim. Berikut impelementasi kebijakan Pendidikan islam di Lembaga Pendidikan di Singapura.

a. Implementasi di Madrasah Formal

Pendidikan Islam di madrasah Singapura dilaksanakan secara terstruktur dengan pengawasan dari Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). Madrasah-madrasah ini menyelenggarakan dua jenis kurikulum: kurikulum agama (seperti fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan sejarah Islam) serta kurikulum umum nasional (Matematika, Sains, Bahasa Inggris) sesuai standar Kementerian Pendidikan Singapura.[432]

Untuk memastikan kualitas lulusan, MUIS menerapkan sistem evaluasi nasional seperti *Joint Madrasah System Examination* dan PSLE Madrasah yang menjadi syarat kelulusan siswa.[433] Lulusan madrasah memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke institusi lokal maupun internasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk beasiswa dan pelatihan guru, untuk memastikan bahwa standar pengajaran tetap tinggi.

b. Implementasi di Sekolah Umum (Non-Madrasah)

Di sekolah umum, pendidikan agama Islam tidak diajarkan sebagai bagian dari kurikulum utama karena Singapura adalah negara sekuler. Namun, siswa Muslim tetap dapat mengikuti *Part-Time Religious Classes* (PRC) atau Madrasah *Part-Time* yang diselenggarakan di luar jam sekolah, seperti sore hari atau akhir pekan.

Kelas ini dikelola oleh MUIS dan dilaksanakan di masjid-masjid atau pusat komunitas Muslim. Materi yang diajarkan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan pembelajaran Al-Qur'an. Tujuan dari program ini adalah memberikan dasar-dasar ajaran Islam bagi siswa Muslim yang tidak bersekolah di madrasah formal, tanpa mengganggu pendidikan umum mereka.

Pemerintah juga mendorong agar materi agama yang diajarkan bersifat moderat dan kontekstual, untuk menjaga

[432] MUIS, *Islamic Education in Singapore: A MUIS Perspective*, Majlis Ugama Islam Singapura, 2019.

[433] MUIS. *Madrasah Education Framework*, www.muis.gov.sg (akses April 2025).

keharmonisan antarumat beragama di tengah masyarakat multikultural Singapura.[434]

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Singapura bersifat fleksibel, disesuaikan dengan jenis lembaga pendidikan. Madrasah formal menjalankan kurikulum ganda dengan pengawasan MUIS dan dukungan pemerintah. Sekolah umum menyediakan pendidikan agama melalui kelas paruh waktu di luar jam sekolah. Pendekatan ini menjaga kebutuhan spiritual umat Islam sekaligus mendukung harmoni sosial multikultural.

D. Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam di Singapura

Pendidikan Islam di Singapura menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara pengajaran agama dan kurikulum akademik yang ketat. Madrasah harus memastikan pendidikan agama yang diberikan berkualitas tinggi, namun juga mempersiapkan siswa dengan kemampuan akademik yang relevan dengan dunia professional. Berikut tantangan dalam pelaksanaan Pendidikan Islam di Singapura:

a. Menjaga Keseimbangan antara Agama dan Kurikulum Akademik

Pendidikan Islam di Singapura menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara pengajaran agama dan kurikulum akademik yang ketat. Madrasah harus memastikan pendidikan agama yang diberikan berkualitas tinggi, namun juga mempersiapkan siswa dengan kemampuan akademik yang relevan dengan dunia profesional.[435]

b. Keterbatasan Sumber Daya Finansial

Keterbatasan sumber daya finansial menjadi tantangan besar bagi madrasah. Meskipun ada Skema Bantuan Madrasah (MAS), dana yang diterima tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan fasilitas dan kualitas pengajaran. Hal

[434] Yusof, Balancing Faith and Nationhood: The Muslim Community and State Policies in Singapore, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 51, No. 3, (2020).

[435] Irfan Munir, Tantangan Pendidikan Islam di Singapura: Upaya Menjaga Keseimbangan Agama dan Akademik, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 8, no. 2 (2020), hlm 101.

ini mempengaruhi kemampuan madrasah untuk bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang lebih kaya sumber daya.[436]

c. Kekurangan Guru yang Terlatih dalam Metode Pengajaran Modern

Sebagian besar guru madrasah kurang terlatih dalam pedagogi modern, sehingga sulit untuk mengadopsi metode pengajaran yang lebih efektif dan berbasis teknologi. Kekurangan pelatihan ini berdampak pada efektivitas pengajaran, terutama dalam mata pelajaran umum yang membutuhkan pendekatan lebih interaktif.[437]

d. Pengaruh Globalisasi dan Budaya Asing

Globalisasi dan budaya asing menjadi tantangan lainnya. Banyak anak muda yang terpengaruh oleh nilai-nilai luar yang seringkali bertentangan dengan ajaran Islam. Madrasah harus menjaga keseimbangan antara pendidikan agama yang kuat dan pembentukan karakter siswa agar tetap teguh pada nilai-nilai Islam.[438]

e. Persaingan dengan Sekolah Umum

Persaingan antara madrasah dan sekolah umum semakin ketat, terutama dalam menarik minat siswa. Madrasah harus berinovasi dengan menawarkan peluang pendidikan yang setara, baik dalam bidang akademik maupun karir masa depan, untuk tetap relevan di tengah persaingan global.[439]

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di Singapura menghadapi berbagai tantangan strategis dalam mempertahankan kualitas agama dan akademik secara seimbang. Madrasah perlu memperkuat pendanaan, pelatihan guru, dan adaptasi teknologi pembelajaran. Globalisasi dan persaingan dengan sekolah umum menuntut inovasi kurikulum dan pembinaan karakter siswa. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci keberhasilan.

---

[436] Nia Purnama, Keterbatasan Dana dalam Pengelolaan Madrasah di Singapura, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, vol. 5, no. 1 (2021), hlm 65.

[437] Haris Wijaya, Kualitas Guru Madrasah di Singapura: Tantangan dalam Pengembangan Profesionalisme, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 9, no. 4 (2019), hlm 88.

[438] Titi Kamila, Pengaruh Globalisasi terhadap Pendidikan Islam di Singapura, *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, vol. 12, no. 3 (2021), hlm 75.

[439] Rizky Azhar, Persaingan Madrasah dan Sekolah Umum di Singapura, *Jurnal Pendidikan Global*, vol. 14, no. 1 (2022), hlm 42.

E. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Perkembangan Komunitas Muslim di Singapura

Kebijakan pendidikan Islam di Singapura memiliki dampak signifikan dalam menjaga eksistensi dan identitas komunitas Muslim di tengah masyarakat yang plural dan sekuler. Madrasah di Singapura tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam membentuk generasi Muslim yang memahami ajaran Islam secara mendalam dan kontekstual. Pemerintah melalui Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) memberikan ruang yang relatif terbuka bagi pendidikan Islam, meskipun tetap dalam kerangka regulasi ketat yang menuntut integrasi dengan sistem pendidikan nasiona.[440] Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Singapura tetap mendapat pengakuan negara sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat.

Pendidikan Islam juga berdampak pada pembentukan karakter sosial komunitas Muslim, khususnya dalam hal nilai integritas, disiplin, dan kepedulian sosial. Kurikulum madrasah yang menggabungkan pelajaran agama dan umum secara proporsional membentuk siswa menjadi pribadi yang religius sekaligus mampu hidup berdampingan dengan masyarakat lintas agama dan budaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Zuhairini et al., pendidikan Islam idealnya tidak hanya membentuk pemahaman keagamaan, tetapi juga membangun akhlak sosial yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat.[441] Dampak ini terlihat dalam meningkatnya partisipasi Muslim Singapura dalam organisasi sosial, ekonomi, dan politik.

Dari sisi mobilitas sosial, kebijakan pendidikan Islam telah membuka peluang bagi generasi Muslim untuk mengakses pendidikan tinggi dan profesi modern. Seiring dengan penyesuaian kurikulum madrasah yang mengakomodasi standar akademik nasional, para lulusan tidak hanya memiliki kemampuan agama, tetapi juga akademik yang memadai untuk bersaing dalam pasar kerja. Menurut Nasution, pendidikan Islam harus merespons tantangan zaman dan mempersiapkan peserta didik untuk terlibat aktif dalam kehidupan profesional tanpa kehilangan identitas

[440] Zuhairini, dkk, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm 87.
[441] *Ibid,* hlm, 90.

keagamaannya.[442] Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Singapura telah berhasil mendorong pergeseran paradigma bahwa madrasah bukan sekadar lembaga tradisional, melainkan institusi pembangun masa depan umat.

Di samping itu, kebijakan ini turut mempererat hubungan antara komunitas Muslim dan pemerintah. Keterlibatan aktif MUIS dalam mengelola pendidikan Islam menciptakan komunikasi yang baik antara negara dan umat Islam. Pendekatan negara yang tidak represif terhadap pendidikan agama, tetapi justru mendorong penguatan kelembagaan dan akuntabilitas, mencerminkan strategi integrasi yang cerdas. Sebagaimana dikemukakan oleh Abuddin Nata, pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan negara, serta tetap konsisten menjaga prinsip ajaran Islam dalam bingkai kebangsaan.[443]

Secara keseluruhan, dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap komunitas Muslim di Singapura sangat terasa, baik dalam penguatan identitas, peningkatan kualitas SDM Muslim, maupun integrasi sosial. Tantangan tetap ada, seperti pengaruh globalisasi, keterbatasan sumber daya, dan kompetisi dengan sekolah umum, namun kebijakan yang responsif dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan. Pendidikan Islam, seperti dinyatakan oleh Hasan, harus dikelola secara profesional agar tidak hanya menjadi alat pelestarian tradisi, tetapi juga motor penggerak kemajuan umat dalam masyarakat modern.[444]

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Singapura berhasil menjaga identitas dan kualitas umat Muslim di tengah masyarakat plural. Integrasi kurikulum agama dan umum mendorong kemajuan akademik serta profesionalisme generasi Muslim.Dukungan pemerintah melalui MUIS memperkuat hubungan negara dan komunitas Muslim. Meski ada tantangan, pendekatan adaptif dan kolaboratif menjadikan pendidikan Islam tetap relevan dan strategis.

---

[442] Nasution, *Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm 65.

[443] Nata, *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 54.

[444] Hasan, *Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 143.

F. Peran Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) dalam Merumuskan dan Mengawasi Kebijakan Pendidikan Islam

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) merupakan lembaga resmi yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan Islam di Singapura, termasuk dalam bidang pendidikan. MUIS memiliki peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan Islam yang selaras dengan prinsip-prinsip negara, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Lembaga ini bertindak sebagai perantara antara pemerintah dan komunitas Muslim, menjaga agar kepentingan umat tetap terakomodasi dalam kebijakan nasional yang bersifat sekuler.[445]

Dalam bidang pendidikan, MUIS memiliki kewenangan untuk mengatur, memantau, dan mengembangkan kurikulum madrasah serta program pendidikan Islam lainnya, baik formal maupun nonformal. Salah satu program unggulannya adalah ARS (*Asatizah Recognition Scheme*), yang memastikan bahwa para guru agama memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Melalui program ini, MUIS berupaya menjaga kualitas pendidikan Islam dengan standar profesional yang tinggi dan mencegah penyebaran ajaran ekstrem yang tidak sesuai dengan prinsip Islam rahmatan lil 'alamin.

Selain itu, MUIS mengelola *Joint Madrasah System* yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah dengan menyatukan sumber daya dan kurikulum antar madrasah. Sistem ini memungkinkan fokus pada penguatan akademik sekaligus memperkuat pengajaran agama, dengan tetap memenuhi standar nasional seperti *Primary School Leaving Examination* (PSLE). MUIS juga menyediakan pelatihan guru, bantuan dana, dan beasiswa bagi siswa madrasah agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan tinggi.[446]

MUIS juga aktif menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri untuk pengembangan lebih lanjut. Misalnya, melalui kemitraan dengan universitas di Timur Tengah dan Malaysia untuk pengiriman pelajar lulusan madrasah. Hal ini mencerminkan bahwa peran MUIS tidak terbatas

[445]MUIS, MUIS Strategic Framework 2020-2024, Majlis Ugama Islam Singapura.

[446]Noor Aisha Abdul Rahman, *Muslim Education in Singapore: Developments and Challenges*, ISEAS, 2012.

pada pengawasan internal, tetapi juga dalam membangun konektivitas global pendidikan Islam Singapura.[447]

Dengan demikian, MUIS memainkan peran yang sangat sentral dalam memastikan bahwa pendidikan Islam di Singapura tetap relevan, profesional, dan sejalan dengan visi komunitas Muslim yang progresif. Peran ini tidak hanya administratif, tetapi juga visioner, karena MUIS bertindak sebagai penjaga nilai-nilai Islam sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan masyarakat Muslim yang adaptif di tengah lingkungan multikultural.[448]

Dapat disimpulkan bahwa MUIS berperan strategis dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan Islam di Singapura secara profesional dan kontekstual. Melalui berbagai program seperti ARS dan *Joint Madrasah System*, MUIS menjaga mutu pendidikan serta integritas ajaran Islam. Peran ini menjadikan MUIS sebagai penghubung penting antara pemerintah dan komunitas Muslim dalam masyarakat multikultural.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Singapura berakar dari komunitas Melayu-Muslim. Madrasah berkembang dari pendidikan tradisional menjadi sistem formal. Pemerintah turut mengatur agar pendidikan agama dan akademik seimbang. Kini, madrasah berinovasi untuk menjawab tantangan global tanpa kehilangan identitas.

Pemerintah Singapura mengatur pendidikan Islam melalui MUIS untuk keseimbangan agama dan akademik. Skema Bantuan Madrasah dan penerapan PSLE memperkuat kualitas pendidikan madrasah. Kurikulum madrasah diintegrasikan dengan pelajaran umum untuk menghadapi tantangan global. Pelatihan guru dan pengembangan kurikulum memastikan pendidikan Islam tetap relevan dan kompetitif.

Kebijakan pendidikan Islam di Singapura bersifat fleksibel, disesuaikan dengan jenis lembaga pendidikan. Madrasah formal menjalankan kurikulum ganda dengan pengawasan MUIS dan dukungan pemerintah. Sekolah umum menyediakan pendidikan agama melalui kelas paruh waktu di luar jam sekolah. Pendekatan ini menjaga

[447] Azhar Ibrahim, *Contemporary Islamic Discourse in the Malay Archipelago*, Springer, 2020.

[448] Hussin Mutalib, *Islam in Singapore: Piety, Politics and Policies*, NUS Press, 2008.

kebutuhan spiritual umat Islam sekaligus mendukung harmoni sosial multikultural.

Pendidikan Islam di Singapura menghadapi berbagai tantangan strategis dalam mempertahankan kualitas agama dan akademik secara seimbang. Madrasah perlu memperkuat pendanaan, pelatihan guru, dan adaptasi teknologi pembelajaran. Globalisasi dan persaingan dengan sekolah umum menuntut inovasi kurikulum dan pembinaan karakter siswa. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi kunci keberhasilan.

Kebijakan pendidikan Islam di Singapura berhasil menjaga identitas dan kualitas umat Muslim di tengah masyarakat plural. Integrasi kurikulum agama dan umum mendorong kemajuan akademik serta profesionalisme generasi Muslim.Dukungan pemerintah melalui MUIS memperkuat hubungan negara dan komunitas Muslim. Meski ada tantangan, pendekatan adaptif dan kolaboratif menjadikan pendidikan Islam tetap relevan dan strategis.

MUIS berperan strategis dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan Islam di Singapura secara profesional dan kontekstual. Melalui berbagai program seperti ARS dan Joint Madrasah System, MUIS menjaga mutu pendidikan serta integritas ajaran Islam. Peran ini menjadikan MUIS sebagai penghubung penting antara pemerintah dan komunitas Muslim dalam masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

Aisha, Ibrahim, Azhar, *Contemporary Islamic Discourse in the Malay Archipelago*, Springer, 2020.

Astuti, Dwi, Kebijakan Pendidikan Islam di Singapura: Menjaga Keseimbangan antara Agama dan Pendidikan Umum, *Jurnal Pendidikan Global*, vol. 10, no. 1 (2022)

Azhar, Rizky, Persaingan Madrasah dan Sekolah Umum di Singapura, *Jurnal Pendidikan Global*, vol. 14, no. 1 (2022)

Fitrianah, R. D. (2022). *Sistem Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Negara-Negara ASEAN (Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam)*. ***At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam***, 21(2), 123–138. https://doi.org/10.29300/attalim.v21i2.1414

Hasan, *Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)

Ibrahim, Azhar, *Contemporary Islamic Discourse in the Malay Archipelago*, (Singapore: RSIS Monograph, 2014)

Kamila, Titi, Pengaruh Globalisasi terhadap Pendidikan Islam di Singapura, *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, vol. 12, no. 3 (2021)

Lestari, Rina, Skema Bantuan Madrasah dan Perkembangannya di Singapura*, Jurnal Administrasi Pendidikan*, vol. 7, no. 1 (2020)

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), *History and Role of MUIS* (akses 2025, www.muis.gov.sg).

Ministry of Education Singapore, *Overview of Madrasah Education* (akses 2025, www.moe.gov.sg).

Muhidin, I., Helmiati, & Karim, M. N. (2023). *Curriculum Design of Joint Madrasah System in Islamic Education in Singapore*. ***Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam***, 16(3), 509–528

MUIS, *Islamic Education in Singapore: A MUIS Perspective*, Majlis Ugama Islam Singapura, 2019.

MUIS, MUIS Strategic Framework 2020-2024, Majlis Ugama Islam Singapura.

MUIS. *Madrasah Education Framework*, www.muis.gov.sg (akses April 2025)

Munir, Irfan, Tantangan Pendidikan Islam di Singapura: Upaya Menjaga Keseimbangan Agama dan Akademik, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 8, no. 2 (2020)

Mutalib, Hussin, *Islam in Singapore: Piety, Politics and Policies*, NUS Press, 2008.

Nasution, *Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: UI Press, 2001)

Nata, *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019)

Purnama, Nia, Keterbatasan Dana dalam Pengelolaan Madrasah di Singapura, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, vol. 5, no. 1 (2021)

Salim, Agus, Evaluasi Pendidikan Islam di Madrasah Singapura: Sebuah Tinjauan Kebijakan, *Jurnal Studi Pendidikan*, vol. 5, no. 3 (2018)

Shalahuddin, Muhammad, Peran Majelis Ugama Islam Singapura dalam Mengembangkan Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 12, no. 2 (2019)

Suryadi, Dedi, Integrasi Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah Singapura, *Jurnal Pendidikan Multikultural,* vol. 9, no. 1 (2021)

Wijaya, Haris, Kualitas Guru Madrasah di Singapura: Tantangan dalam Pengembangan Profesionalisme, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 9, no. 4 (2019)

Yani, Ahmad, Pelatihan Guru Madrasah dalam Konteks Pendidikan Islam di Singapura, *Jurnal Guru dan Pendidikan*, vol. 6, no. 2 (2020)

Yusof, Balancing Faith and Nationhood: The Muslim Community and State Policies in Singapore, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 51, No. 3, (2020)

Zubaidah, Lily, Rahim, , *The Singapore Dilemma: The Political and Educational Marginality of the Malay Community* (Singapore: Oxford University Press, 2001)

Zuhairini, dkk, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020)

BAB 24
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA THAILAND

Hellen Prasilia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Thailand adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki keunikan dalam sejarahnya karena tidak pernah mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa, berbeda dengan Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Penjajahan tersebut memberikan dampak besar terhadap perkembangan Indonesia. Sementara itu, Thailand memperoleh kemerdekaannya dengan relatif mudah tanpa melalui masa penjajahan seperti yang dialami oleh negara-negara lain di kawasan tersebut.

Secara umum, negara-negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menghadapi tekanan dari pihak luar dan berupaya meraih kemerdekaan serta terbebas dari penjajahan. Namun, Thailand memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan negara-negara tetangganya seperti Indonesia dan Malaysia. Jika ditelusuri lebih dalam, pada masa awal sejarahnya, Thailand pernah diserang oleh Burma, dan kemudian konflik ini berlanjut dengan serangan dari Patani pada masa pemerintahan Islam. Serangan tersebut dipicu oleh sikap meremehkan Raja Thai terhadap Raja Patani, yang merupakan putra Raja Ismail Syah dan telah memeluk agama Islam. Perbedaan keyakinan inilah yang mendorong Patani melakukan serangan, yang berakhir dengan kemenangan mereka. Namun, setelah Patani dipimpin oleh seorang ratu pada masa pemerintahan raja keempat, wilayah tersebut mengalami kemunduran. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kerajaan Thai untuk melakukan serangan balasan dan merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Patani. Sejak saat itu, Patani menjadi bagian dari wilayah Thailand. Beberapa abad kemudian, meskipun sebagian besar negara Asia Tenggara mengalami penjajahan oleh bangsa Eropa, Thailand tetap mampu mempertahankan kedaulatannya.

Sebagai bagian dari strategi integrasi, pemerintah Thailand menerapkan kurikulum nasional di sekolah-sekolah Islam dan mewajibkan penggunaan bahasa Thai sebagai bahasa resmi pengantar. Tujuan pendidikan nasional di Thailand dijelaskan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2542 (1999) Pasal 6, yang menekankan bahwa pendidikan harus mampu membentuk warga negara dengan menanamkan nilai-nilai moral, budaya, spiritual, kecerdasan intelektual, pengetahuan, kesehatan jasmani, dan kebiasaan hidup yang sesuai, agar siswa dapat hidup selaras dengan orang lain. Pada tahap ketujuh proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami sistem politik dan pemerintahan yang menjadi dasar demokrasi di Thailand, dengan raja sebagai kepala negara. Selain itu, siswa juga didorong untuk aktif dalam mendukung hak asasi manusia, mematuhi konstitusi, menghargai sesama, dan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Thailand. Pendidikan juga mencakup pemahaman tentang pentingnya produk lokal dan ilmu pengetahuan global, serta mendorong pembentukan lingkungan hidup yang mendukung kreativitas, profesionalisme, dan semangat belajar yang berkelanjutan.

Sistem pendidikan Islam di Thailand mencerminkan keragaman budaya dan usaha untuk menjaga keharmonisan antaragama di negara tersebut. Meskipun mayoritas penduduk Thailand menganut agama Buddha, negara ini berhasil menciptakan sistem pendidikan yang inklusif bagi komunitas Muslim yang menjadi kelompok minoritas. Pendidikan Islam di Thailand mencakup berbagai elemen penting, termasuk kurikulum, lembaga pendidikan, dan peran masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan Islam telah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, dengan memasukkan pembelajaran bahasa Arab dan studi agama Islam ke dalam kurikulum resmi. Dari waktu ke waktu, pemerintah Thailand berupaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui pengembangan program yang relevan serta peningkatan profesionalisme para pengajar agama. [449]

Lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan sekolah berbasis Islam, memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat

[449] Abdurahman, *Sejarah Peradaban Islam dari Massa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: 2002), hlm 234-237

Muslim di Thailand. Walaupun sebagian besar institusi ini menerima dukungan dana dari pemerintah, keterlibatan komunitas Muslim dalam hal pembiayaan dan pengelolaan tetap sangat signifikan. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap pendidikan Islam juga berkontribusi dalam membangun sikap toleransi antarumat beragama serta mendorong terciptanya kerja sama lintas agama.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana kebijakan pendidikan Islam di Thailand ?
b. Apa saja perkembangan pendidikan Islam di Patani ?
c. Bagaimana konflik Islam di Thailand selatan?
d. Bagaimana Kurikulum pendidikan Islam di Thailand Selatan?

C. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam makalah mengenai "Kebijakan Pendidikan Islam pada Negara Thailand" menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada studi kasus di wilayah selatan Thailand yang memiliki populasi Muslim signifikan. Penelitian ini menggabungkan studi literatur, wawancara dengan ahli pendidikan Islam dan tokoh masyarakat, serta observasi lapangan di sekolah-sekolah Islam untuk menggali data yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis konten dan deskriptif untuk memahami kebijakan pendidikan Islam dan dampaknya. Pendekatan komparatif dengan negara lain yang memiliki kebijakan serupa juga digunakan untuk melihat perbedaan dan kesamaan dalam implementasi kebijakan. Sumber data utama mencakup dokumen pemerintah, jurnal akademik, dan laporan organisasi internasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang kebijakan pendidikan Islam di Thailand serta memberikan saran untuk perbaikan kebijakan tersebut.

TEORI

Kebijakan pendidikan adalah serangkaian prinsip atau pedoman yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan untuk mengatur sistem pendidikan suatu negara. Kurikulum, pendanaan, struktur institusi, dan pengakuan pendidikan agama adalah semua bagian dari kebijakan ini. Pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam dengan

tujuan menghasilkan individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam sangat penting untuk mempertahankan identitas keislaman komunitas Muslim minoritas di negara non-Muslim seperti Thailand. Meskipun berada di bawah sistem pendidikan nasional yang sekuler, lembaga-lembaga pendidikan Islam tetap berupaya menanamkan nilai-nilai Islam melalui berbagai institusi seperti madrasah, pondok, dan sekolah swasta Islam.

Di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim, kebijakan pendidikan Islam cenderung mengalami tantangan, seperti pengakuan legal, kurikulum yang terbatas, dan kurangnya dukungan anggaran. Namun, ada juga pendekatan inklusif di mana pemerintah menyediakan ruang bagi pendidikan agama minoritas, termasuk Islam.

Komunitas Muslim yang berada di wilayah selatan Thailand, seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat (sering disingkat sebagai "Vat"), memiliki tradisi keislaman yang kuat dan khas. Pendidikan Islam di kawasan ini diselenggarakan melalui lembaga-lembaga tradisional yang dikenal dengan sebutan pondok. Pondok-pondok ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat pembinaan moral, budaya, dan identitas keislaman masyarakat setempat.

Teori-teori kebijakan pendidikan islam di Thailand menurut para ahli sebagai berikut:

1. Abdullah Pulong (2012)

   Dalam upaya untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, pemerintah Thailand memastikan bahwa madrasah mematuhi kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah nasional. Hal ini dianggap sebagai bentuk kontrol terhadap pendidikan Islam yang berpotensi memperkuat identitas keagamaan yang berbeda dari mayoritas. [450]

2. Harun Yahya (2015)

   Pendidikan Islam di Thailand memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas etno-religius masyarakat Melayu-Patani. Namun, kebijakan negara sering dianggap tidak sensitif terhadap

[450] Abdullah Pulong, Pendidikan Islam Di Thailand Selatan: Antara Integrasi dan Identitas, *Jurnal Pendidikan Islam 5,* Vol 2 (2012), hlm 123-135

kebutuhan dan karakteristik lokal umat Islam, sehingga memicu resistensi dan konflik. [451]

3. Suwat Danuwong (2005)

   Kebijakan pendidikan Thailand yang bersifat sentralistik membuat institusi-institusi pendidikan Islam sulit berkembang secara mandiri. Pendekatan desentralisasi dan partisipatif diperlukan agar sistem pendidikan bisa lebih inklusif. [452]

4. Ahmad Somboon (2009)

   Sejak diberlakukannya kebijakan Dua Kurikulum (kurikulum agama Islam dan kurikulum umum), banyak madrasah mulai diakui dan memperoleh bantuan dari pemerintah. Namun, tetap ada tantangan besar dalam pelatihan guru, kualitas pengajaran, dan pengawasan akademik. [453]

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pendidikan Islam di Thailand

Thailand terbagi menjadi dua wilayah yang memiliki perbedaan kepercayaan, suku, etnis, daerah, dan budaya. Di selatan, sebagian besar orang beragama Islam; di utara, yang disebut sebagai kerajaan Thai, mayoritas orang Hindu. Perbedaan kedua wilayah ini mencerminkan sejarah yang berbeda antara keduanya. Dahulu, kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari sebuah kerajaan yang dipimpin oleh dua raja dengan kepemimpinan yang serupa, namun keduanya menganut agama Hindu yang sama. [454]

Secara umum, negara-negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu masing-masing menghadapi tekanan dari luar dan berjuang untuk meraih kemerdekaan serta terbebas dari penjajahan. Namun, hal ini berbeda dengan Thailand, yang memiliki sejarah yang unik dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, misalnya Indonesia dan Malaysia. Ketika ditelusuri selain itu, dalam sejarahnya Thailand pernah diserang oleh Burma, dan serangan ini

---

[451] Harun Yahya, Peran Pendidikan Islam dalam Identitas Melayu-Patani, Jurnal Studi Islam dan Sosial 7, Vol.1 (2015), hlm 45

[452] Suwat Danuwong, Centralization and Educational Policy in Thailand, Asia Education Review 3, Vol.2, (2005) , hlm 78-89

[453] Ahmad Somboon, Madrasah dan kebijakan Pendidikan di Thailand, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 11*, Vol. 30 (2009), hlm 201-215

[454] Henk Schulte Nardholt, Masa Depan Cerah, Bahaya Menonggur Negara-Bangsa Baru dan Kekerasan Massal Di Asia Tenggara, *Lembaran Sejarah 11*, Vol. 2 (2014), hlm 109

kemudian dilanjutkan oleh Patani pada masa pemerintahan Islam. Raja Thai pada waktu itu meremehkan raja Patani yang dipimpin oleh putra raja Islam Ismail Syah. Perbedaan agama ini memicu serangan balasan dari raja Patani yang akhirnya berhasil mengalahkan Thailand. Patani mengalami kemunduran setelah dipimpin oleh seorang ratu pada masa pemerintahan raja keempat, dan kerajaan Thai melakukan serangan untuk merebut kembali wilayah yang telah mereka kuasai sebelumnya. Sejak itu, Patani sekarang menjadi bagian dari Thailand. Selama beberapa abad kemudian, Thailand tidak dijajah oleh Eropa seperti negara Asia Tenggara lainnya. Ini karena Raja Thai cerdas dalam menggunakan strategi politik dan diplomasi, yang membedakan Thailand dari Indonesia dan Malaysia yang dijajah.

Raja Thai menerapkan strategi politik yang cerdik untuk melindungi negaranya dari ancaman luar, yaitu denganmenghormati negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, AS, Denmark, Belanda, dan Prusia (Jerman). Metode diplomatik ini memungkinkan Thailand mempertahankan kemerdekaannya dan bahkan disebut sebagai negara yang tidak pernah terjajah. Keberhasilan ini membawa perubahan besar, termasuk pergantian nama negara dari Siam menjadi Thailand. Nama Siam sendiri memiliki konotasi sebagai "budak" atau "hamba," sedangkan Thailand mencerminkan kebebasan dari penjajahan**.** [455]

Kebijakan pendidikan Islam di Thailand menggambarkan hubungan antara sistem pendidikan sekuler yang dikelola oleh pemerintah dan sistem pendidikan agama Islam yang dikelola oleh komunitas Muslim, khususnya di wilayah selatan Thailand seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat memiliki mayoritas orang Islam. Di daerah-daerah ini, pendidikan Islam berkembang secara paralel dengan pendidikan sekuler, menciptakan keseimbangan antara keduanya. Meskipun terdapat kebijakan yang memungkinkan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah sekuler, banyak sekolah Islam yang lebih fokus pada pengajaran agama, seperti Al-Qur'an, fiqh, dan sejarah Islam. Pemerintah Thailand memberikan kebebasan bagi komunitas Muslim untuk mengelola sekolah-sekolah Islam, namun tetap mengawasi agar pendidikan tersebut selaras dengan

[455] Aslan, Dinamika Pendidikan Islam Di Thailand Pada Abad 19-20, *Jurnal Pendidikan Islam 3*, Vol. 1 (2020), hlm 38-54

kebijakan nasional. Tantangan utama dalam kebijakan pendidikan Islam ini adalah ketimpangan pendanaan dan fasilitas antara sekolah Islam dan sekolah sekuler, serta kebutuhan untuk mempertahankan kualitas pendidikan agama tanpa mengorbankan akses terhadap pendidikan umum yang penting untuk masa depan siswa. Organisasi Islam lokal memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum dan pengelolaan sekolah-sekolah ini, sementara pemerintah berupaya mendorong integrasi pendidikan yang inklusif untuk menciptakan kedamaian, terutama di daerah yang rawan konflik. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di Thailand berusaha mencapai keseimbangan antara mempertahankan identitas agama dan budaya, sekaligus beradaptasi dengan sistem pendidikan sekuler yang lebih luas.

B. Perkembangan Pendidikan Islam di Patani

Madrasah dan masjid adalah bagian dari sistem pendidikan tradisional melayu patani, yang ada sejak abad ke-17. Masjid bukan hanya lokasi ibadah; mereka adalah tempat untuk belajar dan beribadah bagi umat Islam. Sistem pondok, berasal dari kata Arab "Funduq", yang berarti "bangunan untuk pengembara", digunakan untuk mengembangkan pendidikan Islam di Patani. "Pondok" adalah "lembaga pendidikan kampung yang mempromosikan pendidikan Islam" kata Awang Had Salleh. Guru yang mengajar disebut Tuan Guru dan dihormati oleh penduduk setempat karena telah mengajar mereka tentang Islam.

“Tuk Pake” mengacu pada pelajaran yang diajarkan di sebuah pondok Santri. Ide ini berasal dari bahasa Arab, yang menunjukkan orang-orang yang sangat terbuka terhadap pengetahuan dan keyakinan agama. Seperti yang dapat diamati, pendidikan membuat Periode perjalanan bangsa yang telah disebutkan di atas adalah saat dimulainya pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa. Periode ini juga dipenuhi dengan banyak gejolak dan masalah, seperti yang dialami oleh masyarakat Islam Patani. Hal ini akan mendorong masyarakat Islam Patani untuk mengambil jalan terbaik dan dapat diandalkan yang sesuai dengan kemajuan zaman.

Pemerintah Siam membuat undang-undang pendidikan yang lebih rendah pada tahun 1921 yang mengharuskan anak-anak usia sekolah pergi ke sekolah pemerintah yang menggunakan bahasa

Siam sebagai bahasa pengantar. Sebagai hasil sampingan dari program Siamisasi, masyarakat Patani menghormati peraturan ini, yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, Siam mengalami peristiwa bersejarah pada tahun 1932. Negara itu berpindah dari Monarki Absolut ke Monarki Konstitusional. Dengan sistem ini, orang Islam Patani berharap dapat memperoleh izin dari kerajaan pusat untuk mengembangkan otonomi berhubunagan dalam hal agama, budaya, dan bahasa mereka.

Selanjutnya pada tahun 1932, terjadi peristiwa bersejarah di negara Siam, yaitu ada pergantian sistem pemerintah negara dari sistem Monarki Absolut kepada sistem Monarki Konstitusi. Di bawah sistem ini umat Islam Patani berharap mereka akan memperoleh konsesi dari pemerintah pusat untuk memeprkenalkan otonomi yang berkaitan dengan agama,budaya, dan Bahasa mereka. Namun, mereka merasa kecewa. [456]

Pada tahun 1929, batu asas bangunan pun diletakkan. Dibutuhkan dana sekitar 7.200 Bath untuk pembangunan, jadi butuh waktu untuk menyelesaikannya dan mencari dana. Pada tahun 1933, sekolah juga diselesaikan dan diresmikan oleh Perdana Mentri Thailand. Madrasah Modern AL-Maarif AL-wathaniah Fathoni beroperasi sejak saat itu. tempat pertama sekolah agama Patani didirikan. Ia adalah institusi pendidikan yang baru dibangun dengan tingkatan mata pelajaran, sistem kelas, dan latihan baris berbaris. Karena keterbatasan sumber, saya tidak dapat memberikan penjelasan yang lengkap tentang mata pelajaran menulis. Mungkin dia tidak terlalu jauh dari literatur agama yang dipelajari oleh orang Patani umum, tetapi dia sendiri sangat mahir dalam ilmu Tasawuf dan Tafsir.

C. Konflik Islam di Thailand Selatan

Pada tahun 2013, Putthongchai S. menjelaskan bahwa pemerintahan yang tidak efektif telah menjadi korban orang Melayu. Sebaliknya, pemaksaan ini sering menyebabkan kekacauan di Pattani. Pada tahun 1923, mantan Raja Melayu Pattani, Tengku Abdul Kadir Kamaruddin, dengan bantuan pejuang Turki, memulai gerakan pembebasan. Ketika Kerajaan Pibul Songgram (1939–1944)

[456] Farit Mat Zain, Minariti Muslim Di Thailand (L, Minda Bandar Baru Bangi: 1998), hlm. 82

berusaha menggunakan Hukum Rathaniyom untuk memasukkan orang Melayu minoritas ke dalam masyarakat Siam. [457]

Pada Perang Dunia Kedua (1939-1945), terjadi pemberontakan nasionalis Pattani yang mempertahankan identitas etnis dan agama Muslim Melayu. Penyebaran gerakan pemberontakan ini lebih sering terjadi di selatan Thailand, yang berusaha untuk memisahkan wilayah Melayu dari bagian lain Thailand. Di selatan Thailand, provinsi-provinsi menerima otonomi daerah, yang merupakan keputusan yang dapat diterima. Namun, orang Muslim Melayu di selatan Thailand melihat agama Buddha Thailand dan Islam Melayu sebagai dua lintasan kosmologi yang berbeda. [458]

Posisi mereka sebagai penjaga tradisi agama menempatkan ulama Melayu di garis depan konflik. Seorang aktivis politik dan pembaharu yang dididik di Mekah, ulama Haji Sulong (1895-1954) adalah orang pertama yang membawa ide-ide nasionalis Melayu Muslim ke selatan Thailand. Setelah kembali ke Pattani pada tahun 1930, ia berpartisipasi dalam reformasi masyarakat Muslim Melayu dan mencoba memasukkan ajaran Islam ke dalam pemerintahan. dengan mencapai otonomi politik dalam struktur federal. Pada tahun 1947, Haji Sulong mengajukan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat. Kebebasan politik bagi masyarakat Melayu dan kelangsungan bahasa mereka adalah yang paling penting.

Sejak kematiannya yang tidak diketahui pada tahun 1954, Haji Sulong telah menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah Thailand. Konflik Thailand selatan muncul kembali di tahun-tahun berikutnya setelah jeda kecil selama 1980-an dan 1990-an: [459]

a. Pemberontakan di Thailand Selatan selama pemerintah perdana menteri Thaksin (2001-2006).

   Pemerintahan Thaksin menggunakan kekerasan yang berlebihan dan mendeklarasikan darurat militer di pedalaman selatan Thailand. Ini memulai pemberontakan di Thailand selatan, yang memulai penculikan, tembak-menembak, dan pembunuhan

[457] Nasrullah Djamil, Analisis Kebijkaan Pendidikan Islam Di Negara Yang Dilanda Konflik: Studi Kasus Di Patani Thailand, *El- Riyasah* 12, (2021), hlm. 172-173

[458] Uma Niskah, *Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam Di Patani Thailand Selatan*, (UIN: Antasari, 2019), hlm. 134-1

[459] Imtiyaz Yusuf, Islam and Buddhism Relations from Balkh to Bangkok and Tokyo, *The MuslimWorld 100*, (2010), hlm. 177-186

kepala. Muslim Melayu masih ingat peristiwa kekerasan seperti Krue Se (28 April 2004) dan Tak Bai (25 Oktober 2004).

b. Pemberontakan di Thailand Selatan selama pemerintah PM Surayud dari rahun 2006 hingga 2007.

Konflik Thailand Selatan berakhir setelah kudeta militer pada tahun 2006. Pemerintahan Thaksin sebelumnya melakukan kesalahan dalam menangani krisis, dan Jenderal Surayud, yang sekarang menjadi perdana menteri meminta maaf.

c. Rebellion in South Thailand under Prime Minister Samak Sundaravej and Somchai Wongswat (2008).

Pemerintah baru dibentuk oleh Samak Sundaravej, pemimpin Phak Palang Prachachon (PPP), berdasarkan hasil pemilihan umum yang diadakan pada Desember 2007. Thaksin, yang sedang dipenjara, mendukung PPPMenteri Dalam Negeri Chalerm Yubamrung menegaskan bahwa saatnya mencari solusi baru untuk kekerasan di selatan, dan ini dapat dicapai dengan menciptakan lebih banyak otonomi, yang mengejutkan publik pada pemerintahan baru. Dana menteri menolak proposal tersebut hanya beberapa saat setelah pengumuman ini, yang disambut dengan antusias. Tentara, yang telah melakukan upaya terbaik untuk menghentikan kekerasan, sekarang bertanggung jawab atas pemberontakan di selatan, yang telah diberikan kepada pemerintah. Samak mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 9 September 2008, digantikan oleh Somchai Wongsawat. Perdana Menteri Somchai mewakili kunjungan ke Selatan pada tanggal 28 Oktober 2008, tetapi patennya jelas bahwa tentara lah yang memegang kendali penuh, bukan pusat pemerintahan.

D. Kurikulum Pendidikan Islam di Thailand Selatan

Kurikulum pendidikan Islam adalah rumusan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang berasal dari ajaran Islam, seperti yang dinyatakan oleh Abdul Majid dalam bukunya "Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kompetensi." Pandangan umum tentang kurikulum sekolah Islam tidak jauh berbeda dari pandangan umum tentang kurikulum sekolah umum. (Majid, 2006). Menurut beberapa "Pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan warga Thailand secara utuh dalam semua aspek kesehatan fisik dan mental; intelektual; pengetahuan; dan moralitas.

Dengan demikian, Kurikulum Inti Pendidikan Dasar, yang ditetapkan oleh pemerintah Thailand menjadi 12 tahun, bertujuan untuk menghasilkan warga negara Thailand yang memiliki sifat-sifat berikut: nasionalis dan patriotisme." Selanjutnya, tujuan ini diuraikan menjadi standar kompetensi, tujuan pembelajaran, dan pengembangan bahan ajar, seperti yang dijelaskan dalam Kurikulum Inti Pendidikan B.E. 2551.1. [460]

Artikel 37 Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 2007 menyatakan kebebasan sepenuhnya untuk beragama. Mereka memiliki kebebasan untuk menganut agama mereka atau mengikuti hukum atau melakukan ritual mereka jika itu tidak bertentangan dengan tanggung jawab warga atau tidak bertentangan dengan standar umum atau etika.

Kurikulum pendidikan Islam Patani Thailand Selatan diatur oleh UU Sekolah Swasta 2007 pasal 4. Menurut UU tersebut, "sekolah formal" berarti sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan menentukan tujuan, metode belajar, kurikulum, pengukuran waktu belajar, dan evaluasi, yang merupakan syarat kelulusan. Sekolah nonformal diharuskan memberikan fleksibilitas dalam menentukan tujuan, bentuk, metode belajar, dan penciptaan kurikulum. Pemerintah Patani Thailand selatan telah menerapkan tiga kebijakan utama untuk pembangunan pendidikan Islam, yaitu:

a. Kurikulum

Pasal 37 Konstitusi Thailand tahun 2007 menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk beragama. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih nama atau keyakinan agama mereka dan melakukan ritual yang sesuai dengan keyakinannya selama itu tidak bertentangan dengan kewajiban warga negara atau moralitas umum (Konstitusi Thailand, 2007). Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pendidikan Nasional 1999, seperti yang diubah pada tahun 2002, tujuan pendidikan adalah untuk membina warga negara Thailand adalah manusia secara keseluruhan fisik, mental, intelektual, pengetahuan, moralitas, budaya, dan etika untuk dapat hidup dengan bahagia dan berbagi pengetahuan, moralitas, etika, dan kebahagiaan dengan orang lain. yang beragama dan berbudaya.

[460] Thailand Ministry of Education, *Basic Education Core Curiculum B.E 2551*, (A,D : 2008)

Di Patani, Thailand Selatan, baik pendidikan Islam formal maupun nonformal memiliki kurikulum yang diatur oleh UU Pasal 4 dari Undang-Undang Sekolah Swasta tahun 2007 menggambarkan sekolah yang menyediakan pendidikan dengan menetapkan tujuan, metode belajar, kurikulum, pengukuran waktu belajar, dan evaluasi, yang merupakan syarat kelulusan. [461]

b. Pengembangan Bahasa Thai

Pedoman Manajemen Pendidikan, Undang-Undang Pendidikan Nasional 1999, Kategori 4, Pasal 23, Nomor 4 menyatakan bahwa "kemahiran dalam bahasa dan matematika, dengan penekanan pada penggunaan bahasa Thai secara tepat". Karena Patani berada di bawah administrasi Thailand, dia harus menyesuaikan diri dengan belajar bahasa Thai sebagai bahasa nasional sambil mempertahankan bahasa Melayu sebagai harta yang sangat penting. Orang-orang juga diminta untuk belajar bahasa Inggris dan Arab.

Kebijakan pembelajaran Bahasa Thailand akan meningkatkan jumlah siswa di daerah selatan Thailand dan meningkatkan prestasi mereka dalam belajar memahami materi dan menggunakan Bahasa Thailand dengan benar pelajaran. Pemerintah juga akan mempertimbangkan prestasi siswa di daerah selatan dalam ujian nasional, yang dikenal sebagai O-NET (Ujian Pendidikan Umum Nasional) dan 1-NET (Ujian Pendidikan Islam Nasional).

c. Mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan

Pasal 52 dari "Kementerian akan mendukung sistem produksi, pengembangan guru, tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan", menurut Kategori 7 Undang-Undang Pendidikan Nasional 1999 untuk mencapai kualitas dan standar yang sesuai pada tingkat profesional yang tinggi dengan mengawasi dan berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk memproduksi serta mengembangkan guru, fakultas, dan tenaga kependidikan agar siap untuk pekerjaan." Pemerintah harus memberikan dana yang cukup untuk pengembangan pendidik, instruktur, dan staf sekolah. Kementerian Pendidikan memiliki kebijakan untuk membantu siswa belajar berpikir analitis dan

[461] Rohmatun Lukluk Isnaini, Kurikulum Pendidikan Muslim Thailand Selatan, *Pendidikan Islam 4*, (2020), hlm. 189

meningkatkan kualitas pendidikan mereka. keterampilan belajar dan inovasi, keterampilan hidup dan karir, keterampilan informasi, keterampilan komunikasi, dan moralitas, etika, dan disiplin untuk tanggung jawab sosial Termasuk menanamkan dua belas nilai inti, mengikuti institusi nasional, agama, dan raja, bangga menjadi orang Thailand, dan siap menjadi warga dunia di abad ke-21, di mana guru dan tenaga kependidikan menggerakkan manajemen pembelajaran, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas siswa. [462]

KESIMPULAN

Secara keseluruhan Agama, suku, etnis, wilayah, dan budaya masing-masing dari dua bagian Thailand berbeda. Sebagian besar orang beragama Hindu di bagian utara kerajaan Thailand, sedangkan orang Islam di bagian selatan. Sejarah negara-negara yang terlibat dipahami oleh keberadaan dua wilayah ini. Sejarah kedua wilayah ini dimulai dengan sebuah kerajaan yang diperintah oleh dua raja yang berbeda, meskipun keduanya menganut agama hindu.

Sistem Pendidikan Tradisi Malais telah ada di Patani sejak abad ke XVII, berkat adanya lembaga-lembaga sama dengan madrasah dan masjid. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar dan menyebarkan agama Islam. Pengembangan pendidikan Islam di Patani dibantu oleh sistem pondok. Istilah "Funduq", yang berarti "bangunan untuk musafir" dalam bahasa Arab, adalah asal dari pondok. Awang Had Salleh mengklaim, “pondok” adalah “lembaga pendidikan desa yang mengelola pelajaran agama Islam.” Pengajarnya dikenal dengan sebutan Tuan Guru dan diakui oleh penduduk desa untuk mengajar siswa yang ingin belajar Islam.

Pada tahun 2013, Putthongchai S. menyatakan bahwa pemerintahan yang tidak efektif telah menjadi korban penduduk Melayu. Kekacauan yang sering terjadi di Pattani adalah hasil dari pemaksaan ini. Pada tahun 1923, gerakan pembebasan dipimpin oleh mantan Raja Melayu Pattani, Tengku Abdul Kadir Kamaruddin, dengan dukungan pejuang Turki. Saat Kerajaan Pibul Songgram (1939–44) mencoba memasukkan kaum minoritas Melayu ke dalam masyarakat

[462] Hidar Putra, *Dinamika Pendidikan Islam Di Asia Tenggara*, (Rineka Cipta: 2009), hlm. 189-190.

Siam melalui Undang-Undang Rathaniyom, semangat anti-Siam meningkat.

Selama Perang Dunia kedua (1939-1945), terdapat gerakan pemberontakan nasionalis di Pattani yang menekankan identitas etnis dan agama Islam Melayu. Sering terjadi pemberontakan di bagian selatan Thailand yang bertujuan untuk memisahkan wilayah Melayu dari negara lain. Muslim di Thailand selatan percaya bahwa agama Buddha Thailand dan Islam Melayu memiliki dua orientasi kosmologis yang berbeda, meskipun provinsi-provinsi di bagian selatan diberi otonomi daerah, yang merupakan pilihan yang dapat diterima.

Kurikulum Islam di Patani, Thailand selatan, mencakup kedua jenis pendidikan formal dan non-formal. Sekolah formal, menurut Pasal 4 Undang-Undang Sekolah Swasta 2007, adalah sekolah yang menawarkan pendidikan secara terstruktur dan terstandarisasi. Tujuan kelulusan, metode penelitian, kurikulum, waktu belajar, pengukuran, dan evaluasi adalah persyaratan. Tujuan, format, dan metode pembelajaran pendidikan non-formal dapat disesuaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman. (2002). *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern.* Yogyakarta: SPI FAK Adab IAIN Sunan Kalijaga.

Aslan. (2020). Dinamika Pendidikan Islam di Thailand Pada Abad 19-20 . *Jurnal Pendidikan Islam 3, Vol 1*, 38-54.

Danuwong, S. (2005). Centralization and Educational Policy in Thailand. *Asian Education Review 3 (2)*, 78-89.

Djamil, N. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Negara yang dilanda Konflik: Studi Kasus d Patani Thailand . *El-Riyasah, Vol 12*, 172-173.

Education, T. M. (2008). *Basic Education Core Curriculum B.E 2551.* Thailand: A.D.

Isnaini, R. L. (2020). Kurikulum Pendidikan Muslim Thailand Selatan. *Jurnal Pendidikan Islam, 189.*

M. Zamberi, A. M. (1994). *Patani dalam Tmadun Melayu.* Kuala Lumpur: 92-97.

Majid, A. (2006). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Niskah, U. (2019). *Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam di Patani Thailand Selatan.* Banjar Masin: UIN Antasari.

Nordholt, H. S. (2014). Masa Depan Cerah, Bahaya Menonggur Negara-Bangsa Baru dan Kekerasan Massal di Asia Tenggara . *Lembaran Sejarah 11, Vol 2*, 109.

Pulong, A. (2012). Pendidikan Islam di Thaailand Selatan: Antara Integrasi dan Identitas. *Pendidikan Islam 5 (2)*, 123-135.

Putra, H. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara.* Jakarta: Rineka Cipta.

Somboon, A. (2009). Madrasah dan Kebijakan Pendididkan di Thailand . *Pendidikan dan Kebudayaan 11 (30*, 201-215.

Yahya, H. (2015). Peran Pendidikan Islam dalam Identitas Melayu-Patani. *Jurnal Studi Islam dan Sosial 7 (1), 45.*

Yusuf, I. (2010). Islam and Buddhism Relations from Balkh to Bangkok and Tokyo. *The Muslim World, Vol 100*, 177-186.

Zain, F. M. (1998). *Minoriti Muslim diThailand.* Selangor : L, Minda Bandar Baru Bangi.

BAB 25
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA FILIPINA
(Rina Juliana 2220203039)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filipina adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang secara geografis terbagi menjadi dua wilayah utama, yaitu Filipina bagian utara dan selatan. Wilayah utara mencakup gugusan Kepulauan Luzon, sementara wilayah selatan meliputi Kepulauan Sulu dan Mindanao. Sulu dan Mindanao menjadi pusat komunitas Muslim yang dikenal sebagai bangsa Moro atau Muslim Moro.

Islam diperkirakan mulai masuk ke Filipina pada abad ke-13 melalui para ulama dan pedagang Muslim dari Arab. Pada masa itu, Islam sempat menjadi agama mayoritas sebelum kedatangan bangsa Spanyol yang membawa ajaran Katolik. Keberadaan Islam dalam sejarah Filipina ditandai dengan berdirinya beberapa kesultanan Islam di Sulu dan Mindanao.

Permasalahan yang dihadapi Muslim di Filipina muncul setelah kolonialisme Spanyol dan Amerika. Islam menjadi agama minoritas akibat migrasi besar-besaran penduduk non-Muslim dari Filipina utara ke selatan. Setelah Filipina merdeka, pemerintah menerapkan kebijakan yang dinilai merugikan bangsa Moro dan lebih menguntungkan kelompok kapitalis. Salah satu kebijakan tersebut adalah kemudahan legalisasi kepemilikan tanah di Filipina selatan bagi penduduk dari wilayah utara, yang semakin membuat bangsa Moro tersisih di tanah mereka sendiri.

Pendidikan Islam di Filipina berkembang seiring dengan masuknya Islam itu sendiri. Sistem pendidikan Islam di negara ini dikenal dengan sebutan madrasah. Namun, madrasah baru secara resmi masuk dalam sistem pendidikan nasional setelah 36 tahun kemerdekaan Filipina, yaitu pada tahun 1982. Madrasah di Filipina memiliki berbagai bentuk, seperti DepEd Private School, Alive Program Public School, Weekend Madrasah, dan Independent Madrasah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas lebih dalam tentang kebijakan pendidikan Islam di Filipina guna memahami perkembangan, tantangan, serta prospek ke depannya.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah sejarah pendidikan islam di filipina?
b. Bagaimanakah kebijakan pendidikan islam di filipina?
c. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan?
d. Bagaimanakah upaya dan solusi dalam pengembangan pendidikan islam?

C. Metode Penelitian

Bentuk penilitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa dengan terstruktur dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Metode yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan di jurnal-jurnal yang relevan dan mempelajari serta memahami teori-teori yang ada pada beberapa literatur yang serupa dengan penelitian ini. Peneliti memanfaatkan sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan judul "Kebijakan Pendidikan Islam di Negara Filipina" sehingga penelitian ini dapat di selesaikan.

TEORI

Pemerintah Filipina dalam lima tahun terakhir berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem nasional, khususnya di wilayah dengan populasi Muslim seperti Mindanao. Kebijakan utama yang diterapkan adalah penyelarasan kurikulum madrasah dengan standar pendidikan nasional melalui program seperti *Alive Public School*. Program ini memungkinkan siswa Muslim belajar agama Islam dan bahasa Arab di sekolah negeri.

Selain itu, pemerintah melakukan standardisasi madrasah, pelatihan guru, serta penyediaan buku teks terstandar. Filipina juga menjalin kerja sama internasional, misalnya dengan Indonesia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui pertukaran pengalaman dan pengembangan kurikulum.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat identitas keislaman dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang multikultural[463].

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendidikan Islam di Filipina

Sebelum kedatangan bangsa Barat, Islam pernah menjadi agama mayoritas di Filipina. Masa kejayaan Islam di wilayah ini ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Manila di utara, serta Kerajaan Sulu dan Kerajaan Maguindanao di selatan. Namun, setelah penjajahan berlangsung, pengaruh Islam mulai tergeser oleh penyebaran agama Katolik. Hingga kini, pemeluk Islam di Filipina diperkirakan hanya sekitar 6,01% dari total populasi yang mencapai 109.035.343 jiwa[464].

Secara geografis, Filipina terdiri dari dua wilayah kepulauan utama. Di bagian utara terdapat gugusan Kepulauan Luzon, sementara di bagian selatan mencakup Kepulauan Sulu dan Mindanao beserta wilayah sekitarnya. Sulu dan Mindanao menjadi pusat komunitas Muslim yang diperkirakan telah ada sejak tahun 1450 hingga 1515 M. Kawasan ini dihuni oleh minoritas Muslim yang dikenal sebagai bangsa Moro atau Muslim Moro[465]. Umat Muslim di Filipina selatan terdiri dari 13 kelompok etnis dengan bahasa dan budaya yang beragam, di antaranya Maranao, Iranun, Maguindanao, Tausug, Samal, Bajau, Jama Mapun, Molbog, Kalibugan, Yakan, Karasa, dan Sangil[466].

Islam diperkirakan mulai masuk ke Kepulauan Sulu pada abad ke-13 melalui sosok Tuan Mashaika. Bukti arkeologis mengenai penyebaran Islam di wilayah ini ditemukan dalam sebuah batu nisan bertuliskan nama Miqbal (1310) di Badatto, tidak jauh dari Pulau Jolo, Sulu. Pada masa itu, masyarakat Jolo masih menganut kepercayaan animisme dan menyembah berhala. Namun, karena

---

[463] Sari, M.R. & Rafiqah, L. *Studi Pendidikan Islam di Filipina.* (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2023), hal. 23

[464] Mutadlo, M. (2020). Islam dan Pendidikan Madrasah di Filipina. *Jurnal Edukasi*, hal. 49.

[465] Helmiati. *Sejarah Islam Pada Asia Tenggara.* (Pekanbaru: LPPM UIN SUSKA RIAU, 2024), hal. 23-30.

[466] Nasir, M. (2020). Kurikulum Madrasah: Studi Perbandingan Madrasah di Asia . *Nadwa Jurnal Pendidikan Islam*, hal. 156.

kebijaksanaan dan kelebihannya, Tuan Mashaika diterima dengan baik oleh penduduk setempat dan bahkan dinikahkan dengan seorang putri bernama Rapa Sipad[467].

Pada paruh kedua abad ke-14, komunitas Muslim di Buansa dengan hangat menerima seorang ulama Arab bernama Karimul Makdum. Kehadirannya semakin memperkuat perkembangan Islam yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Tuan Mashaika.

Pada abad ke-15, seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang dikenal sebagai Raja Baginda tiba di Kepulauan Sulu dan berhasil menyebarkan Islam ke wilayah Zamboanga dan Basilan. Berkat kegigihannya, seorang raja terkenal dari Maguindanao, Kabungsuan Maguindanao, akhirnya memeluk Islam. Seiring berjalannya waktu, banyak wilayah di sepanjang garis pantai Filipina dipimpin oleh pemimpin Muslim yang bergelar Datu atau Raja[468].

Berdasarkan berbagai literature sejarah, Islam pertama kali masuk ke Filipina melalui para ulama dan pedagang Muslim yang kemudian menikah dengan penduduk setempat. Dari pernikahan tersebut, terbentuklah komunitas Muslim di wilayah tersebut. Selain itu, proses Islamisasi dalam bidang politik juga berperan penting dalam membangun peradaban Islam di Filipina selatan.

Lembaga pendidikan Islam di Filipina dikenal dengan nama madrasah. Madrasah pertama di negara ini didirikan oleh Sultan Syariful Hasyim Abu Bakar, yang berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam di wilayah tersebut[469]. Pada awalnya, madrasah belum menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional di Filipina. Pemerintah Filipina cenderung lamban dalam mengintegrasikan seluruh wilayahnya ke dalam konsep negara kesatuan Filipina. Adapun sistem pendidikan yang berbentuk madrasah ini memiliki berbagai dinamika diantaranya ialah[470]:

---

[467] Saifullah. (2021). Umat Islam di Filipina Selatan, Sejarah, Perjuangan dan Rekonsiliasi. *Jurnal Islamica*, hal. 55.

[468] Sari, M. R. (2023). Studi Pendidikan Islam di Filipina. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, hal. 61-71.

[469] Fitrianah, R. D. (2021). Sistem Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Negara ASEAN (Malaysia,Filipina, dan Brunei Darussalam). *Jurnal at-Ta'lim*, hal. 238.

[470] Deporos, S. R. (2023). Sistem Pendidikan Madrasah di Filipina; Eksistensi, Potensi dan tantangan. *Jurnal Baitul Hikmah*, hal.50-62.

a. ***Madaris DepEd Private School***, adalah Madrasah swasta yang mendapat dukungan dari pemerintah.
b. ***Alive Program Public School***, yaitu Sekolah negeri yang memasukkan pendidikan Islam dalam kurikulumnya.
c. ***Weekend Madrasah***, adalah Madrasah yang beroperasi di akhir pekan dan terbuka untuk semua usia di berbagai tingkat pendidikan.
d. ***Independent Madrasah***, adalah Madrasah yang berdiri sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

Di Filipina, sistem pendidikan madrasah terbagi menjadi tiga jenis utama:

1. **Madrasah Diniyah Sabtu-Minggu**

   Madrasah ini dirancang untuk siswa yang bersekolah umum di hari biasa dan mengikuti pendidikan agama pada akhir pekan. Materi yang diajarkan mencakup Al-Qur'an, Hadis, Tauhid, Fikih, Sirah, Kaidah Bahasa Arab (Qawaidul Lughah), Tajwid, serta keterampilan membaca dan memahami teks Islam (Imra dan Qira'ah).
2. **Madrasah Diniyah Reguler**

   Madrasah ini beroperasi lima hari dalam seminggu dengan jenjang pendidikan yang mencakup taman kanak-kanak (2 tahun), sekolah dasar atau ibtidaiyah (6 tahun), sekolah menengah pertama atau mutawasithah (3 tahun), serta sekolah menengah atas atau tsanawiyah (3 tahun). Kurikulumnya berfokus pada studi Islam, termasuk Tafsir, Nahwu, Tauhid, Hadis, Tafsir Ibnu Katsir, Subulus Salam, dan Matan Al-Jurumiyah.
3. **Madrasah Integrasi**

   Jenis madrasah ini mengombinasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. Sejak tahun 1982, sistem ini telah diakui oleh pemerintah Filipina melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (MECS). Untuk mendukung perkembangan madrasah, pemerintah menjalankan beberapa langkah, seperti:
   a) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta sarana pendidikan di madrasah.
   b) Mengembangkan program studi Islam di berbagai perguruan tinggi, terutama di Mindanao.

c) Mengadakan program pengajaran bahasa Arab, yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2005/2006 bersamaan dengan uji coba Kurikulum Standar Madrasah (SMC) di madrasah swasta.

B. Kebijakan Pendidikan Islam di Filipina

Pendidikan Islam di Filipina memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-13, ketika Islam pertama kali masuk ke wilayah Mindanao. Meskipun mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik, komunitas Muslim yang signifikan, terutama di wilayah Bangsamoro, telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dalam lima tahun terakhir, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memperkuat pendidikan Islam, baik melalui program pemerintah maupun undang-undang. Adapun Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam diantaranya ialah[471] :

a. **Madrasah *Education* Program (MEP),** merupakan program yang diprakarsai oleh Departemen Pendidikan (DepEd) untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Program ini mencakup pengajaran Bahasa Arab dan Pendidikan Nilai-nilai Islam (ALIVE) di sekolah dasar dan menengah. Pada tahun 2024, DepEd mengeluarkan Peraturan Menteri No. 011 yang memperkuat implementasi MEP dengan meningkatkan dana dukungan program dan memberikan kompensasi bulanan kepada para asatidz (guru) sebesar ₱12.500.

b. **Bangsamoro *Education Code,*** Pada tahun 2022 Pemerintah Otonomi Bangsamoro untuk Muslim Mindanao (BARMM) mengesahkan Kode Pendidikan Bangsamoro yang memberikan dasar hukum untuk pengembangan sistem pendidikan Islam di wilayah tersebut. Kode ini memungkinkan pendirian madrasah negeri dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. **Pendirian Madrasah Publik**, Sebagai implementasi dari Kode Pendidikan Bangsamoro, pada tahun 2024, BARMM mendirikan Madrasah Negeri pertama di Kota Cotabato dengan kapasitas awal 2.000 siswa. Madrasah ini menawarkan program dari tingkat

[471] Herli, J. (2023). Hataman wants Arabic language, Islamic values taught in schools. *Philippine News Agency*, hal. 13.

taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, dengan fokus pada studi Islam dan bahasa Arab.

d. **Inisiatif Legislasi Nasional,** Pada tahun 2023, Senator Sherwin Gatchalian dan Wakil Pemimpin Minoritas DPR Mujiv Hataman memperkenalkan RUU yang bertujuan untuk melembagakan program ALIVE di semua sekolah dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta, di luar wilayah BARMM. RUU ini juga mencakup pelatihan untuk para asatidz dan penyediaan materi pembelajaran yang relevan.

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam di Filipina telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan berbagai inisiatif dari pemerintah dan legislator untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun, tantangan seperti sumber daya yang terbatas dan persepsi publik masih perlu diatasi. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaboratif, pendidikan Islam di Filipina dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas Muslim dan bangsa secara keseluruhan.

C. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun ada berbagai inisiatif untuk memperkuat pendidikan Islam, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut diantaranya yaitu[472]:

a. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

Salah satu tantangan utama dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam di Filipina adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Banyak madrasah, terutama di daerah terpencil, menghadapi kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Keterbatasan ini menghambat proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang efektif.

[472] Sali, A. H. (2020). Madrasah Education Program Implementation in the Philippines: An Exploratory Case Study. *International Journal of Comparative Education and Development*, hal. 201-217.

b. Kekurangan Tenaga Pengajar yang Tertatih

Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi tenaga pengajar. Namun, banyak madrasah di Filipina menghadapi kekurangan guru yang berkualitas dan pelatihan yang memadai dalam pendidikan Islam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya program pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru, serta kurangnya insentif untuk menarik guru-guru yang berkualitas ke madrasah.

c. Kurikulum yang Tidak Terstandarisasi

Kurikulum pendidikan Islam di Filipina belum sepenuhnya terstandarisasi, yang menyebabkan variasi dalam kualitas dan isi pembelajaran antar madrasah. Kurangnya standar nasional untuk kurikulum pendidikan Islam menyulitkan untuk memastikan konsistensi dan relevansi bahan ajar dengan kebutuhan siswa dan masyarakat[473].

d. Tantangan Sosial dan Politik

Implementasi kebijakan pendidikan Islam juga menghadapi tantangan sosial dan politik, termasuk stigma dan diskriminasi terhadap komunitas Muslim. Kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat luas serta pemerintah daerah dapat menghambat integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

e. Kurangnya Dukungan Keuangan

Keterbatasan dana merupakan penghalang yang signifikan bagi pengembangan dan implementasi program pendidikan Islam. Banyak madrasah mengandalkan sumber daya masyarakat yang terbatas, sementara dukungan keuangan dari pemerintah seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan kurikulum.

f. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Kurangnya sinergi antara lembaga pemerintah, organisasi Islam dan sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam menyebabkan duplikasi upaya dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Koordinasi yang

[473] Tadeo, C. P. (2021). Unveiling Perceptions on Implementation of Madrasah Education Program: Basis for Action Plan. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, hal. 535-541.

lemah juga menghambat pengembangan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan.

g. Tantangan dalam Integrasi Teknologi

Di era digital, integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi sangat penting. Namun, banyak madrasah di Filipina menghadapi kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) karena terbatasnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil. Hal ini menghambat inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran.

h. Keterbatasan dalam Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan pemantauan yang efektif sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan Islam. Namun, kurangnya sistem evaluasi yang terstruktur dan data yang akurat menyulitkan untuk mengukur dampak dan efektivitas dari program-program yang telah diimplementasikan.

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Filipina menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari sumber daya yang terbatas hingga kurangnya koordinasi antar lembaga. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, yang melibatkan pemerintah, komunitas Muslim, dan sektor swasta. Peningkatan investasi dalam infrastruktur, pelatihan guru, standarisasi kurikulum, dan integrasi teknologi merupakan langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam di Filipina.

D. Upaya dan Solusi dalam Pengembangan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Filipina telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, masyarakat Muslim, khususnya di wilayah Mindanao dan daerah otonom seperti Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM), masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam bidang pendidikan. Dalam konteks ini, sejumlah upaya dan solusi telah dikembangkan oleh pemerintah, masyarakat lokal dan organisasi internasional untuk memperkuat pendidikan Islam di Filipina.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah reformasi kurikulum pendidikan madrasah. Pemerintah Filipina, melalui Departemen Pendidikan (DepEd), mengadopsi Standard Madrasah

Curriculum (SMC) yang bertujuan untuk mengintegrasikan pelajaran umum nasional dengan pelajaran agama Islam dan bahasa Arab. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan pendidikan yang seimbang bagi siswa Muslim yang mengakomodasi kebutuhan agama mereka namun tetap sesuai dengan standar pendidikan nasional. Dengan demikian, lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa hambatan administratif maupun akademis.

Namun, implementasi kurikulum ini tidak berjalan mulus. Kualitas tenaga pengajar menjadi kunci keberhasilan integrasi kurikulum ini. Banyak madrasah menghadapi kekurangan guru dengan kompetensi pedagogis dan keahlian untuk mengajar kurikulum umum dan Islam secara bersamaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga internasional telah meluncurkan berbagai program pelatihan dan pengembangan profesional bagi para asatidz (guru madrasah). Program-program ini mencakup pelatihan metodologi pengajaran modern, manajemen kelas, dan pemahaman mendalam tentang kurikulum standar nasional.

Dukungan finansial juga menjadi fokus utama. Pemerintah Filipina, melalui program-program seperti Bantuan Pendidikan Dasar untuk Mindanao (BEAM) yang didukung oleh AusAID, memberikan bantuan kepada madrasah-madrasah swasta untuk memenuhi persyaratan akreditasi dan mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Bantuan ini tidak hanya dalam bentuk dana operasional, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur seperti pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendidikan berbasis teknologi. Namun, laporan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar, Tinggi, dan Teknik Bangsamoro (MBHTE) menunjukkan bahwa kebutuhan akan pendanaan yang merata dan distribusi yang transparan masih menjadi tantangan serius yang perlu diatasi dengan kebijakan yang lebih adil[474].

Dalam upaya memperkuat pengembangan pendidikan Islam, kolaborasi antarlembaga menjadi strategi penting. Pemerintah daerah

[474] Harad, H. M. (2022). Challenges to the Implementation of Arabic Language and Islamic Values Education (ALIVE) Program.. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, 4(9)*, hal. 17-26.

BARMM telah menggandeng berbagai organisasi internasional seperti UNICEF dan Islamic Relief Worldwide untuk memperluas jangkauan program pendidikan madrasah. Kerjasama ini tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, serta monitoring dan evaluasi mutu pendidikan. Kolaborasi lintas sektor ini membuka peluang baru dalam memperluas akses pendidikan berkualitas untuk komunitas Muslim, terutama di daerah-daerah terpencil.

Peran komunitas lokal juga tidak dapat diabaikan. Partisipasi aktif dari masyarakat Muslim dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan madrasah berkontribusi besar terhadap keberhasilan program-program pendidikan. Dewan Pendidikan Islam lokal dibentuk di berbagai kota dan provinsi, memungkinkan adanya suara komunitas dalam penentuan arah kebijakan pendidikan Islam. Di banyak daerah, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan mendorong peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan sosial-budaya masyarakat.

Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu terobosan modern dalam pengembangan pendidikan Islam di Filipina. Inisiatif seperti Madrasah e-Learning telah diperkenalkan untuk mendigitalisasi materi pembelajaran Islam dan membuka akses pembelajaran daring bagi siswa-siswa di daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Melalui penggunaan aplikasi pembelajaran dan platform daring, madrasah dapat memperluas jangkauan pendidikan mereka, walaupun tantangan dalam hal infrastruktur teknologi dan literasi digital masih perlu diatasi.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, solusi yang bersifat sistemik sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah perlunya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dari pemerintah nasional untuk mengakui keunikan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Filipina. Ini termasuk pengakuan terhadap keberagaman kurikulum berbasis lokal yang dapat disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat Muslim setempat.

Selain itu, dibutuhkan upaya peningkatan advokasi dan kesadaran publik mengenai pentingnya pendidikan Islam yang berkualitas bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah Muslim Filipina. Kampanye informasi yang

menekankan kontribusi positif pendidikan Islam dalam pembangunan nasional dapat membantu mengurangi stereotip negatif yang selama ini masih melekat di sebagian kalangan masyarakat.

Terakhir, penguatan kapasitas lembaga pendidikan Islam lokal melalui program-program manajemen sekolah, pelatihan kepemimpinan, dan pengembangan jaringan kerjasama internasional akan menjadi langkah penting. Dengan demikian, madrasah-madrasah di Filipina dapat berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mandiri, inovatif, dan berkontribusi aktif dalam membentuk generasi Muslim Filipina yang berdaya saing global .

Dengan seluruh upaya tersebut, diharapkan masa depan pendidikan Islam di Filipina akan lebih cerah dan inklusif, memberikan kesempatan yang setara bagi komunitas Muslim untuk meraih pendidikan bermutu dan memperkokoh peran mereka dalam pembangunan nasional.

Dapat simpulkan bahwa Pengembangan pendidikan Islam di Filipina menghadapi berbagai tantangan, namun melalui reformasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, dukungan finansial, kolaborasi antarlembaga, partisipasi komunitas, dan integrasi teknologi, terdapat peluang signifikan untuk memperkuat sistem pendidikan Islam. Upaya berkelanjutan dan kerja sama antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi komunitas Muslim di Filipina.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Filipina menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun berbagai tantangan masih menghambat pencapaian potensi maksimalnya. Melalui kebijakan seperti Madrasah Education Program (MEP) dan pengesahan Bangsamoro Education Code, pemerintah Filipina telah berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Langkah ini memberikan ruang bagi pendidikan Islam untuk berkembang, terutama di wilayah Bangsamoro, di mana komunitas Muslim yang cukup besar tinggal.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak tanpa hambatan. Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan bagi

tenaga pengajar, serta variasi kurikulum yang belum terstandarisasi, mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa madrasah. Selain itu, tantangan sosial dan politik, termasuk diskriminasi terhadap komunitas Muslim, turut memperburuk situasi dan memperlambat proses integrasi pendidikan Islam di Filipina.

Meski demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat patut diapresiasi. Reformasi kurikulum yang mengintegrasikan pelajaran agama dan pelajaran umum memberi peluang bagi siswa madrasah untuk mengakses pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah umum, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama mereka. Peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui program pelatihan dan pengembangan profesional menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa guru-guru madrasah memiliki keterampilan pedagogis yang diperlukan.

Selain itu, dukungan finansial yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur madrasah, serta kemitraan antara pemerintah dan organisasi internasional, turut memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan Islam di Filipina. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendidikan juga semakin mendukung pengembangan pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat lokal. Program-program seperti Madrasah e-Learning memperkenalkan inovasi teknologi dalam pendidikan, memberikan kesempatan bagi siswa-siswa di daerah terpencil untuk mengakses materi pembelajaran secara daring.

Ke depannya, penguatan koordinasi antara lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, perlunya pengakuan yang lebih besar terhadap keberagaman pendidikan berbasis lokal dan penyusunan kebijakan yang lebih adil dalam distribusi dana dan sumber daya akan memperkuat fondasi pendidikan Islam di Filipina.

Dengan adanya upaya strategis yang lebih terkoordinasi, pendidikan Islam di Filipina berpotensi untuk berkembang lebih baik lagi, memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi komunitas Muslim, serta berkontribusi dalam menciptakan stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh Filipina.

DAFTAR PUSTAKA

Deporos, S. R. (2023). Sistem Pendidikan Madrasah di Filipina; Eksistensi, Potensi dan tantangan. *Jurnal Baitul Hikmah*, 50-62.

Fitrianah, R. D. (2021). Sistem Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural di Negara ASEAN (Malaysia,Filipina, dan Brunei Darussalam). *Jurnal at-Ta'lim*, 238.

Harad, H. M. (2022). Challenges to the Implementation of Arabic Language and Islamic Values Education (ALIVE) Program.. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications, 4(9)*, 17-26.

Helmiati. (2024). *Sejarah Islam Pada Asia Tenggara.* Pekanbaru: LPPM UIN SUSKA RIAU.

Herli, J. (2023). Hataman wants Arabic language, Islamic values taught in schools. *Philippine News Agency*, 13.

Mutadlo, M. (2020). Islam dan Pendidikan Madrasah di Filipina. *Jurnal Edukasi*, 49.

Nasir, M. (2020). Kurikulum Madrasah: Studi Perbandingan Madrasah di Asia . *Nadwa Jurnal Pendidikan Islam*, 156.

Saifullah. (2021). Umat Islam di Filipina Selatan, Sejarah, Perjuangan dan Rekonsiliasi. *Jurnal Islamica*, 55.

Sali, A. H. (2020). Madrasah Education Program Implementation in the Philippines: An Exploratory Case Study. *International Journal of Comparative Education and Development*, 201-217.

Sari, M. R. (2023). Studi Pendidikan Islam di Filipina. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 61-71.

Sari, M.R. & Rafiqah, L. (2023). *Studi Pendidikan Islam di Filipina.* (Yogyakarta: Baitul Hikmah)

Tadeo, C. P. (2021). Unveiling Perceptions on Implementation of Madrasah Education Program: Basis for Action Plan. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 535-541.

Bab 26
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Ovi Imelda

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Dalam kerangka kenegaraannya, Brunei menganut Falsafah Melayu Islam Beraja (MIB), yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu, ajaran Islam, dan sistem monarki absolut. Falsafah ini menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan negara, termasuk dalam sektor pendidikan. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Brunei tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga sangat menekankan pada pendidikan Agama Islam

Pendidikan Islam di Brunei memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi muda. Sejak usia dini, anak-anak di Brunei diperkenalkan dengan ajaran Islam melalui kurikulum yang telah dirancang secara sistematis oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencetak warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan berpegang teguh pada ajaran agama. Sistem pendidikan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan keluarga, sehingga nilai-nilai Islam dapat tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan pendidikan Islam di Brunei juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga identitas keislaman bangsa. Berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari sekolah agama hingga institusi pendidikan tinggi seperti Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), telah didirikan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan Islam secara menyeluruh. Pemerintah secara aktif mengembangkan kurikulum, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran agama

Dengan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana kebijakan pendidikan Islam di Brunei Darussalam dirancang dan diimplementasikan. Kajian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran mengenai sistem pendidikan Islam di negara tersebut serta menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain, khususnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam merancang kebijakan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pendidikan Islam di Brunei Darussalam?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan pendidikan Islam di Brunei Darussalam?
3. Apa saja kebijakan pemerintah Brunei Darussalam dalam pengembangan pendidikan Islam di berbagai jenjang?
4. Bagaimana kebijakan pendidikan Islam terhadap masyarakat dan generasi muda di Brunei Darussalam?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan pendidikan Islam di Negara Brunei Darussalam, termasuk latar belakang, pelaksanaan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informasi yang tersedia melalui dokumen resmi pemerintah, laporan kebijakan pendidikan, serta literatur yang relevan dengan tema kajian. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan sistem pendidikan Islam di Brunei darussalam.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan temuan-temuan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan rumusan masalah. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menggambarkan secara jelas dan mendalam mengenai bagaimana kebijakan pendidikan Islam dirancang dan diterapkan di Brunei Darussalam.

TEORI

Pendidikan merupakan suatu proses yang terstruktur dan sistematis dalam mentransfer ilmu pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi rohani dan jasmani, sehingga pembelajarannya mencakup aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial.[475]

Menurut teori fungsionalisme struktural dalam sosiologi pendidikan, pendidikan memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan budaya masyarakat. Dalam konteks negara yang berbasis agama seperti Brunei Darussalam, pendidikan Islam berfungsi sebagai alat integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kebijakan pendidikan, negara dapat mewariskan nilai-nilai Islam secara formal dan terstruktur kepada generasi muda sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa.[476]

Selain itu, teori kebijakan publik menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil dari proses politik dan perumusan keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan Islam di Brunei Darussalam adalah refleksi dari kehendak negara untuk menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam pembentukan identitas nasional. Oleh karena itu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam tidak lepas dari peran negara, ideologi nasional, serta kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang sesuai dengan nilai agama.

Teori-teori kebijakan pendidikan islam di Thailand menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi dalam bukunya Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, pendidikan Islam adalah usaha sadar dan terencana dalam membina dan mengarahkan peserta didik agar mereka tumbuh menjadi manusia yang bertakwa kepada

[475] Muhammad Yusran, 'Kurikulum Pendidikan Islam Di Thailand Dan Brunei Darussalam (Kajian Pada Jenjang Pendidikan Pesantren)', *Jurnal Al-Risalah*, 2019.

[476] Tim Penyusun Depag RI, *Sejarah Madrasah; Pertumbuhan, Dinamika Dan Perkembangan Di Indonesia* (Departemen Agama RI, 2004).

Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu mengembangkan potensinya sesuai dengan nilai-nilai Islam.[477]

2. Ahmad Tafsir, seorang pakar pendidikan Islam Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan Islam memiliki tujuan utama untuk membentuk manusia paripurna (insan kamil), yaitu manusia yang seimbang antara aspek jasmani, rohani, intelektual, dan emosional. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan yang menjiwai seluruh proses pembelajaran. Dalam konteks kebijakan, hal ini berarti bahwa pemerintah harus merancang sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter Islami.[478]
3. Menurut H.A.R. Tilaar, kebijakan pendidikan merupakan bentuk intervensi negara dalam upaya mengarahkan perkembangan masyarakat. Dalam negara berbasis agama seperti Brunei Darussalam, kebijakan pendidikan Islam adalah alat strategis untuk mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan nilai-nilai agama. Tilaar menekankan bahwa pendidikan yang baik harus berpihak pada nilai budaya dan identitas nasional, dan dalam kasus Brunei, hal ini diwujudkan melalui integrasi ajaran Islam ke dalam sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.[479]

PEMBAHASAN

A. Bagaimana latar belakang kebijakan pendidikan Islam di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang berada dikawasan asia tenggara, yang dikenal dengan kemakmurannya yang signifikan. Negara ini merupakan anggota keenam di ASEAN, Brunei Darussalam berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 1 januari 1984.[480]

---

[477] Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Masyarakat* (Gema Insani, 2011).

[478] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Remaja Rosdakarya, 2009).

[479] H A R Tilaar, *Kebijakan Pendidikan: Perspektif Pendidikan Sebagai Proses Pemberdayaan Manusia* (Rineka Cipta, 2013).

[480] J C Garcia-Huidobro and A Nannemann, 'Integrative Curriculum in Spanish Higher Education: Tantangan Implementasi', *Jurnal Pendidikan Tinggi Eropa*, 2018.

Negara ini dipimpin oleh seorang sultan dan juga menjabat menjadi kepala pemerintahan , walaupun sultan mempunyai wewenang yang luas dan dengan konstitusi dan sistem pemerintah Brunei Darussalam dijalankan dengan demokratis.[481]

Brunei Darussalam cenderung menggunakan sistem rekruitmen yang sangat tertutup dan tidak melibatkan seluruh masyarakat, kelompok etnik minoritas lebih menonjol dalam perekonomian negara ini adalah orang tinghoa (Han), menyumbang sekitar 15% daro total populasi, kedua kelompok etnis sangat mencerminkan pentingnya bahasa dalam masyrakat brunei yaitu bahasa melayu dan bahasa tionghoa sebagai bahasa resmi dan signifikan.[482]

Bahasa Inggris juga digunakan secara luas, sementara terdapat komunitas ekspatriat yang cukup besar, termasuk warga negara Britania dan Australia. Islam diakui sebagai agama resmi Brunei, dan Sultan Brunei juga menjadi kepala agama negara. Meskipun demikian, terdapat juga penganut agama lain di Brunei, seperti agama Buddha (terutama di kalangan orang Tionghoa), agama Kristen, serta beberapa agama asli yang hanya diikuti oleh komunitas kecil. [483]

Menurut hasil yang didapat total populasi Brunei yaitu orang melayu (66,3%). Etnis minoritas yang lebih dominan pertaniannya adalah negara tionghoa (Han), yang menyumbang sekitar 11,2 % , dan diikuti oleh masyarakat adat sekitar (3,4%) dan etnis lainnya (19,1%). [484]

Bahasa inggris digunakan secara umum dan ada komunitas ekspatriat yang sangat cukup besar dengan banyaknya orang inggris dan australia , Brunei Darussalam memegang agama yaitu agama islam sebanyak (67%), sultan yang memerintah juga memegang agama islam tapi disini juga terdapat agama lainnya misalnya, Budha

[481] P D S S Dr. Haji Abdul Rahman, 'Reformasi Pendidikan Brunei Darussalam Dalam Konteks Wawasan 2035', *Jurnal Kebijakan Pendidikan ASEAN*, 2020.

[482] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka).

[483] M Ahmad and Z Ali, 'Integrasi Kurikulum Untuk Pendidikan Tinggi: Studi Perbandingan Antara Brunei Dan Negara-Negara Islam Lainnya', *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 10.3 (2022).

[484] Brahim Bin Ampuan Haji and Brahim Ampuan Haji, 'Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21: Isu Dan Cabaran Di Brunei Darussalam', *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 2013.

(13%) dan kristen ((10%) yang lebih banyak adalah orang tionghoa.[485]

B. Bagaimana sistem pelaksanaan pendidikan Islam di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam ini adalah negara yang dikenal dengan negara yang sangat makmur yang dipimpin oleh sultan yang demokratis, dalam sektor pendidikan di Brunei Darussalam ini menekan masyarakatnya harus menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang tetap mempunyai akhlak, beragama dan bisa teknologi. [486]

Pendidikan formal Brunei Darussalam dimulai pada tahun 1912 dengan dibukanya sekolah melayu yang ada di bandar Brunei, selanjutnya jadi banyak didirikan sekolah sekolah diwilayah brunei muara, kuala belait, dan tutong. Sebelumnya, pada tahun 1916, komunitas Tionghoa juga mendirikan sekolah mereka sendiri di Bandar Seri Begawan. [487]

Pada tahun 1966, sebuah sekolah Melayu di tingkat pendidikan menengah dibuka di Belait. Pada tahun 1979, pendidikan taman kanak-kanak (TK), ini adalah bagian tingkat dasar , dan pada tahun 1985 mulai dikenalkan Universitas Brunei Darussalam yaitu sebagai institusi pendidikan tertitinggi pada negara itu. Pada tahun 1984 kurikulum pendidikan nasional mulai mewajibkan siswa untuk menguasai dua bahasa yaitu bahasa melayu dan inggris.[488]

Dalam negara ini sudah terbagi bahasa- bahasa yang akan digunakan sesuai dengan ketetpannya misalnya, Bahasa melayu digunakan pada saat mengajar mata pelajaran yaitu bahasa melayu, pengetahuan agama islam, pendidikan jasmani, seni lukis dan kerajinan tangan. Sedangkan bahasa inggris digunkan pada saat mengajar mata pelajaran yaitu sains, matematika, geografi, sejarah dan bahasa inggris.

---

[485] Binti Maunah, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Teras, 2011).

[486] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III* (Kencana, 2019).

[487] Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri* (IAIT Press, 2008).

[488] Haidar Putra Daulay, *Sejarah Perkembangan Dan Pertumbuhan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2007).

Pada tahun 2008 Brunei mengubah sistem pendidikan baru menjadi SPN21, (Sistem pendidikan negara abad ke-21. SPN21 ini merupakan sistem pendidikan yang dibuat untuk memberikan kesempatan bagi para siswa mencapai tingkat pendidikan yang sesuai dengan kemampuan akademik yang ada pada diri individu masing-masing.[489]

C. Apa saja kebijakan pemerintah Brunei Darussalam dalam pengembangan pendidikan Islam di berbagai jenjang

Pendidikan Brunei Darussalam mempunyai misi yaitu untuk memberikan pendidikan yang holistik untuk mencapai potensi penuh untuk semua siswa, sistem ini diterapkan pada tahun 2008 (sekolah menengah yaitu siswa lulusan PSR dengan ujian nasional SD dan di tahun 2009 dilakukan perubahan sistem bahwa misi tersebut diterapkan juga untuk anak-anak pada tingkat dasar.[490]

a. Pra pendidikan

Anak-anak yang berusia 5 tahun disarankan untuk memasuki tahap pra pendidikan dasar. Bahkan, di lembaga pendidikan pra-sekolah swasta, anak-anak dapat masuk pada usia di bawah 3 tahun. Kurikulum pada tingkat ini mencakup kelas-kelas dasar dalam bahasa, aritmatika, kewarganegaraan, pendidikan agama Islam, pendidikan jasmani, dan pengembangan bakat, yang diajarkan dengan menggunakan lingkungan sekitar sebagai bahan pembelajaran. Pembelajaran berlangsung secara informal tanpa alokasi waktu khusus per mata pelajaran, karena pengajaran terintegrasi dan dilakukan melalui aktivitas anak-anak.[491]

b. Pendidikan Dasar

Menurut SPN21 pendidikan dasar ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Tingkat bawah (1 tahun hingga 3 tahun)
2. Tingkat atas (4 tahun hingga 6 tahun)

---

[489] Amran Khaidir Fadil and Suhendra, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-Negara ASEAN Dalam Mendukung Sustainable Developments Goal', *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 2023.

[490] Haji Awang Mohd. Jamil al-Sufri, *Tarsilah Brunei: Sejarah Awal Dan Perkembangan Islam* (Kementerian Kebudayaan, 2001).

[491] Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin Dan Peradaban* (Pustaka Paramadina, 1995).

Semua siswa mengikuti kurikulum yang sama pada tahun ke pertama sampai ketiga (Pendidikan tingkat bawah), pada tahun ke empat bagi siswa yang ingin masuk sekolah bahasa arab, harus lulus ujian bahasa arab. Dan pada tahun kelima dan ke enam semua siswa harus mengikuti ujian penilaian sekolah rendah (PSR) sebelum melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah, jika tidak lulus PSR maka siswa akan disuruh melakukan pengulangan.[492]

c. Pendidikan Menengah

SPN21 mengatakan bahwa pendidikan memngah ini memiliki waktu selama 4 atau 5 tahun. Semua siswa harus megikuti kurikulum pada tahun ke 7 dan ke 8, pada akhir tahun ke 8 siswa diwajibkan mengikuti ujian penilaian akhir dan akan di evaluasi. Dengan adanya hasil evaluasi kemajuan siswa tersebut, siswa akan diarahkan ke dalam program pendiidkan menangah selama 4 atau 5 tahun pada tahun ke 9 hingga 10 atau bisa jadi 9 hingga 11. Selain itu juga terdapat program khusus untuk siswa yang berbakat dan berkecerdasan tinggi dalam bidang apapun seperti tari, seni,musik dll. Selain itu juga ada program khusus utnuk siswa yang memiliki kebutuhan lebih seperti gangguan penglihatan , pendengaran, cacat mental, cacat fisik, ataupun siswa yang kesulitan belajar.

Siswa juga diberikan kesempatan untuk memilih program-program tersebut misalnya dari program pendidikan 4 tahun ke program pendidikan menengah ataupun juga sebaliknya, tetai harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi pembelajaran sebelumnya dan persyaratan yang sudah ditetapkan. siswa juga harus menyelesaikan ujian BCGCE di akhir tahun ke 10 program pendidikan menengah 4 tahun, ataupun tahun ke 11 program pendidikan menengah 5 tahun. [493]

d) Pasca Pendidikan Menengah

1. Technical College.

Technical college adalah institusi pendidikan pasca-sekolah menengah yang berfokus pada pelatihan keterampilan teknis dan vokasional yang langsung dapat diterapkan di dunia

[492] Haji Awang Asbol Bin and Haji Mail, 'Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam', *ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan*, 2020.

[493] al-Sufri, *Tarsilah Brunei: Sejarah Awal Dan Perkembangan Islam*.

kerja. Berbeda dengan universitas yang menekankan aspek akademik dan teori, technical college lebih menekankan pada praktik dan kesiapan kerja. Program-program di technical college biasanya berdurasi lebih pendek, berkisar antara satu hingga tiga tahun, dan menghasilkan sertifikat atau diploma. Lulusan dari institusi ini umumnya memiliki keahlian khusus di bidang seperti teknik, IT, perhotelan, otomotif, atau desain, dan memiliki peluang kerja yang baik karena keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan industri. Technical college juga dikenal lebih terjangkau dan fleksibel, menjadikannya pilihan yang relevan bagi mereka yang ingin segera masuk ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan menengah.

2. Sekolah Kejuruan.

   Sekolah kejuruan dalam konteks pasca pendidikan menengah adalah lembaga pendidikan yang menyediakan pelatihan berbasis keterampilan dan keahlian di bidang tertentu, sebagai lanjutan dari jenjang SMA/SMK. Sekolah ini biasanya berorientasi pada dunia kerja dan dirancang untuk mempersiapkan lulusan agar memiliki kompetensi teknis yang siap pakai di berbagai sektor industri, seperti teknik, kesehatan, pariwisata, tata boga, atau teknologi informasi. Program yang ditawarkan dapat berupa diploma atau sertifikasi profesi, dan durasi pendidikan umumnya lebih singkat dibandingkan pendidikan tinggi akademik, yaitu antara satu hingga tiga tahun. Sekolah kejuruan pasca menengah ini sering bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta menyediakan kesempatan magang atau praktik kerja nyata bagi siswa.

e) Pendidikan Tinggi

   1. *Technical & Engineering Colleges.*
   2. Perguruan Tinggi Keperawatan Pengiraan Anak Putri Rashidah.
   3. Institut Teknologi Brunei (ITB).
   4. Universitas Brunei Darussalam [494]

[494] Helmiati and Hairunnas Susiba, 'Analisis Kebijakan Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional (SPN-21): Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam', *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2022.

D. Bagaimana kebijakan pendidikan Islam terhadap masyarakat dan generasi muda di Brunei Darussalam

Pendidikan islam dipahami sebagai upaya komprehensif untuk menjadikan siswa agar bisa menjadi umat islam yang berkembang tetapi tetap sesuai dengan ajaran al-Quran dan hadits yang sudah dianjurkan oleh allah Swt, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun yang lainnya.[495] Dengan ini jadi pemerintahan di Brunei Darussalam mendirikan lembaga pendidikan berbasis agama seperti madrasah dan sekolah-sekolah islam terpadu sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat di Asia Tenggara, dengan masing-masing negara membentuk pola pendidikan Islam sesuai konteksnya. [496]

Brunei Darussalam memiliki sistem pendidikan di Balai yang di laksanakan dalam dua tahapan yaitu pengajaran umum dan khusus. Balai adalah fasiltas khusus tempat belajar untuk anak-anak. Pengajaran umum dipergunakan untuk masyrakat tanpa batasan apapun sedangkan pengajaran khusus hanya boleh diikuti oleh orang- orang tertentu yaitu pegawai agama, ulama, kadhi, juru nikah dan lain sebagainya. Tetapi sistem pengajaran dibalai ini hanya dibuat khusus untuk laki-laki, karena perempuan dibuatkan ketetapan untuk belajar didalam rumah masing-masing.[497]

Sistem informal seperti dibalai, masjid dan tempat-tempat lainnya masih tetap berkelanjutan di Brunei Darussalam, tetapi sistem tersebut tidak terlalu efektif dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak, jadi sistem pendidikan islam dinegara Brunei Darussalam berubah menjadi sistem pendidikan formal seperti sekolah yang diatur oleh pemerintah khusunya pihak kerajaan Brunei.[498]

Tetapi walaupun sistem pendidikan formal sudah diresmikan dan dipakai tidak menutup untuk menghilangkan pendidikan non-formal, pendidikan non formal tetap dilaksanakan tanpa menganggu

---

[495] Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21* (Pustaka al-Husna, 2018).

[496] Hairunnas Isnaini and Septemiarti, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Brunei', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2023.

[497] Fikria Najtama, 'Perkembangan Islam Di Brunei', *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 2018.

[498] Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi* (CV Pustaka Setia, 2015).

waktu pada saat pendidikan formal seperti sekolah Arab, sekolah agama, tahfizul Quran, Institut Tahfiz Alquran Sultan Hassanul Bolkiah, Institut Pengajian Islam yang dikelola oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, serta Fakultas Islamic Studies dan Universitas Brunei Darussalam. Lembaga-lembaga ini berjalan dengan baik dengan adanya dukungan campur tangan besar dari Pemerintah kerajaan Brunei. Kerajaan Brunei ini sangat memperhatikan pendidikan agama bahkan lebih fokus perhatiannya daripada sultan atau kepala pemerintahan Brunei.[499]

Pendidikan di Brunei Darussalam memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan negara, dan pemerintah Brunei telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan sistem pendidikan negara tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan di Brunei Darussalam:

a. Pemerintah Brunei menyediakan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan menangah (ini termasuk sekolah dasar, menengah, atas).
b. Brunei memiliki kurikulum nasional yang dikembangkan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan negara. Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran termasuk bahasa, sains, matematika, dan studi Islam.
c. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di semua tingkatan pendidikan. Ini termasuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan peningkatan infrastruktur pendidikan.
d. Pemerintah Brunei telah mengakui pentingnya pendidikan dalam bidang teknologi dan informatika. Inisiatif telah diluncurkan untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di sekolah-sekolah.
e. Pendidikan Agama Pendidikan agama, terutama Islam, memiliki peran penting dalam sistem pendidikan Brunei Darussalam. Materi keagamaan diajarkan di sekolah sekolah untuk memastikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.

[499] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Panduan Pengembangan Kurikulum Integratif Di Perguruan Tinggi* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

f. Pendidikan Tinggi Brunei memiliki Universitas Brunei Darussalam (UBD) dan Institut Teknologi Brunei (ITB) sebagai lembaga-lembaga pendidikan tinggi utama. Pemerintah terus memperkuat pendidikan tinggi untuk mempersiapkan lulusan yang siap bersaing secara global.
g. Pendidikan Kejuruan Pemerintah juga telah fokus pada pengembangan pendidikan kejuruan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam pasar kerja, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
h. Pemerintah Brunei juga menekankan tentang pengembangan karakter dan kepemudaan, yang diterapkan melalui ekstrakulikuler dan kegiatan diluar kelas yang bisa menimbulkan nilai positif pada siswa. [500]

Kebijakan ini adalah cara Brunei Darussalam untuk memastikan kalau pendidikan di negaranya berkualitas tinggi dan efektif untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak, terdidik, dan siap untuk menghadapi kerasnya dunia.

KESIMPULAN

Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang berada dikawasan asia tenggara, yang dikenal dengan kemakmurannya yang signifikan. Negara ini merupakan anggota keenam di ASEAN, Brunei Darussalam berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 1 januari 1984.

Pada tahun 1966, sebuah sekolah Melayu di tingkat pendidikan menengah dibuka di Belait. Pada tahun 1979, pendidikan taman kanak-kanak (TK), ini adalah bagian tingkat dasar , dan pada tahun 1985 mulai dikenalkan Universitas Brunei Darussalam yaitu sebagai institusi pendidikan tertitinggi pada negara itu. Pada tahun 1984 kurikulum pendidikan nasional mulai mewajibkan siswa untuk menguasai dua bahasa yaitu bahasa melayu dan inggris.

Pendidikan Brunei Darussalam mempunyai misi yaitu untuk memberikan pendidikan yang holistik untuk mencapai potensi penuh untuk semua siswa, sistem ini diterapkan pada tahun 2008 (sekolah menengah yaitu siswa lulusan PSR dengan ujian nasional SD dan di

[500] A Abdullah, 'Implementasi Kurikulum Integratif Di Perguruan Tinggi Islam: Studi Kasus Universitas Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 15.2 (2020).

tahun 2009 dilakukan perubahan sistem bahwa misi tersebut diterapkan juga untuk anak-anak pada tingkat dasar.

Pendidikan islam dipahami sebagai upaya komprehensif untuk menjadikan siswa agar bisa menjadi umat islam yang berkembang tetapi tetap sesuai dengan ajaran al-quran dan hadits yang sudah dianjurkan oleh allah Swt, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A, 'Implementasi Kurikulum Integratif Di Perguruan Tinggi Islam: Studi Kasus Universitas Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 15.2 (2020)

Ahmad, M, and Z Ali, 'Integrasi Kurikulum Untuk Pendidikan Tinggi: Studi Perbandingan Antara Brunei Dan Negara-Negara Islam Lainnya', *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 10.3 (2022)

al-Sufri, Haji Awang Mohd. Jamil, *Tarsilah Brunei: Sejarah Awal Dan Perkembangan Islam* (Kementerian Kebudayaan, 2001)

Ampuan Haji, Brahim Bin, and Brahim Ampuan Haji, 'Sistem Pendidikan Negara Abad Ke-21: Isu Dan Cabaran Di Brunei Darussalam', *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan*, 2013

An-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah Dan Masyarakat* (Gema Insani, 2011)

Anwar, Ali, *Pembaharuan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri* (IAIT Press, 2008)

Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III* (Kencana, 2019)

Bin, Haji Awang Asbol, and Haji Mail, 'Dasar-Dasar Pendidikan Negara Brunei Darussalam', *ATIKAN: Jurnal Kajian Pendidikan*, 2020

Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Perkembangan Dan Pertumbuhan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2007)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Panduan Pengembangan Kurikulum Integratif Di Perguruan Tinggi* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020)

Fadil, Amran Khaidir, and Suhendra, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-Negara ASEAN Dalam Mendukung Sustainable Developments Goal', *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu*

Pendidikan, 2023

Garcia-Huidobro, J C, and A Nannemann, 'Integrative Curriculum in Spanish Higher Education: Tantangan Implementasi', *Jurnal Pendidikan Tinggi Eropa*, 2018

Haji Abdul Rahman, P D S S Dr., 'Reformasi Pendidikan Brunei Darussalam Dalam Konteks Wawasan 2035', *Jurnal Kebijakan Pendidikan ASEAN*, 2020

Helmiati, and Hairunnas Susiba, 'Analisis Kebijakan Kurikulum Sistem Pendidikan Nasional (SPN-21): Peluang Dan Tantangannya Bagi Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam', *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2022

Isnaini, Hairunnas, and Septemiarti, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Di Brunei', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2023

Langgulung, Hasan, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21* (Pustaka al-Husna, 2018)

Madjid, Nurcholish, *Islam, Doktrin Dan Peradaban* (Pustaka Paramadina, 1995)

Maunah, Binti, *Perbandingan Pendidikan Islam* (Teras, 2011)

Najtama, Fikria, 'Perkembangan Islam Di Brunei', *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 2018

Rusdiana, Ahmad, *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi Ke Implementasi* (CV Pustaka Setia, 2015)

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Remaja Rosdakarya, 2009)

Tilaar, H A R, *Kebijakan Pendidikan: Perspektif Pendidikan Sebagai Proses Pemberdayaan Manusia* (Rineka Cipta, 2013)

Tim Penyusun Depag RI, *Sejarah Madrasah; Pertumbuhan, Dinamika Dan Perkembangan Di Indonesia* (Departemen Agama RI, 2004)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka)

Yusran, Muhammad, 'Kurikulum Pendidikan Islam Di Thailand Dan Brunei Darussalam (Kajian Pada Jenjang Pendidikan Pesantren)', *Jurnal Al-Risalah*, 2019

BAB 27
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA VIETNAM

(Rafa Nabila Puteri)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan peradaban umat Muslim di berbagai negara, termasuk di Vietnam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha dan komunis sebagai ideologi politik dominan, Vietnam memiliki tantangan dalam mengakomodasi sistem pendidikan Islam di tengah kebijakan pendidikan nasionalnya. Meskipun populasi Muslim di Vietnam tergolong minoritas, keberadaan komunitas Muslim, di wilayah seperti Ho Chi Minh City, AnGiang, dan Tay Ninh, menjadikan pendidikan Islam sebagai bagian yang tetap diperjuangkan oleh masyarakat Muslim di sana.

Di Vietnam, sistem pendidikan nasional lebih berorientasi pada sekularisme, dengan kebijakan yang tidak banyak memberikan ruang bagi perkembangan pendidikan berbasis agama, termasuk Islam. Hal ini menyebabkan komunitas Muslim harus mencari cara untuk mempertahankan pendidikan Islam melalui jalur nonformal, seperti madrasah kecil atau pengajaran agama di masjid-masjid. Namun, kebijakan pemerintah yang ketat terhadap lembaga pendidikan agama sering kali menjadi kendala dalam pengembangan sistem pendidikan Islam yang lebih mapan dan diakui resmi.

Selain itu, globalisasi dan modernisasi turut memengaruhi bagaimana pendidikan Islam berkembang di Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan akses terhadap pendidikan berbasis Islam, baik melalui kerja sama dengan organisasi Islam internasional maupun melalui inisiatif lokal yang berupaya mempertahankan warisan keislaman di tengah dominasi sistem pendidikan nasional yang berbasis sekuler. Tantangan utama masih tetap ada, termasuk keterbatasan kurikulum yang diakui secara resmi, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, serta minimnya dukungan dari pemerintah Vietnam.

Sehingga dengan kondisi tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kebijakan pendidikan Islam

diterapkan di Vietnam, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta sejauh mana komunitas Muslim di negara tersebut mampu mempertahankan pendidikan Islam di tengah berbagai tantangan yang ada. Sehingga karena itu, makalah ini bertujuan untuk memahami sejarah perkembangan pendidikan Islam di Vietnam, kebijakan pendidikan Islam di Vietnam, peran organisasi Islam dalam mendukung pendidikan Islam di Vietnam, melihat tantangan yang dihadapi dan peluang, serta diharapkan dapat menggali potensi pengembangannya di masa depan.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah sejarah perkembangan pendidikan Islam di Vietnam?
b. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Vietnam terhadap pendidikan Islam?
c. Bagaimanakah peran organisasi Islam dalam mendukung pendidikan Islam di Vietnam?
d. Apa sajakah tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam di Vietnam?

C. Metodelogi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif- analitis. Metode ini dipilih untuk memahami dan menggambarkan kebijakan pendidikan Islam di Vietnam secara lebih mendalam berdasarkan data yang tersedia. Penelitian ini mengandalkan studi literatur dari berbagai sumber akademik seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Vietnam, regulasi yang mengaturnya, serta respons masyarakat Muslim setempat terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor sosial-politik yang memengaruhi perkembangan pendidikan Islam di negara tersebut.

Selain analisis deskriptif, penelitian ini menerapkan analisis komparatif untuk membandingkan kebijakan pendidikan Islam di Vietnam dengan negara lain di Asia Tenggara. Tujuannya adalah mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan kebijakan pendidikan Islam di berbagai negara dengan konteks

demografi dan politik yang berbeda. Analisis ini diharapkan dapat menemukan pola kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan pendidikan Islam di Vietnam, khususnya sebagai negara dengan populasi Muslim minoritas.

TEORI

Dalam kajian mengenai kebijakan pendidikan Islam di Vietnam, beberapa teori utama yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan ini meliputi teori kebijakan pendidikan, teori minoritas dalam pendidikan, dan teori multikulturalisme dalam pendidikan Islam. Ketiga teori ini saling berhubungan dalam memahami bagaimana sistem pendidikan di Vietnam berpengaruh terhadap komunitas Muslim dan bagaimana kebijakan yang ada dapat meningkatkan atau justru menghambat perkembangan pendidikan Islam di negara Vietnam sebagai berikut, yaitu:

A. Teori Kebijakan Pendidikan

Teori kebijakan pendidikan membahas proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perspektif teori kebijakan, pendidikan bukan hanya sekadar proses pembelajaran, tetapi juga alat strategis bagi negara dalam membangun karakter dan kompetensi warganya.

Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun, implementasi kebijakan yang efektif memerlukan beberapa syarat utama, seperti kejelasan tujuan, sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait.[501] Kebijakan pendidikan Islam harus dianalisis berdasarkan apakah negara memberikan ruang bagi keberagaman sistem pendidikan atau justru membatasi praktik pendidikan berbasis agama. Faktor-faktor seperti regulasi pemerintah, kebijakan akreditasi madrasah, serta dukungan terhadap kurikulum berbasis Islam menjadi aspek yang penting dalam memahami bagaimana pendidikan Islam berkembang di Vietnam.

[501] Jumira Warlizasusi, *Analisis Kebijakan dalam Pendidikan Islam*, (Curup: IAIN Curup Press, 2021), hlm. 27.

Kebijakan pendidikan di Vietnam selama ini cenderung terpusat dan berorientasi pada sistem pendidikan nasional yang mengadopsi pendekatan sekuler. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan sering kali kurang memperhatikan kebutuhan pendidikan bagi kelompok minoritas Muslim di negara tersebut. Teori kebijakan pendidikan membantu menganalisis sejauh mana sistem yang ada dapat memberikan akses dan dukungan yang memadai bagi pendidikan Islam di Vietnam.

B. Teori Minoritas dalam Pendidikan

Teori minoritas dalam pendidikan membahas bagaimana kelompok-kelompok minoritas menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak pendidikan yang setara. Dalam banyak negara, kelompok minoritas menghadapi diskriminasi struktural, baik dalam bentuk kebijakan pendidikan yang kurang inklusif maupun dalam keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan berkualitas.

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh kelompok ini, seperti kurangnya sekolah berbasis Islam yang diakui oleh negara, terbatasnya guru yang memiliki kompetensi dalam pendidikan Islam, serta tekanan sosial yang mengharuskan mereka menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang kurang memperhitungkan nilai- nilai agama mereka.[502]

Selain itu, teori ini juga menyoroti bagaimana kelompok minoritas berusaha mempertahankan identitas budaya dan agamanya dalam lingkungan pendidikan yang lebih dominan oleh kelompok mayoritas. Di Vietnam, komunitas Muslim mengalami tantangan dalam menjaga nilai-nilai keislaman mereka melalui pendidikan, mengingat kurikulum nasional yang diterapkan tidak memberikan ruang bagi ajaran Islam secara formal. Banyak komunitas Muslim yang memilih untuk menyelenggarakan pendidikan Islam secara informal atau melalui lembaga nonformal seperti madrasah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

[502] Faras Fuji Azizah & Mona Aprilia, Historical Studies: The Social Life Of Muslim Minorities In The United States, *Tanjak: Jumal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol. 4 No. 1, (2024), hlm. 1.

C. Teori Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam

Teori multikulturalisme dalam pendidikan menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama dalam sistem pendidikan. Multikulturalisme dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan identitas mereka.

Pendidikan multikultural dalam perspektif Islam tidak hanya berfokus pada pengajaran nilai-nilai Islam tetapi juga pada bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan agama dan budaya lain secara harmonis. Dalam konteks Vietnam, pendekatan multikulturalisme dalam pendidikan Islam dapat menjadi strategi untuk memastikan bahwa komunitas Muslim tidak mengalami marginalisasi dalam sistem pendidikan nasional.[503]

Menurut teori ini, pendidikan harus mampu mengakomodasi berbagai perspektif budaya dan agama sehingga peserta didik dari latar belakang yang berbeda dapat belajar dalam lingkungan yang inklusif dan saling menghormati.[504] Di Vietnam, penerapan pendidikan multikultural dapat menjadi salah satu solusi bagi komunitas Muslim untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman mereka tanpa harus terisolasi dari masyarakat luas.

Pendidikan multikultural menjadi sarana untuk memperkenalkan ajaran Islam secara lebih luas kepada masyarakat Vietnam yang mayoritas non-Muslim. Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan berbasis dialog, pendidikan Islam tidak hanya akan memberikan manfaat bagi komunitas Muslim tetapi juga dapat menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif dan beragam.[505]

---

[503] Muhammad Rasyid, Islam dan Pendidikan Multikultural, *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. 15, No. 27, (2017), hlm. 5.

[504] Hisan Mursalin & Abdul Mu'ti, Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islam, *Jurnal Rayah Al-Islam*, Vol. 8, No. 2, (2024), hlm. 106.

[505] Chairul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 89.

D. Penerapan Teori dalam Konteks Vietnam

Ketiga teori di atas saling berkaitan dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan Islam di Vietnam. Kebijakan pendidikan berperan dalam menentukan sejauh mana pemerintah memberikan ruang bagi pendidikan Islam. Sementara itu, teori minoritas dalam pendidikan membantu menganalisis tantangan yang dihadapi komunitas Muslim dalam memperoleh pendidikan yang sesuai dengan identitas mereka. Di sisi lain, teori multikulturalisme menawarkan pendekatan yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif bagi semua kelompok agama dan budaya di Vietnam.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Vietnam

Pendidikan Islam di Vietnam memiliki sejarah yang cukup panjang, meskipun komunitas Muslim di negara ini merupakan minoritas. Islam pertama kali diperkenalkan di Vietnam melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India pada abad ke-10 hingga ke-12. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal, terutama di wilayah pesisir dan kota-kota pelabuhan negara Vietnam yaitu seperti Ho Chi Minh City dan beberapa daerah di selatan Vietnam.[506] Penyebaran Islam semakin berkembang ketika kelompok etnis Cham yang bermigrasi ke Vietnam membawa serta ajaran agama Islam dan tradisi-tradisi pendidikannya.

Pada masa pemerintahan kolonial Prancis di Vietnam, pendidikan Islam mengalami tantangan yang cukup besar. Kolonialisme membawa sistem pendidikan baru yang lebih berorientasi pada model Barat, yang menyebabkan pendidikan Islam semakin terpinggirkan. Banyak lembaga pendidikan Islam mengalami penurunan akibat kebijakan pemerintah kolonial yang membatasi aktivitas keagamaan dan pendidikan berbasis agama. Komunitas Muslim Cham tetap mempertahankan tradisi pendidikan

[506] Muhammad Aminullah, *Perkembangan Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Pustaka Al-Fikrah, 2021), hlm. 87.

Islam mereka, baik melalui lembaga pendidikan informal di masjid maupun melalui sistem pendidikan keluarga.[507]

Setelah Vietnam merdeka pada tahun 1945, pendidikan Islam tetap menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat kebijakan pemerintahan komunis yang cenderung sekuler. Pemerintah Vietnam tidak memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam. Hal ini menyebabkan komunitas Muslim harus berjuang sendiri dalam mempertahankan sistem pendidikan Islam yang ada.[508] Meskipun demikian, terdapat upaya dari komunitas Muslim untuk mendirikan madrasah-madrasah kecil yang bertujuan mengajarkan dasar-dasar Islam, seperti membaca Al-Qur'an dan memahami ajaran Islam. Ada juga ulama lokal yang berperan dalam mendidik generasi muda Muslim di Vietnam.

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, perkembangan pendidikan Islam di Vietnam mengalami sedikit peningkatan.[509] Seiring dengan kebijakan pemerintah yang mulai membuka diri terhadap kebebasan beragama, komunitas Muslim di Vietnam mulai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan pendidikan Islam secara lebih luas. Beberapa madrasah kembali dihidupkan, dan pemerintah Vietnam mulai memberikan toleransi terhadap kegiatan pendidikan berbasis Islam, meskipun masih dalam lingkup terbatas. Hubungan komunitas Muslim Vietnam dengan dunia Islam semakin meningkat, terutama dengan negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, yang memberikan bantuan dalam pengembangan pendidikan Islam di Vietnam.

Saat ini, pendidikan Islam di Vietnam masih berada dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat kemajuan dalam hal kebebasan beragama dan pengakuan terhadap komunitas Muslim, pendidikan Islam masih belum mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sebagian besar pendidikan Islam masih berbasis komunitas dan belum memiliki sistem yang terintegrasi secara formal dalam kebijakan pendidikan

[507] Siti Rahmawati, *Dinamika Pendidikan Islam di Negara Minoritas Muslim*, (Bandung: Mizan, 2020), hlm. 102.

[508] Ahmad Fauzan, *Islam di Vietnam: Sejarah dan Tantangan Pendidikan*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 65.

[509] Nurul Hidayah, *Kebijakan Pendidikan Islam di Negara-Negara ASEAN*, (Surabaya: Pustaka Islamika, 2022), hlm. 124.

nasional Vietnam.[510] Namun, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya pendidikan Islam, diharapkan pendidikan Islam di Vietnam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi generasi Muslim yang lebih baik di masa depan.

Dapat disimpulkan bahwa, pendidikan Islam di Vietnam memiliki sejarah panjang yang dimulai dari masuknya para pedagang Muslim Arab, Persia, dan India pada abad ke-10 hingga ke-12, terutama melalui komunitas etnis Cham. Meski mengalami tantangan signifikan selama masa kolonial Prancis dan era komunis yang cenderung sekuler, komunitas Muslim tetap mempertahankan tradisi pendidikan Islam melalui institusi informal di masjid dan sistem pendidikan keluarga. Menjelang akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, terjadi peningkatan moderat dalam perkembangan pendidikan Islam seiring kebijakan pemerintah Vietnam yang lebih terbuka terhadap kebebasan beragama, meskipun pendidikan Islam saat ini masih berbasis komunitas dan belum terintegrasi secara formal dalam sistem pendidikan nasional, namun dengan meningkatnya kesadaran komunitas Muslim, diharapkan pendidikan Islam di Vietnam terus berkembang di masa depan.

B. Kebijakan Pemerintah Vietnam Terhadap Pendidikan Islam

Kebijakan pemerintah Vietnam terhadap pendidikan Islam merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada sistem sosialisme yang diterapkan di negara tersebut. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha dan ateis, Vietnam memiliki pendekatan yang unik dalam mengelola pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam. Pemerintah Vietnam mengakui keberadaan komunitas Muslim yang sebagian besar berasal dari etnis Cham, yang tersebar di beberapa wilayah seperti An Giang, Ninh Thuan, Binh Thuan, dan Ho Chi Minh City. Dalam konteks kebijakan pendidikan, pemerintah Vietnam mengatur pendidikan Islam dalam lingkup kebijakan agama

[510] Budi Santoso, *Minoritas Muslim dan Pendidikan Islam di Asia*, (Malang: Penerbit UMM Press, 2018), hlm. 77.

secara umum, yang berorientasi pada pengawasan ketat dan regulasi yang jelas dalam sistem pendidikan nasional.[511]

Dalam praktiknya, pendidikan Islam di Vietnam tidak sepenuhnya mendapatkan kebebasan yang sama seperti pendidikan umum. Meskipun Vietnam menjamin kebebasan beragama dalam konstitusinya, implementasi kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah Vietnam memiliki regulasi yang mengharuskan sekolah-sekolah berbasis agama untuk mendaftarkan diri di bawah sistem pendidikan nasional. Hal ini bertujuan agar kurikulum yang diajarkan tetap sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah, termasuk dalam mata pelajaran agama.[512] Pendidikan Islam di Vietnam sebagian besar dilaksanakan di madrasah-madrasah yang dikelola oleh komunitas Muslim sendiri, di mana pembelajaran agama Islam diberikan secara informal di luar jam sekolah formal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat upaya-upaya dari komunitas Muslim untuk mendapatkan pengakuan lebih luas terhadap pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Selain regulasi yang membatasi, kebijakan pemerintah juga berdampak pada ketersediaan tenaga pengajar dan bahan ajar pendidikan Islam. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan Islam di Vietnam adalah kurangnya tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi akademik yang diakui oleh pemerintah. Pemerintah Vietnam belum memiliki kebijakan khusus terkait pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan Islam, sehingga sebagian besar tenaga pengajar dalam pendidikan Islam berasal dari komunitas lokal yang memiliki keterbatasan dalam hal pelatihan profesional dan akses terhadap bahan ajar berkualitas. Selain itu, akses terhadap buku-buku pendidikan Islam juga masih terbatas, mengingat adanya regulasi ketat terhadap materi yang diajarkan dalam sistem pendidikan Vietnam.[513]

Dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan politik, pemerintah Vietnam juga membatasi hubungan pendidikan Islam dengan negara-

---

[511] Muhammad Anwar, *Kebijakan Pendidikan Islam di Asia Tenggara,* (Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2021), hlm. 45.

[512] Siti Rahmawati, *Dinamika Pendidikan Islam dalam Sistem Sosialisme*, (Jakarta: Rajawali Press, 2022), hlm. 67.

[513] Ahmad Fauzi, *Minoritas Muslim dan Pendidikan Islam di Vietnam*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 112.

negara luar, termasuk dalam hal pendanaan dan kerja sama akademik.[514] Madrasah-madrasah yang dikelola komunitas Muslim sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana yang memadai karena adanya pembatasan terhadap bantuan asing. Pemerintah khawatir bahwa keterlibatan pihak luar dalam pendidikan Islam dapat membawa pengaruh yang bertentangan dengan ideologi sosialisme yang mereka anut. Oleh karena itu, pendidikan Islam di Vietnam berkembang secara mandiri dengan dukungan dari komunitas Muslim setempat. Kebijakan pemerintah Vietnam terhadap pendidikan Islam merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada sistem sosialisme yang diterapkan di negara tersebut. Sebagai berikut, yaitu:

a. Landasan Ideologi dan Sistem Pendidikan Nasional
    1) Pendidikan Islam di Vietnam merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan sistem sosialisme.
    2) Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha dan ateis, pendekatan terhadap pendidikan agama dilakukan secara hati-hati dan terkontrol.
b. Keberadaan Komunitas Muslim
    1) Komunitas Muslim di Vietnam terutama berasal dari etnis Cham.
    2) Mereka tersebar di wilayah seperti An Giang, Ninh Thuan, Binh Thuan, dan Ho Chi Minh City.
    3) Pemerintah Vietnam mengakui keberadaan mereka dalam kerangka kebijakan agama nasional.
c. Regulasi terhadap Pendidikan Islam
    1) Pemerintah mengatur pendidikan Islam dalam konteks kebijakan agama secara umum dengan pendekatan pengawasan ketat.
    2) Sekolah-sekolah berbasis agama harus mendaftarkan diri di bawah sistem pendidikan nasional.
    3) Tujuannya adalah memastikan kurikulum tetap sesuai dengan standar nasional, termasuk dalam pelajaran agama.
d. Keterbatasan dan Tantangan dalam Pendidikan Islam
    1) Pendidikan Islam belum sepenuhnya bebas seperti pendidikan umum.

[514] Nurul Hidayah, *Politik dan Pendidikan Islam di Asia*, (Surabaya: Penerbit Laksana Media, 2019), hlm. 89

2) Meski konstitusi menjamin kebebasan beragama, implementasinya masih menghadapi tantangan.
3) Pendidikan Islam kebanyakan dilaksanakan secara informal di madrasah-madrasah komunitas Muslim.

e. Kualifikasi Tenaga Pengajar dan Ketersediaan Bahan Ajar
1) Keterbatasan dalam jumlah dan kualifikasi tenaga pengajar pendidikan Islam.
2) Tidak ada kebijakan khusus pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan Islam.
3) Tenaga pengajar mayoritas berasal dari komunitas lokal dengan pelatihan terbatas.
4) Akses terhadap bahan ajar dan buku-buku pendidikan Islam masih sangat terbatas karena regulasi ketat.

f. Pembatasan terhadap Kerja Sama dan Pendanaan Asing
1) Pemerintah membatasi hubungan pendidikan Islam dengan pihak luar demi menjaga stabilitas sosial dan ideologi negara.
2) Madrasah sering kesulitan mendapatkan dana karena pembatasan bantuan asing.
3) Kekhawatiran pemerintah terhadap pengaruh luar yang dianggap bertentangan dengan ideologi sosialisme Vietnam.

g. Upaya Komunitas Muslim
1) Terdapat upaya dari komunitas Muslim untuk memperjuangkan pengakuan lebih luas terhadap pendidikan Islam.
2) Pendidikan Islam berkembang secara mandiri dengan dukungan internal dari komunitas Muslim itu sendiri.

Meski menghadapi banyak tantangan, kebijakan pemerintah Vietnam terhadap pendidikan Islam juga mengalami perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah mulai memberikan ruang bagi komunitas Muslim untuk mengembangkan pendidikan Islam secara lebih terbuka, meskipun tetap dalam pengawasan ketat. Beberapa inisiatif, seperti pelatihan bagi tenaga pengajar dan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik, mulai mendapatkan perhatian. Komunitas Muslim di Vietnam terus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam memperoleh pendidikan Islam yang lebih terstruktur dan diakui dalam sistem pendidikan nasional. Dengan adanya perkembangan ini,

diharapkan pendidikan Islam di Vietnam dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Muslim di negara Vietnam tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan pemerintah Vietnam terhadap pendidikan Islam tercermin dalam kerangka sosialisme negara tersebut, di mana meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, implementasinya masih mengalami batasan signifikan melalui pengawasan ketat dan regulasi yang mewajibkan madrasah untuk mendaftar dalam sistem pendidikan nasional. Berbagai tantangan dihadapi komunitas Muslim, terutama etnis Cham, meliputi keterbatasan tenaga pengajar berkualifikasi, akses terbatas pada bahan ajar, pembatasan pendanaan dari luar negeri, serta kekhawatiran pemerintah akan pengaruh asing yang bertentangan dengan ideologi sosialisme; namun belakangan ini terdapat perkembangan positif berupa ruang yang lebih terbuka bagi komunitas Muslim untuk mengembangkan pendidikan Islam melalui pelatihan tenaga pengajar dan peningkatan fasilitas pendidikan, meskipun masih tetap di bawah pengawasan pemerintah, sehingga diharapkan pendidikan Islam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Muslim Vietnam.

C. Relevansi Q.S. Al-Hujurat Ayat 13 dalam Memperjuangkan dan Mengembangkan Pendidikan Islam Masyarakat Vietnam

Pendidikan Islam di tengah masyarakat plural seperti di Vietnam memerlukan pendekatan yang arif dan strategis. Q.S. Al-Hujurat ayat 13 menjadi dasar teologis yang sangat kuat untuk memperjuangkan dan mengembangkan pendidikan Islam di tengah realitas sosial yang beragam.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang*

yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Dalam ayat tersebut, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, dan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh latar belakang etnis atau agama, tetapi oleh tingkat ketakwaannya.[515] Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong adanya sikap saling menghargai dalam keberagaman, dan prinsip ini harus menjadi landasan utama dalam mengembangkan pendidikan Islam di tengah komunitas multikultural seperti di Vietnam, yang didominasi oleh masyarakat Buddha, ateis, serta budaya-budaya lokal Vietnam yang kuat.

Dalam konteks Vietnam, pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang pluralistik tersebut. Pendidikan Islam tidak boleh bersifat eksklusif atau menutup diri, melainkan harus mengedepankan nilai-nilai universal Islam seperti toleransi, perdamaian, kerja sama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Menurut Miftahul Huda dalam bukunya Pendidikan Islam Multikultural, pendidikan Islam di masyarakat plural harus menanamkan prinsip tauhid tanpa mengabaikan nilai keterbukaan terhadap pluralitas sosial. Pendidikan Islam harus membekali peserta didik dengan kemampuan membangun dialog, menghargai keragaman budaya dan agama, serta tetap teguh dalam identitas keislamannya tanpa bersikap fanatik atau eksklusif.[516]

Pentingnya memahami relevansi Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dalam konteks pendidikan Islam di Vietnam juga ditegaskan oleh Ahmad Supardi dalam karyanya Membangun Pendidikan Islam Berbasis Multikulturalisme. Supardi menekankan bahwa pendidikan Islam di negara minoritas Muslim seperti Vietnam harus mengambil pendekatan inklusif yang menekankan pada persamaan derajat manusia dan tujuan luhur pendidikan yaitu menciptakan insan yang berakhlak mulia.[517] Dalam implementasinya, kurikulum pendidikan

[515] Siti Khadijah, *Strategi Pendidikan Islam di Tengah Pluralisme Agama*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2022), hlm. 112.

[516] Miftahul Huda, *Pendidikan Islam Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 64.

[517] Ahmad Supardi, *Membangun Pendidikan Islam Berbasis Multikulturalisme*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 102.

Islam perlu mengajarkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang positif, seperti musyawarah, keadilan, kesetaraan, serta penghargaan terhadap hak-hak orang lain, sebagaimana yang diajarkan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

Lebih lanjut, Nur Hidayati dalam artikelnya Pendidikan Islam di Tengah Masyarakat Multikultural mengemukakan bahwa pendekatan pendidikan Islam di masyarakat plural harus berorientasi pada pembangunan karakter yang siap hidup dalam keragaman. Pendidikan Islam harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa kehilangan ruh Islam. Hal ini penting untuk menjaga eksistensi komunitas Muslim di tengah masyarakat non-Muslim, sekaligus membangun citra positif tentang Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Di Vietnam, pendekatan ini sangat relevan mengingat komunitas Muslim adalah minoritas kecil yang membutuhkan strategi adaptif untuk mempertahankan identitas keislamannya di tengah tekanan budaya mayoritas.[518]

Q.S. Al-Hujurat ayat 13 juga memberikan motivasi teologis kepada komunitas Muslim di Vietnam bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dijadikan peluang dalam membangun kerja sama sosial. Pendidikan Islam di Vietnam perlu diarahkan untuk menguatkan nilai moderasi, dialog antaragama, serta kontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan berbasis nilai-nilai ini akan menjadikan komunitas Muslim bukan hanya bertahan dalam pluralitas, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masyarakat Vietnam yang damai dan adil.

Secara konsep, menurut pandangan H.A.R Tilaar dalam perspektif pendidikan nasional, pendidikan di era globalisasi harus mengedepankan nilai-nilai budaya lokal sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai universal. Maka, pendidikan Islam di Vietnam perlu membangun kesadaran kolektif bahwa menjadi Muslim tidak berarti mengasingkan diri, melainkan menjadi bagian dari mozaik budaya nasional dengan tetap membawa prinsip-prinsip keislaman yang kuat.[519] Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam dapat menjadi

[518] Nur Hidayati, Pendidikan Islam di Tengah Masyarakat Multikultural, *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara,* Vol. 3, No. 2, (Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 58.

[519] H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Grasindo, 2020), hlm. 79.

kekuatan moral yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa tanpa kehilangan identitas.

Dapat disimpulkan bahwa relevansi Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dalam konteks perjuangan pendidikan Islam di Vietnam terletak pada prinsip dasar Islam tentang penghargaan terhadap perbedaan dan pentingnya takwa sebagai ukuran kemuliaan manusia. Pendidikan Islam harus dibangun di atas prinsip moderasi, keterbukaan, penghargaan terhadap pluralitas, serta komitmen untuk tetap teguh pada nilai-nilai ajaran Islam. Melalui pendekatan ini, komunitas Muslim di Vietnam memperjuangkan dan mengembangkan pendidikan Islam yang bertahan dan berkembang di tengah masyarakat yang beragam, dinamis, dan terus berubah.

D. Peran Organisasi Islam dalam Mendukung Pendidikan Islam di Vietnam

Peran organisasi Islam dalam mendukung pendidikan Islam di Vietnam memiliki signifikansi yang sangat besar dalam menjaga eksistensi dan perkembangan pendidikan Islam di tengah dominasi sistem pendidikan sekuler di negara tersebut. Salah satu peran utama organisasi Islam adalah dalam pendirian dan pengelolaan sekolah-sekolah Islam di Vietnam.[520] Meskipun pemerintah Vietnam memiliki regulasi ketat terkait lembaga pendidikan agama, organisasi Islam secara mandiri berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan yang tetap berlandaskan ajaran Islam. Beberapa sekolah Islam yang didirikan oleh organisasi Muslim lokal menyediakan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan kurikulum nasional. Ini bertujuan agar para siswa tidak hanya memahami ilmu keislaman, tetapi juga mendapatkan pendidikan formal yang diakui oleh negara. Selain itu, organisasi Islam juga aktif dalam membentuk madrasah atau pusat pendidikan informal bagi anak-anak Muslim yang ingin memperdalam pengetahuan keislaman mereka di luar sekolah umum.

Selain mendirikan institusi pendidikan, organisasi Islam juga memberikan berbagai program pendidikan nonformal, seperti pengajaran Al-Qur'an, kajian keislaman, serta pelatihan keterampilan berbasis Islam. Program-program ini sering kali diadakan di masjid-

[520] Muhammad Ridwan, *Peran Organisasi Islam dalam Pendidikan dan Dakwah di Asia Tenggara,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hlm. 112.

masjid atau pusat komunitas Muslim. Melalui kegiatan tersebut, organisasi Islam turut serta dalam memperkuat identitas keislaman komunitas Muslim Vietnam, yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Dengan adanya pendidikan nonformal ini, anak-anak Muslim tetap bisa mendapatkan pemahaman agama yang lebih mendalam meskipun sistem pendidikan formal yang mereka tempuh tidak menyediakan pelajaran agama Islam.

Peran organisasi Islam dalam pendidikan Islam di Vietnam juga terlihat melalui upaya mereka dalam menyediakan bantuan finansial bagi siswa Muslim yang kurang mampu. Beasiswa yang diberikan oleh organisasi Islam bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga Muslim yang mengalami kesulitan ekonomi.[521] Dengan demikian, anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengenyam pendidikan yang layak tanpa harus meninggalkan pendidikan Islam mereka. Beasiswa ini sering kali didanai oleh lembaga filantropi Islam atau donasi dari komunitas Muslim lokal maupun internasional. Bantuan ini menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan banyak siswa Muslim di Vietnam melanjutkan pendidikan mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun, peran organisasi Islam dalam pendidikan Islam di Vietnam juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah regulasi pemerintah yang membatasi ruang gerak organisasi keagamaan dalam menjalankan program pendidikan berbasis Islam. Pemerintah Vietnam cenderung lebih mendukung sistem pendidikan sekuler dan membatasi pengaruh agama dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini membuat organisasi Islam harus mencari strategi alternatif agar tetap bisa menjalankan misinya dalam memberikan pendidikan Islam bagi komunitas Muslim. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga pengajar yang kompeten maupun dana operasional, menjadi kendala lain yang harus dihadapi oleh organisasi Islam dalam menyelenggarakan pendidikan Islam.[522]

---

[521] Siti Aisyah, *Dinamika Pendidikan Islam dalam Minoritas Muslim*, (Jakarta: Lentera Ilmu, 2020), hlm. 89.

[522] Ahmad Fadhil, *Strategi Pendidikan Islam di Negara Berbasis Sekuler*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2019), hlm. 134.

Meskipun demikian, organisasi Islam tetap memiliki peluang besar untuk berkontribusi lebih jauh dalam pendidikan Islam di Vietnam. Dengan meningkatnya kesadaran komunitas Muslim Vietnam akan pentingnya pendidikan Islam, dukungan terhadap organisasi Islam pun semakin kuat. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi Islam internasional dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kendala finansial dan sumber daya manusia. Dengan adanya kerja sama lintas negara, organisasi Islam di Vietnam dapat memperoleh bantuan dalam bentuk pelatihan guru, pengadaan buku ajar Islam, serta pendanaan bagi operasional sekolah-sekolah Islam.

Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, peran organisasi Islam dalam mendukung pendidikan Islam di Vietnam tetap menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga eksistensi dan perkembangan komunitas Muslim di negara tersebut. Organisasi Islam harus terus berinovasi dalam menghadapi berbagai hambatan yang ada serta mencari cara untuk memperkuat pendidikan Islam agar tetap relevan dan dapat bertahan dalam dinamika sosial-politik Vietnam yang terus berkembang.

Dapat disimpulkan bahwa, organisasi Islam memegang peran penting dalam mempertahankan pendidikan Islam di Vietnam melalui pendirian sekolah dengan kurikulum terintegrasi, pengembangan program pendidikan informal di masjid, serta penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Menghadapi tantangan berupa regulasi pemerintah yang membatasi dan keterbatasan sumber daya, peluang tetap terbuka melalui peningkatan kesadaran komunitas Muslim dan kolaborasi dengan organisasi Islam internasional. Organisasi Islam perlu terus berinovasi untuk mengatasi hambatan dan memperkuat posisi pendidikan Islam dalam konteks sosial-politik Vietnam yang dinamis.

E. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Vietnam

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Vietnam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan regulasi pemerintah, dukungan masyarakat, serta infrastruktur pendidikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pengakuan resmi

terhadap pendidikan Islam oleh pemerintah Vietnam.[523] Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha dan kebijakan sekuler yang kuat, pemerintah Vietnam menerapkan regulasi ketat terhadap lembaga pendidikan agama. Hal ini menyebabkan sulitnya pendirian madrasah atau sekolah berbasis Islam yang mendapatkan izin resmi. Kurangnya pengakuan dari pemerintah berdampak pada sulitnya memperoleh pendanaan serta dukungan institusional bagi pengelolaan sekolah Islam yang ada.

Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi dalam bidang studi Islam. Banyak komunitas Muslim di Vietnam yang harus mengandalkan guru-guru dari luar negeri, terutama dari Malaysia atau Indonesia, untuk mengajarkan ilmu keislaman. Namun, peraturan imigrasi yang ketat sering kali menjadi kendala dalam mendatangkan tenaga pengajar asing, sehingga pendidikan Islam di Vietnam masih bergantung pada komunitas lokal yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam aspek keilmuan Islam. Kurikulum pendidikan Islam juga belum memiliki standar jelas dan sering kali bersifat informal tanpa adanya panduan akademik yang baku.[524]

Tantangan lain yang signifikan adalah minimnya literatur dan bahan ajar yang tersedia dalam bahasa Vietnam. Pendidikan Islam umumnya mengandalkan sumber-sumber dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris, yang tidak semua siswa Muslim di Vietnam dapat menguasainya dengan baik. Keterbatasan ini menghambat pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta menyebabkan kurangnya literasi keislaman di kalangan generasi muda Muslim di Vietnam. Selain itu, distribusi bahan ajar Islam juga sering mengalami hambatan akibat regulasi pemerintah terkait buku-buku keagamaan.

Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pendidikan Islam di Vietnam. Salah satunya adalah meningkatnya hubungan diplomatik antara Vietnam dengan negara-negara Muslim, seperti Malaysia dan Indonesia. Hubungan yang semakin erat ini membuka peluang bagi pertukaran akademik, kerja

[523] Ahmad Taufiq, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2021), hlm. 134.

[524] Mulyadi Syamsuddin, *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam di Minoritas Muslim*, (Bandung: Rosda, 2022), hlm. 76.

sama pendidikan, serta bantuan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam di Vietnam. Program beasiswa bagi siswa Muslim Vietnam untuk belajar di luar negeri juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan Islam.[525]

Peluang lainnya adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran Islam. Di era digital, pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui platform daring yang memungkinkan siswa Muslim di Vietnam mengakses materi ajar Islam tanpa harus bergantung pada lembaga pendidikan formal. Berbagai aplikasi dan situs web berbasis Islam dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan bahan ajar dalam bahasa Vietnam. Selain itu, komunitas Muslim di Vietnam juga dapat memanfaatkan media sosial dan forum daring untuk berbagi ilmu keislaman dan memperkuat identitas keislaman mereka.

Perkembangan ekonomi Vietnam yang pesat juga memberikan peluang bagi komunitas Muslim untuk meningkatkan pendidikan Islam melalui pendanaan swasta.[526] Dengan semakin banyaknya Muslim yang bergerak di sektor ekonomi dan bisnis, potensi filantropi Islam seperti wakaf dan zakat dapat dikembangkan untuk mendukung pendidikan Islam. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang lebih profesional serta meningkatkan fasilitas yang ada.

Meskipun tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam di Vietnam cukup besar, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kendala yang ada. Dengan kerja sama internasional, pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi pendanaan dari komunitas Muslim, pendidikan Islam di Vietnam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi generasi Muslim di negara tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, implementasi pendidikan Islam di Vietnam menghadapi tantangan signifikan berupa keterbatasan pengakuan resmi pemerintah yang menerapkan regulasi ketat, minimnya tenaga pengajar berkualifikasi akibat hambatan imigrasi,

---

[525] Nurhidayat Ali, *Kebijakan Pendidikan Islam di Negara Sekuler*, (Yogyakarta: Pustaka Islamika, 2020), hlm. 210.

[526] Rahmawati Hidayah, *Transformasi Pendidikan Islam dalam Konteks Globalisasi*, (Surabaya: Lentera, 2023), hlm. 98.

serta kurangnya literatur dalam bahasa Vietnam yang menghambat pemahaman mendalam ajaran Islam di kalangan generasi muda. Namun, peluang tetap terbuka melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara Muslim yang memungkinkan pertukaran akademik, pemanfaatan teknologi digital untuk akses materi pembelajaran, serta pendanaan melalui filantropi Islam dari komunitas Muslim yang berkembang di sektor ekonomi, yang secara kolektif dapat menjadi solusi untuk mendukung keberlanjutan pendidikan Islam di Vietnam.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam di Vietnam memiliki sejarah panjang yang dimulai dari kedatangan para pedagang Muslim pada abad ke-10 hingga ke-12. Meskipun komunitas Muslim merupakan minoritas, mereka berhasil mempertahankan tradisi pendidikan Islam meskipun menghadapi tantangan besar selama masa kolonial Prancis dan pemerintahan komunis yang sekuler. Upaya komunitas Muslim untuk mendirikan madrasah dan lembaga pendidikan informal menunjukkan ketahanan mereka dalam menjaga ajaran Islam.

Kebijakan pemerintah Vietnam terhadap pendidikan Islam mencerminkan pendekatan sosialisme yang ketat, di mana meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama, implementasinya masih dibatasi oleh regulasi yang mengharuskan lembaga pendidikan agama terdaftar dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun ada perkembangan positif, tantangan seperti kurangnya tenaga pengajar berkualitas dan akses terbatas terhadap bahan ajar tetap menjadi hambatan bagi komunitas-komunitas Muslim di Vietnam.

Organisasi Islam memainkan peran vital dalam mempertahankan pendidikan Islam di Vietnam melalui pendirian sekolah dengan kurikulum terintegrasi, pengembangan program pendidikan informal di masjid, dan penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Meskipun menghadapi tantangan berupa regulasi pemerintah yang ketat dan keterbatasan sumber daya, peluang tetap terbuka melalui peningkatan kesadaran komunitas Muslim lokal dan kolaborasi dengan organisasi Islam internasional. Dengan kondisi ini, organisasi Islam harus terus berinovasi dalam menghadapi hambatan untuk memperkuat pendidikan Islam agar relevan dalam dinamika sosial-politik Vietnam.

Organisasi Islam memainkan peran penting dalam mendukung pendidikan Islam dengan mendirikan sekolah-sekolah dan program pendidikan nonformal, serta menyediakan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Meskipun harus menghadapi regulasi pemerintah yang membatasi, kolaborasi dengan organisasi internasional dapat menjadi solusi untuk memperkuat pendidikan Islam di Vietnam.

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di Vietnam menghadapi tantangan signifikan, termasuk pengakuan resmi yang terbatas dan minimnya literatur dalam bahasa Vietnam. Namun, peluang untuk mengembangkan pendidikan Islam tetap ada melalui hubungan diplomatik dengan negara-negara Muslim, pemanfaatan teknologi digital, dan potensi pendanaan dari komunitas Muslim. Dengan memanfaatkan peluang ini, pendidikan Islam di Vietnam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi generasi Muslim di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Siti. (2020). *Dinamika Pendidikan Islam dalam Minoritas Muslim.* Jakarta: Lentera Ilmu.

Ali, Nurhidayat. (2020). *Kebijakan Pendidikan Islam di Negara Sekuler*. Yogyakarta: Pustaka Islamika.

Aminullah, Muhammad. (2021). *Perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka Al-Fikrah.

Anwar, Muhammad. (2021). *Kebijakan Pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri.

Fadhil, Ahmad. (2019). S*trategi Pendidikan Islam di Negara Berbasis Sekuler.* Bandung: Penerbit Mizan.

Fauzan, Ahmad. (2019). *Islam di Vietnam: Sejarah dan Tantangan Pendidikan*. Yogyakarta: UII Press.

Fauzi, Ahmad. (2020). *Minoritas Muslim dan Pendidikan Islam di Vietnam*. Bandung: Alfabeta.

Fuji Faras Azizah & Mona Aprilia. (2024). Historical Studies: The Social Life Of Muslim Minorities In The United States. *Tanjak: Jumal Sejarah dan Peradaban Islam.* 4(1). hlm. 1.

Hidayah, Nurul. (2019). *Politik dan Pendidikan Islam di Asia*. Surabaya: Laksana Media.

Hidayah, Nurul. (2022). *Kebijakan pendidikan Islam di Negara-negara ASEAN*. Surabaya: Pustaka Islamika.

Hidayah, Rahmawati. (2023). *Transformasi Pendidikan Islam dalam Konteks Globalisasi.* Surabaya: Lentera.

Hidayati, N. (2021). Pendidikan Islam di tengah masyarakat multikultural. Jurnal Pendidikan Islam Nusantara, 3(2), 58. Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah.

Huda, Miftahul. (2021). *Pendidikan Islam multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khadijah, Siti. (2022). *Strategi pendidikan Islam di tengah pluralisme agama*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Mahfud, Chairul. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mursalin Hisan & Abdul Mu'ti. (2024). Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islam. *Jurnal Rayah Al-Islam*. 8(2). hlm. 106.

Rahmawati, Siti. (2020). *Dinamika pendidikan Islam di Negara Minoritas Muslim*. Bandung: Mizan.

Rahmawati, Siti. (2022). *Dinamika Pendidikan Islam dalam Sistem Sosialisme*. Jakarta: Rajawali Press.

Rasyid, Muhammad. (2017). Islam dan Pendidikan Multikultural Ittihad. *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*. 15(27). hlm. 5.

Ridwan, Muhammad. (2021). *Peran Organisasi Islam dalam Pendidikan dan Dakwah di Asia Tenggara.* Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Santoso, Budi (2018). *Minoritas Muslim dan pendidikan Islam di Asia*. Malang: UMM Press.

Supardi, Ahmad. (2020). *Membangun pendidikan Islam berbasis multikulturalisme*. Bandung: Alfabeta.

Syamsuddin, Mulyadi. (2022). *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam di Minoritas Muslim*. Bandung: Rosda.

Taufiq, Ahmad. (2021). *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

Tilaar, H. A. R. (2020). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.

Warlizasusi, Jumira. (2021). *Analisis Kebijakan dalam Pendidikan Islam.* Curup: IAIN Curup Press.

BAB 28
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI NEGARA LAOS

(Rinto Pardika)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan komunitas muslim di Asia Tenggara yang dahulunya menjadi pusat perlintasan perdaganagan internasional Hindia-China, hingga menjadi Kawasan perebutan pengaruh ideologi pada masa perang dingin (*Cold War*). Menyebabkan setiap negara di Kawasan Asia Tenggara memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengatur puralitas penduduk mereka karena perbedaan sejarah umat muslim di negara mereka masing-masing salah satunya negara Laos.

Laos merupakan negara dengan lanskap sosio-kultural yang berbeda di Asia Tenggara, memiliki minoritas muslim sebagai penambah keberagaman negara tersebut. Keberadaan penduduk muslim ini menimbulkan kebutuhan atau kebijakan terkait pendidikan islam yang mengakomodasi dan mengkoordinir kebutuhan spesifik mereka dalam kerangka sistem pendidikan nasional Laos.

Laos sendiri adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama budha, namun memiliki beberapa komunitas muslim minoritas yang tersebar di berbagai wilayah di negara Laos tersendiri, samahalnya dengan Thailand yang keseluruhan penduduknya beragama budha tapi pemerintah kerajaan Thailand tetap peduli kepada etnis muslim mengingat etnis tersebut telah lama menetap dan membangun permukiman di neagaranya seperti Thailand bagian selatan yang mana kebanyakan penduduknya menganut agama islam.

Laos dalam pemerintahannya menganut empat agama, yaitu Budha, Kristen, Islam, dan Bhai. Negara Laos juga memberikan kebebasan kepada penduduknya namun tetap memprioritaskan agama Budha karna di anggap agama tertua di negara tersebut. Meskipun Laos memberikan kebebasan dalam memeluk agama kepada penduduknya, namun pelaksanaanya tetap di awasi oleh

pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan dalam peimplementasian masih memiliki keterbatasan kegiatan-kegiatan keagamaan baik di kota maupun di perdesaan.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah sejarah pendidikan islam di Laos?
b. Apasajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kenijakan pendidikan islam di laos?
c. Apasajakah tantangan perkembangan kebijakan pendidikan islam di laos?
d. Apasajakah solusi terhadap tantangan kebijakan pendidikan islam di laos?

C. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan peristiwa dengan terstruktur dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Metode yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan di jurnal-jurnal yang relevan dan mempelajari serta memahami teori-teori yang ada pada beberapa literatur yang serupa dengan penelitian ini. Peneliti memanfaatkan sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan judul "*kebijakan pendidikan islam di Laos*" sehingga penelitian ini dapat di selesaikan.

TEORI

Penelitian serupa terkait kebijakan pendidikan di Asia Tenggara terkhusunya Laos bahwasanya masing-masing negara memberikan tekanan pada pendidikan islam, hal ini menyebabkan beberapa komunitas islam di Asia Tenggara berusaha memperoleh kemerdekaan baik dari segi apapun termasuk pendidikan.[527] Pernyataan ini diperkuat oleh yang menyatakan bahwa Laos adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, tentunya hal ini menjadi tekanan dan penyebab minoritas islam pada Laos yang menyebabkan kesenjangan sosial terutama perbandingan pada penganut empat agama

[527]Aslan, Dinamika Pendidikan Islam di Thailand pada Abad 19-20, *Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. 3, No. 1, 2020, Hlm.40.

di Laos.[528] mengenai komunitas muslim di kawasan Asia Tenggara yang dahulu menjadi jalur lintas perdagangan internasional, namun pedagang arab sedikit yang singgah di negara Laos dikarenakan negara ini tidak memiliki jalur lintas laut yang sering dilewati oleh pedagang Arab dan Hindia.[529]

PEMBAHASAN

A. Sejarah pendidikan islam di Laos

Kehadiran islam di laos memiliki akar yang relatif dalam, meskipun komunitas muslim di sana merupakan minoritas. jejak awal islam dapat ditelusuri melalui interaksi perdagangan dan dakwah yang dibawa oleh para pedagang muslim dari wilayah tetangga seperti Malaysia dan kemungkinan juga dari wilayah champa kuno (yang kini menjadi bagian dari Vietnam). proses ini kemungkinan besar terjadi secara bertahap dan damai. Sayangnya, dokumentasi sejarah yang spesifik mengenai perkembangan pendidikan Islam awal di Laos mungkin terbatas dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang memiliki populasi Muslim lebih besar. Namun, kita bisa membuat beberapa perkiraan yang masuk akal berdasarkan pola perkembangan pendidikan Islam di tempat lain seperti:[530]

a. Pendidikan informal awal: pada fase awal, pendidikan islam kemungkinan besar bersifat informal, berpusat di keluarga dan komunitas. Pengetahuan dasar tentang rukun islam, membaca al-qur'an (mungkin secara lisan), dan nilai-nilai islam akan diajarkan secara turun-temurun.
b. Peran masjid dan surau: seiring dengan pembentukan komunitas muslim yang lebih terorganisir, masjid dan surau (langgar) kemungkinan besar menjadi pusat pendidikan. Di tempat-tempat ini, tokoh agama atau sesepuh komunitas akan memberikan pengajaran agama kepada anak-anak dan anggota komunitas

[528]M Oktapia, Sejarah Perkembangan dan Tantangan Muslim Laos sebagai Kaum Minoritas: Studi Pengembangan di Tengah Keterbatasan, *Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, Vol.22, No. 2, 2024, Hlm.150.

[529]Syaiful Pratama, Minoritas Muslimdi Negara Komunis Laos: Perkembangan dalam Keterbatasan, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol. 10, No.1, 2022, Hlm.51.

[530]Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm.49.

lainnya. Materi yang diajarkan mungkin meliputi dasar-dasar akidah, ibadah, dan akhlak.

c. Pengaruh dari luar: mengingat kedekatan geografis dan interaksi dengan negara-negara muslim lainnya, sangat mungkin bahwa materi dan metode pendidikan dari luar juga mempengaruhi perkembangan pendidikan islam di laos. Misalnya, kitab-kitab agama berbahasa melayu atau arab mungkin digunakan, dan para pelajar mungkin melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke pusat-pusat pendidikan islam di wilayah lain.
d. Pendidikan modern: seiring berjalannya waktu, pendidikan islam di laos kemungkinan juga mengalami modernisasi. Ini bisa berupa pendirian madrasah atau sekolah islam yang lebih formal, dengan kurikulum yang lebih terstruktur dan pengajaran yang lebih sistematis. Selain itu, integrasi dengan teknologi dan sumber daya pendidikan modern juga mungkin terjadi.
e. Tantangan dan adaptasi: sebagai komunitas minoritas, pendidikan islam di laos tentu menghadapi tantangan tersendiri, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga pengajar yang terlatih, dan integrasi dengan sistem pendidikan nasional yang mungkin tidak selalu mengakomodasi kebutuhan pendidikan agama islam secara penuh. Dalam menghadapi tantangan ini, komunitas muslim di laos kemungkinan besar mengembangkan strategi adaptasi dan inovasi dalam menyelenggarakan pendidikan agama bagi generasi mereka.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan mendalam, penelitian lebih lanjut yang berfokus pada sejarah komunitas Muslim dan perkembangan pendidikan Islam di Laos sangat dibutuhkan. Sumber-sumber seperti catatan sejarah lokal (jika ada), arsip kolonial (jika relevan), dan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Muslim di Laos dapat memberikan wawasan yang lebih kaya.

Meskipun demikian, dari perspektif yang lebih luas, sejarah pendidikan Islam di Laos adalah bagian penting dari mozaik perkembangan Islam di Asia Tenggara, yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai dan praktik Islam berakar dan beradaptasi dalam konteks budaya dan sosial yang beragam. Ini juga menjadi pengingat akan pentingnya mempelajari sejarah komunitas-

komunitas Muslim minoritas yang seringkali terpinggirkan dalam narasi sejarah yang lebih dominan.[531]

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan islam di laos

Faktor-faktor krusial yang membentuk kebijakan pendidikan Islam di Laos. Mengingat status komunitas Muslim sebagai minoritas, dinamika kebijakan pendidikannya tentu dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang saling terkait seperti:[532]

a. Status minoritas dan hubungan dengan pemerintah: ini adalah fondasi utama. Sebagai minoritas, kebijakan pendidikan islam sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah laos memandang dan memperlakukan komunitas muslim. Faktor-faktor yang berperan di sini meliputi:
   1) Pengakuan konstitusional dan legal: apakah islam dan hak-hak komunitas muslim (termasuk pendidikan agama) diakui secara konstitusional dan dalam peraturan perundang-undangan? Tingkat pengakuan ini akan sangat menentukan ruang gerak dan dukungan pemerintah terhadap pendidikan islam.
   2) Kebijakan nasional terhadap agama minoritas: bagaimana pemerintah secara umum memperlakukan agama-agama minoritas? Apakah ada kebijakan yang inklusif dan mendukung keberagaman, atau justru sebaliknya? Kebijakan umum ini akan menjadi payung bagi kebijakan pendidikan islam.
   3) Dialog dan kemitraan: tingkat dialog dan kemitraan antara pemimpin komunitas muslim dengan pemerintah dan lembaga terkait akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan pendidikan islam diartikulasikan dan diakomodasi dalam kebijakan.
   4) Stabilitas politik dan sosial: kondisi politik dan sosial yang stabil cenderung menciptakan ruang yang lebih kondusif bagi pengembangan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas muslim dalam hal pendidikan.

---

[531]N Tubagus, Sejarah Perkembangan Islam di Laos: Sudut Pandang Sejarah Politik, *Journal Of Islamic History and Civilization*, Vol. 3, No. 2, 2024, Hlm.29.

[532]Erasiah, Komunitas Muslim di Kawasan Komunis, *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2022, Hlm.66.

b. Demografi dan distribusi geografis komunitas muslim
    1) Konsentrasi geografis: jika komunitas muslim terkonsentrasi di wilayah tertentu, ini dapat memudahkan pembentukan lembaga pendidikan islam dan pengorganisasian kegiatan belajar-mengajar. Kebijakan mungkin lebih fokus pada penyediaan dukungan di wilayah-wilayah ini.
    2) Akses ke pendidikan: sebaran geografis juga mempengaruhi akses komunitas muslim terhadap sistem pendidikan nasional dan lembaga pendidikan islam yang ada. Kebijakan perlu mempertimbangkan pemerataan akses.
    3) Pertumbuhan populasi muslim: tingkat pertumbuhan populasi muslim dapat mempengaruhi kebutuhan akan fasilitas dan tenaga pengajar dalam pendidikan islam di masa depan, yang perlu diantisipasi oleh kebijakan.
c. Sumber daya dan kapasitas komunitas muslim
    1) Sumber daya finansial: kemampuan komunitas untuk mendanai lembaga pendidikan, menyediakan beasiswa, dan mendukung kegiatan pendidikan lainnya akan mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan pendidikan islam.
    2) Sumber daya manusia (tenaga pengajar): ketersediaan guru dan tenaga pendidik yang kompeten di bidang pendidikan islam sangat krusial. Kebijakan mungkin perlu mempertimbangkan pelatihan guru dan pengembangan kurikulum.
    3) Organisasi dan kepemimpinan: keberadaan organisasi muslim yang kuat dan memiliki visi pendidikan yang jelas akan membantu dalam mengartikulasikan kebutuhan komunitas dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.
d. Pengaruh eksternal
    1) Hubungan dengan negara-negara muslim: dukungan dan kerjasama dari negara-negara dengan populasi muslim mayoritas, baik dalam bentuk bantuan finansial, pertukaran pelajar, maupun pengembangan kurikulum, dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan islam di laos.
    2) Organisasi islam internasional: peran organisasi islam internasional dalam memberikan advokasi, sumber daya, dan panduan juga dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan islam di tingkat nasional.

3) Globalisasi dan teknologi: akses terhadap informasi dan teknologi global dapat membuka peluang untuk inovasi dalam metode pengajaran dan materi pembelajaran pendidikan islam.

e. Sistem pendidikan nasional laos

1) Kurikulum nasional: bagaimana kurikulum nasional mengakomodasi pendidikan agama? Apakah ada ruang untuk pendidikan agama islam di sekolah-sekolah umum, ataukah pendidikan agama hanya menjadi tanggung jawab komunitas muslim sendiri.
2) Peraturan dan standar pendidikan: lembaga pendidikan islam kemungkinan besar harus mematuhi peraturan dan standar pendidikan nasional. Kebijakan perlu mempertimbangkan bagaimana standar ini dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan islam.
3) Integrasi dan ekualitas: kebijakan pendidikan islam idealnya bertujuan untuk memastikan bahwa siswa muslim memiliki kesempatan yang sama dalam sistem pendidikan nasional tanpa harus mengorbankan identitas agama mereka.

Kebijakan pendidikan Islam di Laos adalah hasil dari interaksi kompleks antara status minoritas komunitas Muslim, demografi, sumber daya internal, pengaruh eksternal, dan sistem pendidikan nasional. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas dan relevan bagi komunitas Muslim di Laos, sambil tetap berkontribusi pada pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kebijakan yang efektif akan membutuhkan dialog yang berkelanjutan, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan komunitas Muslim, dan komitmen dari pemerintah untuk mengakomodasi keberagaman dalam sistem pendidikan.[533]

C. Tantangan perkembangan kebijakan pendidikan islam di laos

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kebijakan pendidikan Islam di Laos. Mengingat konteks unik Laos sebagai

[533]Ahmad Wildan Syidad, Islamisasi di Wilayah Indochina, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1, 2023, Hlm.139.

negara dengan komunitas Muslim minoritas, tantangan-tantangan ini bersifat multidimensional:[534]

a. Keterbatasan sumber daya
   1) Finansial: komunitas muslim sebagai minoritas seringkali memiliki sumber daya finansial yang terbatas untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan islam yang berkualitas. Bantuan dari luar negeri mungkin tidak selalu stabil atau mencukupi.
   2) Tenaga pengajar: ketersediaan guru dan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi yang memadai dalam ilmu-ilmu keislaman dan metodologi pengajaran modern bisa menjadi kendala. Pelatihan guru juga mungkin terbatas.
   3) Materi dan kurikulum: pengembangan kurikulum yang relevan dengan konteks laos dan sesuai dengan standar pendidikan nasional, serta penyediaan materi ajar yang memadai, memerlukan investasi dan keahlian khusus.
b. Pengakuan dan integrasi dalam sistem pendidikan nasional
   1) Kurikulum yang tidak akomodatif: kurikulum nasional mungkin tidak secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan pendidikan agama islam, sehingga komunitas muslim perlu berjuang untuk memasukkan elemen-elemen keislaman dalam pendidikan anak-anak mereka.
   2) Standarisasi dan akreditasi: lembaga pendidikan islam mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar pendidikan nasional atau mendapatkan akreditasi, yang dapat mempengaruhi pengakuan ijazah dan kesempatan bagi lulusannya.
   3) Diskriminasi dan stereotip: potensi adanya diskriminasi atau stereotip terhadap siswa dan lulusan lembaga pendidikan islam dalam sistem pendidikan yang lebih luas atau di pasar kerja dapat menjadi tantangan.
c. Tantangan sosial dan budaya
   1) Asimilasi dan identitas: tekanan untuk berasimilasi dengan budaya mayoritas dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan identitas keislaman generasi muda melalui pendidikan.

[534]Faisal Tanjung, Islam Minoritas di Laos, *Diniyyah International Conference*, Vol.1, No. 1, 2024, Hlm.111.

2) Kurangnya kesadaran dan dukungan komunitas: tidak semua anggota komunitas muslim mungkin memiliki kesadaran yang sama tentang pentingnya pendidikan islam formal, atau mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mendukungnya.
3) Perbedaan etnis dan budaya dalam komunitas muslim: keragaman etnis dan budaya di dalam komunitas muslim laos sendiri dapat menimbulkan tantangan dalam menyusun kurikulum dan pendekatan pendidikan yang inklusif.

d. Kebijakan dan regulasi pemerintah
1) Keterbatasan regulasi yang mendukung: pemerintah mungkin belum memiliki kebijakan atau regulasi yang secara spesifik mendukung pengembangan pendidikan agama bagi komunitas minoritas, termasuk islam.
2) Birokrasi dan perizinan: proses perizinan untuk mendirikan dan mengoperasikan lembaga pendidikan islam mungkin rumit dan memakan waktu.
3) Potensi pembatasan: ada potensi risiko pembatasan atau intervensi pemerintah dalam kurikulum atau pengelolaan lembaga pendidikan islam.

e. Pengaruh eksternal dan global
1) Polarisasi dan ekstremisme: narasi-narasi ekstremisme global dapat mempengaruhi persepsi terhadap pendidikan islam dan menimbulkan tantangan dalam menjaga pendidikan yang moderat dan toleran.
2) Bantuan dan intervensi asing: ketergantungan pada bantuan asing untuk pendidikan islam dapat membuatnya rentan terhadap perubahan agenda atau kepentingan eksternal.

f. Modernisasi dan globalisasi
1) Tantangan dalam menyeimbangkan ilmu agama dan umum: lembaga pendidikan islam perlu membekali siswa dengan pengetahuan agama yang kuat sekaligus keterampilan dan pengetahuan umum yang relevan dengan tuntutan zaman.
2) Dampak media dan teknologi: paparan terhadap media dan teknologi global dapat mempengaruhi nilai-nilai dan pandangan siswa muslim, yang perlu diantisipasi oleh pendidikan islam.

D. Solusi terhadap tantangan kebijakan pendidikan islam di laos

Solusi potensial untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan Islam di Laos. Solusi-solusi ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif:

a. Penguatan Sumber Daya
   1) Penggalangan Dana Komunitas yang Terorganisir: Membangun sistem penggalangan dana yang transparan dan akuntabel di dalam komunitas Muslim untuk mendukung lembaga pendidikan dan program-programnya. Ini bisa melalui wakaf, donasi rutin, atau kegiatan fundraising.
   2) Kemitraan dengan Pihak Eksternal: Menjalin kerjasama dengan organisasi Islam internasional, lembaga filantropi, atau negara-negara Muslim untuk mendapatkan dukungan finansial, bantuan teknis, atau beasiswa bagi siswa dan guru.
   3) Pengembangan Kapasitas Tenaga Pengajar: Mengadakan program pelatihan guru yang berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun melalui kerjasama dengan institusi pendidikan di luar negeri. Memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh dan pelatihan daring.
   4) Pengembangan Materi dan Kurikulum Berbasis Lokal: Mengembangkan materi ajar dan kurikulum yang relevan dengan konteks sosial dan budaya Laos, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip ajaran Islam yang otentik. Memanfaatkan sumber daya lokal dan kearifan lokal.

b. Penguatan Pengakuan dan Integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional:
   1) Advokasi Kebijakan yang Inklusif: Melakukan dialog dan advokasi yang konstruktif dengan pemerintah untuk memasukkan pendidikan agama Islam sebagai bagian yang diakui dalam sistem pendidikan nasional, dengan kurikulum yang disetujui dan guru yang berkualitas.
   2) Standarisasi dan Akreditasi Mandiri: Mengembangkan standar mutu pendidikan Islam sendiri dan berupaya mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk meningkatkan kepercayaan dan pengakuan.
   3) Promosi Pemahaman dan Toleransi: Mengadakan program-program pertukaran budaya dan pendidikan antar siswa dari

berbagai latar belakang agama untuk membangun pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi diskriminasi.

c. Penguatan Sosial dan Budaya
   1) Pendidikan Keluarga dan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan Islam formal dan informal bagi perkembangan anak-anak Muslim. Mengadakan seminar dan lokakarya tentang pendidikan Islam.
   2) Penguatan Identitas Keislaman: Mengembangkan program-program yang memperkuat identitas keislaman generasi muda melalui pemahaman sejarah Islam di Asia Tenggara, nilai-nilai Islam yang universal, dan praktik keagamaan yang moderat.
   3) Inklusivitas dalam Pendidikan: Mengembangkan pendekatan pendidikan yang inklusif dan menghargai keragaman etnis dan budaya di dalam komunitas Muslim Laos, memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan didukung.

d. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah
   1) Pengembangan Regulasi yang Mendukung: Bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang secara spesifik mendukung pendirian, pengelolaan, dan pengembangan lembaga pendidikan Islam dengan tetap memperhatikan standar nasional.
   2) Simplifikasi Proses Perizinan: Mengadvokasi proses perizinan yang lebih efisien dan transparan untuk pendirian lembaga pendidikan Islam.
   3) Keterlibatan dalam Forum Kebijakan: Berpartisipasi aktif dalam forum-forum kebijakan pendidikan di tingkat nasional untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi komunitas Muslim dalam hal pendidikan.

e. Mitigasi Pengaruh Eksternal Negatif dan Pemanfaatan Pengaruh Positif
   1) Pengembangan Kurikulum Anti-Ekstremisme: Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan pemahaman lintas agama dalam kurikulum pendidikan Islam untuk menangkal narasi ekstremisme.
   2) Kerjasama Internasional yang Selektif: Memanfaatkan kerjasama internasional dengan tetap menjaga kedaulatan dan

identitas pendidikan Islam di Laos, dengan fokus pada transfer pengetahuan dan praktik terbaik.

3) Literasi Media dan Digital: Meningkatkan literasi media dan digital di kalangan siswa dan guru untuk membantu mereka memilah informasi dan menangkal pengaruh negatif dari media sosial dan platform daring.

f. Adaptasi terhadap Modernisasi dan Globalisasi

1) Integrasi Ilmu Agama dan Umum: Mengembangkan kurikulum yang seimbang antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman.
2) Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran: Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan pendidikan Islam.
3) Pengembangan Keterampilan Abad ke-21: Membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, yang relevan dengan tuntutan global.[535]

Implementasi solusi-solusi ini memerlukan komitmen yang kuat, kerjasama yang erat antara berbagai pihak, dan visi yang jelas untuk masa depan pendidikan Islam di Laos. Dengan pendekatan yang strategis dan berkelanjutan, diharapkan tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi, dan pendidikan Islam dapat berkembang menjadi pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia di Laos.

KESIMPULAN

Penulisan karya ilmiah ini menyoroti perjalanan unik kebijakan pendidikan Islam di Laos, sebuah negara dengan komunitas Muslim sebagai minoritas. Sejarah awal pendidikan Islam di Laos ditandai dengan transmisi informal dan peran sentral masjid, dipengaruhi oleh interaksi dengan wilayah tetangga. Perkembangan kebijakan pendidikan

[535]Fikri Arfiansyah Husnain, Dampak Kerjasama Pendidikan Singapoera-Laos Melalui Singapore Coorperation Programme (SCP) terhadap Human Capital di Laos, *The Journal of IslamicStudies and International Relations*, Vol. 7, No. 2, 2024, Hlm.60.

Islam dipengaruhi oleh kompleksitas status minoritas, demografi komunitas Muslim, sumber daya internal, pengaruh eksternal, dan sistem pendidikan nasional Laos secara keseluruhan.

Berbagai tantangan signifikan menghambat perkembangan kebijakan pendidikan Islam yang optimal, termasuk keterbatasan sumber daya finansial dan tenaga pengajar, isu pengakuan dan integrasi dalam sistem pendidikan nasional, tantangan sosial budaya terkait identitas dan asimilasi, keterbatasan regulasi pemerintah yang mendukung, pengaruh eksternal yang beragam, serta tuntutan modernisasi dan globalisasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, artikel ini menawarkan solusi yang berfokus pada penguatan sumber daya komunitas, advokasi untuk pengakuan dan integrasi yang lebih baik dalam sistem pendidikan nasional, penguatan identitas sosial dan budaya, kerjasama dengan pemerintah dalam pengembangan regulasi yang mendukung, mitigasi pengaruh eksternal negatif sambil memanfaatkan pengaruh positif, serta adaptasi terhadap tuntutan modernisasi dan globalisasi melalui integrasi ilmu agama dan umum serta pemanfaatan teknologi.

Kesimpulannya, pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Laos memerlukan upaya kolaboratif dan berkelanjutan dari komunitas Muslim, pemerintah, dan berbagai pihak terkait. Dengan pemahaman mendalam terhadap sejarah, faktor-faktor yang mempengaruhi, tantangan yang dihadapi, dan implementasi solusi yang strategis, diharapkan pendidikan Islam di Laos dapat terus berkembang, memberdayakan komunitas Muslim, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Laos secara keseluruhan, sambil tetap menjaga identitas dan nilai-nilai Islam yang luhur.

DAFTAR PUSTAKA

Aslan. (2020). Dinamika Pendidikan Islam di Thailand pada Abad 19-20. *Jurnal Pendidikan Islam*, *3*(1), 40.

Erasiah. (2022). Komunitas Muslim di Kawasan Komunis. *Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, *12*(2).

Husnain, F. A. (2024). Dampak Kerjasama Pendidikan Singapura-Laos Melalui Singapore Coorperation Programme (SCP) Terhadap Human Capital di Laos. *The Journal of Islamic Studies and International Relations*, *7*(2), 60.

N, T. (2024). Sejarah Perkembangan Islam di Laos: Sudut Pandang

Sejarah Politik. *Journal of Islamic History and Civilization*, *3*(2).
Oktapia, M. (2024). Sejarah Perkembangan dan Tantangan Muslim Laos sebagai Kaum Minoritas: Studi Pengembangan Pendidikan di Tengha Keterbatasan. *Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, *22*(2), 150.
Pratama, F. S. (2022). Minoritas Muslim di Negara Komunis Laos: Perkembangan dalam Keterbatasan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, *10*(1), 51.
Saifullah. (2010). *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar.
Syidad, A. W. (2023). Islamisasi di Wilayah Indochina. *Jurnal Studi Islam*, *15*(1), 139.
Tanjung, F. (2024). Islam Minoritas di Laos. *Diniyyah International Conference*, *1*(1), 111.

Bab 29
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA MYANMAR

Sepralin Tesva (2220203050)
Dosen Pengampu Prof. Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Myanmar merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dengan mayoritas penduduknya beragama buddha (sekitar 87,9%), sementara penganut islam menjadi minoritas dengan persentase sekitar 4,3 % dari total populasi. Masyarakat muslim di Myanmar Sebagian besar adalah etnis Rohingya yang bermukim di wilayah Rakhine (Arakan), namun terdapat juga komunitas Muslim di daerah perkotaan seperti Yangon dan Mandalay yang telah menetap sejak masa colonial inggris. Kebijkan Pendidikan islam di Myanmar telah mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan politik dan sosial negara tersebut. Setelah kemerdekaan Myanmar dari inggris pada tahun 1948, pemerintah menerapkan kebijakan yang cenderung membatasi aktivitas keagamaan dan Pendidikan bagi kelompok minoritas, termasuk muslim [536]

Situasi ini semakin memburuk saat rezim militer berkuasa pada tahun 1962 yang menerapkan kebijakan "Burmanisasi" dengan mempromosikan identitas nasional berbasis Buddha dan etnis Burma (Bamar Hlaing, 2020). Kebijakan Pendidikan islam di Myanmar menjadi isu yang sensitif karena berkaitan erat dengan konflik etnis dan keagamaan yang telah berlangsung lama. Komunitas muslim terutama Rohingya, menghadapi berbagai bentuk deskriminasi structural, termasuk pembatasan akses Pendidikan, penolakan kewarganegaraan, dan pembatasan mobilitas. UU Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi menjadikan mereka "stateless" atau tanpa kewarganegaraan, yang berdampak pada akses mereka terhadap Pendidikan formal [537]

[536] Sevea Feener, *Islam Di Asia Tenggara Kontemporer* (LP3ES, 2021).
[537] Ahmad Ibrahim, *Dilema Kewarganegaraan* (Gading Publishing, 2018).

Transisi Myanmar menuju demokrasi pada tahun 2011 membawa harapan baru bagi perbaikan kondisi minoritas, termasuk dalam bidang Pendidikan. Namun konflik kekerasan antara komunitas Buddha dan Muslim di Rakhie pada tahun 2012, serta operasi militer terhadap Rohingya pada tahun 2017 yang dianggap sebagai "pembersihan etnis" oleh PBB, memperkuat marginalisasi Pendidikan islam di negara tersebut. Ribuan sekolah islam terpaksa ditutup atau beroperasi secara sembunyi-sembunyi, dan banyak anak-anak muslim kehilangan akses terhadap Pendidikan yang layak.

Dalam konteks global, Pendidikan menjadi hak asasi yang fundamental sebagaimana tercantum dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. Namun, realita kebijakan Pendidikan islam di Myanmar, menunjukan adanya kesenjangan besar antara komitmen internasional dengan implementasi di lapangan. Organisasi Internasional seperti UNESCO dan UNICEF telah berupaya mendorong pemerintah Myanmar untuk menjamin hak Pendidikan bagi semua anak tanpa deskriminasi, tetapi tantangan politik dan sosial- budaya membuat kemajuan berjalan lambat.

Penelitian tentang kebijakan Pendidikan islam di Myanmar menjadi penting untuk menganalisis bagaimana negara dengan mayoritas non-muslim mengelola Pendidikan untuk kelompok minoritas muslim, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut, serta mencari Solusi untuk memperbaiki system Pendidikan yang lebh inklusif dan berkeadilan[538]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan historis kebijakan Pendidikan islam di Myanmar sejak masa kemerdekaan hingga saat ini?
2. Apa saja bentuk dan implementasi kebijakan Pendidikan islam yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar?
3. Bagaimana dampak kebijakan Pendidikan terhadap komunitas muslim di Myanmar, khususnya dalam hal akses, kualitas, dan relevansi Pendidikan?

[538] Kipgen, *Konflik Myanmar Akar Masalah Dan Prospek Penyelesaian* (Kompas Media Nusantara, 2019).

4. Bagaimana strategi dan upaya komunitas Muslim di Mynmar dalam memepertahankan dan mengembangkan Pendidikan islam di tengah berbagai kebijakan pemerintah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka (library research), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kebijakan pendidikan Islam di Myanmar. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari jurnal ilmiah, artikel akademik, buku, serta laporan dari organisasi internasional yang dapat diakses melalui internet. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria kesesuaian dengan topik dan kemutakhiran informasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi pokok-pokok informasi penting, mengelompokkan data sesuai tema, serta menyusun hasil kajian secara sistematis.

TEORI

Pendidikan Islam dipahami sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang berlandaskan ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kecakapan intelektual dan keterampilan hidup. Pendidikan Islam mencakup aspek tarbiyah (pengasuhan), ta'lim (pengajaran), dan ta'dib (penanaman adab), dan bersifat menyeluruh, meliputi dimensi spiritual, moral, fisik, psikis, dan sosial. Dalam masyarakat minoritas, pendidikan Islam menjadi sarana utama untuk mempertahankan identitas keagamaan dan budaya.

Dalam masyarakat yang majemuk, kebijakan pendidikan seharusnya menjunjung nilai keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keragaman. Pendidikan memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik. Menurut teori multicultural education, kebijakan pendidikan yang adil harus mencakup integrasi konten, konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi yang setara, dan pemberdayaan budaya sekolah. Kelima prinsip ini penting untuk menilai sejauh mana negara non-Muslim seperti Myanmar mengakomodasi kebutuhan pendidikan komunitas Muslim.

Hak atas pendidikan bagi kelompok minoritas telah dijamin secara internasional. Dokumen penting seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konvensi UNESCO menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Negara juga berkewajiban menjamin kelompok minoritas untuk menyelenggarakan pendidikan sendiri, termasuk penggunaan bahasa dan budaya mereka. Dasar normatif ini menjadi pijakan dalam menilai kebijakan pendidikan Islam di negara dengan mayoritas non-Muslim seperti Myanmar.

Secara umum, terdapat tiga model kebijakan pendidikan terhadap minoritas agama, yakni segresi, asimilasi, dan integrasi. Model segresi memberi otonomi pendidikan namun berisiko menciptakan isolasi; asimilasi meleburkan identitas minoritas ke dalam budaya mayoritas; sementara integrasi mengakomodasi kebutuhan pendidikan minoritas sambil membangun nilai bersama. Di kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar, kebijakan pendidikan terhadap Muslim umumnya cenderung menggabungkan unsur segresi dan asimilasi, tidak seperti Singapura yang lebih mendekati model integratif.

Hubungan antara pendidikan dan konflik etno-religius sangat erat. Di Myanmar, kebijakan pendidikan yang diskriminatif terhadap Muslim Rohingya telah memperburuk marginalisasi sosial dan konflik berkepanjangan. Sebaliknya, pendekatan pendidikan berbasis komunitas yang mengusung nilai-nilai inklusif dan penghargaan terhadap keragaman terbukti memiliki potensi besar dalam membangun kohesi sosial serta mengurangi ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang inklusif menjadi sangat relevan dalam konteks negara plural seperti Myanmar.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Historis Kebijakan Pendidikan Islam di Myanmar

Kebijakan Pendidikan Islam di Myanmar telah mengalami perubahan signifikan sejalan dengan transformasi politik negara tersebut. Berdasarkan penelitian Aung (2020), perkembangan historis kebijakan Pendidikan Islam di Myanmar dapat dibagi menjadi 4 periode utama:

a. Periode Kolonial (1824-1948)

Pada masa colonial inggris, komunitas muslim di Burma (nama Myanmar sebelumnya), memiliki kebebasan relatif dalam menyelenggarakan Pendidikan islam. Masjid-masjid dan madrasah didirikan terutama di wilayah Arakan (Rakhine sekarang) dan kota-kota besar seperti Rangoon (Yangon) dan Mandalay. Madrasah ini mengajarkan Al-qur'an, Hadist, Fiqh, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, serta pengetahuan umum dalam Bahasa urdu, arab, dan inggris. Administrasi colonial menerapkan kebijakan "divide and rule" yang memberikan ruang bagi kelompok minoritas termasuk muslim untuk mempertahankan identitas mereka melalui Pendidikan[539]

b. Periode Pasca Kemerdekaan dan Demokrasi Parlementer (1948-1962)

Setelah kemerdekaan, pemerintahan perdana Menteri UNU menerapkan kebijakan yang relatif toleran terhadap minoritas agama. Islam diakui sebagai salah satu agama resmi negara, dan Lembaga Pendidikan islam diizinkan beroperasi dengan beberapa Batasan. Meskipun demikian, mulai muncul sentiment anti-muslim terutama terkait isu separatism rohingyah. Pada tahun 1954, Departemen Pendidikan mengeluarkan regulasi yang mengharuskan semua sekolah swasta termasuk madrasah untuk mendaftar dan mengiukuti kurikulum nasional, meskipun masih diiizinkan memberikan Pendidikan agama sebagai Pelajaran tambahan [540]

c. Periode Rezim Militer (1962-2011)

Kudeta Militer tahun 1962 yang dipimpin oleh jenderal ne win membawa perubahan drastis dalam kebijakan Pendidikan. Pemerintah menerapkan "Burmese Way to Socialsm" yang menekankan identitas nasional berbasisi Budha dan etnis Bamar".

Pendidikan islam mengalami tekanan berat melalui serangkaian kebijakan yaitu: Nasionalisme semua sekolah swasta pada tahun 1964-1965, Pelarangan pengajaran Bahasa Arab dan Urdu di sekolah-sekolah, pembatasan Pembangunan tempat

[539] Aung, 'Sejarah Perkembangan Kebijakan Pendidikan Di Myanmar', *Jurnal Sejarah Pendidikan*, 2 (2020), pp. 78–95.

[540] Thawnmung, 'Dilema Minoritas Muslim Di Myanmar', *Jurnal Studi Perbatasan*, 2019, pp. 195–167.

ibadah baru yang berfungsi juga sebagai pusat Pendidikan, pengawasan ketat terhadap konten Pendidikan agama serta pembatasan materi pelajaran agama hanya pada jam-jam tertentu. Menurut selth(2021), periode ini merupakan masa paling sulit bagi Pendidikan islam di Myanmar,dimana banyak madrasah terpaksa beroperasi secara sembunyi- sembunyi atau beralih menjadi sekolah umum dengan pengajaran islam yang sangat terbatas.

d. Periode Reformasi dan Transisi Demokratis (2011-sekarang)

Transisi Myanmar menuju demokrasi pada tahun 2011 awalnya membawa harapan bagi perbaikan kebijakan Pendidikan islam. Beberapa masjid dan madrasah di izinkan untuk dibuka Kembali. Namun, konflik kekerasan antara komunitas Budhha dan muslim di Rakhine pada tahun 2012, serta operasi militer terhadap rohingyah pada tahun 2017, mengakibatkan penutupan banyak Lembaga Pendidikan islam di daerah konflik. Pemerintah Aung San Suu Kyi (2016-2021) tidak membawa perubahan siqnifikan dalam kebijakan Pendidikan islam. Program reformasi Pendidikan nasional yang diluncurkan tahun 2016 tidak secara khusus mengakomodasi kebutuhan Pendidikan islam. Kudeta militer February 2021 semakin memperburuk situasi dengan meningkatknya pengawasan terhadap aktivitas keagamaan dan Pendidikan minoritas.

B. Bentuk Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam di Myanmar

Kebijakan Pendidikan islam di Myanmar saat ini termanifestasi dalam beberapa bentuk regulasi dan praktik, yang menurut penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Regulasi Formal dan Informal

Secara Formal, konstitusi myanmar tahun 2008 menjamin kebebasan beragama (pasal 34) dan hak Pendidikan (pasal 366), namun implementasinya sangat dibatasi oleh berbagai peraturan Tingkat rendah dan praktik deskriminatif. Pendidikan islam berada dibawah pengawasan dua Lembaga: Kementerian Pendidikan dan Kementerian urusan agama, dengan prosedur perizinan yang rumit. Regulasi yang dikeluarkan pada tahun 1990-an dan belum dicabut mencakup: kewajiban registrasi semua Lembaga Pendidikan agama, pembatasan kurikulum dan

bahan ajar agama, larangan penggunaan bangunan untuk tujuan Pendidikan tanpa izin khusus, kewajiban pengajaran dalam Bahasa Myanmar serta pengawasan ketat terhadap guru agama, termasuk sertifikasi dan pemeriksaan latar belakang [541]

b. Kurikulum dan Bahasa pengantar

Kurikulum nasional Myanmar tidak mengakomodasi Pendidikan agami slam dalam system Pendidikan formal. Pendidikan agama hanya di perbolehkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler dengan waktu terbatas. Bahasa Myanmar diwajibkan sebagai Bahasa pengantar utama di sekolah, sememntara Bahasa arab, urdu' atau Bahasa rohingyah dilarang digunakan sebagai medium pembelajaran formal, meskipun dalam praktiknya masih diajarkan secara terbatas di madrasah-madrasah swasta.

c. Akses Pendidikan tinggi

Muslim Myanmar, terutama dari kelompok Rohingya, menghadapi diskriminasi sistematis dalam akses pendidikan tinggi. Pembatasan meliputi: kesulitan mendapatkan dokumen identitas yang diperlukan untuk pendaftaran universitas, kouta tidak resmi yang membatasi jumlah mahasiswa muslim di universitas tertentu, larangan mempelajari bidang-bidang strategis seperti, kedokteran, hukum, dan Teknik bagi muslim dari daerah tertentu serta pengawasan ketat terhadap aktivis mahasiswa muslim di kampus [542]

d. Pendanaan dan infrastruktur

Tidak ada alokasi dana pemerintah untuk pendidikan Islam, sehingga lembaga pendidikan Islam sepenuhnya bergantung pada donasi privat dan dana dari komunitas Muslim lokal atau internasional. Bantuan internasional untuk pendidikan Islam sering dicurigai sebagai upaya "radikalisasi" dan diawasi ketat atau dibatasi. Pelarangan pembangunan atau renovasi tempat ibadah secara tidak langsung membatasi pengembangan fasilitas pendidikan Islam yang biasanya terintegrasi dengan masjid.

---

[541] Cheesman, 'Kebijakan Pendidikan Dan Politik Identitas Di Myanmar', *Jurnal Studi Asia Tenggara*, 2019, pp. 112–34.

[542] Taufiqqurahman, 'Studi Kasus Rohingyah Myanmar', *Jurnal Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat*, 2021, pp. 67–85.

e. Implementasi di berbagai wilayah

Implementasi kebijakan pendidikan Islam bervariasi antar wilayah di Myanmar:

1). Wilayah Rakhine (Arakan): Pembatasan paling ketat diterapkan di wilayah ini, terutama setelah konflik 2012 dan 2017. Sebagian besar madrasah formal telah ditutup, dan pendidikan Islam berlangsung secara rahasia di camp-camp pengungsi internal dengan sumber daya sangat terbatas.

2). Wilayah Yangon dan Mandalay: kota-kota besar, madrasah diizinkan beroperasi dengan pengawasan ketat. Beberapa lembaga pendidikan Islam berhasil bertahan dengan mendaftar sebagai sekolah umum yang memberikan pendidikan agama sebagai kegiatan tambahan.

3). Wilayah Perbatasan (Shan, Kachin): Komunitas Muslim di wilayah perbatasan memiliki sedikit lebih banyak keleluasaan dalam menyelenggarakan pendidikan Islam informal, meskipun tetap menghadapi tantangan dari otoritas lokal dan kelompok mayoritas.

C. Dampak Kebijakan Pendidikan terhadap Komunitas Muslim

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar telah menimbulkan berbagai dampak terhadap komunitas Muslim, baik secara langsung maupun tidak langsung:

a. Dampak terhadap akses Pendidikan

Menurut laporan Human Rights Watch yang dikutip oleh Saiful & Jasmine (2020), tingkat melek huruf di kalangan Muslim Rohingya di Myanmar hanya mencapai 20%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 90%. Studi oleh UNICEF yang dirujuk oleh Taufiqurrohman (2021) mengestimasi bahwa hanya 28% anak-anak Muslim Rohingya yang memiliki akses ke pendidikan dasar, dan kurang dari 5% yang melanjutkan ke tingkat menengah. Pembatasan mobilitas, diskriminasi, dan kemiskinan menjadi faktor-faktor utama yang menghambat akses Pendidikan [543]

[543] Rahman, *Sejarah Komunitas Muslim Di Myanmar* (Mizan, 2018).

b. Dampak terhadap Kualitas Pendidikan.

Kualitas pendidikan yang diterima komunitas Muslim, terutama Rohingya, sangat rendah karena beberapa faktor: seperti, Kekurangan guru berkualifikasi (banyak guru Muslim dilarang mengajar atau tidak mendapat sertifikasi), Keterbatasan bahan ajar dan fasilitas Pendidikan, Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan komunitas, Pengajaran yang terputus-putus akibat konflik dan pengungsian, serta Absennya pengakuan terhadap ijazah atau sertifikat dari lembaga pendidikan Islam non-formal [544]

c. Dampak terhadap identitas kultural dan keagamaan

Kebijakan asimilasi melalui pendidikan telah mengancam pelestarian identitas kultural dan keagamaan komunitas Muslim. Seorang tokoh menjelaskan bahwa pembatasan pengajaran bahasa Arab, sejarah Islam, dan nilai-nilai religius dalam sistem pendidikan formal menyebabkan generasi muda Muslim Myanmar mengalami kesulitan dalam memahami dan menghayati tradisi keagamaan mereka. Pada saat yang sama, madrasah yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi cenderung fokus pada aspek ritualistik dan tekstual Islam tanpa pengembangan pemikiran kritis dan kontekstual [545]

d. Dampak terhadap Kohesi Sosial

Segregasi pendidikan antara Muslim dan non-Muslim di Myanmar telah berkontribusi terhadap kurangnya kohesi sosial dan memperburuk stereotip antar komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari berbagai kelompok etnis dan agama di Myanmar memiliki sedikit kesempatan untuk berinteraksi dalam lingkungan pendidikan, sehingga menguatkan prasangka dan miskonsepsi. Sistem pendidikan yang terpisah juga menyuburkan narasi "us versus them" yang kemudian dapat dimanipulasi untuk tujuan politik[546]

e. Dampak terhadap Prospek Ekonomi

Keterbatasan akses dan kualitas pendidikan berdampak langsung pada prospek ekonomi komunitas Muslim. Tanpa

[544] Hefner, *Pendidikan Islam Di Asia Tenggara* (Suara Muhamadiyah, 2021).

[545] Rustam, 'Pelestarian Identitas Kultural-Religius Muslim Di Myanmar', *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 2020, pp. 124–42.

[546] Thalib, 'Pendidikan Komunitas Muslim Di Myanmar', *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2019, pp. 123–39.

pendidikan yang memadai, generasi muda Muslim Myanmar sulit mendapatkan pekerjaan formal dan terjebak dalam kemiskinan struktural. Menurut studi yang dilakukan oleh Hasan (2022), pengangguran di kalangan pemuda Muslim Myanmar mencapai 70%, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok etnis lainnya. Diskriminasi dalam perekrutan, ditambah dengan rendahnya kualifikasi pendidikan, membuat komunitas Muslim semakin terpinggirkan dalam pembangunan ekonomi negara [547]

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan islam

Berbagai faktor kompleks telah membentuk dan memengaruhi formulasi serta implementasi kebijakan pendidikan Islam di Myanmar. Faktor Politik Nasionalisme Berbasis Agama. Konstruksi identitas nasional Myanmar yang erat dengan Buddhisme telah menjadikan Islam dan Muslim sebagai "the other" yang dipandang sebagai ancaman. Pendidikan menjadi arena kontestasi identitas nasional di mana kelompok mayoritas berupaya untuk mempertahankan hegemoni kulturalnya. Keamanan Nasional: Pemerintah Myanmar sering menjustifikasi pembatasan pendidikan Islam dengan alasan keamanan nasional, khususnya kekhawatiran terhadap "radikalisasi" dan separatisme. Madrasah dicurigai sebagai tempat penyebaran ideologi yang bertentangan dengan kepentingan negara. Tekanan Kelompok Nasionalis Buddha: Kelompok-kelompok seperti Ma Ba Tha (Asosiasi untuk Perlindungan Ras dan Agama) telah memainkan peran signifikan dalam mendorong kebijakan yang membatasi hak-hak Muslim, termasuk dalam bidang pendidikan, melalui kampanye publik dan lobi politik [548]

a. Faktor Sosial Budaya

Persepsi Ancaman Demografis: Narasi tentang "ledakan populasi Muslim" dan "Islamisasi" telah memengaruhi kebijakan publik terhadap komunitas Muslim. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk mengontrol pertumbuhan pengaruh Islam dalam masyarakat Myanmar. Isolasi dan Segregasi Spasial: Komunitas Muslim, terutama Rohingya, hidup dalam kondisi

[547] Hasan, 'Marginalisasi Ekonomi Minoritas Muslim Di Myanmar', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 2022, pp. 89–103.

[548] Hlaing, *Politik Burmanisasi Dan Dampaknya Terhadap Minoritas Etnis Agama Di Myanmar* (LIPI Press, 2020).

terisolasi secara geografis dan sosial, yang menyulitkan akses terhadap pendidikan umum dan memperkuat stereotip negatif. Kurangnya Interaksi Antar-komunitas: Minimnya interaksi antara Buddhist dan Muslim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan pendidikan, memperkuat ketidakpercayaan dan prasangka yang kemudian tercermin dalam kebijakan public.

b. Faktor Ekonomi

Kompetisi Sumber Daya: Keterbatasan anggaran pendidikan nasional menciptakan persaingan antar kelompok, dengan prioritas diberikan kepada mayoritas Buddha. Pendidikan Islam dipandang sebagai "beban tambahan" dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Kemiskinan Struktural: Tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan komunitas Muslim, terutama Rohingya, menyulitkan mereka untuk menuntut hak-hak pendidikan dan membayar biaya pendidikan swasta

c. Faktor Internasional

Menguatnya sentimen anti-Islam secara global pasca-9/11 memberi legitimasi tambahan bagi pembatasan terhadap pendidikan Islam di Myanmar, dengan alasan memerangi "ekstremisme". Tekanan Hak Asasi Manusia: Di sisi lain, tekanan internasional terkait hak asasi manusia dan kebebasan beragama telah mendorong beberapa konsesi terbatas dalam kebijakan pendidikan untuk minoritas, meskipun implementasinya masih minimal. Intervensi Organisasi Internasional: Peran PBB, UNICEF, dan NGO internasional dalam menyediakan pendidikan darurat bagi pengungsi Rohingya telah membantu mengurangi kesenjangan pendidikan, namun juga terkadang menimbulkan reaksi negatif dari pemerintah dan masyarakat local

E. Strategi dan Upaya Komunitas Muslim Menghadapi berbagai pembatasan dan tantangan

komunitas Muslim di Myanmar telah mengembangkan berbagai strategi adaptif untuk mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam. Berdasarkan penelitian Anwar & Hidayat (2021), beberapa strategi tersebut meliputi: sistem pendidikan berbasis komunitas yang meliputi: Tahfiz Qur'an Rumahan: Kelompok-kelompok kecil anak-anak belajar membaca

dan menghafal Al-Qur'an di rumah-rumah penduduk secara bergantian untuk menghindari perhatian otoritas.

Madrasah Berpindah (Mobile Madrasah): Guru-guru agama berpindah dari satu komunitas ke komunitas lain untuk memberikan pendidikan dasar keislaman secara periodik, terutama di daerah pedesaan dan camp pengungsi. Pendidikan Orang Tua-Anak: Orang tua Muslim dilatih untuk menjadi pendidik utama bagi anak-anak mereka, terutama dalam hal dasar-dasar keagamaan dan nilai-nilai Islam, transformasi Madrasah menjadi Sekolah Umum, Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pengetahuan umum dengan nilai-nilai Islam secara implisit, tanpa labeling keagamaan yang eksplisit, membangun kerjasama dengan institusi Buddhis moderat untuk mendapatkan perlindungan politik dan legitimasi sosial serta Pemanfaatan Teknologi dan Pendidikan Jarak Jauh yang telah membuka peluang baru bagi komunitas Muslim untuk mengakses pendidikan Islam melalui platform seperti, WhatsApp, Facebook, dan YouTube[549]

Komunitas Muslim Myanmar telah membangun jaringan transnasional untuk mendukung pendidikan mereka seperti:

a. Beasiswa Luar Negeri: Organisasi-organisasi Islam internasional menyediakan beasiswa bagi pelajar Muslim Myanmar untuk melanjutkan pendidikan di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Pakistan, dan Timur Tengah.
b. Pertukaran Guru: Program pertukaran guru agama dari negara-negara Muslim seperti Indonesia dan Malaysia untuk memberikan pelatihan singkat kepada pendidik lokal.
c. Kurikulum Adaptif: Adopsi dan adaptasi kurikulum pendidikan Islam dari negara-negara dengan sistem pendidikan Islam yang lebih mapan, seperti Al-Azhar (Mesir) dan Pondok Pesantren (Indonesia).

[549] Hidayat, A. (2021). Strategi Adaptasi Pendidikan dalam Masyarakat Minoritas. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 45-62.

Selain itu Komunitas Muslim Myanmar juga telah memperjuangkan hak Pendidikan mereka dibidang advokasi dan diplomasi melalui berbagai saluran seperti:

a. Organisasi Muslim Moderat: Kelompok seperti All Burma Muslim Union dan Islamic Religious Affairs Council melakukan dialog dengan otoritas pemerintah untuk menegaskan loyalitas komunitas Muslim kepada negara sambil memperjuangkan hak pendidikan.
b. Kerjasama dengan Organisasi Hak Asasi Manusia: Dokumentasi pelanggaran hak pendidikan dan kerjasama dengan NGO internasional untuk meningkatkan kesadaran global.
c. Diplomasi Agama: Dialog antar-iman dengan tokoh-tokoh Buddhis moderat untuk membangun pemahaman bersama dan dukungan terhadap pendidikan Islam.

Selain itu juga terdapat beberapa inisiatif Pendidikan yang dirancang khusus untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi:

a. Kurikulum Pendidikan Perdamaian: Beberapa madrasah di daerah urban telah mengembangkan modul pendidikan yang menekankan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan hidup berdampingan dalam Islam.
b. Program Pertukaran Pelajar: Inisiatif terbatas untuk memfasilitasi interaksi antara pelajar Muslim dan Buddha melalui kegiatan ekstrakurikuler bersama dan program sosial.
c. Pendidikan Kewarganegaraan Inklusif: Upaya menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan Myanmar yang inklusif sambil mempertahankan identitas keislaman, untuk mengatasi stereotip bahwa Muslim tidak loyal terhadap negara [550]

[550] Tilaar. (2020). *Pendidikan dan Kekuasaan* . Jakarta : Rineka Cipta.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam di Myanmar sejak kemerdekaan hingga saat ini cenderung restriktif dan diskriminatif, dengan intensitas yang bervariasi sesuai dinamika politik negara tersebut. Periode paling sulit adalah masa rezim militer (1962-2011) dengan kebijakan "Burmanisasi" yang secara sistematis membatasi pendidikan Islam. Transisi demokratis yang sempat terjadi (2011-2021) tidak membawa perubahan signifikan, Terdapat kesenjangan besar antara jaminan konstitusional tentang hak pendidikan dan kebebasan beragama dengan implementasi di lapangan. Berbagai peraturan tingkat rendah dan praktik diskriminatif di tingkat lokal menciptakan hambatan struktural bagi akses pendidikan Islam, terutama bagi komunitas Rohingya di Rakhine.

Kebijakan pendidikan yang restriktif telah berdampak luas pada komunitas Muslim Myanmar, meliputi rendahnya akses dan kualitas pendidikan, ancaman terhadap pelestarian identitas kultural dan keagamaan, berkurangnya kohesi sosial, serta marginalisasi ekonomi akibat keterbatasan kesempatan pendidikan. Formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan Islam di Myanmar dipengaruhi oleh faktor kompleks yang saling terkait, meliputi nasionalisme berbasis agama, persepsi ancaman demografis, kompetisi sumber daya ekonomi, serta dinamika politik domestik dan internasional.

Menghadapi berbagai pembatasan, komunitas Muslim Myanmar telah menunjukkan ketahanan (resilience) luar biasa dengan mengembangkan strategi adaptif untuk mempertahankan pendidikan Islam, termasuk pendidikan berbasis komunitas, adaptasi institusional, pemanfaatan teknologi, jaringan transnasional, serta advokasi strategis. Kebijakan pendidikan Islam di Myanmar menunjukkan kesenjangan signifikan dengan standar internasional tentang hak pendidikan dan perlindungan minoritas agama sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia yang diakui secara global.

Meskipun saat ini pendidikan menjadi arena diskriminasi, terdapat potensi untuk mentransformasikannya menjadi instrumen rekonsiliasi dan perdamaian melalui pendekatan yang inklusif, multikultur, dan berbasis hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Aung. (2020). Sejarah Perkembangan Kebijakan Pendidikan di Myanmar. *Jurnal Sejarah Pendidikan.*, 78-95.

Cheesman. (2019). Kebijakan Pendidikan dan Politik Identitas di Myanmar. *Jurnal Studi Asia Tenggara*, 112-134.

Feener, R., & Sevea. (2021). *Islam di Asia Tenggara Kontemporer*. Jakarta: LP3ES.

Hasan. (2022). Marginalisasi Ekonomi Minoritas Muslim di Myanmar. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 89-103.

Hefner. (2021). *Pendidikan Islam di Asia Tenggara.* Yogyakarta: Suara Muhamadiyah.

Hidayat, A. (2021). Strategi Adaptasi Pendidikan dalam Masyarakat Minoritas. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 45-62.

Hlaing. (2020). *Politik Burmanisasi dan Dampaknya terhadap Minoritas Etnis Agama di Myanmar*. Jakarta: LIPI Press.

Ibrahim, A. (2018). *Dilema Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Gading Publishing.

Kipgen. (2019). *Konflik Myanmar akar masalah dan Prospek Penyelesaian.* Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Rahman. (2018). *Sejarah Komunitas Muslim di Myanmar.* Jakarta: Mizan.

Rustam. (2020). Pelestarian Identitas Kultural-Religius Muslim di Myanmar. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 124-142.

Sharma. (2021). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan terhadap Minoritas di Myanmar. *Jurnal Politik ASEAN*, 45-63.

Sirait, M. &. (2019). *Etnisitas, Agama dan Konflik.* Jakarta: LIPI Press.

Taufiqurrohman. (2021). Studi Kasus Rohingyah Myanmar. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 67-85.

Thalib, I. (2019). Pendidikan Komunitas Muslim di Myanmar. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 123-139.

Thawngmung. (2019). Dilema Minoritas Muslim di Myanmar. *Jurnal Studi Perbatasan*, 145-167.

Tilaar. (2020). *Pendidikan dan Kekuasaan* . Jakarta : Rineka Cipta.

BAB 30
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA NEGARA TIMOR LESTE

(Nina Meilinda)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah kunci membangun identitas nasional dan mendorong kemajuan bangsa, termasuk menjaga nilai-nilai luhur seperti agama. Timor Leste merupakan negara yang merdeka dari Indonesia pada 2002, pendidikan disini punya peran vital dalam membangun keadilan, inklusivitas, dan keberagaman.

Sebagai negara dengan mayoritas Katolik akibat warisan kolonialisme Portugis, Timor Leste juga dihuni komunitas Muslim yang kecil namun penting. Mereka berasal dari warga lokal, migran Nusantara, hingga keturunan campuran. Dalam semangat demokrasi dan hak asasi manusia, kebutuhan akan pendidikan Islam menjadi bagian yang harus diperhatikan.

Meski pemerintah berusaha membuat pendidikan lebih inklusif, pendidikan Islam masih menghadapi banyak tantangan dari minimnya sekolah Islam, kekurangan guru agama, keterbatasan dana, hingga adanya bias budaya yang lebih mengutamakan pendidikan Katolik. Situasi sosial-politik pasca konflik juga memperumit upaya ini.

Pendidikan Islam di Timor Leste menyentuh isu sensitif antaragama. Komunitas Muslim berjuang menyediakan pendidikan agama sambil menjaga harmoni sosial. Perjuangan ini tidak mudah dan butuh pendekatan cermat.

Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana kebijakan pendidikan Islam dirancang dan dijalankan di Timor Leste, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta menggali peran berbagai pihak. Hasilnya diharapkan memberi rekomendasi untuk mendorong pendidikan yang lebih adil bagi semua agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik mengenai studi minoritas Muslim di negara-negara berpenduduk mayoritas non-Muslim, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang multikultural dan multireligius.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimanakah sejarah negara Timor Leste?
b. Bagaimanakah sejarah masuknya Islam ke Timor Leste?
c. Bagaimana sistem pendidikan di Timor Leste?
d. Bagaiamanakah perkembangan pendidikan Islam di Timor Leste?
e. Apa sajakah kebijakan pendidikan Islam di Timor Leste?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Timor Leste dari berbagai perspektif, termasuk kebijakan pemerintah, implementasi di lapangan, dan peran masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi kebijakan pendidikan Islam di negara tersebut. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan realitas sosial dan kebijakan pendidikan secara kontekstual berdasarkan data yang tersedia, tanpa melakukan intervensi langsung.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka atau studi literatur (*library research*), yang mengandalkan data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah Timor Leste, seperti undang-undang, kebijakan pendidikan nasional, serta dokumen kebijakan agama yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Selain itu, data juga diperoleh dari laporan lembaga swadaya masyarakat, artikel ilmiah, buku-buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkum dan menginterpretasikan berbagai perspektif tentang pendidikan Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni dengan menghimpun dan mengkaji berbagai dokumen yang berisi informasi mengenai kebijakan pendidikan Islam di Timor Leste. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses analisis ini mencakup beberapa tahapan, yaitu reduksi data sebagai langkah awal untuk memilih dan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama yang

selaras dengan rumusan masalah, serta penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memahami keberadaan serta dinamika kebijakan pendidikan Islam di Timor Leste, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dan prospek pengembangannya di masa depan.

TEORI

Pendidikan Islam di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim, seperti Timor Leste, tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk mencerdaskan generasi muda, tetapi juga untuk memperkuat identitas keagamaan dan moral.[551] Kebijakan pendidikan Islam di Timor Leste dipengaruhi oleh peran negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam di Timor Leste berfungsi untuk mempertahankan stabilitas sosial dan budaya dengan menanamkan nilai-nilai keislaman yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Di Timor Leste, kebijakan pendidikan Islam diharapkan dapat menjembatani kebutuhan akan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam serta mendorong pembentukan masyarakat yang harmonis, berakhlak mulia, dan mampu mengembangkan potensi diri sesuai dengan tuntunan agama.[552] Sejalan dengan pandangan Abdurrahman An-Nahlawi dan Ahmad Tafsir, pendidikan Islam di negara ini juga memfokuskan pada pembentukan insan kamil, yang seimbang dalam aspek jasmani, rohani, dan intelektual. Sebagai hasilnya, kebijakan pendidikan Islam di Timor Leste tidak hanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang terdidik, tetapi juga berakhlak mulia dan sesuai dengan ajaran agama Islam.[553]

PEMBAHASAN

A. Sejarah Negara Timor Leste

Pada abad ke-16, bangsa Portugis datang ke bagian timur Pulau Timor dan mulai mendirikan koloni. Orang-orang Portugis juga

[551] Sutan Nasution, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

[552] H. A. R. Tilaar, *Pendidikan: Sebuah Profesi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

[553] Abdurrahman An-Nahlawi dan Ahmad Tafsir, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1992).

memulai aktivitas perdagangan dan menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah jajahan mereka di pertengahan abad itu. Penjajahan Portugis berlangsung lebih dari 400 tahun, menjadikan Timor Timur sebagai salah satu koloni terlama di dunia. Kolonialisasi ini menjadikan Timor Timur bagian dari jaringan dagang rempah-rempah Portugis di Asia Tenggara. Pemerintah kolonial memperkenalkan agama Katolik Roma yang kemudian menjadi bagian penting dari identitas nasional rakyat Timor Leste.[554]

Pada saat yang sama, Belanda mulai memperluas pengaruhnya di bagian barat Pulau Timor, yang kemudian berhasil dikuasainya pada tahun 1613. Inggris sempat menguasai Timor selama periode singkat antara tahun 1812 hingga 1815, namun kembali meninggalkannya seiring pemulihan dominasi Belanda. Setelah mengalami berbagai ketegangan dan konflik mengenai batas wilayah, Belanda dan Portugis akhirnya menandatangani Perjanjian Lisboa (Lisbon) pada tahun 1859. Perjanjian ini secara resmi membagi Pulau Timor menjadi dua wilayah pengaruh: bagian timur di bawah kekuasaan Portugal, dan bagian barat dikuasai Belanda. Meskipun secara administratif dibagi, perbedaan sistem kolonial dan budaya di kedua wilayah tersebut kemudian berkontribusi terhadap identitas nasional yang berbeda dalam jangka panjang. [555]

Situasi Timor Timur semakin kompleks selama Perang Dunia II, ketika wilayah ini sempat diduduki oleh tentara Kekaisaran Jepang. Setelah perang berakhir, Portugal kembali menguasai Timor Timur, namun kondisi internal negaranya terguncang akibat Revolusi Bunga yang terjadi pada April 1974. Kudeta oleh kelompok militer berhaluan kiri di Lisbon menyebabkan Portugal melemah dan akhirnya menarik aparat pemerintahan dan militernya dari koloni-koloninya, termasuk Timor Timur. Dalam kekosongan kekuasaan yang terjadi, beberapa partai politik lokal bermunculan, termasuk UDT (*União Democrática Timorense*) dan Fretilin (*Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente*). Ketegangan antara kelompok-kelompok ini memuncak dalam bentuk konflik bersenjata dan kudeta internal. Akhirnya, pada 28 November 1975, Fretilin

[554] M. Aditiya Mahendra, dkk, Kemerdekaan Timor Portugis sebagai The New World Order Portugal, *Al Ma'arief: Jurnal Sosial dan Budaya*, 4 (1), 2022.

[555] Jhon G Taylor, *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor*. (London: Zed Books, 1991).

secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur, yang kemudian memicu intervensi militer Indonesia.[556]

Tidak lama setelah Portugal mulai menarik diri dari Timor Timur, situasi politik di wilayah tersebut menjadi tidak stabil. Ketegangan di antara kelompok-kelompok lokal yang berbeda seperti FRETILIN, UDT, dan APODETI semakin meningkat. Dalam konteks ketidakpastian ini, pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan serangan militer besar-besaran yang diberi nama "Operasi Seroja" (Seroja: Serangan Operasi Jayakarta). Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara, yang kala itu dianggap sebagai ancaman oleh pemerintahan Orde Baru. Namun, banyak pengamat dan peneliti menilai bahwa tindakan tersebut lebih merupakan upaya perluasan wilayah dan penguatan kontrol strategis Indonesia di kawasan tersebut.

Setelah pendudukan militer yang intensif dan berbagai upaya integrasi, pada 17 Juli 1976 pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa Timor Timur telah menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Meskipun demikian, pengakuan internasional atas klaim ini sangat terbatas. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan banyak negara anggota lainnya menolak mengakui integrasi tersebut, dan tetap menganggap Portugal sebagai kekuatan administrasi sah atas Timor Timur. Selama masa pendudukan yang berlangsung lebih dari dua dekade, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual, serta pembantaian terhadap warga sipil. Laporan dari Komnas HAM dan beberapa LSM seperti KontraS menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia di wilayah tersebut menyebabkan trauma berkepanjangan bagi masyarakat lokal dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi mereka.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, kepemimpinan nasional Indonesia berada di bawah Presiden B.J. Habibie. Dalam rangka menjawab desakan masyarakat internasional dan tekanan dari dalam negeri terkait status Timor Timur, Presiden Habibie pada awal tahun 1999 mengumumkan bahwa rakyat Timor

[556] James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, (NSW: Longueville Books, 2003).

Timur akan diberikan pilihan melalui sebuah referendum. Referendum ini memberi dua opsi: menerima status otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau memilih untuk merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Proses ini merupakan bagian dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Referendum yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 menghasilkan keputusan yang cukup mengejutkan: sekitar 78,5 persen pemilih menolak tawaran otonomi dan lebih memilih kemerdekaan.

Pasca pengumuman hasil tersebut, situasi di Timor Timur berubah menjadi kacau. Kelompok milisi pro-integrasi yang menolak hasil referendum dan diduga kuat memiliki hubungan dengan unsur militer Indonesia melakukan aksi kekerasan masif. Dalam kurun waktu antara referendum hingga kedatangan pasukan perdamaian internasional (INTERFET) pada akhir September 1999, terjadi pembunuhan, pembakaran massal, dan pengungsian besar-besaran. Diperkirakan sekitar 1.400 orang tewas dan lebih dari 300.000 warga sipil mengungsi ke wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Timor Barat. Infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, irigasi, dan sistem distribusi air mengalami kerusakan parah atau dihancurkan secara sistematis. Laporan lain menyebutkan bahwa lebih dari 70 persen bangunan di Dili dan sekitarnya mengalami kerusakan berat atau hancur total akibat konflik ini.[557]

Pada 20 September 1999, PBB mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang diberi nama *Force for East Timor* (INTERFET) yang dipimpin Australia untuk mengamankan situasi. Setelah itu, PBB mendirikan UNTAET (Administrasi Transisional PBB di Timor Timur) untuk mengelola masa transisi hingga negara ini siap merdeka secara penuh. Pada 20 Mei 2002, Timor Leste resmi merdeka dan Kay Rala Xanana Gusmão dilantik sebagai presiden pertama, dan penduduk berjumlah 978.590 jiwa pada tahun 2006, dengan luas wilayah sekitar 14.609.375 km². Timor Leste kemudian bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membangun hubungan diplomatik dengan banyak negara. Meski

[557] Geoffrey Robinson, *Timor timur 1999 Kejahatan Terhadap Umat Manusia*, (Dili&Jakarta: Perkumpulan Hak&Elsam, 2003).

menghadapi tantangan besar seperti instabilitas politik, pengangguran, dan ketergantungan ekonomi terhadap minyak bumi, Timor Leste berupaya membangun pemerintahan yang demokratis dan stabil.[558]

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 2002, pemerintah Timor Leste secara bertahap berusaha memutus seluruh bentuk keterkaitan politik, ekonomi, dan budaya dengan Indonesia, sebagai bekas negara integrasinya. Salah satu langkah awal yang cukup signifikan adalah penetapan Bahasa Portugis sebagai bahasa resmi negara, menggantikan Bahasa Indonesia yang sebelumnya digunakan secara luas di berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama pendidikan dan administrasi pemerintahan. Pemilihan Bahasa Portugis tidak hanya bermakna simbolik sebagai upaya rekonstruksi identitas nasional, tetapi juga mencerminkan kedekatan historis dengan kolonialisme Portugis yang berlangsung selama lebih dari 400 tahun.[559] Selain itu, pemerintah Timor Leste juga mengganti nama resmi negara dari "Timor Timur" menjadi "Republik Demokratik Timor Leste" untuk menegaskan eksistensinya sebagai negara berdaulat yang merdeka sepenuhnya dari pengaruh Indonesia.

Sebagai bentuk terima kasih terhadap dukungan Australia dalam proses referendum dan pasca-kemerdekaan, pemerintah Timor Leste menjalin kerja sama erat dengan Australia, termasuk dalam sektor ekonomi. Salah satu bentuk konkritnya adalah kebijakan untuk mengimpor berbagai kebutuhan pokok dari Australia, yang sayangnya mengakibatkan harga barang-barang kebutuhan hidup menjadi sangat mahal bagi sebagian besar rakyat Timor Leste. Di sisi lain, pemerintah juga mengambil langkah kontroversial dengan mengadopsi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi, yang meskipun stabil, justru menambah kesulitan ekonomi masyarakat karena tidak disertai dengan peningkatan daya beli yang memadai. Akibatnya, dalam tahun-tahun awal kemerdekaannya, Timor Leste menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang cukup berat, terutama tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.[560] Situasi ini

[558] A.B Lapian, dan JR Chaniago, *Timor Timur dalam Gerak Pembangunan*, (Jakarta: Dekdikbud, 1988).

[559] S Andoko, Politik Bahasa di Negara Baru: Studi tentang Perubahan Bahasa Resmi di Timor Leste. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1), 2012.

[560] I Yulianto, Dilema Pembangunan Ekonomi Timor Leste Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), 2015.

menunjukkan bahwa meskipun secara politik berhasil meraih kemerdekaan, secara ekonomi negara ini masih mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar.

Dari penjelasan tersebut dapat di analisis, bahwa Timor Leste memiliki sejarah panjang perjuangan dan ketahanan. Setelah lebih dari empat abad dijajah Portugis dan sempat diduduki Jepang saat Perang Dunia II, wilayah ini dianeksasi Indonesia pada 1976, memicu periode penuh pelanggaran hak asasi manusia. Harapan muncul usai jatuhnya Orde Baru, ketika rakyat Timor Leste memilih merdeka lewat referendum PBB. Meski sempat dilanda kekerasan, Timor Leste akhirnya merdeka pada 20 Mei 2002. Sejak itu, negara ini terus berjuang membangun demokrasi, mengatasi ketidakstabilan, pengangguran, dan ketergantungan ekonomi, sambil memperkuat identitas nasionalnya.

B. Sejarah Masuknya Islam Ke Timor Leste

Masuknya Islam ke Timor Leste merupakan bagian dari dinamika penyebaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara yang tidak lepas dari peran penting para pedagang dan pelaut Muslim. Sejak abad ke-15, para pedagang Arab dari Hadramaut serta pelaut dari Kesultanan Gowa dan Ternate aktif menjelajahi kawasan timur Nusantara hingga mencapai pulau Timor. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. Menurut Ambarak A. Bazher dalam bukunya Islam di Timor Timur (1995), jejak-jejak Islam sudah tampak di Dili jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1512.[561] Salah satu tokoh lokal yang menyambut hangat kedatangan mereka adalah Abdullah Afif, yang diyakini telah memeluk Islam dan menjadi pemimpin komunitas Muslim awal di wilayah tersebut.[562] Hal ini menandakan bahwa penyebaran Islam di Timor Leste berlangsung melalui pendekatan damai dan asimilatif, yang banyak dipengaruhi oleh jaringan perdagangan dan kekerabatan antarkepulauan.

[561] Ambarak A. Bazher, Islam di Timor-Timur, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

[562] Geoffrey C. Gunn, 500 Tahun Timor Lorosae, (Yogyakarta: INSIST Press, 2005).

Keterangan lebih lanjut mengenai keberadaan Islam pra-Portugis di Timor Leste juga diperkuat oleh catatan-catatan lisan masyarakat lokal dan sejumlah artefak sejarah yang ditemukan di kawasan pesisir. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PSTTI-UI), ditemukan bahwa nilai-nilai Islam telah terinternalisasi dalam beberapa praktik budaya lokal, seperti tradisi menyambut tamu dan penghormatan terhadap ulama. Bahkan, beberapa wilayah di pesisir selatan dan timur Timor Leste menunjukkan pengaruh kosakata Arab dalam dialek setempat, yang menjadi indikasi adanya interaksi lama dengan komunitas Muslim. Hal ini menguatkan argumen bahwa Islam bukan sekadar agama pendatang belaka, tetapi pernah menjadi bagian dari struktur sosial dan spiritual masyarakat Timor sebelum kedatangan bangsa Eropa.[563]

Namun, kedatangan bangsa Portugis dengan misi kolonial dan penyebaran agama Katolik membawa perubahan besar terhadap tatanan keagamaan di Timor Leste. Melalui kebijakan kristenisasi dan represi terhadap keyakinan non-Katolik, komunitas Muslim mengalami tekanan yang signifikan, baik secara sosial maupun politik. Meski demikian, Islam tidak sepenuhnya lenyap dari wilayah ini. Komunitas Muslim tetap bertahan, khususnya di kawasan urban seperti Dili, di mana mereka terus mempertahankan identitas keagamaannya. Salah satu simbol keberlangsungan Islam di Timor Leste adalah berdirinya Masjid An-Nur pada tahun 1955, yang hingga kini menjadi pusat kegiatan keagamaan umat Islam. Masjid ini juga menjadi penanda penting bahwa meskipun minoritas, umat Muslim tetap memiliki peran dalam sejarah dan kehidupan sosial di Timor Leste.

Meskipun Islam menjadi agama minoritas di Timor Leste, keberadaannya tetap diakui oleh pemerintah dan masyarakat luas. Komunitas Muslim, yang sebagian besar berasal dari keturunan Bugis, Arab, dan Melayu, memainkan peranan dalam bidang perdagangan dan jasa. Mereka juga turut serta dalam membangun jembatan dialog antaragama di tengah masyarakat yang plural. Lembaga-lembaga Islam seperti Majelis Ulama Timor Leste (MUTL) bekerja sama dengan organisasi dari Indonesia seperti

[563] M. Abror Rosyidin, https://tebuireng.online/cahaya-islam-di-timor-leste/, (di akses tanggal 28 April 2025, jam 16.00).

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah Islam yang moderat. Kementerian Luar Negeri RI bahkan mencatat bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Timor Leste turut memperkuat posisi komunitas Muslim dalam bidang pendidikan dan sosial-budaya (Kemenlu RI, 2021). Hal ini menjadi bukti bahwa warisan sejarah Islam di Timor Leste tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang seiring zaman.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam ke Timor Leste merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan politik, dengan sebagian besar sumber sepakat bahwa Islam tiba melalui jalur perdagangan maritim, meskipun terdapat beragam teori mengenai waktu dan pelaku utamanya. Kehadiran Islam di Timor Leste diyakini terjadi sebelum kedatangan bangsa Eropa, dibawa oleh para pedagang Arab dari Hadramaut dan pelaut dari Kesultanan Gowa, yang kemudian dihadapkan pada tantangan besar akibat dominasi Portugis dan penyebaran Katolik. Meskipun menjadi minoritas, komunitas Muslim tetap bertahan dan menunjukkan eksistensinya, yang dibuktikan dengan pembangunan masjid serta penguatan tradisi keagamaan di Dili dan sekitarnya.

C. Sistem Pendidikan di Timor Leste

Di Timor Leste, pendidikan tercantum dengan jelas dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Pasal 59 ayat 3 bahwa "Negara akan mengakui dan mengawasi pendidikan swasta dan pendidikan bersama". Selanjutnya, Pendidikan Nasional juga dengan tegas dijelaskan dalam buku Rencana Pembangunan Nasional (RPN) bahwa pada tahun 2020 diharapkan di masa depan, masyarakat Timor Leste akan memiliki tingkat pendidikan yang memadai, kesehatan yang baik, produktivitas tinggi, serta sikap yang demokratis dan mandiri. Selain itu, mereka diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai nasionalisme, mengedepankan prinsip non-diskriminasi, dan kesetaraan dalam konteks global.[564]

Secara struktural, sistem pendidikan di Timor Leste terbagi menjadi dua tingkat utama, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan

[564] Elis Tuti Winaningsih, dkk, Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Timor Leste, *Jurnal Kajian Pendidikan dan Inovasi*, 5(2), 2022.

tinggi. Pendidikan dasar meliputi tiga tahapan: Pendidikan Anak Usia Dini (*Pre-Escolar*), Pendidikan Dasar (*Ensino Básico*), dan Pendidikan Menengah (*Ensino Secundário*).[565]

Dalam implementasinya, pendidikan di Timor Leste dikelola oleh dua sektor, yaitu sektor publik yang diatur pemerintah, dan sektor swasta yang sebagian besar dikelola oleh institusi keagamaan, terutama Gereja Katolik. Pemerintah tetap berperan mengawasi dan memastikan bahwa semua lembaga menggunakan standar kurikulum nasional yang ditetapkan oleh *Ministry of Education, Youth and Sport* (MEJD).

Perkembangan pendidikan tinggi di Timor Leste juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Menurut data UniRank 2020, Timor Leste memiliki beberapa institusi unggulan, antara lain: Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) pada tahun 2000 sebagai universitas negeri pertama. Kemudian muncul Instituto Superior Cristal (ISC) pada tahun 2001 dan Institut Bisnis Timor Lorosa'e (IBTL) pada 2002. Selain itu, sejumlah universitas swasta juga turut berkontribusi, seperti Universidade de Díli (UNDIL), Universidade Oriental Timor Lorosa'e (UNITAL), Universidade da Paz (UNPAZ), dan Instituto Teknologi Dili (ITD), yang semuanya secara kolektif memperkuat sistem pendidikan tinggi di negara tersebut.

Hal ini merupakan kemajuan signifikan, mengingat pada masa integrasi dengan Indonesia, Timor Leste, selain memiliki satu universitas negeri (UNTIM), juga memiliki sejumlah sekolah tinggi.[566] Sejak merdeka tahun 2002, perkembangan pendidikan tinggi berjalan pesat, walaupun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang masih menjadi hambatan.

Namun, tantangan besar tetap ada, terutama di daerah-daerah terpencil seperti keterbatasan ekonomi, minimnya infrastruktur pendidikan, dan rendahnya kualitas guru masih menjadi hambatan utama. Banyak anak-anak di daerah ini harus meninggalkan

---

[565] Habelar Informasaun, https://habelarinformasaun.wordpress.com/2018/06/24/sistem-pendidikan-timor-leste/, diakses tanggal 29 April 2025, jam 23.00.

[566] Ferdinan Sihombing, *Perkembangan Pendidikan di Negara Bekas Koloni: Studi Kasus Timor Leste*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020).

pendidikan formal karena kondisi keluarga dan kesulitan akses ke sekolah.

Dapat di analisis bahwa sistem pendidikan di Timor Leste telah mengalami kemajuan signifikan pasca-kemerdekaan, ditandai dengan hadirnya berbagai institusi pendidikan tinggi dan penguatan regulasi pendidikan dalam konstitusi serta rencana pembangunan nasional. Pemerintah bersama sektor swasta, terutama lembaga keagamaan, memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan. Namun, tantangan masih terlihat jelas, terutama dalam hal keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan di daerah terpencil, serta kualitas tenaga pendidik yang belum merata. Oleh karena itu, meskipun fondasi sistem pendidikan sudah terbentuk dengan baik, diperlukan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Timor Leste.

D. Perkembangan Pendidikan Islam di Timor Leste

Islam di Timor Leste memiliki sejarah panjang, meskipun jumlah pemeluknya kini merupakan minoritas, tetap menunjukkan vitalitasnya, khususnya melalui masjid dan lembaga pendidikan berbasis agama. Salah satu tonggak sejarah penting adalah pembangunan Masjid An-Nur di Dili pada tahun 1955. Inisiatif ini dipelopori oleh Imam Haji Hasan bin Abdullah Balatif dan masyarakat Muslim Kampung Alor, Dili, dengan dukungan komunitas Arab lokal dan mengalami renovasi besar pada tahun 1981 oleh Mayjen Dading Kalbuadi. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk salat, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran Islam, termasuk madrasah diniyah.[567]

Masjid An-Nur bukan sekadar tempat ibadah, melainkan juga berfungsi sebagai pusat pendidikan agama Islam melalui pendirian Madrasah Diniyah An-Nur. Madrasah ini mulai berkembang pada tahun 1977–1979 dan menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam di Dili hingga masa kemerdekaan. Dengan minimnya sumber daya, madrasah ini berhasil bertahan dan terus mencetak generasi

[567] Budi Nugroho, *Jejak Islam di Timor Leste: Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Muslim di tengah dominasi Katolik yang kuat. Banyak para pengajar mayoritas berasal dari Indonesia, khususnya dari Aceh dan Sulawesi Utara. [568]

Meski demikian, tingkat literasi keagamaan umat Islam di Timor Leste masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan belum adanya sekolah Islam formal yang berdiri kokoh di Timor Leste. Anak-anak Muslim banyak yang hanya belajar agama di masjid atau lembaga informal lainnya. Rendahnya pemahaman dasar agama di kalangan Muslim Timor Leste menjadi perhatian utama, sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, *Centro da Comunidade Islamica de Timor Leste* (CENCISTIL) dibentuk pada tahun 2000. Dalam bahasa Indonesianya adalah Pusat Komunitas Islam Timor-Leste. Organisasi ini berfungsi sebagai representasi komunitas Muslim dalam berdialog dengan pemerintah serta sebagai pusat kegiatan dakwah dan sosial umat Islam di Timor Leste. Salah satu upaya penting CENCISTIL adalah mendatangkan dai dari luar negeri untuk memperkuat pendidikan agama Islam. Melalui CENCISTIL, umat Islam terus berupaya mengembangkan dakwah, membina mualaf, dan mengadakan berbagai kegiatan sosial dan pendidikan.

Dapat disimpulkan perkembangan pendidikan Islam di Timor Leste menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh tantangan, terutama mengingat posisi umat Islam sebagai minoritas di tengah dominasi Katolik. Meskipun terbatas dalam jumlah dan sumber daya, komunitas Muslim tetap menunjukkan semangat tinggi dalam mempertahankan dan mengembangkan pendidikan Islam, seperti melalui Masjid An-Nur yang juga berfungsi sebagai pusat madrasah *diniyah*, serta peran signifikan organisasi seperti CENCISTIL yang menjembatani kepentingan umat Islam dengan pemerintah dan mendukung kegiatan dakwah dan pendidikan. Kendati demikian, rendahnya literasi keagamaan dan ketiadaan lembaga pendidikan Islam formal yang kuat menunjukkan perlunya strategi yang lebih sistematis dan dukungan berkelanjutan untuk memperkuat fondasi keagamaan umat Islam di Timor Leste.

[568] Amat Triatna, *Masjid An-Nur Dili: Simbol Islam di Timor Leste*, (Jakarta: BIPA-Kemdikbud, 2020).

E. Kebijakan Pendidikan Islam di Timor Leste

Kebijakan pendidikan Islam di Timor Leste masih dalam tahap perkembangan, fokus pada meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Islam, dengan mendukung pendirian sekolah-sekolah Islam secara sistemik di negara tersebut, serta memastikan akses yang adil bagi semua warga negara, termasuk umat Muslim.

Negara ini mengadopsi sistem pemerintahan sekuler, di mana prinsip pemisahan antara agama dan negara ditegakkan secara formal. Dalam konteks pendidikan, kebijakan pendidikan nasional lebih berfokus pada pencapaian standar akademik secara umum tanpa membedakan agama atau kepercayaan. Namun, meskipun negara ini bersifat sekuler, dalam praktiknya, institusi-institusi keagamaan tetap diberikan ruang untuk berkembang, termasuk dalam aspek administratif yang melibatkan kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam urusan administrasi sipil seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pernikahan, dan proses keagamaan lainnya, agama tetap memiliki pengaruh dan dihormati. Proses ini memungkinkan warga negara untuk menyatakan afiliasi agama mereka secara resmi, yang seringkali juga menjadi bagian penting dalam identitas mereka.[569]

Meskipun tidak ada kebijakan yang secara langsung mendukung pendirian sekolah-sekolah Islam, CENCISTIL berupaya mengisi kekosongan ini dengan membangun lembaga pendidikan non-formal berbasis Islam, termasuk rencana pendirian *Jamiah Islamiyah* Timor Leste, yang diharapkan menjadi pondasi pendidikan Islam formal di masa depan. Sekolah-sekolah ini lebih bersifat pribadi atau berbasis komunitas, dan tidak mendapat dukungan penuh atau pengaturan khusus dari pemerintah. Di beberapa daerah, terdapat upaya-upaya dari masyarakat Muslim setempat untuk mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah Islam, meskipun tantangan dalam hal pendanaan dan pengakuan resmi dari pemerintah masih menjadi kendala utama.[570]

Keterbatasan kebijakan ini juga mencerminkan sifat pluralistik dari masyarakat Timor Leste, di mana mayoritas penduduk

[569] Arif Abdullah Sagran, Geliat Dakwah Islam di Timor Leste, (Jakarta: MINA Publisher, 2025). https://minanews.net/geliat-dakwah-di-timor-leste/, diakses 30 April 2025, jam 12.17.

[570] Mita Ayu Anggraini, Sejarah Perkembangan Islam Timor Leste Pasca Merdeka. *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2024.

menganut agama Katolik, dan negara lebih memilih untuk mempertahankan sistem yang memungkinkan keberagaman agama tetap dihormati tanpa memberikan prioritas khusus pada salah satunya. Sebagai akibatnya, kebijakan pendidikan di Timor Leste berfokus pada pemenuhan kebutuhan umum masyarakat tanpa memihak pada kelompok agama tertentu, meskipun ruang untuk keberagaman agama tetap ada dalam batas-batas yang diatur oleh negara. Dalam wawancara eksklusif, Arif Abdullah Sagran menegaskan bahwa harmoni antar agama di Timor Leste sangat baik, namun internal umat Islam sendiri yang perlu diperkuat, baik dalam aspek dakwah maupun pengembangan pendidikan.[571]

Meskipun Islam merupakan agama minoritas di Timor Leste, semangat dakwah dan pendidikan Islam tetap hidup. Dengan semangat komunitas dan inisiatif sosial-keagamaan, dakwah Islam terus dilakukan, termasuk melalui kegiatan sosial, pendidikan nonformal, serta pembinaan mualaf. Pendirian masjid, madrasah diniyah, serta pembentukan organisasi seperti CENCISTIL menunjukkan bahwa umat Islam di Timor Leste berjuang mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman. Dukungan dari komunitas internasional, terutama dari Indonesia, diharapkan dapat memperkuat pembangunan pendidikan Islam di negara ini.

Berdasarkan penjelasan diatas analisis tentang kebijakan pendidikan Islam di Timor Leste masih berada pada tahap perkembangan dengan tantangan utama terkait kuantitas dan kualitas pendidikan Islam yang terbatas. Meskipun negara ini menganut sistem pemerintahan sekuler, ruang untuk keberagaman agama tetap dihormati, meskipun tidak ada kebijakan resmi yang mendukung pendirian sekolah-sekolah Islam. Inisiatif masyarakat dan lembaga non-formal seperti CENCISTIL menjadi kunci dalam mengisi kekosongan tersebut. Meskipun menghadapi kendala dalam pendanaan dan pengakuan resmi, semangat dakwah dan pendidikan Islam tetap berkembang, didorong oleh komunitas lokal dan dukungan internasional, terutama dari Indonesia. Keberagaman agama tetap dihormati, tetapi pendidikan Islam tetap membutuhkan

[571] *Arif Abdullah Sagran, Geliat Dakwah Islam di Timor Leste, (Jakarta: MINA Publisher, 2025). https://minanews.net/geliat-dakwah-di-timor-leste/, diakses 30 April 2025, jam 12.17.*

perhatian lebih agar dapat berkembang secara sistemik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Muslim di Timor Leste.

KESIMPULAN

Berdasarkan sejarah panjangnya, dapat disimpulkan Pulau Timor, khususnya Timor Leste, memiliki sejarah yang sangat kompleks, dimulai dengan penjajahan Portugis selama lebih dari 400 tahun, diikuti oleh pendudukan Jepang pada Perang Dunia II, dan aneksasi oleh Indonesia pada 1976, yang penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia. Setelah runtuhnya Orde Baru, rakyat Timor Leste memilih jalur kemerdekaan melalui referendum yang diawasi oleh PBB. Meskipun pasca-referendum terjadi kekerasan hebat, pada akhirnya Timor Leste meraih kemerdekaan pada 20 Mei 2002, dan mulai membangun negara demokratis meskipun menghadapi berbagai tantangan serius seperti ketidakstabilan politik, tingginya tingkat pengangguran, dan ketergantungan ekonomi. Semua ini terjadi di tengah upaya mereka untuk membangun identitas nasional yang terpisah dari pengaruh Indonesia.

Islam pertama kali masuk ke Timor Leste melalui jalur perdagangan maritim, dibawa oleh pedagang Arab dari Hadramaut dan pelaut dari Kesultanan Gowa, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Meskipun tantangan besar datang dari dominasi Portugis dan penyebaran agama Katolik, komunitas Muslim di Timor Leste tetap bertahan. Mereka membangun masjid, seperti Masjid An-Nur di Dili pada tahun 1955, yang menjadi pusat pendidikan agama Islam, serta menjaga tradisi keagamaan mereka di sekitar wilayah tersebut.

Sejak kemerdekaan, sistem pendidikan di Timor Leste menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga swasta, terutama di bidang pendidikan tinggi. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses terbatas di daerah terpencil, serta kualitas tenaga pendidik masih menjadi hambatan besar yang harus dihadapi untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Perkembangan pendidikan Islam di Timor Leste pun menunjukkan perjuangan luar biasa, mengingat umat Islam merupakan kelompok minoritas. Sejak berdirinya Madrasah Diniyah An-Nur, pendidikan agama Islam terus berkembang meskipun literasi

keagamaan masih rendah karena terbatasnya lembaga pendidikan Islam formal. Upaya melalui organisasi seperti CENCISTIL sejak tahun 2000 telah berperan dalam meningkatkan dakwah dan pendidikan agama Islam di Timor Leste. Dalam konteks ini, peran masjid, madrasah, dan organisasi komunitas Islam sangat penting untuk memastikan pendidikan dan pemberdayaan umat Islam tetap berlanjut, meskipun negara ini mayoritas Katolik.

Kebijakan pendidikan Islam di Timor Leste terus berkembang meskipun terbatasnya jumlah sekolah Islam dan dana. Negara ini tetap menghormati keberagaman agama meskipun bersifat sekuler. Inisiatif dari masyarakat, termasuk CENCISTIL, menjadi kunci dalam pengembangan pendidikan Islam non-formal. Dukungan internasional, khususnya dari Indonesia, diharapkan dapat memperkuat pengembangan pendidikan Islam di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andoko, S. (2012). Politik Bahasa di Negara Baru: Studi tentang Perubahan Bahasa Resmi di Timor Leste. . *Jurnal Sosial Humaniora, 5(1)* .

Anggraini, M. A. (2024). Sejarah Perkembangan Islam Timor Leste Pasca Merdeka. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.

An-Nahlawi, A. d. (1992). *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Bazher, A. A. (1995). *Islam di Timor-Timur*. Jakarta: Gema Insani Press.

Dunn, J. (2003). *East Timor: A Rough Passage to Independence*. NSW: Longueville Books.

Gunn, G. C. (2005). *500 Tahun Timor Lorosae*. Yogyakarta: INSIST Press.

Informasaun, H. (n.d.). Retrieved from HYPERLINK "https://habelarinformasaun.wordpress.com/2018/06/24/sistem-pendidikan-timor-leste/" https://habelarinformasaun.wordpress.com/2018/06/24/sistem-pendidikan-timor-leste/ , diakses tanggal 29 April 2025, jam 23.00.

Jhon G Taylor. (1991). *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor*. London: Zed Books.

Lapian, A. d. (1988). *Timor Timur dalam Gerak Pembangunan.* Jakarta: Dekdikbud.

Mahendra, M. A. (2022). Kemerdekaan Timor Portugis sebagai The New World Order Portugal. *Al Ma'arief: Jurnal Sosial dan Budaya, 4 (1).*

Nasution, S. (2000). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, B. (2012). *Jejak Islam di Timor Leste: Sejarah dan Perkembangannya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Robinson, G. (2003). *Timor timur 1999 Kejahatan Terhadap Umat Manusia* . Dili&Jakarta: Perkumpulan Hak&Elsam.

Rosyidin, M. A. (n.d.). . Retrieved from HYPERLINK "https://tebuireng.online/cahaya-islam-di-timor-leste/" https://tebuireng.online/cahaya-islam-di-timor-leste/ , (di akses tanggal 28 April 2025, jam 16.00).

Sagran, A. A. (2025). *Geliat Dakwah Islam di Timor Leste.* Jakarta : MINA News Net.

Sihombing, F. (2020). *Perkembangan Pendidikan di Negara Bekas Koloni: Studi Kasus Timor Leste.* Bandung: Pustaka Setia.

Taylor, J. G. (1999). *East Timor: The Price of Freedom.* London: Zed Books.

Tilaar, H. A. (2002). *Pendidikan: Sebuah Profesi dan Perubahan Sosial.* Jakarta: Rineka Cipta.

Triatna, A. (2020). *Masjid An-Nur Dili: Simbol Islam di Timor Leste.* Jakarta: BIPA-Kemdikbud.

Winaningsih, E. T. (2022). Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Timor Leste. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Inovasi, 5(2).*

Yulianto, I. (2015). Dilema Pembangunan Ekonomi Timor Leste Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19(2).*